RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2027

Penguatan Pondasi Transformasi Ekonomi dan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Inklusif, dan Berkelanjutan



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 14 TAHUN 2026

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6976);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
5. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Padang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2024 Nomor 11);
6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Tahun 2015-2029 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2025 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 152);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Padang.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2027 adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
8. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokanbatas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.

Pasal 2

RKPD tahun 2027 dijadikan sebagai:

a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah; dan
b. pedoman penyusunan Rancangan KUA serta Rancangan PPAS.

Pasal 3

(1) RKPD disusun dengan sistematika yang terdiri atas :
   a. bab I memuat pendahuluan;
   b. bab II memuat gambaran umum kondisi Daerah;
   c. bab III memuat kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
   d. bab IV memuat sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
   e. bab V memuat rencana kerja dan pendanaan Daerah;
   f. bab VI memuat kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
   g. bab VII memuat penutup.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

(1) Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RKPD Tahun 2027.
(2) Pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan RKPD Tahun 2027;
    b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Tahun 2027; dan
    c. evaluasi terhadap hasil RKPD.
(3) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1) RKPD Tahun 2027 dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan/atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
(2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 7 Juli 2026

WALI KOTA PADANG,

FADLY AMRAN

Diundangkan di Padang
pada tanggal 7 Juli 2026
SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,

RAJU MINROPA

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2026 NOMOR 14

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH TAHUN 2027

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	**i**
DAFTAR ISI	**ii**
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	
BAB I PENDAHULUAN	**I-1**
1.1 Latar Belakang	**I-1**
1.1.1 Pendekatan Penyusunan	**I-2**
1.1.2 Proses Penyusunan	**I-4**
1.1.3 Prinsip Penyusunan	**I-6**
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	**I-6**
1.3 Hubungan Antar Dokumen	**I-8**
1.4 Maksud dan Tujuan	**I-9**
1.4.1 Maksud	**I-9**
1.4.2 Tujuan	**I-10**
1.5 Sistematika RKPD	**I-10**
BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah	**II-1**
2.1 Kondisi Umum Daerah	**II-1**
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi	**II-1**
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	**II-47**
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum	**II-75**
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah	**II-156**
2.2 Evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun berjalan	**II-185**
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah	**II-188**
2.3.1 Permasalahan daerah berdasarkan aspek	**II-188**
2.3.2 Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran Pembangunan daerah	**II-199**
2.3.3 Permasalahan Dearah berdasarkan penyelenggaran Perurusan pemerintah daerah	**II-201**
2.3.4 Permasalahan Pembangunan Daerah Berdasarkan Urusan Pemerintah Wajib yang Bukan Pelayanan Dasar	**II-204**
2.3.5 Permasalahan Pembangunan Daerah Berdasarkan Urusan Pemerintahan Pilihan	**II-205**
2.3.6 Permasalahan Pembangunan Daerah Berdasarkan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	**II-213**
2.4 Capaian Standar Pelayanan Minimal Kota Padang	**II-214**
2.4.1 Bidang Pendidikan	**II-215**
2.4.2 Bidang Kesehatan	**II-216**
2.4.3 Bidang Pekerjaan Umum	**II-217**
2.4.4 Bidang Perumahan Rakyat	**II-217**
2.4.5 Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)	**II-218**
2.4.5 Bidang Sosial	**II-219**
2.5 Capaian Pelaksanaan SDGs	**II-220**
2.6 Realisasi Capaian Makro hingga Tahun 2025	**II-222**
2.7 Realisasi Capaian Misi hingga Tahun 2025	**II-223**
2.8 Realisasi Indikator Kinerja Kota (Indikator Kinerja Utama / IKU Kota) Tahun 2025	**II-224**
2.9 Capaian Program Unggulan hingga Tahun 2025	**II-225**
2.10 Isu Strategis Pembangunan Daerah	**II-229**
2.11 Inovasi Daerah	**II-252**
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH	**III-1**
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	**III-2**
3.1.1 Kondisi Makro Ekonomi Kota Padang Tahun 2025	**III-2**
3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Kota Padang	**III-9**
3.1.3 Arah dan Kebijakan Perekonomian Nasional	**III-10**

3.1.4 Arah dan Kebijakan Perekonomian Provinsi Sumatera Barat Tahun 2027 ..... III-13
3.1.5 Arah Kebijakan Ekonomi Kota Padang Tahun 2027 ..... III-17
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah III-21
3.2.1 Pendapatan Daerah III-32
3.2.2 Belanja Daerah III-25
3.2.3 Pembiayaan Daerah III-38
3.2.4 Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun 2027 ..... III-41
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH..... IV-1
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan IV-2
4.1.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional IV-2
4.1.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat IV-10
4.1.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Padang Tahun 2027 ..... IV-16
4.1.4 Tema Pembangunan Kota Padang Tahun 2027 ..... IV-42
4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan IV-45
4.2.1 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2027 ..... IV-44
4.2.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2027 ..... IV-51
4.2.3 Prioritas Pembangunan Kota Padang Tahun 2027..... IV-94
4.2.4 Pemenuhan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kota Padang Tahun 2027 ..... IV-109
4.2.5 Program Unggulan Kota Padang Tahun 2027 ..... IV-114
4.2.6 Penyelarasan dan Dukungan RKPD Kota Padang Terhadap RKPD Provinsi dan RKP 2027 ..... IV-116
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-1
5.1 Rencana Kerja..... V-1
5.2 Pendanaan Daerah V-2
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH VI-1
6.1 Indikator Kinerja Makro IV-1
6.2 Indikator Kinerja Utama VI-3
6.3 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah VI-12
6.4 Indikator Kinerja Kunci VI-20
6.4.1 Indikator Kinerja Kunci VI-20
6.4.2 Indikator Kinerja Kunci Outcome VI-29
6.4.3Indikator Kinerja Kunci Penunjang Urusan Pemerintahan VI-60
BAB VII PENUTUP VII-1
7.1 KAIDAH PELAKSANAAN VI-2
7.2 PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2027 SEBAGAI DASAR PERUBAHAN RKPD TAHUN 2027 ..... VI-2

DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 2-1	Luas Kota Padang berdasarkan Kecamatan.....	II-2
Tabel 2-2	Kondisi Kemiringan Lahan Kota Padang Menurut Kelurahan.....	II-4
Tabel 2-3	Jumlah curah hujan dan hari hujan Tahun 2025 ...	II-10
Tabel 2-4	Luas Tanah Menurut Jenis Penggunaannya di Kota Padang, Tahun 2021 – 2025	II-12
Tabel 2-5	Sebaran Wilayah Rawan Gempa Bumi Menurut Kelurahan di Kota Padang.....	II-16
Tabel 2-6	Wilayah Rawan Bencana Tsunami Menurut Kelurahan di Kota Padang.....	II-21
Tabel 2-7	Wilayah Rawan Bencana Likuifaksi Kota Padang	II-24
Tabel 2-8	Wilayah Rawan Banjir Kota Padang Menurut Kelurahan	II-28
Tabel 2-9	Tingkat Risiko Bencana Kota Padang	II-30
Tabel 2-10	Jumlah Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	II-36
Tabel 2-11	Tingkat Risiko Bencana Kota Padang Tahun 2021-2025	II-37
Tabel 2-12	Jumlah Penduduk Kota Padang Per-Kecamatan	II-38
Tabel 2-13	Rasio Penduduk menurut Jenis Kelamin per-Kecamatan tahun 2021 – 2025	II-40
Tabel 2-14	Kepadatan Penduduk Kota Padang Tahun 2021-2025	II-40
Tabel 2-15	Komposisi Penduduk Berdasarkan Umur, Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan Tahun 2025.....	II-42
Tabel 2-16	Persentase Tingkat Pendidikan Tertinggi Penduduk di Kota Padang.....	II-43
Tabel 2-17	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	II-45
Tabel 2-18	Perbandingan Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Harga Konstan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, 2021-2025	II-46
Tabel 2-19	Garis Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin Kota Padang Tahun 2020-2025	II-48
Tabel 2-20	Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2025.....	II-48
Tabel 2-21	Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kota Padang Tahun 2021-2025 (Persen)	II-51
Tabel 2-22	Perbandingan Nilai IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2025.....	II-55
Tabel 2-23	Capaian Penanganan Stunting Kota Padang Tahun 2021-2025	II-58
Tabel 2-24	Jumlah Sekolah Negeri dan Swasta di Kota Padang Tahun 2021 – 2025	II-64
Tabel 2-32	Indeks Pembangunan Keluarga Kota Padang tahun 2020-2025 hapus	II-69
Tabel 2-25	Indeks Ketimpangan Gender Kota Padang Tahun 2020-2024	II-71
Tabel 2-26	Rekapitulasi Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Kota Padang Tahun 2020-2025	II-72
Tabel 2-27	Rekapitulasi Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Kota Padang Tahun 2020-2025	II-72

Tabel 2-28	Sarana Pendidikan Kota Padang Tahun 2021–2025.	II-78
Tabel 2-29	Rekap SD 2 (dua) Shift Tahun 2025	II-79
Tabel 2-30	Rekap SMPN 2 (dua) Shift Tahun 2025	II-80
Tabel 2-31	Lembaga Pelaksana Program Kesetaraan Tahun 2025	II-80
Tabel 2-32	Kinerja Daerah Urusan Pendidikan Tahun 2021-2025.....	II-81
Tabel 2-33	Jumlah Fasilitas Kesehatan Kota Padang Tahun 2021- 2025	II-82
Tabel 2-34	Capaian Penanganan Stunting Kota Padang Tahun 2021-2025	II-83
Tabel 2-35	Kinerja Daerah Urusan Kesehatan Tahun 2021-2025	II-84
Tabel 2-36	Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan dan Kondisi di Kota Padang Tahun 2025	II-86
Tabel 2-37	Panjang Jalan Menurut Kecamatan dan Kondisi Jalan di Kota Padang Tahun 2025.....	II-86
Tabel 2-38	Panjang Jalan Menurut Fungsi dan Kondisi Permukaan di Kota Padang Tahun 2025	II-87
Tabel 2-39	Jumlah dan Panjang Jembatan di Kota Padang Tahun 2021-2025	II-89
Tabel 2-40	Areal Sistem Drainase Kota Padang	II-91
Tabel 2-41	Kinerja Daerah Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021-2025.....	II-94
Tabel 2-42	Sebaran Kawasan Kumuh Kota Padang.....	II-96
Tabel 2-43	Kinerja Daerah Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2021-2025	II-97
Tabel 2-44	Kinerja Daerah Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2021-2025	II-98
Tabel 2-45	Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kota Padang Tahun 2021-2025	II-98
Tabel 2-46	Kinerja Daerah Urusan Sosial Tahun 2021-2025.....	II-100
Tabel 2-47	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Di Kota Padang, Tahun 2025	II-101
Tabel 2-48	Kinerja Daerah Urusan Tenaga Kerja Tahun 2021-2025.....	II-102
Tabel 2-49	Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2021-2025	II-104
Tabel 2-50	Kasus Kekerasan Terhadap Anak Tahun 2021-2025.	II-105
Tabel 2-51	Penghargaan Kota Layak Anak yang diterima Kota Padang tahun 2021 – 2025	II-105
Tabel 2-52	Kinerja Daerah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021-2025	II-107
Tabel 2-53	Kinerja Daerah Urusan Pangan Tahun 2021-2025 ...	II-109
Tabel 2-54	Jumlah dan Luas Tanah yang sudah disertifikatkan Kota Padang Tahun 2021-2025	II-110
Tabel 2-54	Kinerja Daerah Urusan Pertanahan Tahun 2021-2025.....	II-110
Tabel 2-55	Timbulan Sampah Kota Padang dan Jumlah TPS.....	II-111
Tabel 2-56	Data Ruang Terbuka Hijau	II-110
Tabel 2-57	Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2021-2025	II-117
Tabel 2-58	Kinerja urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021-2025	II-119
Tabel 2-59	Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2021 - 2025	II-120

Tabel 2-60	Kepadatan Penduduk per Kecamatan Tahun 2021-2025	II-121
Tabel 2-61	Jumlah Pasangan Usia Subur Dan Peserta KB Aktif Menurut Kecamatan di Kota Padang, Tahun 2025.....	II-122
Tabel 2-62	Kinerja urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021-2025	II-123
Tabel 2-63	Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2021 – 2025 ..	II-127
Tabel 2-64	Kinerja urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2021 – 2025.....	II-129
Tabel 2-65	Jumlah Koperasi dan Kondisi di Kota Padang Tahun 2021-2025	II-129
Tabel 2-66	Kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2021-2025	II-130
Tabel 2-67	Kinerja Urusan Penanaman Modal Tahun 2021-2025	II-131
Tabel 2-68	Kinerja urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2021 – 2025	II-132
Tabel 2-69	Kinerja urusan Statistik Tahun 2021-2025	II-134
Tabel 2-70	Indeks KAMI Kota Padang Tahun 2021-2025	II-135
Tabel 2-71	Kinerja urusan Persandian Tahun 2021-2025	II-135
Tabel 2-72	Jumlah Sarana dan Prasarana Kebudayaan Tahun 2021-2025	II-136
Tabel 2-73	Kinerja urusan Kebudayaan Tahun 2021-2025	II-136
Tabel 2-74	Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2021-2025	II-137
Tabel 2-75	Kinerja urusan Kearsipan Tahun 2021-2025	II-138
Tabel 2-76	Produksi Perikanan Tangkap Kota Padang Tahun 2021- 2025 (Ton)	II-139
Tabel 2-77	Kinerja urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2021-2025	II-139
Tabel 2-78	Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2021-2025	II-140
Tabel 2-79	Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2021-2025	II-140
Tabel 2-80	Palawija Kota Padang Tahun 2025	II-141
Tabel 2-81	Kinerja urusan Pertanian Tahun 2021-2025	II-142
Tabel 2-82	Jumlah sarana perdagangan menurut jenisnya Tahun 2021-2025	II-142
Tabel 2-83	Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2021-2025	II-143
Tabel 2-84	Komoditi Industri Unggulan Kota Padang Tahun 2021- 2025	II-144
Tabel 2-85	Kinerja urusan Perencanaan Tahun 2021-2025	II-145
Tabel 2-86	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang, Tahun 2021-2025	II-146
Tabel 2-87	Kinerja Urusan Keuangan Tahun 2021-2025	II-146
Tabel 2-88	Capaian Kinerja Unsur Pengawasan	II-147
Tabel 2-89	Pelaksanaan Diklat Aparatur yang diaksanakan di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Tahun 2021-2025	II-148
Tabel 2-90	Kinerja urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2021-2025.....	II-148
Tabel 2-91	Perkembangan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2021-2025	II-149
Tabel 2-92	Kinerja urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2021-2025	II-150
Tabel 2-93	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kota Padang (miliar rupiah), 2021–2025	II-152
Tabel 2-94	Produktivitas Total Daerah Kota Padang Tahun 2021-2024	II-153

Tabel 2-95	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	II-175
Tabel 2-96	Interval Kinerja sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017	II-179
Tabel 2-97	Realisasi Capaian RPJMD 2025 – 2029 hingga tahun 2025	II-181
Tabel 2-98	Realisasi SPM Bidang Pendidikan.....	II-215
Tabel 2-99	Realisasi SPM Bidang Kesehatan	II-216
Tabel 2-100	Target Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum	II-217
Tabel 2-101	Realisasi SPM Bidang Perumahan Rakyat	II-217
Tabel 2-102	Realisasi SPM Satpol PP	II-218
Tabel 2-103	Target Pencapaian SPM M Kebencanaan (BPBD	II-218
Tabel 2-104	Target Pencapaian SPM Damkar	II-219
Tabel 2-105	Realisasi SPM Bidang Sosial	II-219
Tabel 2-106	Capaian Indikator TPB Kota Padang	II-221
Tabel 2-107	Realisasi Capaian Misi RPJMD Hingga Tahun 2025.	II-222
Tabel 2-108	Realisasi Capaian Misi RPJMD Hingga Tahun 2025.....	II-222
Tabel 2-109	Realisasi Indikator Kinerja Kota (Indikator Kinerja Utama / IKU Kota) Tahun 2025.....	II-223
Tabel 2-110	Indeks Inovasi Daerah Kota Padang Tahun 2021–2025	II-251
Tabel 3- 1	Kinerja Perekonomian Tahun 2025 dan Outlook Tahun 2026 (Persen)	III-11
Tabel 3-2	Sasaran Makro Pembangunan Tahun 2027	III-12
Tabel 3-3	Proyeksi Indikator Makro Sumatera Barat Tahun 2026-2027	III-14
Tabel 3- 1	Target Indikator Makro Ekonomi Kota Padang Tahun 2025-2027	III-20
Tabel 3-4	Pendapatan Daerah Kota Padang Tahun 2023-2027.	III-25
Tabel 3-5	Belanja Daerah Kota Padang Tahun 2023-2027	III-35
Tabel 3-6	Pembiayaan Daerah Kota Padang Tahun 2023-2027	III-40
Tabel 3-7	Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Padang Tahun 2027	III-43
Tabel 4- 1	Target Makro Pembangunan Kota Padang Tahun 2025-2029.....	IV-9
Tabel 4- 2	Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029	IV-10
Tabel 4- 3	Proyeksi Indikator Makro Daerah Tahun 2027.....	IV-16
Tabel 4- 4	Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan pada RPJMD Kota Padang Tahun 2025-2029.....	IV-18
Tabel 4- 5	Target Indikator Makro Kota Padang Tahun 2027....	IV-43
Tabel 4- 6	Prioritas Pembangunan, Sasaran dan Arah Kebijakan Nasional 2025-2029	IV-44
Tabel 4- 7	Jenis Pelayanan Dasar dan Target Penerima Layanan Dasar Tahun 2027	IV-53
Tabel 4- 8	Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas Tahun 2027	IV-64
Tabel 4-9	Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Lumbung Pangan Nasional dan Ekonomi Berkelanjutan Tahun 2027	IV-68

Tabel 4- 10	Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Nagari/Desa Sebagai Basis Kemajuan Tahun 2027.	IV-72
Tabel 4- 9	Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Sumatera Barat Pusat Perdagangan dan Bisnis Sumatera Bagian Barat Tahun 2027	IV-76
Tabel 4- 10	Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Membangun Infrastruktur Berkeadilan dan Siap Tanggap Bencana Tahun 2027	IV-80
Tabel 4- 13	Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Membangun Kehidupan Beradat dan Berbudaya Berbasiskan Agama, Kearifan Lokal Melalui Dukungan Keluarga yang Berkualitas Tahun 2027…	IV-84
Tabel 4- 14	Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Tingkatkan Daya Saing Wisata dan Akselerasi Ekonomi Kreatif untuk UMKM Tahun 2027	IV-88
Tabel 4- 15	Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Pelayanan Publik yang Efektif Tahun 2027	IV-91
Tabel 4- 16	Sasaran dan Target Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif Tahun 2027	IV-96
Tabel 4- 17	Sasaran dan Target Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat Tahun 2027..	IV-99
Tabel 4- 18	Sasaran dan Target Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan Tahun 2027	IV-101
Tabel 4- 11	Sasaran dan Target Kemudahan Berinvestasi Demi Terbukanya Lapangan Pekerjaan Tahun 2027	IV-103
Tabel 4- *20*	Sasaran dan Target Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas Tahun 2027	IV-104
Tabel 4- *21*	Sasaran dan Target Menguatkan Jaringan Ketahanan Bencana Tahun 2027	IV-106
Tabel 4- *22*	12Sasaran dan Target Pengembangan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa Tahun 2027.....	IV-107
Tabel 4- 13	Sasaran dan Target Optimalisasi Potensi Kota untuk Terwujudnya Industri Kreatif dan Pariwisata Berkelanjutan Tahun 2027	IV-109
Tabel 4- 14	Target Standar Pelayanan Minimal Kota Padang Tahun 2027	IV-110
Tabel 4- 15	Sinkronisasi Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025-2029 Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 dan Kota Padang Tahun 2025-2029	IV-118
Tabel 5- 1	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Padang Tahun 2027	V-3
Tabel 6- 1	Target Kinerja Makro Kota Padang Tahun 2027.....	IV-1
Tabel 6- 2	Indikator Kinerja Utama Kota	IV-3
Tabel 6- 3	Indikator Kinerja Daerah tahun 2027.....	IV-13
Tabel 6- 4	Indikator Kinerja Kunci Output	IV-20
Tabel 6- 5	Indikator Kinerja Kunci Outcome	IV-29
Tabel 6- 6	Indikator Kinerja Kunci Penunjang Urusan Pemerintah	IV-60

DAFTAR GAMBAR

		Hal
Gambar 1-1	Proses penyusunan dan Keterkaitan RKPD dengan Dokumen Perencananaan……	I-8
Gambar 2-1	Peta Kota Padang……	II-1
Gambar 2-2	Suhu Udara dan Kelembapan Kota Padang Tahun 2022 – 2025……	II-9
Gambar 2-3	Sebaran Wilayah Rawan Gempa Bumi Menurut Kelurahan di Kota Padang……	II-15
Gambar 2-4	Wilayah Rawan Bencana Tsunami Menurut Kelurahan di Kota Padang……	II-20
Gambar 2-5	Wilayah Rawan Bencana Likuifaksi Kota Padang……	II-23
Gambar 2-6	Wilayah Rawan Banjir Kota Padang Menurut Kelurahan ……	II-27
Gambar 2-7	Kerangka Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi……	II-31
Gambar 2-8	Gambaran IKP Kota Padang dari Tahun 2021-2025……	II-32
Gambar 2-9	Pola Pangan Harapan (PPH) Kota Padang Tahun ……	II-33
Gambar 2-10	Pravalensi Ketidakcukupan Konsumsui Pangan Kota Padang Tahun 2021-2025……	II-34
Gambar 2-11	Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Padang Tahun 2021-2025……	II-39
Gambar 2-12	Pertumbuhan Ekonomi Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Nasional Tahun 2021-2025……	II-46
Gambar 2-13	Persentase Penduduk Miskin Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2021-202……	II-48
Gambar 2-14	PDRB Per Kapita Kota Padang dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2025 ……	II-52
Gambar 2-15	Kontribusi PDRB ADHB Kota Padang dari Terbesar ke Terkecil Tahun 2025 ……	II-52
Gambar 2-16	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2021-2025 ……	II-52
Gambar 2-17	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2021-2025……	II-53
Gambar 2-18	Perbandingan Index Gini Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2021-2025……	II-54
Gambar 2-19	Nilai IPM Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan Indonesia Tahun 2021-2025 ……	II-55
Gambar 2-20	Angka Harapan Hidup Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2021-2025…	II-57
Gambar 2-21	Realisasi Angka Kematian Ibu Kota Padang Tahun 2021 – 2025 ……	II-57
Gambar 2-22	Realisasi Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis Kota Padang Tahun 2021 – 2025 ……	II-59
Gambar 2-23	Realisasi Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis Kota Padang Tahun 2021 – 2025 …..	II-59

Gambar 2-24	Capaian Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional 2020-2025.....	II-61
Gambar 2-25	Persentase satuan Pendidikan yang mencapai SKM pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Membaca	II-62
Gambar 2-26	Persentase satuan Pendidikan yang mencapai SKM pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi....	II-63
Gambar 2-27	Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2021-2025	II-64
Gambar 2-28	Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kota Padang dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2025	II-65
Gambar 2-29	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	II-66
Gambar 2-30	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	II-67
Gambar 2-31	Indeks Pembangunan Kebudayaan Kota Padang ..	II-69
Gambar 2-32	Indeks Kerukunan Umat Beragama	II-70
Gambar 2-33	Indeks Pembangunan Keluarga Kota Padang tahun 2020-2025	II-70
Gambar 2-34	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni, Rumah Tidak Layak Huni yang direhab dan Jumlah Rumah Layak Huni Tahun 2021-2024 (unit).....	II-95
Gambar 2-35	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Tahun 2021-2025	II-97
Gambar 2-36	Jumlah Pencari Kerja Yang Telah Ditempatkan Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2025	II-101
Gambar 2-37	Pemenuhan Lowongan Permintaan Tenaga Kerja menurut Lapangan Usaha Terbanyak Tahun 2025.	II-102
Gambar 2-37	Perbandingan capaian IPM dan IPG Kota Padang Tahun 2020-2024	II-104
Gambar 2-38	Perbandingan Capaian IPG Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional tahun 2020-2024 ...	II-104
Gambar 2-39	Layanan AMDAL/UKL/UPL Tahun 2021-2025	II-116
Gambar 2-40	Jumlah Akte kelahiran, KK dan KTP Elektronik yang Diterbitkan oleh Dinas Dukcapil Tahun 2021-2025	II-119
Gambar 2-41	Indikator Pengendalian Penduduk Kota Padang Tahun 2021-2025	II-121
Gambar 2-42	Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2021-2025.	II-126
Gambar 2-43	PMA dan PMDN Tahun 2021-2025	II-131
Gambar 2-44	Perkembangan Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif Tahun 2021-2025	II-132
Gambar 2-45	Nilai Investasi Pada Industri Kecil, Menengah Dan Besar di Kota Padang Tahun 2020-2024 (Dalam Juta)	II-143
Gambar 2-46	Perkembangan Jumlah PNS Kota Padang Tahun 2021– 2025	II-148
Gambar 2-47	Perkembangan Produktivitas Total Daerah Kota Padang Tahun 2021-2024	II-153
Gambar 2-48	Rasio PDRB Industri Pengolahan di Kota Padang Tahun 2021-2025 (Persen)	II-155
Gambar 2-49	Rasio PDRB Akomodasi dan Makan Minum di Kota Padang Tahun 2021-2025 (Persen)	II-156
Gambar 2-50	Kunjungan Wisatawan Mancanegara di Kota Padang Tahun 2021-2025 (Orang)	II-157

Gambar 2-51	Proporsi PDRB Sektor Industri Kreatif dan Pariwisata terhadap PDRB Kota Padang (%)	II-158
Gambar 2-52	Proporsi Jumlah UKM Non Pertanian Kota Padang Tahun 2019 – 2023	II-159
Gambar 2-53	Kota Padang Tahun 2025-2030 (%)	II-160
Gambar 2-54	Jumlah Usaha Mikro Binaan Kota Padang Tahun 2021-2025 (Unit Usaha)	II-161
Gambar 2-55	Rasio Kewirausahaan Daerah Kota Padang Tahun 2025-2030 (%)	II-162
Gambar 2-56	Rasio Volume Usaha Terhadap PDRB Kota Padang Tahun 2025-2030 (%)	II-163
Gambar 2-57	Return on Asset (ROA) BUMD Kota Padang Tahun 2025-2030 (%)	II-164
Gambar 2-58	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal Kota Padang Tahun 2025-2030 (%)	II-165
Gambar 2-59	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kota Padang Tahun 2025-2030 (%)	II-166
Gambar 2-60	Indeks Inovasi Daerah Kota Padang Tahun 2025-2030 (%)	II-167
Gambar 2-61	Rasio Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Kota Padang Tahun 2021-2025 (%)	II-168
Gambar 2-62	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kota Padang Tahun 2020-2024 (juta/tahun)	II-170
Gambar 2-63	Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) Kota Padang Tahun 2025-2030	II-171
Gambar 2-64	Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok Kota Padang Tahun 2025-2030	II-172
Gambar 2-65	Pembentukan Modal Tetap Bruto (%PDRB) Kota Padang Tahun 2025-2030	II-174
Gambar 2-66	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB) Kota Padang Tahun 2025-2030	II-173
Gambar 2-67	Grafik Persentase Capaian Indikator TPB Kota Padang	II-220
Gambar 2-68	Capaian Program Unggulan : Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pekerja Rentan Kota Padang Periode Januari – November 2025	II-228
Gambar 2-69	Aktivasi Bantuan Pemerintah untuk Pertanian dan Perikanan Program Unggulan Padang Melayani Tahun 2025	II-229
Gambar 2-70	Aktivasi Progul Padang Rancak Tahun 2025	II-234
Gambar 2-71	Capaian Program Unggulan UMKM Naik Kelas Tahun 2025	II-236
Gambar 2-72	Capaian Progul Jelajah Padang Tahun 2025	II-237
Gambar 2-73	Megatren Global 2045	II-238
Gambar 2-74	Program Prioritas Pembangunan Nasional RPJMN 2025-2029	II-243
Gambar 2-75	Struktur Sektor Ekonomi Pilar Pendorong PDRB Kota Padang	II-243
Gambar 2-76	Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanana Kota Padang Tahun 2021-2025	II-244
Gambar 2-77	Profil Petani di Kota Padang Tahun 2022.....	II-245
Gambar 2-78	Rasio PDRB Sektor Perikanan Kota Padang Tahun 2021-2025	II-246
Gambar 3-1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Padang dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2025	III-2

Gambar 3-2	PDRB per kapita ADHB Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2021-2025....	III-4
Gambar 3-3	Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2021-2025.....	III-6
Gambar 3-4	Tingkat Kemiskinan Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2021-2025....	III-7
Gambar 3-5	Gini Ratio Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2021-2025.....	III-8
Gambar 4-1	Dukungan Terhadap Tema Pembangunan	IV-7

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan yang disusun oleh pemerintah daerah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RKPD memuat arah kebijakan pembangunan daerah, prioritas pembangunan, program dan kegiatan, serta pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, dan menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam melaksanakan pembangunan secara terarah, terukur, dan berkelanjutan.

Penyusunan RKPD dilaksanakan melalui proses perencanaan yang bersifat partisipatif, teknokratis, politis, serta memadukan pendekatan top–down dan bottom–up. Proses tersebut diawali dengan evaluasi kinerja pembangunan daerah tahun sebelumnya, dilanjutkan dengan penyusunan rancangan awal RKPD, perumusan rancangan RKPD, pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat kelurahan hingga kota, penyempurnaan rancangan akhir RKPD, dan ditetapkan melalui peraturan kepala daerah. Tahapan ini dimaksudkan untuk memastikan keterpaduan antara kebutuhan dan aspirasi masyarakat, prioritas pembangunan daerah, serta kemampuan pendanaan daerah.

RKPD Kota Padang Tahun 2027 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan RPJMD Kota Padang Tahun 2025–2029, dan menempati posisi sebagai dokumen perencanaan tahunan tahun ketiga dalam periode RPJMD tersebut. RKPD Tahun 2027 berperan penting dalam menjaga kesinambungan arah kebijakan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah agar dapat dicapai secara bertahap dan konsisten.

Dalam hierarki perencanaan, RKPD 2027 menjadi pedoman dasar bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan yang merupakan manifestasi tahunan dari Renstra Perangkat Daerah sehingga seluruh program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2027 tetap selaras dan menjadi tonggak capaian (*milestones*) yang konsisten menuju sasaran strategis lima tahunan yang telah digariskan dalam Renstra masing-masing perangkat daerah.

RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Secara substansial, RKPD merupakan dokumen yang secara substansial menjabarkan Rencana Pembangunan Daerah Kota Padang Tahun 2027 yang memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;

2. Secara Normatif, RKPD merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);
3. Secara Operasional, RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta Pemerintahan Daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja PD; dan
4. Secara Faktual, RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, menjadi tolak ukur untuk menilai sejauh mana capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam merealisasikan program dan kegiatan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

1.1.1 Pendekatan Penyusunan

Untuk lebih implementatif, penyusunan perencanaan pembangunan Kota Padang Tahun 2027 menggunakan 2 (dua) pendekatan yaitu pendekatan berorientasi proses dan pendekatan berorientasi substansi. Pendekatan berorientasi proses dilaksanakan melalui 4 kriteria yaitu teknokratis, partisipatif, politis, atas–bawah, bawah-atas. Berikut penjelasan dari masing-masing pendekatan sebagai berikut :

A. Teknokratis

Yang dimaksud dengan pendekatan teknokratis adalah proses pendekatan yang mengedepankan penggunaan metoda dan kerangka berpikir ilmiah dan sistematik dalam melakukan analisis masalah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Dalam hal ini proses teknokratik digunakan pada proses penyusunan perkiraan ekonomi makro daerah dan menyusun rencana program dan kegiatan pembangunan. Pendekatan teknokratik dilakukan melalui forum diskusi dan konsultasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk tenaga ahli dari lembaga/institusi dan perguruan tinggi; serta pejabat yang menangani perencanaan dari Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kota Padang.

B. Partisipatif

Yang dimaksud dengan pendekatan partisipatif dalam hal ini adalah proses yang dilakukan dengan mengembangkan forum konsultasi publik yang melibatkan tokoh masyarakat dan organisasi masyarakat dalam merumuskan masalah dan prioritas pembangunan daerah Tahun 2027. Hal ini dijalankan melalui Musrenbang dan dialog interaktif dengan pemangku kepentingan guna menyusun Rencana Kerja yang akuntabel. Pendekatan ini melibatkan semua pemangku kepentingan antara lain diikuti oleh unsur pemerintah dan masyarakat melalui penyelenggaraan musrenbang dari tingkat

kelurahan hingga tingkat kota dengan menghimpun hasil dari rembuk warga.

Pendekatan juga dilakukan dalam bentuk forum konsultasi publik yang melibatkan para pakar dan tokoh masyarakat sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 80 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Selain itu juga melalui dialog Pemerintah Kota Padang dengan Pelaku Usaha untuk menjaring potensi dan aspirasi pengusaha yang bisa dibiayai dengan dana CSR.

C. Politik

Pada prinsipnya pendekatan politik memandang bahwa proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah harus mengedepankan kehendak dan kepentingan rakyat pemilih yang sudah memberikan hak pilihnya kepada organisasi politik dan Kepala Daerah berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan.

Dalam penyusunan RKPD Tahun 2027 dilakukan dengan cara mengedepankan proses politik di lingkungan Pemerintah Kota Padang sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Pendekatan politik juga dilakukan melalui Koordinasi Pemko Padang dengan DPRD.

D. Atas – Bawah dan Bawah – Atas

Pendekatan atas bawah dilakukan melalui penyusunan RKPD dengan mengacu pada prioritas pembangunan daerah yang tercantum dalam RPJMD Kota Padang 2025-2029 serta agenda dan prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam RKP dan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2027. Pendekatan atas – bawah dan bawah – atas diselaraskan melalui musyawarah perencanaan pembangunan nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dengan melakukan koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan pembangunan diantaranya melalui Forum Rapat Koordinasi Pembangunan dengan Provinsi Sumatera Barat, Bappenas, Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian/Lembaga terkait.

Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah pada RKPD tahun 2027 melalui proses teknokratik, partisipatif, politik, atas - bawah dan bawah - atas, diharapkan diperoleh hasil yang akuntabel dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Kota Padang. Dengan demikian kegiatan yang akan dilakukan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang akan bisa menjawab kebutuhan masyarakat dan tepat sasaran, memenuhi kebijakan belanja dengan prinsip *money follow priority program*, tidak lagi *money follow function*. Hal ini berarti bahwa dilakukan prioritasi program secara ketat, tidak lagi mengalokasikan kegiatan berdasarkan struktur organisasi semata.

Pendekatan berorientasi pada substansi dilaksanakan melalui 3 kriteria yaitu thematik-holostik, integratif dan spasial sebagai berikut:

A. Tematik-holistik

Yang dimaksud dengan pendekatan tematik-holistik adalah perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan

mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.

B. Integratif

Yang dimaksud dengan pendekatan integratif adalah perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah.

C. Spasial

Yang dimaksud dengan pendekatan spasial adalah perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan (kewilayahan) dalam perencanaan.

1.1.2 Proses Penyusunan

Secara umum RKPD Kota Padang Tahun 2027 disusun melalui pentahapan sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan RKPD, meliputi;
   a. penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RKPD;
   b. orientasi mengenai RKPD;
   c. penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD; dan
   d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.
2. Penyusunan Rancangan Awal RKPD, meliputi;
   a. analisis gambaran umum kondisi Daerah;
   b. analisis rancangan kerangka ekonomi Daerah;
   c. analisis kapasitas riil keuangan Daerah;
   d. penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah;
   e. perumusan permasalahan pembangunan Daerah;
   f. penelaahan terhadap sasaran RPJMD;
   g. penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD;
   h. penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dan program strategis nasional;
   i. penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;
   j. perumusan prioritas pembangunan Daerah; dan
   k. perumusan rencana kerja program dan pendanaan.
3. Pelaksanaan rembug warga tingkat RT/RW
4. Pelaksanaan rapat koordinasi pembangunan tingkat kelurahan
5. Pelaksanaan forum konsultasi publik rancangan awal RKPD Tahun 2027

   Rancangan awal RKPD dibahas bersama dengan kepala Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam forum konsultasi publik untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan dituangkan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh Kepala BAPPEDA dan Kepala Perangkat Daerah serta perwakilan masyarakat yang hadir pada konsultasi publik untuk selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyempurnaan rancangan awal RKPD tahun 2027.

Rancangan awal RKPD yang telah disempurnakan diajukan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk memperoleh persetujuan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah disertai dengan net konsep surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah yang berisikan agenda penyusunan RKPD, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD, dan batas waktu penyampaian rancangan awal Renja Perangkat Daerah kepada Kepala BAPPEDA untuk diverifikasi.

6. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tingkat Kecamatan.
7. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah.
8. Penyusunan Rancangan RKPD, meliputi;
   a. Penelaahan terhadap rancangan RKPD Provinsi Sumatera Barat, RKP Tahun 2027 dan program strategis nasional.
   b. Pengajuan rancangan RKPD kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dalam rangka memperoleh persetujuan terhadap rancangan RKPD Tahun 2027.
9. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tingkat Kota.
10. Perumusan Rancangan Akhir RKPD, meliputi;
    a. Penyempurnaan rancangan RKPD menjadi rancangan akhir RKPD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD tahun 2027.
    b. Penyampaian Rancangan akhir RKPD Tahun 2027 kepada Sekretaris Daerah untuk dibahas oleh seluruh Kepala Perangkat Daerah.
    c. Pembahasan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2027, bertujuan untuk memastikan program dan kegiatan Perangkat Daerah telah diakomodir dalam rancangan akhir RKPD
    d. Penyusunan rancangan Perkada tentang RKPD berdasarkan hasil pembahasan Rancangan akhir RKPD Tahun 2027
    e. Penyampaian Rancangan Perkada RKPD Tahun 2027 kepada Inspektorat untuk di Reviu oleh APIP
    f. Reviu APIP
    g. Penyempurnaan Rancangan Perkada berdasarkan hasil Reviu oleh APIP
    h. Penyampaian rancangan Perkada tentang RKPD oleh Wali Kota kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk diharmonisasi.
    i. Penyampaian rancangan Perkada tentang RKPD oleh Wali Kota kepada Gubernur untuk difasilitasi.
    j. Fasilitasi rancangan Perkada tentang RKPD Tahun 2027 oleh Gubernur
    k. Penyempurnaan rancangan Perkada tentang RKPD Tahun 2027 berdasarkan hasil fasilitasi oleh Gubernur
11. Penetapan RKPD, meliputi:
    a. Penyampaian Rancangan Perkada tentang RKPD yang telah disempurnakan oleh Kepala BAPPEDA kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah untuk persetujuan untuk penetapan dan pengundangan.
    b. Penetapan Peraturan Wali Kota tentang RKPD Tahun 2027.

c. Penyampaian Peraturan Wali Kota tentang RKPD Tahun 2025 kepada Gubernur melalui BAPPEDA provinsi Sumatera Barat.

1.1.3 Prinsip Penyusunan

Prinsip-prinsip yang digunakan dalam penyusunan RKPD Kota Padang tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1. Sinergitas program dan kegiatan diantara program/kegiatan ditingkat Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat maupun Nasional melalui Forum OPD maupun Musrenbang baik di tingkat Kota, Provinsi maupun Nasional.
2. Mempertimbangkan kemampuan fiskal keuangan daerah dalam proses penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Pendanaan melalui penyusunan prioritas dari setiap OPD.
3. Berpegang pada prinsip-prinsip tata kelola Pemerintah yang bersih, professional dan akuntabel serta menegakkan supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD Kota Padang Tahun 2027 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6976);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 9);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodeikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Kinerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Melaksanakan Program Strategis Nasional Pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2026 Tentang Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 74);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 395)
17. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2026 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 346)
18. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030 (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2019 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 220);
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun

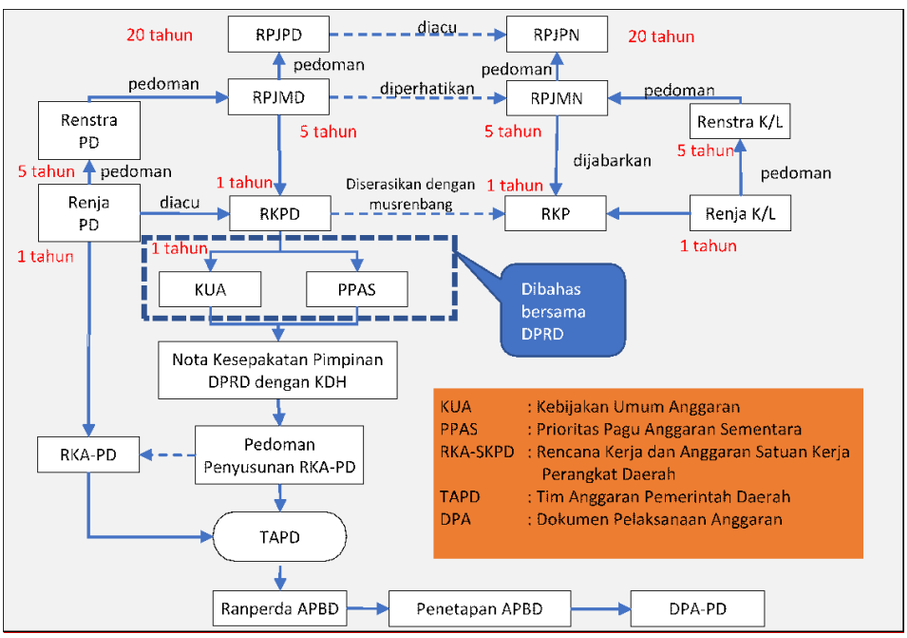
2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 227);

21. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Padang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2024 Nomor 11);
22. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2025-2029 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2025 Nomor 9);
23. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 12 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

RKPD Kota Padang Tahun 2027 disusun sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah, sehingga memiliki keterkaitan yang erat dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan lainnya, baik pada tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. Keterkaitan ini dimaksudkan untuk menjamin keselarasan arah kebijakan, sinergi program dan kegiatan, serta konsistensi pencapaian sasaran pembangunan secara berjenjang. Hubungan antar dokumen perencanaan pemerintah Kota Padang disajikan dalam gambar berikut:

Gambar 1. 1 Proses penyusunan dan Keterkaitan RKPD dengan Dokumen Perencanaan



RKPD Kota Padang Tahun 2027 merupakan penjabaran tahunan dari RPJMD Kota Padang Tahun 2025–2029, khususnya untuk tahun ketiga periode RPJMD. Seluruh arah kebijakan, prioritas pembangunan, program, dan indikator kinerja yang termuat dalam RKPD disusun untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kota Padang.

Selain itu, penyusunan RKPD Kota Padang Tahun 2027 juga memperhatikan keterkaitan dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025–2029. Keterkaitan ini diwujudkan melalui penyelarasan tema, prioritas pembangunan daerah, serta program dan kegiatan yang bersifat lintas kabupaten/kota dan menjadi kewenangan provinsi. Dengan demikian, RKPD Kota Padang diharapkan dapat berkontribusi secara optimal terhadap pencapaian sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Barat.

Dalam konteks perencanaan pembangunan nasional, RKPD Kota Padang Tahun 2027 disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 serta program strategis nasional. Penyelarasan ini dilakukan untuk memastikan bahwa prioritas dan program pembangunan daerah sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional, khususnya dalam mendukung agenda pembangunan nasional, pencapaian target pembangunan makro, serta pelaksanaan program strategis nasional di daerah.

Selanjutnya, RKPD Kota Padang Tahun 2027 juga memiliki keterkaitan langsung dengan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2027. RKPD Provinsi menjadi salah satu acuan utama dalam penyusunan RKPD kabupaten/kota, terutama dalam penyelarasan prioritas pembangunan daerah, program strategis provinsi, serta kegiatan yang memerlukan koordinasi dan dukungan lintas wilayah. Keterkaitan ini penting untuk menjamin integrasi perencanaan pembangunan antarlevel pemerintahan serta efektivitas pelaksanaan pembangunan daerah.

Dengan memperhatikan keterhubungan antara RKPD Kota Padang Tahun 2027 dengan RPJMD kabupaten/kota dan provinsi, RKP dan program strategis nasional, serta RKPD Provinsi Sumatera Barat, diharapkan dokumen RKPD Kota Padang Tahun 2027 mampu menjadi instrumen perencanaan tahunan yang selaras, terpadu, dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah secara berkelanjutan. Selain itu, RKPD Kota Padang Tahun 2027 juga memiliki keterkaitan dengan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 sebagai dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah yang memuat tujuan, sasaran, program, dan indikator kinerja perangkat daerah sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Keterkaitan tersebut menunjukkan bahwa RKPD merupakan penjabaran tahunan yang mengoperasionalkan target dan sasaran Renstra Perangkat Daerah ke dalam prioritas, program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan tahunan, sehingga terjaga konsistensi antara perencanaan tahunan daerah dengan perencanaan jangka menengah perangkat daerah. Keselarasan dan keterpaduan tersebut selanjutnya menjadi landasan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah yang berpedoman pada RKPD.

1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Padang Tahun 2027 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan yang disusun untuk menjamin

keterpaduan dan konsistensi antara perencanaan pembangunan jangka menengah dan perencanaan tahunan daerah, serta sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah pada Tahun Anggaran 2027.

1.4.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Padang Tahun 2027 adalah:

1. Menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Tahun 2025–2029 ke dalam arah kebijakan, prioritas pembangunan daerah, serta program, kegiatan, dan subkegiatan pembangunan daerah untuk satu tahun anggaran.
2. Menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2027.
3. Menjadi dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027.
4. Menjamin keterpaduan antara perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi.
5. Menjamin kesinambungan pelaksanaan pembangunan daerah serta pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah secara bertahap, terukur, dan berkelanjutan.

1.5 Sistematika RKPD

RKPD Kota Padang Tahun 2027 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan;

Bagian ini memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika dokumen RKPD agar urgensitas dan kepentingan penyusunan dan sinergitas antar bab mudah dipahami;

BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah;

Bagian ini memuat Gambaran Umum Kondisi Daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah; Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD; Permasalahan pembangunan daerah yang meliputi permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dan identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

BAB III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah;

Bagian ini memuat arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah, menguraikan kebijakan pembangunan nasional yang diselaraskan dengan kebijakan pembangunan daerah, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah.

BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;

Bagian ini memuat tujuan dan sasaran pembangunan daerah dan prioritas dan sasaran pembangunan Tahun 2027.

BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;

Bagian ini memuat rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Bagian ini berisi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi IKU dan IKK pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII Penutup

Bagian ini merupakan penegasan bahwa RKPD menjadi pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam menjabarkan rencana kerja melalui program/kegiatan yang akan dilaksanakan Tahun 2027.

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

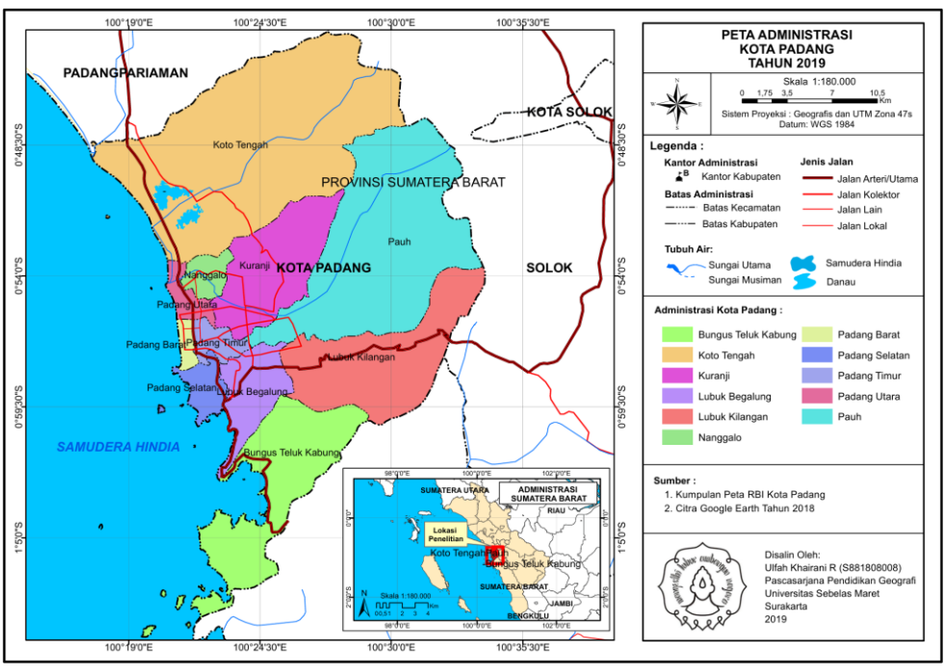
2.1. Kondisi Umum Daerah

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

A. Kondisi Geografi Daerah

Kota Padang adalah ibu kota Provinsi Sumatera Barat, secara administratif memiliki luas wilayah ± 1.414,96 km², berada di pesisir pantai Barat pulau Sumatera dengan posisi astronomis antara 1000 05'05" BT - 1000 34'09" BT dan 000 44'00" LS - 01008'35" LS.

Gambar 2- 1 Peta Kota Padang



Sumber : Ulfah Khairani R, Universitas Sebelas Maret, 2019

Kota Padang terdiri kawasan daratan dan perairan/laut, dimana luas kawasan daratan adalah 694,96 km² sedangkan kawasan perairan/laut luasnya 720,00 km². Kota Padang memiliki 19 pulau-pulau kecil yang tersebar pada beberapa kecamatan, dan 21 sungai besar dan kecil dimana 5 di antaranya merupakan sungai besar, dengan sungai terpanjang adalah sungai Batang Kandis yang panjangnya ± 20 Km.

Pada tahun 1980 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tanggal 21 Maret 1980 wilayah Kota Padang yang sebelumnya terdiri dari 3 Kecamatan dengan 15 Kampung dikembangkan menjadi 11 Kecamatan dan 193 Kelurahan, kemudian dengan ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2005 dilakukan penggabungan kelurahan menjadi 104 Kelurahan.

Adapun batas-batas wilayah administratif Kota Padang, adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Solok dan Kota Solok .
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Mentawai.

Wilayah kecamatan yang terluas di kota Padang adalah Kecamatan Koto Tangah yaitu 232,25 km^2 atau 33,42% sedangkan wilayah kecamatan yang terkecil luasnya adalah Kecamatan Padang Barat yaitu 7 km^2 atau 1,01%. Luas dan komposisi luas lahan serta ketinggian daerah menurut Kecamatan di Kota Padang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2- 1 Luas Kota Padang berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	Jml Kelurahan	Luas (km2)	% luas	Tinggi Wilayah di Atas Permukaan Laut (meter)	Jarak ke Ibukota Padang
1	Bungus Teluk Kabung	6	100,78	14,5	0 - 850	33
2	Lubuk Kilangan	7	85,99	12,37	25 - 1853	15
3	Lubuk Begalung	15	30,91	4,45	8 - 400	14
4	Padang Selatan	12	10,03	1,44	0 - 322	17
5	Padang Timur	10	8,15	1,17	10-Apr	13
6	Padang Barat	10	7	1,01	0 - 8	12
7	Padang Utara	7	8,08	1,16	0 - 25	11
8	Nanggalo	6	8,07	1,16	8-Mar	8
9	Kuranji	9	57,41	8,26	8 - 1000	9
10	Pauh	9	146,29	21,05	10 - 1600	16
11	Koto Tangah	13	232,25	33,42	0 - 1600	13,4
TOTAL		104		100		

Sumber: Kota Padang Dalam Angka, 2026

1. Topografi

   Wilayah Kota Padang memiliki topografi yang bervariasi, perpaduan daratan yang landai dan perbukitan bergelombang yang curam. Sebagian besar topografi wilayah Kota Padang memiliki tingkat kelerengan lahan rata-rata >40%. Ketinggian wilayah Kota Padang dari permukaan laut juga bervariasi, mulai 0 m dpl sampai >1.000 m dpl. Topografi Kota Padang terdiri dari dataran tinggi/perbukitan, dataran rendah, daerah aliran sungai serta mempunyai pulau- pulau dan pantai.

   Berdasarkan posisi wilayahnya, Kota Padang secara fisik mempunyai ciri yang menonjol:

- Wilayah Pantai; seluruhnya berhadapan dengan Samudera Hindia
- Wilayah Dataran Rendah; sebagian besar sudah berkembang sebagai daerah pusat kota.
- Wilayah Dataran tinggi; berupa lereng Bukit Barisan melingkari Kota Padang.

Kondisi kemiringan lereng di Kota Padang umumnya didominasi oleh kemiringan lereng antara >40% yaitu dengan luasan 20.763,72 hektar atau sebesar 29,87%. Kelurahan dengan tingkat kemiringan >40% paling luas adalah Kelurahan Lubuk Minturun di Kecamatan Koto Tangah dan Kelurahan Lambung Bukit yang terdapat di Kecamatan Pauh. Kawasan dengan kelerengan lahan >40% ini merupakan kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung.

Kemiringan lereng lainnya yang cukup dominan di Kota Padang adalah kemiringan lereng 25-40% yaitu seluas 16.709,01 hektar atau sebesar 24,04%. Kelurahan dengan tingkat kemiringan 25- 40% yang paling luas terdapat di Kelurahan Lambung Bukit Kecamatan Pauh dan Kelurahan Lubuk Minturun di Kecamatan Koto Tangah. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa pada umumnya kemiringan lereng di Kota Padang dapat dikatakan memiliki kemiringan yang cukup tinggi dengan dominasi kemiringan sebesar 15% sampai dengan >40% yaitu seluas 45.787,83 hektar atau sebesar 65,87% dari luas Kota Padang.

Dalam perencanaan permukiman umumnya kemiringan lereng yang aman untuk dapat dimanfaatkan adalah kemiringan lereng antara 0-15%, saat ini di Kota Padang kemiringan lereng tersebut seluas 23.722,85 hektar atau sebesar 34,14% dari luas Kota Padang. Kelurahan dengan tingkat kemiringan yang cukup landai tersebut paling luas berada di Kelurahan Batipuh Panjang Kecamatan Koto Tangah, dan pada umumnya hampir seluruh kelurahan di Kecamatan Koto Tangah merupakan daerah dengan tingkat kemiringan lereng sebesar 0-3%. Kelurahan lainnya yang memiliki kemiringan lereng yang cukup landai adalah Kelurahan Gunung Sarik Kecamatan Kuranji, serta beberapa kelurahan lainnya di Kecamatan Kuranji umumnya memiliki kemiringan lereng yang cukup landai. Untuk lebih jelasnya terkait dengan kemiringan lereng di Kota Padang Menurut Kelurahan dapat dilihat pada tabel 2-2 berikut:

Tabel 2- 2 Kondisi Kemiringan Lahan Kota Padang Menurut Kelurahan

Kecamatan	Kelurahan	Kemiringan Lahan					
		0 - 3%	3 - 8%	8 - 15%	15 - 25%	25 - 40%	>40%
Bungus Teluk Kabung	Bungus Barat	183,26	171,61	99,36	200,10	346,47	533,42
	Bungus Selatan	102,21	12,05	44,65	92,23	189,51	64,61
	Bungus Timur	184,52	261,71	221,64	390,24	644,27	1.056,20
	Teluk Kabung Selatan	131,09	75,04	87,31	369,43	774,20	608,29
	Teluk Kabung Tengah	84,11	105,52	109,27	351,08	759,18	642,52
	Teluk Kabung Utara	60,30	55,85	80,92	263,49	312,87	160,52
Bungus Teluk Kabung Total		745,50	681,77	643,15	1.666,57	3.026,51	3.065,56
Koto Tangah	Air Pacah	471,86	15,15	-	-	-	-
	Balai Gadang	582,01	422,79	399,81	1.375,30	2.295,84	1.971,06
	Batang Kabung	240,34	-	-	-	-	-
	Batipuh Panjang	752,35	94,30	29,37	5,89	3,74	0,58
	Bungo Pasang	404,18	6,36	-	-	-	-
	Dadok Tunggul Hitam	366,67	-	-	-	-	-
	Koto Panjang Ikua Koto	592,85	54,68	-	-	-	-
	Koto Pulai	266,26	15,30	-	-	-	-
	Lubuk Buaya	483,16	-	-	-	-	-
	Lubuk minturun	220,01	245,58	386,38	1.366,09	2.972,41	3.940,97
	Padang Sarai	513,90	-	-	-	-	-
	Parupuk Tabing	489,35	-	-	-	-	-
	Pasir Nan Tigo	364,45	-	-	-	-	-
Koto Tangah Total		5.747,37	854,17	815,56	2.747,28	5.272,00	5.912,61

Kecamatan	Kelurahan	Kemiringan Lahan					
		0 - 3%	3 - 8%	8 - 15%	15 - 25%	25 - 40%	>40%
Kuranji	Ampang	132,81	-	-	-	-	-
	Anduring	114,60	-	-	-	-	-
	Gunung Sarik	547,32	65,07	49,00	84,90	113,77	28,95
	Kalumbuk	246,14	6,85	-	-	-	-
	Korong Gadang	383,76	44,09	15,45	9,27	3,51	-
	Kuranji	570,72	193,72	266,13	528,73	828,66	1.134,59
	Lubuk Lintah	179,98	9,68	-	-	-	-
	Pasar Ambacang	296,49	38,71	2,68	-	-	-
	Sungai Sapih	554,60	4,05	5,32	6,11	-	-
Kuranji Total		3.026,42	362,17	338,59	629,01	945,94	1.163,54
Lubuk begalung	Banuaran Nan XX	54,11	15,99	-	-	-	-
	Batung Taba Nan XX	143,76	3,17	2,70	-	-	-
	Cangkeh Nan XX	76,05	-	-	-	-	-
	Gates Nan XX	17,55	11,87	8,43	63,40	230,15	331,05
	Gurun Laweh Nan Dua Puluh	64,61	-	-	-	-	-
	Kampung Baru Nan XX	31,34	16,25	0,02	-	-	-
	Kampung Jua Nan XX	107,48	21,28	12,32	84,03	87,80	31,68
	Koto Baru Nan XX	13,67	39,54	5,67	2,16	-	-
	Lubuk Begalung Nan XX	97,33	10,39	0,93	-	-	-
	Pagambiran Ampalu Nan XX	191,93	45,83	19,80	70,82	195,89	173,69
	Pampangan Nan XX	88,49	18,25	2,49	6,92	36,31	50,28
	Parak Laweh Pulau Air Nan XX	93,06	0,66	-	-	-	-

Kecamatan	Kelurahan	Kemiringan Lahan					
		0 - 3%	3 - 8%	8 - 15%	15 - 25%	25 - 40%	>40%
	Tanah Sirah Nan XX	78,23	6,15	5,12	-	-	-
	Tanjung Aur	2,82	9,13	-	0,72	-	-
	Tanjung Saba Pitameh Nan XX	88,75	16,82	5,74	-	-	-
Lubuk Begalung Total		1.149,18	215,33	63,22	228,05	550,15	586,70
Lubuk Kilangan	Bandar Buat	229,22	167,21	7,54	0,68	-	-
	Batu Gadang	28,74	256,78	353,69	616,55	768,37	1.649,25
	Beringin	62,14	29,59	50,21	80,31	115,44	102,54
	Indarung	14,84	302,63	530,54	231,42	680,53	1.437,26
	Koto Lalang	176,78	64,86	11,94	21,65	8,50	-
	Padang Besi	19,67	51,07	10,37	-	-	-
	Tarantang	62,88	26,63	21,19	82,49	108,13	80,08
Lubuk Kilangan Total		594,27	898,77	985,49	1.033,10	1.680,96	3.269,12
Nanggalo	Gurun Laweh	132,43	-	-	-	-	-
	Kampung Lapai Baru	117,40	-	-	-	-	-
	Kampung Olo	91,42	5,25	1,92	0,17	-	-
	Kurao Pagang	300,28	-	-	-	-	-
	Surau Gadang	199,42	1,79	-	-	-	-
	Tabing Bandar adang	90,64	9,51	-	1,53	2,53	-
Nanggalo Total		931,58	16,55	1,92	1,70	2,53	
Padang Barat	Belakang Tangsi	38,01	22,91	-	-	-	-
	Berok Nipah	41,29	4,81	0,12	-	-	-
	Flamboyan Baru	51,09	-	-	-	-	-
	Kampung Jao	66,36	-	-	-	-	-
	Kampung Pondok	31,34	18,03	-	-	-	-

Kecamatan	Kelurahan	Kemiringan Lahan					
		0 - 3%	3 - 8%	8 - 15%	15 - 25%	25 - 40%	>40%
	Olo	52,10	-	-	-	-	-
	Padang Pasir	62,54	-	-	-	-	-
	Purus	54,13	-	-	-	-	-
	Rimbo Kaluang	62,16	-	-	-	-	-
	Ujung Gurun	39,63	-	-	-	-	-
Padang Barat Total		498,65	45,75	0,12	-	-	
Padang Selatan	Air Manis	82,00	24,92	11,16	14,29	76,43	61,75
	Alang Laweh	21,80	0,29	-	-	-	-
	Batang Arau	7,57	7,22	3,12	9,21	28,49	7,57
	Belakang Pondok	27,79	5,32	-	-	-	-
	Bukit Gado-Gado	15,39	-	11,04	50,44	47,73	39,84
	Mata Air	17,55	69,53	14,94	24,23	55,09	97,61
	Pasa Gadang	29,92	10,87	-	0,01	0,68	-
	Ranah Parak Rumbio	16,83	6,60	-	-	-	-
	Rawang	74,82	17,61	5,24	7,52	36,27	21,66
	Seberang Padang	50,81	3,31	-	0,98	11,92	6,09
	Seberang Palinggam	8,07	-	-	14,46	20,99	59,42
	Teluk Bayur	33,12	6,70	0,30	6,23	70,31	23,65
Padang Selatan Total		385,68	152,36	45,79	127,38	347,91	317,59
Padang Timur	Andalas	123,38	-	-	-	-	-
	Ganting Parak Gadang	81,46	0,52	-	-	-	-
	Jati	90,85	-	-	-	-	-
	Jati Baru	76,52	-	-	-	-	-
	Kubu Marapalam	76,08	-	-	-	-	-
	Kubu Parak Karakah	228,74	-	-	-	-	-
	Parak Gadang	69,85	4,61	-	0,04	-	-

Kecamatan	Kelurahan	Kemiringan Lahan					
		0 - 3%	3 - 8%	8 - 15%	15 - 25%	25 - 40%	>40%
	Timur						
	Sawahan	53,89	-	-	-	-	-
	Sawahan Timur	72,02	-	-	-	-	-
	Simpang Haru	40,56	-	-	-	-	-
Padang Timur Total		913,35	5,14	0,04		-	
Padang Utara	Air Tawar Barat	148,15	-	-	-	-	-
	Air Tawar Timur	68,11	-	-	-	-	-
	Alai Parak Kopi	162,30	-	-	-	-	-
	Gunung Pangilun	118,65	30,15	2,31	11,51	20,21	-
	Lolong Belanti	115,23	-	-	-	-	-
	Ulak Karang Selatan	90,53	-	-	-	-	-
	Ulak Karang Utara	85,22	-	-	-	-	-
Padang Utara Total		788,18	30,15	2,31	11,51	20,21	
Pauh	Binuang Kampung Dalam	151,77	7,53	-	-	-	-
	Cupak Tangah	146,50	61,79	1,58	-	-	-
	Kapala Koto	102,44	149,86	6,87	2,18	3,62	-
	Koto Luar	24,42	116,62	41,83	71,24	145,10	65,34
	Lambung Bukit	66,06	144,30	400,44	1.134,83	3.360,93	3.763,06
	Limau Manis	19,86	222,50	248,03	411,85	983,26	2.043,92
	Limau Manis Selatan	47,68	143,55	258,66	250,37	369,89	576,28
	Piai Tangah	234,31	4,24	-	-	-	-
	Pisang	183,53	-	-	-	-	-
Pauh Total		976,56	850,39	957,41	1.870,47	4.862,80	6.448,60
KOTA PADANG TOTAL		15.756,74	4.112,54	3.853,56	8.315,11	16.709,01	20.763,72

Sumber: RDTR Kota Padang Tahun 2023 – 2043

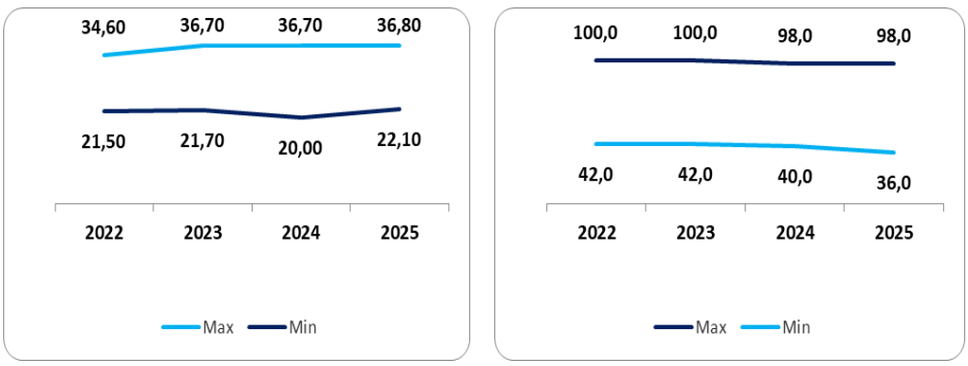
Keterangan : - (data = 0)

2. Klimatologi

Secara geografis, posisi Kota Padang terletak di pesisir pantai barat pulau Sumatera sehingga memiliki suhu dan kelembapan yang cukup tinggi. Dalam kurun tahun 2025, suhu rata-rata Kota Padang berkisar antara 26,9°C-28,7°C dengan suhu maksimum 36,80°C di bulan Juni dan suhu minimum sebesar 22,10°C di bulan Januari.

Kelembapan maksimum Kota Padang pada tahun 2025 berada di angka 98% dan kelembapan minimum sebesar 36%. Sementara itu, kelembapan rata-rata berkisar di angka 72%-80%. Data len andesit dan Tuf kap perubahan suhu dan kelembapan Kota Padang dapat di lihat pada gambar berikut :

Gambar 2- 2 Suhu Udara dan Kelembapan Kota Padang Tahun 2022 – 2025



Suhu Udara (°C) Kelembaban (%)

Sumber: Kota Padang Dalam Angka, 2026

Secara rata-rata Kota Padang memiliki normal curah hujan pada kategori menengah dengan curah hujan/harinya sebesar 100-300 mm. Namun, pada bulan November curah hujan Kota Padang berada pada kategori sangat tinggi dimana rata-rata curah hujan/hari >600 mm^3 yaitu 1.159,20 mm^3 dengan hari hujan pada selama 23 hari sehingga menimbulkan bencana hidrometrologi.

Dampak dari bencana hidrometrologi yang terjadi pada tahun 2025 yang lalu dimuat dalam dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang berisikan usulan kegiatan penanganan terhadap objek terdampak, yang memuat usulan kegiatan prioritas untuk ditangani pada RKPD Kota Padang tahun 2027.

Sepanjang tahun 2025 Kota Padang memiliki rata-rata curah hujan yang cukup tinggi sebesar 453,05 mm^3 dengan rata-rata jumlah hari hujan sebanyak 18,58 hari. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan November dan terendah pada bulan Mei. Hari hujan terbanyak terjadi pada bulan September dan Desember, sedangkan hari hujan terkecil terjadi pada bulan

Mei. Jumlah curah hujan dan hari hujan selama tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2- 3 Jumlah curah hujan dan hari hujan Tahun 2025

Bulan	Tahun 2025	
	Curah hujan (mm)	Hari hujan (Hari)
Januari	540,20	18
Februari	340,20	18
Maret	580,00	23
April	374,70	24
Mei	231,60	8
Juni	422,90	13
Juli	382,70	14
Agustus	370,80	18
September	451,10	25
Oktober	170,30	14
November	1.159,20	23
Desember	412,90	25
Rata-Rata	453,05	18,58

Sumber: Kota Padang Dalam Angka, 2026

3. Kondisi Geologi

Kondisi geologi Kota Padang yang menjadi ibukota Provinsi Sumatera Barat berdasarkan peta Geologi Lembang Padang, Sumatera (Kastowo, Gerhard W.Leo, S.Gafoer & T.C.Amin, 1996), ditutupi oleh batuan dari umur muda ke tua sebagai berikut :

- Aluvium (Qal) : terdiri dari lanau, pasir dan kerikil umumnya terdapat di dataran pantai,termasuk endapan rawa di sebelah utara Tiku, sebelah barat daya Lubuk Kalung dan sebelah Timur Padang, setempat kadang-kadang terdapat sisa-sisa batu apung tuf
- Kipas Aluvium (Qf) : Kebanyakan terdiri dari hasil rombakan andesit berasal dari gunung api strato, Qtau. Permukaannya ditutupi oleh bongkah-bongkah andesit. Kipas-kipas alluvium yang terdapat pada lereng-lereng gunung api Kwarter dipetakan sebagai hasil-hasil dari gunung api tersebut
- Aliran yang tak teruraikan (QTau) : Lahar, fanglomerat dan endapan-endapan koluvium yang lain
- Andesit danTuf (QTia) : berselingan dan/atau andesit sebagai inklusi di dalam tuf
- Tuf Kristal yang telah mengeras (QTi) : Terdapat di bagian selatan, pejal dan tersemen baik. Di dekat sungai buluh berwarna muda danterdiri dari matriks yang banyak mengandung serabut-serabut gelas dengan fragmen-fragmen kuarsa, plagioklas dan fragmen-fragmen batuan gunungapi yang berkomposisi menengah hingga asam dengan garis tengah sampai 10 cm. Lebih ke selatan berwarna kelabu muda sampai kelabu tua kehijauan yang komposisinya lebih mafik, matriks umumnya klontik dan tuf

mengandung fragmen- fragmen batuan berkomposisi menengah sampai mafik disamping kuarsa dan plagioklas, terdapat kontak selaras maupun kontak sesar antara tuf dan andesit dimana sumber tuf tidak diketahui.

- Batu Gamping Jura (R) : terdiri dari batu gamping kompak putih sampai kelabu kebiruan, pejal dan berongga berumur jura. Dapat dikorelasikan dengan Anggota Batu gamping Formasi Siguntur (Jsl) di lembah Painan dan bagian Timur Laut Muara Siberut.

4. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan adalah pemanfaatan lahan yang dilakukan oleh manusia terhadap lingkungan hidup untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Penggunaan lahan Kota Padang didominasi oleh hutan lebat yang merupakan hutan lindung dengan luas ±35.448,00 Ha atau 51,01% dari luas administrasi Kota Padang. Dilihat dari posisi dan fungsi Kota Padang yang sangat strategis sebagai pusat pertumbuhan kota dan semakin bertambah jumlah penduduk Kota Padang setiap tahunnya, maka tentunya membutuhkan lahan/ruang untuk menampung jumlah penduduk dan aktivitas/kegiatan perkotaan seperti kebutuhan lahan untuk perumahan, perdagangan dan jasa. Sementara itu, luas lahan di Kota Padang tidak bertambah, sehingga secara tidak langsung akan berdampak terjadinya alih fungsi lahan dari non terbangun menjadi lahan terbangun. Data BPS menunjukkan dari tahun 2021-2024, terjadi peningkatan penggunaan lahan untuk tanah perumahan dari 7.839,76 menjadi 8.011,58 Ha, namun kemudian menurun di tahun 2025 menjadi 6.749,16 Ha. Untuk lahan sawah beririgasi mengalami peningkatan dari 4.133,31 Ha di tahun 2021, menjadi 5.844,44 Ha di tahun 2025. Untuk lebih jelasnya perkembangan penggunaan lahan di Kota Padang dari Tahun 2021 sampai Tahun 2025 dilihat tabel berikut 2-4 berikut:

Tabel 2- 4 Luas Tanah Menurut Jenis Penggunaannya di Kota Padang, Tahun 2021 – 2025

No.	Jenis Penggunaan	2021		2022		2023		2024		2025		+/-
		Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	
1	Hutan Lebat	35.448,00	51	35.448,00	51	35.448,00	51	35.448,00	51	45.365,07	67,43	0
2	Kebun Campuran	13.625,50	19,6	13.625,50	19,6	13.625,50	19,6	13.625,50	19,6	0	0	0
3	Perumahan	7.839,76	11,3	7.882,36	11,3	8.005,06	11,5	8.011,58	11,5	6.749,16	10,03	0,18
4	Sawah Beririgasi	4.133,31	5,95	4.090,71	5,89	3.968,01	5,71	3.961,49	5,7	5.844,44	8,69	-0,18
	Perkebunan	2.147,50	3,09	2.147,50	3,09	2.147,50	3,09	2.147,50	3,09	2.237,34	3,33	0
6	Semak	1.415,10	2,04	1.415,10	2,04	1.415,10	2,04	1.415,10	2,04	4.429,45	6,58	0
7	Kebun Sayuran	1.343,00	1,93	1.343,00	1,93	1.343,00	1,93	1.343,00	1,93		0	0
8	Ladang	939,47	1,35	939,47	1,35	939,47	1,35	939,47	1,35	1.281,85	1,91	0
9	Jasa	756,96	1,09	756,96	1,09	756,96	1,09	756,96	1,09		0	0
10	Industri	773,32	1,11	773,32	1,11	773,32	1,11	773,32	1,11	398,55	0,59	0
11	Sungai dll	387,99	0,56	387,99	0,56	387,99	0,56	387,99	0,56	552,37	0,82	0
12	Perusahaan	270,3	0,39	270,3	0,39	270,3	0,39	270,3	0,39	0	0	0
13	Kolam Ikan	100,8	0,15	100,8	0,15	100,8	0,15	100,8	0,15	0	0	0
14	Jalan Arteri dan	135	0	135	0	135	0	135	0	0	0	0
15	Rawa	120	0,17	120	0,17	120	0,17	120	0,17	12,64	0,02	0
16	Sawah non Irigasi	10,7	0,02	10,7	0,02	10,7	0,02	10,7	0,02	373,74	0,56	0
17	Peternakan	27,33	0,04	27,33	0,04	27,33	0,04	27,33	0,04	36,12	0,05	0
18	Tanah Kota	17,16	0,02	17,16	0,02	17,16	0,02	17,16	0,02	0	0	0
19	Tanah Kosong	2,55	0	2,55	0	2,55	0	2,55	0	0	0	0
20	Danau Buatan	2,25	0	2,25	0	2,25	0	2,25	0	0	0	0
	Jumlah	69.496,00	100	69.496,00	100	69.496,00	100	69.496,00	100	67.280,73	100	

Sumber: Kota Padang Dalam Angka, 2026

B. Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah kota Padang dapat dilihat dari aktivitas ekonomi di wilayah ini, yaitu:

1. Wilayah Potensi Perikanan.

   Wilayah Pelabuhan Bungus dalam RPJPD akan dikembangkan sebagai Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS), dalam skala pelayanan regional dan internasional. PPS ini akan dikembangkan sebagai pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan rencana pengembangan Kawasan Minapolitan Bungus. PPS Bungus sudah dilengkapi prasarana penunjang. Selain itu, ada juga pelabuhan Muara Anai yang direncanakan untuk pengembangan pelabuhan nelayan, aktivitas penangkapan ikan di sekitar kawasan perairan setempat dengan bobot kapal dibawah 30 DWT.

2. Wilayah Potensi Pertanian.

   Ruang untuk pengembangan budi daya pertanian kota diarahkan pada lokasi-lokasi yang memiliki saluran-saluran irigasi teknis, antara lain Kecamatan Pauh, Kuranji, Bungus Teluk Kabung, dan Koto Tangah. Upaya untuk mempertahankan kawasan pertanian kota tidak hanya dalam rangka ketahanan pangan namun juga sebagai bagian penataan lanskap kota, membatasi terjadinya urbanisasi penduduk atau tidak terjadinya perpindahan mata pencaharian penduduk dari pertanian ke lainnya, sehingga pertanian tetap terjaga antara lahan terbangun dan lahan tidak terbangun. Hutan Lindung dan Hutan Suaka di Kota Padang juga harus dijaga kelestariannya sebagai kawasan penyangga dan pembatas antara kawasan lindung dan kawasan budi daya.

3. Wilayah Potensi Pariwisata.

   Potensi wisata yang ada meliputi wisata alam, budaya, bahari, belanja, kuliner, sejarah dan wisata konveksi. Pengembangan wisata kuliner, belanja dan konveksi direncanakan terintegrasi dengan kawasan perdagangan dan jasa. Sedangkan wisata alam budaya dan sejarah direncanakan terintegrasi pada wisata kuliner. Rincian kawasan tersebut adalah sebagai berikut :

   - Kawasan pariwisata alam.

     Pantai Padang, Gunung Padang dan Pantai Air Manis, Sungai Pisang, Pantai Pasir Jambak, Pulau-Pulau Kecil, dan Taman Hutan Raya (THR) Bung Hatta.

   - Kawasan pariwisata budaya

     Kawasan kota lama yaitu kawasan Pondok dan kawasan Muaro, permukiman tradisional/adat nagari adat di Kecamatan Bungus, Koto Tangah, Pauh dan Kuranji;

- Kawasan Agrowisata

  Kecamatan Koto Tangah dan Kecamatan Pauh banyak sebelah Timur berbatasan dengan perbukitan yang pada beberapa lokasi telah dimanfaatkan untuk Kawasan agrowisata

- Wilayah Potensi Industri Kecil dan Menengah (IKM).

  Potensi IKM di kota Padang dikembangkan untuk menampung kegiatan ekonomi skala kecil dan menengah. Sentra IKM yang ada di Kota Padang terpusat di Kecamatan Lubuk Kilangan, Lubuk Begalung dan Koto Tangah.

- Wilayah Potensi Pertambangan

  Pengembangan area tambang skala besar berlokasi di Kecamatan Lubuk Kilangan sebagai penghasil semen (PT. Semen Indonesia). Potensi tambang lainnya seperti galian non logam skala kecil berada pada sebagian besar Kecamatan.

- Wilayah potensi perdagangan.

  Sebagai ibukota provinsi, Kota Padang berada pada posisi strategis sebagai pusat perdagangan karena memiliki pelabuhan laut Teluk Bayur, Terminal tipe A di Anak Aia dan Bandara Internasional Minangkabau yang tidak jauh dari Kota Padang. Kota Padang memiliki 1 unit Pasar Raya dan 16 unit pasar rakyat serta beberapa pusat perbelanjaan modern.

- Wilayah potensi pendidikan.

  Kota Padang memiliki beberapa Perguruan Tinggi Negeri di antaranya, Universitas Andalas di Kecamatan Pauh, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol di Kecamatan Koto Tangah dan Universitas Negeri Padang di Kecamatan Padang Utara serta Perguruan Tinggi Swasta yang tersebar di beberapa kecamatan. Dengan demikian, Kota Padang telah menjadi kota tujuan pendidikan secara nasional, yang juga diminati oleh calon mahasiswa dari negara lain.

C. Wilayah Rawan Bencana

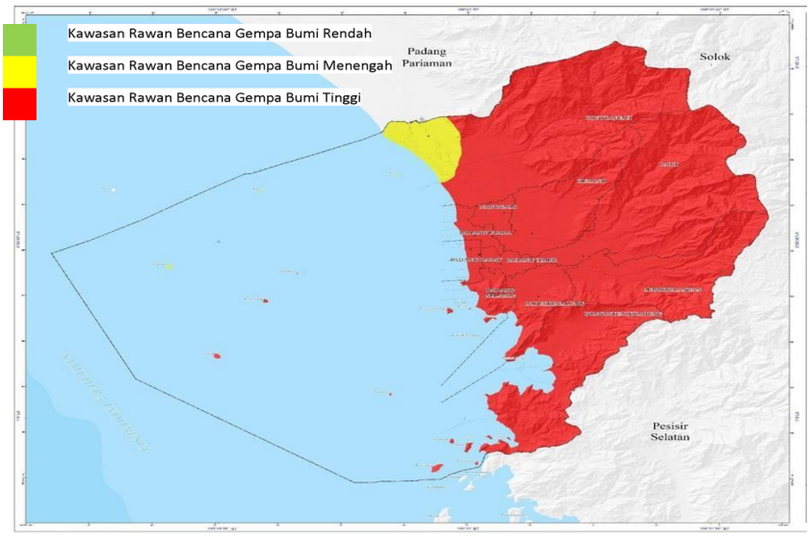
Kota Padang merupakan salah satu kota yang rawan terhadap bencana gempa bumi dan tsunami disebabkan letak Kota Padang berada pada dua lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia. Selain itu bencana yang sering terjadi adalah kebakaran, pohon tumbang, longsor, abrasi pantai dan banjir karena hujan atau naiknya permukaan air laut.

1. Gempa Bumi

   Data kejadian Gempabumi dari BMKG memperlihatkan lokasi pusat-pusat gempa di perairan Kota Padang tersebar merata, dengan pusat gempa lebih banyak di perairan antara Pulau Enggano dan daratan Pulau Sumatera. Frekuensi kejadian

gempa pada periode tahun 1963 hingga 2009 terjadi peningkatan, dengan jumlah gempa terjadi 3 sampai 16 kali pertahun dalam kurun 1963- 1975, frekuensi hingga 2 kali kejadian dalam tahun 1984 hingga 1995, frekuensi hingga 4 kali kejadian dalam kurun 1995 hingga 2009.

Gambar 2- 3 Sebaran Wilayah Rawan Gempa Bumi Menurut Kelurahan di Kota Padang



Sumber: RDTR Kota Padang Tahun 2023 - 2043

Kebanyakan sumber-sumber gempa tersebut berada pada kedalaman 33 hingga 100 km, dengan magnitudo terbesar 7,9 Skala Richter. Zona tektonik aktif yang terbentuk dari penujaman lempeng di sebelah Barat Pulau Sumatera juga dapat dilihat dari adanya gunung api aktif yang muncul di sepanjang jalur patahan aktif di bagian sisi Barat Pulau Sumatera yang bergerak geser kanan *(dextral strike slip fault)*. Jalur patahan Sumatera yang juga biasa disebut dengan Patahan Semangko sepanjang 1.650 km, menyebabkan blok sebelah Barat Sumatera bergerak ke Utara sedangkan yang di sebelah Timur bergerak ke Selatan serta melahirkan kepulauan busur dalam *(inner island arc)* seperti Pulau Nias, Mentawai, dan Enggano. Gempa vulkanik yang terjadi di Kota Padang disebabkan posisi kota berada di dekat 3 gunung api aktif, yaitu Gunung Talang, Marapi dan Tandikek.

Tabel 2- 5 Sebaran Wilayah Rawan Gempa Bumi Menurut Kelurahan di Kota Padang

Kecamatan		Kelurahan	Kawasan Rawan Bencana Gempa bumi Menengah (Ha)	Kawasan Rawan Bencana Gempa bumi Tinggi (Ha)
Bungus Teluk Kabung		Bungus Barat	-	1.534,23
		Bungus Selatan	-	505,26
		Bungus Timur	-	2.758,57
		Teluk Kabung Selatan	-	2.045,37
		Teluk Kabung Tengah	-	2.051,68
		Teluk Kabung Utara	-	933,95
	Bungus Teluk Kabung Total		-	9.829,07
Koto Tangah		Air Pacah	-	487
		Balai Gadang	88,11	6.958,70
		Batang Kabung	203,58	36,76
		Batipuh Panjang	791,89	94,34
		Bungo Pasang	19,58	390,97
		Dadok Tunggul Hitam	-	366,67
		Koto Panjang Ikua Koto	-	647,53
		Koto Pulai	112,28	169,28
		Lubuk Buaya	483,16	-
		Lubuk Minturun	-	9.131,45
		Padang Sarai	513,9	-
		Parupuk Tabing	-	489,35
		Pasir Nan Tigo	364,45	-
	Koto Tangah Total		2.576,95	18.772,04
Kuranji		Ampang	-	132,81
		Anduring	-	114,6
		Gunung Sarik	-	889,01
		Kalumbuk	-	252,98
		Korong Gadang	-	456,08
		Kuranji	-	3.522,55
		Lubuk Lintah	-	189,66
		Pasar Ambacang	-	337,88
		Sungai Sapih	-	570,08
	Kuranji Total		-	6.465,66

Kecamatan		Kelurahan	Kawasan Rawan Bencana Gempa bumi Menengah (Ha)	Kawasan Rawan Bencana Gempa bumi Tinggi (Ha)
Lubuk Begalung		Banuaran Nan Duapuluh	-	70,11
		Batung Taba Nan Duapuluh	-	149,63
		Cangkeh Nan Duapuluh	-	76,05
		Gates Nan Duapuluh	-	662,46
		Gurun Laweh Nan Dua Puluh	-	64,61
		Kampung Baru Nan Duapuluh	-	47,6
		Kampung Jua Nan Duapuluh	-	344,59
		Koto Baru Nan Duapuluh	-	61,05
		Lubuk Begalung Nan Duapuluh	-	108,65
		Pagambiran Ampalu Nan Duapuluh	-	697,97
		Pampangan Nan Duapuluh	-	202,74
		Parak Laweh Pulau Air Nan Duapuluh	-	93,71
		Tanah Sirah Nan Duapuluh	-	89,49
		Tanjung Aur	-	12,66
		Tanjung Saba Pitameh Nan Duapuluh	-	111,31
	Lubuk Begalung Total		-	2.792,64
Lubuk Kilangan		Bandar Buat	-	404,65
		Batu Gadang	-	3.673,38
		Beringin	-	440,22
		Indarung	-	3.197,22
		Koto Lalang	-	283,72
		Padang Besi	-	81,11
		Tarantang	-	381,4
	Lubuk Kilangan Total		-	8.461,70
Nanggalo		Gurun Laweh	-	132,43
		Kampung Lapai Baru	-	117,4
		Kampung Olo	-	98,75

Kecamatan		Kelurahan	Kawasan Rawan Bencana Gempa bumi Menengah (Ha)	Kawasan Rawan Bencana Gempa bumi Tinggi (Ha)
		Kurao Pagang	-	300,28
		Surau Gadang	-	201,21
		Tabing Bandar Gadang	-	104,21
	Nanggalo Total		-	954,28
Padang Barat		Belakang Tangsi	-	60,92
		Berok Nipah	-	46,22
		Flamboyan Baru	-	51,09
		Kampung Jao	-	66,36
		Kampung Pondok	-	49,37
		Olo	-	52,1
		Padang Pasir	-	62,54
		Purus	-	54,13
		Rimbo Kaluang	-	62,16
		Ujung Gurun	-	39,63
	Padang Barat Total		-	544,52
Padang Selatan		Air Manis	-	270,55
		Alang Laweh	-	22,08
		Batang Arau	-	63,2
		Belakang Pondok	-	33,11
		Bukit Gado-Gado	-	164,44
		Mata Air	-	278,95
		Pasa Gadang	-	41,47
		Ranah Parak Rumbio	-	23,44
		Rawang	-	163,1
		Seberang Padang	-	73,11
		Seberang Palinggam	-	102,94
		Teluk Bayur	-	140,32
	Padang Selatan Total		-	1.376,71
Padang Timur		Andalas	-	123,38
		Ganting Parak Gadang	-	81,99
		Jati	-	90,85
		Jati Baru	-	76,52
		Kubu Marapalam	-	76,08

Kecamatan		Kelurahan	Kawasan Rawan Bencana Gempa bumi Menengah (Ha)	Kawasan Rawan Bencana Gempa bumi Tinggi (Ha)
		Kubu Parak Karakah	-	228,74
		Parak Gadang Timur	-	74,51
		Sawahan	-	53,89
		Sawahan Timur	-	72,02
		Simpang Haru	-	40,56
	Padang Timur Total		-	918,53
Padang Utara		Air Tawar Barat	-	148,15
		Air Tawar Timur	-	68,11
		Alai Parak Kopi	-	162,3
		Gunung Pangilun	-	182,82
		Lolong Belanti	-	115,23
		Ulak Karang Selatan	-	90,53
		Ulak Karang Utara	-	85,22
	Padang Utara Total		-	852,35
Pauh		Binuang Kampung Dalam	-	159,29
		Cupak Tangah	-	209,86
		Kapala Koto	-	264,97
		Koto Luar	-	464,55
		Lambung Bukit	-	8.869,63
		Limau Manis	-	3.929,42
		Limau Manis Selatan	-	1.646,42
		Piai Tangah	-	238,55
		Pisang	-	183,53
	Pauh Total		-	15.966,22
	KOTA PADANG TOTAL		2.576,95	66.933,72

Sumber: RDTR Kota Padang Tahun 2023-2043

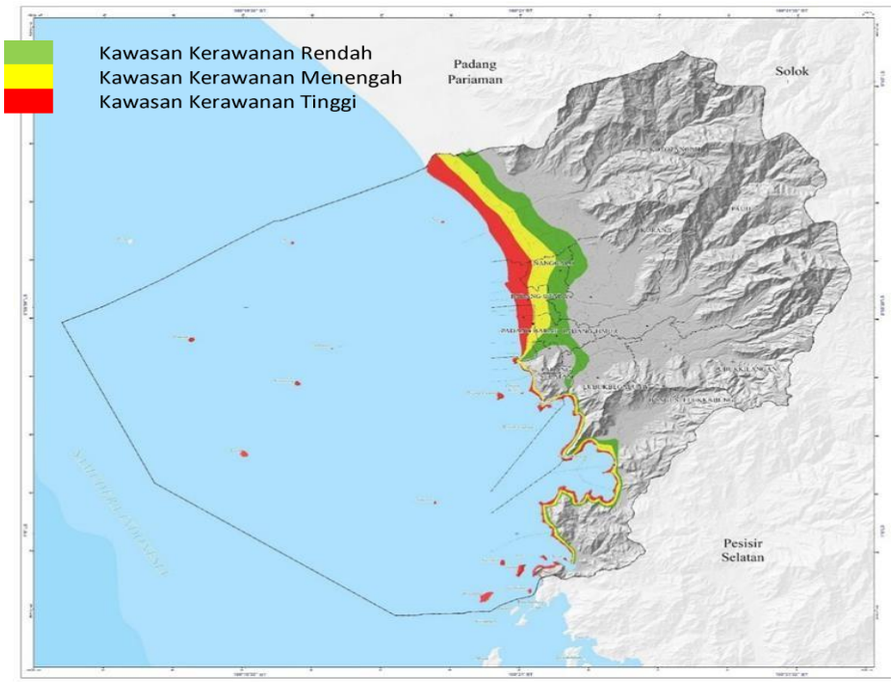
Keterangan: - (data = 0)

2. Gelombang Tsunami

Letak Kota Padang yang berada di Pantai Barat Sumatera, yang berbatasan langsung dengan laut terbuka (Samudera Hindia) dan zona tumbukan aktif dua lempeng menjadikan Padang salah satu kota paling rawan bahaya gelombang Tsunami. Gempa tektonik sepanjang daerah subduksi dan adanya seismik aktif, dapat mengakibatkan gelombang yang luar biasa dahsyat. Dari catatan sejarah bencana, gelombang tsunami

pernah melanda Sumatera Barat pada tahun 1797 dan 1833.

Gambar 2- 4 Wilayah Rawan Bencana Tsunami Menurut Kelurahan di Kota Padang



Sumber: RDTR Kota Padang Tahun 2023 - 2043

Kawasan rawan gelombang pasang dan tsunami dengan risiko sangat tinggi ditetapkan pada kawasan sepanjang pantai yang meliputi wilayah :

1. Kecamatan Bungus Teluk Kabung, kelurahan ; Bungus Barat, Bungus Selatan, Bungus Timur, Teluk Kabung Selatan, Teluk Kabung Tengah, Teluk Kabung Utara.
2. Kecamatan Koto Tangah Kelurahan ; Aie Pacah, Balai Gadang, Batang Kabung, Batipuh Panjang, Bungo Pasang, Dadok Tunggul Hitam, Koto Panjang Ikua Koto, Koto Pulai, Lubuk Buaya, Padang Sarai, Parupuk Tabing, Pasir Nan Tigo
3. Kecamatan Kuranji, Kelurahan ; Ampang, Anduring, Gunung Sarik, Kalumbuk, Korong Gadang, Kuranji, Pasar Ambacang, Sungai Sapih
4. Kecamatan Lubuk Begalung, Kelurahan ; Banuaran Nan XX, Batung Taba Nan XX, Gates Nan XX, Gurun Laweh Nan XX, Lubuk Begalung Nan XX, Pagambiran Ampalu Nan XX, Pampangan Nan XX, Parak Laweh Pulau Aie Nan XX.
5. Kecamatan Lubuk Kilangan, Kelurahan ; Bandar Buat, Batu Gadang, Beringin, Indarung, Koto Lalang, Padang Besi, Tarantang
6. Kecamatan Nanggalo Kelurahan Gurun Laweh, Kampung Lapai Baru, Kampung Olo, Kurao Pagang, Surau Gadang, Tabing Banda Gadang
7. Kecamatan Padang Barat Kelurahan Belakang Tangsi, Berok

Nipah, Flamboyan Baru, Kampung Jao, Kampung Pondok, Olo, Padang Pasir, Purus, Rimbo Kaluang, Ujung Gurun

8. Kecamatan Padang Selatan Air Manis, Alang Laweh, Batang Arau, Belakang Pondok, Bukit Gado-Gado, Mata Air, Ranah Parak Rumbio, Rawang, Seberang Padang, Teluk Bayur

Tabel 2- 6 Wilayah Rawan Bencana Tsunami Menurut Kelurahan di Kota Padang

Kecamatan	Kelurahan	Zona Kerawanan Menengah (Ha)	Zona Kerawanan Rendah (Ha)	Zona Kerawanan Tinggi (Ha)
Bungus Teluk Kabung	Bungus Barat	76,05	98,1	56,5
	Bungus Selatan	57,99	41,84	22,74
	Bungus Timur	-	0,75	-
	Teluk Kabung Selatan	45,38	37,08	219,21
	Teluk Kabung Tengah	174,99	135,77	166,14
	Teluk Kabung Utara	47,02	34,08	33,55
Bungus Teluk Kabung Total		401,43	347,61	498,15
Koto Tangah	Air Pacah	4,59	181,8	-
	Balai Gadang	-	27,66	-
	Batang Kabung	142,66	-	97,68
	Batipuh Panjang	81,93	389,86	-
	Bungo Pasang	200,91	106,13	103,51
	Dadok Tunggul Hitam	201,89	164,77	-
	Koto Panjang Ikua Koto	-	302,97	-
	Koto Pulai	51,28	205,55	-
	Lubuk Buaya	283,19	89,77	110,21
	Lubuk Minturun	195,86	45,05	272,99
	Padang Sarai	127,87	-	361,48
	Parupuk Tabing	-	-	364,45
	Pasir Nan Tigo	1.290,16	1.513,56	1.310,32
Koto Tangah Total		2.580,32	3.027,12	2.620,64
Kuranji	Ampang	-	13,3	-
	Anduring	-	19,36	-
	Gunung Sarik	-	22,57	-
	Kalumbuk	-	310,76	-
	Korong Gadang	-	485,84	-
	Kuranji	-	42,47	-
	Lubuk Lintah	-	1,65	-
	Pasar Ambacang	94,02	57,51	102,35
	Sungai Sapih	-	52,17	-
Kuranji Total		94,02	1.005,63	102,35
Lubuk Begalung	Banuaran Nan Duapuluh	-	3,11	-
	Batung Taba Nan Duapuluh	-	15,36	-
	Cangkeh Nan Duapuluh	-	80,39	-
	Gates Nan Duapuluh	94,02	252,65	102,35

Kecamatan	Kelurahan	Zona Kerawanan Menengah (Ha)	Zona Kerawanan Rendah (Ha)	Zona Kerawanan Tinggi (Ha)
	Gurun Laweh Nan Dua Puluh	-	114,47	-
	Kampung Baru Nan Duapuluh	77,48	-	39,92
	Kampung Jua Nan Duapuluh	78,49	20,26	-
	Koto Baru Nan Duapuluh	101,3	172,8	26,18
	Lubuk Begalung Nan Duapuluh	121	80,21	-
	Pagambiran ampalu Nan Duapuluh	2,55	101,66	-
	Pampangan Nan Duapuluh	380,82	489,4	66,1
	Parak Laweh Pulau Air Nan Duapuluh	28,79	1,06	31,07
	Tanah Sirah Nan Duapuluh	11,25	23,3	3,2
	Tanjung Aur	4,53	-	46,57
	Tanjung Saba Pitameh Nan Duapuluh	55,65	2,1	8,61
Lubuk Begalung Total		955,88	1.356,77	324
Lubuk Kilangan	Bandar Buat	2,13	-	49,97
	Batu Gadang	15,3	-	47,23
	Beringin	-	-	54,13
	Indarung	4,82	-	57,34
	Koto Lalang	5,35	-	34,28
	Padang Besi	136,63	58,44	332,4
	Tarantang	30,68	-	93,02
Lubuk Kilangan Total		194,92	58,44	668,38
Nanggalo	Gurun Laweh	11,9	-	16,54
	Kampung Lapai Baru	4,27	25,61	-
	Kampung Olo	17,02	-	26,24
	Kurao Pagang	-	12,19	-
	Surau Gadang	-	10,46	-
	Tabing Bandar Gadang	-	47,09	-
Nanggalo Total		33,18	95,34	42,78
Padang Barat	Belakang Tangsi	29,06	-	44,79
	Berok Nipah	92,92	129,16	180,59
	Flamboyan Baru	-	84,73	-
	Kampung Jao	-	79,5	-
	Kampung p Ondok	81,19	9,66	-
	Olo	76,52	-	-
	Padang Pasir	-	64,39	-
	Purus	-	14,28	-
	Rimbo Kaluang	-	31,92	-
	Ujung Gurun	17,77	36,12	-
Padang Barat Total		297,46	449,75	225,38
Padang Selatan	Air Manis	-	40,56	-
	Alang Laweh	177,42	431,23	-
	Batang Arau	-	-	148,15
	Belakang Pondok	-	-	68,11

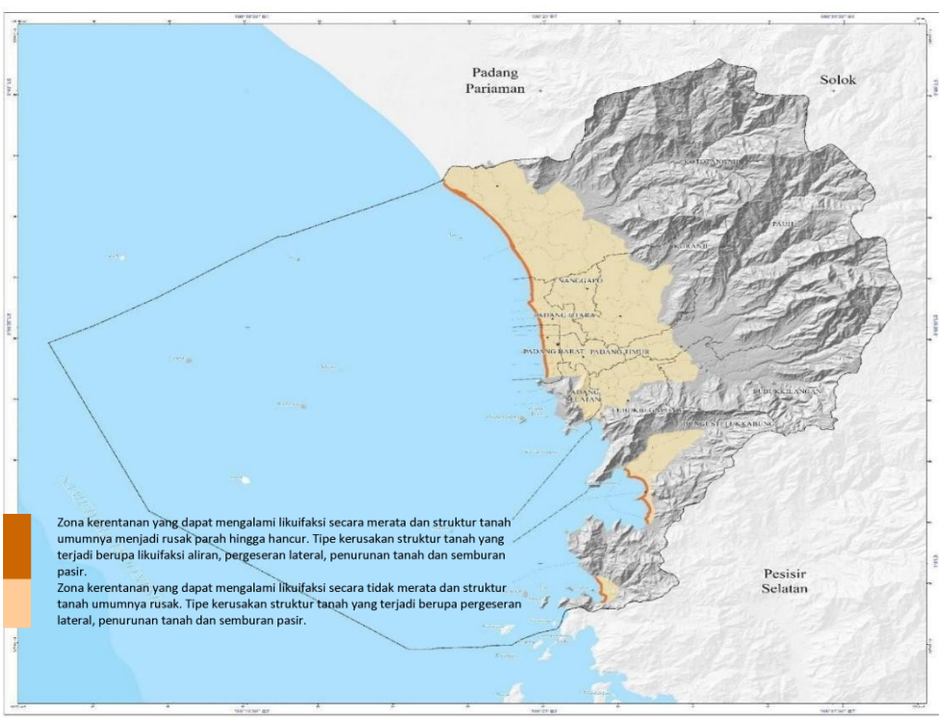
Kecamatan	Kelurahan	Zona Kerawanan Menengah (Ha)	Zona Kerawanan Rendah (Ha)	Zona Kerawanan Tinggi (Ha)
	Bukit Gado-Gado	72,89	89,4	-
	Mata Air	174,34	7,9	0,59
	Pasa Gadang	24,54	-	90,68
	Ranah Parak Rumbio	1,06	-	89,47
	Rawang	-	-	85,22
	Seberang Padang	272,84	97,3	482,22
	Seberang Palinggam	2.846,25	3.805,19	2.972,13
Padang Selatan Total		3.569,35	4.471,58	3.936,56

Sumber: RDTR Kota Padang Tahun 2023 – 2043
Keterangan : - (data = 0)

3. Likuifaksi

Likuifaksi terjadi pada daerah yang tersusun dari endapan alluvium dimana batuannya bersifat material lepas *(loose unconsolidated)*, jenuh air tanah, dengan kemiringan lereng memadai, sehingga bila mendapat guncangan kuat akibat gempa bumi, maka tegangan air pori akan meningkat dan mengakibatkan lapisan pasir tersebut akan cenderung menjadi bubur dan mengakibatkan daya dukung tanah menjadi berkurang dan meluncur mengikuti bidang lengsernya.

Gambar 2- 5 Wilayah Rawan Bencana Likuifaksi Kota Padang



Sumber: RDTR Kota Padang Tahun 2023 - 2043

Rawan bencana likuifaksi di Kota Padang dibagi menjadi 2 (dua) tingkatan, yaitu likuifaksi tinggi dan likuifaksi sedang. Rawan bencana likuifaksi yang terdapat di Kota Padang

umumnya merupakan rawan bencana likuifaksi sedang. Kelurahan dengan kerawanan likuifaksi paling luas adalah kelurahan Batipuh Panjang, Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto yang berada di Kecamatan Koto Tangah. Sedangkan, kelurahan dengan tingkat rawan likuifaksi paling rendah adalah Kelurahan Batang Arau Kecamatan Padang Selatan. Adapun sebaran rawan likuifaksi di Kota Padang menurut kelurahan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2- 7 Wilayah Rawan Bencana Likuifaksi Kota Padang

Kecamatan	Kelurahan	Sedang (Ha)	Tinggi (Ha)
Bungus Teluk Kabung	Bungus Barat	400,82	11,87
	Bungus Selatan	114,74	48,79
	Bungus Timur	494,98	-
	Teluk Kabung Selatan	157,76	53,36
	Teluk Kabung Tengah	4,9	7,47
	Teluk Kabung Utara	67,11	60,19
Bungus Teluk Kabung Total		**1.240,30**	**181,7**
Koto Tangah	Aie Pacah	486,96	-
	Balai Gadang	502,96	-
	Batang Kabung	240,34	-
	Batipuh Panjang	867,14	-
	Bungo Pasang	387,84	22,7
	Dadok Tunggul Hitam	366,67	-
	Koto Panjang Ikua Koto	641,98	-
	Koto Pulai	281,56	-
	Lubuk Buaya	483,16	-
	Lubuk Minturun	231,15	-
	Padang Sarai	510,15	3,75
	Parupuk Tabing	447,88	41,47
	Pasir Nan Tigo	165,46	176,1
Koto Tangah Total		**5.613,26**	**244,1**
Kuranji	Ampang	132,81	-
	Anduring	114,6	-
	Gunung Sarik	579,54	-
	Kalumbuk	252,98	-
	Korong Gadang	445,07	-
	Kuranji	487,37	-
	Lubuk Lintah	189,66	-
	Pasaram Bacang	337,88	-
	Sungai Sapih	570,08	-
Kuranji Total		**3.110,01**	**-**
Lubuk Begalung	Banuaran Nan Duapuluh	70,11	-
	Batung Taba Nan Duapuluh	149,63	-
	Cangkeh Nan Duapuluh	76,05	-
	Gates Nan Duapuluh	11,86	-

Kecamatan	Kelurahan	Sedang (Ha)	Tinggi (Ha)
	Gurun Laweh Nan Duapuluh	64,61	-
	Kampung Baru Nan Duapuluh	47,6	-
	Kampung Jua Nan Duapuluh	99,78	-
	Koto Baru Nan Duapuluh	61,05	-
	Lubuk Begalung Nan Duapuluh	108,65	-
	Pagambiran Ampalu Nan Duapuluh	172,4	-
	Pampangan Nan Duapuluh	104,98	-
	Paraklaweh Pulau Aie Nan Duapuluh	93,71	-
	Tanah Sirah Nan Duapuluh	89,49	-
	Tanjung Aua	12,66	-
	Tanjung Saba Pitameh Nan Duapuluh	111,31	-
Lubuk Begalung Total		**1.273,91**	**-**
Lubuk Kilangan	Bandar Buat	116,77	-
	Beringin	3,4	-
	Koto Lalang	211,04	-
	Tarantang	87,93	-
Lubuk Kilangan Total		**419,14**	**-**
Nanggalo	Gurun Laweh	132,43	-
	Kampung Lapai Baru	117,4	-
	Kampung Olo	98,75	-
	Kurao Pagang	300,28	-
	Surau Gadang	201,21	-
	Tabing Banda Gadang	104,21	-
Nanggalo Total		**954,28**	**-**
Padang Barat	Belakang Tangsi	41,55	19,37
	Berok Nipah	8,12	3,35
	Flamboyan Baru	41,84	9,25
	Kampung Jao	66,36	-
	Kampung Pondok	32,86	-
	Olo	32,95	19,15
	Padang Pasir	62,54	-
	Purus	25,88	28,25
	Rimbo Kaluang	52,57	9,59
	Ujung Gurun	39,63	-
Padang Barat Total		**404,3**	**88,96**
Padang Selatan	Alang Laweh	22,08	-
	Batang Arau	0,13	-
	Belakang Pondok	33,09	-
	Mata Air	229,76	-
	Pasa Gadang	26,47	-

Kecamatan	Kelurahan	Sedang (Ha)	Tinggi (Ha)
	Ranah Parak Rumbio	23,44	-
	Rawang	137,72	-
	Seberang Padang	72,4	-
	Seberang Palinggam	27,46	-
	Teluk Bayur	16,21	-
Padang Selatan Total		**588,77**	**-**
Padang Timur	Andalas	123,38	-
	Ganting Parak Gadang	81,99	-
	Jati	90,85	-
	Jatibaru	76,52	-
	Kubu Marapalam	76,08	-
	Kubu Parak Karakah	228,74	-
	Parak Gadang Timur	74,51	-
	Sawahan	53,89	-
	Sawahan Timur	72,02	-
	Simpang Haru	40,56	-
Padang Timur Total		**918,53**	**-**
Padang Utara	Air Tawar Barat	107,54	40,61
	Air Tawar Timur	68,11	-
	Alai Parak Kopi	162,3	-
	Gunung Pangilun	182,82	-
	Lolong Belanti	102,09	13,14
	Ulak Karang Selatan	75,6	14,93
	Ulak Karang Utara	63,15	22,07
Padang Utara Total		**761,61**	**90,75**
Pauh	Binuang Kampung Dalam	150,22	-
	Cupak Tangah	56,08	-
	Kapala Koto	7,03	-
	Lambung Bukit	0,65	-
	Piai Tangah	238,55	-
	Pisang	183,53	-
Pauh Total		636,08	-
KOTA PADANG TOTAL		**15.920,18**	**605,4**

Sumber: RDTR Kota Padang Tahun 2023 – 2043

Keterangan : - (data = 0)

4. Longsoran Lahan

Sebagian besar daerah Kota Padang berada pada lokasi yang memiliki tingkat bahaya longsoran pada karakteristik lahan dengan kemiringan lahan berkisar 23% – 99%. Bentuk lereng umumnya tidak beraturan *(irreguler)*, dengan panjang lereng yang bervariasi, mulai dari 12 hingga 150 meter. Ketinggian daerah yang sebagian besar berupa kompleks perbukitan vulkanik, dan kompleks pegunungan vulkanik dengan ketinggian relief berkisar antara 500-1.000 meter dari permukaan laut. Tingkat bahaya longsoran lahan tinggi hampir

terdapat pada setiap Kecamatan di Kota Padang, kecuali Kecamatan Padang Utara dan Padang Timur yang daerahnya cenderung datar sehingga diindikasikan tingkat bahaya longsoran lahan rendah pada daerah tersebut. Tingkat risiko longsoran lahan tinggi yang memiliki luasan terbesar terdapat pada Kecamatan Padang Selatan dengan luas 16 Ha.

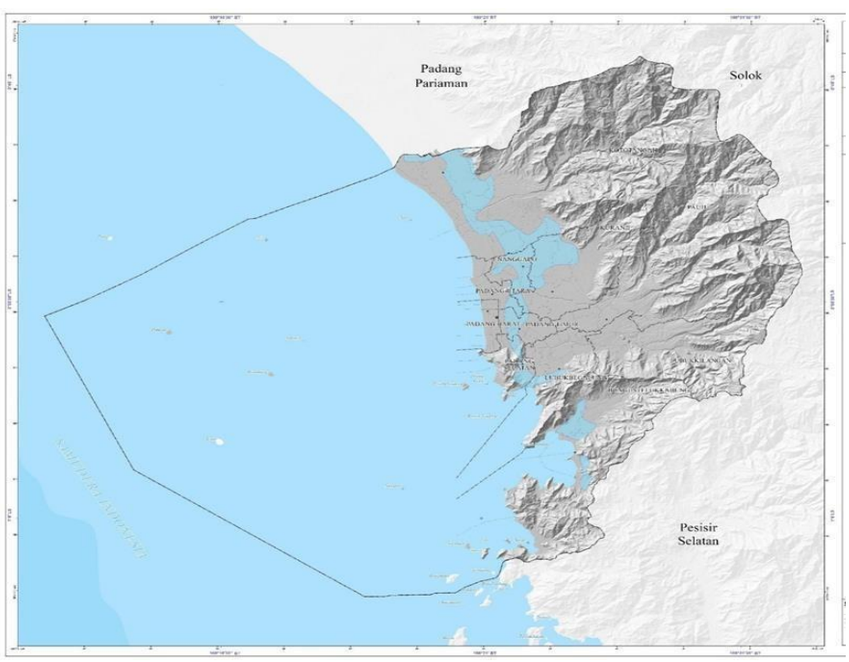
5. Abrasi Pantai

   Abrasi pantai merupakan peristiwa alam yang mengakibatkan terjadinya pengikisan pada pantai sehingga luas daerah pantai menjadi berkurang. Abrasi pantai banyak terjadi pada pantai di Kota Padang karena pantai-pantai tersebut berhubungan langsung dengan Samudera Hindia, terkecuali Pantai Bungus, karena pantai ini terletak pada daerah teluk, maka kecepatan arus sepanjang pantainya cenderung menjadi rendah. Salah satu faktor penyebab tingginya laju abrasi pantai, khususnya di daerah Pasir Parupuk dan Pantai Air Manis.

6. Banjir

   Kota Padang berpotensi mengalami banjir sedang, tinggi bahkan terdapat potensi banjir bandang. Banjir ringan sering terjadi pada musim hujan. Banjir sedang sering terjadi pada wilayah bagian timur yang merupakan daerah perbukitan yang dilalui oleh sungai seperti Batang Bungus, Batang Arau, Batang Kuranji dan Batang Air Dingin serta masih ada lagi 18 sungai lainnya yang mempunyai aliran permanen sepanjang tahun. Selain itu, terdapat beberapa wilayah di Kota Padang yang memiliki bentangan wilayah landai sehingga ketika durasi hujan cukup tinggi dan terjadi pasang laut tinggi, akan mengakibatkan banjir dan genangan air.

Gambar 2- 6 Wilayah Rawan Banjir Kota Padang Menurut Kelurahan



Sumber: RDTR Kota Padang Tahun 2023 - 2043

Kota Padang merupakan daerah yang mempunyai curah hujan yang relatif tinggi dengan rata-rata curah hujan 354,75 mm per bulan dan rata-rata hari hujan 19 hari per bulan, sehingga terjadi luapan sungai dan banjir bandang. Tingkat bahaya banjir ringan bersifat genangan terbesar terdapat pada Kecamatan Koto Tangah dengan luas daerah 790 Ha umumnya disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan kejadian pasang surut air laut. Kejadian banjir di Kota Padang sering bertepatan dengan kejadian pasang naik, sehingga air yang akan mengalir ke laut terhambat karena bertemunya dua massa air, yaitu massa air tawar dan massa air laut ini yang sering menyebabkan banjir ringan yang bersifat genangan. Kelurahan rawan banjir paling luas berada di Kelurahan Batipuh Panjang Kecamatan Koto Tangah, yaitu 797,81 Ha sedangkan kelurahan rawan bencana banjir paling kecil adalah Kelurahan Alang Laweh Kecamatan Padang Selatan yaitu dengan luas 0,17 Ha dan Kelurahan Pasir Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah dengan luas 0,79 Ha. Adapun sebaran wilayah rawan banjir dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2- 8 Wilayah Rawan Banjir Kota Padang Menurut Kelurahan

Kecamatan	Kelurahan	Rawan Banjir (Ha)
Bungus Teluk Kabung	Bungus Barat	275,77
	Bungus Selatan	68,04
	Bungus Timur	122,97
	Teluk Kabung Tengah	59,96
	Teluk Kabung Utara	103,47
Bungus Teluk Kabung Total		**630,21**
Koto Tangah	Aie Pacah	238,05
	Balai Gadang	178,86
	Batan Gkabung	102,01
	Batipuh Panjang	797,81
	Bungo Pasang	213,7
	Dadok Tunggul Hitam	271,02
	Koto Panjang Ikua Koto	125,99
	Koto Pulai	225,91
	Lubuk Buaya	63,91
	Lubuk Minturun	135,1
	Padang Sarai	118,85
	Parupuk Tabing	34,51
	Pasir Nan Tigo	0,79
Koto Tangah Total		**2.506,52**
Kuranji	Ampang	68,97
	Anduring	11,63
	Gunung Sarik	343,36
	Kalumbuk	108,67
	Kuranji	25,66

Kecamatan	Kelurahan	Rawan Banjir (Ha)
	Lubuk Lintah	14,4
	Sungai Sapih	519,4
Kuranji Total		**1.092,09**
Lubuk Begalung	Gates Nan Duapuluh	28,82
	Pagambiran Ampalu Nan Duapuluh	71,91
	Pampangan Nan Duapuluh	89,83
Lubuk Begalung Total		**190,56**
Nanggalo	Gurun Laweh	121,79
	Kampung Lapai Baru	24,39
	Kampung Olo	29,17
	Kurao Pagang	246,4
	Surau Gadang	130,14
	Tabing Banda Gadang	97,38
Nanggalo Total		**649,27**
Padang Selatan	Air Manis	2,65
	Alang Laweh	0,17
	Mata Air	67,84
	Pasa Gadang	19,49
	Ranah Parak Rumbio	7,91
	Rawang	133,8
	Seberang Padang	58,75
	Seberang Palinggam	22,3
	Teluk Bayur	28,37
Padang Selatan Total		**341,29**
Padang Timur	Andalas	43,77
	Ganting Parak Gadang	54,75
	Jati	90,85
	Jatibaru	13,36
	Sawahan	17,24
	Sawahan Timur	71,15
	Simpang Haru	7,84
Padang Timur Total		**298,96**
Padang Utara	Alai Parak Kopi	127,25
	Gunung Pangilun	19,31
Padang Utara Total		**146,56**
KOTA PADANG TOTAL		**5.855,47**

Sumber: RDTR Kota Padang Tahun 2023 - 2043

Dari hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perubahan RPJMD Kota Padang, tingkat risiko bencana di Kota Padang dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2- 9 Tingkat Risiko Bencana Kota Padang

No	Jenis Bahaya	Kelas Bahaya	Kelas Kerentanan	Kelas Kapasitas	Kelas Risiko	Nilai Indeks
1.	Banjir	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang	0,609
2.	Banjir Bandang	Tinggi	Sedang	Rendah	Tinggi	0,713
3.	Cuaca Ekstrim	Tinggi	Sedang	Sedang	Tinggi	0,837
4.	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	Tinggi	Sedang	Sedang	Tinggi	0,67
5.	Gempabumi	Tinggi	Sedang	Sedang	Tinggi	0,864
6.	Kebakaran Hutan dan Lahan	Rendah	Sedang	Rendah	Sedang	0,509
7.	Kekeringan	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	0,615
8.	Tanah Longsor	Tinggi	Sedang	Rendah	Tinggi	0,674
9.	Tsunami	Tinggi	Sedang	Sedang	Tinggi	0,709

Sumber: Dokumen KRB Kota Padang 2023-2027

Dokumen RKPD yang menerjemahkan sasaran pembangunan jangka menengah ke dalam prioritas pembangunan, program, kegiatan, dan kerangka pendanaan daerah juga sinkron dengan dokumen perencanaan teknis lainnya seperti dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Paska Bencana (R3P), untuk memberi kepastian pelaksanaan, dukungan penganggaran, serta keterpaduan antar perangkat daerah dan pemangku kepentingan.

Sinkronisasi dokumen R3P dan RKPD diharapkan bisa memperkuat koordinasi pendanaan yang bersumber dari APBD, APBN, bantuan pemerintah, dunia usaha, maupun sumber pendanaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini penting untuk menghindari duplikasi program, meningkatkan efektivitas pemanfaatan sumber daya, serta mempercepat proses pemulihan wilayah terdampak bencana.

D. Ketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

1. Indeks Ketahanan Pangan

   Ketahanan Pangan daerah merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi daerah sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Pembangunan ketahanan pangan dan gizi dilakukan secara sistemik dengan melibatkan lintas sektor. Pendekatan ini diarahkan untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang memadai melalui produksi pangan domestik dan perdagangan; tercapainya stabilitas ketersediaan dan akses pangan secara

makro-meso dan mikro; tercukupinya kualitas (keragaman dan keamanan pangan) dan kuantitas konsumsi pangan yang didukung oleh perbaikan infrastruktur. Untuk mewujudkan kondisi tersebut, diperlukan dukungan kebijakan ekonomi makro yang mampu mewujudkan stabilitas ekonomi menjamin stabitas pasokan dan harga pangan.

Dalam rangka mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah beserta faktor-faktor pendukungnya, telah dikembangkan suatu sistem penilaian dalam bentuk IKP yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan subsistem yang membentuk sistem ketahanan pangan. Sembilan indikator yang digunakan dalam penyusunan IKP merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Pemilihan indikator yang digunakan dalam IKP didasarkan pada: (i) hasil review terhadap indeks ketahanan pangan global; (ii) tingkat sensitivitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi; (iii) keterwakilan 3 pilar ketahanan pangan; dan (iv) ketersediaan data secara rutin untuk periode tertentu (tahunan) serta mencakup seluruh kabupaten/kota dan provinsi.

Gambar 2- 7 Kerangka Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi



Secara umum nilai IKP Kota Padang lima tahun terakhir berada dalam kategori **sangat tahan**. Terjadinya kontraksi tajam pada tahun 2022 menunjukkan adanya kerentanan sistem ketahanan pangan daerah terhadap guncangan eksternal. Meskipun pemerintah daerah berhasil melakukan akselerasi pemulihan hingga mencapai performa puncak pada tahun 2024, tren penurunan pada tahun 2025 mengindikasikan bahwa instabilitas masih menjadi tantangan utama dalam menjaga keberlanjutan ketahanan pangan. Hal ini memerlukan perhatian khusus terkait konsistensi program ketersediaan pangan dan stabilisasi harga komoditas strategis. Berikut gambaran IKP Kota Padang dari tahun 2021-2025:

Gambar 2- 8 Gambaran IKP Kota Padang dari Tahun 2021-2025

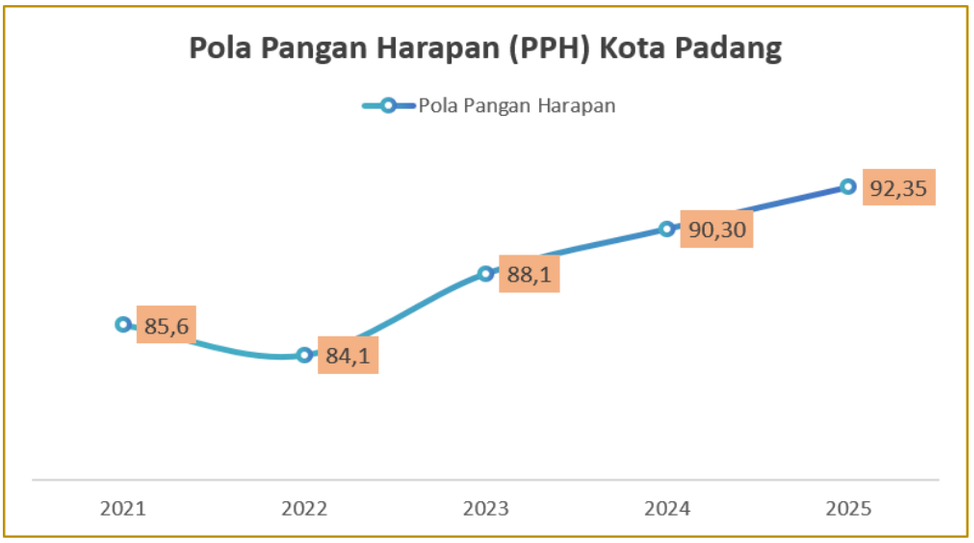


Sumber : Dinas Perikanan Pangan Kota Padang, 2026

Berdasarkan data hasil evaluasi, pergerakan nilai IKP Kota Padang dapat dilihat pada gambar diatas dimana pada tahun 2021, IKP berada pada angka 87,73, Pada tahun 2022, kinerja mengalami kontraksi signifikan dengan penurunan indeks menjadi 84,14, yang sekaligus menjadi titik terendah dalam periode 2021-2025. Pada tahun 2023, tercatat adanya pemulihan kinerja dengan kenaikan indeks menjadi 88,33, puncak performa terjadi pada tahun 2024, di mana indeks mencapai angka tertinggi sebesar 89,63 setelah mengalami fase pemulihan berturut-turut, Namun, pada akhir periode pengamatan tahun 2025, nilai indeks kembali mengalami penurunan terkoreksi menjadi 86,03. Dari gambar diatas juga dapat dilihat bahwa IKP berada dalam range > 74,40. Artinya Daerah sangat tahan pangan, sistem pangan kuat dan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan ketahanan pangan relatif kuat, dengan pasokan beras, hortikultura, dan diversifikasi pangan lokal yang mendukung stabilitas. Namun, tantangan tetap ada di antaranya alih fungsi lahan sawah, risiko iklim, dan keterbatasan pasca panen masih bisa menurunkan skor jika tidak diantisipasi.

Peningkatan dari IKP ini diikuti oleh meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan (keberagaman dan keseimbangan konsumsi pangan penduduk) penduduk Kota Padang pada tahun 2021-2025, yang dapat digambarkan pada grafik di bawah ini:

Gambar 2- 9 Pola Pangan Harapan (PPH) Kota Padang Tahun 2021-2025



Sumber: Dinas Perikanan Pangan Kota Padang, 2026

Grafik di atas menyajikan tren data Pola Pangan Harapan yang mencakup periode dari tahun 2021 hingga 2025. Meskipun sempat terjadi penurunan tipis pada angka indeks di tahun 2022, grafik di atas menunjukkan adanya tren peningkatan yang konsisten setelah periode tersebut. Pada tahun 2023, skor tercatat mencapai 88,1 dan diperkirakan akan terus tumbuh secara berkelanjutan hingga menyentuh angka 92,35 di akhir periode. Secara keseluruhan, data ini menggambarkan optimisme terhadap perbaikan kualitas konsumsi pangan masyarakat di masa mendatang. Kenaikan angka yang stabil ini mencerminkan keberhasilan dalam upaya meningkatkan diversifikasi dan gizi makanan yang dikonsumsi secara luas.

2. Konsumsi Listrik Perkapita

Konsumsi listrik per kapita adalah rata-rata jumlah energi listrik dalam kilowatt-jam (kWh) yang dihabiskan oleh setiap penduduk dalam satu tahun. Metrik ini menjadi indikator penting kemajuan ekonomi, pembangunan energi, dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), konsumsi listrik per kapita nasional Indonesia mencapai **1.584 kWh per kapita**. Capaian ini menunjukkan peningkatan aktivitas ekonomi dan perluasan jaringan listrik, melonjak dari **1.411 kWh** di tahun 2024 dan **1.337 kWh** pada tahun 2023.

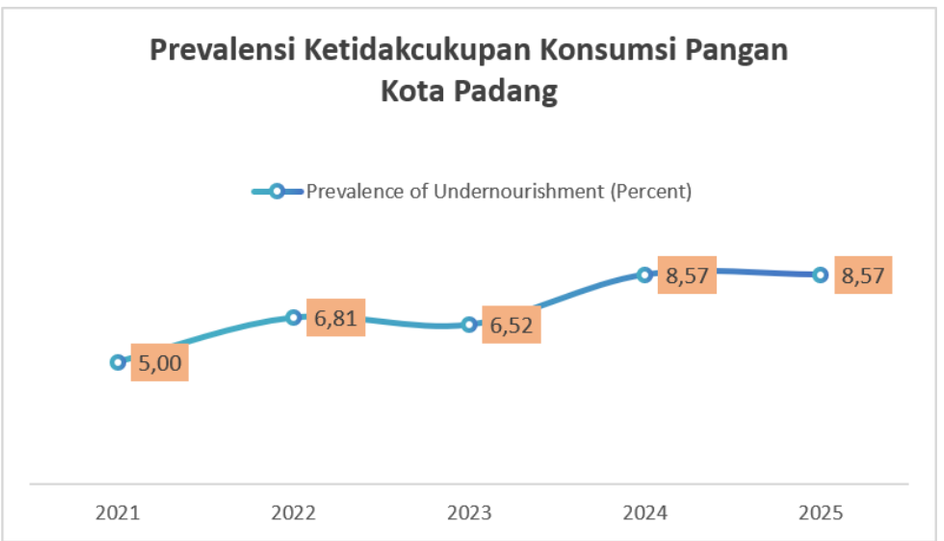
Data spesifik mengenai konsumsi listrik per kapita khusus untuk wilayah Kota Padang pada tahun 2025 belum dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik Kota Padang

3. Prevalansi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)

   Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (atau *Prevalence of Undernourishment* / PoU) adalah persentase penduduk di suatu wilayah yang asupan energi pangannya secara rutin berada di bawah kebutuhan minimum untuk hidup sehat dan aktif.

   peningkatan dari Indeks Ketahanan Pangan (IKP) dan skor Pola Pangan Harapan (PPH) diikuti oleh peningkatan ketidakcukupan konsumsi pangan *(Prevalence of Undernourishment)* yang didefinisikan sebagai suatu kondisi dimana seseorang secara regular mengkonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup untuk menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, aktif dan sehat, dari 5% pada tahun 2021 menjadi 8,57% pada tahun 2025.

Gambar 2- 10 Pravalensi Ketidakcukupan Konsumsui Pangan Kota Padang Tahun 2021-2025



Sumber: Badan Pangan Nasional, 2026

Meski sistem pangan (IKP) dan Skor PPH bisa terlihat membaik, akses rumah tangga terhadap pangan tetap bermasalah. Faktor penyebab bisa berupa inflasi harga pangan, distribusi tidak merata, daya beli masyarakat menurun, atau berkurangnya kapasitas produksi akibat alih fungsi lahan dan menurunnya jumlah petani produktif.

4. Kapasitas Air Baku (m3/detik)

   Kapasitas air baku adalah volume atau debit air dari berbagai sumber (seperti sungai, waduk, atau air tanah) yang tersedia dan dapat dimanfaatkan untuk diolah menjadi air bersih atau air minum. Biasanya, kapasitas ini diukur dalam satuan liter per detik atau meter kubik per detik

   Kapasitas normal produksi air baku Perumda Air Minum Kota Padang adalah **1.800 liter per detik**. Namun, pada periode

puncak krisis bulan November tahun 2025, kapasitas produksi sempat anjlok menjadi **1.200 liter per detik** hingga **1.595 liter per detik** akibat penurunan kualitas air baku pascabencana.

5. Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)

   Berdasarkan data BPS Provinsi Sumatera Barat, persentase rumah tangga di Kota Padang yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak pada tahun 2025 mencapai angka **95,25%**. Angka ini mencakup seluruh sumber air minum layak perkotaan (perpipaan, sumur bor/gali terlindung, dan mata air terlindung) yang diakui dan distandarisasi .

E. Lingkungan Hidup yang Berkualitas

1. Indeks Tutupan Lahan

   Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) adalah metrik yang digunakan di Indonesia untuk mengukur kualitas lingkungan berdasarkan luas tutupan hutan dan vegetasi non-hutan. Skor indeks ini berkisar dari 0 (sangat kurang) hingga 100 (sangat baik). pada tahun 2025 nilai Indeks Tutupan Lahan Kota Padang adalah 80,61 naik 0,17 poin dari target 80,44.

2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

   Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah nilai komposit yang mengukur kondisi lingkungan suatu daerah, ditetapkan pada skala 0 hingga 100. Nilai ini menjadi indikator kinerja pembangunan lingkungan yang sangat penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. pada tahun 2025 nilai IKLH Kota Padang sebesar 80,68 naik 3,32 Poin dari target 77,36.

   Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup menggambarkan bahwa IKLH Kota Padang masuk dalam Kategori Baik. Capaian IKLH tahun 2025 mengalami kenaikan dari tahun 2024 sebesar 3,42 point dari 77,26. Kenaikan ini dipengaruhi oleh Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL) Kota Padang yang masuk dalam kategori tinggi dan masih berada di atas baku mutu.

3. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

   Rumah tangga dengan akses sanitasi aman adalah hunian yang menggunakan fasilitas sendiri, dilengkapi kloset leher angsa, dan limbahnya dibuang ke tangki septik yang disedot minimal sekali dalam 5 tahun (diolah di IPLT) atau tersambung ke sistem pengolahan limbah terpusat (SPALD-T).

   Kota Padang telah membangun Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) Individu dari Tahun 2020 s.d tahun 2024 yang pembiayaannya bersumber dari APBD, APBN, DAK, dan Hibah. Total pembangunan SPALDS yang telah dibangun sekitar 3.735 unit. dan Kota Padang juga telah

memiliki Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Nanggalo yang mendukung pencapaian target sanitasi aman bagi masyarakat kota padang dengan kapasitas 80,6 m3/hari. data persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2- 10 Jumlah Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

	Jumlah Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak				
	2021	2022	2023	2024	2025
Kota Padang	80,13	76,1	78,56	78,22	78,10

Sumber : DPRKPP, 2026

4. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)

   Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%) adalah indikator kinerja yang menghitung persentase volume sampah (dalam ton) yang berhasil direduksi atau dikelola (seperti dikompos, maggot BSF, atau didaur ulang) terhadap total volume timbulan sampah yang dihasilkan.

   Timbulan sampah di Kota Padang mencapai rata-rata 643 hingga 750 ton per hari. Dari total tersebut, sekitar 62,80% merupakan sampah sisa makanan. Saat ini, persentase sampah yang berhasil dipilah dan dikurangi berkisar di angka 21% hingga 40%, sementara sisanya masuk ke Tempat Pengolahan Sampah Terakhir (TPST)

5. Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)

   Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah adalah persentase rumah tangga yang menerima layanan pengumpulan sampah secara rutin dari pintu ke pintu (minimal 2 kali/minggu) atau melalui tempat komunal dengan sampah terpilah

   Tingkat layanan penuh pengumpulan sampah di Kota Padang pada tahun 2025 mencapai **81,32 %**. Hal ini mencakup rumah tangga yang dilayani secara rutin dan terjadwal oleh petugas dari sumber hingga ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

F. Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

1. Indeks Risiko Bencana (IRB)

   Indeks Risiko Bencana (IRB) adalah ukuran yang menunjukkan potensi dampak negatif akibat ancaman bencana di suatu wilayah. Angka ini dihitung berdasarkan perbandingan antara tingkat ancaman (bahaya), kerentanan masyarakat atau infrastruktur, serta kapasitas (ketangguhan) daerah dalam menghadapi potensi bencana.

Tabel 2- 11 Tingkat Risiko Bencana Kota Padang Tahun 2021 - 2025

2021	2022	2023	2024	Realisasi 2025
181,7	179,03	166,99	155,96	185,53

Sumber : BPBD, 2026

Berdasarkan data tabel yang dilampirkan, Indeks Risiko Bencana (IRBI) Kota Padang menunjukkan tren penurunan yang konsisten sejak tahun 2021 hingga mencapai titik terendahnya pada tahun 2024, sebelum akhirnya mengalami lonjakan signifikan pada tahun 2025. Nilai indeks tercatat sebesar **181,7** pada tahun 2021, kemudian turun perlahan menjadi **179,03** (2022), **166,99** (2023), dan menyentuh level paling aman di angka **155,96** pada tahun 2024. Namun, tren positif pemulihan dan penurunan risiko ini berbalik arah secara drastis pada tahun 2025, di mana angka realisasi indeks melonjak tajam ke level **185,53**, yang menjadi angka risiko bencana tertinggi dalam lima tahun terakhir di Kota Padang.

Aspek utama yang melatarbelakangi penurunan risiko bencana pada periode 2021-2024 adalah masifnya penguatan kapasitas daerah dalam manajemen kebencanaan. Selama periode tersebut, Pemerintah Kota Padang bersama BNPB gencar melakukan program mitigasi struktural dan non-struktural, seperti pembangunan *seawall*, penataan jalur evakuasi tsunami, pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana (Kelatana), serta penyempurnaan sistem peringatan dini (*early warning system*). Peningkatan kapasitas kesiapsiagaan masyarakat dan kelembagaan ini berhasil menekan nilai kerentanan secara kumulatif, sehingga meskipun ancaman bahaya fisik (*hazard*) tetap ada, tingkat risiko total di dokumen IRBI regional berhasil diturunkan.

Sebaliknya, lonjakan tajam Indeks Risiko Bencana pada tahun 2025 menjadi **185,53** sangat dipengaruhi oleh anomali cuaca ekstrem berupa fenomena hidrometeorologi basah yang melanda wilayah pesisir Sumatera Barat sepanjang tahun tersebut. Kota Padang berkali-kali menghadapi bencana banjir bandang, tanah longsor di kawasan perbukitan, serta abrasi pantai akibat cuaca buruk dan tingginya intensitas curah hujan, ditambah dengan peningkatan kepadatan paparan aset/permukiman di zona rawan. Frekuensi dan magnitudo bencana alam nyata yang terjadi sepanjang tahun 2025 ini secara otomatis menaikkan variabel bahaya (*hazard*) dan kerentanan (*vulnerability*) dalam penilaian formula indeks, sehingga mengalahkan akumulasi kapasitas mitigasi yang telah dibangun pada tahun-tahun sebelumnya.

2. Persentase Penurunan Emisi GRK (%) (Kumulatif)

Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) adalah upaya mitigasi untuk mengurangi pelepasan gas-gas seperti karbon dioksida (CO_2) dan metana ke atmosfer. Hal ini dilakukan guna mencegah laju pemanasan global dan perubahan iklim ekstrem, dengan cara beralih ke energi terbarukan serta menekan deforestasi.

Pemerintah Kota Padang belum menetapkan persentase target atau capaian penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) secara mandiri di tingkat kota. Namun, Kota Padang mengikuti target dan proyeksi mitigasi perubahan iklim di tingkat provinsi yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatra Barat.

Provinsi Sumatera Barat memproyeksikan persentase penurunan emisi kumulatif Gas Rumah Kaca (GRK) telah mencapai angka 15,22% dalam tren penurunannya, dengan target potensi pengurangan emisi hingga 16,9 juta ton CO_2 ekuivalen pada tahun 2030

3. Persentase Penurunan Emisi GRK (%) (Tahunan)

Persentase Penurunan Emisi GRK Tahunan mengikuti target dan realisasi di Provinsi Sumatera Barat

G. Demografi

1. Jumlah Penduduk

Menurut UUD Pasal 26 tahun 1945, pengertian penduduk adalah sekelompok warga negara yang bertempat tinggal di wilayah tertentu, yang wilayah tersebut dijadikannya domisili atau wilayah sementara dan dapat juga ditinggali secara menetap. Lebih spesifik, lembaga BPS dalam Statistik Indonesia menjelaskan bahwa penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap.

Berdasarkan data dari BPS, Jumlah penduduk Kota Padang Tahun 2025 sebanyak 954.177 jiwa dengan pertumbuhan sebesar 1,26 persen terhadap jumlah penduduk Tahun 2020 sebanyak 909,040 jiwa. Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak berada pada Kecamatan Koto Tangah dan Kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil berada pada Kecamatan Bungus Teluk Kabung.

Tabel 2- 12 Jumlah Penduduk Kota Padang Per-Kecamatan

No	Kecamatan	2021	2022	2023	2024	2025
1	Bungus Teluk Kabung	27.728	28.090	28.788	29.251	29.251
2	Lubuk Kilangan	58.065	58.725	60.614	61.655	61.655

No	Kecamatan	2021	2022	2023	2024	2025
3	Lubuk Begalung	123.565	124.709	128.453	130.410	130.410
4	Padang Selatan	60.969	61.023	62.333	62.758	62.758
5	Padang Timur	77.306	76.963	78.407	78.591	78.591
6	Padang Barat	42.709	42.519	43.200	43.263	43.263
7	Padang Utara	54.853	54.609	55.484	55.564	55.564
8	Nanggalo	58.320	58.183	59.240	59.450	59.450
9	Kuranji	147.283	148.661	153.137	155.485	155.485
10	Pauh	62.167	62.188	63.489	63.886	63.886
11	Koto Tangah	200.483	203.475	209.793	213.854	213.854
TOTAL		**913.448**	**919.145**	**942.938**	**954.177**	**954.177**

Sumber: Kota Padang Dalam Angka, 2026

2. Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk adalah angka yang menunjukkan rata-rata tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Laju pertumbuhan penduduk Kota Padang tahun 2025 sebesar 1,24 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 1,29.

Gambar 2- 11 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Padang Tahun 2021-2025



Sumber: Kota Padang Dalam Angka, 2026

3. Rasio Penduduk

Rasio Penduduk di bagi ke dalam rasio jenis kelamin. Rasio jenis kelamin adalah perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan, biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki per 100 penduduk

perempuan. Berdasarkan data BPS, rasio jenis kelamin di Kota Padang sebesar 100,55 yang berarti terdapat 100-101 penduduk laki-laki setiap 100 orang penduduk perempuan. Perkembangan penduduk dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian dan migrasi. Berikut disajikan data rasio penduduk menurut jenis kelamin di Kota Padang tahun 2021 – 2025 :

Tabel 2- 13 Rasio Penduduk menurut Jenis Kelamin per-Kecamatan tahun 2021 - 2025

No	Kecamatan	2021	2022	2023	2024	2025
1	Bungus Teluk Kabung	105,60	105,61	105,34	105,20	105,07
2	Lubuk Kilangan	101,30	101,35	101,11	101,01	100,89
3	Lubuk Begalung	100,80	100,68	100,32	100,10	99,87
4	Padang Selatan	100,40	100,42	100,17	100,06	99,93
5	Padang Timur	99,30	99,33	98,58	98,33	98,07
6	Padang Barat	98,60	98,58	98,33	98,21	98,08
7	Padang Utara	99,90	99,84	99,58	99,46	99,34
8	Nanggalo	98,80	99,23	99,40	99,71	100,01
9	Kuranji	101,90	102,55	102,26	102,44	102,61
10	Pauh	102,50	102,55	102,36	102,31	102,25
11	Koto Tangah	101,00	100,97	100,64	100,49	100,32
KOTA PADANG		**100,90**	**100,94**	**100,69**	**100,62**	**100,55**

Sumber: Kota Padang Dalam Angka, 2026

4. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk adalah perbandingan jumlah penduduk dengan luas lahan. Secara umum, tingkat kepadatan penduduk *(population density)* adalah perbandingan banyaknya jumlah penduduk dengan luas daerah berdasarkan satuan luas tertentu.

Tingkat kepadatan penduduk di setiap daerah tidak merata karena ada lahan atau wilayah yang kurang cocok untuk dijadikan tempat tinggal. Sementara itu, daerah yang memiliki akses mudah ke pusat industri dan memiliki tanah yang subur cenderung memiliki tingkat kepadatan penduduk yang relatif tinggi.

Penyebaran penduduk dapat dikatakan tidak merata karena terdapat beberapa kecamatan yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Kecamatan dengan kepadatan tertinggi berada pada Kecamatan Padang Timur dan kepadatan terendah berada pada Kecamatan Bungus Teluk Kabung.

Tabel 2- 14 Kepadatan Penduduk Kota Padang Tahun 2021-2025

No	Kecamatan	Kepadatan Penduduk per km²				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Bungus Teluk Kabung	275	279	286	288	295
2	Lubuk Kilangan	675	683	705	704	729
3	Lubuk Begalung	3.998	4.035	4.156	4.151	4.281
4	Padang Selatan	6.079	6.084	6.215	6.208	6.296
5	Padang Timur	9.485	9.443	9.620	9.584	9.660
6	Padang Barat	6.101	6.074	6.171	6.165	6.186
7	Padang Utara	6.789	6.759	6.867	6.859	6.883
8	Nanggalo	7.227	7.210	7.341	7.333	7.389
9	Kuranji	2.565	2.589	2.667	2.665	2.748
10	Pauh	425	425	434	434	439
11	Koto Tangah	863	876	903	906	938

Sumber : Padang Dalam Angka, 2026

5. Komposisi Penduduk (kelompok umur, Jenis Kelamin, Tingkat Pendidikan)

   Komposisi penduduk Kota Padang tahun 2025 menunjukkan bahwa jumlah penduduk tersebar cukup merata pada kelompok usia anak-anak, usia produktif muda, dan usia dewasa. Kelompok umur 0–4 tahun berjumlah 83,09 ribu jiwa dan menjadi salah satu kelompok terbesar, disusul kelompok umur 30–34 tahun sebesar 80,30 ribu jiwa serta kelompok umur 25–29 tahun sebesar 76,30 ribu jiwa. Kondisi ini menggambarkan bahwa Kota Padang masih memiliki struktur penduduk yang relatif muda, dengan jumlah penduduk usia anak dan usia produktif awal yang cukup besar. Data BPS juga menunjukkan bahwa kelompok usia 20–39 tahun memiliki jumlah yang dominan, sehingga kelompok ini menjadi potensi utama dalam pembangunan ekonomi, pendidikan, ketenagakerjaan, dan pelayanan publik.

   Dari sisi jenis kelamin pada setiap kelompok umur, jumlah laki-laki dan perempuan relatif seimbang. Pada kelompok usia muda hingga usia produktif awal, jumlah laki-laki umumnya sedikit lebih tinggi dibandingkan perempuan. Namun, pada kelompok usia lanjut, terutama usia 60 tahun ke atas, jumlah perempuan mulai lebih besar dibandingkan laki-laki. Hal ini terlihat pada kelompok umur 75 tahun ke atas, yaitu perempuan berjumlah 10,91 ribu jiwa, sedangkan laki-laki 7,39 ribu jiwa. Pola tersebut menunjukkan kecenderungan umum bahwa perempuan memiliki proporsi yang lebih besar pada usia lanjut, sehingga pelayanan kesehatan lansia, perlindungan sosial, dan program kesejahteraan perempuan lanjut usia perlu menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan daerah.

Tabel 2- 15 Komposisi Penduduk Berdasarkan Umur, Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan Tahun 2025

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0–4	42,38	40,71	83,09
5–9	39,40	37,36	76,76
10–14	37,25	35,82	73,07
15–19	38,46	35,95	74,41
20–24	37,16	34,60	71,76
25–29	39,12	37,18	76,30
30–34	40,45	39,85	80,30
35–39	38,76	37,80	76,56
40–44	34,88	33,82	68,70
45–49	30,74	30,63	61,37
50–54	27,66	28,96	56,62
55–59	24,65	26,92	51,57
60–64	20,09	22,05	42,14
65–69	15,46	16,94	32,40
70–74	10,00	11,71	21,71
75+	7,39	10,91	18,30
Jumlah	**483,85**	**481,21**	**965,06**

Sumber : Padang Dalam Angka, 2026

Berdasarkan ringkasan jenis kelamin, penduduk Kota Padang tahun 2025 terdiri atas 483,85 ribu jiwa laki-laki atau sekitar 50,14%, dan 481,21 ribu jiwa perempuan atau sekitar 49,86%. Selisih antara laki-laki dan perempuan hanya sekitar 2,64 ribu jiwa, sehingga struktur penduduk menurut jenis kelamin dapat dikatakan hampir seimbang. Keseimbangan ini menunjukkan bahwa kebutuhan pembangunan berbasis gender di Kota Padang perlu diarahkan secara proporsional, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan, maupun perlindungan sosial.

Kondisi jumlah penduduk laki-laki yang sedikit lebih tinggi tidak menunjukkan ketimpangan yang mencolok. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan daerah sebaiknya tidak hanya melihat jumlah penduduk secara umum, tetapi juga memperhatikan kebutuhan spesifik laki-laki dan perempuan pada setiap kelompok usia. Misalnya, pada usia produktif, kebijakan dapat diarahkan pada peningkatan akses kerja dan pelatihan keterampilan. Sementara itu, pada kelompok usia lanjut, perhatian terhadap perempuan lansia menjadi penting karena jumlah perempuan cenderung lebih tinggi pada kelompok umur tersebut.

Sebagian besar pencari kerja di Kota Padang menurut tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan merupakan lulusan Universitas yang mencapai 44,46 persen dan disusul oleh lulusan SMA sebesar 42,28 persen. Jumlah pencari kerja menurut pendidikan tertinggi disajikan pada gambar berikut :

Tabel 2- 16 Persentase Tingkat Pendidikan Tertinggi Penduduk di Kota Padang

Tingkat Pendidikan	Persentase
Tidak/ Belum Pernah Sekolah	22,87
belum Tamat SD	10,38
Tamat SMP/ sederajat	12,03
SMA/ Sederajat	30,66
Diploma (D1/D2/D3)	4
Sarjana (S1-S3)	
S1	10,93
S2	1,11
S3	0,12

Sumber : Profil Pendidikan Kota Padang, Dinas Pendidikan 2024

Berdasarkan tabel tersebut, tingkat pendidikan penduduk Kota Padang tahun 2025 didominasi oleh kelompok SMA/sederajat dengan persentase sebesar 30,66%. Angka ini menunjukkan bahwa jenjang pendidikan menengah atas menjadi tingkat pendidikan yang paling banyak ditempuh atau ditamatkan oleh penduduk. Kondisi tersebut dapat menggambarkan bahwa sebagian besar penduduk telah memiliki bekal pendidikan dasar-menengah yang cukup untuk memasuki dunia kerja, melanjutkan pendidikan tinggi, atau mengikuti pelatihan keterampilan. Selain itu, kelompok SMP/sederajat juga cukup besar, yaitu 12,03%, sehingga secara keseluruhan jenjang pendidikan menengah memiliki peran dominan dalam struktur pendidikan penduduk.

Namun, tabel juga menunjukkan masih adanya proporsi penduduk dengan tingkat pendidikan rendah atau belum menyelesaikan pendidikan dasar. Kelompok tidak/belum pernah sekolah mencapai 22,87%, sedangkan kelompok belum tamat SD sebesar 10,38%. Jika kedua kategori ini digabungkan, persentasenya mencapai 33,25%. Angka tersebut cukup besar dan menunjukkan bahwa masih terdapat bagian penduduk yang belum memiliki akses atau belum menyelesaikan pendidikan dasar. Akan tetapi, apabila data ini mencakup seluruh kelompok umur, kategori tidak/belum pernah sekolah dapat dipengaruhi oleh keberadaan anak usia dini yang memang belum memasuki usia sekolah.

Pada jenjang pendidikan tinggi, penduduk yang menamatkan Diploma (D1/D2/D3) tercatat sebesar 4%. Sementara itu, kelompok Sarjana (S1–S3) jika dijumlahkan terdiri dari S1 sebesar 10,93%, S2 sebesar 1,11%, dan S3 sebesar 0,12%, sehingga totalnya mencapai 12,16%. Dengan demikian, total penduduk yang telah menamatkan pendidikan tinggi, yaitu

Diploma dan Sarjana, mencapai sekitar 16,16%. Angka ini menunjukkan bahwa penduduk berpendidikan tinggi sudah cukup terlihat, tetapi masih lebih kecil dibandingkan kelompok pendidikan menengah dan kelompok pendidikan rendah.

Secara umum, struktur pendidikan penduduk Kota Padang tahun 2025 menunjukkan bahwa pendidikan menengah, khususnya SMA/sederajat, menjadi kelompok terbesar. Hal ini dapat menjadi potensi bagi pembangunan daerah, terutama dalam penyediaan tenaga kerja produktif. Namun, masih besarnya penduduk yang tidak/belum sekolah dan belum tamat SD perlu menjadi perhatian dalam kebijakan pendidikan, terutama melalui perluasan akses pendidikan dasar, program kesetaraan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, tabel yang terlihat belum mencapai total 100% karena jumlah seluruh persentase yang tampak baru sekitar 92,10%, sehingga kemungkinan masih ada kategori pendidikan lain yang belum terlihat atau belum tercantum dalam gambar.

Penurunan capaian indikator dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain meningkatnya kebutuhan hunian seiring pertumbuhan penduduk dan urbanisasi, keterbatasan kemampuan masyarakat berpenghasilan rendah dalam mengakses rumah layak huni, bertambahnya rumah yang mengalami penurunan kualitas fisik akibat usia bangunan maupun dampak bencana, serta masih adanya kawasan permukiman yang memerlukan peningkatan kualitas infrastruktur dasar.

Kondisi tersebut menjadi perhatian dalam penyusunan RKPD Kota Padang Tahun 2027. Pemerintah Kota Padang akan terus mendorong peningkatan akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau melalui rehabilitasi dan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, penataan kawasan permukiman, penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU), pengurangan kawasan kumuh, serta sinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan sektor swasta dalam penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana juga akan diintegrasikan untuk memastikan masyarakat terdampak memperoleh hunian yang aman, layak, dan tangguh terhadap bencana.

Melalui berbagai intervensi tersebut, diharapkan akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau dapat meningkat secara bertahap sehingga mendukung terwujudnya permukiman yang sehat, aman, inklusif, dan berkelanjutan serta berkontribusi terhadap pencapaian target RPJMD Kota Padang Tahun 2025–2029 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), khususnya tujuan mewujudkan kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.

Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2- 17 Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau

Tahun	Realisasi		
	Jumlah Rumah Tangga Hunian Layak (JRTHLT)	Jumlah Rumah Tangga seluruhnya (JRT)	Persentase Rumah Tangga Hunian Layak
2021	223.847,00	274.653,00	81,50
2022	227.592,00	227.534,00	82,01
2023	231.048,00	288.457,00	80,10
2024	232.748,00	294.936,00	78,91
2025	234708.00	297885	78.79

Sumber : DPRKPP, 2026

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Keberhasilan pembangunan merupakan cermin dari keberhasilan pencapaian indikator pembangunan yaitu terwujudnya kesejahteraan ekonomi masyarakat, pembangunan yang merata di berbagai bidang terutama bidang pendidikan, kesehatan, serta terpenuhinya kebutuhan fasilitas publik (infrastruktur).

Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Analisis kinerja untuk fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dilakukan berdasarkan indikator yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dan pemerataan ekonomi.

Kesejahteraan masyarakat pada dasarnya merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas. Indikasi capaian pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Padang diperlihatkan melalui analisis data indikator berikut :

A. Laju Pertumbuhan Ekonomi

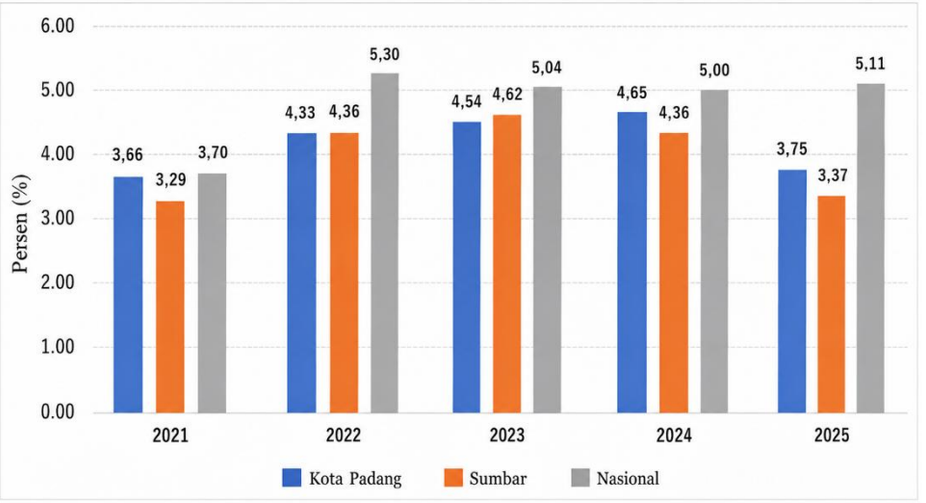
Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu tolak ukur keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai penambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Indikator pertumbuhan ekonomi adalah nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merupakan indikator makro ekonomi daerah. PDRB merupakan jumlah nilai tambah bruto yang timbul akibat adanya berbagai kegiatan ekonomi dan proses produksi yang tercipta di suatu daerah dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi dimiliki daerah tersebut atau bukan.

Ekonomi Kota Padang pada tahun 2025 tumbuh sebesar 3,75

persen, lebih rendah dari capaian tahun 2024 dengan pertumbuhan sebesar 4,65 persen. Jika disandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat (3,37%) dan Nasional (5,11%) maka Kota Padang berada 0,38 poin diatas provinsi dan 1,36 poin dibawah pertumbuhan ekonomi nasional.

Berikut disajikan data Pertumbuhan Ekonomi Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2021-2025 :

Gambar 2- 12 Pertumbuhan Ekonomi Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Nasional Tahun 2021-2025



Sumber: Kota Padang Dalam Angka 2026

Dari data perbandingan diatas, Pertumbuhan ekonomi tahun 2025 menunjukkan performa spasial yang kontras antara akselerasi di tingkat nasional, perlambatan struktural di Provinsi Sumatera Barat, dan ketahanan ekonomi lokal di Kota Padang.

Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2025, Kota Padang berada pada posisi keempat setelah Pasaman Barat, Dharmasraya dan Solok Selatan. Capaian ini lebih rendah dari tahun 2024 dimana Kota Padang berada pada posisi pertama dengan pertumbuhan tertinggi diantara Kab/Kota se Sumatera Barat. Penurunan ini disebabkan salah satunya oleh bencana *hidrometeorologi* yang melanda Kota Padang.

Berikut disajikan perbandingan Laju Pertumbuhan PDRB Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat :

Tabel 2- 18 Perbandingan Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Harga Konstan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, 2021-2025

Kabupaten/Kota	2021	2022	2023	2024	2025
Kabupaten Kep. Mentawai	2,89	4,94	4,04	3,97	2,93
Kabupaten Pesisir Selatan	3,37	4,02	4,19	3,84	3,62

Kabupaten/Kota	2021	2022	2023	2024	2025
Kabupaten Solok	3,32	4,31	4,36	3,91	3,01
Kabupaten Sijunjung	3,15	3,95	4,26	3,89	3,26
Kabupaten Tanah Datar	3,3	4,2	4,44	3,85	2,66
Kabupaten Padang Pariaman	2,18	6,87	5,46	4,57	1,74
Kabupaten Agam	3,7	4,21	4,52	4,12	2,99
Kabupaten Lima Puluh Kota	3,33	4,04	4,55	4,03	3,40
Kaupaten Pasaman	3,39	4,09	4,41	3,95	3,49
Kabupaten Solok Selatan	3,35	4,02	4,57	4,09	3,65
Kabupaten Dharmasraya	3,42	4,28	4,35	3,86	3,79
Kabupaten Pasaman Barat	3,75	4,17	4,33	4,08	3,87
Kota Padang	3,66	4,33	4,54	4,65	3,63
Kota Solok	3,56	4,6	4,81	4,55	3,61
Kota Sawahlunto	2,49	3,98	4,46	4,02	3,38
Kota Padang Panjang	3,46	4,39	4,84	4,52	3,61
Kota Bukittinggi	3,61	4,68	4,79	4,52	3,51
Kota Payakumbuh	3,58	4,52	4,70	4,53	3,55
Kota Pariaman	3,53	4,55	4,79	4,51	3,46
SUMATERA BARAT	3,29	4,36	4,62	4,36	3,37

Sumber: Kota Padang Dalam Angka 2026

B. Tingkat Kemiskinan

Persentase penduduk miskin Kota Padang 5 tahun terakhir terus membaik, ditahun 2021 persentase kemiskinan meningkat dibandingkan tahun 2020, yakni sebesar 4,94 sebagai dampak dari pandemi covid-19 yang berdampak pada perekonomian Masyarakat. Ditahun 2022 hingga tahun 2024 kondisi ini terus membaik, hingga di tahun 2025 persentase kemiskinan turun hingga diangka 3,63. Sehingga secara total dari tahun 2021 hingga tahun 2025 persentase kemiskinan telah turun hingga 1,63 persen. Jika dikonversi ke jumlah penduduk miskin dari tahun 2021 hingga tahun 2025, jumlah penduduk miskin telah berkurang hingga 11.060 jiwa.

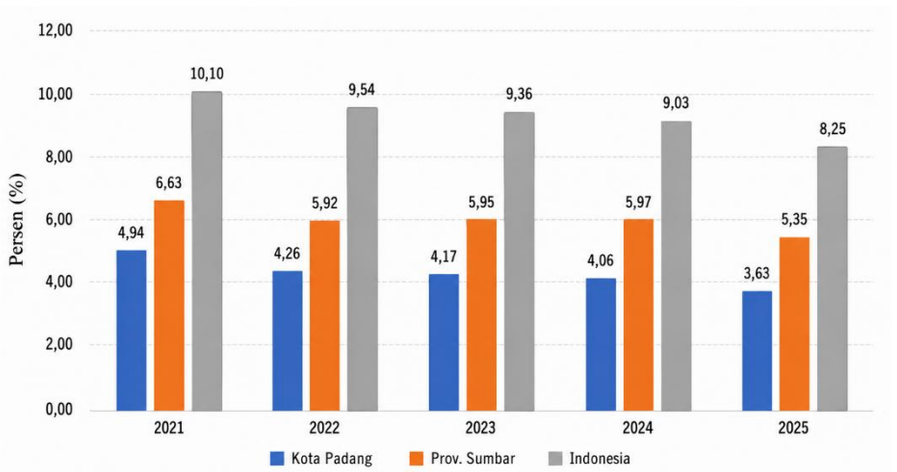
Jika dilihat perbandingan antara persentase penduduk miskin Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional, posisi Kota Padang jauh lebih baik dibandingkan rata rata Provinsi dan nasional. Perbandingan persentase penduduk miskin Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional tahun 2020 – 2025 disajikan pada gambar 2-20.

Salah satu alat ukur untuk menentukan jumlah penduduk miskin adalah garis kemiskinan. Garis kemiskinan menunjukkan jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan

pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilo kalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Berdasarkan data BPS Garis kemiskinan di Kota Padang pada tahun 2025 adalah sebesar Rp 767.616 per kapita per bulan.

Gambar 2- 13 Persentase Penduduk Miskin Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2021-2025



Sumber: Kota Padang Dalam Angka 2026, Statistik Indonesia 2026

Tabel 2- 19 Garis Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin Kota Padang Tahun 2020-2025

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah)	Jumlah (ribu orang)
2021	602.540	48,44
2022	634.581	42,37
2023	698.720	41,97
2024	736.786	41,40
2025	767.616	37,38

Sumber: Kota Padang Dalam Angka, 2026

Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, dari tahun 2020 sampai dengan 2025 jumlah penduduk miskin di Kota Padang menempati urutan teratas. Hal ini juga disebabkan jumlah penduduk di Kota Padang yang menempati urutan teratas dengan jumlah penduduk sebanyak 965.050 jiwa di tahun 2025.

Tabel 2- 20 Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2025

Jumlah Penduduk Miskin	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Rank
Kepulauan Mentawai	13,37	14,31	13,74	13,76	14,19	13,74	9
Pesisir Selatan	35,46	37,41	33,78	35,09	36,05	31,53	3

Jumlah Penduduk Miskin	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Rank
Solok	29,28	30,36	27,16	27,33	28,18	25.23	5
Sijunjung	29,28	16,81	15,07	15,02	14,99	13,55	10
Tanah Datar	15,34	15,89	14,91	14,56	15,00	12,57	12
Padang Pariaman	29,98	30,41	26,44	26,93	26,76	25,08	6
Agam	33,31	34,26	31,33	33,41	34,82	30.57	4
Lima Puluh Kota	26,43	28,51	26	27,02	27,72	24,61	7
Pasaman	20,29	21,57	19,94	19,99	20,01	18,00	8
Solok Selatan	12,39	13,41	11,81	11,91	12,33	11,44	13
Dharmasraya	15,7	17,6	15,08	15,49	15,25	13,52	11
Pasaman Barat	31,64	34,97	32,91	33,52	34,60	31,68	2
Kota Padang	42,17	48,44	42,37	41,97	41,40	37,38	1
Kota Solok	1,99	2,31	2,28	2,35	2,40	2,31	18
Kota Sawahlunto	1,36	1,52	1,47	1,47	1,52	1,79	19
Kota Padang Panjang	2,84	3,28	2,89	2,98	3,06	2,90	17
Kota Bukittinggi	6,01	6,98	6,16	5,78	5,82	5,46	15
Kota Payakumbuh	7,74	8,66	8,08	7,88	7,62	7,37	14
Kota Pariaman	3,66	3,99	3,8	3,91	4,01	3,63	16
Provinsi Sumatera Barat	344,23	370,67	335,22	340,37	345,73	312,35	

Sumber: Kota Padang Dalam Angka, 2026

C. PDRB Per Kapita

PDRB perkapita merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah/daerah. PDRB per kapita ini bisa diperoleh dari hasil bagi antara PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang bersangkutan. Data yang tersaji dalam bentuk ini merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu wilayah. Besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut.

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi penduduk di suatu wilayah. Nilai PDRB per kapita Kota Padang tahun 2021-2025 dapat dilihat dari gambar berikut :

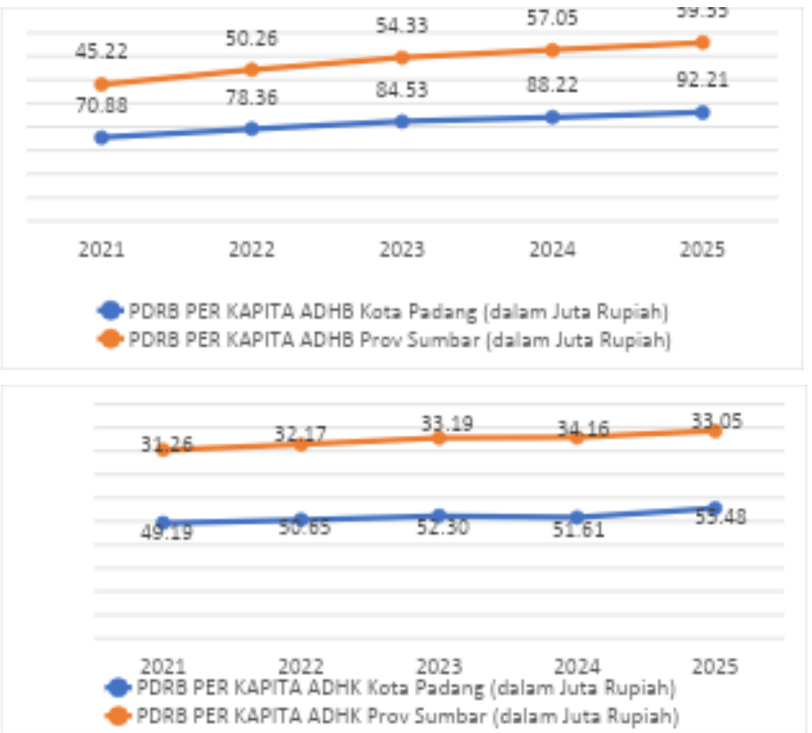
Nilai PDRB per kapita Kota Padang ADHB dan ADHK sejak tahun 2021 hingga 2025 selalu berada di atas nilai PDRB per kapita dari Provinsi Sumatera Barat. Kenaikan PDRB per kapita ADHK tidak setinggi kenaikan yang terjadi pada PDRB per kapita atas dasar harga berlaku, karena tidak di pengaruhi inflasi.

PDRB per kapita ini bisa diperoleh dari hasil bagi antara PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang bersangkutan. Data yang tersaji dalam bentuk ini merupakan salah satu indikator

yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu wilayah. Besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut.

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi penduduk di suatu wilayah. Nilai PDRB per kapita Kota Padang tahun 2021-2025 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2- 14 PDRB Per Kapita Kota Padang dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2025



Sumber: Kota Padang Dalam Angka Tahun 2026

Nilai PDRB per kapita Kota Padang ADHB dan ADHK sejak tahun 2021 hingga 2025 selalu berada di atas nilai PDRB per kapita Provinsi Sumatera Barat. Kenaikan PDRB per kapita ADHK tidak setinggi kenaikan yang terjadi pada PDRB per kapita atas dasar harga berlaku, karena sudah tidak ada pengaruh inflasi.

Pencapaian realisasi PDRB ADHB Perkapita di tahun 2025 yakni sebesar 92,21 dibawah target pada Perubahan RKPD 2025 sebesar 97,52 %.

Kontribusi lapangan usaha lainnya sebagai penyangga struktur ekonomi Kota Padang selama periode 2021-2025 dapat dilihat pada tabel yang disajikan berikut :

Tabel 2- 21 Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kota Padang Tahun 2021-2025 (Persen)

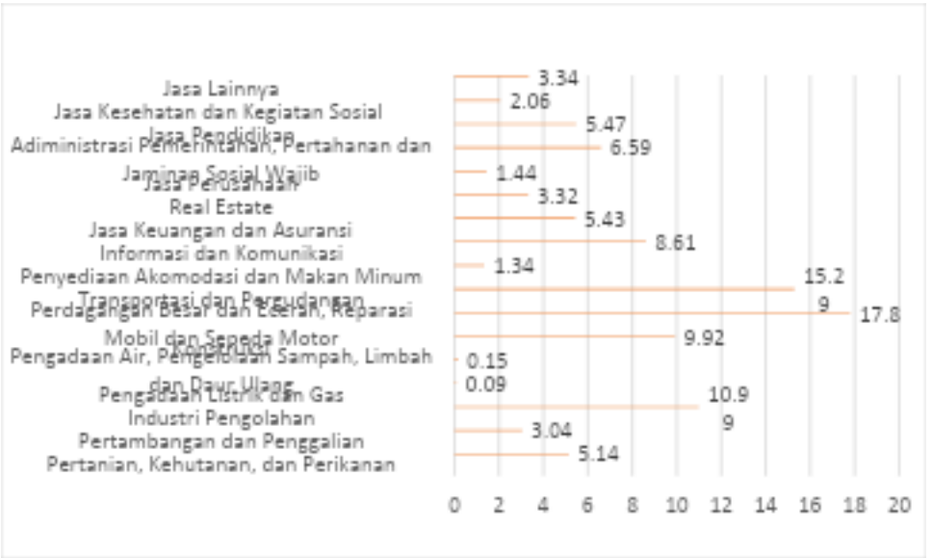
Kode	Lapangan Usaha	2021	2022	2023	2024	2025
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,29	5,12	5,04	4,98	5,14
B	Pertambangan dan Penggalian	3,23	3,11	3,25	3,14	3,04
C	Industri Pengolahan	11,77	11,26	10,88	10,68	10,99
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,1	0,09	0,09	0,09	0,09
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,15	0,15	0,14	0,15	0,15
F	Konstruksi	10,12	10,21	10,46	10,44	9,92
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	16,5	17,42	17,41	17,52	17,80
H	Transportasi dan Pergudangan	15,53	15,66	16,09	15,68	15,29
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,24	1,33	1,37	1,35	1,34
j	Informasi dan Komunikasi	8,34	8,49	8,49	8,48	8,61
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,64	5,6	5,27	5,29	5,43
L	Real Estate	3,11	3,13	3,19	3,32	3,32
M,N	Jasa Perusahaan	1,42	1,4	1,45	1,45	1,44
O	Adiministrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,37	6,9	6,82	7	6,59
P	Jasa Pendidikan	5,54	5,35	5,17	5,19	5,47
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,93	1,9	1,96	2,04	2,06
R,S,T, U	Jasa Lainnya	2,7	2,86	2,95	3,23	3,34
Produk Domestik Regional Bruto		100	100	100	100	100

Sumber: Kota Padang Dalam Angka, 2026

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Padang pada tahun 2025 dihasilkan oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor yaitu mencapai 17,80 persen. Selanjutnya disusul oleh lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 15,29 persen. Dominasi sektor perdagangan dan transportasi ini menegaskan peran strategis Kota Padang sebagai pusat logistik, distribusi, dan perniagaan utama di wilayah pesisir barat Pulau Sumatera dan sangat kontras dengan tingkat provinsi Sumatera Barat secara umum yang masih didominasi oleh sektor pertanian.

Gambar berikut ini menggambarkan kontribusi kategori PDRB di Kota Padang tahun f2025 yang diurut mulai dari nilai kontribusi terbesar hingga nilai kontribusi terkecil dengan menggunakan harga berlaku.

Gambar 2- 15 Kontribusi PDRB ADHB Kota Padang dari Terbesar ke Terkecil Tahun 2025

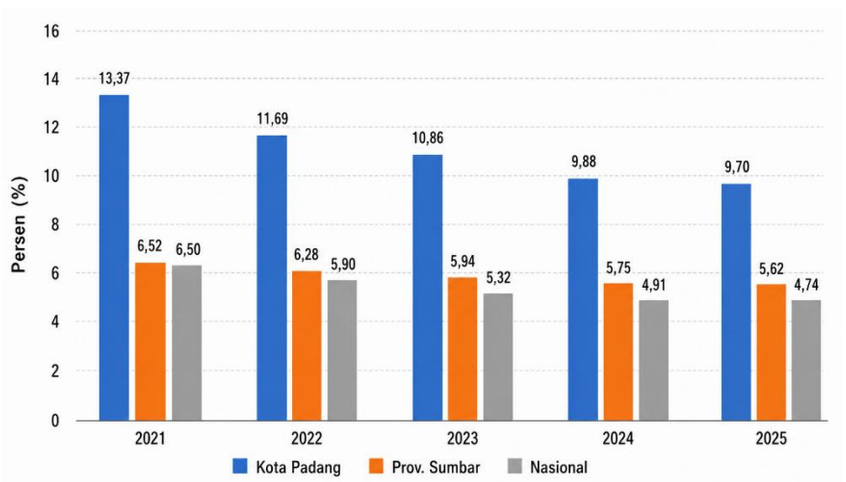


Sumber: Kota Padang Dalam Angka, 2026

D. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT dapat mengindikasikan kesempatan kerja yang ada di wilayah tersebut, semakin tinggi tingkat pengangguran terbuka di suatu wilayah maka semakin kecil kesempatan kerja yang ada di wilayah tersebut.

Gambar 2- 16 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2021-2025



Sumber: BPS Kota Padang Dalam Angka, 2026

Pada tahun 2021 TPT Kota Padang berada pada angka 13,37 akibat pandemi yang melanda dan menurun menjadi 11,69 di tahun 2022. Penurunan disebabkan antara lain oleh pelonggaran PPKM, adaptasi kebiasaan baru, kebijakan

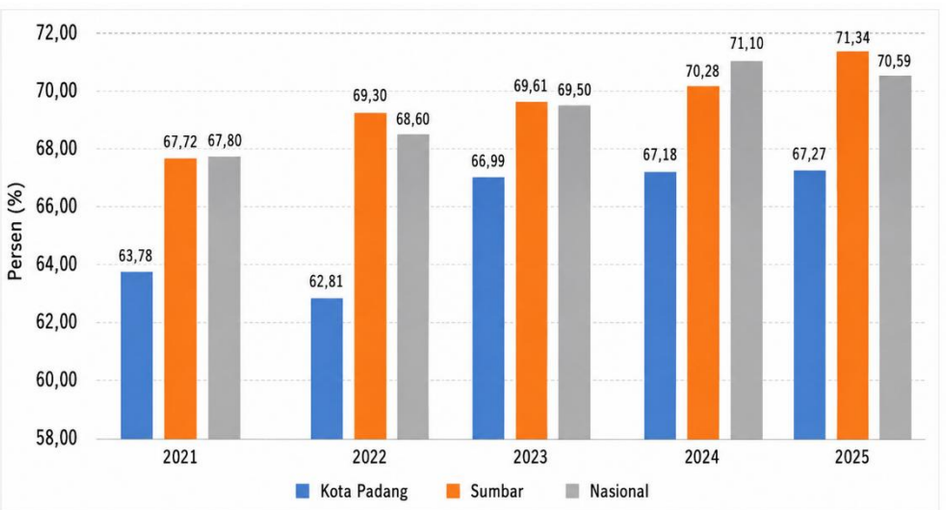
Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kota terhadap pemulihan ekonomi daerah. Pada tahun 2023-2025 TPT terus mengalami penurunan seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian, di tahun 2023 berada di angka 10,86, di tahun 2024 sebesar 9,88 dan tahun 2025 turun menjadi 9,7. Dilihat dari tren 5 tahun terakhir, TPT Kota Padang masih berada di atas Provinsi Sumatera Barat dan Nasional.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang merupakan angkatan kerja.

TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja *(labour supply)* yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian

Tren TPAK Kota Padang dari tahun 2021-2022 bergerak fluktuatif. TPAK Kota Padang tahun 2021 berada pada angka 63,78 dan mengalami penurunan menjadi 62,81 di tahun 2022. Turunnya angka TPAK ini terjadi karena bertambahnya penduduk usia kerja yang masuk pada kelompok bukan angkatan kerja, utamanya semakin bertambahnya penduduk usia kerja yang bersekolah/mahasiswa dan mengurus rumah tangga. Data TPAK Kota Padang Tahun 2021-2025 disajikan pada gambar berikut :

Gambar 2- 17 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2021-2025



Sumber: BPS Kota Padang, 2026

E. Ketimpangan Pendapatan / Gini Ratio

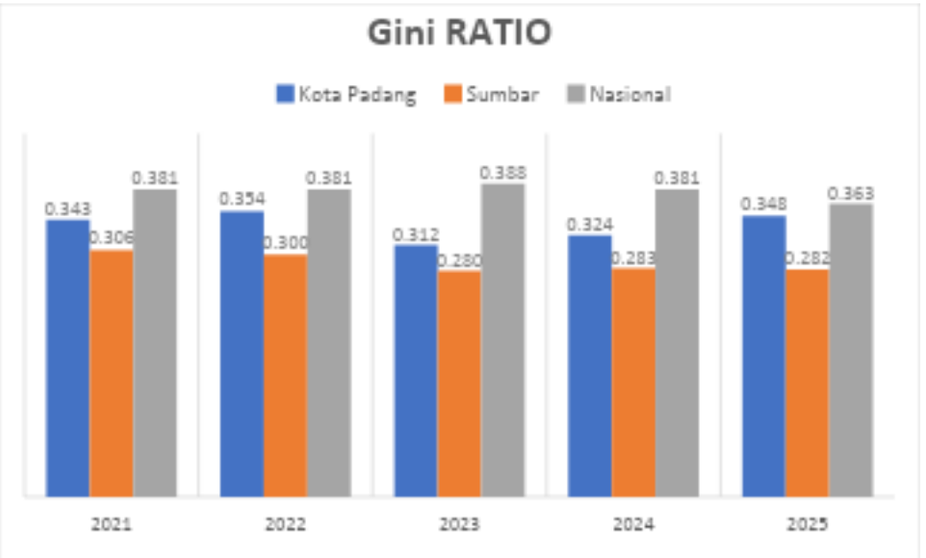
Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk melihat tingkat pemerataan pembangunan adalah indeks gini atau Rasio Gini. Rasio Gini adalah alat mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk. Indikator ini mengukur

tingkat kesenjangan pendapatan penduduk dalam suatu wilayah, dimana nilainya adalah 0 (nol) sampai 1 (satu). Jika nilai rasio gini suatu daerah mendekati nilai 1 maka pendapatan penduduk daerah yang bersangkutan semakin tidak merata, sedangkan jika nilainya mendekati nol, maka pendapatan penduduk daerah yang bersangkutan semakin merata. Berdasarkan nilai rasio gini, terdapat tiga kelompok ketimpangan yaitu: ketimpangan tinggi jika nilai koefisien gini ratio 0,5 atau lebih, sedang jika nilainya antara 0,30-0,49 dan rendah jika kurang dari 0,30.

Berikut perbandingan indeks gini Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir.

Nilai Gini Ratio Kota Padang selama kurun waktu 5 tahun berada pada kisaran 0,35 – 0,31 yang tergolong dalam kategori sedang. Oleh karena itu, tingkat pemerataan distribusi pendapatan perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota Padang agar tidak terjadi kesenjangan ekonomi yang dapat berakibat pada kesenjangan sosial dan menimbulkan konflik karena tujuan akhir dari pembangunan ekonomi adalah kesejahteraan rakyat.

Gambar 2- 18 Perbandingan Index Gini Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2021-2025



Sumber : BPS Kota Padang, 2026

F. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahun *Human Development Report* (HDR). IPM dibentuk oleh 3 (tiga)

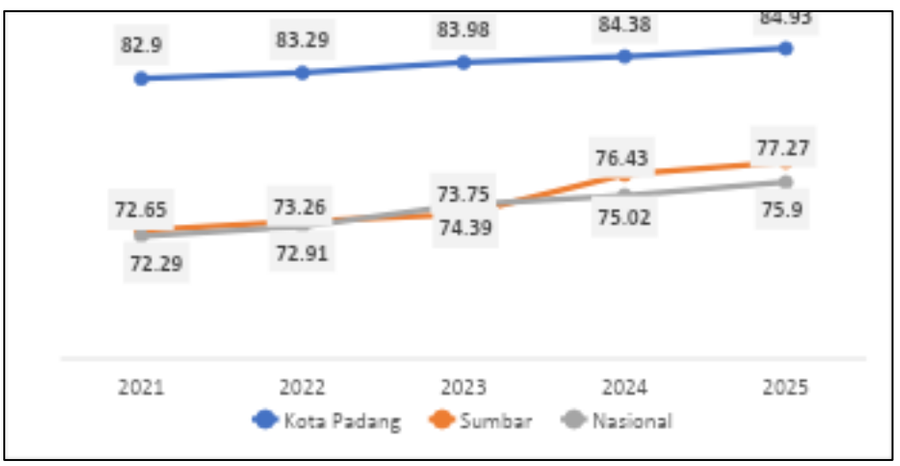
dimensi dasar: umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak.

Berdasarkan konsep Pembangunan Manusia, PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), menetapkan peringkat kinerja pembangunan manusia pada skala 0,0 – 100,0 dengan kategori sebagai berikut:

Tinggi : IPM lebih dari 80,0
Menengah Atas : IPM antara 66,0 79,9
Menengah Bawah : IPM antara 50,0 – 65,9
Rendah : IPM kurang dari 50,0

Perkembangan nilai IPM Kota Padang, dibandingkan dengan kondisi Provinsi Sumatera Barat dan Indonesia dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2- 19 Nilai IPM Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan Indonesia Tahun 2021-2025



Sumber: BPS Kota Padang, 2026

Pencapaian IPM Kota Padang dalam 5 tahun terakhir masuk ke dalam kategori Tinggi dengan angka capaian > 80. Pencapaian ini berada di atas pencapaian Provinsi Sumatera Barat dan Nasional. Hal ini menunjukkan bahwa bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya. Jika dibandingkan nilai IPM Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, nilai IPM Kota Padang tetap berada di urutan teratas dari 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dalam 5 tahun terakhir.

Tabel 2- 22 Perbandingan Nilai IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2025

NO	Kabupaten/Kota	2021	2022	2023	2024	2025
1	Kepulauan Mentawai	61,35	62,19	63,13	66,67	67,62
2	Pesisir Selatan	70,03	70,84	71,44	72,87	73,72
3	Solok	69,24	70,02	70,63	72,29	73,26

NO	Kabupaten/Kota	2021	2022	2023	2024	2025
4	Sijunjung	67,86	68,69	69,65	72,88	73,73
5	Tanah Datar	72,46	73,29	73,98	76,49	77,04
6	Padang Pariaman	70,76	71,63	72,61	74,9	75,71
7	Agam	72,57	73,29	73,98	75,08	76,04
8	Lima Puluh Kota	69,68	70,28	70,7	72,51	73,43
9	Pasaman	66,77	67,41	68,13	70,61	71,57
10	Solok Selatan	69,23	69,71	70,58	73,17	74,01
11	Dharmasraya	71,76	72,3	73,04	74,82	75,70
12	Pasaman Barat	68,76	69,57	70,19	72,78	73,69
13	Kota Padang	82,9	83,29	83,58	84,38	84,93
14	Kota Solok	78,41	79,23	79,58	80,06	80,90
15	Kota Sawahlunto	72,88	73,73	74,42	76,68	77,05
16	Kota Padang Panjang	77,97	78,78	79,26	80,6	81,32
17	Kota Bukittinggi	80,7	81,42	81,78	82,61	83,05
18	Kota Payakumbuh	79,08	79,53	79,97	80,76	81,62
19	Kota Pariaman	77,07	77,65	78,13	80,49	81,27

Sumber: BPS Kota Padang, 2026

G. Kesehatan untuk Semua

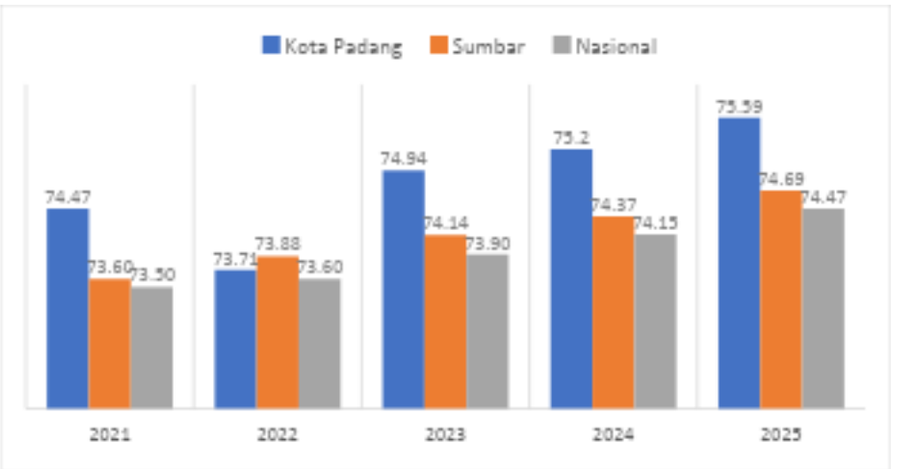
Kesehatan untuk Semua merupakan salah satu aspek fundamental dalam pembangunan daerah yang bertujuan mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, dan memiliki kualitas hidup yang tinggi. Pembangunan kesehatan diarahkan pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata, mudah diakses, serta didukung oleh upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif secara berkesinambungan. Selain itu, pembangunan kesehatan juga berfokus pada pengendalian penyakit, peningkatan status gizi masyarakat, perlindungan kesehatan ibu dan anak, serta perluasan cakupan jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk. Dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesehatan tersebut, Pemerintah Kota Padang menetapkan beberapa indikator utama yang menggambarkan kondisi kesehatan masyarakat sekaligus menjadi tolok ukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan sektor kesehatan. Adapun indikator yang digunakan dalam mengukur kinerja pembangunan pada aspek Kesehatan untuk Semua meliputi:

1. Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)

Angka Harapan Hidup adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

Dilihat dari indikator angka harapan hidup, tampak bahwa usia penduduk Kota Padang semakin lama semakin meningkat yang mengindikasikan keberhasilan program dan kegiatan di bidang kesehatan. Angka harapan hidup di Kota Padang tahun 2025 terus meningkat, menjadi sebesar 75,59%. Hal ini memperlihatkan bahwa upaya pemerintah Kota Padang untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat telah berhasil dicapai.

Gambar 2- 20 Angka Harapan Hidup Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2021-2025

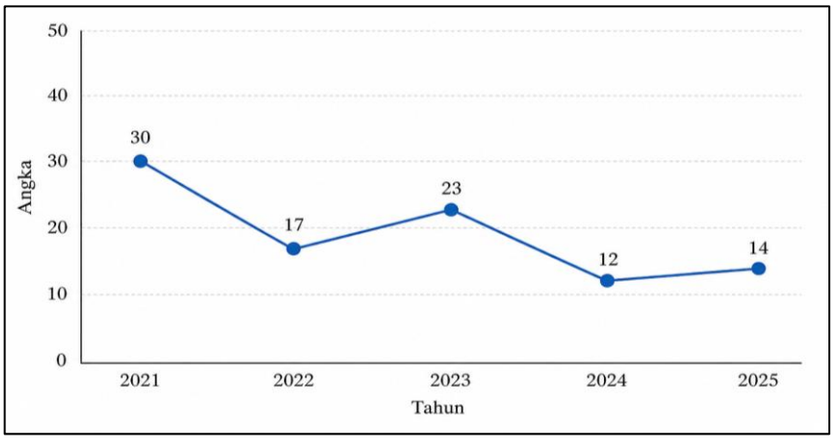


Sumber: BPS Kota Padang, 2025

2. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator utama dalam mengukur derajat kesehatan masyarakat, khususnya kualitas pelayanan kesehatan ibu selama masa kehamilan, persalinan, dan nifas. Semakin rendah angka kematian ibu menunjukkan semakin baik akses dan mutu pelayanan kesehatan maternal yang tersedia.

Gambar 2- 21 Realisasi Angka Kematian Ibu Kota Padang Tahun 2021 - 2025



Sumber: BPS Kota Padang, 2025

Perkembangan Angka Kematian Ibu (AKI) Kota Padang selama Tahun 2021–2025 menunjukkan nilai yang cenderung menurun meskipun masih mengalami fluktuasi. AKI tercatat sebesar 30 pada Tahun 2021, menurun menjadi 17 pada Tahun 2022, kemudian meningkat menjadi 23 pada Tahun 2023. Selanjutnya, AKI kembali menurun signifikan menjadi 12 pada Tahun 2024 dan sedikit meningkat menjadi 14 pada Tahun 2025. Secara keseluruhan, AKI berhasil diturunkan sebesar 53,3 persen dibandingkan Tahun 2021.

3. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)

Capaian penanganan prevelansi stunting di Kota Padang tahun sudah baik ditunjukkan oleh data e-PPGBM tahun 2021 - 2025, namun sedikit berbeda dengan data SSGI yang menunjukkan kenaikan pada tahun tersebut. Data penanganan stunting kota padang tahun 2021-2025 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2- 23 Capaian Penanganan Stunting Kota Padang Tahun 2021-2025

Tahun	Target		Capaian	
	SSGI	e-PPGBM	SSGI	e-PPGBM
2021	21,10%	8%	18.9	7.09
2022	18,40%	7%	19,5	4,69
2023	16%	7%	24,2	2,65
2024	14%	6,50%	20,6	2,53
2025	17,90%	2,55	Tidak ada survey	2,52

Sumber: Dinas Kesehatan, 2026

Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dihitung berdasarkan sampel balita di Kota Padang. Dari seluruh balita diambil sampel 740 orang, kemudian diperiksa status tinggi badan, berat badan, kondisi ekonomi, pendidikan orang tua, sanitasi dll sedangkan Elektronik Pencatatan Dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM) adalah suatu aplikasi yg dibuat oleh kementerian kesehatan yang

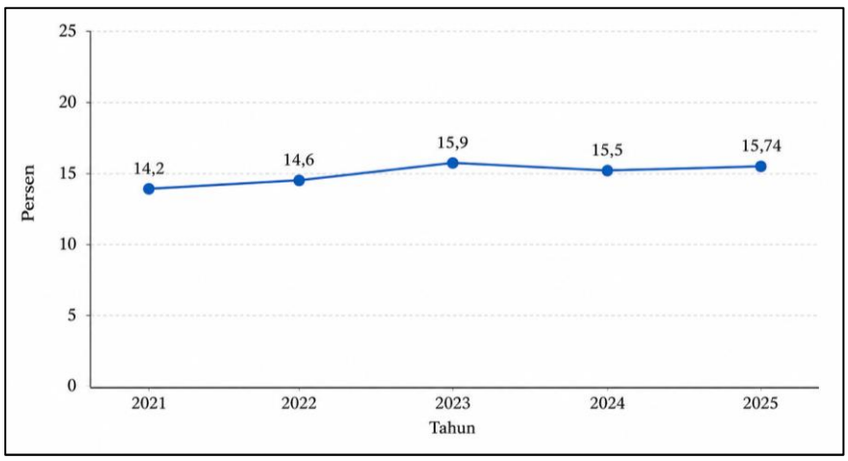
berisi data by name by address balita yang telah dilakukan pengukuran dan penimbangan oleh puskesmas setiap bulannya.

Peruntukan kedua data ini adalah data SSGI digunakan untuk evaluasi prevalensi angka stunting secara nasional dan data E-PPGBM digunakan untuk monitoring perkembangan tumbuh kembang balita (Kemenko PMK).

4. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage)

Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) merupakan indikator yang menunjukkan persentase penderita Tuberkulosis yang berhasil ditemukan dan mendapatkan pengobatan sesuai standar. Indikator ini mencerminkan efektivitas program pengendalian Tuberkulosis dalam menjangkau penderita dan memastikan keberhasilan pengobatan.

Gambar 2- 22 Realisasi Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis Kota Padang Tahun 2021 - 2025



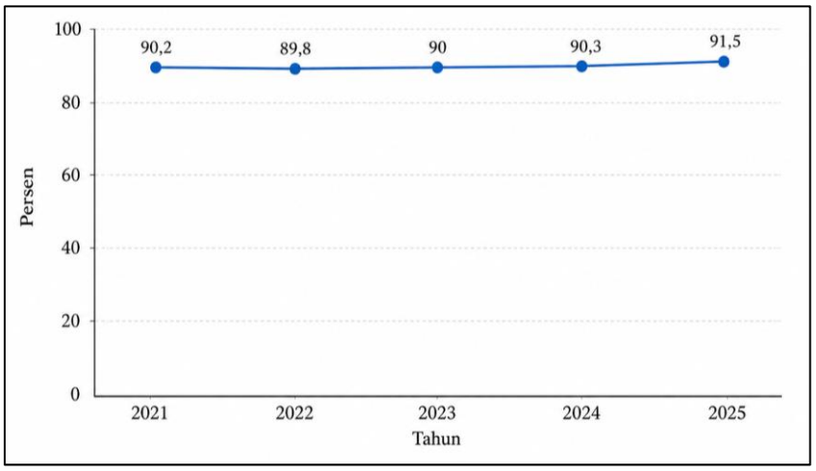
Sumber: BPS Kota Padang, 2025

Perkembangan cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis di Kota Padang selama Tahun 2021–2025 menunjukkan tren yang cenderung meningkat. Cakupan tercatat sebesar 14,2% pada Tahun 2021, meningkat menjadi 14,6% pada Tahun 2022 dan 15,9% pada Tahun 2023. Pada Tahun 2024 terjadi sedikit penurunan menjadi 15,5%, kemudian kembali meningkat menjadi 15,74% pada Tahun 2025.

5. Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)

Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis merupakan indikator yang menunjukkan persentase pasien Tuberkulosis yang berhasil menyelesaikan pengobatan sesuai standar hingga dinyatakan sembuh atau menyelesaikan terapi.

Gambar 2- 23 Realisasi Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis Kota Padang Tahun 2021 - 2025



Sumber: BPS Kota Padang, 2025

Perkembangan angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis di Kota Padang selama Tahun 2021–2025 menunjukkan kondisi yang relatif stabil dengan kecenderungan meningkat. Capaian sebesar 90,2 persen pada Tahun 2021 sedikit menurun menjadi 89,8 persen pada Tahun 2022, kemudian meningkat menjadi 90 persen pada Tahun 2023, 90,3 persen pada Tahun 2024, dan mencapai 91,5 persen pada Tahun 2025.

Secara keseluruhan, angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis menunjukkan kinerja yang baik dan mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2021. Hal ini mengindikasikan semakin optimalnya pelaksanaan pengobatan Tuberkulosis, meskipun upaya peningkatan kepatuhan pasien, pendampingan selama masa terapi, serta pemantauan pengobatan tetap perlu diperkuat guna mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan pengobatan.

6. Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional (%)

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan program jaminan kesehatan yang diselenggarakan secara nasional untuk memberikan perlindungan kesehatan kepada seluruh penduduk agar memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Dalam konteks pembangunan daerah, cakupan kepesertaan JKN menjadi indikator penting untuk menggambarkan tingkat perlindungan jaminan kesehatan masyarakat serta komitmen pemerintah daerah dalam memperluas akses pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduk, terutama masyarakat miskin dan rentan. Di Kota Padang, cakupan kepesertaan JKN menunjukkan tren yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir, yaitu dari 91,44 persen pada tahun 2020 menjadi 92,69 persen pada tahun 2021, 95,20 persen pada tahun 2022, 98,01 persen pada tahun 2023, 98,06 persen pada tahun 2024, dan 98,34 persen pada tahun 2025. Capaian tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepesertaan JKN di Kota Padang sudah sangat tinggi dan telah mendukung tercapainya Universal Health Coverage (UHC). Berdasarkan target RPJMD Kota

Padang, cakupan kepesertaan JKN pada tahun 2027 ditargetkan mencapai 99,20 persen. Target tersebut mencerminkan komitmen Pemerintah Kota Padang untuk terus meningkatkan perlindungan jaminan kesehatan masyarakat melalui penguatan kepesertaan aktif, perluasan cakupan peserta, serta menjaga keberlanjutan UHC di Kota Padang.

Gambar 2- 24 Capaian Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional 2020-2025



Sumber : Dinas Pendidikan Kota Padang, 2025 dan RPJMD Kota Padang Tahun 2025-2029

H. Pendidikan Berkualitas yang Merata

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang berdaya saing, berkarakter, dan berkelanjutan. Upaya mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan merata menjadi prioritas Pemerintah Kota Padang sebagai bagian dari peningkatan kualitas hidup masyarakat. Akses terhadap layanan pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan berkeadilan diharapkan mampu menghasilkan peserta didik yang memiliki kompetensi, karakter, serta kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam mendukung pencapaian tujuan tersebut, Pemerintah Kota Padang terus berupaya meningkatkan mutu layanan pendidikan melalui pemenuhan standar pelayanan minimal, peningkatan kualitas tenaga pendidik, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, serta penguatan kualitas proses pembelajaran. Selain itu, pemerataan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan, menjadi perhatian agar tidak terjadi kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah maupun antarkelompok masyarakat.

1. Persentase satuan Pendidikan yang mencapai SKM pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Membaca

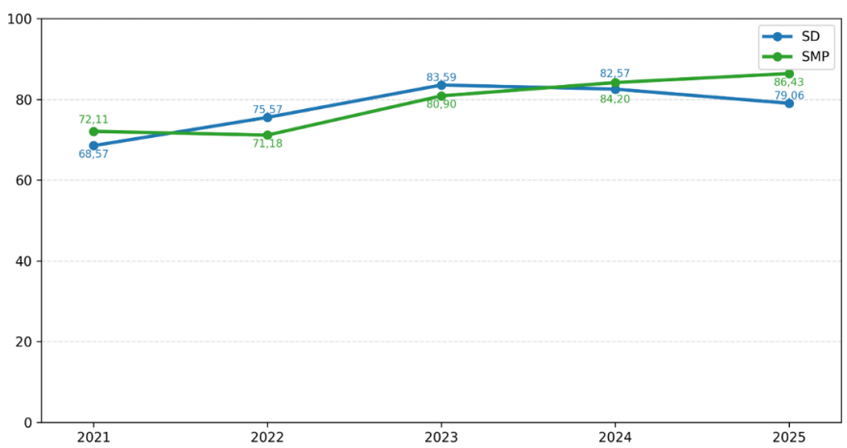
Angka literasi merupakan indikator yang menggambarkan persentase satuan pendidikan yang telah mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk

kemampuan literasi. Literasi dalam konteks ini dimaknai sebagai kemampuan peserta didik untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksikan berbagai jenis teks dalam rangka mengembangkan kapasitas diri, berpikir kritis, serta berpartisipasi secara produktif dalam kehidupan bermasyarakat. Indikator ini menjadi penting dalam pembangunan daerah karena mencerminkan mutu hasil pembelajaran dasar, khususnya kemampuan memahami bacaan sebagai fondasi peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Berdasarkan capaian tahun 2023-2024, persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi SD di Kota Padang meningkat dari 73,56 persen pada tahun 2023 menjadi 83,59 persen pada tahun 2024. Sementara itu, untuk literasi SMP juga mengalami peningkatan dari 71,53 persen pada tahun 2023 menjadi 80,90 persen pada tahun 2024. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya perbaikan capaian pembelajaran pada aspek literasi di jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama.

Dalam RPJMD Kota Padang, target tahun 2027 untuk angka literasi SD ditetapkan sebesar 75,18 persen, sedangkan angka literasi SMP ditargetkan sebesar 64,76 persen. Target tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Padang untuk menjaga keberlanjutan peningkatan mutu pendidikan, khususnya dalam penguatan kemampuan literasi peserta didik sebagai fondasi pembelajaran. Dalam konteks RKPD Kota Padang Tahun 2027, pencapaian target ini diharapkan didukung melalui peningkatan kualitas pembelajaran, penguatan kompetensi pendidik, penyediaan sarana prasarana pendidikan, serta penguatan budaya baca di lingkungan sekolah.

Gambar 2- 25 Persentase satuan Pendidikan yang mencapai SKM pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Membaca



Sumber : Dinas Pendidikan Kota Padang, 2025 dan RPJMD Kota Padang Tahun 2025-2029

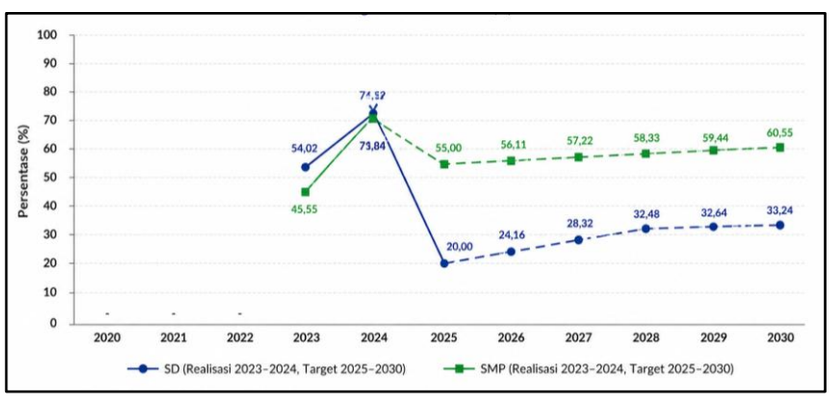
2. Persentase satuan Pendidikan yang mencapai SKM pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi

Angka numerasi merupakan indikator yang menggambarkan persentase satuan pendidikan yang telah mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk kemampuan numerasi. Numerasi dimaknai sebagai kemampuan peserta didik dalam menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah dalam berbagai konteks kehidupan sehari-hari. Indikator ini penting karena menunjukkan kualitas hasil pembelajaran dasar dalam aspek berpikir logis, analitis, dan pemecahan masalah, yang menjadi bagian penting dalam pembentukan sumber daya manusia yang unggul dan adaptif.

Berdasarkan capaian yang tersedia, persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi SD di Kota Padang meningkat dari 54,02 persen pada tahun 2023 menjadi 71,84 persen pada tahun 2024. Adapun untuk numerasi SMP, capaian meningkat dari 45,55 persen pada tahun 2023 menjadi 74,68 persen pada tahun 2024. Capaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan yang cukup signifikan dalam kemampuan numerasi peserta didik, baik pada jenjang SD maupun SMP.

Dalam RPJMD Kota Padang, target tahun 2027 untuk angka numerasi SD ditetapkan sebesar 28,32 persen, sedangkan angka numerasi SMP ditargetkan sebesar 57,22 persen. Target tersebut merupakan bagian dari upaya peningkatan mutu pendidikan melalui penguatan kemampuan numerasi peserta didik sejak pendidikan dasar. Dalam RKPD Kota Padang Tahun 2027, pencapaian target ini perlu didukung melalui penguatan proses pembelajaran yang berorientasi pada kompetensi, peningkatan kapasitas guru, penyediaan media pembelajaran yang memadai, serta penguatan intervensi pembelajaran numerasi secara lebih terarah.

Gambar 2- 26 Persentase satuan Pendidikan yang mencapai SKM pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi



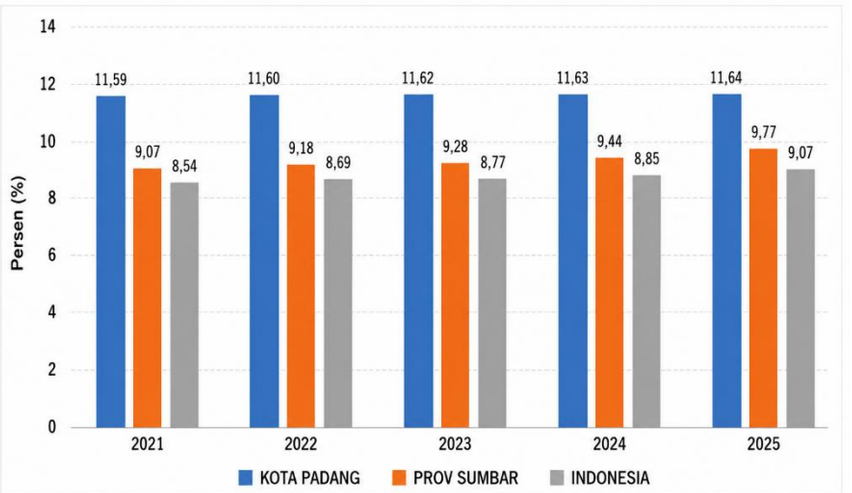
Sumber : Dinas Pendidikan Kota Padang, 2025 dan RPJMD Kota Padang Tahun 2025-2029

3. Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun (tahun)

Rata-rata lama sekolah (RLS) adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani. Rata-rata lama sekolah di Kota Padang mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dari 11,59 pada tahun 2021 menjadi 11,64 pada tahun 2025.

Data perkembangan rata-rata lama sekolah Kota Padang tahun 2021–2025 selalu berada di atas nilai rata-rata lama sekolah Provinsi Sumatera Barat dan Nasional. Rata-rata lama sekolah di Kota Padang Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 2- 27 Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2021-2025



Sumber: Kota Padang Dalam Angka 2026

Untuk mewujudkan pendidikan yang maju dan berkualitas di Kota Padang, maka perlu didukung dengan ketersediaan sarana prasarana pendidikan. Sesuai dengan kewenangan yang ada pada pemerintah kota yaitu berkaitan dengan pendidikan dasar, berikut data prasarana sekolah yang ada di Kota Padang.

Tabel 2- 24 Jumlah Sekolah Negeri dan Swasta di Kota Padang Tahun 2021 – 2025

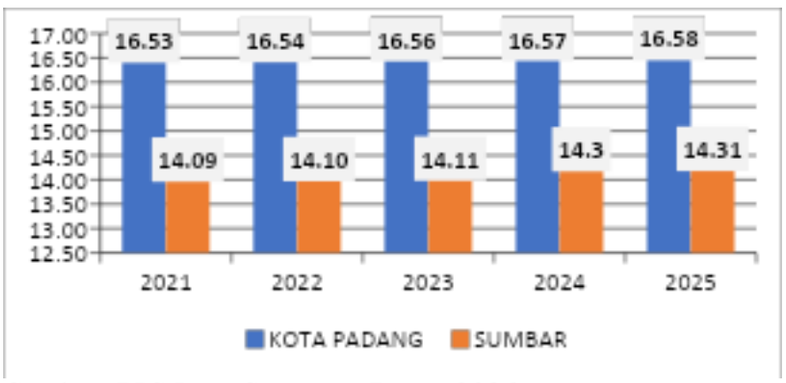
No	Tahun	TK			SD			SMP		
		Negeri	Swasta	jmlh	Negeri	Swasta	Jmlh	Negeri	Swasta	Jmlh
1	2021	5	318	323	338	71	409	43	56	99
2	2022	5	324	329	338	74	412	43	58	101
3	2023	5	332	337	268	78	346	45	56	101
4	2024	5	326	331	268	79	347	45	56	101
5	2025	5	323	328	268	80	348	46	56	102

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2026

4. Harapan Lama Sekolah

Angka harapan lama sekolah adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Data perkembangan angka harapan lama sekolah Kota Padang tahun 2021–2025 masih berada di atas nilai angka harapan lama sekolah Provinsi Sumatera Barat. Data tersebut menunjukkan bahwa penduduk Kota Padang berharap menempuh pendidikan sampai dengan memasuki perguruan tinggi.

Gambar 2- 28 Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kota Padang dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2025



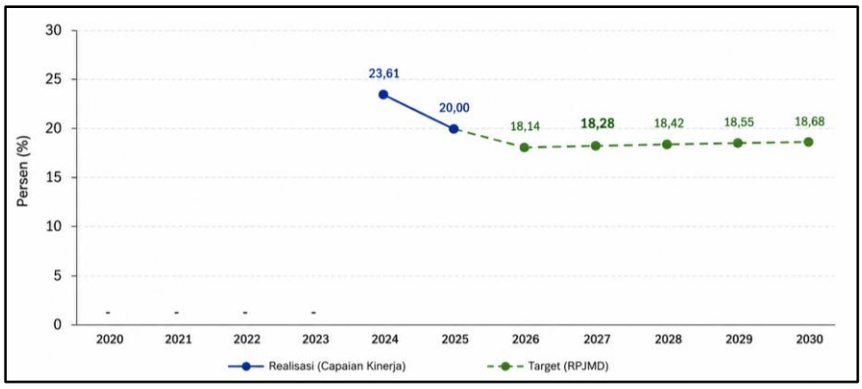
Sumber: BPS Prov. Sumatera Barat, 2026

5. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi

Proporsi penduduk berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi memperlihatkan kesanggupan penduduk untuk menyelesaikan studi di pendidikan tinggi. Indikator ini menunjukkan gambaran kualitas sumber daya manusia dari aspek tingkat pendidikan yang dimiliki. Semakin tinggi tingkat pendidikan maka jumlah penduduk yang bekerja akan semakin banyak karena angkatan kerja banyak diserap oleh pasar kerja, dan dengan demikian akan mengurangi jumlah pengangguran.

Capaian indikator ini pada tahun 2024 sebesar 23,61 persen, meningkat dibandingkan target tahun 2025 sebesar 18 persen, dengan realisasi tahun 2025 mencapai 20 persen. Selanjutnya, dalam RPJMD Kota Padang target indikator ini pada tahun 2027 ditetapkan sebesar 18,28 persen. Dalam konteks RKPD Kota Padang Tahun 2027, target tersebut mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui perluasan akses dan kesempatan pendidikan tinggi, serta penguatan kebijakan pembangunan bidang pendidikan untuk mendukung daya saing masyarakat Kota Padang.

Gambar 2- 29 Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi

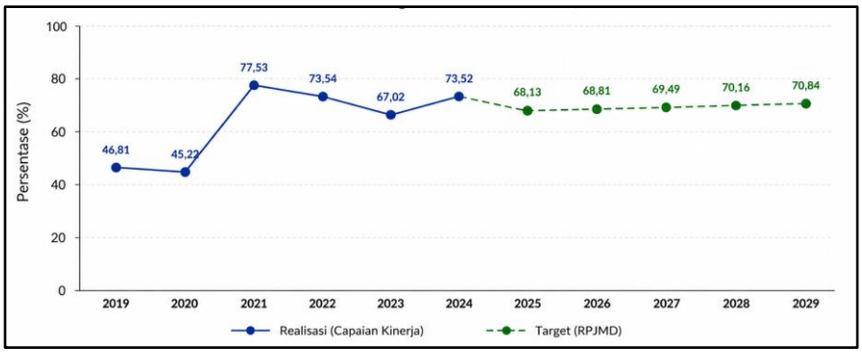


Sumber : RPJMD Kota Padang Tahun 2025-2029

6. Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)

Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi merupakan indikator yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara jenjang pendidikan yang ditamatkan dengan jenis pekerjaan yang dijalani oleh tenaga kerja. Indikator ini penting dalam mengukur kualitas hasil pembangunan bidang pendidikan sekaligus keterkaitan antara dunia pendidikan dengan pasar kerja, karena semakin tinggi persentasenya menunjukkan semakin baik kesesuaian kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan lapangan kerja. Di Kota Padang, capaian indikator ini menunjukkan tren yang cenderung meningkat dalam beberapa tahun terakhir, dari 46,81 persen pada tahun 2019 menjadi 67,02 persen pada tahun 2023 dan meningkat lagi menjadi 73,52 persen pada tahun 2024. Capaian tersebut menggambarkan bahwa korelasi antara pendidikan yang ditamatkan dengan pekerjaan yang diperoleh semakin membaik. Dalam RPJMD Kota Padang, target indikator ini pada tahun 2027 ditetapkan sebesar 69,49 persen. Target tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Padang untuk meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja, melalui penguatan link and match antara pendidikan menengah dan tinggi dengan pasar kerja, peningkatan kompetensi tenaga kerja, serta pengembangan kebijakan ketenagakerjaan yang mendukung penyerapan tenaga kerja sesuai bidang keahlian.

Gambar 2- 30 Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)



Sumber : RPJMD Kota Padang Tahun 2025-2029

I. Perlindungan Sosial yang Adaptif

1. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kota (%)

Cakupan BPJS Ketenagakerjaan merupakan Indikator penting untuk mengetahui dan mengevaluasi akses Masyarakat terhadap perlindungan sosial terkait ketenagakerjaan. Data cakupan BPJS Ketenagakerjaan menjadi cerminan dari seberapa efektif program ini dalam mencakup berbagai segmen pekerja formal. Ini mencakup pekerja dari berbagai sektor ekonomi, termasuk industri, perdagangan, dan jasa, serta pekerja mandiri dan buruh harian.

Capaian cakupan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja di Kota Padang menunjukkan kecenderungan meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2019 capaian indikator ini sebesar 24,95 persen, kemudian menurun menjadi 24,38 persen pada tahun 2020 akibat dampak pandemi Covid-19. Selanjutnya, capaian meningkat menjadi 25,26 persen pada tahun 2021, 27,25 persen pada tahun 2022, dan 30,50 persen pada tahun 2023. Pada tahun 2024 capaian tercatat sebesar 27,83 persen, kemudian meningkat signifikan menjadi 38,08 persen pada tahun 2025.

Berdasarkan target RPJMD Kota Padang, cakupan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja pada tahun 2027 ditargetkan sebesar 33,55 persen. Target tersebut menjadi fokus dalam RKPD Kota Padang Tahun 2027 sebagai bagian dari upaya memperluas perlindungan sosial bagi tenaga kerja melalui peningkatan kepesertaan aktif, penguatan kepatuhan pemberi kerja, serta optimalisasi sinergi program dengan BPJS Ketenagakerjaan dan pemangku kepentingan terkait.

2. Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)

Pekerja penyandang disabilitas adalah penduduk penyandang disabilitas berusia 15 tahun ke atas yang bekerja dan mengalami satu atau lebih hambatan di antaranya: gangguan dalam penglihatan, pendengaran, mobilitas, menggunakan atau

menggerakan jari atau tangan, gangguan berbicara atau memahami atau berkomunikasi dengan orang lain, gangguan mengingat, berkonsentrasi, dan gangguan emosional dengan tingkat keparahan rendah, sedang, sampai parah. Penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal adalah penyandang disabilitas yang bekerja pada status pekerjaan berusaha. Indikator ini bertujuan untuk melihat sejauh mana perekonomian pemerintah dan dunia usaha dapat memberikan kesempatan bagi pekerja disabilitas untuk dapat bekerja disektor formal.

Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan di Kota Padang berdiri pada tahun 2023 ketersediaan data terkait penyandang disabilitas yang bekerja sangat minim. Pada Tahun 2023 baru terdata sebanyak 16 orang disabilitas yang bekerja di sektor formal dari 2.888 orang penyandang disabilitas di Kota Padang atau sebesar 0,55 % dari total penyandang disabilitas Kota Padang.

J. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

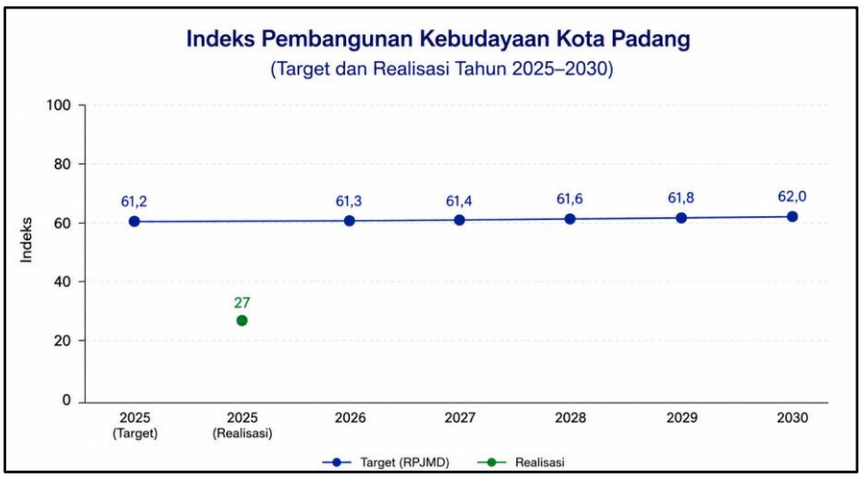
1. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) / (Disesuaikan dengan karakteristik Kabupaten/Kota)

Indeks Pembangunan Kebudayaan merupakan ukuran komposit yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kemajuan pembangunan kebudayaan di suatu daerah melalui berbagai dimensi kebudayaan, seperti ekonomi budaya, pendidikan, ketahanan sosial budaya, warisan budaya, ekspresi budaya, budaya literasi, gender, serta dimensi lainnya yang relevan sesuai metodologi pengukuran yang berlaku. Indikator ini penting karena mencerminkan sejauh mana pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada aspek fisik dan ekonomi, tetapi juga pada perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan sebagai bagian dari identitas, karakter, dan ketahanan sosial masyarakat.

Di Kota Padang, Indeks Pembangunan Kebudayaan belum memiliki data capaian pada tahun-tahun sebelumnya dan baru direncanakan untuk mulai dihitung dalam periode RPJMD Tahun 2025–2030. Oleh karena itu, target indikator ini dalam RPJMD ditetapkan secara bertahap, yaitu sebesar 61,2 pada tahun 2025, 61,3 pada tahun 2026, 61,4 pada tahun 2027, 61,6 pada tahun 2028, 61,8 pada tahun 2029, dan 62,0 pada tahun 2030.

Dalam konteks RKPD Kota Padang Tahun 2027, target Indeks Pembangunan Kebudayaan ditetapkan sebesar 61,4. Target ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kota Padang untuk mulai membangun basis data dan pengukuran pembangunan kebudayaan secara lebih terstruktur, sekaligus memperkuat pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan nilai-nilai budaya daerah dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan berkarakter.

Gambar 2- 31 Indeks Pembangunan Kebudayaan Kota Padang



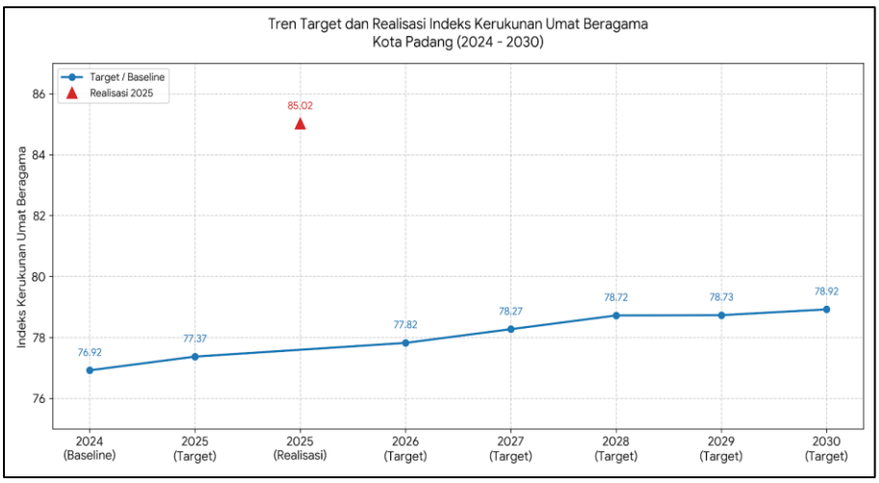
Sumber : RPJMD Kota Padang Tahun 2025-2029

2. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) / (Disesuaikan dengan karakteristik Kabupaten/Kota)

Indeks Kerukunan Umat Beragama digunakan untuk mengukur tingkat kerukunan masyarakat dalam beragama di Indonesia, dengan tiga dimensi utama yaitu toleransi, kesetaraan dan kerja sama. Jika nilai IKUB ini tinggi berarti setiap masyarakat merasa diterima dari berbagai latar belakang agama dan merasa aman walaupun dalam perbedaan. Indeks Kerukunan Umat Beragama sampai saat ini belum dilakukan pengukurannya.Di Kota Padang, pengukuran Indeks Kerukunan Umat Beragama belum dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga data capaian historis belum tersedia. Dalam RPJMD Kota Padang, target indikator ini mulai ditetapkan pada tahun 2025 sebesar 77,37, dengan realisasi tahun 2025 mencapai 85,02. Selanjutnya, target tahun 2026 ditetapkan sebesar 77,82 dan pada tahun 2027 ditargetkan mencapai 78,27.

Dalam konteks RKPD Kota Padang Tahun 2027, target Indeks Kerukunan Umat Beragama sebesar 78,27 menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Padang untuk menjaga dan memperkuat harmoni sosial dalam masyarakat yang majemuk melalui penguatan toleransi, kesetaraan, dan kerja sama antarumat beragama. Upaya pencapaian target tersebut perlu didukung melalui pembinaan kehidupan beragama, penguatan forum kerukunan umat beragama, serta sinergi antara pemerintah daerah, tokoh agama, dan masyarakat dalam menciptakan kehidupan sosial yang aman, damai, dan inklusif.

Gambar 2- 32 Indeks Kerukunan Umat Beragama



Sumber : RPJMD Kota Padang Tahun 2025-2029

K. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan gender, dan Masyarakat Inklusif

1. Indeks Pembangunan Keluarga

Indeks Pembangunan Keluarga adalah Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga) yang meliputi tiga dimensi yaitu Ketentraman, Kemandirian dan Kebahagiaan. Indeks ini berkolaborasi positif dengan Indeks Pembangunan Manusia.

Bangga untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas keluarga. Indeks Pembangunan keluarga digunakan untuk mengklasifikasikan suatu wilayah dengan status pembangunan keluarga tangguh, berkembang dan rentan.

- Nilai iBangga yang kurang baik (rentan) dengan nilai kurang dari 40
- Nilai iBangga yang cukup baik (berkembang) apabila nilainya antara 40-70
- Nilai iBangga yang baik(tangguh) apabila nilainya diatas 70

Berikut disajikan data Indeks Pembangunan Keluarga Kota Padang tahun 2020-2025:

Gambar 2- 33 Indeks Pembangunan Keluarga Kota Padang tahun 2020-2025

Tahun	Capaian Indeks Pembangunan Keluarga (I Bangga)					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-	53,49	56,45	64,77	64,22	71,4

Sumber : RPJMD Kota Padang Tahun 2025-2029

2. Indeks Ketimpangan Gender

Indek Ketimpangan Gender adalah alat yang berguna untuk mengukur dan memantau kesetaraan gender dalam berbagai aspek pembangunan manusia, dan membantu dalam merumuskan kebijakan dan strategi untuk mencapai kesetaraan gender.

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) merupakan ukuran gabungan yang mencerminkan ketimpangan pencapaian antara perempuan dan laki-laki dalam 3 (tiga) dimensi dan 5 (lima) indikator, yaitu (i) dimensi kesehatan reproduksi perempuan yang dibentuk dari indikator angka kematian ibu dan angka kelahiran remaja (ii) dimensi pemberdayaan yang dibentuk dari indikator tingkat pendidikan menengah ke atas bagi perempuan dan laki-laki usia 25 tahun ke atas dan persentase kursi parlemen yang di pegang perempuan, serta (iii) dimensi partisipasi ekonomi yang diwakili dengan indikator tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) laki-laki dan TPAK perempuan. IKG berkisar antara 0 hingga 1, dimana nilai 0 menunjukkan kesetaraan sempurna antara laki-laki dan perempuan dengan tidak ada ketimpangan dalam pencapaian. Sedangkan nilai 1 menunjukkan ketimpangan ekstrim, dengan perempuan mengalami hasil yang jauh lebih buruk daripada laki-laki. Semakin tinggi nilai IKG, semakin besar ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam pencapaian pembangunan. Kegunaan IKG yaitu (i) IKG dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana ketimpangan gender berdampak pada pembangunan, (ii) IKG membantu memantau kemajuan dan perubahan dalam kesetaraan gender, (iii) IKG dapat digunakan untuk mengevaluasi program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan gender. Tujuan pengukuran IKG adalah mendorong untuk mengurangi ketimpangan gender dan menyediakan data untuk pemantauan pembangunan berkelanjutan (SDGs) terutama Tujuan 5 : Kesetaraan Gender. Berikut disajikan data Indeks Ketimpang an Gender Kota Padang tahun 2020-2024 sebagai berikut:

Tabel 2- 25 Indeks Ketimpangan Gender Kota Padang Tahun 2020-2024

Tahun	Capaian Indeks Ketimpangan Gender				
	2020	2021	2022	2023	2024
	0,200	0,32	0,171	0,198	0,172

Sumber: DP3AP2KB Kota Padang, 2025

3. Indeks Perlindungan Khusus Anak

Perlindungan khusus anak hingga saat ini masih menjadi salah satu isu penting meskipun dalam upaya penyediaan perlindungan khusus anak pemerintah memiliki beragam tantangan. Perlindungan khusus anak di antaranya adalah perlindungan akan risiko kemiskinan, fenomena pekerja anak, kekerasan, maupun

perlindungan terhadap anak dengan disabilitas. Indikator yang termasuk dalam IPKA adalah indikator yang menggambarkan kondisi anak yang membutuhkan perlindungan khusus, seperti anak penyandang disabilitas, pekerja anak, dan anak terlantar baik secara nasional maupun di tingkat provinsi. Hasil IPKA menjadi indikator yang sangat dibutuhkan sebagai dasar penyusun kebijakan terhadap perlindungan khusus anak dan sebagai indikator yang dapat menilai keberhasilan pembangunan.

Tabel 2- 26 Rekapitulasi Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Kota Padang Tahun 2020-2025

Tahun	Jenis Kekerasan						Jumlah
	KDRT	Fisik	Psikis	Seksual	Penelantaran	Eksploitasi	
2020	2	3	8	20	1	1	35
2021	5	1	18	22	7	0	53
2022	3	1	19	22	4	0	49
2023	7	2	28	34	3	0	74
2024	7	6	28	31	5	1	78
Januari - Juni 2025	3	2	8	12	1	0	26

Sumber : DP3AP2KB Kota Padang, 2025

Tabel 2- 27 Rekapitulasi Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Kota Padang Tahun 2020-2025

Tahun	Jenis Kekerasan						Jumlah
	KDRT	Fisik	Psikis	Seksual	Penelantaran	Eksploitasi	
2020	5	2	4	2	5	0	18
2021	4	0	17	2	2	0	25
2022	5	2	22	2	1	0	32
2023	6	1	16	4	0	0	27
2024	9	2	17	3	0	0	31
Januari - Juni 2025	3	0	7	1	0	0	11

Sumber : DP3AP2KB Kota Padang, 2025

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Terkait dengan aspek pelayanan umum maka fokus layanan Pemerintah Kota Padang dibagi dalam dua kelompok yakni urusan wajib dan urusan pilihan. Pemerintah sebagai aparat pelayanan masyarakat wajib memberikan pelayanan kepada masyarakat berwujud pelayanan publik. Pelayanan pubik merupakan pelayanan umum dalam segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pelayanan yang baik dicerminkan dari tercapainya indikator-indikator pada urusan wajib dan urusan pilihan sebagai bentuk profesionalisme.

A. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

1. Indeks Reformasi Hukum

Indeks Reformasi Hukum (IRH) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan

reformasi hukum di lingkungan pemerintah daerah melalui penataan regulasi, harmonisasi peraturan perundang-undangan, peningkatan kompetensi perancang peraturan perundang-undangan (legal drafter), pelaksanaan re-regulasi dan deregulasi, serta pengelolaan basis data produk hukum daerah. Penilaian IRH dilaksanakan oleh Kementerian Hukum berdasarkan pedoman penilaian yang berlaku secara nasional.

Berdasarkan hasil penilaian, capaian Indeks Reformasi Hukum Pemerintah Kota Padang menunjukkan tren yang semakin baik. Pada tahun 2022 Kota Padang memperoleh nilai 73,25 dengan kategori BB, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 57,21 Indeks Reformasi HukumIndeks Reformasi Hukum(kategori CC) yang mengindikasikan perlunya penguatan dalam penataan regulasi dan pengelolaan produk hukum daerah. Berbagai upaya perbaikan kemudian dilakukan melalui peningkatan koordinasi harmonisasi regulasi, penguatan kompetensi aparatur, penataan JDIH, serta percepatan evaluasi produk hukum daerah sehingga pada tahun 2024 nilai IRH meningkat signifikan menjadi 98,70 dengan kategori AA (Sangat Baik). dan Tahun 2025 91 di tahun 2026 target 91.

2. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kematangan penerapan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik pada instansi pemerintah. Penilaian dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) terhadap aspek tata kelola, manajemen, layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik, dan layanan publik berbasis elektronik. Semakin tinggi nilai indeks SPBE menunjukkan semakin baik kualitas penyelenggaraan pemerintahan digital yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik. Berdasarkan hasil evaluasi, capaian Indeks SPBE Pemerintah Kota Padang menunjukkan tren yang terus meningkat. Pada tahun 2022 Pemerintah Kota Padang memperoleh nilai **3,41** dengan predikat **Baik**, meningkat menjadi **3,62** pada tahun 2023 dengan predikat **Sangat Baik**, dan kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi **4,17** dengan predikat **Memuaskan**. dan tahun 2025 3,96 Peningkatan tersebut mencerminkan semakin matangnya tata kelola SPBE, meningkatnya integrasi layanan pemerintahan berbasis elektronik, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

3. Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Indeks Pelayanan Publik (IPP) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja penyelenggaraan pelayanan publik pada instansi pemerintah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Penilaian dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) terhadap berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan, meliputi kebijakan pelayanan, profesionalisme sumber daya manusia, sarana dan prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi pelayanan publik. Semakin tinggi nilai IPP menunjukkan semakin baik kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.
Berdasarkan hasil evaluasi, capaian Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Kota Padang menunjukkan kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan tersebut mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memperbaiki kualitas pelayanan melalui penyederhanaan prosedur, pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kompetensi aparatur, serta penguatan budaya pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

4. Survei Penilaian Integritas (SPI) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan instrumen yang dikembangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengukur tingkat integritas instansi pemerintah dalam mencegah terjadinya korupsi. Penilaian dilakukan melalui survei kepada responden internal, responden eksternal, dan responden ahli dengan mengukur aspek transparansi, akuntabilitas, integritas dalam pelaksanaan tugas, pengelolaan sumber daya manusia, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan anggaran, serta efektivitas pengendalian gratifikasi dan pencegahan korupsi. Semakin tinggi nilai SPI menunjukkan semakin baik budaya integritas dan efektivitas sistem pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil pelaksanaan Survei Penilaian Integritas, Pemerintah Kota Padang menunjukkan kecenderungan peningkatan budaya integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hasil tersebut mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi melalui implementasi berbagai program pencegahan korupsi.

5. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)

Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) merupakan indikator yang menggambarkan tingkat persepsi masyarakat terhadap perilaku antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari. Indeks ini disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK) yang mengukur persepsi dan pengalaman masyarakat terhadap praktik korupsi serta tingkat penerapan nilai-nilai antikorupsi. Semakin tinggi nilai IPAK menunjukkan semakin kuat budaya antikorupsi dan semakin rendah toleransi masyarakat terhadap praktik korupsi.

Pemerintah Kota Padang menjadikan Indeks Persepsi Anti Korupsi sebagai salah satu indikator pendukung dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Peningkatan nilai indikator ini mencerminkan semakin baiknya upaya pemerintah daerah dalam membangun budaya integritas, memperkuat transparansi penyelenggaraan pemerintahan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik dan pencegahan korupsi.

B. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial / (Disesuaikan dengan karakteristik Kabupaten/Kota

1. Persentase Penanganan Pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) yang Diselesaikan

Persentase Penanganan Pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) yang Diselesaikan merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas Pemerintah Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah melalui kegiatan pembinaan, pengawasan, penindakan, serta penyelesaian terhadap setiap pelanggaran yang terjadi. Indikator ini menjadi salah satu ukuran kinerja penyelenggaraan urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Persentase capaian dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah kasus pelanggaran Perda yang berhasil diselesaikan dengan jumlah keseluruhan kasus pelanggaran Perda yang ditangani pada periode yang sama. Semakin tinggi persentase yang dicapai menunjukkan semakin efektif penegakan Perda serta semakin meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di daerah.

2. Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi Hak Asasi Manusia (Aksi HAM)

Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi Hak Asasi Manusia (Aksi HAM) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang mendukung penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan Hak Asasi Manusia (HAM) sesuai dengan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan Aksi HAM dikoordinasikan oleh pemerintah pusat dengan melibatkan pemerintah daerah melalui pemenuhan berbagai indikator yang telah ditetapkan.

Indikator ini dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah aksi atau indikator HAM yang berhasil dipenuhi oleh pemerintah daerah dengan jumlah seluruh aksi atau indikator yang menjadi kewajiban pemerintah daerah pada periode pelaporan. Semakin tinggi persentase capaian menunjukkan semakin optimal pelaksanaan kebijakan dan program yang mendukung penghormatan dan perlindungan HAM di daerah.

3. Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%) / (Disesuaikan dengan karakteristik Kabupaten/Kota)

Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya merupakan indikator yang menggambarkan tingkat rasa aman masyarakat terhadap kondisi lingkungan tempat tinggalnya. Indikator ini diperoleh berdasarkan hasil survei persepsi masyarakat dan menjadi salah satu ukuran keberhasilan pemerintah daerah dalam menciptakan kondisi ketenteraman, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat. Semakin tinggi persentase penduduk yang menyatakan merasa aman, semakin baik kondisi keamanan lingkungan dan semakin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di daerah.

Capaian indikator ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain efektivitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah, sinergi antara pemerintah daerah dengan aparat keamanan, partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan, serta ketersediaan sarana dan prasarana pendukung keamanan.

4. Indeks Demokrasi Indonesia / (Disesuaikan dengan karakteristik Kabupaten/Kota)

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan indikator yang mengukur tingkat perkembangan demokrasi berdasarkan tiga aspek utama, yaitu **Kebebasan Sipil**, **Hak-Hak Politik**, dan

Lembaga Demokrasi. Indeks ini disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) berdasarkan data administratif, pemberitaan media massa, dokumen resmi, serta pendapat para ahli. Nilai IDI berada pada skala 0–100, di mana semakin tinggi nilai yang diperoleh menunjukkan kualitas demokrasi yang semakin baik.

Bagi Pemerintah Kota Padang, Indeks Demokrasi Indonesia menjadi indikator yang mencerminkan kondusivitas kehidupan demokrasi di daerah, termasuk penghormatan terhadap hak-hak masyarakat, partisipasi warga dalam proses pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta efektivitas kelembagaan demokrasi. Meskipun pengukuran IDI dilakukan pada tingkat provinsi, capaian tersebut dapat digunakan sebagai indikator kontekstual dalam mengevaluasi kondisi demokrasi yang menjadi bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah.

C. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan / (Disesuaikan dengan karakteristik Kabupaten/Kota)

1. Persentase kerja sama wajib yang dilaksanakan / (Disesuaikan dengan karakteristik Kabupaten/Kota)

Persentase Kerja Sama Wajib yang Dilaksanakan merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan dan kinerja Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kerja sama yang bersifat wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kerja sama wajib dimaksud dapat mencakup kerja sama antar daerah, kerja sama dengan pemerintah provinsi/pusat, serta kerja sama dengan pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan urusan pemerintahan daerah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.

Indikator ini dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah kerja sama wajib yang telah dilaksanakan secara efektif dengan jumlah seluruh kerja sama wajib yang menjadi kewajiban pemerintah daerah dalam periode tertentu. Semakin tinggi persentase capaian menunjukkan semakin baik tingkat koordinasi, kepatuhan, serta efektivitas pelaksanaan kerja sama pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan daerah dan stabilitas kawasan.

2. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan/ (Disesuaikan dengan karakteristik Kabupaten/Kota)

Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan merupakan indikator yang menggambarkan tingkat ketangguhan suatu daerah dalam menjaga stabilitas pertahanan dan keamanan wilayah, ketenteraman masyarakat, serta kemampuan dalam menghadapi potensi gangguan keamanan dan ketertiban. Indeks ini merupakan bagian dari pengukuran Ketahanan Nasional yang mencakup berbagai aspek, termasuk kondisi keamanan lingkungan, kesiapsiagaan aparat, partisipasi masyarakat, serta

efektivitas koordinasi antar pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas daerah.

Pada tingkat daerah, indikator ini merefleksikan kemampuan pemerintah daerah bersama unsur TNI, Polri, dan masyarakat dalam menciptakan situasi yang aman, kondusif, serta mampu mencegah dan merespons berbagai potensi gangguan keamanan, konflik sosial, bencana, maupun ancaman lainnya yang dapat mempengaruhi stabilitas wilayah.

D. Capaian Kinerja setiap urusan Pemerintah Daerah

1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

a. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat, harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana belajar mengajar yang bermutu dan berkualitas. Pada tabel berikut diperlihatkan sarana utama penunjang pendidikan yakni guru dan sekolah beserta rasionya terhadap total murid di Kota Padang.

Tabel 2- 28 Sarana Pendidikan Kota Padang Tahun 2021–2025

Tahun Ajaran	Sekolah	Murid	Guru	Rasio Murid terhadap Guru	Rasio Murid terhadap sekolah
Sekolah Dasar Negeri					
2021	338	70735	4233	16,71	209,28
2022	338	69869	4231	16,51	206,71
2023	268	67052	4049	16,56	250,19
2024	268	68797	4346	15,83	256,70
2025	268	68634	4186	16.47	256,09
Sekolah Dasar Swasta					
2021	71	17370	1074	16,17	244,65
2022	74	18678	1142	16,36	252,41
2023	78	18532	1057	17,53	237,59
2024	79	20332	1231	16,51	257,36
2025	80	20848	1392	14.82	260.6
Madrasah Ibtidaiyah Negeri					
2021	7	3660	209	17,51	522,86
2022	7	3522	232	15,18	503,14
2023	7	3429	202	16,98	489,86
2024	7	3440	209	16,45	491,42
2025	8	3563	224	15.89	445.375
Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta					
2021	7	708	56	12,64	101,14
2022	8	981	98	10,01	122,63
2023	8	1065	102	10,44	133,13

Tahun Ajaran	Sekolah	Murid	Guru	Rasio Murid terhadap Guru	Rasio Murid terhadap sekolah
2024	8	1168	106	11,01	146
2025	8	1209	102	11.9	151.125
SMP Negeri					
2021	43	27843	1841	15,12	647,51
2022	43	28038	1864	15,04	652,05
2023	45	27551	1774	15,53	612,24
2024	45	29832	1982	15,05	66arsip secara baku2,93
2025	46	30270	1987	15.17	658.04
SMP Swasta					
2021	56	9202	816	11,28	164,32
2022	58	8617	811	10,63	148,57
2023	56	6162	726	8,49	110,04
2024	56	7127	715	9,96	127,26
2025	56	7646	757	10.01	136.54
Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri					
2021	7	6061	457	13,26	865,86
2022	7	5915	501	11,81	845,00
2023	7	6302	465	13,55	900,29
2024	7	6535	472	13,84	933,57
2025	8	6606	474	13.93	825.75
Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta					
2021	13	1990	268	7,43	153,08
2022	13	1855	249	7,45	142,69
2023	13	1667	245	6,80	128,23
2024	14	739	220	3,35	52,78
2025	17	1431	209	6.78	84.18

Sumber: Kota Padang Dalam Angka, 2026

Sampai dengan tahun 2025, kegiatan belajar mengajar di sekolah-sekolah di Kota Padang masih menggunakan metode dua shift. Artinya satu gedung sekolah dapat digunakan oleh dua sekolah dengan sistem pagi dan siang. Berikut disajikan data rekap sekolah dengan metode dua shift.

Tabel 2- 29 Rekap SD 2 (dua) Shift Tahun 2025

NO	Kecamatan	Jumlah Sekolah 2 Shift	Kekurangan Ruang Kelas
1	PADANG BARAT	1	3
2	PADANG TIMUR	10	41
3	PADANG SELATAN	4	23
4	PADANG UTARA	3	12
5	BUNGUS TELUK KABUNG	1	3

NO	Kecamatan	Jumlah Sekolah 2 Shift	Kekurangan Ruang Kelas
6	KOTO TANGAH	19	71
7	LUBUK KILANGAN	4	11
8	PAUH	4	16
9	LUBUK BEGALUNG	12	31
10	KURANJI	18	68
11	NANGGALO	5	15
TOTAL		81	294

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2026

Tabel 2- 30 Rekap SMPN 2 (dua) Shift Tahun 2025

No	Nama Sekolah	Kekurangan Ruang Kelas
1	SMPN 38	8
2	SMPN 39	6
TOTAL		14

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2026

Selain itu, dari jalur pendidikan nonformal Pemerintah Daerah juga memfasilitasi dan melaksanakan program pendidikan kesetaraan melalui pelaksanaan program paket A, program paket B dan program paket C yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga pendidikan kesetaraan. Sampai saat ini di Kota Padang terdapat lembaga pelaksana program kesetaraan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2- 31 Lembaga Pelaksana Program Kesetaraan Tahun 2025

No	Kecamatan	Jumlah Lembaga	Jumlah Anak		
			Paket A	Paket B	Paket C
1	BUNGUS TELUK KABUNG	2	4	23	102
2	LUBUK BEGALUNG	3	54	135	216
3	PADANG TIMUR	2	169	305	376
4	LUBUK KILANGAN	2	10	66	58
5	PAUH	0	0	0	0
6	KURANJI	3	64	101	221
7	NANGGALO	2	79	184	307
8	PADANG SELATAN	1	7	9	36
9	PADANG BARAT	1	38	181	296
10	PADANG UTARA	2	14	20	27
11	KOTO TANGAH	11	233	411	606
	JUMLAH	29	672	1435	2245

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2026

Kinerja urusan Pendidikan Tahun 2021-2025 dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2- 32 Kinerja Daerah Urusan Pendidikan Tahun 2021-2025

No	Bidang Urusan/ Indikator	Satuan	Realisasi				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	%	104,04	103,76	104,58	110,54	102.89
2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	%	98,68	86,26	93,67	110,29	97.11
3	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	97,33	98,20	98,72	99,24	97,17
4	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	81,56	81,59	80,55	83,08	88.44
5	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0,37	0,38	0	0,05	0.05
6	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0,59	0,56	0	0,03	0.01
7	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	99,38	99,81	100	100	99.76
8	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	98,94	100	100	100	99.36
9	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	97,13	100	100	100	66.6
10	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	100	100	100	-	100
11	Ruang kelas SD/MI kondisi bangunan baik	%	99,72	99,79	99,79	99,34	79,39
12	Ruang kelas SMP/MTs kondisi bangunan baik	%	97,18	97,33	99,67	97,14	80.8
13	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD/MI	rasio	0,005	0,004	0,004	0,004	0.004
14	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SMP/MTs	rasio	0,003	0,002	0,002	0,002	0.002
15	Rasio siswa/guru sekolah SD	rasio	18	16	18	16	16
16	Rasio siswa/guru sekolah SMP/MI	rasio	13	13	13	14	13
17	Rasio siswa per kelas jenjang SD/MI	rasio	24	24	24	26	24
18	Rasio siswa per kelas jenjang SMP/MTs	rasio	25	28	25	29	29
19	Persentase Sekolah SD/MI Akreditasi A & B	%	89,18	88,63	97,01	93,37	95.88
20	Persentase Sekolah SMP/MTs Akreditasi A & B	%	84,87	85,12	95,24	86,89	90.16
21	Persentase Guru Layak SD/MI	%	94,38	94,39	94,39	97,17	97.68
22	Persentase Guru Layak SMP/MTs	%	96,56	94,92	94,92	98,28	97.55

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2025

b. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Perkembangan bidang kesehatan suatu daerah menjadi salah satu urusan wajib dan tujuan pokok pemerintah daerah dalam mensejahterakan masyarakatnya melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, sehat jasmani dan rohani. Untuk itu, diperlukan fasilitas dan tenaga medis pendukung kesehatan.

Upaya pencapaian tujuan tersebut ditempuh melalui berbagai kebijakan di antaranya dengan peningkatan promosi kesehatan, budaya hidup bersih dan sehat, peningkatan kualitas lingkungan, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau, penyediaan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan penyandang masalah sosial lainnya serta peningkatan kuantitas dan kualitas SDM bidang kesehatan.

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain: perilaku dan kebiasaan hidup, lingkungan, sosial budaya, dan fasilitas kesehatan serta peran serta masyarakat dalam menerapkan pola hidup sehat.

Untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan pelayanan urusan kesehatan pada masyarakat, Pemerintah Kota Padang terus berupaya meningkatkan capaian derajat kesehatan masyarakat melalui pengembangan berbagai kebijakan, program, dan kegiatan sesuai tugas fungsi dan kewenangannya.

Sebagai ibukota Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang menjadi pusat berbagai aktivitas sosial ekonomi masyarakat, termasuk urusan kesehatan, Kota Padang mempunyai rumah sakit yang menjadi rujukan daerah sekitarnya. Fasilitas kesehatan lainnya adalah Puskesmas induk, Posyandu dan klinik/balai kesehatan ada di setiap kecamatan di Kota Padang. Jumlah fasilitas kesehatan yang tersedia di Kota Padang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2- 33 Jumlah Fasilitas Kesehatan Kota Padang Tahun 2021-2025

No	Fasilitas Kesehatan	2021	2022	2023	2024	2025
1	Rumah Sakit Umum	14	14	14	14	14
2	Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA)	5	5	5	5	5
3	Rumah Sakit Khusus	7	8	8	8	9
4	Puskesmas	23	24	24	24	24
5	Puskesmas Pembantu	59	58	57	58	55
6	Posyandu	919	924	929	933	934
7	Klinik/Balai Kesehatan	83	102	110	125	137
8	Apotek	234	242	247	255	293
9	Toko Obat	24	24	24	26	16
10	Laboratorium	6	6	6	6	7

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Padang, 2026

Capaian penanganan prevelansi stunting di Kota Padang tahun sudah baik ditunjukkan oleh data e-PPGBM tahun 2021 - 2025, namun sedikit berbeda dengan data SSGI yang menunjukkan kenaikan pada tahun tersebut. Data penanganan stunting kota padang tahun 2021-2025 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2- 34 Capaian Penanganan Stunting Kota Padang Tahun 2021-2025

Tahun	Target		Capaian	
	SSGI	e-PPGBM	SSGI	e-PPGBM
2021	21,10%	8%	18.9	7.09
2022	18,40%	7%	19,5	4,69
2023	16%	7%	24,2	2,65
2024	14%	6,50%	20,6	2,53
2025	17,90%	2,55	Tidak ada survey	2,52

Sumber: Dinas Kesehatan, 2026

Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dihitung berdasarkan sampel balita di Kota Padang. Dari seluruh balita diambil sampel 740 orang, kemudian diperiksa status tinggi badan, berat badan, kondisi ekonomi, pendidikan orang tua, sanitasi dll sedangkan Elektronik Pencatatan Dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM) adalah suatu aplikasi yg dibuat oleh kementerian kesehatan yang berisi data by name by address balita yang telah dilakukan pengukuran dan penimbangan oleh puskesmas setiap bulannya.

Peruntukan kedua data ini adalah data SSGI digunakan untuk evaluasi prevalensi angka stunting secara nasional dan data E-PPGBM digunakan untuk monitoring perkembangan tumbuh kembang balita (Kemenko PMK).

Permasalahan dalam penanganan stunting di antaranya:

1. Belum optimalnya pemetaan balita stunting di tingkat posyandu. Dari 933 posyandu, namun baru 921 (98,7%) yang memiliki alat antropometri, namun sekitar 8% dari alat tersebut tidak berfungsi baik.
2. Dari 4146 kader posyandu yang dibutuhkan untuk melakukan pengukuran status gizi di posyandu, hanya1574 (37,96%) yang mendapatkan pelatihan pemantauan tumbuh kembang balita.
3. Masih belum optimalnya rujukan kasus balita terduga stunting ke dokter spesialis anak.
4. Pada tahun 2024, Pemerintah kota Padang belum memiliki anggaran untuk tatalaksana balita stunting sesuai juknis yatu dengan menggunakan PKMK (Pangan Kebutuhan Medis Khusus). PKMK bagi balita stunting yang diperiksa dirumah sakit di dapat dari bantuan BAZNAS. Baru pada tahun 2025, Dinas kesehatan memiliki anggaran belanja PKMK.
5. Salah satu program pencegahan stunting yang dilaksanakan oleh Dinas kesehatan adalah pemberian Makanan Tambahan berbasis pangan local. Namun, program ini sebagai adalah berupa kudapan, bukan makanan utama

Kinerja urusan Kesehatan Tahun 2021-2025 dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2- 35 Kinerja Daerah Urusan Kesehatan Tahun 2021-2025

No	Bidang Urusan/ Indikator	Satuan	Realisasi					PD Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025	
1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Angka	6,03	8,7	9,1	8,3	7,69	Dinas Kesehatan
2	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	Angka	0,57	10,1	10,4	9,67	9,41	Dinas Kesehatan
3	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	Angka	30 (kasus)	17	23	12 (kasus)	14 kasus	Dinas Kesehatan
4	Rasio posyandu per satuan balita	Rasio	11,8	11,9	11,9	11,21	11,24	Dinas Kesehatan
5	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	Rasio	0,08	0,08	0,08	0,086	0,082	Dinas Kesehatan
6	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	Rasio	0,014	0,014	0,014	0,015	0,015	Dinas Kesehatan
7	Rasio dokter per satuan penduduk	Rasio	0,15 (dokter dibawah pemko)	2,1	1,85	1,23	1,16	Dinas Kesehatan
8	Rasio tenaga paramedis per satuan penduduk	Rasio	0,53 (paramedis dibawah pemko)	4,2	4,7	5,01	4,93	Dinas Kesehatan
9	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	102,6	52,4	100	100	100	Dinas Kesehatan
10	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	99,8	79,6	99,9	100	77,67	Dinas Kesehatan
11	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	48,1	45,2	52,9	79,81	Indikator ini tidak ada lagi di Kemenkes sejak 2023	Dinas Kesehatan
12	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100	100	100	95,81	97,18	Dinas Kesehatan
13	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	%	77,7	76	66,2	88	67,65	Dinas Kesehatan
14	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk berumur < 15 th	%	0,004	0,004	0,009	0,037	7,30	Dinas Kesehatan
15	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	%	23,2	70,8	85,73	70,6	88,67	Dinas Kesehatan
16	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC	%	47,8	54,9	65	88,7	82,69	Dinas Kesehatan
17	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Nilai	252,7	346,3	361,5	450	414	Dinas Kesehatan
18	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Nilai	9,45	4	10,9	17,61	16,57	Dinas Kesehatan
19	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	%	14,2	14,6	15,9	15 ,5	15,74	Dinas Kesehatan

No	Bidang Urusan/ Indikator	Satuan	Realisasi					PD Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025	
20	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	%	90,2	89,8	90	90,3	91,5	Dinas Kesehatan
21	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
22	Penderita diare yang ditangani	%	15,5	22,2	25,4	25,4	94,95	Dinas Kesehatan
23	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	%	0,02	0,02	0,03	0,035	0,026	Dinas Kesehatan
24	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	22,85	21,2	27,15	29,78	19,66	Dinas Kesehatan
25	Cakupan kunjungan bayi	%	69,1	77,9	83,21	88,91	74,96	Dinas Kesehatan
26	Cakupan puskesmas	%	23 (jumlah puskesmas)	24	24	218,18	218,18	Dinas Kesehatan
27	Cakupan pembantu puskesmas	%	59 (jumlah puskesmas pembantu)	58	57	59,77	52,88	Dinas Kesehatan
28	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	%	98,14	79,2	77,6	82,52	81	Dinas Kesehatan
29	Cakupan pelayanan nifas	%	87,85	78,6	77,3	78,18	74,95	Dinas Kesehatan
30	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	51,3	50,5	46	100	100	Dinas Kesehatan
31	Cakupan pelayanan anak balita	%	90	95,8	99,07	81,94	91,3	Dinas Kesehatan
32	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	%	93,1 (data yang ada 6-59 bulan sesuai dengan data yang diinput kepada aplikasi e-PPBGM)	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
33	Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	%	57,6	91,6	100	95	95,08	Dinas Kesehatan
34	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	%	73,77	114,9	137,62	153,09	168,16	Dinas Kesehatan
35	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	%	-	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
36	Persentase balita gizi buruk	%	0,9	0,6	0,34	0,3	0,31	Dinas Kesehatan
37	Prevalensi balita gizi kurang	%	12,1	4,6	3,55	2,3	2,27	Dinas Kesehatan

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Padang, 2026 Keterangan: - (data = 0)

c. *Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*

- Jalan dan Jembatan

Jalan merupakan salah satu infrastruktur utama dalam mendorong perekonomian suatu daerah. Jalan sebagai sarana penunjang transportasi memiliki peran penting khususnya untuk transportasi darat. Jumlah panjang jalan di Kota Padang tahun 2025 adalah sepanjang 624.691 km dengan kondisi yang relatif baik. Berikut disajikan panjang jalan menurut kondisi dan status di Kota Padang.

Tabel 2- 36 Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan dan Kondisi di Kota Padang Tahun 2025

Jenis Permukaan	Kondisi			Jumlah
	Baik (m)	Sedang (m)	Rusak (m)	
1. Aspal Beton	62,860	3.314	27.389,30	93.564,28
2. Aspal	417.009,50	12.635	71.216	500.860,50
3. Kerikil	-	-	4.984,56	4.984,56
4. Kolektor Sekunder	-	-	-	-
5. Macadom	-	-	-	-
6. Paving Block	-	-	25.281,66	-
Jumlah/Total				624,691

Sumber : Dinas PUPR 2026 Keterangan : - (data = 0)

Berikut disajikan data panjang jalan menurut Kecamatan dan kondisi jalan :

Tabel 2- 37Panjang Jalan Menurut Kecamatan dan Kondisi Jalan di Kota Padang Tahun 2025

No	Kecamatan	Kondisi Jalan			Jumlah
		Baik	Sedang	Rusak	
1	Bungus Teluk Kabung	20,756	3,686	5,418	29,860
2	Lubuk Kilangan	4,942	0,878	1,29	7,110
3	Lubuk Begalung	44,875	7,970	11,714	64,559
4	Padang Selatan	23,654	4,201	6,175	34,030
5	Padang Timur	33,003	5,862	8,615	47,480
6	Padang Barat	25,003	4,441	6,527	35,971
7	Padang Utara	27,053	4,805	7,062	38,920
8	Nanggalo	19,06	3,385	4,975	27,420
9	Kuranji	101,79	18,079	26,571	146,440
10	Pauh	33,928	6,026	8,856	48,810
11	Koto Tangah	100,157	17,789	26,145	144,091
	Jumlah	434,221	77,122	113,348	624,691

Sumber: Kota Padang Dalam Angka Tahun 2026

Berdasarkan tabel di atas tergambar bahwa proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (kondisi mantap) di Kota Padang sekitar 53,60% dari total panjang jalan yang ada dan jalan yang ada belum semuanya memiliki trotoar yang ramah terhadap penjalan kaki dan drainase/saluran pembuangan air.

Jaringan jalan yang ada di Kota Padang jika dilihat dari sisi fungsinya, terbagi menjadi sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder, serta lingkungan. Berdasarkan fungsi jalan tersebut, di Kota Padang terdapat jaringan jalan arteri primer, arteri sekunder, kolektor primer, kolektor sekunder, lokal primer, lokal sekunder dan lingkungan. Berikut ini disajikan panjang jalan

menurut fungsi di Kota Padang :

Tabel 2- 38 Panjang Jalan Menurut Fungsi dan Kondisi Permukaan di Kota Padang Tahun 2025

Fungsi	Kondisi			Jumlah
	Baik	Sedang	Rusak	
1. Arteri Primer	-	-	-	-
2. Arteri Sekunder	45,870	8,150	11,980	66,00
3. Kolektor Primer	-	-	-	
4. Kolektor Sekunder	119,490	21,220	31,200	171,910
5. Lokal Primer	-	-	-	-
6. Lokal Sekunder	268,851	47,750	70,180	386,786
7. Lingkungan	-	-	-	-
Jumlah/Total	434,211	77,120	113,360	624,691

Sumber: Kota Padang Dalam Angka Tahun 2026

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jalan arteri primer yang menjadi kewenangan Kota Padang tidak ada. Jalan arteri primer yang ada di Kota Padang adalah jalan arteri yang merupakan kewenangan pusat berdasarkan Keputusan Menteri PUPR Nomor

248 Tahun 2015 tentang Penetapan Ruas Jalan dalam Jaringan Jalan Primer menurut Fungsinya Sebagai Jalan Arteri dan Jalan Kolektor. Jalan yang termasuk jalan arteri primer dan jalan kolektor primer di Kota Padang, yaitu:

1. Jalan Adinegoro;
2. Jalan Prof. DR. Hamka;
3. Jalan Padang By Pass I;
4. Jalan Padang By Pass II;
5. Batas Kota Padang - Jalan Simpang Haru;
6. Jalan Bukit Putus - Teluk Bayur;

Kota Padang adalah Ibukota Provinsi Sumatera Barat dan kota inti dari Metropolitan Palapa serta bagian dari Kawasan Strategis Propinsi Sumatera Barat (berdasarkan RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032). Secara ekonomis, Kota Padang berperan dalam meningkatkan daya saing *(competitiveness)* kegiatan industri untuk pasar global, serta sebagai pusat perdagangan dan jasa. Kondisi ini mendorong tingginya tingkat intensitas perkembangan kota di Kota Padang, sehingga kebutuhan peningkatan dan pengembangan jaringan jalan internal kota serta jalan penghubung Kota Padang dengan kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat merupakan suatu kebutuhan yang diprioritaskan beberapa tahun ke depan untuk mencapai kondisi mantap.

Beberapa ruas jalan yang menghubungkan pusat pelayanan dan pusat kegiatan antar kawasan di Kota Padang perlu dilakukan peningkatan kondisi dan kapasitas jalan untuk mempermudah mobilisasi penduduk dan arus keluar masuk barang seperti peningkatan Jalan By Pass, Jalan akses menuju Terminal Tipe A Anak Air, dan Jalan Maransi serta Jalan Lingkar Timur (By Pass – Air Dingin – Lubuk Minturun – Gunung Sarik – Limau Manis – Bandar Buat – Bungus). Disamping peningkatan kapasitas jaringan jalan, juga perlu dilakukan pengembangan jaringan jalan yang dilakukan dengan pendekatan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah, dan membentuk

struktur ruang yang teratur sesuai dengan amanat dari rencana tata ruang. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah dan panjang jembatan di Kota Padang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2- 39 Jumlah dan Panjang Jembatan di Kota Padang Tahun 2021-2025

Tahun	Jembatan Gantung		Jembatan Rangka Baja		Jembatan Leger INP		Jembatan Beton		Jembatan Nasional		Jumlah	
	Jumlah	Panjang (m)	Jumlah	Panjang (m)	Jumlah	Panjang (m)	Jumlah	Panjang (m)	Jumlah	Panjang (m)	Jembatan	Panjang (m)
2021	10	356,50	25	1.176,20	86	888,29	143	2.115,48	57	1920	264	4.536,47
2022	10	356,50	25	1176,20	86	888,29	143	2.115,48	-	-	264	4.536,47
2023	10	356,50	25	1176,20	86	888,29	143	2.115,48	-	-	264	4.536,47
2024	10	356,50	25	1176,20	86	888,29	143	2.115,48	-	-	264	4.536,47
2025	10	356,50	25	1176,20	86	888,29	143	2.115,48	-	-	264	4.536,47

Sumber: Kota Padang Dalam Angka Tahun 2026 *Keterangan: - (data = 0)*

Sarana dan prasarana penghubung transportasi darat selain jalan adalah jembatan. Pembangunan jembatan mempunyai beragam manfaat yang bisa dilihat dari berbagai segi. Salah satu manfaat dari pembangunan jembatan yang dapat dirasakan secara langsung yakni kemudahan akses dari satu tempat ketempat lain dimana diantara kedua tersebut terdapat penghalang seperti sungai, jurang, danau, bahkan laut. Kota Padang yang dilintasi oleh 21 sungai didukung oleh keberadaan 264 jembatan dengan total panjang 4.536,47 meter.

Untuk ke depannya, masih dirasakan perlunya Pemerintah Kota Padang meningkatkan kualitas jembatan yang ada dan membangun jembatan baru sebagai sarana penghubung antar daerah yang terpisah oleh sungai di Kota Padang. Kelayakan sarana dan prasarana transportasi di Kota Padang harus benar-benar diperhatikan agar mobilitas yang dilakukan masyarakat menjadi lancar. Jadi, Pemerintah Kota Padang benar-benar mengamati dan memperhatikan kerusakan-kerusakan pada jembatan di Kota Padang secara detail agar terdapat kenyamanan, kemanan dan keselamatan bagi pengguna jembatan di Kota Padang dalam melakukan kegiatan sehari-hari.

b. Drainase Perkotaan

Sistem drainase Kota Padang yang telah berkembang hingga saat ini terdiri dari saluran alami (sungai), saluran buatan, dan kolam tandon. Umumnya sistem drainase yang berkembang merupakan sistem drainase yang masih menggunakan paradigma konvensional, sedangkan sistem drainase ramah lingkungan yang berkembang masih terbatas penggunaan kolam tandon. Kolam tandon yang sudah ada di Kota Padang meliputi:

a) Kolam tandon Cimpago (Danau Cimpago) muara sungai Banda Bakali (kanal Banda Bakali) terletak di Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat. Luas Tandon Cimpago 2,45 ha dengan keliling 1,25 km. Kolam Tandon Cimpago termasuk area drainase Ujung Gurun. Kondisi muara Banda Bekali dipengaruhi oleh pasang surut Pantai Purus.

b) Baung Panjalinan Ponds terletak pada muara Sungai Batang Air Dingin di Kelurahan Bungo Pasang, Kecamatan Koto Tangah. Baung Panjalinan Ponds merupakan tampungan yang terbentuk dari alam. Luas Baung Panjalinan Ponds 19,67 ha dengan keliling: 4,41 km.

c) Kolam Tandon Ulak Karang terletak pada muara Sungai Batang Kuranji atau Batang Muar, sebelah kiri aliran sungai tersebut. Terletak di Kelurahan Ulak Karang Utara, Kecamatan Padang Utara.

d) Kolam Tandon Parkit terletak pada muara Sungai Batang Kuranji atau Batang Muar, sebelah kanan aliran sungai tersebut. Terletak di Kelurahan Air Tawar Barat, Kecamatan Padang Utara. Kolam Tandon Parkit berhubungan dengan areal drainase Baung Panjalinan Ponds.

Kondisi kolam tandon yang ada sekarang masih berfungsi, tetapi

tidak dipelihara dengan baik, sehingga menurunkan fungsi sebagai penampung air ketika pasang naik. Dilihat dari kondisi banjir beberapa tahun ini yang disebabkan limpasan air dari wilayah hulu, maka dibutuhkan pengembangan kolam penampung air di wilayah hulu dan tengah. Kolam yang perlu dikembangkan adalah kolam detensi dan kolam retensi. Termasuk penambahan kolam tandon di beberapa tempat lainnya. Kolam yang dikembangkan, perlu dilengkapi dengan sistem polder.

Jaringan drainase di Kota Padang pada umumnya merupakan drainase pasangan batu dan drainase alam yang pembuangan akhirnya terkumpul pada sungai, dimana sistem ini bertumpu pada 10 saluran/badan penerima utama dengan luas tangkapan 3.986 ha, yaitu:

1. Batang Air Dingin.
2. Batang Tabing.
3. Batang Balimbiang.
4. Baung Panjalinan Ponds.
5. Batang Kuranji.
6. Saluran Lolong.
7. Banjir Kanal.
8. Batang Arau.
9. Batang Jirak.

Sistem drainase di Kota Padang dibagi atas 19 (sembilan belas) areal sistem drainase. Untuk lebih jelasnya mengenai areal sistem drainase di Kota Padang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2- 40 Areal Sistem Drainase Kota Padang

No.	Areal Drainase	Luas Tangkapan (ha)	Badan Air Penerima	Penggunaan Lahan
1	Air Pacah	426	Batang Balimbiang	Pertanian dan Permukiman
2	Pasir Putih	60	Batang Air Dingin	Permukiman
3	Tabing	307	Batang Tabing	Bandara
4	Airport	352	Batang Balimbiang	Permukiman
5	Baung Penjalinan	291	Baung Panjalinan Pond	Permukiman
6	Siteba	128	Batang Balimbiang	Permukiman
7	Sawah Liat	174	Batang Kuranji	Permukiman
8	Kandis	85	Batang Kuranji	Permukiman
9	Lapai	164	Batang Kuranji	Permukiman
10	Ulak Karang	223	Batang Kuranji	Perkantoran, Perdagangan dan Permukiman
11	Lolong	304	Saluran Lolong	Permukiman dan Perdagangan
12	Purus	136	Banjir Kanal	Permukiman dan Perkantoran
13	Jati	120	Banjir Kanal	Permukiman dan Perdagangan
14	Alai	322	Batang Arau	Pertanian
15	Ujung Gurun	303	Banjir Kanal	Permukiman, Permukiman dan Perkantoran

No.	Areal Drainase	Luas Tangkapan (ha)	Badan Air Penerima	Penggunaan Lahan
16	Aur Duri	271	Batang Arau	Permukiman
17	Olo Nipah	197	Batang Arau	Perdagangan dan Permukiman
18	Kali Mati	50	Batang Arau	Permukiman
19	Rawang Barat	73	Batang Jirak	Permukiman
	Total	3.335,24		

Sumber: Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kota (SSK) Padang

Pengelolaan drainase merupakan tugas utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang dibantu oleh Dinas Lingkungan Hidup. Dinas PUPR bertugas mengelola sepanjang 49.275 meter drainase primer dan 29.395 meter drainase sekunder. Sedangkan area layanan pengelolaan drainase oleh Dinas LH mencakup drainase lingkungan dan 5 (lima) buah banjir kanal dengan total panjang 24.850 meter. Drainase di Kota Padang tidak hanya diperuntukkan sebagai penyaluran air hujan namun juga sebagai pengendali banjir di wilayah perkotaan dan berfungsi juga sebagai saluran pembuangan air limbah.

Kondisi drainase pada pusat-pusat permukiman dan kawasan pasar, banyak yang tidak berfungsi dengan baik akibat tumbukan sedimen, sampah dan jaringan utilitas kota seperti pipa PDAM, drainase yang ada belum terintegrasi dan banyak terputus, serta kapasitas/dimensi jaringan drainase kota yang tidak memadai karena terjadinya penyempitan drainase. Kondisi ini menyebabkan lambatnya laju air menjadi sehingga terjadi banjir dan genangan. Banjir dan genangan yang terjadi di Kota Padang, cenderung merupakan pola yang berulang pada kawasan yang sama dan jenis ancaman yang relatif permanen dikala musim penghujan tiba. Banjir terjadi di sepanjang jalan utama Kota Padang dan kawasan sekitarnya termasuk permukiman dan rumah sakit. Beberapa wilayah yang dilanda banjir adalah daerah By Pass, Palarik, Lubuk Minturun, Jundul Rawang, Berok Siteba, Air Dingin dan Dadok Tunggul Hitam.

c. Penataan Ruang (Perencanaan, Pemanafaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) menjadi acuan dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kota. RTRW adalah dasar untuk penerbitan perizinan lokasi pembangunan dan administrasi pertanahan. Kota Padang telah memiliki Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Padang Tahun 2010-2030 yang merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota Padang. Adapun rencana program pembangunan wilayah menurut Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang

Nomor 4 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Padang Tahun 2010-2030 mencakup rencana struktur ruang kota dan rencana pola ruang kota.

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030 tersebut merupakan rencana umum yang belum mengatur secara rinci mengenai pelaksanaan pemanfaatan ruang pada skala persil sehingga masih memerlukan perincian/pendetailan dalam bentuk Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) dan penyusunan peraturan zonasi agar lebih operasional digunakan dalam perizinan.

Dikarenakan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) masih dalam tahap proses penyusunan saat ini maka Kota Padang dalam memberikan izin pemanfaatan ruang masih berpedoman kepada Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030, sehingga persentase ketaatan terhadap tata ruang 100%.

Dari luasan 694,96 km² wilayah daratan Kota Padang, hanya 25% yang merupakan wilayah efektif perkotaan, sedangkan 75% merupakan kawasan lindung yang terdiri dari hutan suaka, hutan lindung, kawasan sabuk hijau/*green belt*, sempadan pantai, sempadan sungai, dan ruang terbuka hijau kota. Kondisi ini menyebabkan Kota Padang memiliki keterbatasan daya dukung dan daya tampung ruang yang dapat dikembangkan untuk kegiatan perkotaan.

Berdasarkan pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dijelaskan bahwa penyediaan ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit sebesar 30% dari luas wilayah kota yang dibagi menjadi RTH publik paling sedikit 20% dan RTH privat sebesar 10%. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Padang Tahun 2010-2030, ditargetkan hingga tahun 2030 penyediaan ruang terbuka hijau publik di Kota Padang mencapai ± 24,70%, yang direncanakan terdistribusi sesuai dengan sebaran penduduk dan hirarki pelayanan.

Namun faktanya, penyediaan RTH publik dalam lingkup perkotaan masih terbilang minim, terutama di kawasan perumahan. Dimana prioritas pembangunan di kawasan perumahan, fokus pada penyediaan hunian dan fasilitas penunjang hunian lainnya (fasos dan fasum) yang tidak diikuti dengan penyediaan ruang terbuka hijau publik secara kuantitas maupun kualitas.

Hal ini mengakibatkan semakin minimnya ketersedian RTH Publik di kawasan perumahan yang secara tidak langsung akan berdampak kepada semakin terbatasnya tempat bagi masyarakat untuk melakukan interaksi/sosialisasi dengan sahabat dan teman diluar rutinitas sehari-hari dan berkurangnya tempat untuk bermain bagi anak-anak. Kondisi ini cenderung menyebabkan dijadikannya ruang milik jalan sebagai area bermain bagi anak-

anak atau anak-anak lebih banyak menghabiskan waktu dengan bermain gadget di rumah.

Tabel 2- 41 Kinerja Daerah Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021-2025

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SAT	Realisasi					PD Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025	
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	km	13139	1374,63	84,5	84,5	0,7935	Dinas PUPR
2	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	rasio	465,1	465	402,24	402,24	0,655	Dinas PUPR
3	Persentase jalan kota dalam kondisi baik (> 40 km/Jam)	%	59,08	69,95	84,5	84,5		Dinas PUPR
4	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	%	11,5	12,15	21	21	62,57	Dinas PUPR
5	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	73,33	74,08	76,5	78,03		Dinas PRKP
6	Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	%	2	2	1,76	1,76	-	Dinas PUPR
7	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	72,5	72,8	65,03	65,03	75	Dinas PUPR
8	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	%	0,3	0,29	0,24	0,24	50	Dinas PUPR
9	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	84,89	85	62,29	62,29	80,79	Dinas PUPR
10	Rasio Jaringan Irigasi	rasio	85	89	46,72	46,72	-	Dinas PUPR
11	Persentase penduduk berakses air minum	%	92,68	94,15	95,79	78,24	-	Dinas PRKP
12	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	%	92,68	73,06	78	78,03		Dinas PRKP
13	Persentase areal kawasan kumuh	%	0,18	-	63,95	0		Dinas PRKP
14	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	%	20,00*	16,38	21.21	21,95		Dinas Lingkungan Hidup

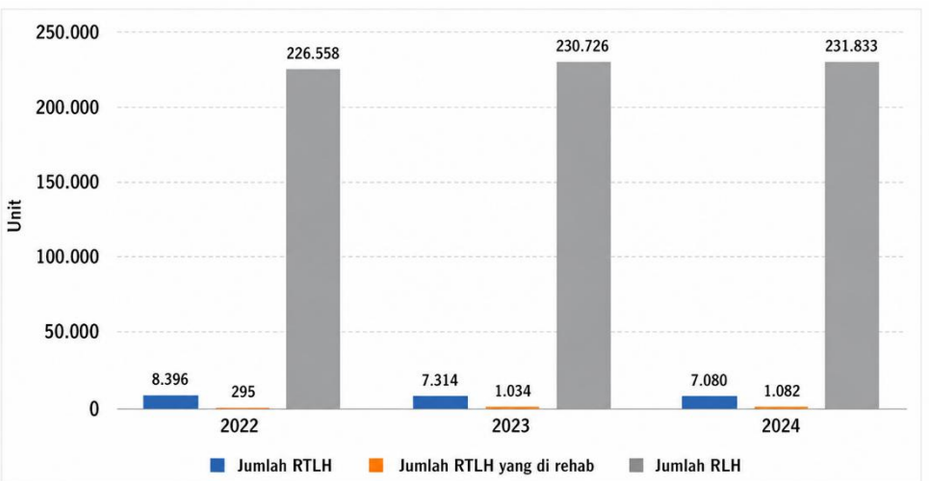
NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SAT	Realisasi					PD Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025	
15	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	%	0,88*	0,95	2.03	1.96		Dinas Lingkungan Hidup
16	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	rasio	0,7	0,92	0,8	0,8	0,95	Dinas PUPR
17	Ruang publik yang berubah peruntukannya	%	0,17	0,21	-	-	-	Dinas PUPR
18	Ketaatan terhadap RTRW	%	100	100	100	100	100	Dinas PUPR

Sumber: Dinas PUPR, Dinas PRKP, Dinas Lingkungan Hidup, Bag Kesra 2025

d. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 7/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, telah ditetapkan kriteria rumah tidak layak huni. Pada tahun 2024 jumlah rumah tidak layak huni di Kota Padang sebanyak 7.080 unit dan jumlah yang di rehab sebanyak 1.082 unit rumah dan jumlah rumah yang layak huni terdata sebanyak 231.833 unit. Rehab rumah tidak layak huni masih menjadi fokus Pemerintah Kota Padang untuk mengurangi kemiskinan.

Gambar 2- 34 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni, Rumah Tidak Layak Huni yang direhab dan Jumlah Rumah Layak Huni Tahun 2021-2024 (unit)



Sumber: Kota Padang Dalam Angka, 2026

Berdasarkan SK Walikota Padang Nomor 310 Tahun 2025 tentang Lokasi Perumahan Kumuh dan Perkumiman Kumuh dijelaskan bahwa di Kota Padang terdapat seluas 196,45 Ha kawasan kumuh yang tersebar di 25 (dua puluh lima)lokasi. Kota Padang akan melakukan penanganan pada Kawasan Kumuh tersebut hingga akhir tahun RPJMD Kota Padang Tahun 2025-2029 dengan target

0 Kumuh pada tahun 2029. Untuk lebih jelasnya sebaran lokasi kawasan kumuh tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2- 42 Sebaran Kawasan Kumuh Kota Padang

No.	Lokasi Kawasan Kumuh	Kelurahan	Kecamatan	luas Kumuh (Ha)
1	Cengkeh	Cengkeh	Lubuk Begalung	7,65
2	Tanah Sirah Piai Nan XX	Tanah Sirah Piai Nan XX	Lubuk Begalung	14,53
3	Tanjung Saba Pitameh	Tanjung Saba Pitameh	Lubuk Begalung	11,23
4	Kampung Baru Nan XX	Kampung Baru Nan XX	Lubuk Begalung	5,49
5	Tanjung Aur Nan XX	Tanjung Aur Nan XX	Lubuk Begalung	4,89
6	Pampangan	Pampangan	Lubuk Begalung	2,32
7	Gurun Lawas	Gurun Lawas	Lubuk Begalung	4,26
8	Gates Nan XX	Gates Nan XX	Lubuk Begalung	3,26
9	Pengambiran Ampalu Nan XX	Pengambiran Ampalu Nan XX	Lubuk Begalung	2,78
10	Batu Gadang	Batu Gadang	Lubuk Kilangan	10,03
11	Indarung	Indarung	Lubuk Kilangan	7,1
12	Kampung Jao	Kampung Jao	Padang Barat	3,7
13	Rimbo Kaluang	Rimbo Kaluang	Padang Barat	5,11
14	Kampung Lapai	Kampung Lapai	Nanggalo	10,01
15	Gunung Panggilun	Gunung Panggilun	Padang Utara	10,05
16	Ganting Parak Gadang	Ganting Parak Gadang	Padang Timur	2,03
17	Andalas	Andalas	Padang Timur	4,14
18	Simpang Haru	Simpang Haru	Padang Timur	3,97
19	Kuranji	Kuranji	Kuranji	4,99
20	Sungai Sapih	Sungai Sapih	Kuranji	15,07
21	Koto Luar	Koto Luar	Pauh	11,61
22	Pasir Nan Tigo	Pasir Nan Tigo	Koto Tangah	28,23
23	Bungo Pasang	Bungo Pasang	Koto Tangah	3,19
24	Rawang	Rawang	Padang Selatan	15,97
25	Air Manis	Air Manis	Padang Selatan	4,84
	Total			196,45

(Sumber : SK Wali Kota Padang nomor 310 Tahun 2025)

Disamping itu, tiap tahunnya melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ditargetkan untuk memberikan fasilitasi rumah bersubsidi bagi masyarakat sebanyak 1000 unit/tahun. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengatasi tingkat kebutuhan kepemilikan rumah yang cendrung terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah kepala keluarga di Kota Padang.

Kinerja urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2021-2025 dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2- 43 Kinerja Daerah Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2021-2025

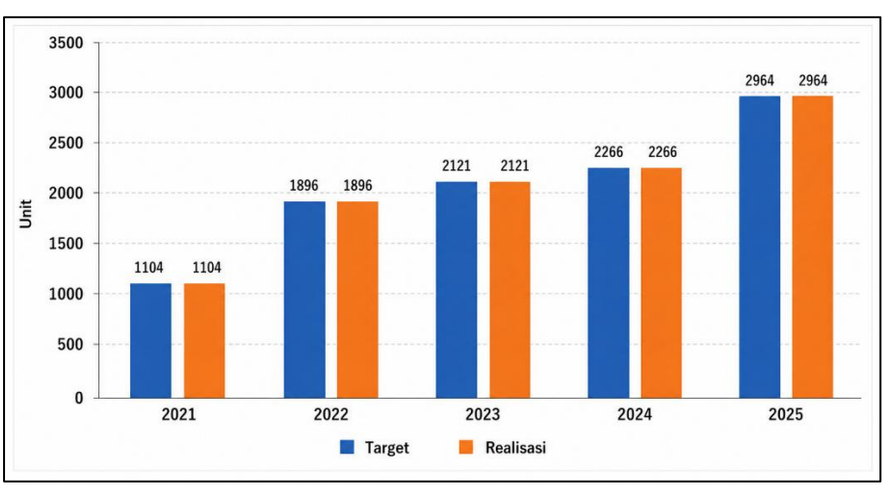
No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi					PD Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025	
1	Rasio rumah layak huni	rasio	0,22	0,221	0,202	0,25	0,25	Dinas PRKP
2	Rasio permukiman layak huni	rasio	-	7,92	-	-	-	Dinas PRKP
3	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	95,91	96,44	96,80	97,00	97,20	Dinas PRKP
4	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	%	50,77	52,77	52,39	72,50	76,39	Dinas PRKP
5	Persentase permukiman yang tertata	%	8,79	7,92	8,85	-	-	Dinas PRKP
6	Persentase lingkungan permukiman kumuh	%	0,12	0,08	0,05	-	-	Dinas PRKP
7	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	%	0,12	0,08	0,32	-	-	Dinas PRKP

Sumber: Dinas PRKP 2025 Keterangan: - (data = 0)

e. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Kriminalitas merupakan salah satu penghambat bagi kota untuk mewujudkan rasa aman, damai, dan tentram dalam kehidupan sehari-hari. Selain angka kriminalitas, masalah ketertiban, kententraman, dan keindahan (K3) juga menjadi perhatian pemerintah daerah karena masih banyak terjadi pelanggaran terhadap K3. Pada tahun 2025 jumlah pelanggaran sebanyak 2.964 dan semuanya dapat terselesaikan. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2- 35 Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 Ketertiban, Ketentraman, Keindahan Tahun 2021-2025



Sumber: Satpol PP, 2025

Kinerja urusan Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2021-2025 dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2- 44 Kinerja Daerah Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2021-2025

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	Realisasi					PD Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025	
1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	%	40,00	40	40	40	-	Satpol PP
2	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Tibum & Tranmas	%	109,99	84	103,72	100	-	Satpol PP
3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kota	%	100	67,84	-	100	100	Dinas Pemadam Kebakaran
4	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	97,60	99,47	98,50	100	100	Dinas Pemadam Kebakaran
5	Persentase Penegakan PERDA	%	322,16	2,92	3,54	2,87	-	Satpol PP
6	Persentase Kejadian Kebakaran yang ditangani sesuai SOP	%	-	-	-	-	100	Dinas Pemadam Kebakaran
7	Persentase Penyelamatan Kedaruratan yang terlayani sesuai SOP	%	-	-	-	-	100	Dinas Pemadam Kebakaran

Sumber : Satpol PP, Dinas Damkar 2025

Pada capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja telah disusun target penyelesaian pelanggaran ketertiban umum, dengan artian setiap pelanggaran yang masuk ke Satpol PP dapat diselesaikan, ditahun 2023 terjadi peningkatan penyelesaian pelanggaran Tibum, sehingga melebihi target yang diprediksi. dan ditahun 2024 realisasi sesuai dengan penyelesaian target yang ditetapkan

f. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Penduduk miskin merupakan salah satu Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ada. Ada 26 (dua puluh enam) jenis PPKS yang sudah terdata di Kota Padang sebagaimana data pada tabel berikut :

Tabel 2- 45 Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kota Padang Tahun 2021-2025

No.	Jenis PPKS	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
1	Anak Balita Terlantar	Anak	-	4	11	11	11
2	Anak Terlantar	Anak	1255	2110	1178	1438	1438

No.	Jenis PPKS	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
3	Anak Yang berhadapan Dengan Hukum	Anak	76	50	56	50	59
4	Anak Jalanan	Anak	43	40	16	38	38
5	Anak Dengan Kedisabilitasan	Anak	1.540	1650	1689	1554	1554
6	Anak Korban Tindak Kekerasan	Anak	20	5	20	36	38
7	Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Anak	35	50	35	50	50
8	Lanjut Usia Terlantar	Orang	4.003	280	202	150	201
9	Penyandang Disabilitas	Orang	1.695	1724	1547	1334	1334
10	Tuna Susila	Orang	86	86	126	118	118
11	Gelandangan	Orang	22	11	15	10	12
12	Pengemis	Orang	11	23	15	20	80
13	Pemulung	Orang	23	23	16	20	28
14	Kelompok Minoritas	Orang	-	-	-	0	0
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)	Orang	-	-	-	14	12
16	Orang Dengan HIV/AIDS	Orang	40	0	332	311	252
17	Korban Penyalahgunaan Napza	Orang	268	310	40	91	98
18	Korban Trafficking	Orang	-	-	-	0	0
19	Korban Tindak Kekerasan	Orang	-	-	20	0	0
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	Orang	1	-	-	0	0
21	Korban Bencana Alam	Orang	2.282	572	3628	185	2845
22	Korban Bencana Sosial	Orang	387	324	312	343	682
23	Perempuan Rawan Sosial	Orang	105	505	-	0	0
24	Fakir Miskin	KK	48.440	42.370	41.970	41.400	37.380
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi	KK	81-	265	34	60	100
26	Komunitas Adat Terpencil	KK	-	-	-	0	0

Sumber : Dinas Sosial Tahun 2026 Keterangan : - (data = 0)

Penjelasan :

- Kelompok minoritas (14) tidak terdapat kelompok minoritas di Kota Padang

- Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) (15) data berasal dari Bapas, data tersebut mulai direkap oleh perangkat daerah penanggung jawab mulai tahun 2024.

- Korban *Trafficking (18)* Korban trafficking ket. tidak terdapat korban trafficking pada tahun 2024

- Korban Tindak Kekerasan (19) Korban tindak kekerasan ket. tidak ditemui data korban tindak kekerasan tahun 2024

- Pekerja Migran Bermasalah Sosial (20) Pekerja migran bermasalah sosial ket. tidak ada laporan korban pekerja migran bermasalah sosil tahun 2024

- Perempuan Rawan Sosial (23) Perempuan rawan sosial ket. tidak terdapat data perempuan rawan sosial tahun 2024

- Komunitas Adat Terpencil (26) Komunitas adat terpencil ket. Tidak terdapat komunitas adat terpencil di Kota Padang

Kinerja urusan Sosial Tahun 2021-2025 dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2- 46 Kinerja Daerah Urusan Sosial Tahun 2021-2025

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi					PD Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025	
1	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial	%	87	99,11	96,13	92	91,17	Dinas Sosial
2	Persentase PPKS yang tertangani	%	91	99,11	96,13	92	92,51	Dinas Sosial
3	Persentase PPKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	87	99.11	96,13	91	91,08	Dinas Sosial
4	Persentase KUBE PPKS yang dapat berkembang secara mandiri	%	50	63,49	68,69	78	80,43	Dinas Sosial
5	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	%	5.71	5,88	5,88	100	12,20	Dinas Sosial
6	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
7	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
8	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	23	23	16,29	15,24	28,03	Dinas Sosial
9	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	100	100	100	

Sumber: Dinas Sosial Tahun 2026

2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

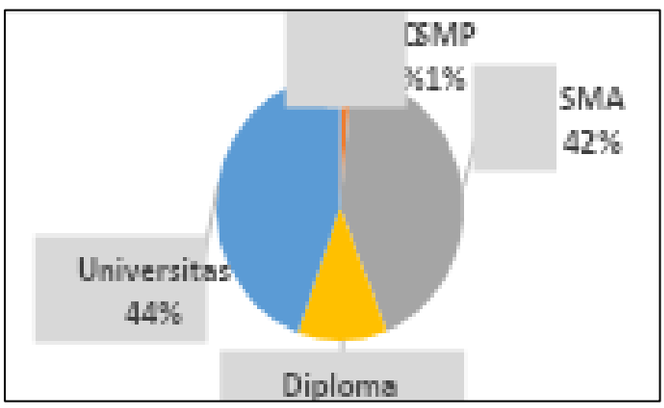
a. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Ketenagakerjaan merupakan bidang yang penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat karena dalam bidang ini

dapat menunjukkan kualitas sumber daya manusia yang secara otomatis berdampak pada pendapatan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam bidang ketenagakerjaan dimana semakin menurun tingkat pengangguran dapat mengindikasikan peningkatan kesejahteraan manusia karena diasumsikan pendapatan rumah tangga yang meningkat.

Sebagian besar pencari kerja di Kota Padang menurut tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan merupakan lulusan Universitas yang mencapai 44,46 persen dan disusul oleh lulusan SMA sebesar 42,28 persen. Jumlah pencari kerja menurut pendidikan tertinggi disajikan pada gambar berikut :

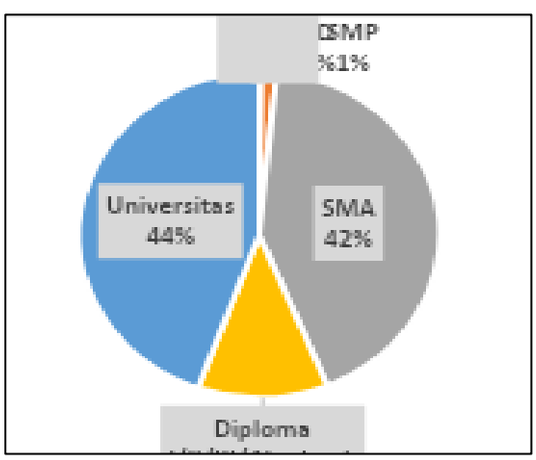
Tabel 2- 47 Persentase Pencari Kerja Terdaftar Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Di Kota Padang, Tahun 2025



Sumber: Kota Padang Dalam Angka 2026

Sementara itu, untuk pencari kerja yang telah ditempatkan menurut tingkat pendidikan didominasi oleh pencari kerja dengan tingkat pendidikan SMA dengan persentase sebesar 65 % dan diikuti oleh tingkat pendidikan Universitas sebesar 26 % dan diploma sebesar 7 %. Jumlah pencari kerja yang telah ditempatkan menurut tingkat pendidikan di tampilkan pada gambar berikut:

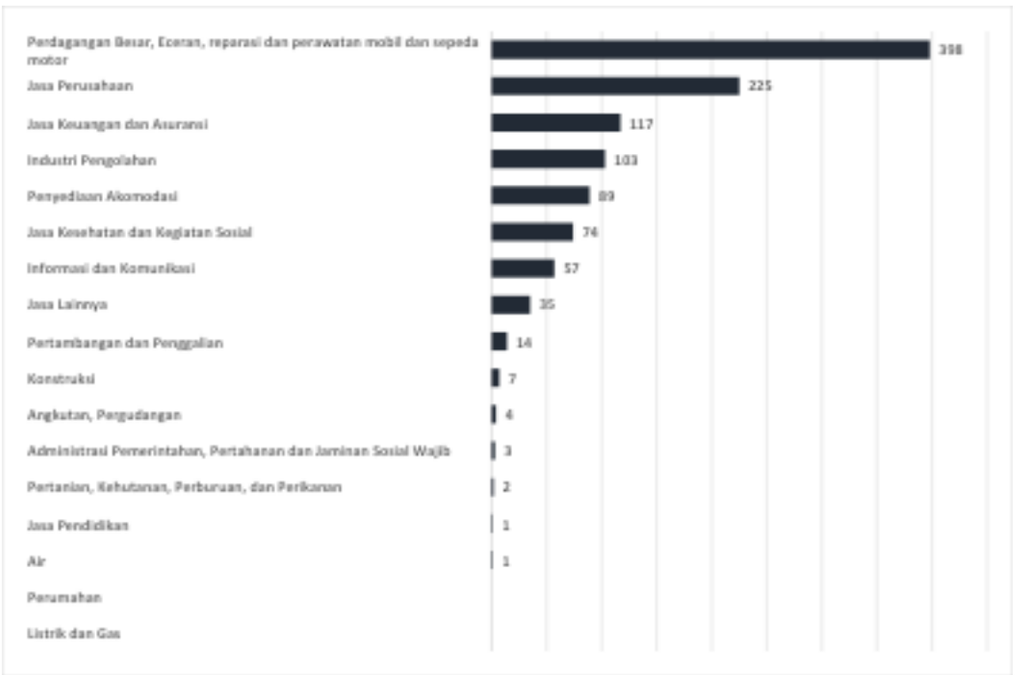
Gambar 2- 36 Jumlah Pencari Kerja Yang Telah Ditempatkan Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2025



Sumber: Kota Padang Dalam Angka 2025

Pemenuhan Lowongan Permintaan Tenaga Kerja menurut Lapangan Usaha terbanyak berasal dari lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib disusul oleh lapangan usaha Jasa Lainnya. Secara lebih detail disajikan pada gambar berikut :

Gambar 2- 37 Pemenuhan Lowongan Permintaan Tenaga Kerja menurut Lapangan Usaha Terbanyak Tahun 2025



Sumber: Kota Padang Dalam Angka 2026

Kinerja urusan Tenaga Kerja Tahun 2021-2025 dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2- 48 Kinerja Daerah Urusan Tenaga Kerja Tahun 2021-2025

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi					PD Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025	
1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	angka	24,53	19.64	15,06	16,84	24,72	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	70,58	56.60	56,60	68	67,04	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	12,85	19,95	19,46	31,13	29,72	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
4	Jumlah pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	angka	3395	116.598	98240	95887	100454	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi					PD Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025	
5	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	%	1	-	-	0	100	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
6	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	46,38	81,3	100%	88	97,89	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
7	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	%	-	-	-	-	-	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
8	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	100%	96 %	100%	0	91,83	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
9	Rasio lulusan S1/S2/S3	rasio	28,95	5,3 %	3,39%	26,05	20,67	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
10	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	1,2	62,81	66,99	66,99	67,27	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
11	Tingkat pengangguran terbuka	%	13,37	11,69	10,86	10,86	9,7	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
12	Rasio penduduk yang Bekerja	rasio	88,94	88,53	40,49%	89,14	90,3	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tahun 2025 Keterangan : - (data = 0)

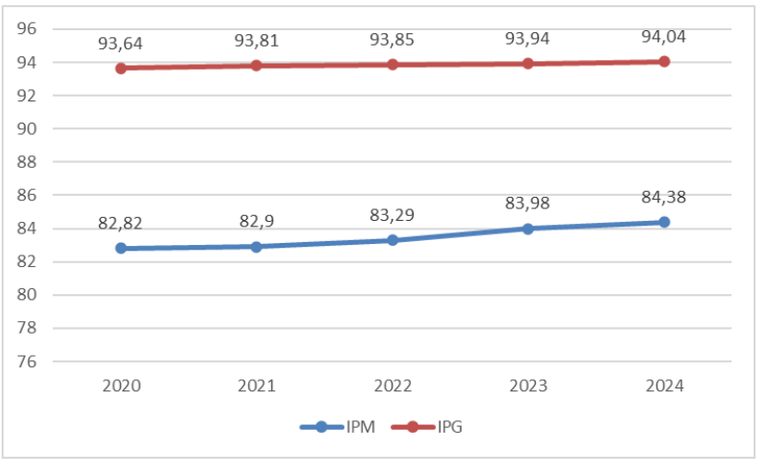
b. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan Perempuan dan Anak masih menjadi perhatian pemerintah daerah KotaPadang dalam rangka mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender.

Kesetaraan dan keadilan gender dapat terjadi apabila porsi dan siklus sosial perempuan dan laki- laki setara, serasi, seimbang dan harmonis. Indeks Pembangunan Gender atau (IPG) digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. Dilihat dari data 5 tahun terakhir, nilai IPG Kota Padang menunjukkan nilai yang lebih besar dari nilai IPM. Hal ini menunjukkan kesetaraan gender di Kota Padang cukup baik yang salah satu penyebabnya makin gencarnya pemerintah kota Padang melaksanakan Pengarustamaan Gender. Di tahun 2025 nilai IPM kota Padang sebesar 84,93, namun Nilai IPG belum keluar sehingga belum dapat disandingkan.

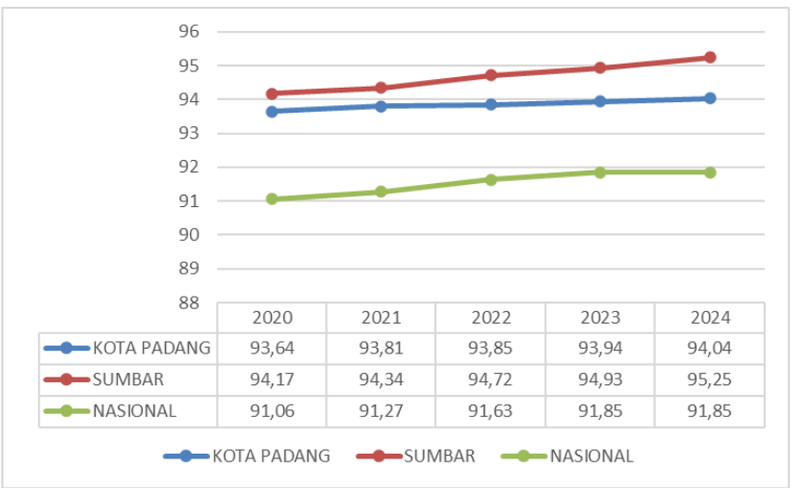
Tren capaian IPG Kota Padang dalam kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan posisi di atas nilai IPG Nasional namun berada sedikit di bawah nilai IPG Provinsi Sumatera Barat.

Gambar 2- 37 Perbandingan capaian IPM dan IPG Kota Padang Tahun 2020-2024



Sumber : Bappeda Kota Padang, 2026 (data diolah)

Gambar 2- 38 Perbandingan Capaian IPG Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional tahun 2020-2024



Sumber : DP3AP2KB, 2025

Peningkatan kualitas hidup perempuan juga membutuhkan perlindungan dari tindak kekerasan. Data lima tahun terakhir menunjukkan tingginya angka kekerasan terhadap perempuan di Kota Padang dimana pada tahun 2021 mengalami sedikit kenaikan kemudian mengalami penurunan di tahun 2022 dan 2023 namun kembali naik di tahun 2024. Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan ini di sebabkan mulai terbukanya masyarakat untuk melaporkan kejadian kepihak berwajib dan P2TP2A Kota Padang. Kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani oleh P2TP2A Kota Padang sejak tahun 2020 sampai tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2- 49 Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2021-2025

Tahun	Jenis Kekerasan							Jumlah
	KDRT	Fisik	Psikis	Seksual	Penelantaran	Eksploitasi	lainnya	
2021	4	-	13	-	2	2	33	54
2022	5	2	22	2	1	-	-	32

Tahun	Jenis Kekerasan							Jumlah
	KDRT	Fisik	Psikis	Seksual	Penelantaran	Eksploitasi	lainnya	
2023	6	1	16	4	-	-	-	27
2024	9	2	17	3	0	-	-	31
2025	7	0	10	3	0	-	-	20

Sumber: Pusat Pelayanan Teradu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Padang Keterangan : - (data = 0)

Tabel 2- 50 Kasus Kekerasan Terhadap Anak Tahun 2021-2025

Tahun	Jenis Kekerasan							Jumlah
	KDRT	Fisik	Psikis	Seksual	Penelantaran	Eksploitasi	lainnya	
2021	5	1	18	22	7	-	60	113
2022	3	1	19	22	4	-	-	49
2023	7	2	28	34	3	-	-	74
2024	7	6	28	31	5	1	-	78
2025	3	2	17	35	5		-	62

Sumber: Pusat Pelayanan Teradu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Padang Keterangan : - (data = 0)

Kualitas hidup anak juga ditentukan dari perlindungan terhadap anak dari tindak kekerasan. Data kekerasan terhadap anak dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 fluktuatif. Pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 kasus kekerasan terhadap anak cendrung menurun namun di tahun 2023 dan 2024 kembali mengalami sedikit peningkatan. Kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani oleh P2TP2A Kota Padang sejak tahun 2020 sampai tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di atas.

Dalam rangka memberikan apresiasi kepada kabupaten/kota yang telah baik dalam pemberdayaan dan perlindungan terhadap anak, Kementerian PPPA memberikan penghargaan Kota Layak Anak (KLA) kepada kabupaten/kota yang memiliki sistem pembangunan hak dan perlindungan khusus anak secara menyeluruh, berkelanjutan, dan terencana. Penghargaan KLA dibagi menjadi beberapa tingkatan, yaitu tingkat Pratama, Madya, Nindya, Utama, dan KLA. Kota Padang berhasil mempertahankan peringkat Utama pada 2 tahun terakhir yaitu 2023 dan 2024. Berikut adalah penghargaan yang diterima Kota Padang dalam pemberdayaan dan perlindungan terhadap anak :

Tabel 2- 51 Penghargaan Kota Layak Anak yang diterima Kota Padang tahun 2021 - 2025

No	Tahun	Tingkatan
1	2021	Nindya
2	2022	Nindya
3	2023	Utama
4	2024	Utama
5	2025	Nindya

Sumber : Kementerian PPPA RI, 2025

Capaian kinerja urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada umumnya mencapai target yang

diharapkan. Untuk penanganan dan pelayanan terhadap kasus kekerasan perempuan dan anak dapat terlayani dan tertangani dengan baik. Peranan perempuan di lingkungan pemerintahan menunjukkan angka yang cukup signifikan dimana perempuan mempunyai peranan penting dalam pengambilan keputusan.

Kinerja urusan Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021-2025 dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2- 52 Kinerja Daerah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021-2025

No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	Realisasi					PD Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025	
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga Pemerintah	%	5,4	5,4	5,4	-		DP3AP2KB
2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	13,00	13	13,00	8.89	8.89	DP3AP2KB
3	Persentase partisipasi perempuan di lingkup pemerintah Kota Padang	%	70,87	71,02	71,56	71,65	71,65	DP3AP2KB
4	Rasio KDRT	rasio	0,039	0,034	0,06	0,07	0,04	DP3AP2KB
5	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	51,35	51,35	51,35		56,45	DP3AP2KB
6	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	100	100	100	DP3AP2KB
7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	%	100	100	100	100	100	DP3AP2KB
8	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	%	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
9	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	100	100	100	100	100	DP3AP2KB

10	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	100	100	100	100	100	DP3AP2KB
11	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	100	100	100	100	100	DP3AP2KB
12	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	100	100	100	100	100	DP3AP2KB

Sumber: Dinas P3AP2KB Tahun 2025

Keterangan : - (data = 0)

c. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Ketahanan pangan merupakan kondisi dimana suatu wilayah mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya secara mandiri dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata dan menyeluruh. Kinerja pelayanan urusan pangan dapat dilihat dari beberapa indikator pada tabel berikut :

Tabel 2- 53 Kinerja Daerah Urusan Pangan Tahun 2021-2025

No	Bidang Urusan/ Indikator	Sat	Realisasi					PD Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025	
1	Ketersediaan pangan utama	%	110,8	126.85	111,65	114,81	126,07	Dinas Perikanan dan Pangan
2	Ketersediaan energi dan protein per kapita		3025	3.152	3.131	3.600	3052	Dinas Perikanan dan Pangan
3	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	85	88	94,44	92,85	80,77	Dinas Perikanan dan Pangan
4	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	85,6	84.1	88,1	87,1	92,35	Dinas Perikanan dan Pangan
5	Penguatan cadangan pangan	%	105	15	13,05	29,31	180,99	Dinas Perikanan dan Pangan
6	Indeks Ketahanan Pangan	%	68,3	69,24	74,85	86	86,03	Dinas Perikanan dan Pangan
7	Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB	%	3,45	3,34	3,30	3,28	3,44	Dinas Perikanan dan Pangan
8	Persentase Pangan Segar yang Aman di Konsumsi	%	85	88	94,44	92,85	80,77	Dinas Perikanan dan Pangan

Sumber : Dinas Perikanan dan Pangan Tahun 2025 Keterangan : - (data = 0)

d. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Jumlah luas tanah negara yang sudah disertifikat meningkat di tahun 2022 dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 tanah yang disertifikasi sebanyak 5.524 sertifikat dengan luas 1.843.585 m^2 menjadi 5.596 sertifikat dengan luas 3.718.038 m^2 di tahun 2022. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya Program Sertifikat Tanah Gratis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Pada tahun 2024 jumlah tanah yang sudah disertifikatkan sebanyak 13.370, dan 6 Tanah Negara disertifikatkan sebanyak 6 Persil dengan total luas 19.353 meter persegi di tahun 2025.

Tabel 2- 54 Jumlah dan Luas Tanah yang sudah disertifikatkan Kota Padang Tahun 2021-2025

Tahun	Tanah Negara		Tanah Masyarakat		Total	
	Jumlah Sertifik at	Luas (m2)	Jumlah Sertifikat	Luas (m2)	Jumlah Sertifikat	Luas (m2)
2021	-	-	-	-	5.524	1.843.585
2022	-	-	-	-	5.596	3.718.038
2023	-	-	-	-	12.468	8.108.007
2024	-	-	-	-	13.370	6.763.052
2025	6	19.353	-	-	6	19.353

Sumber: Kota Padang Dalam Angka, 2025
Keterangan : - (data = 0)

Jumlah luas tanah di kota Padang yang sudah disertifikatkan dari tahun 2021 hingga tahun 2025 berjumlah 6.782.405 meter persegi.

Kinerja urusan Pertanahan Tahun 2021-2025 dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2- 54 Kinerja Daerah Urusan Pertanahan Tahun 2021-2025

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi					PD Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025	
1	Persentase luas lahan bersertifikat dalam satu tahun	%	100	100	100	100	100	Dinas Pertanahan
2	Penyelesaian kasus tanah Negara	%	85,71	100	100	100	100	Dinas Pertanahan

Sumber : Dinas Pertanahan Tahun 2025

e. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup merupakan salah satu unsur yang diutamakan dalam pelaksanaan pembangunan yang dinamis atau bisa disebut pembangunan yang berkelanjutan. Salah satu kinerja dalam pencapaian urusan lingkungan hidup adalah diperolehnya penghargaan Adipura dari Pemerintah Pusat. Penghargaan ini diberikan kepada Kota Padang sebagai kota yang bersih serta telah melakukan pengelolaan lingkungan perkotaan untuk kategori kota besar. Piala Adipura kategori Kota Besar ini merupakan yang kedua kalinya diraih Kota Padang berturut-turut dari 2017 dan 2018 setelah pasca gempa tahun 2009 lalu. Hanya saja untuk penilaian tahun 2019 tidak dapat dilaksanakan di tahun 2020.

Kota Padang sudah memiliki satu lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang berlokasi di Air Dingin Kecamatan Koto Tangah dengan luas 19,3 ha. TPA ini dilengkapi dengan sistem *sanitary landfill*, memiliki kapasitas 723.600 m^3 dan sudah terpakai sebesar 482.800 m^3. Timbulan sampah direduksi melalui program 3R (Reuse, reduce, recycle).

Tabel 2- 55 Timbulan Sampah Kota Padang dan Jumlah TPS

No.	Tahun	Timbulan Sampah (ton/hari)	3R (ton/hari)	% 3R	Jumlah TPS
1	2021	639,4	115,5	18,06	212
2	2022	643,76	136,51	21,21	157
3	2023	647,39	141,03	21.78	155
4	2024	657,90	80,13	12,18	144
5	2025	668,98	44,31	6,62	143

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, 2025

Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam terus dilakukan pemerintah Kota Padang antara lain dengan melakukan konservasi daerah aliran sungai yang menjadi kewenangan Kota Padang terutama pada 6 (enam) Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kota Padang yaitu DAS Batang Arau, DAS Kuranji, DAS Air Dingin, DAS Kandis, DAS Anai dan DAS Bungus. Namun demikian masih terdapat aktifitas masyarakat yang mengancam kelestarian lingkungan di sepanjang aliran sungai tersebut seperti pertambangan rakyat galian C, penyulingan air ulang, dan budidaya perikanan yang tidak terkontrol.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang ada di Kota Padang terdiri atas RTH publik dan RTH privat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dijelaskan bahwa Pemerintah Kota harus menyediakan minimal RTH publik 20 % dari luas wilayah perkotaan, yaitu seluas 13.899 ha. Kota Padang sudah memenuhi ketentuan ini, namun secara fungsi, ketersediaan RTH ini belum optimal baik itu untuk fungsi ekologi, sosial dan ekonomi serta arsitektural kota. Lebih lengkap lokasi RTH kota Padang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2- 56 Data Ruang Terbuka Hijau

No.	Jenis RTH	Nama RTH	Penanggung Jawab	Lokasi	Luas RTH (ha)	Persentase Luas RTH (%)
	Taman					
1.	Taman Lingkungan	Taman Batang Arau	Dinas Lingkungan Hidup	Jl. Muara Kel. Batang Arau Kec.batang Arau	1530	7,08
		Taman Kapal Malin Kundang	Dinas Lingkungan Hidup	Jl. Kp. Batu Kel. Batang Arau kec.Batang Arau	558	2,58
		Taman Tan Malaka	Dinas Lingkungan Hidup	Jl. Tan Malaka Kel. Sawahan Kec. Padang Timur	850	3,93
		Taman Jati gaung	Dinas Lingkungan Hidup	Jl. Jati Gaung Kel. Jati Kec. Padang Timur	650	3,01
		Taman Sawahan Timur	Dinas Lingkungan Hidup	Jl. Betawi Kel. Sawahan Timur Kec. Padang Timur	212	0,98
		Taman Digital	Dinas Lingkungan Hidup	Jl. KH. Ahmad Dahlan Kel. Alai Parak Kopi Kec. Padang Utara	1500	6,94

No.	Jenis RTH	Nama RTH	Penanggung Jawab	Lokasi	Luas RTH (ha)	Persentase Luas RTH (%)
		Taman Gurun Laweh	Dinas Lingkungan Hidup	Gurun Laweh nan XX Kel. Gurun Laweh Nan XX Kec. Lubuk Begalung	70	0,32
		Taman Parupuk Tabing	Dinas Lingkungan Hidup	Jl. Bahari Kel. Parupuk Tabing Kec. Koto Tangah	439	2,03
2.	Taman Kota	Taman Edukasi Bencana	Dinas Lingkungan Hidup	Jl. Samudera Kel. Purus Kec. Padang Barat	3878	17,95
3.	Taman Kecamatan	Taman Rimbo Kaluang	Dinas Lingkungan Hidup	Jl. Raden Saleh Kel. Rimbo Kaluang Kec. Padang Barat	1950	9,02
		Taman Nanggalo	Dinas Lingkungan Hidup	Jl. Raya Siteba Kel. Surau Gadang Kec. Nanggalo	1500	6,94
4.	Taman Pantai	Taman Naval Komodo	Dinas Lingkungan Hidup	Pantai Purus Kel. Rimbo Kaluang Kec. Padang Barat	1920	8,89
		Taman Muaro Lasak	Dinas Lingkungan Hidup	Pantai Purus Kel. Rimbo Kaluang Kec. Padang Barat	2500	11,57
5.	Kebun Bibit Tanaman Hias	Kebun Bibit DLH	Dinas Lingkungan Hidup	Jl. Polonia Kel. Air Tawar Barat Kec. Padang Timur	4050	18,74
	Jalur Hijau Jalan					
	Taman Pedestrian	Taman Grand Zuri (Dekat Kantor Pos)	Dinas Lingkungan Hidup	Jl. Bagindo Aziz Chan Kel. Belakang Pondok Kec. Padang Selatan	215	0,10
		Taman BUMN	Dinas Lingkungan Hidup	Kawasan Danau Cimpago Kel. Purus Kec. Padang Barat	239	0,11
		Taman Juanda	Dinas Lingkungan Hidup	Jl. Juanda Kel. Rimbo Kaluang Kec. Padang Barat	150	0,07
		Taman Monumen Gempa	Dinas Lingkungan Hidup	Jl. Gereja Kel. Belakang Tangsi Kec. Padang Barat	85	0,04
		Taman Sutomo	Dinas Lingkungan Hidup	Jl. Dr. Sutomo Kel. Kubu Marapalam Kec. Padang Timur	350	0,16
		Taman Sisingamangaraja	Dinas Lingkungan Hidup	Jl. Sisingamangaraja Kel. Simp. Haru Kec. Padang Timur	630	0,29
		Taman samping SPBU baru sawahan	Dinas Lingkungan Hidup	Jl. Sawahan Kel. Sawahan Kec. Padang Timur	127	0,06

No.	Jenis RTH	Nama RTH	Penanggung Jawab	Lokasi	Luas RTH (ha)	Persentase Luas RTH (%)
		Taman Samping SPBU Lama Sawahan	Dinas Lingkungan Hidup	Jl. Sawahan Kel. Sawahan Kec. Padang Timur	260	0,12
		Taman Tugu Selamat Datang	Dinas Lingkungan Hidup	Jl. Hamka Kel. Air Tawar Timur Kec. Padang Utara	894	0,41
		Taman Tugu Adipura	Dinas Lingkungan Hidup	Jl. Hamka Kel. Air Tawar Timur Kec. Padang Utara	78	0,04
		Taman Jembatan Tamsis	Dinas Lingkungan Hidup	Jl. Taman Siswa Kel. Alai Parak Kopi Kec. Padang Utara	300	0,14
	Taman Pulau Jalan	Taman Depan Masjid Nurul Iman	Dinas Lingkungan Hidup	Jl. Thamrin Kel. Alang Laweh Kec. Padang Selatan	42	0,02
		Taman Kampung Nias	Dinas Lingkungan Hidup	Jl. Kampung Nias Kel. Belakang Pondok Kec. Padang Selatan	38,42	0,02
		Taman depan jembatan seberang padang	Dinas Lingkungan Hidup	Jl. Thamrin Kel. Alang Laweh Kec. Padang Selatan	80	0,04
		Taman DIPO	Dinas Lingkungan Hidup	Depan Taman Melati Kel. Belakang Tangsi Kec. Padang Barat	90	0,04
		Taman depan SMUN 2	Dinas Lingkungan Hidup	Jl. Musi kel. Ujung Gurun Kec. Padang Barat	405	0,19
		Taman Simpang Pattimura	Dinas Lingkungan Hidup	Jl. Pattimura Kel. Kampung Jao Kec. Padang Barat	30	0,01
		Taman Joeng Sumatra	Dinas Lingkungan Hidup	Depan Hotel Ina Muara Kel. Belakang Tangsi Kec. Padang Barat	90	0,04
		Taman Tugu Padang Area	Dinas Lingkungan Hidup	Jl. Sutomo Kel. Simp. Haru Kec. Padang Timur	1100	0,50
		Taman Depan RST	Dinas Lingkungan Hidup	Jl. Gantiang Kel. Gantiang Parak Gadang Kec. Padang Timur	46	0,02
		Taman Perempatan Gantiang	Dinas Lingkungan Hidup	Simp. Ganting Padang Timur Kel. Gantiang Parak Gadang Kec. Padang Timur	135	0,06
		Taman Tugu Wahana Tata	Dinas Lingkungan Hidup	Jl. Sudirman Kel. Jati Baru Kec. Padang Timur	60	0,03

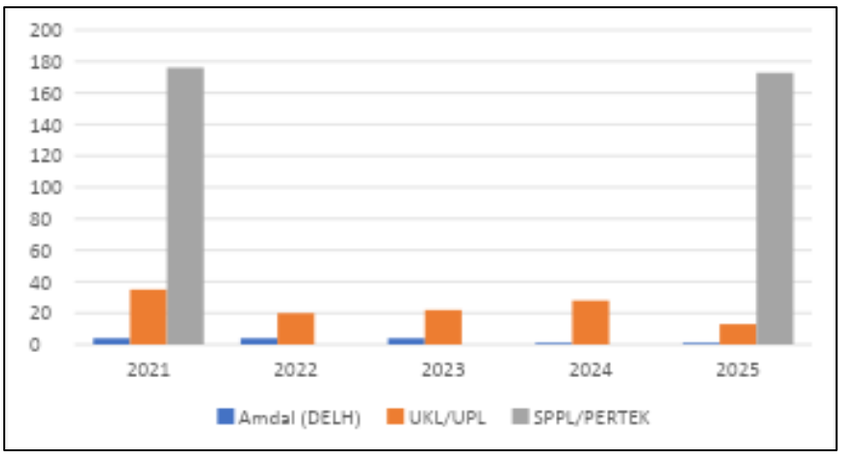
No.	Jenis RTH	Nama RTH	Penanggung Jawab	Lokasi	Luas RTH (ha)	Persentase Luas RTH (%)
		Taman depan Pos Polisi (Gardu PLN)	Dinas Lingkungan Hidup	Jl. Gantiang Kel. Gantiang Parak Gadang Kec. Padang Timur	275	0,13
		Taman Pasar Ulak Karang	Dinas Lingkungan Hidup	Jl. Jhony Anwar Kel. Ulak Karang Selatan Kec. Padang Utara	158	0,07
			Dinas Lingkungan Hidup	Jl. Thamrin Kel. Alang Laweh Kec. Padang Selatan	42	0,02
			Dinas Lingkungan Hidup	Jl. Kampung Nias Kel. Belakang Pondok Kec. Padang Selatan	38,42	0,02
	Taman Median Jalan	Hamka-S.Parman	Dinas Lingkungan Hidup	Jl. Hamka - Jl. S. Parman Kec. Padang Utara	3552	1,63
		Khatib-Batas Kecamatan	Dinas Lingkungan Hidup	Jl. Khatib Sulaiman - Batas Kecamatan, Kec. Padang Utara	913,32	0,42
		Depan Danau Cimpago	Dinas Lingkungan Hidup	Depan Danau Cimpago Kec. Padang Barat	900	0,41
		Jl. Samudera	Dinas Lingkungan Hidup	Jl. Samudera Kec. Padang Barat	7080	3,25
		Jl. Pemuda	Dinas Lingkungan Hidup	Jl. Pemuda Kec. Padang Barat	1022	0,47
		Jl. Raden Saleh	Dinas Lingkungan Hidup	Jl. Raden Saleh Kec. Padang Barat	1920	0,88
		Plansum pangkal jembatan juanda	Dinas Lingkungan Hidup	Jl. Ir. H. Juanda Kec. Padang Barat	153	0,07
		By Pass	Dinas Lingkungan Hidup	Jl. By Pass Kec. Kuranji	7570	3,47
		Jl. Moh. Hatta	Dinas Lingkungan Hidup	Jl. Moh. Hatta Kec. Kuranji	3945	1,81
		By Pass	Dinas Lingkungan Hidup	Jl. By Pass Kec. Kuranji	3300	1,51
		Hamka-Adinegoro	Dinas Lingkungan Hidup	Jl. Hamka - Jl. Adinegoro Kec. Koto Tangah	21440	9,83
		Jl. Moh Hatta	Dinas Lingkungan Hidup	Jl. Moh Hatta Kec. Pauh	5265	2,41
		By Pass	Dinas Lingkungan Hidup	Jl. Soetomo - Simp. Lubeg Kec. Lubuk Begalung	5730	2,63
		Soetomo-Simp. Lubeg	Dinas Lingkungan Hidup	Jl. Soetomo - Simp. Lubeg Kec. Lubuk Begalung	1470	0,67

No.	Jenis RTH	Nama RTH	Penanggung Jawab	Lokasi	Luas RTH (ha)	Persentase Luas RTH (%)
		Jl. Bandar Buat	Dinas Lingkungan Hidup	Jl. Bandar Buat Kec. Lubuk Begalung	1860	0,85
		Jl. Bandar Buat	Dinas Lingkungan Hidup	Jl. Bandar Buat Kec. Lubuk Kilangan	9600	4,40
	Jalur Hijau Jalan	JHJ Wilayah Tak Terlayani	Dinas Lingkungan Hidup	Median Jalan Balai Kota – Jembatan, RS. Gigi dan Mulut Padang – Balai Baru, BAPEDA (Khatib) – Simp. SMP 25, DLH Provinsi (Khatib) – Lampu Merah Mesjid Raya Padang, Raden Saleh – Pasar Alai, Jln. Diponegoro – Taman DIPO, Hayam Wuruk – AL.Hakim – Lapas, Kantor Lurah Berok Nipah – Jembatan Simpang 6, Rel Kereta Api Tarandam – Jln. Wahidin PLN, Simp. Wahidin (PLN) – Stasiun Kereta Haru (Taman Jembatan Andalas), Simp. Wahidin (Lampu Merah) – Simp. Kandang, Jln. Cut Mutia, Jln. Aur dn Jln. Katini, Simp. Mc. Donald's – Simp. Ujung Gurun	136478,5	62,58

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 Keterangan : - (data = 0)

Layanan AMDAL/UKL/UPL yang diberikan kepada masyarakat dunia usaha yang membutuhkan rekomendasi dokumen lingkungan bagi kegiatan usaha yang akan dibangun. Selama kurun waktu 2020 – 2024, rekomendasi dokumen lingkungan yang telah dikeluarkan dengan rincian sebagai berikut :

Gambar 2- 39 Layanan AMDAL/UKL/UPL Tahun 2021-2025



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, 2026

Kinerja urusan Lingkungan Hidup Tahun 2021-2025 dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2- 57 Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2021-2025

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	Realisasi					PD Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025	
1	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Ada/tidak ada	Ada	Tidak	Tidak	Tidak Ada	-	Dinas Lingkungan Hidup
2	Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Air	indeks	63.63	66.67	66.67	69,09	80,67	Dinas Lingkungan Hidup
3	Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Udara	indeks	74.83	73.87	73.87	87,8	80,73	Dinas Lingkungan Hidup
4	Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Tutupan Lahan	indeks	72.40	72.34	72.34	71,78	80,61	Dinas Lingkungan Hidup
5	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	%	95.9	100	100	100	93,75	Dinas Lingkungan Hidup
6	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota		1	-	-	-	1	Dinas Lingkungan Hidup
7	Monitoring Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa	jumlah	6	-	-	6	6	Dinas Lingkungan Hidup
8	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	jumlah	1	3	3	14	14	Dinas Lingkungan Hidup
9	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Ada/tidak ada	Ada	-	-	Ada	Ada	Dinas Lingkungan Hidup

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	Realisasi					PD Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025	
10	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.	%	100	100	100	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
11	Timbulan sampah yang ditangani	%	78.24	72.55	72.55	21,95	25,2	Dinas Lingkungan Hidup
12	Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	%	9.29	10.36	10.36	12,18	6,62	Dinas Lingkungan Hidup
13	Persentase cakupan area pelayanan	%	85	94	94	96,75	98,45	Dinas Lingkungan Hidup
14	Persentase jumlah sampah yang tertangani	%	74.33	72.55	72.55	74,26	73,24	Dinas Lingkungan Hidup
15	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten / kota	nilai	-	73	73	-	-	Dinas Lingkungan Hidup

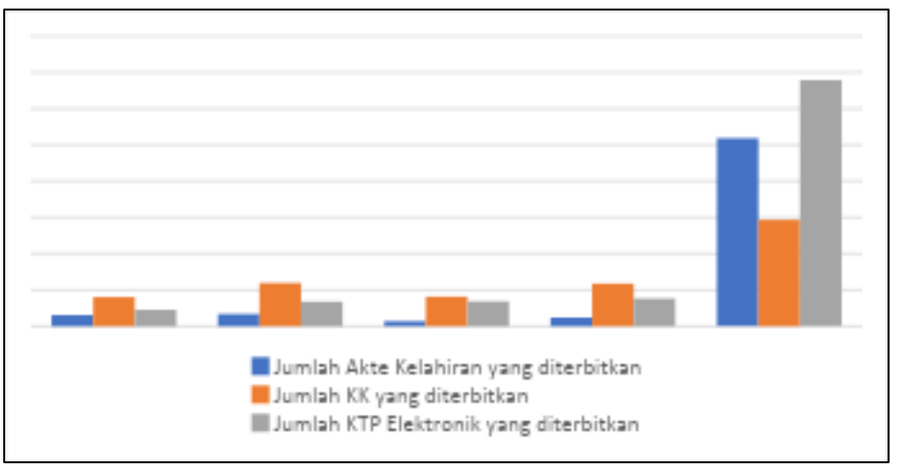
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025

Keterangan : - (data = 0)

f. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan administrasi kependudukan merupakan urusan yang sangat penting dalam tata pemerintahan nasional. Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, disebutkan bahwa urusan administrasi kependudukan merupakan salah satu urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan pelayanan dasar termasuk Kota Padang. Berikut disajikan data jumlah akte kelahiran, KK dan KTP elektronik yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil Kota Padang dari tahun 2021-2025 :

Gambar 2- 40 Jumlah Akte kelahiran, KK dan KTP Elektronik yang Diterbitkan oleh Dinas Dukcapil Tahun 2021-2025



Sumber: Kota Padang Dalam Angka 2026

Kinerja urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020-2024 dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2- 58 Kinerja urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021-2025

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi					PD Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025	
1	Rasio penduduk ber-KTP per satuanpenduduk	rasio	98,07	99,48	99,14	99,6	99,62	Dinas Dukcapil
2	Rasio bayi berakte kelahiran	rasio	20,91	24,88	39,92	98,31	99,64	Dinas Dukcapil
3	Rasio pasangan berakte nikah	rasio	58,69	66,55	71,33	74,81	76,45	Dinas Dukcapil
4	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	sudah/ belum	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	Dinas Dukcapil
5	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	98,07	99,48	99,14	99,6	98,42	Dinas Dukcapil

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi					PD Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025	
6	Cakupan penerbitan akta kelahiran	%	48,01	33,12	87,12	98,31	56,96	Dinas Dukcapil

Sumber: Dinas Dukcapil Tahun 2025

Dari tabel di atas terlihat bahwa semua indikator kinerja urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dari tahun 2020 sampai tahun 2024 mengalami peningkatan, khususnya indikator cakupan penerbitan akta kelahiran yang mengalami penurunan tahun 2020 dan 2021 disebabkan karena masih kurangnya kesadaran masyarakat, naik signifikan pada tahun 2023 dan 2024.

g. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan

Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kota Padang saat ini berbasis RT dan RW yang berada dibawah koordinasi kecamatan dan kelurahan. Wadah pemberdayaan yang sudah berkembang di antaranya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), majelis taklim dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya. Bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan seperti kegiatan keagamaan, sosial, pendidikan dan pembangunan infrastruktur. Urusan pemberdayaan berada pada beberapa instansi terkait tergantung bentuk dan jenis kegiatannya. Kinerja urusan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2021-2025 dapat dilihat dari tabel di atas.

Tabel 2- 59 Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2021 - 2025

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi					PD Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025	
1	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	angka	6	6	6	6	6	DP3AP2KB
2	Persentase LPM aktif	%	100	100	100	100	100	DP3AP2KB
3	Persentase PKK aktif	%	100	100	100	100	100	DP3AP2KB
4	Persentase Posyandu aktif	%	100	100	100	100	100	DP3AP2KB

Sumber: Dinas P3AP2KB Tahun 2026

h. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tingkat kepadatan penduduk Kota Padang dari tahun ke tahun semakin meningkat. Akan tetapi, sebaran kepadatan penduduk tidak merata dimana konsentrasi penduduk masih di pusat kota, yaitu Kecamatan Padang Barat, Padang Timur, Padang Utara, Padang Selatan dan Nanggalo. Sementara Kecamatan Koto Tangah walaupun memiliki populasi penduduk terbesar namun karena luas wilayahnya sangat luas sehingga kepadatannya masing tergolong rendah.

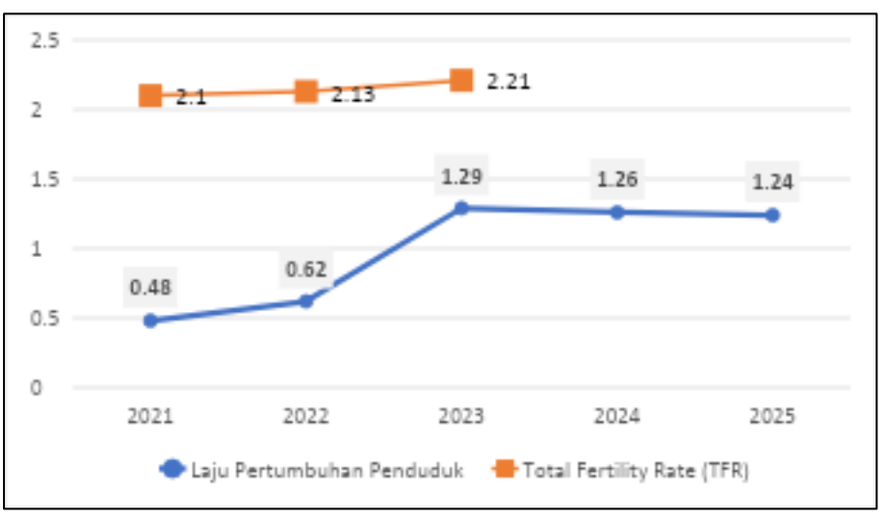
Tabel 2- 60 Kepadatan Penduduk per Kecamatan Tahun 2021-2025

No	Kecamatan	Luas Wilayah Km2	Kepadatan Penduduk (jiwa /km2)				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Bungus Teluk Kabung	100,78	275	279	286	290	295
2	Lubuk Kilangan	85,99	675	683	705	717	729
3	Lubuk Begalung	30,91	3998	4035	4156	4219	4281
4	Padang Selatan	10,03	6079	6084	6215	6257	6296
5	Padang Timur	8,15	9485	9443	9620	9643	9660
6	Padang Barat	7,00	6101	6074	6171	6180	6186
7	Padang Utara	8,08	6789	6759	6867	6877	6883
8	Nanggalo	8,07	7227	7210	7341	7367	7389
9	Kuranji	57,41	2565	2589	2667	2708	2748
10	Pauh	146,29	425	425	434	437	439
11	Koto Tangah	232,25	863	876	903	921	938

Sumber : Kota Padang Dalam Angka, 2025
**= estimasi*

Beberapa indikator pengendalian penduduk Kota Padang antara lain laju pertumbuhan penduduk, total *Fertility Rate* dan aspek pengendalian penduduk dari tahun 2021 sampai dengan 2025 dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 2- 41 Indikator Pengendalian Penduduk Kota Padang Tahun 2021-2025



Sumber: Kota Padang Dalam Angka Tahun 2025

Dari grafik diatas dari tahun 2021 hingga 2023 terlihat Total Fertility Rate yang meningkat setiap tahun turut mempengaruhi laju pertumbuhan penduduak pada tahun.

Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kota Padang masih berjalan hingga saat ini. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk pengendalian kependudukan untuk kesejahteraan masyarakat khususnya keluarga. Sebagian besar akseptor perempuan usia produktif yang pernah kawin saat ini sebagian besar menggunakan Suntik sebagai alat kontrasepsi yakni sebanyak 21.448. Oleh karena itu, perlu upaya pemerintah daerah untuk mensosialisasikan penggunaan alat kontrasepsi lainnya.

Tabel 2- 61 Jumlah Pasangan Usia Subur Dan Peserta KB Aktif Menurut Kecamatan di Kota Padang, Tahun 2025

No	Kecamatan	Jumlah PUS	Peserta KB aktif									Jmlh
			IUD	MOW	MOP	Kondom	Implan	Suntikan	Pil	MAL	Tradisional	
1	Bungus Teluk Kabung	3 529	89	199	16	151	286	1 473	463	-	9	2 686
2	Lubuk Kilangan	6 796	434	369	9	410	412	2 334	1 124	12	30	5 134
3	Lubuk Begalung	13 769	913	581	22	1.103	694	3 947	2.248	5	19	9 532
4	Padang Selatan	6 680	351	229	5	485	568	2 138	649	1	32	4 458
5	Padang Timur	7 322	856	514	8	740	291	1 833	699	1	22	4 964
6	Padang Barat	3 348	540	114	5	109	287	856	171	-	35	2 117
7	Padang Utara	4 490	595	219	3	376	361	928	545	1	17	3 045
8	Nanggalo	5 780	463	239	22	744	194	1 421	1 049	16	17	4 165
9	Kuranji	15 571	1 342	674	25	1 125	863	5 386	1.476	5	80	10 976
10	Pauh	6 691	664	308	4	560	649	1 484	905	1	40	4 615
11	Koto Tangah	17 569	1 188	594	15	879	705	6 547	1 981	8	64	11 910
TOTAL		91 545	7 364	4 040	134	6 682	5 310	28 347	11 310	50	365	63.602

Sumber: Kota Padang Dalam Angka 2025

Capaian kinerja pada urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana mengalami pergerakan angka yang sangat berfluktuasi beberapa indikator sudah memenuhi target namun masih ada yang tidak mencapai target. Sebagian besar dari indikator kinerja memenuhi target yang diinginkan seperti Angka LPP dan TFR sudah mengalami penurunan dari tahun ketahun sesuai dengan yang diharapkan, angka CPR pada tahun 2023 mengalami peningkatan. Pada capaian *Unmet Need* KB dan tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi yang diinginkan setiap tahunnya menurun di tahun 2023 sudah mengalami penurunan.

Kinerja urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021-2025 dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 2- 62 Kinerja urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021-2025

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi					PD Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025	
1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)		0,84	0,62	1,29	1,30	1,25	DP3AP2KB
2	Total Fertility Rate (TFR)		2,1	2,27	2,21	2,21	2,18	DP3AP2KB
3	Dokumen Rancangan Induk Pengendalian Penduduk dengan 5 aspek	dokumen	-	2	-	-	-	DP3AP2KB
4	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	%	12	12	12	12	12	DP3AP2KB
5	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	angka	7	7	7	-	7	DP3AP2KB
6	Jumlah kerja sama penyelenggaraan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	angka	-	5	-	-		DP3AP2KB
7	Rata-rata jumlah anak per keluarga	angka	2.1	2,27	2,21	2,23	2,18	DP3AP2KB
8	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49	angka	67	47,86	69,62	69,48	65,32	DP3AP2KB
9	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	%	0,1	0.1	0.1	12,07		DP3AP2KB
10	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	%	26,3	15,7	16,0	13,6	16,46	DP3AP2KB
11	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	18,33	14,68	18,10	18,40	19,20	DP3AP2KB
12	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	%	31,04	49,2	17,76	2,79	6,40	DP3AP2KB
13	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	%	62,92	77,52	49,39	51,76		DP3AP2KB
14	Cakupan anggota Bina Keluarga	%	66,92	14,69	13,67	33,67		DP3AP2KB

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi					PD Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025	
	Remaja (BKR) ber-KB							
15	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	%	48,84	5,43	28,17	19,35		DP3AP2KB
16	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	angka	8	8	0	1	1	DP3AP2KB
17	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/ Mahasiswa	angka	73	49	72	55		DP3AP2KB
18	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	%	100	100	100	100	100	DP3AP2KB
19	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	%	74,25	24,67	22,17	14,59	14,60	DP3AP2KB
20	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	%	1,88	1,76	1,76	1.89	1,89	DP3AP2KB
21	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi di gudang Kabupaten/Kota	%	2,5	2,41	2,41	38	38	DP3AP2KB
22	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi di Faskes	%	2,5	2,41	2,41	38	38	DP3AP2KB
23	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerja sama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	%	100	100	100	100	100	DP3AP2KB

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi					PD Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025	
24	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	angka	100	100	100	100	100	DP3AP2KB
25	Rata-rata usia kawin pertama wanita	tahun	24	24	24,4	24	24,1	DP3AP2KB
26	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	%	0,24	0,38	0,33	3,16	0,30	DP3AP2KB

Sumber : Dinas P3AP2KB Tahun 2025 Keterangan : - (data = 0)

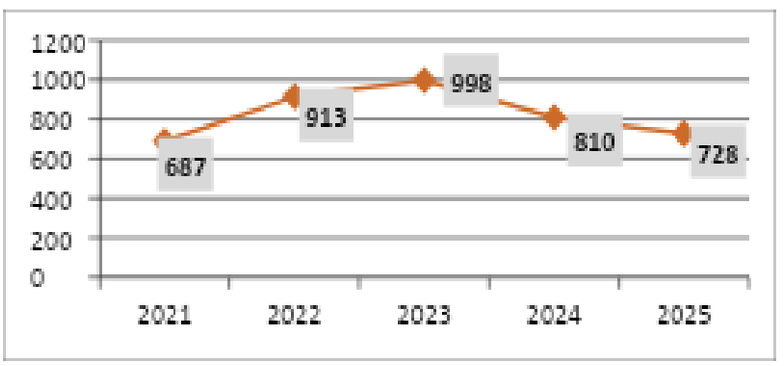
i. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Urusan perhubungan tidak terlepas dari sektor transportasi. Transportasi menjadi penggerak, pendorong dan penunjang pembangunan. Keberadaan transportasi harus mampu menghasilkan jasa layanan yang handal dengan mengikuti perkembangan untuk memberikan pelayanan transportasi yang terbaik dan ramah terhadap lingkungan. Pemanfaatan Trans Padang sebagai transportasi massal di Kota Padang menjadi salah satu solusi dari permasalahan tranportasi di perkotaan.

Sampai dengan tahun 2025 ini Trans Padang sudah melayani 6 koridor yakni koridor 1: Pusat Kota– Lubuk Buaya-Batas Kota. koridor 4: Terminal Anak Aia-By Pass-Teluk Bayur, koridor 5: Pusat Kota-Indarung, dan koridor 6: Pusat Kota-Kampus Unand Limau Manis.

Salah satu indikator untuk mengetahui keberhasilan pembangunan di bidang perhubungan ini adalah jumlah kecelakaan lalu lintas. Semakin sedikit jumlah kecelakaan lalu lintas terjadi, maka pembangunan di bidang perhubungan sudah berhasil menyelamatkan banyak nyawa. Jumlah kecelakaan lalu lintas di Kota Padang meningkat setiap tahunnya dari tahun 2020-2023, namun pada tahun 2024 mengalami penurunan terdapat 810 kasus kecelakaan lalu lintas terjadi di Kota Padang. Hal ini perlu mendapat perhatian untuk melakukan evaluasi kelayakan jalan dan kendaraan. Selain itu tindakan tegas dan pengawasan yang ketat terhadap pengguna jalan oleh aparat kepolisian juga diperlukan, agar warga masyarakat lebih tertib dalam berkendara dijalan raya.

Gambar 2- 42 Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2021-2025



Sumber: Kota Padang Dalam Angka, 2024

Tabel 2- 63 Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2021 - 2025

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi					PD Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025	
1	Jumlah Uji KIR angkutan umum	angka	13.083	29.715	33.535	42825	44716	Dinas Perhubungan
2	Jumlah dermaga	angka	Kewenangan BPTD Wilayah III/Kementerian	Sejak Tahun 2020 Kewenangan pada BPTD Wil. III Sumbar	Sejak Tahun 2020 Kewenangan pada BPTD Wilayah III Sumbar	Sejak Tahun 2020 Kewenangan pada BPTD Wilayah III Sumbar	Kewenangan pada pemerintah pusat berdasarkan Permenhub 50/2020	Dinas Perhubungan
3	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	angka	1 (Kewenangan BPTD Wilayah III/Kementerian)	Sejak Tahun 2020 Kewenangan pada BPTD Wilayah III Sumbar	Sejak Tahun 2020 Kewenangan pada BPTD Wilayah III Sumbar	Sejak Tahun 2020 Kewenangan pada BPTD Wilayah III Sumbar	Kota Padang hanya memiliki pangkalan angkot	Dinas Perhubungan
4	Persentase layanan angkutan darat (load factor)	%	28,99	Pada Tahun 2022 tidak dilakukan survey *Loar Factor*	Pada Tahun 2023 tidak dilakukan survey *Loar Factor*	33	Tidak dilakukan survey	Dinas Perhubungan
5	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	%	72,62	94	94,53	53	100	Dinas Perhubungan
6	Pemasangan Rambu-rambu	%	38	16	20	12,6	140	Dinas Perhubungan
7	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	rasio	0,001	0,001	0,23	0,23	Jumlah panjang jalan berada pada kewenangan DPUPR Jumlah Kendaraan berada di kewenangan SAMSAT	Dinas Perhubungan

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi					PD Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025	
8	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	angka	1.388.186 Penumpang Trans Padang Sedangkan Untuk Penumpang Angkutan Kota/Umum Tidak ada Dilakukan Survey	Pada Tahun 2022 tidak dilakukan survey Load Factor	Pada Tahun 2023 tidak dilakukan survey Load Factor	4.424.489	Data jumlah penumpang trans padang bearada pada perumd PSM	Dinas Perhubungan
9	Jumlah orang melalui dermaga	angka	Kewenangan BPTD Wil. III/Kementerian	Sejak Tahun 2020 Kewenangan Pada BPTD Wil. III Sumbar	Sejak Tahun 2020 Kewenangan Pada BPTD Wil. III Sumbar	Sejak Tahun 2020 Kewenangan Pada BPTD Wil. III Sumbar	Kewenangan pada pemerintah pusat berdasarkan Permenhub 50/2020	Dinas Perhubungan
10	Jumlah barang melalui dermaga	angka	Kewenangan BPTD Wil. III/Kementerian	Sejak Tahun 2020 Kewenangan Pada BPTD Wil. III Sumbar	Sejak Tahun 2020 Kewenangan Pada BPTD Wil. III Sumbar	Sejak Tahun 2020 Kewenangan Pada BPTD Wil. III Sumbar	Kewenangan pada pemerintah pusat berdasarkan Permenhub 50/2020	Dinas Perhubungan

Sumber: Dinas Perhubungan Tahun 2026

j. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Dalam rangka mendukung jangkauan jaringan komunikasi, Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang telah melakukan pemasangan jaringan internet ke seluruh SKPD, 11 Kecamatan, 104 Kelurahan, 24 Puskesmas, 20 UPT dan 65 titik Wifi gratis di tempat publik.

Kinerja urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2025 dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2- 64 Kinerja urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2021 - 2025

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Cakupan layanan jaringan komunikasi	%	98	100	100	100	100
2	Persentase penanganan permasalahan jaringan	%	100	100	100	100	100
3	Cakupan integrasi aplikasi/sistem informasi	%	22,2	20	25	25	26,5
4	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	%	52,93	53,73	54,25	54,30	0
5	Persentase penanganan serangan siber	%	100	100	100	100	100
6	Jumlah akses masyarakat terhadap informasi publik secara digital	angka	973 views	1.211.800 view	1.620.506 view	1.735.506 view	1.057.081 view

Sumber: Dinas Kominfo Kota Padang 2025

k. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Salah satu penunjang perekonomian masyarakat, dalam perekonomian mikro adalah koperasi yang merupakan wadah kegiatan produktif masyarakat dalam perekonomian rakyat. Meskipun belum sepenuhnya berkembang, namun koperasi di Kota Padang masih menunjukkan eksistensinya dalam meningkatkan pergerakan perekonomian mikro daerah. Jumlah koperasi dan kondisi tahun 2021-2025 disajikan pada tabel 2-65

Tabel 2- 65 Jumlah Koperasi dan Kondisi di Kota Padang Tahun 2021-2025

Tahun	Aktif	Tidak Aktif
2021	390	335
2022	404	353

Tahun	Aktif	Tidak Aktif
2023	411	365
2024	383	402
2025	383	531

Sumber: BPS, 2025

Pasca pandemi Covid-19, masyarakat yang terdampak banyak memulai jadi wirausahawan serta dukungan fokus pembangunan pemulihan ekonomi baik dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kota Padang sendiri, terjadi lonjakan jumlah pelaku usaha mikro binaan di Kota Padang menjadi 48.274 pada Tahun 2025 yang pada tahun sebelumnya berjumlah 47.692 usaha mikro. Untuk lebih lengkapnya, kinerja urusan Koperasi, Usaha Mikro Tahun 2021-2025 dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2- 66 Kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2021-2025

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	REALISASI					PD Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025	
1	Persentase koperasi aktif	%	54,48	43,12	52,96	56,05	58	Dinas Koperasi dan UKM
2	Jumlah Usaha Mikro Binaan	angka	38.299	41.787	43.282	47,692	48.274	Dinas Koperasi dan UKM

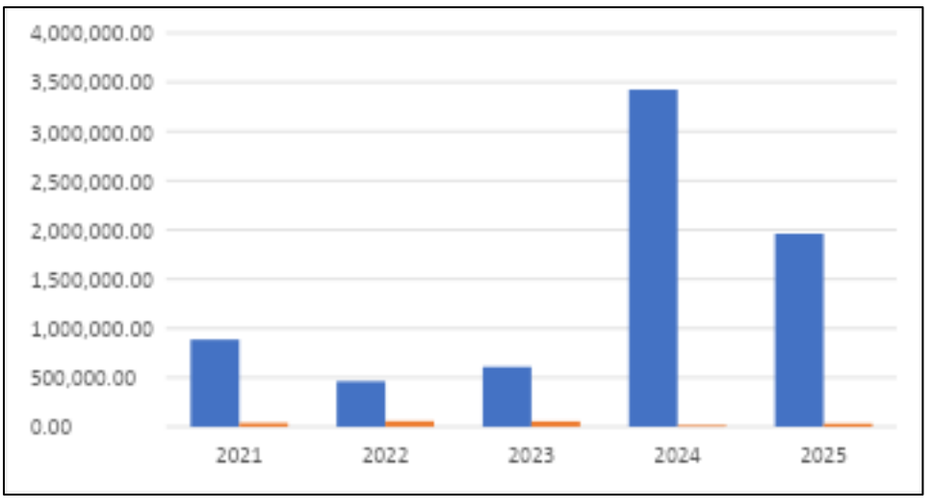
Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2025

l. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Kemudahan serta keamanan tentu saja menjadi faktor yang menarik minat investor untuk melirik Kota Padang sebagai tujuan untuk menanamkan modal. UU Cipta Kerja diharapkan tidak hanya sekadar regulasi yang memudahkan pendirian usaha atau perizinan investasi saja, tetapi lebih dari itu, UU Cipta Kerja merupakan harapan baru agar perekonomian semakin meningkat dengan kembali menggairahkan iklim investasi.

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem Online Single Submission (OSS) merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. OSS Berbasis Risiko wajib digunakan oleh Pelaku Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Badan Pengusahaan Kawasan PerdaganganBebas Pelabuhan Bebas (KPBPB). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 terdapat 1.702 kegiatan usaha yang terdiri atas 1.349 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang sudah diimplementasikan dalam Sistem OSS Berbasis Risiko.

Gambar 2- 43 PMA dan PMDN Tahun 2021-2025



Sumber: BPS Kota Padang, 2025

Dari gambar di atas, realisasi penanaman modal baik yang bersumber dari dalam negeri maupun Penanaman Modal Asing dari tahun 2021-2025 sangat fluktuatif dan terjadi peningkatan yang signifikan pada tahun 2024 khususnya penanaman modal dalam dan negeri meskipun untuk penanaman modal asing juga mengalami penurunan. Hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor, di antaranya iklim investasi baik di daerah maupun di Nasional serta perlindungan hukum kepada investasi yang telah ditanamkan oleh investor. Untuk itu Pemerintah Kota Padang akan terus berupaya untuk menjaga iklim investasi yang kondusif, memberikan kemudahan investasi, perlindungan hukum terhadap investasi yang ditanamkan serta melakukan peningkatan pelayanan investasi di Kota Padang, baik itu kepada investor dalam negeri maupun dari luar negeri.

Kinerja urusan Penanaman Modal Tahun 2021 - 2025 dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2- 67 Kinerja Urusan Penanaman Modal Tahun 2021-2025

No	Bidang Urusan/ Indikator	Satuan	Realisasi					PD Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025	
1	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)							
	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMA)	US $	38.991.665	57.967.400	55.539.311,1	15.007.995	33.093.637,20	DPMPTSP
	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN)	Juta Rupiah	886.626.600.000	462.089.200.000	609.329.000.000	3.425.496.891.558	1.960.197.448.825,97	DPMPTSP

Sumber: Dinas PMPTSP, 2025

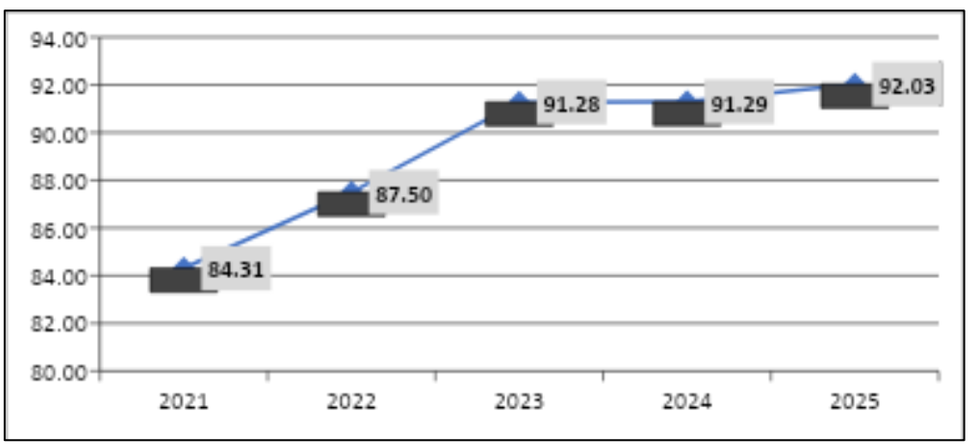
m. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Kepemudaan dan olahraga merupakan bagia dari urusan pembangunan yang mengedepankan kreativitas generasi penerus bangsa. Perkembangan organisasi pemuda ini perlu ditingkatkan lagi sebagai salah satu antisipasi dalam mengurangi tingkat kriminalitas dan perilaku menyimpang pemuda di Kota Padang sehingga masalah sosial ini dapat dituntaskan.

Dalam menumbuh kembangkan kreatifitas kepemudaan di generasi mileneal diperlukan sarana dan prasarana pendukung baik tingkat kota dan di setiap kecamatan berupa pusat kegiatan kepemudaan *(youth center). Youth center* hadir sebagai suatu solusi kepemudaan (berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda) dengan tidak meninggalkan nilai-nilai budaya/kearifan lokal.

Berikut data persentase organisasi pemuda yang aktif dalam 5 (lima) tahun terakhir:

Gambar 2- 44 Perkembangan Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif Tahun 2021-2025



Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang, 2025

Kinerja urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2021-2025 dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2- 68 Kinerja urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2021 - 2025

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	84,31	87,50	91,18	91,29	92,03
2	Cakupan Pembinaan Olahraga	%	65,53	17,65	20,59	50,9	54,54
3	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	%	2,78	60	68,71	50	69,89
4	Cakupan Pembinaan atlit muda	%	11,76	11,76	11,80	5,56	10,02
5	Pelajar	%	3,89	3,89	3,90	5,17	4,85
6	lainnya	%	7,78	7,78	7,90	12,3	10,02
7	Jumlah atlet berprestasi	angka	21	38	95	110	126

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi				
			2021	2022	2023	2024	2025
8	Jumlah Prestasi Olahraga	angka	12	9	95	21	7
9	Persentase sarana dan prasarana olahraga dalam kondisi baik	%	78,25	83,25	86,29	86,5	88,25

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2026

n. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Satu Data Indonesia harus dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data;
2) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata;Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
3) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

Berdasarkan peraturan tersebut Pemerintah Kota Padang telah menetapkan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia. Penyelenggaraan Satu data Indonesia daerah dilaksanakan oleh, Pembina Data, Walidata, Walidata Pendukung dan Produsen Data. Serta dalam rangka pengkoordinasian Satu Data Indonesia Daerah dibentuk Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Kepala Bappeda.

Dalam rangka Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Pemerintah Kota Padang membentuk Tim Penyelenggara Satu Data Indonesia dan Tim dengan mengeluaran Surat Keputusan Wali Kota Padang Nomor 155 Tahun 2021 tentang Tim Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Kota Padang Tahun 2021, Surat Keputusan Wali Kota Padang Nomor 295 Tahun 2023 tentang Tim Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Kota Padang Tahun 2023.

Selanjutnya Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, indikator keberhasilan pada urusan Statistik di antaranya adalah Ketersediaan Buku Daerah Dalam Angka dan Buku PDRB Kabupaten/Kota. Publikasi ini menjadi acuan Pemerintah Kota Padang dalam menyusun perencanaan, kebijakan dan program/kegiatan pembangunan tahunan, jangka menengah dan juga jangka panjang.

Indeks Pembangunan Statistik (IPS) adalah untuk mengukur capaian penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) dan Data Statistik Sektoral baik di Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik mengatur bahwa kegiatan statistik bertujuan untuk menyediakan

data statistik yang lengkap, akurat, dan mutakhir dalam rangka mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien. Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral, Badan Pusat Statistik sebagai pembina data statistik telah melaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Tahun 2023 di Pemerintah Kota Padang dengan berpedoman pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral. Adapun hasil penilaian Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Pemerintah Kota Padang Tahun 2023 adalah 2.05 dengan Predikat "Cukup".

Kinerja urusan Statistik Tahun 2020-2024 dapat dilihat dari tabel 2 – 69.

Tabel 2- 69 Kinerja urusan Statistik Tahun 2021-2025

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi					PD Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025	
1	Jumlah produk statistik sektoral	dokumen	4	4	4	4	4	Dinas Kominfo
2	Buku "Kota Padang Dalam Angka"	Ada/tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Dinas Kominfo
3	Jumlah survey statistik sektoral	dokumen	2	2	5	5	5	Dinas Kominfo
4	Jumlah kompilasi statistik sektoral	dokumen	1	1	6	6	6	Dinas Kominfo

Sumber: Dinas Kominfo Tahun 2025

o. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Secara umum, urusan persandian meliputi kegiatan pengamanan atau melindungi informasi. Urusan persandian yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang meliputi:

1. Pemanfaatan Sertifikat Elektronik/ Tanda tangan elektronik pada tata naskah dinas

Dalam upaya untuk mewujudkan pelayanan yang efektif dan efisien, Pemerintah Kota Padang menerapkan tanda tangan elektronik. Dengan tanda tangan elektronik ini, diharapkan terjadi pemangkasan proses birokrasi, dan juga pemangkasan anggaran dalam pelayanan dokumen administrasi.

Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik, Pemerintah Kota Padang telah mengeluarkan Surat Edaran Wali Kota Padang Nomor: 268.a/Diskominfo-Pdg/2021 tentang Optimalisasi Penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE) Pada Naskah Dinas tanggal 24 Agustus 2021.

Selanjutnya, Pemerintah Kota Padang mengeluarkan Surat Edaran

Wali Kota Padang Nomor: 050.227.a/Diskominfo-Pdg/2021 tentang Penggunaan Surat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Padang tanggal 10 September 2021 sebagai salah satu langkah strategis menyelenggarakan jaringan komunikasi sandi berupa email Sanapati sebagai alat komunikasi persuratan elektronik kegiatan kedinasan bagi Kepala Perangkat Daerah dan Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Padang. Diperkuat juga oleh Perwako No.24 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sertikat Elektronik.

Tahun 2023 pemanfaatan sertifikat elektronik jadi lebih optimal melalui aplikasi persuratan dari Arsip Nasional Republik Indonesia yang diamanahkan kepada Dinas Perpustakaan dan Arsip melalui aplikasi SRIKANDI. Penggunaan aplikasi ini telah diterapkan pada semua tata naskah dinas yang diwajibkan kepada seluruh perangkat daerah di Kota Padang. Sampai akhir Tahun 2023, sertifikat elektronik telah diterbitkan untuk semua Kepala OPD, Lurah se-Kota Padang dan seluruh Kepala Puskesmas.

2. Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)

Indeks Keamanan informasi (Indeks KAMI) merupakan indikator kesiapan sebuah organisasi di bidang keamanan informasi yang didapatkan melalui penilaian mandiri oleh organisasi yang menerapkan dengan penyusunan dokumen berdasarkan 114 indikator yang telah ditetapkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara berdasarkan Tools Indeks KAMI versi 4.2. Hasil penilaian mandiri ini seterusnya diserahkan kepada tim asesmen indeks KAMI di Badan Siber dan Sandi Negara untuk dilakukan pengujian dokumen dan wawancara. Indeks yang dihasilkan merupakan salah satu indikator yang terdapat di dalam LPPD Kota Padang di tiap tahunnya. Adapun hasil penilain Indeks KAMI Kota Padang dari Tahun 2021-2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2- 70 Indeks KAMI Kota Padang Tahun 2021-2025

No	Tahun	Jenis Penilaian	Hasil
1	2021	Mandiri Diskominfo	403
2	2022	Mandiri Diskominfo	403
3	2023	Mandiri dan Eksternal BSSN	431
4	2024	Mandiri Diskominfo	430
5	2025	Mandiri Diskominfo	526

Sumber : Dinas Kominfo Kota Padang, 2026

Kinerja urusan Persandian Tahun 2021-2025 dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2- 71 Kinerja urusan Persandian Tahun 2021-2025

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi					PD Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025	
1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	Dinas Kominfo

Sumber: Dinas Kominfo Tahun 2026 Keterangan : - (data = 0)

p. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Pembangunan kebudayaan pada hakikatnya diarahkan pada upaya untuk mewujudkan ketahanan budaya. Ketahanan budaya sangat diperlukan, mengingat semakin pesatnya arus globalisasi akan membawa konsekuensi terjadinya ekspansi seni dan budaya global yang dapat mempengaruhi kelestarian budaya daerah, yang pada akhirnya akan berimplikasi kepada budaya nasional.

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan kebudayaan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja "jumlah sarana dan penyelenggaraan seni dan budaya serta jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan, yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2- 72 Jumlah Sarana dan Prasarana Kebudayaan Tahun 2021-2025

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Grup Kesenian	62	68	68	68	91
2	Jumlah Gedung Kesenian	3	3	3	3	-
3	Jumlah Museum dan Pusat Kebudayaan	1	1	1	1	1

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan Tahun 2025

Kinerja urusan Kebudayaan Tahun 2021-2025 dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2- 73 Kinerja urusan Kebudayaan Tahun 2021-2025

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi					PD Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025	
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	angka	1	1	1	1	5	Disdikbud
2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	52	52	52	71	20	Disdikbud
3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	angka	5	6	6	6	56	Disdikbud
4	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	angka	40	30	30	53	5	Disdikbud
5	Indeks Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan	indeks	-	-	-	-	80,9	Disdikbud

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025 Keterangan : - (data = 0)

*terjadinya penurunan jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu pada tahun 2022 disebabkan karena adanya rencana perubahan status cagar budaya.

q. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Kota Padang memiliki 1 perpustakaan daerah yang berlokasi di kompleks GOR H. Agus Salim Padang yang merupakan eks studio Susi FM. Gedung ini merupakan aset dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan status pinjam pakai. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai SKPD pelaksana urusan perpustakaan memiliki 2 mobil perpustakaan keliling dan 1 kendaraan roda 3.

Dilihat dari rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun dan jumlah koleksi judul buku di perpustakaan, jumlahnya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa minat baca dari masyarakat Kota Padang cukup tinggi. Hanya saja jumlah tersebut kurang didukung dengan sarana dan prasarana perpustakaan serta jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat. Gedung perpustakaan yang representatif sangat dibutuhkan, namun masalahnya adalah ketersedian lahan untuk perkantoran yang sampai dengan saat ini sulit untuk dipenuhi.

Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2021-2025 dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2- 74 Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2021-2025

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	angka	17.721	20.375	47.419	0,67	60.030 (pembagi jumlah penduduk blm ada)
2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	angka	36.179	36.721	38.335	0,321	0,398
3	Jumlah perpustakaan yang terkelola dengan baik	angka	67	56	40	65	120
4	Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/ tahun	angka	17721	20.375	47.419	56.868	60.030
5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	angka	11079	11.273	12.219	12.460	12.460
6	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	angka	2	3	3	13	13

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2026

r. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Penyelenggaraan kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta pendampingan dan monitoring penerapan penggunaan sistem pola baru yang

dikembangkan dengan sistem aplikasi kearsipan berbasis IT sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Arsip merupakan dokumen yang berisi data/informasi beberapa tahun ke belakang. Keberadaannya sangat penting untuk mengingatkanperistiwa/kejadian/kronologis pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, oleh karenanya memerlukan pengelolaan secara baku. Belum seluruh SKPD melaksanakan penerapan arsip secara baku. Kurang tertibnya penanganan arsip dan kurangnya pegawai yang berlatar belakang pendidikan ilmu kearsipan di SKPD menjadi permasalahan hampir di seluruh SKPD.

Untuk mengatasi permasalahan ini, Perangkat Daerah perlu diarahkan untuk tertib sistem tata kearsipan sesuai Ketentuan, yaitu: 1) Adanya SDM Tenaga Pengelola Arsip/Arsiparis; 2) Menggunakan program/aplikasi dalam pengelolaan arsip; 3) Tertib penataan pemberkasan arsip dan pembuatan Daftar Arsip; 4) Tersedianya Sarana Prasarana kearsipan Arsip Aktif (*Filling Cabinet*, Map gantung, Buku daftar Pengendali) dan Arsip Inaktif (Rak Arsip/Mobil File, Box Arsip, Folder Besar) serta 5) Adanya Ruang Simpan Arsip/Depo.

Kinerja urusan Kearsipan Tahun 2021-2025 dapat dilihat dari table berikut :

Tabel 2- 75 Kinerja urusan Kearsipan Tahun 2021-2025

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi					PD Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025	
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	37	57	44	100	62,79	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	kegiatan	1	-	-	1	4	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2026

Keterangan : - (data = 0)

3. Urusan Pemerintahan Pilihan

a. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Kota Padang merupakan salah satu kawasan minapolitan yang ada di Provinsi Sumatera Barat ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia Nomor KEP.32/MEN/2010. Kawasan Minapolitan Kota Padang adalah Kecamatan Bungus Teluk Kabung yang berbasis perikanan tangkap dengan kawasan intinya adalah Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus.

Jumlah produksi perikanan tangkap di Kota Padang mengalami kenaikan signifikan di tahun 2024 jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Di tahun 2024 jumlah produksi perikanan tangkap sebanyak 30.258,94 ton sedangkan di tahun 2023 jumlahnya 23.539,82 ton. Peningkatan ini diprediksi karena kebutuhan masyarakat terhadap bahan pangan berprotein tinggi meningkat seiring dengan kebutuhan untuk menjaga dan

memperkuat daya tahan tubuh, salah satunya melalui produk perikanan ini. Jumlah produksi perikanan tangkap tahun 2021-2025 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2- 76 Produksi Perikanan Tangkap Kota Padang Tahun 2021-2025 (Ton)

Tahun	Perikanan Laut	Perairan Umum	Jumlah
2021	20.191,60	7,50	20.199,02
2022	22.209,96	7,53	22.217,49
2023	23.522,57	17,25	23.539,82
2024	30.239,85	19,09	30.258,94
2025	30.239,85	19,97	32.576,76

Sumber: Kota Padang Dalam Angka, 2026

Kinerja urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2021-2025 dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2- 77 Kinerja urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2021-2025

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Produksi perikanan	%	80,41	90,80	85.80	106 %	100,46
2	Konsumsi ikan	%	92,15	102,35	104,22	100,66	100,66
3	Cakupan bina kelompok nelayan	%	89,28	100,50	19.35	93	22,6
4	Produksi perikanan kelompok nelayan	%	81,04	90,60	82.9	3,77	3,8
5	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	%	116,07	120	125	125,53	125,13
6	Nilai tukar nelayan		94,94	101,65	105.7	109,11	101,4
7	Persentase Peningkatan Industri Hulu Sektor Kelautan Perikanan	%	57,73	50	65,43	83,07	3,07
8	Persentase Peningkatan Industri Hilir Sektor Kelautan Perikanan	%	6,8	6,75	200	1.345,20	1.782,18
9	Persentase Peningkatan Pendapatan Nelayan	%	1,11	2	3.35	1.34	2
10	Persentase Peningkatan Pendapatan Pembudidaya Ikan	%	2,01	4,5	3,33	1.3	5
11	Persentase Peningkatan Pendapatan Pengolah dan Pemasar Perikanan	%	4,54	5,87	11,4	6,41	3,86

Sumber: Dinas Perikanan dan Pangan Tahun 2026

b. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas destinasi wisata dan memacu pengembangan pariwisata di Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, maka ditetapkan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi Sumatera Barat melalui Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 556-575-2021 tentang Perubahan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021. Salah satu Daya Tarik Unggulan Provinsi Sumatera Barat tersebut adalah Kawasan Wisata Terpadu Gunung Padang. Sesuai dengan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kota Padang (RIPPDA) dan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Sumatera Barat, Kota Padang merupakan salah satu Wilayah Pengembangan Wisata (WPW) yang diharapkan mampu mendukung pengembangan kepariwisataan provinsi dan nasional.

Tabel 2- 78 Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2021-2025

No	Jenis Objek Wisata	Satuan (Unit)	Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Wisata alam	Lokasi	40	40	40	15	30
2	Wisata bahari	lokasi	37	37	37	13	37
3	Wisata budaya	Lokasi	3	3	3	3	3
4	Wisata sejarah	Unit	-	-	74	15	74
5	Wisata belanja	Lokasi	29	29	29	56	42
6	Wisata kuliner	Kawasan	9	9	9	56	374
	Jumlah wisata		118	118	192	158	560

Sumber: BPS Kota Padang, 2026 Keterangan : - (data = 0)

Penyusunan RIPPDA dilakukan berdasarkan pendekatan Community Attraction Complex dengan membentuk Wilayah Pengembangan Pariwisata (WPP) yang kemudian dikembangkan lagi menjadi Satuan Kawasan Wisata (SKW). Pemerintah Kota Padang secara bertahap telah membangun dan membenahi sarana dan prasarana penunjang pariwisata yang tersebar pada beberapa lokasi di Kota Padang. Kota Padang memiliki potensi wisata yang terbentuk dari kondisi geografis, sejarah dan budaya sebagaimana dapat dilihat pada tabel di atas.

Kinerja urusan Pariwisata Tahun 2021-2025 dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2- 79 Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2021-2025

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Capaian Kinerja Kunjungan Wisata Mancanegara	%	5,35	96,28	1606,32	639,83	530,10
	Kunjungan wisata Mancanegara	angka	1.538	22.995	45.698	191.632	228.352
2	Capaian Kinerja Kunjungan Wisata Nusantara	%	37,19	98,36	117.02	149.47	473.246
	Kunjungan wisata Nusantara	angka	1.000.732	2.832.140	3.702.838	5.455.685	5.320.498
3	Lama Kunjungan Wisatawan						

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi				
			2021	2022	2023	2024	2025
	Mancanegara	angka	1,22	1,90	1,93	1,93	-
	Nusantara	angka	1,62	2,10	2,19	2,80	-
4	PAD sektor pariwisata	Rp	73.848.293.666	120.317.777.412	138.558.809.408	140.213.296.706,-	135.521.463.056
5	Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	19,51	19.64	20.77	21,16	14,71
6	Pertumbuhan pelaku usaha ekonomi kreatif (e-kraf)	%	9,57	10,67	11,40	11,81	Dalam proses pengolahan data

Sumber: Dinas Pariwisata Tahun 2026

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan kunjungan wisatawan baik dari dalam negeri maupun dalam negeri secara signifikan di tahun 2025. Hal ini mengakibatkan naiknya PAD dari sektor pariwisata dan angka lama kunjungan wisatawan yang meningkat. Hal ini menjadi bukti bahwa Kota Padang menjadi salah satu daerah tujuan wisata baik dalam negeri maupun luar negeri.

c. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Sektor pertanian secara umum terdiri atas pertanian, perkebunan, hortikultura, perikanan, peternakan, dan kehutanan. Sektor pertanian bukan merupakan komoditi utama pembentuk pertumbuhan ekonomi di kota Padang. Selain padi, lahan pertanian Kota Padang juga ditanami berbagai macam tanaman palawija, antara lain: ubi kayu, ubi jalar, dan kacang tanah. Diantara berbagai tanaman palawija tersebut, ubi jalar merupakan palawija yang memiliki luas panen terbesar di Kota Padang sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 2- 80 Palawija Kota Padang Tahun 2025

Kecamatan	Luas Panen	Produksi	Hasil Per Hektar
01. Padi/Paddy			
a. Padi Sawah/Wet Land	10,040	46,685	46,50
a. Padi Ladang/Dry land	-	-	-
02. Palawija/Food Crops			
a. Jagung/Maize	8	54	67,50
b. Ubi Kayu/Cassava	6	193	321,67
c. Ubi Jalar/Sweet Potatoes	-	-	-
d. Kacang Tanah/Peanuts	18	28	1,54
e. Kedelai/Soya Beans	-	-	-
f. Kacang Hijau/Green Beans	-	-	-
Padang			

Sumber: BPS Kota Padang, 2025 Keterangan : - (data = 0)

Kinerja urusan Pertanian Tahun 2021-2025 dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2- 81 Kinerja urusan Pertanian Tahun 2021-2025

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	5,29	0,09	5,02	4.95	1,59
2	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	%					
	Padi		46,52	58,5	54,2	4,86	5,04
	Jagung		70,16	2,96	111,80	6,75	5,5
	Ubi Kayu		38,38	43,75	350,90	28,67	-
	Ubi Jalar		32,60	32,50		-	-
	Kacang Tanah		13,77	12,00	12,60	1,57	-
	Kedelai		-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Pertanian Tahun 2025 Keterangan : - (data = 0)

d. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Kota Padang merupakan pintu gerbang perdagangan dari Eropa maupun Asia. Perdagangan merupakan salah satu sektor usaha yang mempunyai andil dalam memberikan kontribusi yang signifikan dalam pertumbuhan perekonomian Kota Padang. Meskipun angkanya menurun, namun perdagangan merupakan

Perusahaan perdagangan di Kota Padang dibagi ke dalam empat kelompok, yaitu perusahaan perdagangan besar, menengah, kecil dan mikro. Dari keempat jenis perusahaan perdagangan tersebut, perusahaan perdagangan kecil mempunyai jumlah yang paling banyak. Jumlah perusahaan perdagangan kecil meningkat dari jumlah 33.101 di tahun 2019 meningkat menjadi 34.011 di tahun 2023. Jumlah pedagang yang meningkat ini menandakan bahwa iklim dagang bergejolak di masyarakat Kota Padang.

Selain jumlah pedagang yang meningkat, jumlah sarana perdagangan juga turut meningkat. Jenis sarana perdagangan antara pasar, toko, kios, dan warung. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana perdagangan tidak terlepas dari upaya memantapkan posisi Kota Padang sebagai pusat perdagangan di Sumatera Barat. Jumlah sarana perdagangan menurut jenisnya Kota Padang dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 2- 82 Jumlah sarana perdagangan menurut jenisnya Tahun 2021-2025

No	Sarana Perdagangan	2021	2022	2023	2024	2025
1	Pasar	21	21	32	32	9
2	Toko	2.492	2.492	2.492	2.492	3.327
3	Kios	4.824	4.824	4.824	4.824	791
4	Warung	1.308	1.308	4.812	4.812	4.830
	Jumlah	8.645	8.645	12.160	12.160	8.967

Sumber: BPS Kota Padang, 2025

Kinerja urusan Perdagangan Tahun 2021-2025 dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2- 83 Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2021-2025

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Ekspor Bersih Perdagangan	Ribu US $	3.066.932,45	2.868.419,97	2.366.661,09	2.177.615,49	Menunggu data BPS rilis
3	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	16,5	17,42	17,41	17,52	Menunggu data BPS rilis

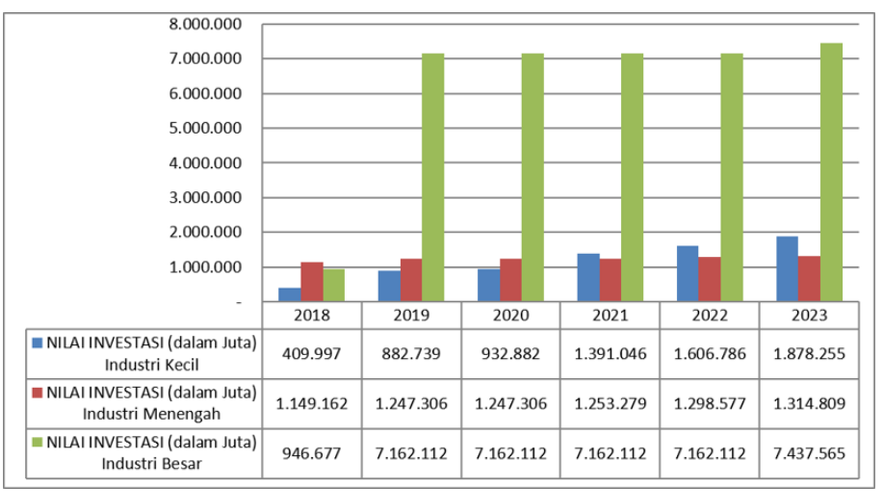
Sumber : Dinas Perdagangan Tahun 2026

e. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Sektor Industri menjadi andalan ekonomi Kota Padang, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dalam 5 tahun terakhir, investasi dalam industri besar selalu mendominasi dibandingkan industri kecil dan industri menengah. Namun pada tahun 2024 investasi industri kecil mengalami peningkatan yang pesat dari tahun sebelumnya. Nilai investasi industri kecil mendekati nilai investasi industri besar yang selalu lebih tinggi setiap tahunnya. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB pada tahun 2024 sebesar 10,68 persen

Kota Padang memiliki potensi besar untuk menarik minat para investor untuk turut memajukan perekonomian daerah. Potensi besar ini juga diikuti dengan kemudahan berinvestasi di Kota Padang dari segi pelayanan. Nilai investasi menunjukkan trend positif setiap tahunnya. Perkembangan nilai investasi tahun 2020-2024 di Kota Padang dapat dilihat dari gambar berikut :

Gambar 2- 45 Nilai Investasi Pada Industri Kecil, Menengah Dan Besar di Kota Padang Tahun 2020-2024 (Dalam Juta)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023
NILAI INVESTASI (dalam Juta) Industri Kecil	409.997	882.739	932.882	1.391.046	1.606.786	1.878.255
NILAI INVESTASI (dalam Juta) Industri Menengah	1.149.162	1.247.306	1.247.306	1.253.279	1.298.577	1.314.809
NILAI INVESTASI (dalam Juta) Industri Besar	946.677	7.162.112	7.162.112	7.162.112	7.162.112	7.437.565

Sumber: BPS Kota Padang, 2026

Kota Padang berupaya untuk memaksimalkan potensi Investasi yang dimiliki daerah dengan mengolah bahan baku yang berasal dari daerah terdekat guna meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Komoditi unggulan Kota Padang dapat dilihat

pada tabel berikut:

Tabel 2- 84 Komoditi Industri Unggulan Kota Padang Tahun 2021-2025

No	Klasifikasi Industri	Satuan	Kapasitas Produksi				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Industri Makanan dan Minuman	Ton	3.452	34.246	35.670	36862	38.688
2	Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	Helai	8.650	8996	9005	9230	10.962
3	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas kaki	Pasang	72.652	74831	72316	72805	77.901
4	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	Unit	27.560	28.386	28910	29115	30.861
5	Industri Barang Galian Bukan Logam/ Semen	Ton (x 1.000)	11.000	11.000	11.000	11.000	1.290.960

Sumber: Kota Padang Dalam Angka, 2025

Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

a. Sekretariat Daerah

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 67 tahun 2022, Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang dibantu oleh 3 orang asisten yang terdiri dari Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan dan Asisten Administrasi Umum. Masing-masing asisten dibantu oleh bagian yang terdiri dari:

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
   a) Bagian Tata Pemerintahan
   b) Bagian Kesejahteraan Rakyat
   c) Bagian Hukum
   d) Bagian Kerja sama
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
   a) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
   b) Bagian Administrasi Pembangunan dan Perencanaan
   c) Bagian Pengadaan Barang/Jasa
3. Asisten Administrasi Umum
   a) Bagian Umum
   b) Bagian Organisasi
   c) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

b. Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD Kota Padang dibentuk terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2O16 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2O20 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2O16 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang.
Berdasarkan Peraturan Walikota Padang Nomor 70 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD, Sekretariat DPRD Kota Padang mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli dan tim ahli/pakar yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
Anggota DPRD Kota Padang periode 2019—2024 terdiri dari 45 anggota dewan perwakilan 9 partai politik hasil pemilihan umum legislatif 2019.

4. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

a. Unsur Perencanaan
Perencanaan pembangunan daerah merupakan pondasi awal pemerintah daerah melaksanakan setiap program dan kegiatan pembangunannya untuk mewujudkan visi dan misi yang diemban. Perencanaan pembangunan daerah meliputi:

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan dokumen perencanaan untuk jangka waktu 20 tahun.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan dokumen perencanaan untuk jangka waktu 5 tahun.
- Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan untuk jangka waktu 1 tahun.

Kinerja urusan Perencanaan Tahun 2021-2025 dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2- 85 Kinerja urusan Perencanaan Tahun 2021-2025

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi					PD Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025	
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Bappeda
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Bappeda
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Bappeda

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi					PD Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025	
4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Bappeda
5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	%	100	100	100	100	100	Bappeda
6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%	100	100	100	100	100	Bappeda
7	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	%	100	100	100	100	100	Bappeda

Sumber : Bappeda Tahun 2025

b. Unsur Keuangan

Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah ditunjukkan dengan adanya akuntabilitas pelaporan keuangan yang memadai, meliputi kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah daerah (LKPD) dan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LK K/L). Opini BPK terhadap Laporan Keuangan pemerintah Kota Padang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang menunjukkan bahwa akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah di wilayah Kota Padang memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Kota Padang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2- 86 Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang, Tahun 2021-2025

No	Tahun	Opini Publik
1	2021	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2	2022	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
3	2023	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
4	2024	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
5	2025	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Sumber: BPK Kota Padang 2025

Kinerja urusan Keuangan Tahun 2020-2024 dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2- 87 Kinerja Urusan Keuangan Tahun 2021-2025

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Persentase SILPA	%	1,69	3,65	2,39	5,20	4,53
3	Persentase SILPA terhadap APBD	%	1,69	3,65	2,39	5,54	4,53
4	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	%	-	-	-	0	0

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi				
			2021	2022	2023	2024	2025
5	Persentase belanja pendidikan (20%)	%	33,51	35,15	37,45	33,71	34,54
6	Persentase belanja kesehatan (10%)	%	12,10	17,80	18,48	22,83	10,39
7	Perbandingan antara belanja langsung (selain Blj. Pegawai) dengan APBD	%	55,29	56,87	58,19	50,98	-
	Perbandingan antara belanja tidak langsung (Blj. Pegawai) dengan APBD	%	44,71	43,13	41,81	49,02	-
8	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	%	6,77	6,58	7,82	2,93	3,3
9	Penetapan APBD		Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu

Sumber : BPKAD Tahun 2026 Keterangan : - (data = 0)

c. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Dalam pelaksanaan pemerintah aspek pengawasan mutlak diimplementasikan secara komprehensif sebagai alat evaluasi terhadap program kegiatan yang dilaksanakan pemerintah. Perkembangan indikator pengawasan di Kota Padang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2- 88 Capaian Kinerja Unsur Pengawasan

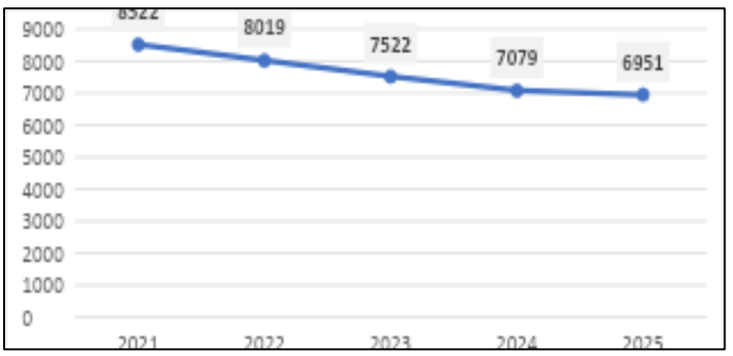
No	Indikator Kinerja Inspektorat	Realisasi Capaian Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Opini atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Level Kapabilitas APIP	2,5	3	3	3	2
3	Nilai maturitas SPIP	3.08	3,10	3,090	3	2
4	Nilai SAKIP PD	86,75	88,01	88,65	88,95	92,20

Sumber : Inspektorat Kota Padang, 2025

d. Unsur Kepegawaian

Jumlah PNS secara umum di Kota Padang mengalami penurunan setiap tahunnya. Hal ini disebabkan karena masa kerja yang sudah selesai/pensiun, pindah status kepegawaian PNS Guru SMA/sederajat dari Pemerintah Kota Padang ke Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dan mutasi PNS ke daerah lain baik mutasi dalam provinsi maupun keluar provinsi. Setelah dilakukannya moratorium sementara, Pemerintah Kota Padang baru dapat melakukan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil pada tahun 2018, akan tetapi hal ini tidak begitu berpengaruh terhadap penambahan pegawai secara keseluruhan. Jumlah PNS Pemerintah Kota Padang masih dapat diprediksi akan tetap mengalami penurunan sampai 5 tahun kedepan. Perkembangan jumlah Pegawai Negeri Sipil yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Padang dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2- 46 Perkembangan Jumlah PNS Kota Padang Tahun 2021–2025



Sumber : Padang dalam Angka 2026

e. Unsur Pendidikan dan Pelatihan

Penataan sistem manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur dilaksanakan dari pengembangan aparatur dalam bentuk diklat jenjang karier dan diklat teknis fungsional. Pelaksanaan diklat aparatur yang telah dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kota Padang sebagai berikut :

Tabel 2- 89 Pelaksanaan Diklat Aparatur yang diaksanakan di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Tahun 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Diklat Jenjang Karier :	369	692	431	2.844	
	- Diklatpim Tk. II	13	-	-	-	-
	- Diklatpim Tk. III	30	-	-	20	6
	- Diklatpim Tk. IV	14	-	-		-
	- Diklat Pra Jab	200	692	5	-	8
	-Pembekalan PPPK	112	-	426	2.824	2854
2	Diklat Teknis Fungsional	227	476	924	647	803

Sumber : BKPSDM Kota Padang, 2025 Keterangan : - (data = 0)

Kinerja urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2021-2025 dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2- 90 Kinerja urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2021-2025

NO	Bidang Urusan/Indikator	Satuan		Realisasi				PD Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025	
1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Tahun	20 JP	20 JP/Th	20 JP/Th	20 JP	20 JP	BKPSDM
2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	2,66	6,48	17,94	34,46	1,31	BKPSDM

NO	Bidang Urusan/Indikator	Satuan		Realisasi				PD Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025	
3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	-	-	-	89,79	24,46	BKPSDM
4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Angka	27	35	35	36	30	BKPSDM
5	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Angka	175	3.345	1.420	173	180	BKPSDM
6	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Angka	4.966	4.639	5.024	4,857	8695	BKPSDM

Sumber : BKPSDM Tahun 2026 Keterangan : - (data = 0)

f. Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan pengembangan mempunyai peranan penting untuk mendukung pembangunan suatu daerah. Berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan keluarnya Permendagri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, menguatkan peran lembaga kelitbangan sebagai lembaga yang berperan dalam melaksanakan evaluasi dan memberikan rekomendasi untuk perumusan kebijakan dan regulasi berbasis kelitbangan guna mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Tabel 2- 91Perkembangan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2021-2025

No	Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
1	Persentase implementasi rencana kelitbangan	%	100%*	100%*	100%	100%	100%
2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	%	66,67%	66,67%	100%	100%	62,5%

Sumber : Bappeda Tahun 2026

Kinerja urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2021-2025 dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2- 92 Kinerja urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2021-2025

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi					PD Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025	
1	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	%	100	100	100	100	100	Bappeda
2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	%	66,67	66,67	100	100	62,5	Bappeda
3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	%	100	100	100	100	100	Bappeda
4	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	%	43	22	18	98	100	Bappeda

Sumber : Bappeda Tahun 2026 Keterangan : - (data = 0)

g. Unsur Kewilayahan

Kota Padang terdiri dari 11 Kecamatan dan 104 Kelurahan. Dalam masa pandemi Covid-19 yang lalu, peran serta Lembaga Kemasyarakatan dalam melakukan pencegahan dan penularan sangat berdampak efektif. Selain itu, peran masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan nyaman serta meningkatkan silaturahmi antar tetangga melalui Program Padang Bagoro. Tiga prinsip pelaksanaan yakni, serentak sekali sebulan, bersama keluarga, dan di lingkungan depan rumah masing- masing menjadi pilar keberhasilan yang megah. "Padang Bagoro" tak sekadar menghidupkan semangat membersihkan lingkungan, melainkan menjadi arena transformasi pikiran masyarakat.

h. Unsur Pemerintahan Umum

Urusan pemerintahan umum merupakan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang Presiden sebagai Kepala Pemerintahan. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, urusan pemerintahan umum meliputi:

1) Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2) Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa.
3) Pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional.
4) Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5) Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan daerah Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6) Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila.
7) Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

Urusan Pemerintahan Umum dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dibentuk pada tahun 2023 yang lalu melalui Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang.

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Aspek daya saing daerah terdiri dari pengeluaran rata-rata perkapita per bulan, produktivitas total daerah, iptek, inovasi dan produktivitas ekonomi yang dijabarkan sebagai berikut.

A. Pengeluaran Rata-Rata Per Kapita Per Bulan

Komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT) merupakan komponen terbesar dalam penggunaan berbagai barang dan jasa yang tersedia di Kota Padang. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar nilai tambah bruto (PDRB) yang dihasilkan di Kota Padang masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga. Dengan demikian, sebagian besar barang dan jasa yang diproduksi di dalam wilayah maupun yang berasal dari luar wilayah akan dikonsumsi oleh rumah tangga sebagai konsumen akhir.

Dalam struktur perekonomian, rumah tangga berperan sebagai konsumen akhir (final consumer) atas barang dan jasa, termasuk konsumsi oleh rumah tangga khusus seperti asrama, panti, dan lembaga pemasyarakatan. Konsumsi tersebut dikelompokkan berdasarkan klasifikasi COICOP (Classification of Individual Consumption by Purpose) ke dalam tujuh kelompok, yaitu: (1) makanan dan minuman selain restoran; (2) pakaian, alas kaki, dan jasa perawatannya; (3) perumahan, perlengkapan, dan pemeliharaan rumah tangga; (4) kesehatan dan pendidikan; (5) transportasi dan komunikasi; (6) restoran dan hotel; serta (7) barang dan jasa lainnya.

Dalam konteks indikator kesejahteraan masyarakat, pengeluaran per kapita pada dasarnya merujuk pada pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, yaitu rata-rata pengeluaran konsumsi yang dilakukan oleh setiap penduduk untuk memenuhi kebutuhan makanan maupun nonmakanan dalam periode tertentu. Oleh karena itu, perkembangan pengeluaran per kapita mencerminkan

kemampuan konsumsi masyarakat yang erat kaitannya dengan tingkat pendapatan, daya beli, dan kesejahteraan penduduk.

Selama periode 2020–2024, pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga di Kota Padang menunjukkan tren meningkat, baik atas dasar harga berlaku (nominal) maupun atas dasar harga konstan (riil), meskipun sempat mengalami perlambatan pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Seiring dengan membaiknya penanganan pandemi dan pelonggaran pembatasan aktivitas ekonomi pada tahun 2021 hingga 2024, berbagai sektor usaha kembali beroperasi secara normal. Kondisi tersebut mendorong peningkatan kesempatan kerja, pertumbuhan pendapatan masyarakat, serta peningkatan pengeluaran konsumsi rumah tangga. Peningkatan konsumsi tersebut pada akhirnya turut tercermin dalam meningkatnya nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita sebagai salah satu indikator tingkat kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2- 93 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kota Padang (miliar rupiah), 2021– 2025

Jenis Pengeluaran	2021	2022	2023	2024	2025
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	32.756,92	36646,84	39.324,41	41.835,43	43.703,08
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	734,11	555,48	866,77	938,67	984,74
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	9521,81	8959,13	9.049,10	9.403,01	9.212,78
Pembentukan Modal Tetap Bruto	19030,23	20937,97	23.013,89	24.063,39	25.251,62
Perubahan Inventori	59,67	172,27	-527,52	-127,21	-285,94
Net Ekspor Barang dan Jasa / Net	3076,12	5487,26	7.834,57	7.883,33	10.121,14
Produk Domestik Regional	65.178,86	72.978,95	79.561,22	83.996,62	88.987,41

Sumber : PDRB Menurut Pengeluaran, BPS Kota Padang 2025

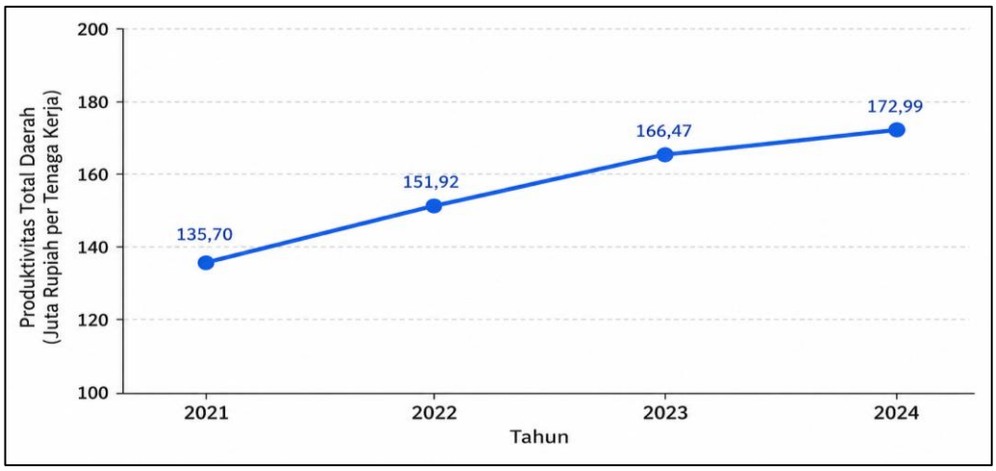
Jika dilihat pada tabel, komponen pengeluaran yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB secara nominal adalah Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) yang mencapai 43.703,08 miliar rupiah pada tahun 2025. Kemudian diikuti oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto yaitu sebesar 25.251,62 miliar rupiah, Net Ekspor sebesar Rp 10.121,14 miliar rupiah. Fenomena ini mencerminkan daya beli masyarakat yang tetap kuat meskipun terdapat tantangan ekonomi global. Namun, konsumsi pemerintah mengalami fluktuasi, menurun pada 2022 dan mulai pulih pada 2023-2024. Hal ini mencerminkan kebijakan fiskal yang lebih ketat pasca pandemi.

B. Produktifitas Total Daerah

Produktifitas Total Daerah merupakan indikator yang menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan nilai tambah ekonomi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, baik tenaga kerja, modal, maupun teknologi. Secara umum, peningkatan produktivitas menunjukkan bahwa faktor-faktor produksi digunakan secara lebih efisien sehingga mampu menghasilkan output yang lebih besar tanpa harus diikuti oleh peningkatan penggunaan input dalam proporsi yang sama. Oleh karena itu, produktivitas menjadi salah satu indikator penting

dalam mengukur daya saing dan kualitas pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Gambar 2- 47 Perkembangan Produktifitas Total Daerah Kota Padang Tahun 2021-2024



Sumber : BPS Kota Padang 2025

Di Kota Padang, produktifitas daerah dipengaruhi oleh perkembangan berbagai sektor ekonomi, terutama sektor perdagangan, industri pengolahan, transportasi dan pergudangan, konstruksi, jasa pendidikan, jasa kesehatan, serta penyediaan akomodasi dan makan minum. Sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, pendidikan, dan jasa di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang memiliki struktur ekonomi yang didominasi oleh sektor tersier. Kondisi ini mendorong peningkatan efisiensi kegiatan ekonomi melalui penguatan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, dan berkembangnya aktivitas usaha.

Tabel 2- 94 Produktifitas Total Daerah Kota Padang Tahun 2021-2024

Tahun	PDRB ADHB (Juta Rp)	Angkatan Kerja	Produktivitas Total
2020	62.181.006,06	476.663	130,45
2021	65.178.860,85	480.324	135,70
2022	72.978.951,70	480.376	151,92
2023	79.704.673,24	478.779	166,47
2024	84.182.560,00	486.638	172,99

Sumber : BPS Kota Padang (diolah), sebagaimana dimuat dalam RPJMD Kota Padang Tahun 2025–2029

Perkembangan produktifitas daerah juga dipengaruhi oleh peningkatan investasi, pembangunan infrastruktur, transformasi digital, inovasi pelayanan publik, serta peningkatan kompetensi tenaga kerja. Di sisi lain, tantangan seperti perlambatan ekonomi global, perubahan pola konsumsi masyarakat, perkembangan teknologi, dan dinamika pasar tenaga kerja turut memengaruhi

tingkat produktifitas daerah. Oleh karena itu, upaya peningkatan produktifitas memerlukan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif serta mendorong inovasi dan peningkatan nilai tambah pada setiap sektor ekonomi.

Peningkatan produktifitas total daerah diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas, meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas kesempatan kerja, serta memperkuat daya saing Kota Padang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah Sumatera Barat. Dengan produktifitas yang semakin baik, proses pembangunan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan dan mewujudkan pembangunan yang inklusif.

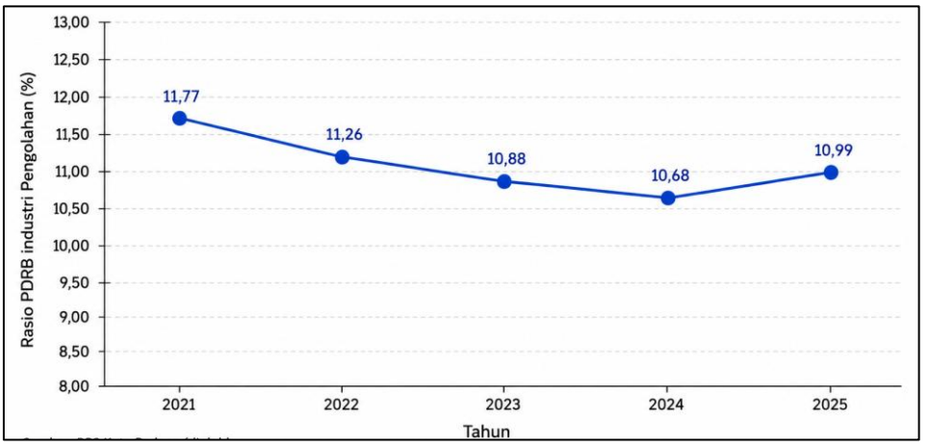
C. Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi

Ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), inovasi, dan produktivitas ekonomi merupakan faktor utama dalam meningkatkan daya saing dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Pemanfaatan IPTEK dan pengembangan inovasi berperan dalam meningkatkan efisiensi proses produksi, kualitas pelayanan, serta nilai tambah pada berbagai sektor ekonomi. Sementara itu, produktivitas ekonomi mencerminkan kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan output yang lebih tinggi melalui pemanfaatan sumber daya secara efektif dan efisien. Di Kota Padang, penguatan ekosistem inovasi, transformasi digital, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat menjadi landasan penting dalam mendorong peningkatan produktivitas ekonomi. Dengan demikian, kemajuan IPTEK dan inovasi diharapkan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, meningkatkan daya saing daerah, serta mendukung terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan.

1. Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)

Sektor industri pengolahan merupakan salah satu sektor strategis yang berperan dalam menciptakan nilai tambah (value added) melalui proses pengolahan bahan baku menjadi barang setengah jadi maupun barang jadi. Dalam struktur perekonomian Kota Padang, sektor ini menjadi salah satu penggerak aktivitas ekonomi yang berkontribusi terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), di samping sektor perdagangan, konstruksi, transportasi dan pergudangan, serta penyediaan akomodasi dan makan minum. Besarnya kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB mencerminkan peran sektor tersebut dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, serta memperkuat daya saing ekonomi daerah. Oleh karena itu, perkembangan rasio PDRB industri pengolahan menjadi salah satu indikator yang penting untuk menggambarkan kinerja sektor manufaktur dalam struktur perekonomian Kota Padang.

Gambar 2- 48 Rasio PDRB Industri Pengolahan di Kota Padang Tahun 2021-2025 (Persen)



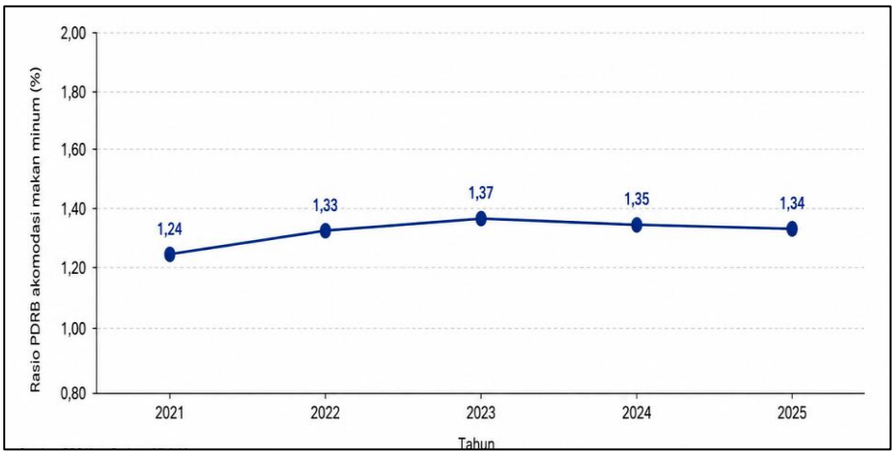
Sumber : BPS Kota Padang 2025

Berdasarkan grafik Rasio PDRB Industri Pengolahan di Kota Padang Tahun 2021–2025, kontribusi sektor industri pengolahan terhadap total PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan kecenderungan menurun selama periode 2021–2024, yaitu dari 11,77 persen pada tahun 2021 menjadi 10,68 persen pada tahun 2024. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pertumbuhan sektor industri pengolahan relatif lebih lambat dibandingkan pertumbuhan sektor ekonomi lainnya yang memiliki kontribusi lebih besar terhadap pembentukan PDRB Kota Padang. Meskipun demikian, pada tahun 2025 rasio tersebut mengalami peningkatan menjadi 10,99 persen, yang menunjukkan mulai membaiknya kinerja sektor industri pengolahan dalam mendukung aktivitas perekonomian daerah. Ke depan, peningkatan kontribusi sektor ini perlu terus didorong melalui penguatan hilirisasi industri, peningkatan investasi, pengembangan industri kecil dan menengah, penerapan teknologi produksi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia agar sektor industri pengolahan mampu memberikan nilai tambah yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Padang secara berkelanjutan.

2. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)

Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum merupakan salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas perekonomian Kota Padang, terutama sebagai kota tujuan wisata, perdagangan, dan jasa di Provinsi Sumatera Barat. Perkembangan sektor ini dipengaruhi oleh meningkatnya mobilitas masyarakat, pertumbuhan sektor pariwisata, penyelenggaraan berbagai kegiatan ekonomi dan pemerintahan, serta berkembangnya usaha kuliner dan perhotelan. Selain memenuhi kebutuhan masyarakat dan wisatawan, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum juga berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan pelaku usaha, serta memberikan nilai tambah terhadap perekonomian daerah. Oleh karena itu, besarnya kontribusi sektor ini terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menjadi salah satu indikator yang dapat menggambarkan perkembangan aktivitas ekonomi berbasis jasa di Kota Padang.

Gambar 2- 49 Rasio PDRB Akomodasi dan Makan Minum di Kota Padang Tahun 2021-2025 (Persen)



Sumber : BPS Kota Padang 2025

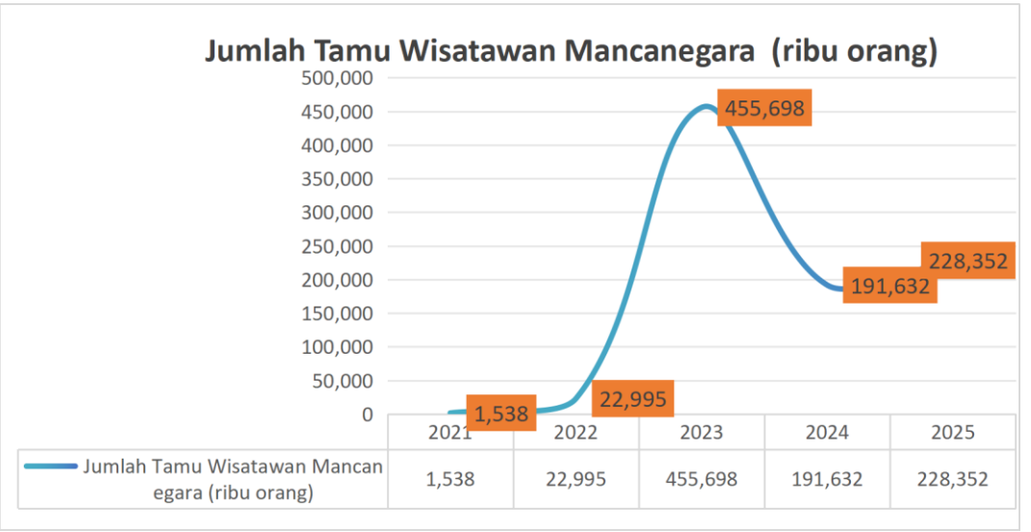
Grafik di atas menggambarkan pergerakan rasio PDRB Pariwisata di Kota Padang atas dasar harga berlaku pada tahun 2021-2025. Pada tahun 2021, rasio berada di angka 1,24. Angka ini terus mengalami kenaikan signifikan pada tahun 2022 menjadi 1,33 dan mencapai puncaknya pada tahun 2023 di angka 1,37. Kenaikan ini didorong oleh pelonggaran mobilitas masyarakat, geliat aktivitas pariwisata, serta bangkitnya industri perhotelan, restoran, dan UMKM kuliner di Kota Padang pasca-pandemi COVID-19. Setelah mencapai puncak di tahun 2023, rasio ini mengalami sedikit koreksi pada tahun 2024 menjadi 1,35, dan kembali turun tipis ke angka 1,34 pada tahun 2025. Penurunan berturut-turut dalam dua tahun terakhir ini mengindikasikan adanya titik jenuh (*saturation point*) atau melambatnya pertumbuhan konsumsi domestik/kunjungan wisata yang tidak secepat periode pemulihan awal. Kondisi ini dipicu oleh kombinasi faktor eksternal berupa tekanan inflasi komponen harga bergejolak (*volatile foods*) yang menahan daya beli riil masyarakat, serta faktor internal terkait perlunya penyegaran daya tarik wisata dan penguatan rantai pasok kuliner lokal guna meningkatkan lama tinggal wisatawan di Kota Padang."

3. Jumlah tamu Wisatawan Mancanegara (Ribu orang)

Kunjungan wisatawan mancanegara merupakan salah satu indikator yang menggambarkan daya tarik dan daya saing sektor pariwisata suatu daerah di tingkat internasional. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara tidak hanya mencerminkan meningkatnya citra dan daya saing destinasi wisata, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah melalui peningkatan aktivitas pada sektor penyediaan akomodasi, makan minum, transportasi, perdagangan, ekonomi kreatif, serta berbagai jasa pendukung lainnya. Sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Barat sekaligus salah satu pintu gerbang utama pariwisata di wilayah barat Indonesia, Kota Padang terus berupaya meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara melalui pengembangan destinasi wisata, penyelenggaraan berbagai event berskala nasional dan internasional, serta peningkatan kualitas

sarana dan prasarana kepariwisataan.

Gambar 2- 50 Kunjungan Wisatawan Mancanegara di Kota Padang Tahun 2021-2025 (Orang)



Sumber: Kota Padang Dalam Angka, 2026

Berdasarkan gambar di atas, Pada tahun 2021, jumlah kunjungan wisman berada pada titik terendah yaitu sebesar 1,538 ribu orang akibat pembatasan mobilitas global (pandemi Covid-19). Seiring dibukanya kembali pintu masuk internasional pada tahun 2022, angka kunjungan melonjak tajam sebesar 1.395,1% menjadi 22,995 ribu orang. Tahun 2023 menjadi tahun keemasan (*booming*) pariwisata dengan capaian tertinggi sepanjang periode, yakni mencapai 455,698 ribu orang. Lonjakan ekstrem ini didorong oleh fenomena *revenge travel* (wisata balas dendam) pascapandemi dan efektivitas promosi pariwisata daerah. Pada tahun 2024, terjadi penurunan signifikan (koreksi pasar) sebesar 57,9% menjadi 191,632 ribu orang. Hal ini dipengaruhi oleh berakhirnya gelombang *revenge travel* global dan penyesuaian daya beli masyarakat internasional. Namun, komitmen pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas pariwisata membuahkan hasil positif di tahun 2025, di mana kunjungan kembali tumbuh sebesar 19,2% menjadi 228,352 ribu orang.

Adanya tren pemulihan yang solid dari tahun 2024 ke 2025 (+19,2%), mengindikasikan bahwa daya tarik daerah di mata internasional berangsur-angsur pulih dan stabil. Kebijakan pelonggaran travel dan peningkatan infrastruktur aksesibilitas daerah pasca-2022 terbukti efektif memicu minat wisman.

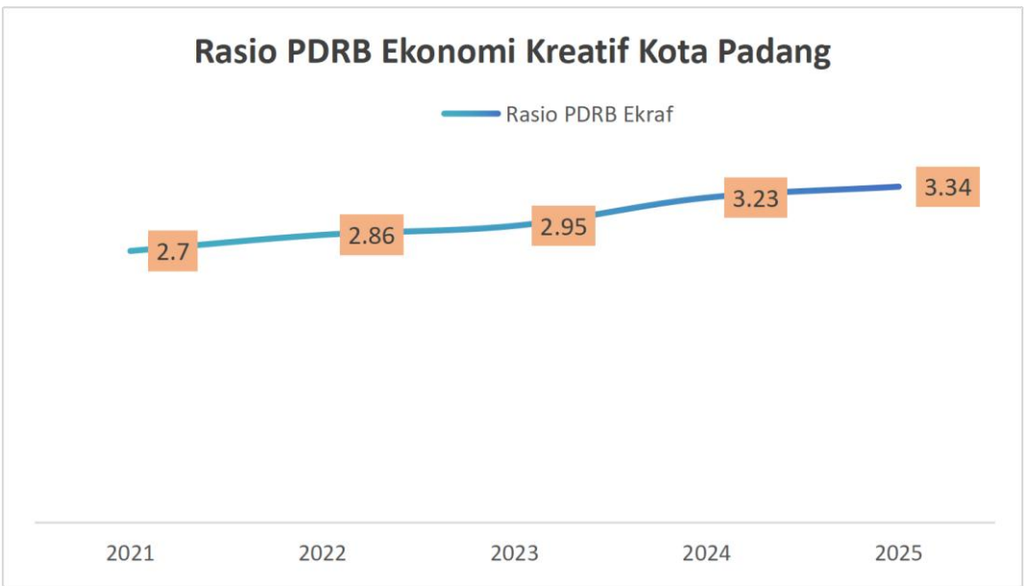
4. Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif

Dalam upaya mewujudkan transformasi struktur perekonomian daerah yang tangguh, berdaya saing, dan berkelanjutan, Pemerintah Kota Padang terus mendorong diversifikasi sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru yang tidak hanya bertumpu pada sektor konvensional. Salah satu sektor potensial yang

diproyeksikan menjadi motor penggerak ekonomi masa depan adalah sektor ekonomi kreatif. Melalui pemanfaatan kreativitas, modal intelektual, kemajuan teknologi, serta kekayaan warisan budaya lokal, sektor ini terbukti mampu beradaptasi di tengah dinamika ekonomi global maupun nasional. Arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah yang fokus pada penguatan ekosistem hilirisasi produk, pemberdayaan UMKM, serta optimalisasi ruang-ruang kreatif bagi para pelaku usaha, secara langsung telah memberikan stimulus positif terhadap pembentukan nilai tambah ekonomi. Keberhasilan intervensi program kerja daerah tersebut tercermin dari kontribusi sektor ini yang terus mengalami penguatan dari tahun ke tahun.

Untuk melihat sejauh mana performa dan pengaruh sektor berbasis pengetahuan ini terhadap struktur ekonomi makro daerah, perkembangan kontribusi nilai tambah tersebut dapat diukur melalui indikator Rasio PDRB Ekonomi Kreatif. Berdasarkan hasil kompilasi data sektoral sepanjang periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2025, Rasio PDRB Ekonomi Kreatif dapat dijabarkan melalui analisis sebagai berikut :

Gambar 2- 51 Proporsi PDRB Sektor Industri Kreatif dan Pariwisata terhadap PDRB Kota Padang (%)



Sumber: BPS Kota Padang, 2026

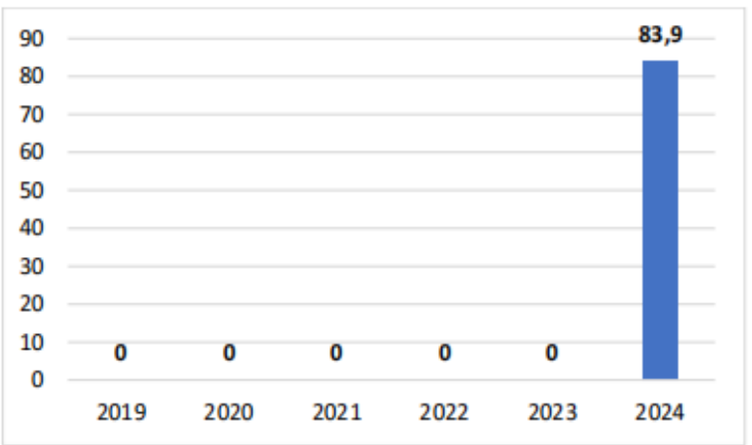
Sektor Ekonomi Kreatif di Kota Padang menunjukkan peran yang semakin strategis dalam struktur perekonomian daerah. Berdasarkan data rasio PDRB Ekonomi Kreatif Kota Padang lima tahun terakhir (2021–2025) yang tercantum pada grafik di atas, sektor ini secara konsisten mengalami tren ekspansif. Pada tahun 2021, rasio PDRB Ekraf tercatat sebesar 2,70%, dan terus merangkak naik hingga mencapai 3,34% pada akhir tahun 2025. Kenaikan yang paling signifikan terjadi pada periode 2023–2024, di mana rasio tumbuh dari 2,95% menjadi 3,23%. Tren positif yang berkelanjutan ini mengindikasikan bahwa diversifikasi ekonomi di Kota Padang berjalan dengan baik, di mana sektor-sektor berbasis

kreativitas, inovasi, dan teknologi digital mulai mengambil porsi yang lebih besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi makro daerah.

5. Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian (%)

Sensus Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kota Padang baru dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kota Padang pada Tahun 2023, sehingga tidak didapatkan data pada Tahun 2019 – 2022 untuk jumlah UKM di sektor pertanian, hal ini menyebabkan tidak adanya ketersediaan data terkait proporsi UKM non pertanian.
Pada Tahun 2023 berdasarkan data sensus UKM jumlah total pelaku usaha mikro di Kota Padang sebanyak 132.519 pelaku dan usaha mikro di sektor pertanian sebanyak 21.341 pelaku usaha, dan jika diproporsikan jumlah UKM non pertanian berjumlah 83,9%.

Gambar 2- 52 Proporsi Jumlah UKM Non Pertanian Kota Padang Tahun 2019 - 2023



Sumber : BPS Kota Padang, 2024

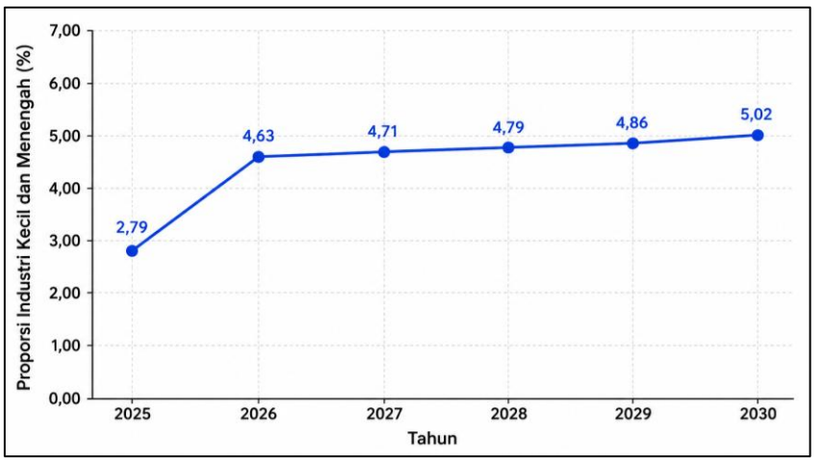
Ke depannya proporsi UKM non pertanian akan cenderung meningkat, hal disebabkan Kota Padang yang merupakan daerah perkotaan yang akan berspesialisasi pada sektor jasa perdagangan, jasa pariwisata, jasa Pendidikan, jasa Kesehatan, jasa transportasi dan pergudangan.

6. Proporsi jumlah industri kecil dan menengah (%)

Industri Kecil dan Menengah (IKM) merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi daerah karena berperan dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah produk lokal, mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi, serta memperkuat daya saing industri daerah. Di Kota Padang, pengembangan IKM menjadi salah satu fokus pembangunan sektor industri mengingat karakteristik usaha yang relatif adaptif terhadap perubahan ekonomi dan memiliki keterkaitan yang erat dengan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Peningkatan proporsi jumlah IKM menunjukkan semakin

berkembangnya basis industri pengolahan skala kecil dan menengah yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi, memperluas kesempatan berusaha, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, indikator proporsi jumlah IKM menjadi salah satu ukuran penting dalam menilai keberhasilan pembangunan sektor industri di Kota Padang.

Gambar 2- 53 Padang Tahun 2025-2030 (%)



Sumber : RPJMD Kota Padang 2025-2030

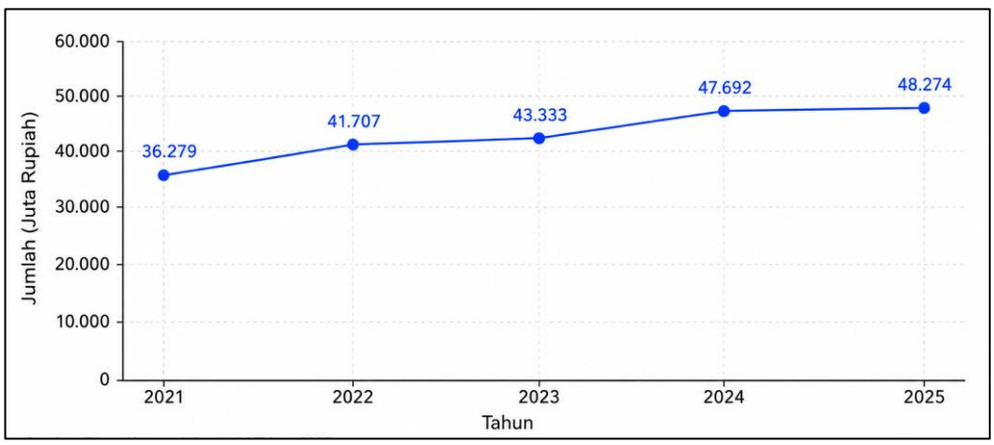
Berdasarkan grafik Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah Kota Padang Tahun 2025–2030, proporsi jumlah IKM diproyeksikan mengalami peningkatan secara konsisten selama periode perencanaan. Pada tahun 2025, proporsi IKM tercatat sebesar 2,79 persen sebagai kondisi dasar (baseline), kemudian meningkat signifikan menjadi 4,63 persen pada tahun 2026. Selanjutnya, proporsi tersebut diproyeksikan terus meningkat secara bertahap menjadi 4,71 persen pada tahun 2027, 4,79 persen pada tahun 2028, 4,86 persen pada tahun 2029, dan mencapai 5,02 persen pada tahun 2030. Tren peningkatan tersebut mencerminkan komitmen Pemerintah Kota Padang dalam mendorong pertumbuhan sektor industri melalui pengembangan sentra industri, peningkatan kapasitas pelaku IKM, pemanfaatan teknologi dan inovasi, perluasan akses pembiayaan, serta penguatan akses pasar. Dengan meningkatnya proporsi IKM, diharapkan sektor industri mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan daya saing produk lokal di tingkat regional maupun nasional.

7. Proporsi Jumlah UKM (%)

Usaha mikro memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung perekonomian daerah karena mampu menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Sebagai kelompok usaha yang mendominasi struktur pelaku usaha di Kota Padang, usaha mikro menjadi sasaran utama berbagai program pembinaan pemerintah daerah melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, fasilitasi perizinan, akses pembiayaan, pendampingan usaha,

hingga perluasan akses pemasaran. Jumlah usaha mikro binaan merupakan salah satu indikator yang menggambarkan jangkauan intervensi pemerintah dalam meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha mikro sehingga mampu berkembang menjadi usaha yang lebih produktif dan berkontribusi terhadap perekonomian daerah.

Gambar 2- 54 Jumlah Usaha Mikro Binaan Kota Padang Tahun 2021-2025 (Unit Usaha)



Sumber : BPS Kota Padang 2025

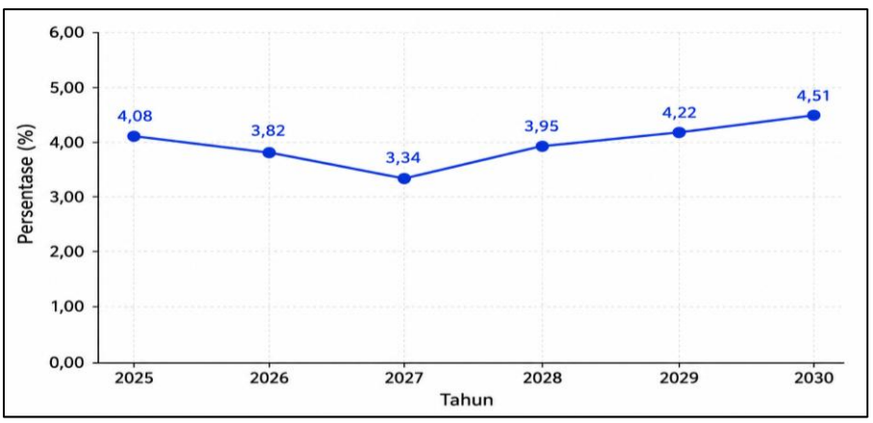
Berdasarkan grafik Jumlah Usaha Mikro Binaan Kota Padang Tahun 2021–2025, jumlah usaha mikro binaan menunjukkan tren yang terus meningkat selama periode 2021–2025. Pada tahun 2021 jumlah usaha mikro binaan tercatat sebanyak 38.299 unit, kemudian meningkat menjadi 41.787 unit pada tahun 2022, 43.282 unit pada tahun 2023, 47.692 unit pada tahun 2024, dan kembali meningkat menjadi 48.274 unit pada tahun 2025. Peningkatan ini menunjukkan semakin luasnya cakupan program pembinaan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Koperasi dan UKM dalam mendukung pengembangan kapasitas pelaku usaha mikro. Selain mencerminkan meningkatnya jumlah usaha mikro yang memperoleh pembinaan, kondisi tersebut juga mengindikasikan adanya komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat sektor usaha mikro sebagai salah satu penggerak perekonomian daerah. Oleh karena itu, upaya pembinaan perlu terus ditingkatkan, baik dari sisi jangkauan maupun kualitas pendampingan, sehingga mampu meningkatkan daya saing, produktivitas, serta keberlanjutan usaha mikro di Kota Padang.

8. Rasio kewirausaahan (%)

Rasio kewirausahaan daerah merupakan salah satu indikator yang menggambarkan tingkat perkembangan kegiatan kewirausahaan dalam suatu wilayah. Indikator ini mencerminkan proporsi penduduk yang berwirausaha terhadap jumlah penduduk usia produktif sesuai dengan metodologi yang ditetapkan pemerintah. Semakin tinggi rasio kewirausahaan, semakin besar pula kemampuan daerah dalam menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan usaha baru, meningkatkan daya saing ekonomi, serta memperkuat ketahanan ekonomi daerah. Bagi Kota Padang, peningkatan rasio kewirausahaan menjadi salah satu

strategi penting dalam mendukung transformasi ekonomi daerah melalui pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan ekosistem kewirausahaan yang inovatif dan berkelanjutan.

Gambar 2- 55 Rasio Kewirausahaan Daerah Kota Padang Tahun 2025-2030 (%)



Sumber : RPJMD Kota Padang Tahun 2025-2029

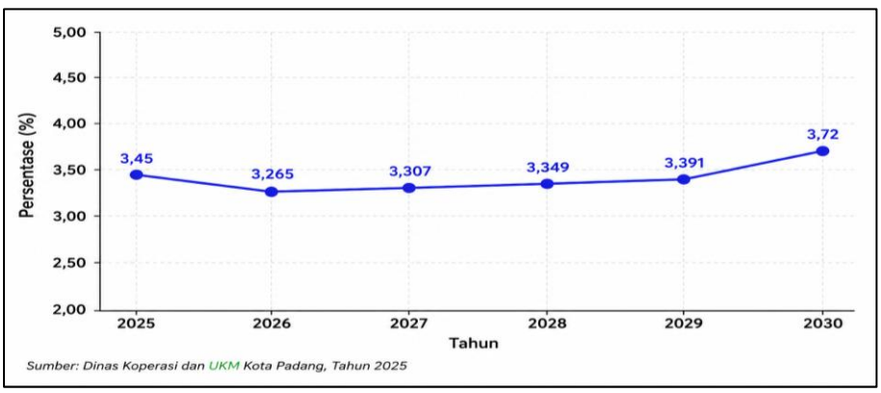
Berdasarkan grafik Rasio Kewirausahaan Daerah Kota Padang Tahun 2025–2030, rasio kewirausahaan diproyeksikan mengalami fluktuasi pada awal periode perencanaan sebelum menunjukkan tren peningkatan hingga akhir periode. Pada tahun 2025, rasio kewirausahaan tercatat sebesar 4,08 persen sebagai kondisi dasar (baseline), kemudian menurun menjadi 3,82 persen pada tahun 2026 dan kembali menurun menjadi 3,34 persen pada tahun 2027. Selanjutnya, rasio kewirausahaan diproyeksikan meningkat menjadi 3,95 persen pada tahun 2028, 4,22 persen pada tahun 2029, dan mencapai 4,51 persen pada tahun 2030. Tren peningkatan pada paruh akhir periode tersebut menunjukkan adanya optimisme terhadap semakin berkembangnya iklim kewirausahaan di Kota Padang sebagai hasil dari berbagai kebijakan pemerintah daerah dalam mendorong lahirnya wirausaha baru, meningkatkan kapasitas dan daya saing pelaku usaha, memperluas akses pembiayaan dan pemasaran, serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat. Dengan meningkatnya rasio kewirausahaan, diharapkan tercipta struktur ekonomi daerah yang lebih tangguh, inklusif, dan mampu menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi serta penciptaan lapangan kerja di Kota Padang.

9. Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)

Koperasi merupakan salah satu pelaku ekonomi yang memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan kesejahteraan anggota, serta penguatan ekonomi berbasis kebersamaan. Sebagai bagian dari pilar perekonomian nasional, koperasi berkontribusi dalam mengembangkan kegiatan usaha produktif, memperluas akses pembiayaan, serta meningkatkan kapasitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kontribusi koperasi terhadap perekonomian

daerah adalah Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Indikator ini menggambarkan besarnya kontribusi volume usaha koperasi dibandingkan dengan total aktivitas ekonomi daerah, sehingga dapat menjadi tolok ukur perkembangan peran koperasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Kota Padang.

Gambar 2- 56 Rasio Volume Usaha Terhadap PDRB Kota Padang Tahun 2025-2030 (%)



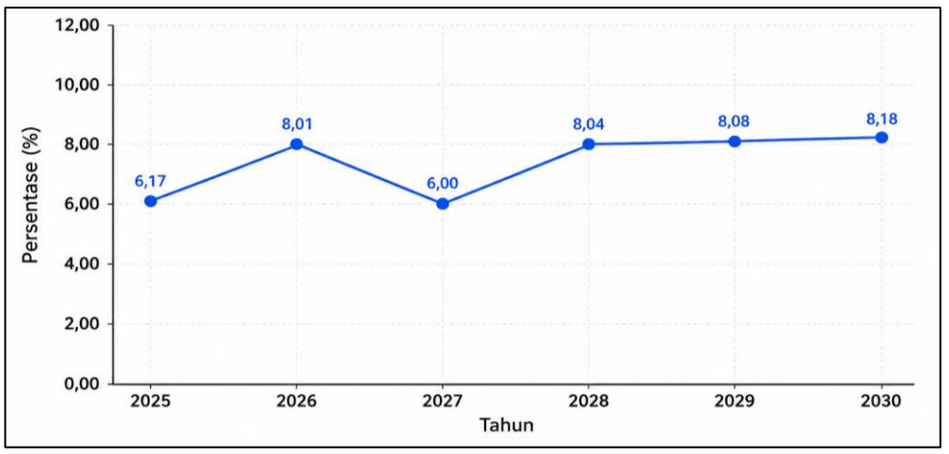
Berdasarkan grafik Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB Kota Padang Tahun 2025–2030, kontribusi volume usaha koperasi terhadap PDRB diproyeksikan mengalami fluktuasi pada awal periode perencanaan sebelum menunjukkan tren peningkatan hingga akhir periode. Pada tahun 2025, rasio volume usaha koperasi tercatat sebesar 3,45 persen sebagai kondisi dasar (baseline), kemudian menurun menjadi 3,265 persen pada tahun 2026. Selanjutnya, rasio tersebut diproyeksikan meningkat secara bertahap menjadi 3,307 persen pada tahun 2027, 3,349 persen pada tahun 2028, 3,391 persen pada tahun 2029, dan mencapai 3,72 persen pada tahun 2030. Tren peningkatan tersebut menunjukkan adanya proyeksi penguatan peran koperasi dalam mendukung aktivitas perekonomian daerah melalui peningkatan volume usaha, perluasan keanggotaan, penguatan kelembagaan, peningkatan profesionalisme pengelolaan koperasi, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi dan digitalisasi layanan koperasi. Dengan meningkatnya rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB, diharapkan koperasi mampu menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi yang inklusif, meningkatkan kesejahteraan anggotanya, serta memperkuat struktur ekonomi kerakyatan yang berdaya saing dan berkelanjutan di Kota Padang.

10. Return on Aset (ROA) BUMD (%)

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki peran strategis sebagai salah satu instrumen pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam menjalankan fungsinya, BUMD dituntut untuk mampu mengelola aset secara efektif dan efisien sehingga menghasilkan kinerja keuangan yang sehat dan berkelanjutan. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas pengelolaan aset tersebut adalah Return on Asset (ROA). Indikator

ROA menggambarkan kemampuan BUMD dalam menghasilkan laba dari seluruh aset yang dimiliki, sehingga semakin tinggi nilai ROA menunjukkan semakin optimal pemanfaatan aset dalam mendukung kinerja perusahaan dan memberikan manfaat ekonomi bagi daerah.

Gambar 2- 57 Return on Asset (ROA) BUMD Kota Padang Tahun 2025-2030 (%)



Sumber : RPJMD Kota Padang Tahun 2025-2030

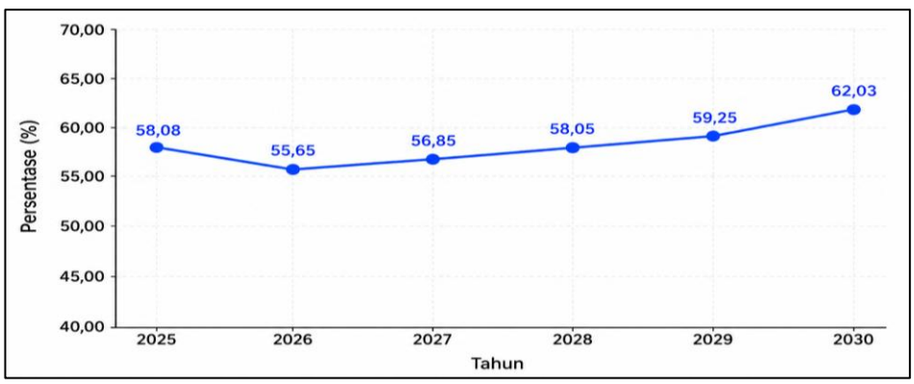
Berdasarkan grafik Return on Asset (ROA) BUMD Kota Padang Tahun 2025–2030, kinerja pemanfaatan aset BUMD diproyeksikan mengalami fluktuasi pada awal periode perencanaan sebelum menunjukkan tren peningkatan hingga akhir periode. Pada tahun 2025, ROA BUMD tercatat sebesar 6,17 persen sebagai kondisi dasar (baseline), kemudian meningkat menjadi 8,01 persen pada tahun 2026. Selanjutnya, ROA diproyeksikan menurun menjadi 6,00 persen pada tahun 2027 sebelum kembali meningkat menjadi 8,04 persen pada tahun 2028, 8,08 persen pada tahun 2029, dan mencapai 8,18 persen pada tahun 2030. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya proyeksi perbaikan kinerja keuangan BUMD melalui optimalisasi pengelolaan aset, peningkatan efisiensi operasional, penguatan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), serta pengembangan unit usaha yang lebih produktif dan berorientasi pada profitabilitas. Dengan tren yang terus membaik hingga akhir periode perencanaan, BUMD diharapkan mampu meningkatkan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, memperkuat kapasitas fiskal melalui peningkatan dividen kepada pemerintah daerah, serta memberikan pelayanan yang semakin berkualitas kepada masyarakat.

11. Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)

Penciptaan lapangan kerja formal merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kualitas pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Lapangan kerja formal umumnya memiliki karakteristik berupa kepastian status pekerjaan, perlindungan ketenagakerjaan, kepesertaan dalam jaminan sosial, serta tingkat produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan sektor informal. Oleh karena itu, peningkatan proporsi penciptaan lapangan kerja formal menjadi

salah satu sasaran pembangunan ekonomi daerah untuk mendorong terciptanya kesempatan kerja yang layak (*decent work*), meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat daya saing tenaga kerja. Di Kota Padang, upaya peningkatan lapangan kerja formal dilakukan melalui pengembangan investasi, penguatan sektor industri dan jasa, peningkatan kompetensi tenaga kerja, serta pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah yang berorientasi pada peningkatan skala usaha dan penyerapan tenaga kerja.

Gambar 2- 58 Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal Kota Padang Tahun 2025-2030 (%)



Sumber : RPJMD Kota Padang Tahun 2025-2030

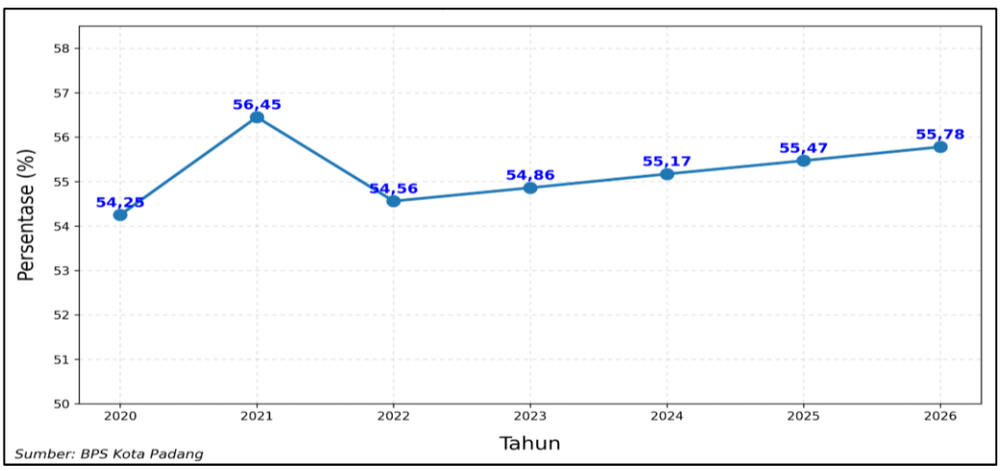
Berdasarkan grafik Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal Kota Padang Tahun 2025–2030, proporsi penciptaan lapangan kerja formal diproyeksikan mengalami fluktuasi pada awal periode perencanaan sebelum menunjukkan tren peningkatan hingga akhir periode. Pada tahun 2025, proporsi lapangan kerja formal tercatat sebesar 58,08 persen sebagai kondisi dasar (baseline), kemudian menurun menjadi 55,65 persen pada tahun 2026. Selanjutnya, indikator ini diproyeksikan kembali meningkat secara bertahap menjadi 56,85 persen pada tahun 2027, 58,05 persen pada tahun 2028, 59,25 persen pada tahun 2029, dan mencapai 62,03 persen pada tahun 2030. Peningkatan tersebut mencerminkan optimisme terhadap semakin berkembangnya kegiatan ekonomi formal di Kota Padang yang didukung oleh peningkatan investasi, pertumbuhan sektor industri dan jasa, pengembangan kewirausahaan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan meningkatnya proporsi penciptaan lapangan kerja formal, diharapkan struktur ketenagakerjaan Kota Padang menjadi semakin berkualitas, produktif, dan berdaya saing sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

12. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)

Indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan menggambarkan persentase perempuan usia kerja yang aktif secara ekonomi, baik yang bekerja maupun sedang mencari pekerjaan. Indikator ini menjadi salah satu ukuran penting dalam menilai tingkat keterlibatan perempuan dalam aktivitas ekonomi sekaligus mencerminkan keberhasilan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan gender. Peningkatan TPAK perempuan menunjukkan

semakin besarnya kesempatan dan akses perempuan terhadap pasar kerja, yang pada akhirnya diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Gambar 2- 59 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kota Padang Tahun 2025-2030 (%)



Sumber : RPJMD Kota Padang Tahun 2025-2030

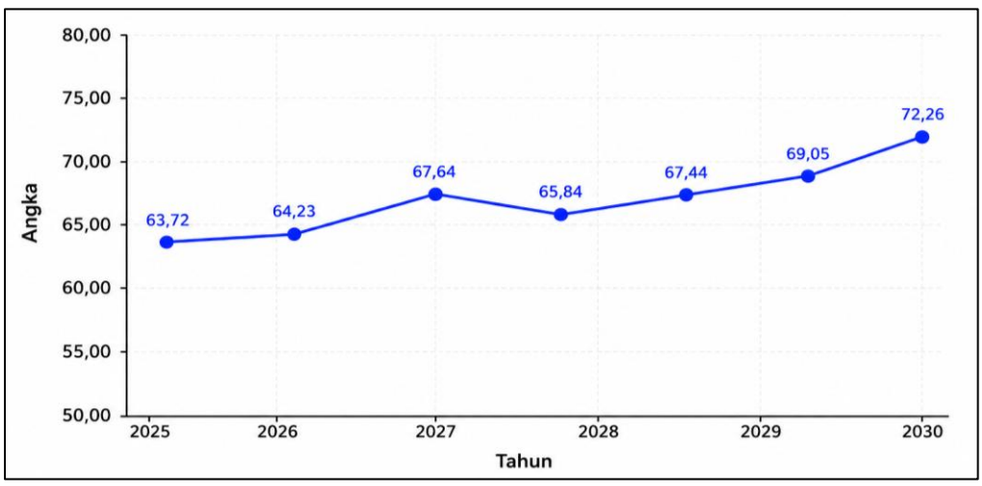
Perkembangan TPAK Perempuan Kota Padang menunjukkan kecenderungan yang relatif stabil dengan tren meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2020, TPAK Perempuan tercatat sebesar 54,25 persen, kemudian meningkat cukup signifikan menjadi 56,45 persen pada tahun 2021. Selanjutnya, indikator ini mengalami sedikit penurunan menjadi 54,56 persen pada tahun 2022, namun kembali menunjukkan peningkatan secara bertahap menjadi 54,86 persen pada tahun 2023, 55,17 persen pada tahun 2024, 55,47 persen pada tahun 2025, dan diproyeksikan mencapai 55,78 persen pada tahun 2026. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam pasar kerja di Kota Padang terus mengalami perbaikan meskipun peningkatannya berlangsung secara bertahap. Hal ini mengindikasikan semakin terbukanya kesempatan kerja bagi perempuan serta meningkatnya peran perempuan dalam kegiatan ekonomi. Ke depan, peningkatan indikator ini perlu terus didukung melalui kebijakan yang memperluas akses perempuan terhadap lapangan kerja yang layak, pengembangan kompetensi dan keterampilan, pemberdayaan perempuan melalui kewirausahaan, serta penciptaan lingkungan kerja yang inklusif dan responsif gender sehingga kontribusi perempuan terhadap pembangunan daerah dapat semakin optimal.

13. Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah (IID) merupakan indikator yang menggambarkan tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam mengembangkan dan mengimplementasikan inovasi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, serta daya saing daerah. Peningkatan nilai Indeks Inovasi Daerah mencerminkan semakin kuatnya budaya inovasi di lingkungan pemerintah daerah yang

didukung oleh pengembangan kebijakan, pemanfaatan teknologi, kolaborasi antar pemangku kepentingan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, Indeks Inovasi Daerah menjadi salah satu indikator penting dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, adaptif, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Gambar 2- 60 Indeks Inovasi Daerah Kota Padang Tahun 2025-2030 (%)



Sumber : RPJMD Kota Padang Tahun 2025-2030

Indeks Inovasi Daerah Kota Padang ditargetkan menunjukkan tren yang cenderung meningkat selama periode perencanaan. Pada tahun 2025 Indeks Inovasi Daerah ditargetkan sebesar 63,72, kemudian meningkat menjadi 64,23 pada tahun 2026 dan 67,64 pada tahun 2027. Selanjutnya, pada tahun 2028 indikator ini ditargetkan mengalami penyesuaian menjadi 65,84, sebelum kembali meningkat menjadi 67,44 pada tahun 2029 dan mencapai 72,26 pada tahun 2030. Meskipun terdapat penyesuaian target pada tahun 2028, secara keseluruhan arah kebijakan menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Padang untuk terus meningkatkan kapasitas inovasi daerah secara berkelanjutan. Peningkatan target tersebut diharapkan dapat dicapai melalui penguatan ekosistem inovasi, peningkatan kompetensi aparatur, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta penguatan kolaborasi dengan perguruan tinggi, dunia usaha, komunitas, dan masyarakat. Dengan demikian, inovasi yang dihasilkan diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, efektivitas tata kelola pemerintahan, daya saing daerah, serta mendukung percepatan pencapaian sasaran pembangunan Kota Padang secara berkelanjutan.

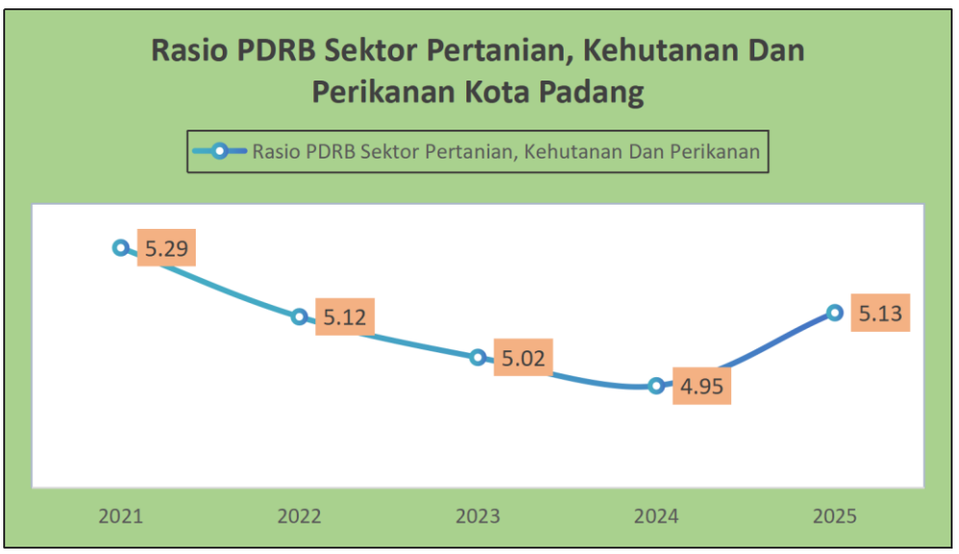
D. Penerapan Ekonomi Hijau

1. Rasio PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan (%)

Ekonomi Hijau adalah model pembangunan ekonomi untuk menunjang pembangunan berkelanjutan dengan fokus pada investasi, kapital dan infrastruktur, lapangan kerja dan

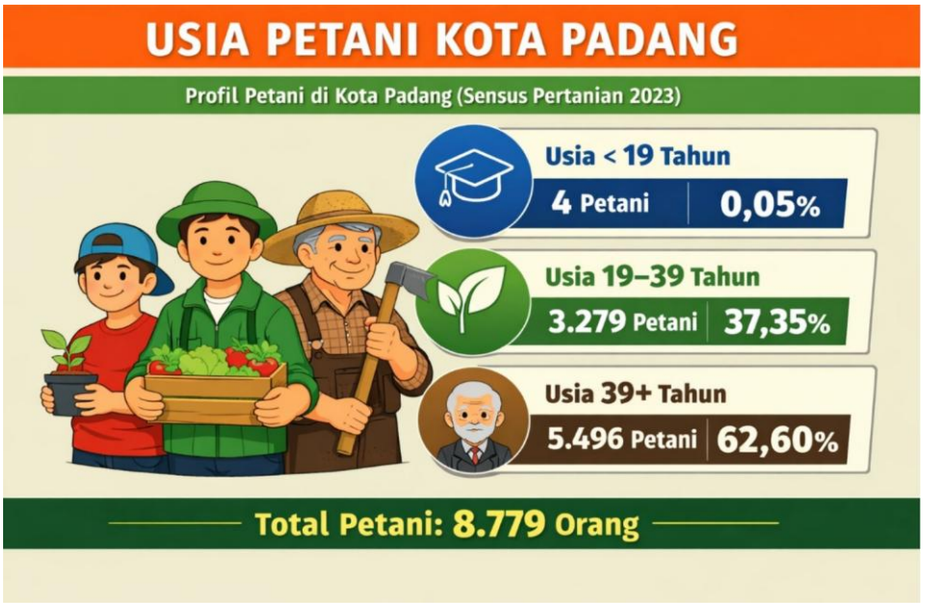
keterampilan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan. Indeks Ekonomi Hijau ditujukan sebagai alat untuk mengukur progres dan capaian transformasi ekonomi menuju Ekonomi Hijau secara tangible, representatif, dan akurat. Penghitungan Indeks Ekonomi Hijau pada level kota dilakukan dengan menghitung rasio PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (%) terhadap PDRB harga berlaku 2021-2025. Berdasarkan hasil perhitungan terhadap indikator Indeks Ekonomi Hijau Kota Padang pada tahun 2021-2025 diperoleh sebagai berikut :

Gambar 2- 61 Rasio Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Kota Padang Tahun 2021-2025 (%)



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Padang, 2026

Dari data diatas dapat dilihat bahwa perkembangan nilai rasio PDRB subsektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tersebut mengalami fluktuasi. Rasio subsektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB terus menurun dari 5,29% pada tahun 2021 menjadi 4,95% pada tahun 2024. Hal ini terjadi kemungkinan diakibatkan luas lahan pertanian yang terus mengalami penurunan dari tahun 2021 ke tahun 2024. Dari tahun 2021-2024 luas sawah beririgasi berkurang sebanyak 171.82Ha. Dari 4.133,31 di tahun 2021 ke 3.961,49 di Tahun 2024. Namun ditahun 2025 terjadi peningkatan menjadi 5.844,44Ha. Ini berakibat adanya *rebound* atau pemulihan kontribusi sektor, meski belum menyamai level 2021.



Sumber: data diolah dari Sensus Pertanian, 2023

Pengurangan rasio PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan ini salah satunya juga disebabkan minat masyarakat khususnya generasi muda untuk berusaha di sektor pertanian makin berkurang. Gambar di atas menggambarkan struktur demografi petani dimana mayoritas (62,60%) berusia di atas 40 tahun, sementara hanya 0,05% yang berusia di bawah 19 tahun dan sisanya 37,35% petani dengan usia 19-39 tahun Kondisi ini menegaskan tantangan regenerasi tenaga kerja pertanian, sekaligus peluang untuk mendorong keterlibatan generasi muda melalui inovasi, teknologi, dan dukungan kebijakan. Selain itu belum maksimalnya pengelolaan sektor kehutanan untuk menjadi sumber PDRB Kota Padang menjadi salah satu penyebab rendahnya nilai indeks ekonomi hijau ini. Pemulihan di 2025 Bisa dikaitkan dengan kebijakan berupa intervensi pemerintah dalam bentuk bantuan untuk kelompok pertanian, perbaikan harga komoditas, atau peningkatan produksi. Pemulihan harus dijaga dengan program berkelanjutan (modernisasi pertanian, perlindungan lahan, diversifikasi usaha tani).

2. Tingkat produktivitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (Juta/orang)

Secara umum indikator produktivitas diartikan sebagai hubungan antara output berupa barang atau jasa dengan input sumber atau tenaga yang digunakan dalam suatu produksi. Dalam hal ini adalah terkait produktivitas tenaga kerja yang menjadi acuan dalam sebuahkeberhasilan tenaga kerja dalam menghasilkan suatu produk tertentu.Sektor pertanian, kehutanan dan perikananmerupakan salah satupenyangga perekonomian dantenaga kerja sebagian besar penduduk di Provinsi Sumatera Barat.

Gambar 2- 62 Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kota Padang Tahun 2020-2024 (juta/tahun)



Sumber: BPS Kota Padang, 2025

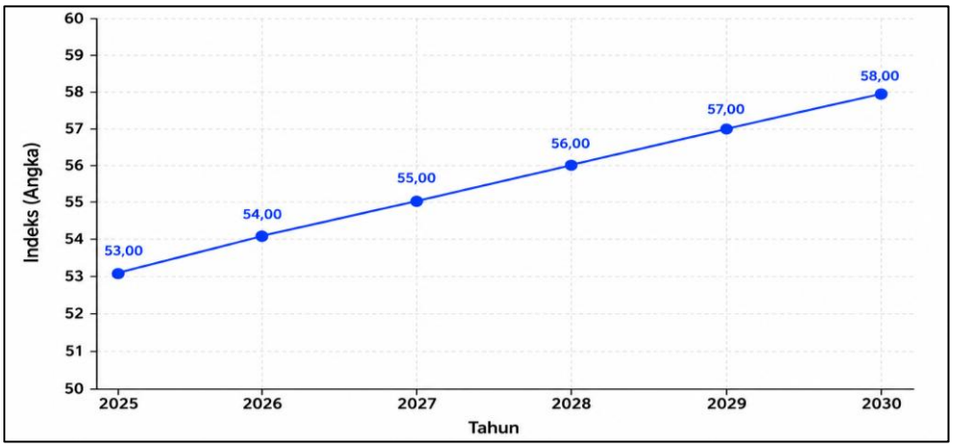
Kondisi produktivitas tenaga kerja sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terlihat dari jumlah penduduk yang bekerja dan kontribusi PDRB sektor ini di Kota Padang. Jumlah penduduk di Kota Padang yang bekerja di sektor ini tahun 2020-2024 terlihat cenderung fluktuatif, sejalan dengan distribusi PDRB sektor yang sama terhadap PDRB Kota Padang. Jumlah terendah penduduk yang bekerja pada sektor pada tahun 2020 yaitu 16.989 orang, dan tertinggi pada tahun 2023 yaitu 24.328 orang dan kembali turun pada tahun 2024 menjadi 19.029 orang yang bekerja di sektor pertanian.

E. Transformasi Digital

1. Indeks Masyarakat Digital Indonesia

Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) merupakan indikator yang mengukur tingkat kematangan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital secara produktif, aman, dan berkelanjutan. Pengukuran IMDI mencakup berbagai dimensi, antara lain infrastruktur dan akses digital, keterampilan digital, pemanfaatan teknologi digital dalam aktivitas ekonomi dan sosial, serta budaya digital masyarakat. Bagi Pemerintah Kota Padang, peningkatan nilai IMDI menjadi salah satu indikator penting dalam mendukung transformasi digital daerah sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan daya saing ekonomi daerah, serta percepatan pembangunan yang inklusif sesuai dengan arah kebijakan transformasi digital nasional.

Gambar 2- 63 Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) Kota Padang Tahun 2025-2030



Sumber : RPJMD Kota Padang Tahun 2025-2030

Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) Kota Padang ditargetkan mengalami peningkatan secara bertahap selama periode perencanaan tahun 2025–2030. Pada tahun 2025, IMDI ditargetkan sebesar 53, kemudian meningkat menjadi 54 pada tahun 2026, 55 pada tahun 2027, 56 pada tahun 2028, 57 pada tahun 2029, dan mencapai 58 pada tahun 2030. Peningkatan target tersebut mencerminkan komitmen Pemerintah Kota Padang dalam mempercepat transformasi digital yang tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, tetapi juga pada peningkatan literasi digital masyarakat, perluasan akses terhadap layanan digital, penguatan ekosistem ekonomi digital, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Di sisi lain, capaian Realisasi Tahun 2025 sebesar 58,28 telah melampaui target tahun yang ditetapkan sebesar 53, sehingga menunjukkan bahwa tingkat adopsi dan pemanfaatan teknologi digital oleh masyarakat berkembang lebih cepat dari yang diproyeksikan. Kondisi tersebut menjadi modal yang kuat bagi Pemerintah Kota Padang untuk menetapkan target yang lebih progresif pada tahun-tahun berikutnya dengan tetap memperhatikan keberlanjutan program, pemerataan akses digital, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta penguatan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, komunitas, dan masyarakat dalam mewujudkan ekosistem digital yang inklusif, inovatif, dan berdaya saing.

F. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

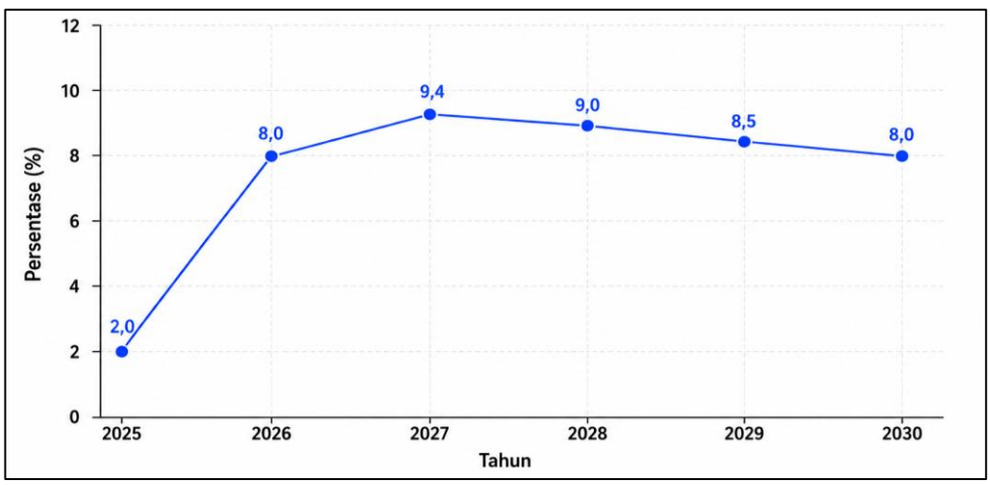
Integrasi Ekonomi Domestik dan Global merupakan upaya untuk memperkuat keterhubungan perekonomian daerah dengan pasar nasional maupun internasional melalui peningkatan daya saing produk, kelancaran arus barang dan jasa, investasi, serta pengembangan jaringan perdagangan dan kerja sama ekonomi. Dalam konteks pembangunan daerah, integrasi ekonomi menjadi faktor strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor

unggulan, memperluas akses pasar bagi pelaku usaha, serta menciptakan peluang investasi dan lapangan kerja. Bagi Kota Padang, sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat yang didukung oleh keberadaan pelabuhan, bandara, serta sektor perdagangan, jasa, pariwisata, dan industri pengolahan, penguatan integrasi ekonomi domestik dan global menjadi salah satu prasyarat untuk meningkatkan daya saing daerah, memperluas konektivitas ekonomi, dan mendukung terwujudnya pembangunan yang inklusif, tangguh, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1. Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok

Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok merupakan indikator yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam menjaga kecukupan pasokan serta stabilitas distribusi barang kebutuhan pokok di masyarakat. Indikator ini menjadi salah satu ukuran penting dalam mewujudkan ketahanan ekonomi daerah karena berkaitan erat dengan pengendalian inflasi, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Upaya menjaga stabilitas dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dilakukan melalui penguatan koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, distributor, dan pemangku kepentingan lainnya guna memastikan pasokan tetap terjaga, distribusi berjalan lancar, serta mengantisipasi potensi gangguan akibat faktor musiman, bencana, maupun dinamika perekonomian.

Gambar 2- 64 Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok Kota Padang Tahun 2025-2030



Sumber : RPJMD Kota Padang Tahun 2025-2030

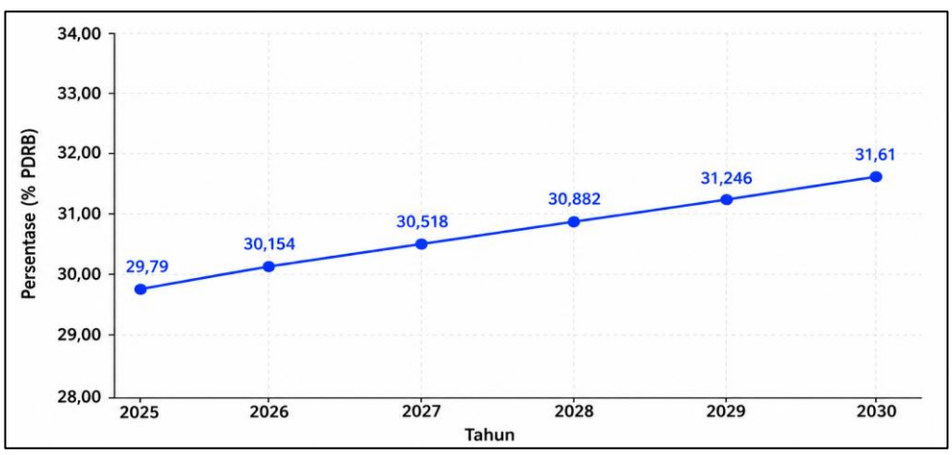
Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok Kota Padang ditargetkan berada pada rentang yang mampu menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat selama periode perencanaan tahun 2025–2030. Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan berada pada kisaran 2–10 persen, kemudian pada

tahun 2026 ditargetkan berada pada rentang 2,7–9,8 persen, meningkat menjadi 2,5–9,4 persen pada tahun 2027, 2–9 persen pada tahun 2028, 1,5–8,5 persen pada tahun 2029, dan mencapai 1–8 persen pada tahun 2030. Target tersebut menunjukkan arah kebijakan Pemerintah Kota Padang untuk menjaga stabilitas pasokan barang kebutuhan pokok sekaligus mengendalikan fluktuasi yang berpotensi mengganggu ketersediaan dan stabilitas harga di pasar. Penyempitan rentang target dari tahun ke tahun mencerminkan upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan rantai pasok, memperkuat sistem distribusi, meningkatkan koordinasi pengendalian inflasi daerah, serta mengoptimalkan pemantauan stok dan harga barang kebutuhan pokok. Dengan demikian, diharapkan ketersediaan barang kebutuhan pokok tetap terjaga, gejolak harga dapat diminimalkan, daya beli masyarakat tetap terpelihara, serta ketahanan ekonomi daerah semakin kuat dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan Kota Padang secara berkelanjutan.

2. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) merupakan salah satu komponen penting dalam struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang mencerminkan tingkat investasi fisik dalam bentuk pembangunan infrastruktur, pengadaan barang modal, serta peningkatan kapasitas produksi di suatu daerah. Indikator ini menjadi salah satu tolok ukur utama dalam menilai tingkat akumulasi modal dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi daerah. Peningkatan PMTB menunjukkan adanya penguatan aktivitas investasi, baik dari sektor pemerintah maupun swasta, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap perluasan kapasitas ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan daya saing daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Gambar 2- 65 Pembentukan Modal Tetap Bruto (%PDRB) Kota Padang Tahun 2025-2030



Sumber : RPJMD Kota Padang Tahun 2025-2030

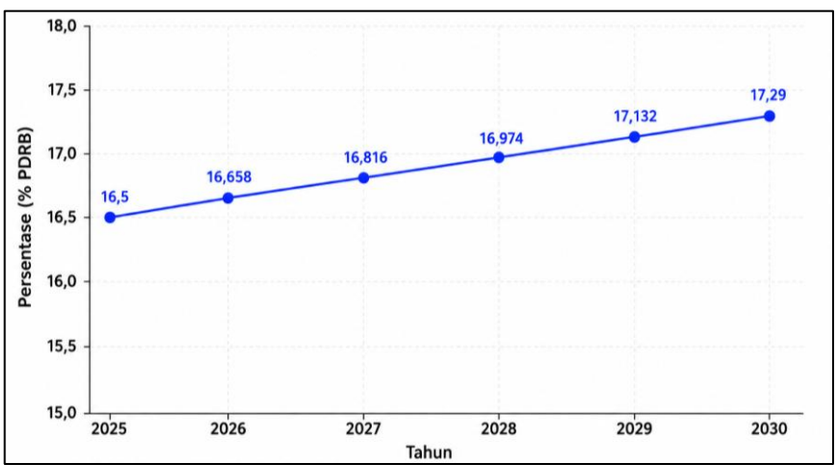
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Kota Padang ditargetkan menunjukkan tren peningkatan secara bertahap selama periode tahun 2025–2030. Pada tahun 2025, PMTB ditargetkan sebesar

29,79 persen, kemudian meningkat menjadi 30,154 persen pada tahun 2026, 30,518 persen pada tahun 2027, 30,882 persen pada tahun 2028, 31,246 persen pada tahun 2029, dan mencapai 31,61 persen pada tahun 2030. Tren peningkatan tersebut mencerminkan komitmen Pemerintah Kota Padang dalam memperkuat iklim investasi dan mendorong akumulasi modal di berbagai sektor ekonomi melalui peningkatan infrastruktur, kemudahan berusaha, serta penguatan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Peningkatan PMTB juga diharapkan mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan kapasitas produksi, efisiensi ekonomi, dan perluasan kesempatan kerja, sehingga pada akhirnya dapat mendukung terwujudnya struktur ekonomi Kota Padang yang lebih produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

3. Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB) (Kota Padang)

Ekspor Barang dan Jasa merupakan salah satu komponen penting dalam struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang menggambarkan tingkat keterbukaan ekonomi suatu daerah terhadap pasar luar, baik nasional maupun internasional. Indikator ini mencerminkan kemampuan daerah dalam menghasilkan produk barang dan jasa yang memiliki daya saing dan dapat dipasarkan ke luar wilayah, serta menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi daerah. Peningkatan ekspor menunjukkan adanya penguatan struktur ekonomi, peningkatan produktivitas sektor unggulan, serta perluasan akses pasar yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan daya saing Kota Padang dalam menghadapi dinamika ekonomi global.

Gambar 2- 66 Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB) Kota Padang Tahun 2025-2030



Sumber : RPJMD Kota Padang Tahun 2025-2030

Kontribusi ekspor barang dan jasa terhadap PDRB Kota Padang diproyeksikan meningkat secara bertahap dari **16,50 persen pada tahun 2025** menjadi **17,29 persen pada tahun 2030**, yang menunjukkan semakin menguatnya peran sektor berorientasi pasar eksternal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Tren peningkatan ini mencerminkan prospek yang positif terhadap daya

saing produk barang dan jasa Kota Padang, didukung oleh optimalisasi fungsi kota sebagai pusat perdagangan dan jasa di Sumatera Barat. Meskipun peningkatannya relatif moderat, kondisi ini memerlukan penguatan kebijakan melalui peningkatan nilai tambah produk unggulan, pengembangan industri dan UMKM berorientasi ekspor, peningkatan kualitas infrastruktur logistik, perluasan akses pasar, serta penguatan kolaborasi dengan pemerintah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya agar target kontribusi ekspor terhadap PDRB dapat tercapai secara berkelanjutan dan memberikan dampak yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

G. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

1. Persentase Rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)

Berdasarkan data tabel, sasaran untuk **mewujudkan hunian layak dan terjangkau di Kota Padang** pada tahun 2025 menunjukkan performa yang sangat positif. Melalui indikator Persentase Hunian Layak dan Terjangkau, pemerintah kota menetapkan **target tahun 2025 sebesar 73,50%**, sementara **realisasi yang berhasil dicapai mencapai 73,69%**. Keberhasilan ini menempatkan status capaian dalam kategori **melebihi target**, yang mengindikasikan program penyediaan serta standardisasi hunian berjalan secara efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat pada periode tersebut.

Tabel 2- 95 Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau

Tahun	Realisasi		
	Jumlah Rumah Tangga Hunian Layak (JRTHLT)	Jumlah Rumah Tangga seluruhnya (JRT)	Persentase Rumah Tangga Hunian Layak
2021	223.847	274.653	81,50
2022	227.592	227.534	82,01
2023	231.048	288.457	80,10
2024	232.748	294.936	78,91
2025	234.708	297.885	78.79

Sumber : DPRKPP, 2026

Memasuki periode perencanaan berikutnya, pemerintah Kota Padang menetapkan arah tren yang optimistis dan terus meningkat secara bertahap. Hal ini dibuktikan melalui **proyeksi capaian pada tahun 2026 yang ditargetkan naik menjadi 74,74%**, dan dijadwalkan terus meningkat hingga **75,98% pada tahun 2027**. Rencana kenaikan target yang konsisten ini menuntut keberlanjutan program strategis seperti peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH), penyediaan regulasi perumahan yang terjangkau, serta kolaborasi pembiayaan yang kuat guna menjaga momentum keberhasilan yang telah diraih sebelumnya.

H. Stabilitas Ekonomi Makro

1. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)

Rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah persentase yang membandingkan total penerimaan pajak (pusat atau daerah) dengan nilai total produksi ekonomi secara keseluruhan. Angka ini mengukur kemandirian fiskal dan seberapa besar porsi ekonomi yang ditarik oleh pemerintah untuk pembangunan

Berdasarkan data tabel fiskal Kota Padang, rasio Pajak Daerah terhadap PDRB pada tahun 2025 tercatat sebesar **0,82%**, mengalami **kenaikan sebesar 0,13%** jika dibandingkan dengan nilai *baseline* tahun 2024 yang berada di angka 0,69%. Pertumbuhan positif dari tahun sebelumnya ini mengindikasikan bahwa laju penerimaan dan pemungutan pajak daerah bergerak lebih progresif daripada laju pertumbuhan ekonomi makro kota secara keseluruhan. Kenaikan ini mencerminkan keberhasilan langkah intensifikasi fiskal, optimalisasi penagihan berbasis digital, serta perluasan objek pajak daerah baru sepanjang tahun berjalan.

Selain berhasil mencatatkan pertumbuhan dari tahun lalu, kinerja keuangan Pemerintah Kota Padang pada tahun 2025 juga sukses **melampaui target tahunan** yang telah ditetapkan sebelumnya sebesar 0,71%. Capaian realisasi yang menyentuh angka 0,82% ini bahkan sudah melewati ekspektasi jangka panjang daerah yang dipatok untuk tahun 2026 sebesar 0,76% dan tahun 2027 sebesar 0,8%. Melampauinya target ini membuktikan efektivitas perluasan basis pemajakan daerah, sekaligus menjadi fondasi yang kuat bagi struktur kemandirian fiskal Kota Padang di masa mendatang

2. Tingkat Inflasi (%) (Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kabupaten Dharmasraya dan kab Pasaman Barat)

Berdasarkan data rilis resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat, tingkat inflasi tahunan (*year-on-year*) di empat wilayah cakupan Indeks Harga Konsumen (IHK) menutup tahun 2025 dengan dinamika tekanan harga yang cukup signifikan. **Kabupaten Pasaman Barat** mencatatkan lonjakan inflasi tertinggi di Sumatera Barat pada Desember 2025, yakni menembus angka **7,09%**. Di posisi berikutnya, tekanan harga juga terjadi di **Kota Bukittinggi** dengan angka inflasi sebesar **4,99%** dan **Kabupaten Dharmasraya** yang berada di level **4,77%**. Sementara itu, pusat pemerintahan provinsi yakni **Kota Padang** berhasil menjadi wilayah dengan tingkat inflasi tahunan paling terkendali, bertengger di posisi terendah sebesar **4,66%**.

Tingginya disparitas angka inflasi antar-wilayah ini sangat dipengaruhi oleh karakteristik struktural perekonomian masing-masing daerah dalam merespons rantai pasok. Pasaman Barat dan

Dharmasraya, sebagai wilayah kabupaten agroindustri, sangat rentan terhadap fluktuasi biaya logistik distribusi barang dan guncangan cuaca lokal. Sebaliknya, Kota Padang dan Kota Bukittinggi yang memiliki basis perekonomian di sektor jasa dan perdagangan ritel modern, cenderung memiliki jalur distribusi komoditas utama yang lebih mapan. Hal inilah yang membuat stabilitas harga di area perkotaan tersebut menjadi relatif lebih landai dibandingkan dengan wilayah kabupaten sepanjang tahun 2025.

Secara makro, laporan BPS Sumatera Barat menegaskan bahwa kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau, khususnya volatilitas harga pangan segar (*volatile foods*) seperti **bawang merah, cabai rawit, beras, dan daging ayam ras**, menjadi komoditas pemicu utama inflasi di akhir tahun 2025. Akselerasi angka inflasi kumulatif ini menjadi sinyal penting bagi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di masing-masing kota dan kabupaten untuk memperkuat strategi keterjangkauan harga. Langkah ini mencakup penguatan kerja sama antardaerah (KAD) untuk menyuplai pasokan pangan, serta intensifikasi pelaksanaan operasi pasar murah guna menjaga stabilitas daya beli masyarakat memasuki tahun fiskal berikutnya.

3. Total Dana Pihak Ketiga / PDRB (%)

Berdasarkan data tabel indikator makro Kota Padang, rasio Total Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap PDRB menunjukkan adanya koreksi yang cukup signifikan pada tahun 2025 jika dibandingkan dengan kondisi *baseline* tahun 2024. Pada tahun 2024, rasio DPK terhadap PDRB berada di angka **36,78%**, sementara target indikator yang ditetapkan untuk tahun 2025 diturunkan ke level **25,41%**. Penurunan target fiskal yang cukup drastis sebesar 11,37% ini mengindikasikan adanya penyesuaian ekspektasi atau perubahan struktural dalam proyeksi penghimpunan dana masyarakat perbankan terhadap laju pertumbuhan ekonomi daerah sepanjang tahun berjalan. Pemerintah Kota Padang menyusun proyeksi pemulihan yang optimis untuk periode dua tahun berikutnya. Pada tahun 2026, rasio DPK terhadap PDRB diproyeksikan mulai bangkit merangkak naik ke level **28,15%**, dan terus menunjukkan tren penguatan hingga menyentuh angka **30,88%** pada tahun 2027. Tren pertumbuhan jangka menengah ini mencerminkan komitmen daerah dalam mendorong pendalaman sektor keuangan (*financial deepening*), perluasan literasi inklusi perbankan, serta peningkatan kembali kepercayaan masyarakat untuk menabung dan berinvestasi di Kota Padang pasca-fase transisi tahun 2025.

4. Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per (Rupiah)

Berdasarkan data tabel indikator makro ekonomi Kota Padang, indikator Nilai Transaksi Saham per Kapita direncanakan mengalami lonjakan pertumbuhan yang sangat masif pada tahun 2025 dibandingkan dengan kondisi aktual sebelumnya. Pada tahun 2024, *baseline* nilai transaksi saham per kapita masyarakat Kota Padang berada di angka **Rp7.448.960**. Pemerintah daerah

menyesuaikan dengan target Imperative dari Pemerintah Provinsi, sehingga pada tahun 2025 dengan diproyeksi capaian sebesar **Rp19.155.489**, atau tumbuh lebih dari 157% dari baseline. Target kenaikan yang signifikan ini merefleksikan adanya ekspektasi perluasan literasi keuangan, masifnya digitalisasi pasar modal, serta peningkatan pendapatan disposibel (*disposable income*) masyarakat perkotaan untuk berinvestasi.

Meskipun kolom realisasi murni tahun 2025 dikosongkan pada tabel kerja tersebut, arah kebijakan dan tren jangka menengah Kota Padang dirancang terus ekspansif menuju tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2026, proyeksi capaian nilai transaksi saham per kapita kembali dinaikkan menjadi **Rp23.121.911**, dan terus diproyeksikan tumbuh konsisten hingga menyentuh angka **Rp27.088.333** pada tahun 2027. Tren pertumbuhan linier yang kuat ini menunjukkan optimisme bahwa pasar modal akan menjadi instrumen investasi yang semakin inklusif di Kota Padang, sekaligus menjadi motor penggerak baru bagi pendalaman sektor keuangan (*financial deepening*) di tingkat daerah

5. Total Kredit/PDRB (%)

Berdasarkan data tabel indikator ekonomi makro Kota Padang, rasio Total Kredit terhadap PDRB direncanakan mengalami koreksi atau penurunan target yang cukup tajam pada tahun 2025 jika dibandingkan dengan kondisi aktual sebelumnya. Pada tahun 2024, *baseline* rasio kredit terhadap PDRB tercatat cukup tinggi di angka **36,98%**, namun target capaian yang ditetapkan untuk tahun 2025 diturunkan secara signifikan menjadi hanya **15,3%**. Penurunan target fiskal hingga lebih dari separuh nilai *baseline* ini dikarenakan adanya kebijakan konsolidasi perbankan, pengetatan penyaluran kredit (prudent banking), atau proyeksi pertumbuhan PDRB yang jauh lebih cepat daripada laju pertumbuhan akumulasi kredit di daerah sepanjang tahun tersebut.

Proyeksi rasio Total Kredit terhadap PDRB dipatok meningkat menjadi **17,93%** pada tahun 2026, dan terus melanjutkan tren ekspansi hingga menyentuh level **20,56%** pada tahun 2027. Tren kenaikan yang konsisten dalam rencana jangka menengah ini mencerminkan optimisme pemerintah daerah dan sektor perbankan terhadap pemulihan aktivitas investasi, peningkatan serapan modal kerja bagi UMKM, serta penguatan kembali fungsi intermediasi keuangan untuk mendukung roda perekonomian Kota Padang.

6. Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan (%)

Berdasarkan data tabel indikator makro ekonomi Kota Padang, Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan menunjukkan tren pertumbuhan yang stabil dan positif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2024, nilai *baseline* rasio ini tercatat sebesar **5,29%** dari total PDRB kota. Memasuki tahun 2025, sektor ini diproyeksikan tumbuh tipis dengan target sebesar **5,3%**, namun pada realisasinya berhasil mencatatkan performa gemilang di angka **5,42%**. Keberhasilan melampaui target tahunan sebesar 0,12% ini mengindikasikan adanya akselerasi aktivitas lembaga keuangan,

baik perbankan maupun pasar modal, yang bergerak lebih dinamis dalam menopang struktur perekonomian daerah sepanjang tahun berjalan.

Menatap periode jangka menengah, kontribusi sektor jasa keuangan terhadap PDRB Kota Padang diproyeksikan akan terus menjaga stabilitas pertumbuhannya secara berkelanjutan. Pada tahun 2026, target rasio dipatok berada di angka **5,34%**, sedikit mengalami penyesuaian dari realisasi 2025 namun tetap berada di jalur ekspansi jika dibandingkan dengan target awal tahun sebelumnya. Tren penguatan ini berlanjut pada tahun 2027 dengan proyeksi capaian yang merangkak naik ke level **5,38%**. Konsistensi pertumbuhan di atas angka 5,3% dalam rencana jangka menengah ini menegaskan peran krusial sektor jasa keuangan sebagai salah satu pilar penopang stabilitas makro ekonomi dan pendalaman finansial di Kota Padang.

2.2. Evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun berjalan

Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RKPD meliputi evaluasi terhadap pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah dengan mempedomani Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Sejak awal tahun 2026, Kementerian dalam negeri melalui Direktorat Bina Pembangunan Daerah (Bangda) telah mengembangkan aplikasi e-Dalev SIPD yang merupakan aplikasi terintegrasi dari data Perencanaan, penganggaran hingga evaluasi pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Pada aplikasi ini dapat dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD, Renstra, RKPD hingga Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Kota Padang telah menggunakan aplikasi e-Dalev SIPD ini untuk evaluasi pelaksanaan RKPD dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026.

Pada tabel 2-97 disajikan data tarikan dari aplikasi e-Dalev SIPD sesuai format Permendagri 86 tahun 2017 pada format Tabel TC.19 yang merupakan Evaluasi terhadap Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Sampai Dengan Tahun 2026.

Hasil evaluasi mempedomani interval kinerja tahunan pada tabel T-E.1 pada permendagri 86 tahun 2017 yang telah di*breakdown* dalam wujud triwulanan dan 5 tahunan sebagai berikut :

Tabel 2- 96 Interval Kinerja sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Interval Tahunan	Interval TW I (tahunan)	Interval TW I (5 tahunan)	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
90 ≤ 100	> 22,5	> 2,5	Sangat tinggi
75 ≤ 90	18,75 > x ≤ 22,5	1,875 > x ≤ 2,5	Tinggi
65 ≤ 75	16,25 > x ≤ 18,75	1,25 > x ≤ 1,875	Sedang
50 ≤ 65	12,5 > x ≤ 16,25	0,625 > x ≤ 1,25	Rendah
≤ 50	≤ 12,5	≤ 0,625	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri Nomor 86 tahun 2017

Pada aplikasi e-Dalev SIPD, dapat terlihat target hingga akhir periode RPJMD, realisasi capaian RPJMD sampai dengan RKPD tahun lalu serta realisasi pelaksanaan RKPD hingga kondisi Triwulan II tahun 2026 hingga bulan Mei. Hasil evaluasi menjadi acuan penyusunan Perubahan RKPD 2026 dan Perubahan rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2026.

Berdasarkan hasil evaluasi dari sistem e-Dalev SIPD didapat kesimpulan bahwa hingga bulan Mei pada Triwulan II Tahun 2026 realisasi kinerja sebesar 30,56 % (predikat kinerja sangat tinggi), sedangkan realisasi anggaran sebesar 15,72 % (predikat kinerja rendah)

Sedangkan dari hasil rekapitulasi terhadap pelaksanaan RPJMD capaian interval kinerja sebesar 1,53 % (predikat kinerja sedang) dan Realisasi anggaran sebesar 1,77 % (predikat kinerja sedang). Lebih rinci capaian kinerja per urusan tersebut dapat dilihat pada tabel 2-97 pada halaman 2 – 179.

Evaluasi pelaksanaan RPJMD periode 2025 – 2029 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2- 97 Realisasi Capaian RPJMD 2025 – 2029 hingga tahun 2025

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun	Realisasi 2025	ket	TARGET				
				2025			2026	2027	2028	2029	2030
Misi 1 : Menguatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	**Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas profesional, responsif, kolaboratif, dan partisipatif**		Nilai SAKIP	86	87,31	**melebihi target**	86,25	86,5	86,75	87	87,25
		Meningkatnya kualitas integrasi pembangunan dari sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan kinerja		78.68	78.84	**melebihi target**	79,50	80	80,5	81	81,5
		Meningkatkan Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang efektif, efisien dan akuntabel	Opini atas laporan keuangan pemerintah daerah	WTP	WTP	sesuai target	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Meningkatnya kualitas pemetaan regulasi, regulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi daerah	Indeks Reformasi Hukum	91	100	**melebihi target**	91	92	93	94	96
		Meningkatkan Pelayanan Publik yang profesional,	Indeks Pelayanan Publik	3,54	3,38	dibawah target	3,55	3,56	3,57	3,8	4,55

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun	Realisasi 2025	ket	TARGET				
				2025			2026	2027	2028	2029	2030
		responsif dan bebas korupsi									
		Meningkatnya pengawasan arsip daerah	Indeks Pengawasan Arsip	84	96,39	**melebihi target**	85	86	87	88	89
		Meningkatnya pencegahan perilaku korupsi	Indeks Pencegahan Korupsi Daerah	95,2	77.65	dibawah target	95,25	95,50	95,75	96	96,25
		Meningkatnya sumber daya aparatur yang profesional dan berintegritas	Indeks Sistem Merit	0,71	0,66	dibawah target	0,73	0,75	0,78	0,82	0,83
Misi 2 : Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	**Mewujudkan Implementasi Kota Pintar dan Kota Sehat**		Smart City Index	3,2	3,16	dibawah target	3,4	3,5	3,6	3,8	4,0
		Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan berbasis digitalisasi dalam wujudkan smart city	Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	3,96	4,17		4,02	4,08	4,13	4,19	4,25
			Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintahan	-			1,6	1,7	1,8	1,9	2,0
		Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	0,84	0,84	sesuai target	0,84	0,85	0,85	0,85	0,86
		Tercapainya kondisi	Peningkatan Penilaian Hasil	0.01	0,88	**melebihi target**	-	0.01	-	0.08	-

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun	Realisasi 2025	ket	TARGET				
				2025			2026	2027	2028	2029	2030
		lingkungan hidup yang bersih, nyaman, aman dan kualitas hidup sehat.	Evaluasi Kota Sehat								
Misi 3 : Menguatkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya dengan Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	**Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul**		Indeks Pembangunan Manusia	84,51	84,93	**melebihi target**	84,82	85,14	85,53	85,93	86,33
		Meningkatnya literasi masyarakat Kota	Indeks pembangunan Literasi masyarakat	86	18,76	perubahan cara perhitungan	86	86	86	86	88
		Meningkatkan pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	0,849	0,849	sesuai target	0,849	0,850	0,850	0,851	0,852
		Meningkatnya pelestarian dan pembangunan kebudayaan daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan	61,2	27	perubahan cara perhitungan	61,3	61,4	61,6	61,8	62,0
		Meningkatnya Peran Pemuda dalam pembangunan sumber daya manusia unggul	Indeks Pembangunan Pemuda	56,5	56,7	**melebihi target**	56,8	57,0	57,2	57,3	57,5
		Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan daerah	Indeks Pembangunan Gender	94,16		n/a	94,26	94,37	94,58	94,69	94,77

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun	Realisasi 2025	ket	TARGET				
				2025			2026	2027	2028	2029	2030
	Meningkatkan stabilitas sosial dan politik daerah		Indeks Rasa Aman	11	-3.41	dibawah target	10,8	10,6	10,4	10,2	10,00
		Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Indeks Penyelenggaran Trantibumlinmas	65,0	76,32	melebihi target	65,5	66,0	66,5	67,0	67,5
		Meningkatnya Toleransi beragama dan partisipasi politik	Indeks Kerukunan Umat Beragama	77,37	85,02	melebihi target	77,82	78,27	78,72	78,73	78,92
		Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Indeks Kesejahteraan Sosial	53,89	50,48	dibawah target	54,29	54,69	55,09	55,49	55,89
Misi 4 : Mendorong Kemudahan Berinvestasi Demi Terbukanya Lapangan Pekerjaan	**Mewujudkan Perekonomian Masyarakat yang adaptif dan kondusif**		Indeks daya saing daerah	4,27	4,25	dibawah target	4,3	4,35	4,4	4,45	4,5
		Meningkatkan Realisasi Investasi	Nilai PMTB terhadap PDRB	29,94	28,38	dibawah target	29,97	30,00	30,03	30,06	30,09
		Meningkatkan Tingkat Kesempatan Kerja	Perbandingan orang yang bekerja thd angkatan kerja	90,12 %	90,30 %	**melebihi target**	90,85%	91,15%	91,30%	91,84%	92,01%
Misi 5 : Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi	**Mewujudkan Kota Layak Huni**		Indeks Kota Layak Huni	69,16	69,89	melebihi target	69,39	69,63	69,86	70,10	70,33

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun	Realisasi 2025	ket	TARGET				
				2025			2026	2027	2028	2029	2030
Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas											
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	77,36	80.68	melebihi target	77,65	77,75	78	78,25	78,42
		Meuwujudkan hunian layak dan terjangkau	Persentase Hunian Layak dan terjangkau	73,50	73,69	melebihi target	74,74	75,98	77,22	78,46	79,70
		Mengembangkan dan merevitalisasi sarana serta prasarana umum yang ramah lingkungan dan hijau	Indeks Infrastruktur	66,12		n/a	66,65	67,03	67,42	67,8	68,18
		Meningkatnya Kualitas Transportasi Publik	Rasio Konektivitas Wilayah	60,0	74	melebihi target	60,2	60,4	60,6	60,8	70,0
Misi 6 : Menguatkan Jaringan Ketahanan Bencana	**Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim**		Indeks Risiko Bencana (IRB)	154,68	185,53	dibawah target	154,67 - 153,4	153,39 - 152,12	152,11 - 150,84	150,83 - 149,56	149,55 - 148,28
		Penguatan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana dan perubahan iklim	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,52	0,52	sesuai target	0,53	0,55	0,57	0,59	0,61
		Meningkatnya Kualitas Penanganan	Presentase kejadian kebakaran yang	100	100	sesuai target	100	100	100*	100	100

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun	Realisasi 2025	ket	TARGET				
				2025			2026	2027	2028	2029	2030
		Kebakaran dan Penyelamatan Kedaruratan	ditangani sesuai SOP								
			Persentase penyelamatan kedaruratan yang terlayani sesuai SOP	100	100	sesuai target	100	100	100	100	100
Misi 7 : Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif dengan Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	Mewujudkan Sektor perdagangan dan jasa yang tangguh		PDRB sektor perdagangan dan jasa (Miliar Rupiah)	30.744,63	62.850,61	**melebihi target**	32.622,65	34.500,68	36.378,70	38.256,72	40.134,74
		Meningkatnya kemampuan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan	Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	0,32	0,32	sesuai target	0,34	0,36	0,38	0,39	0,40
		Meningkatnya Kontribusi Sektor perdagangan dan jasa terhadap perekonomian Daerah	Persentase Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan dan jasa	5,48	4,34	dibawah target	5,76	6,05	6,35	6,67	7,00
		Meningkatnya daya saing produk daerah	Persentase Pertumbuhan Net Ekspor	9,29	21,54	**melebihi target**	9,38	9,48	9,57	9,67	9,76
		Meningkatkan Lapangan Usaha Perdagangan	Kontribusi Lapangan usaha Perdagangan Terhadap PDRB	17,99	17,8		18,30	18,61	18,92	19,23	19,54

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun	Realisasi 2025	ket	TARGET				
				2025			2026	2027	2028	2029	2030
		Meningkatnya daya saing produk daerah dan transaksi perdagangan	Kontribusi Ekspor terhadap PDRB	7,108	11,15	**melebihi target**	7,123	7,138	7,153	7,168	7,185
		Meningkatkan perekonomian daerah dari sektor Koperasi dan UMKM (Usaha Mikro)	Nilai omset sektor koperasi dan UMKM (usaha mikro) (Rp Juta)	1.852.392,88	2.058.677,88	**melebihi target**	1.937.602,95	2.038.358,31	2.156.583,09	2.294.604,41	2.455.226,71
					1.326.568,69	pola hitungan baru	1.420.038,72	1.420.038,72			
Misi 8 : Menggerakkan Potensi Kota untuk Terwujudnya Industri Kreatif dan Pariwisata Berkelanjutan	**Terwujudnya Meningkatkan perekonomian daerah dari sektor Industri Kreatif dan Pariwisata**		PDRB sektor industri kreatif dan pariwisata (Miliar Rupiah)	1218,19	4160.11	**melebihi target**	1296,19	1374,19	1452,19	1530,19	1608,19
		Meningkatnya Kontribusi Industri Kreatif terhadap Perekonomian Daerah	Persentase Pertumbuhan Sektor PDRB Ekonomi Kreatif	7,43	9,8	**melebihi target**	7,48	7,54	7,67	8,07	8,37
		Meningkatnya Kontribusi sektor pariwisata terhadap Perekonomian Daerah	Persentase Pertumbuhan sektor pariwisata	7,12	2,4	dibawah target	7,22	8,98	9,08	9,11	9,14

Sumber : Bappeda Kota Padang 2026

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

2.3.1. Permasalahan daerah berdasarkan aspek

1. Aspek Sosial

Permasalahan sosial utama di Kota Padang meliputi tingginya angka kemiskinan dengan sekitar 37.380 penduduk miskin, maraknya anak jalanan dan gelandangan di pusat keramaian seperti Pasar Raya, kenakalan remaja (tawuran), serta kesenjangan akses pendidikan dan ekonomi dapat diurai berikut :

a) Tawuran dan Kenakalan Remaja: Masalah ketertiban sosial ini masih sering menjadi sorotan pemerintah. Tawuran antar kelompok pemuda atau pelajar kerap terjadi, yang dipicu oleh berbagai faktor lingkungan.\
b) Anak Jalanan dan Pengemis : Lokasi seperti perempatan lampu merah dan Pasar Raya menjadi titik rawan penyebaran anak jalanan dan gepeng. Hal ini sering kali merupakan dampak dari kemiskinan keluarga dan putus sekolah.
c) Kemiskinan dan Kesenjangan : Dengan puluhan ribu penduduk masih berada di bawah garis kemiskinan, program pengentasan seperti pemberdayaan kelompok usaha bersama dan bantuan disabilitas terus diupayakan oleh instansi terkait
d) Fasilitas Publik dan Parkir Liar : Pertumbuhan kendaraan yang tidak diimbangi lahan parkir memadai menimbulkan masalah sosial baru di ruang publik, seperti okupasi trotoar

2. Aspek Ekonomi dan Pengelolaan Sumber Daya Alam

Dalam mendukung tercapainya Indonesia Emas 2045, diperlukan upaya yang benar-benar focus dan tepat dalam pemecahan masalah Pembangunan. Hal ini disebabkan oleh semakin dinamisnya perubahan aktivitas ekonomi masyarakat sementara daya dukung lingkungan sangat terbatas, untuk itu diperlukan pengelolaan sumber daya alam yang penuh kehati-hatian. Terkait dengan hal ini Kota Padang menghadapi beberapa permasalahan Pembangunan. berikut ini adalah beberapa permasalahan perekonomian yang dihadapi oleh Kota Padang.

a) Permasalahan perekonomian makro

1. Perlambatan pertumbuhan ekonomi; lebih dari satu dekade yakni sejak tahun 2014, telah terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi di Kota Padang. Hal ini disebabkan oleh menurunnya pertumbuhan lapangan usaha transportasi dan pergudangan. Sebagai kota jasa dan perdagangan, sektor ini merupakan sektor pendukung yang sangat penting. Untuk itu, pemerintah daerah Kota Padang bersama masyarakat dan pelaku usaha harus mampu menemukan sumber pengungkit ekonomi baru melalui pertumbuhan sektor-sektor lain,

seperti industri manufaktur, jasa, dan peningkatan kemampuan teknologi pelaku usaha.

2. Tingginya Tingkat Pengangguran: hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak sejalan dengan penciptaan lapangan kerja yang memadai, sehingga terjadi peningkatan pengangguran. Diperlukan kebijakan dan program yang mendorong investasi dan pengembangan sektor-sektor ekonomi yang dapat menciptakan lebih banyak peluang kerja bagi penduduk Kota Padang.
3. Kesenjangan Ekonomi dan Sosial : Kota Padang memiliki angka ketimpangan yang berada di atas rata-rata Provinsi Sumatera Barat, hal ini di antaranya disebabkan oleh masih adanya ketimpangan pendapatan, akses terhadap layanan publik, dan kesempatan ekonomi yang terbatas. Untuk itu, pada Pembangunan lima tahun mendatang Pemerintah perlu menerapkan kebijakan yang mendorong peningkatan inklusivitas ekonomi, pemerataan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.
4. Terbatasnya akses terhadap sumber pembiayaan dan modal usaha : Usaha mikro dan kecil masih memiliki masalah dalam mendapatkan sumber pembiayaan akibat keterbatasan dalam pemenuhan persyaratan administrasi maupun jaminan lainnya. Akibatnya keterbatasan sumber dana usaha ini menjadi kendala dalam mengembangkan dan memperluas usaha pelaku usaha skala mikro dan kecil. Untuk itu, dalam Pembangunan mendatang diperlukan upaya untuk meningkatkan akses ke pembiayaan bagi pelaku usaha dengan melakukan pendekatan perbankan yang inklusif, koperasi yang sehat serta program dukungan keuangan untuk UMKM, dan fasilitasi akses ke pasar dan jejaring bisnis baik lokal, regional maupun internasional.
5. Peningkatan Persaingan dan Globalisasi : Persaingan yang semakin ketat dan penetrasi pasar global menjadi tantangan dan permasalahan bagi pelaku usaha di Kota Padang. Pengusaha lokal dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perubahan pasar yang bergerak semakin cepat dan dinamis. Dibutuhkan dukungan kebijakan pemerintah untuk dapat meningkatkan daya saing produk, dan memperkuat inovasi agar pelaku usaha lokal mampu bersaing di pasar global.

b) Permasalahan Lapangan Usaha Industri Pengolahan

1. Penurunan kontribusi dan laju pertumbuhan industri: lapangan usaha industri Kota Padang didominasi oleh Industri Kecil dan Mikro yang rentan terhadap fluktuasi ekonomi, untuk itu upaya penguatan melalui peningkatan diversifikasi usaha industri menjadi penting untuk menciptakan ekonomi yang beragam, tangguh, dan berkelanjutan
2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia Terampil: Keterbatasan tenaga kerja terampil dan kurangnya keterampilan dan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan industri menjadi penghambat pertumbuhan dan inovasi industri di Kota

Padang. Diperlukan upaya untuk meningkatkan pelatihan dan pendidikan vokasional yang relevan dengan kebutuhan industri.

3. Kurangnya Keterampilan Manajerial: Kurangnya keterampilan manajerial dan keahlian dalam mengelola usaha industri menjadi hambatan bagi perkembangan dan keberlanjutan usaha. Pengelolaan yang efektif meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengambilan keputusan yang baik. Diperlukan kebijakan pemerintah untuk peningkatan keterampilan manajerial dan pengetahuan bisnis untuk meningkatkan kinerja usaha industri di Kota Padang.
4. Kurangnya Inovasi dan R&D: Kurangnya investasi dalam penelitian dan pengembangan (R&D) serta kurangnya inovasi dapat menghambat pertumbuhan dan daya saing usaha dan produk hasil usaha pelaku usaha di Kota Padang. Diperlukan dukungan kebijakan untuk mendorong kemampuan perusahaan mengembangkan inovasi baru, meningkatkan efisiensi proses produksi, dan mengadopsi teknologi baru guna meningkatkan kualitas produk dan efisiensi operasional untuk dapat bertahan di tengah persaingan global.
5. Kurang optimalnya implementasi Rencana Pengembangan Industri: Pelaksanaan perencanaan pengembangan industri belum optimal hal ini berdampak pada belum dapat diwujudkannya pengelolaan usaha yang sesuai dengan standar di Kota Padang. Tanpa mempedomani perencanaan yang telah dibuat maka pengembangan tidak berjalan secara efisien dan terkoordinasi.

c) Permasalahan Lapangan Usaha Perdagangan

1. Terbatasnya Infrastruktur Perdagangan: terbatasnya fasilitas dan infrastruktur perdagangan yang memadai, seperti pusat perbelanjaan modern yang nyaman, pasar tradisional yang efisien, menjadi hambatan bagi perkembangan usaha perdagangan di Kota Padang. Infrastruktur yang terbatas dapat menghambat efisiensi operasional dan memberikan pengalaman belanja yang kurang memadai bagi konsumen. Untuk itu pada Pembangunan lima tahun ke depan, perlu diupayakan peningkatan kualitas infrastruktur perdagangan kota agar kota Padang dapat menjadi pusat perdagangan yang mensejahterakan masyarakat dan meningkatkan perekonomian daerah.
2. Perubahan Pola Konsumsi dan Tren Belanja: terjadinya perubahan pola konsumsi dan tren belanja masyarakat menjadi tantangan bagi pelaku usaha perdagangan di Kota Padang. Perkembangan teknologi dan pergeseran preferensi konsumen mengharuskan pelaku usaha untuk beradaptasi dan menyesuaikan model bisnis mereka. Usaha yang tidak mampu mengikuti tren konsumen dapat kehilangan daya saing dan pelanggan.
3. Perkembangan Teknologi dan *E-commerce*: Perkembangan

teknologi dan penetrasi *e-commerce* memiliki dampak signifikan pada pelaku usaha perdagangan di Kota Padang. Perusahaan yang tidak mengadopsi atau beradaptasi dengan perubahan teknologi dan tren *e-commerce* dapat tertinggal dalam persaingan dan kehilangan pangsa pasar. Perlu dukungan kebijakan akan pelaku usaha perdagangan kota Padang

4. Masih terbatasnya pemahaman tentang Perilaku Pasar: Kurangnya pemahaman tentang perilaku pasar, kebutuhan konsumen, dan tren bisnis menjadi penghambat dalam pengelolaan usaha perdagangan di Kota Padang. Pengetahuan yang terbatas menganai perubahan perilaku dalam pasar akan menyulitkan dalam pengambilan keputusan strategis dan pengembangan pemasaran yang efektif.
5. Terbatasnya Kemampuan/Keahlian Manajerial: Kurangnya keahlian manajerial pelaku usaha dalam pengelolaan usaha perdagangan menjadi kendala pengembangan usaha ini di Kota Padang. Manajemen yang efektif diperlukan dalam hal pengelolaan stok, pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia. Kurangnya keahlian ini dapat mempengaruhi efisiensi operasional dan pertumbuhan usaha.

d) Permasalahan Lapangan Usaha Pariwisata

1. Belum optimalnya Pengelolaan Destinasi Wisata: Pengelolaan yang tidak memadai terhadap destinasi wisata, termasuk kurangnya perencanaan pengembangan, regulasi yang tidak efektif, dan pengelolaan yang tidak terkoordinasi, dapat mempengaruhi pengalaman wisatawan. Kurangnya optimalnya pengelolaan destinasi wisata dapat berakibat juga terhadap kerusakan lingkungan, peningkatan konflik sosial, dan ketidakseimbangan antara kebutuhan pariwisata dan masyarakat lokal.
2. Keterbatasan Infrastruktur Pariwisata: masih terbatasnya kualitas dan kuantitas serta pemerataan infrastruktur pariwisata yang memadai, seperti keterbatasan fasilitas transportasi, fasilitas akomodasi atau kurangnya sarana dan prasarana pendukung pariwisata, dapat menghambat pengembangan pariwisata di Kota Padang. Kurangnya infrastruktur yang memadai dapat membatasi jumlah wisatawan yang dapat ditampung dan mengurangi kenyamanan pengalaman wisatawan.
3. Kurangnya kesadaran dan Keterlibatan Masyarakat Lokal: Kurangnya kesadaran dan keterlibatan serta partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan pariwisata menyulitkan dalam mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Masyarakat lokal memiliki berperan dan kepentingan dalam pengelolan destinasi wisata, untuk itu pemahaman tentang nilai-nilai kepariwisataan serta keterampilan dalam melayani akan dapat meningkatkan kualitas keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan dan manfaat ekonomi yang pada gilirannya akan dapat

meningkatkan kualitas pengelolaan pariwisata secara keseluruhan.

4. Terbatasnya kemampuan manajerial, Pendidikan, dan Pelatihan dalam Industri Pariwisata: Kurangnya kemampuan manajerial karena keterbatasan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dalam industri pariwisata menjadi hambatan dalam pengelolaan pariwisata di Kota Padang. Tenaga kerja yang kurang terlatih dalam bidang pariwisata dapat mengurangi kualitas pelayanan dan pengalaman wisatawan.

Selanjutnya beberapa permasalahan dalam pengelolaan sumber daya alam yang dihadapi oleh Kota Padang:

1. Terbatasnya kapasitas dalam pengelolaan Kualitas lingkungan: Pertumbuhan perkotaan yang pesat dan aktivitas manusia yang intensif dapat menyebabkan kualitas lingkungan di Kota Padang mengalami degradasi. Pembangunan kawasan permukiman yang sulit dikendalikan, polusi udara, pencemaran air, dan akumulasi sampah menjadi faktor yang merusak ekosistem alam dan mengancam keberlanjutan lingkungan.
2. Konflik pemanfaatan Sumber Daya Alam: Adanya persaingan dan konflik terkait penggunaan sumber daya alam antara berbagai pihak, seperti masyarakat lokal, perusahaan, dan pemerintah, konflik mengenai akses dan pengelolaan lahan, konflik agraria terkait tanah. Konflik semacam ini menjadi faktor yang menghambat pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
3. Terbatasnya kesadaran dan Pemberdayaan Masyarakat: Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya alam, kurangnya akses masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan dan kurangnya pemahaman mengenai pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan menjadi penyebab terjadinya penggunaan yang tidak bertanggung jawab dan penyalahgunaan sumber daya alam.
4. Perubahan Iklim dan Bencana Alam: Kota Padang merupakan Kawasan yang rentan terhadap perubahan iklim dan bencana alam, seperti banjir, tanah longsor, dan gempa bumi. Perubahan iklim dapat berdampak negatif pada sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata. Kesiapsiagaan dalam menghadapi perubahan iklim, perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam yang adaptif dan tahan bencana menjadi penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

3. Permasalahan Aspek Lingkungan dan Wilayah

Cakupan pembangunan infrastruktur dan lingkungan mencakup berbagai aspek yang berhubungan dengan pengembangan dan peningkatan sistem fisik yang mendukung kehidupan manusia serta upaya menjaga dan melindungi lingkungan alam. Beberapa bidang yang termasuk dalam cakupan tersebut adalah

1. Infrastruktur Transportasi: meliputi pembangunan jalan, jembatan, rel kereta api, pelabuhan, bandara, dan sistem

transportasi umum lainnya;

2. Infrastruktur Air: meliputi pembangunan dan pengelolaan sistem penyediaan air bersih, pengelolaan air limbah, bendungan, saluran irigasi, dan sistem drainase;
3. Infrastruktur Telekomunikasi: melibatkan pembangunan jaringan telekomunikasi seperti telepon seluler, internet, dan penyediaan akses komunikasi yang cepat dan terjangkau;
4. Infrastruktur Publik: termasuk pembangunan fasilitas publik seperti rumah sakit, sekolah, Ruang Terbuka Hijau, prasarana dan sarana umum lainnya, gedung pemerintahan; Pembangunan Perumahan: meliputi pembangunan hunian, permukiman, dan fasilitas pendukungnya seperti jalan lingkungan, saluran air, dan sistem sanitasi;
5. Perlindungan Lingkungan: melibatkan upaya pelestarian dan rehabilitasi lingkungan alam, pengelolaan limbah, perlindungan sumber daya alam, pengendalian polusi udara dan air, serta pengelolaan taman nasional dan kawasan konservasi.

Permasalahan yang termasuk aspek fisik lingkungan yang berhasil diidentifikasi secara umum adalah sebagai berikut:

a) Permasalahan transportasi berkelanjutan;

Permasalahan transportasi di Kota Padang mengakibatkan berbagai masalah yang mempengaruhi mobilitas, efisiensi, kualitas udara, dan kehidupan sehari-hari penduduk perkotaan. Berikut adalah beberapa permasalahan umum dalam transportasi perkotaan:

1. Kemacetan lalu lintas: Kemacetan lalu lintas merupakan permasalahan yang umum di kota-kota besar. Jumlah kendaraan yang tinggi, kurangnya infrastruktur jalan yang memadai, dan kepadatan populasi menyebabkan kemacetan yang semakin parah. Kemacetan berdampak pada waktu tempuh yang lebih lama, meningkatkan konsumsi bahan bakar, polusi udara, dan stres bagi pengendara yang berdampak terhadap penurunan kualitas hidup.
2. Keterbatasan aksesibilitas: Tidak semua penduduk perkotaan memiliki akses yang sama terhadap transportasi yang terjangkau dan efisien. Kawasan-kawasan tertentu, terutama yang di wilayah pinggiran, tak jarang akan mengalami keterbatasan dalam akses ke layanan transportasi publik yang memadai. Hal ini dapat menyebabkan ketimpangan sosial dan ekonomi. Meskipun demikian, Kota Padang sudah mengarahkan penyediaan transportasi angkutan umum massal yang terintegrasi.

   Berdasarkan pola pelayanan angkutan umum, maka dapat dilihat bahwa rute angkutan umum di Kota Padang bersifat radial konsentris, yang artinya semua pelayanan masih terpusat pada satu titik saja sehingga dapat menimbulkan kemacetan di daerah perkotaan. Selain itu, sistem pengelolaan angkutan umum yang ada menjadi tantangan tersendiri dalam memberikan pelayanan angkutan umum

sehingga menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat, kinerja pelayanan yang rendah, keselamatan, kenyamanan, keamanan, dan kecelakaan lalu lintas.

Untuk itu, sangatlah penting untuk membangun infrastruktur yang mendukung integrasi angkutan umum, seperti stasiun transfer, terminal intermoda, dan fasilitas yang memungkinkan transfer yang lancar antara mode transportasi. Jaringan jalan dan jalur yang terhubung dengan baik, termasuk jalur sepeda dan trotoar yang aman, juga penting dalam mendukung integrasi angkutan umum.

Pengguna angkutan umum perlu memiliki akses mudah ke informasi mengenai jadwal, rute, tarif, dan mode transportasi yang tersedia. Pengembangan aplikasi atau platform teknologi yang memungkinkan pengguna untuk melacak dan merencanakan perjalanan mereka dengan mudah sehingga dapat meningkatkan keterjangkauan dan kenyamanan pengguna. Sistem pembayaran elektronik yang terintegrasi juga dapat memfasilitasi penggunaan berbagai mode transportasi dengan satu kartu atau aplikasIntegrasi angkutan umum membutuhkan kerja sama yang baik antara operator transportasi yang berbeda. Ini melibatkan koordinasi jadwal, integrasi tarif, dan pertukaran informasi operasional antara operator bus, kereta, dan transportasi lainnya. Kerja sama juga dapat melibatkan pengembangan layanan transfer yang efisien dan penggunaan bersama infrastruktur yang ada.

Pemerintah dapat memainkan peran penting dalam menciptakan kebijakan dan regulasi yang mendukung integrasi angkutan umum. Ini meliputi penyusunan kebijakan tarif yang terkoordinasi, pengaturan lisensi dan perizinan yang memungkinkan kerja sama antara operator, dan insentif untuk mendorong kolaborasi dalam penyediaan layanan terintegrasi.

Integrasi angkutan umum memiliki potensi untuk meningkatkan mobilitas, mengurangi kemacetan, mengurangi emisi gas rumah kaca, dan meningkatkan kualitas hidup di perkotaan. Namun, upaya integrasi ini membutuhkan kerja sama aktif antara pemerintah, operator transportasi, dan pemangku kepentingan terkait untuk mencapai sistem transportasi yang terpadu, efisien, dan ramah pengguna.

3. Ketergantungan pada kendaraan pribadi: Banyak penduduk perkotaan mengandalkan kendaraan pribadi untuk mobilitas mereka. Ketergantungan ini mengakibatkan peningkatan volume kendaraan di jalan-jalan perkotaan, hal ini menyebabkan kemacetan dan polusi udara. Selain itu, keberadaan kendaraan pribadi yang berlebihan juga menyebabkan kekurangan ruang parkir dan penggunaan lahan yang tidak efisien. Hal ini juga berkaitan dengan penyediaan angkutan umum massal yang handal sehingga masyarakat mau beralih dalam menggunakan angkutan umum.
4. Infrastruktur transportasi yang tidak memadai: Infrastruktur transportasi yang kurang memadai, termasuk jaringan jalan yang terbatas, sistem transportasi publik yang tidak efisien,

dan kurangnya aksesibilitas bagi pejalan kaki dan pesepeda, menyebabkan permasalahan mobilitas di perkotaan. Penduduk seringkali mengalami kesulitan dalam mencapai tujuan dengan mudah dan efisien.

5. Polusi udara dan dampak kesehatan: Lalu lintas perkotaan merupakan sumber utama polusi udara, dengan emisi gas buang kendaraan yang mengandung zat berbahaya. Paparan terhadap polusi udara perkotaan dapat menyebabkan masalah kesehatan serius, termasuk gangguan pernapasan, alergi, penyakit kardiovaskular, dan risiko kanker.
6. Ketidakberlanjutan energi dan emisi gas rumah kaca: Transportasi perkotaan juga berkontribusi terhadap perubahan iklim melalui emisi gas rumah kaca. Penggunaan bahan bakar fosil dalam kendaraan berkontribusi pada peningkatan emisi CO2, yang mempercepat pemanasan global. Kurangnya transportasi berkelanjutan dan efisiensi energi dalam sistem transportasi perkotaan menjadi permasalahan yang perlu diatasi.

b) Permasalahan Pengembangan Infrastruktur berkelanjutan

Infrastruktur merujuk kepada rangkaian fasilitas fisik yang dibangun dan diperlukan untuk mendukung berbagai kegiatan dan fungsi masyarakat. Infrastruktur berperan sebagai tulang punggung ekonomi dan kehidupan masyarakat. Investasi yang tepat dalam infrastruktur yang memadai dan terpelihara dengan baik dapat menghasilkan efisiensi ekonomi, pertumbuhan, dan peningkatan kualitas hidup. Infrastruktur yang baik juga berperan penting dalam menghadapi tantangan modern, seperti urbanisasi yang pesat, perubahan iklim, dan kebutuhan akan teknologi yang canggih.

Infrastruktur meliputi aspek Sumber Daya Air (Bangunan Pantai, Sungai, irigasi), Jalan Jembatan, Perumahan dan Permukiman, Darinase dan Prasarana Umum, Sanitasi dan Pengelolaan Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah, Air Minum, Sumber Daya Energi Terbarukan dan Kelistrikan.

Adapun Permasalahan masing-masing aspek infrastruktur adalah:

1) Sumber Daya Air (Bangunan Pantai, Irigasi, Sungai); Permasalahan sumber daya air perkotaan adalah isu yang signifikan di banyak kota di seluruh dunia, termasuk kota Padang sebagai ibukota provinsi Sumatera Barat. Permasalahan terkait dengan sumber daya air perkotaan antara lain:
    a. Kekurangan pasokan air: Kepadatan dan peningkatan jumlah populasi yang tinggi di perkotaan seringkali melebihi kapasitas infrastruktur air yang ada. Hal ini mengakibatkan kekurangan pasokan air bersih bagi penduduk perkotaan. Ketika pasokan air tidak mencukupi, masyarakat bisa mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti air minum, sanitasi, dan kebersihan.
    b. Pencemaran air: Pertumbuhan perkotaan yang cepat juga berkontribusi terhadap pencemaran air. Hal ini juga terjadi di

kota Padang, dimana penyebab pendemaran akir di antaranya adalah adanya limbah industri, limbah rumah sakit, dan pembuangan sampah yang tidak tepat dapat. Pencemaran ini berdampak negatif pada kualitas air dan dapat menyebabkan masalah kesehatan bagi masyarakat yang mengandalkan sumber air tersebut.

c. Infrastruktur air yang tidak memadai: Sistem infrastruktur air yang belum memadai untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang terus berkembang. Saluran air yang tua dan rusak, jaringan distribusi yang buruk, dan sistem penyediaan air yang tidak efisien menyebabkan kerugian air yang signifikan dan ketidakmerataan akses air bersih di berbagai daerah perkotaan.

d. Pengelolaan air yang tidak efisien: Kurang efisiennya pengelolaan sumber daya air seperti belum adanya pengaturan yang jelas terkait pemanfaatan air, kehilangan air yang tinggi akibat kebocoran, serta belum optimalnya upaya konservasi sumber daya air.

e. Perubahan iklim: Perubahan iklim juga berdampak pada sumber daya air. Pola curah hujan yang tidak teratur, periode kekeringan yang lebih panjang, banjir yang lebih sering terjadi, dapat mengganggu pasokan air dan memperburuk masalah yang sudah ada.

2) Perumahan dan Permukiman; Permasalahan perumahan dan permukiman perkotaan adalah hal yang kompleks dan melibatkan berbagai aspek. Adapun permasalahan yang terkait dengan perumahan dan permukiman di kota Padang adalah:

3) Kekurangan perumahan terjangkau: Harga perumahan yang tinggi akibat tingginya permintaan menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak. Hal ini dapat mengakibatkan konsekuensi sosial dan ekonomi, seperti meningkatnya jumlah tunawisma atau penduduk yang tinggal dalam kondisi perumahan yang buruk.

4) Permasalahan air minum: masalah air minum di Kota Padang meliputi beberapa isu , sebagai berikut:

a) Akses Terbatas: Salah satu permasalahan utama adalah akses terbatas terhadap pasokan air minum yang bersih dan aman. Beberapa daerah di Kota Padang masih mengalami kesulitan dalam mendapatkan pasokan air yang memadai dan berkualitas. Hal ini di antaranya disebabkan adanya ketidakmerataan infrastruktur, terutama di daerah perkotaan yang padat penduduk.

b) Kualitas Air: Kualitas air minum juga menjadi perhatian di Kota Padang. Standar kualitas air minum yang tidak terpenuhi dapat berpotensi menyebabkan masalah kesehatan bagi penduduk yang mengonsumsinya.

c) Sanitasi yang Buruk: Praktik sanitasi yang buruk, termasuk sanitasi yang tidak memadai di rumah tangga dan sistem pembuangan limbah yang tidak efisien, dapat berkontribusi terhadap pencemaran sumber air. Hal ini dapat

mengakibatkan penurunan kualitas air minum dan risiko terhadap kesehatan masyarakat.

d) Kerentanan terhadap Bencana: Kota Padang juga memiliki kerentanan terhadap bencana alam seperti banjir dan gempa bumi. Bencana-bencana ini dapat merusak infrastruktur penyediaan air minum dan mengganggu distribusi air minum kepada masyarakat. Pasokan air minum yang terputus dapat berdampak negatif pada kesehatan dan kesejahteraan penduduk.

e) Keberlanjutan Sumber Daya Air: Pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan haarus menjadi perhatian di Kota Padang. Pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan perubahan iklim dapat memberikan tekanan tambahan pada pasokan air. Keberlanjutan sumber daya air memerlukan manajemen yang baik, perlindungan terhadap daerah tangkapan air, dan penggunaan yang efisien serta adil.

5) Masalah Pengelolaan Lingkungan dan Kebencanaan; Permasalahan lingkungan di Kota Padang mencakup berbagai aspek yang mempengaruhi kualitas hidup manusia dan ekosistem di sekitarnya. Berikut adalah beberapa permasalahan lingkungan umum yang terjadi di Kota Padang:

a) Pencemaran udara: Pencemaran udara menjadi salah satu permasalahan utama di perkotaan. Emisi kendaraan bermotor, industri, dan pembakaran bahan bakar fosil menghasilkan polutan seperti partikel berbahaya, nitrogen dioksida, dan sulfur dioksida. Pencemaran udara dapat menyebabkan masalah kesehatan serius, termasuk gangguan pernapasan, iritasi mata, dan peningkatan risiko penyakit pernapasan kronis.

b) Pencemaran air: Pencemaran air di perkotaan umumnya disebabkan oleh pembuangan limbah industri dan domestik yang tidak terkelola dengan baik. Limbah kimia dan zat berbahaya lainnya mencemari sumber air permukaan dan tanah, mengancam kehidupan akuatik dan kesehatan manusia yang mengandalkan air tersebut. Selain itu, aliran permukaan yang buruk dan saluran pembuangan yang tidak memadai dapat menyebabkan banjir dan genangan air yang membawa polutan.

c) Pengelolaan limbah: Pertumbuhan aktivitas masyarakat perkotaan menghasilkan volume limbah yang besar. Jika pengelolaan limbah tidak efisien, limbah dapat menumpuk di tempat pembuangan akhir yang tidak memadai atau bahkan dibuang secara ilegal, menyebabkan masalah pencemaran lingkungan dan kesehatan masyarakat.

d) Kehilangan habitat dan keragaman hayati: Perkembangan perkotaan seringkali mengakibatkan konversi lahan yang luas menjadi kawasan perkotaan, yang mengakibatkan hilangnya habitat alami dan berkurangnya keragaman hayati. Kehilangan habitat mengancam kelangsungan hidup spesies-spesies tanaman dan hewan, serta menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem perkotaan.

e) Efisiensi energi dan emisi gas rumah kaca: Perkotaan adalah sumber utama emisi gas rumah kaca, yang berkontribusi terhadap perubahan iklim global. Kegiatan transportasi, konsumsi energi pada bangunan, dan industri perkotaan merupakan sumber emisi utama. Kurangnya efisiensi energi dan ketergantungan pada bahan bakar fosil mengakibatkan peningkatan emisi gas rumah kaca dan pemanasan global.

f) Ketidakseimbangan ekosistem perkotaan: Pertumbuhan perkotaan seringkali menyebabkan ketidak-seimbangan ekosistem, dengan semakin berkurangnya ruang terbuka hijau, keterbatasan akses ke taman dan area rekreasi, serta degradasi lingkungan alami. Kurangnya ruang terbuka dan lingkungan yang buruk dapat berdampak negatif pada kesehatan dan kesejahteraan penduduk perkotaan.

Dalam upaya mewujudkan kota Padang sebagai kota Pintar (*Smart City*) maka upapya mengatasi permasalahan di atas diperlukan pendekatan sosial ekonomi dan lingkungan, dengan menerapkan pendekatan ini diharapkan akan dapat ditemukan solusi yang holistik, berkelanjutan, dan mempertimbangkan kepentingan semua pemangku kepentingan. Hal ini dapat mengarah pada pembangunan yang lebih seimbang dan berkelanjutan, di mana keberlanjutan ekonomi tidak dikorbankan untuk kepentingan lingkungan dan sosial, demikian juga sebaliknya.

4. Permasalahan Aspek Kelembagaan dan Tata Kelola Pemerintahan

Dalam aspek kelembagaan dan tata kelola Pemerintah Kota Padang senantiasa mengikuti kebijakan Pemerintah Pusat. Setiap kali ada perubahan regulasi, maka Pemerintah Kota Padang senantiasa mengimplementasikannya di daerah dalam upaya menghasilkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Salah satunya adalah melaksanakan agenda reformasi birokrasi yang telah ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan. Reformasi birokrasi menjadi program yang sangat penting dan wajib dilaksanakan oleh seluruh pemerintah daerah. Reformasi birokrasi merupakan suatu kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang baik akan mempercepat perputaran roda pembangunan nasional dan daerah. Reformasi birokrasi ditandai dengan adanya grand design sejak tahun 2010 dalam upaya menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia (*world class bureaucracy*) yang bercirikan di antaranya pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola organisasi yang semakin efisien dan efektif.

Pemerintahan di Kota Padang telah mengarah pada praktik paradigma *New Public Management* yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan efektivitas, efisiensi, pemerintahan berorientasi pada hasil serta *New Public Service (Governance)* yang ditunjukkan dengan adanya keterlibatan aktor lain di luar pemerintah dalam kedudukan yang sama seperti dunia usaha, masyarakat sipil dan media masa. Selain itu kinerja pelayanan publik cenderung meningkat dan responsif terhadap perubahan

melalui inovasi daerah berbasis kebutuhan masyarakat dan teknologi informasi.

Namun demikian masih terdapat beberapa persoalan daerah terkait dengan kelembagaan dan reformasi birokrasi yang harus mendapat perhatian dalam Pembangunan lima tahun mendatang, yakni:

1. Pengelolaan Data dan Bantuan Sosial: Terdapat kelemahan dalam prosedur pengusulan, verifikasi, dan validasi Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Minimnya koordinasi antarinstansi dan ketidaktepatan sasaran membuat sistem penyaluran bantuan rawan penyimpangan.
2. Pelayanan Publik dan Maladministrasi: Ombudsman menyoroti perlunya pengawasan lebih ketat terhadap potensi maladministrasi dan inefisiensi pada sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menjamin hak-hak Masyarakat
3. Tindak Lanjut Good Governance: Implementasi tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) masih belum merata di tingkat bawah seperti kelurahan. Masih terdapat tantangan dalam mematuhi prinsip transparansi dan ketaatan hukum sepenuhnya dalam setiap level layanan.

2.3.2. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

Misi 1 Menguatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif.

Tujuan Pada misi ini Adalah Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas profesional, responsif, kolaboratif, dan partisipatif.

Permasalahan : Pembangunan tata kelola pemerintahan yang integritas, profesional, responsif, kolaboratif, dan partisipatif masih menghadapi lima hambatan utama, yaitu praktik korupsi dan pungli, kompetensi aparatur yang rendah, birokrasi yang lambat, tingginya ego sektoral, serta keterbatasan pelibatan publik dalam pengambilan keputusan.

Misi 2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat

Tujuan Pada misi ini Adalah Mewujudkan Implementasi Kota Pintar dan Kota Sehat

Permasalahan : Implementasi Kota Pintar (Smart City) dan Kota Sehat sering terhambat oleh kesenjangan infrastruktur teknologi, keterbatasan anggaran daerah, dan rendahnya literasi digital masyarakat. Selain itu, tantangan utamanya adalah masalah tata kelola yang belum terintegrasi (ego sektoral antar instansi), risiko keamanan data pribadi, serta masalah lingkungan akibat urbanisasi pesat.

Misi 3 Menguatkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya dengan Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan

Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul

Permasalahan : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul sering kali terhambat oleh disparitas

pendidikan, minimnya akses pelatihan kerja, serta rendahnya standar kesehatan gizi masyarakat. Hambatan struktural ini memicu rendahnya produktivitas dan kesenjangan keterampilan dalam menghadapi pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK)

Tujuan 2 : Meningkatkan stabilitas sosial dan politik daerah

Permasalahan : Meningkatkan stabilitas sosial dan politik daerah sering terhambat oleh kesenjangan ekonomi, polarisasi identitas, lemahnya koordinasi antar-lembaga, serta maraknya penyebaran misinformasi. Tantangan ini semakin diperburuk oleh praktik politik transaksional dan lambatnya respon pemerintah daerah dalam mengatasi konflik sosial.

Misi 4 Mendorong Kemudahan Berinvestasi Demi Terbukanya Lapangan Pekerjaan

Tujuan : Mewujudkan Perekonomian Masyarakat yang adaptif dan kondusif

Permasalahan : Permasalahan utama dalam menciptakan perekonomian masyarakat yang adaptif dan kondusif berakar pada kesenjangan keterampilan (gap skill), keterbatasan modal, serta infrastruktur digital. Selain itu, inflasi biaya hidup dan tantangan iklim/bencana kerap menekan daya beli, sehingga menghambat masyarakat untuk mampu bertahan dan berkembang di tengah dinamika pasar

Misi 5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas

Tujuan Mewujudkan Kota Layak Huni

Permasalahan : Mewujudkan kota layak huni (liveable city) sering kali terbentur oleh tantangan multidimensi seperti urbanisasi yang tidak terkendali, kesenjangan ekonomi, serta pengelolaan tata ruang yang kurang inklusif. Masalah utama meliputi tingginya angka kawasan kumuh, kemacetan lalu lintas, minimnya ruang terbuka hijau (RTH), dan terbatasnya akses fasilitas dasar seperti air bersih serta sanitasi

Misi 6 Menguatkan Jaringan Ketahanan Bencana

Tujuan : Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim

Sasaran Strategis 1 : Penguatan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana dan perubahan iklim

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Kualitas Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan Kedaruratan

Permasalahan : Permasalahan utama dalam resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim mencakup keterbatasan infrastruktur yang tidak memadai, kesenjangan sosial-ekonomi yang memperburuk kerentanan kelompok rentan, tata kelola dan koordinasi antarlembaga yang masih tumpang tindih, serta kurangnya integrasi sains dan teknologi ke dalam kebijakan mitigasi

Misi 7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif dengan Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa

Tujuan : Mewujudkan Sektor perdagangan dan jasa yang Tangguh

Permasalahan : Permasalahan utama dalam mewujudkan sektor perdagangan dan jasa yang tangguh mencakup tingginya biaya logistik, kesenjangan literasi dan adopsi teknologi digital, rendahnya daya saing, serta kerentanan terhadap gejolak ekonomi global. Faktor-faktor ini diperparah oleh regulasi yang belum adaptif dan masalah kualitas lapangan kerja.

Misi 8 Menggerakkan Potensi Kota untuk Terwujudnya Industri Kreatif dan Pariwisata Berkelanjutan

Tujuan Terwujudnya Meningkatkan perekonomian daerah dari sektor Industri Kreatif dan Pariwisata

Permasalahan : Pengembangan sektor industri kreatif dan pariwisata di daerah sering kali terhambat oleh masalah akses permodalan, keterbatasan infrastruktur dasar, dan rendahnya literasi pemasaran digital. Hambatan lainnya mencakup kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), minimnya inovasi produk, serta lemahnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan kolaborasi lintas sektor.

2.3.3. Permasalahan Daerah berdasarkan penyelenggaraan Perurusan pemerintah daerah

A. Permasalahan Pembangunan Daerah Berdasarkan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

   Pendidikan merupakan kebutuhan dasar untuk menyiapkan sumber daya manusia dari aspek kecerdasan, akhlak, serta keterampilan. Kemajuan Pendidikan bisa dilihat dari berapa banyak anak usia sekolah yang mengikuti pendidikan. Pelaksanaan urusan pendidikan masih menghadapi beberapa permasalahan di antaranya adalah (1) belum merata memadainya sarana prasarana sekolah, (2) Berdasarkan data Pusdatin Kemendikdasmen, tercatat masih ada 6.615 anak usia sekolah di Kota Padang yang tidak berada di bangku pendidikan akibat masalah ekonomi keluarga, tantangan sosial, dan kendala administratif, (3) Sistem PPDB sering dikeluhkan masyarakat karena masih terjadi polemik sistem domisili, daya tampung, dan stigma "sekolah favorit" (4) Kompleksnya tantangan sosial mengharuskan sekolah menjadi ruang aman (*safe space*) yang mampu mendeteksi potensi kekerasan dan trauma pada siswa.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

   Urusan kesehatan merupakan salah satu urusan wajib pelayanan dasar yang penting dan mendapat prioritas dalam pembangunan. Pelaksanaan urusan kesehatan masih menghadapi beberapa permasalahan di antaranya :

a. Masih adanya permasalahan status gizi masyarakat, khususnya pada balita yang ditunjukkan oleh kasus gizi buruk yang masih terjadi setiap tahun.
b. Terjadinya fluktuasi kasus balita gizi buruk, yang menunjukkan belum optimalnya pencegahan dan penanganan masalah gizi secara berkelanjutan.
c. Masih terdapat ketimpangan kasus gizi buruk antar kecamatan, dengan beberapa wilayah memiliki jumlah kasus lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya.
d. Faktor determinan gizi buruk masih cukup dominan, seperti rendahnya pengetahuan pola asuh dan gizi keluarga, kondisi sosial ekonomi, serta sanitasi lingkungan yang belum optimal.
e. Deteksi dini dan intervensi gizi belum sepenuhnya optimal meskipun sudah menggunakan sistem e-PPGBM.
f. Masih perlunya penguatan layanan kesehatan dasar dan jangkauan intervensi gizi spesifik terutama pada kelompok rentan (ibu hamil, bayi, dan balita).
g. Peningkatan Angka Harapan Hidup belum sepenuhnya diikuti dengan pemerataan kualitas kesehatan masyarakat di seluruh wilayah.

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

   Permasalahan pada bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang antara lain:

   a. Konektivitas infrastruktur antar wilayah pelayanan yang belum optimal dimana kapasitas jalan yang tidak mampu mengikuti pertumbuhan kendaraan bermotor
   b. Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air yang belum optimal
   c. Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman yang belum optimal, dimana belum semua masyarakat terlayani akses terhadap air Minum, dan sarpras air limbah,
   d. Belum semua lingkungan permukiman didukung oleh prasarana, sarana lingkungan dan utilitas umum yang memadai
   e. Konsistensi perencanaan dengan pemanfaatan ruang masih menjadi hal yang perlu terus dibenahi.
   f. Genangan dan Banjir. Dampak perubahan iklim semakin nyata dirasakan oleh masyarakat Kota Padang, yaitu semakin tingginya intensitas dan jenis bencana perubahan iklim yang terjadi seperti banjir. Banjir dan genangan yang terjadi di Kota Padang disamping dampak dari perubahan iklim, juga disebabkan oleh kondisi dan fungsi drainase yang belum optimal.

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

   Permasalahan pada bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman antara lain:

a. Masih belum meratanya penyediaan Sarana dan Utilitas Perumahan
b. Masih banyak ditemui Kawasan Perumahan dan permukiman yang sulit untuk diakses karena tidak adanya akses jalan dan Jembatan serta drainase yang memadai untuk penunjang Lingkungan yang layak
c. Masih banyaknya jumlah rumah tangga yang menempati rumah yang tidak layak huni
d. Belum optimalnya pelayanan air bersih dan air minum aman. Masih kurangnya akses pelayanan air minum layak, terutama pada kawasan kumuh, Adanya beberapa bangunan Pamsimas yang tidak berfungsi dan berfungsi sebagian, pada daerah yang tidak terjangkau PDAM
e. Belum optimalnya pelayanan sanitasi aman, dimana masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki WC ataupun septictank yang layak dan aman.
f. Masih ditemui Kawasan Kumuh di Kota padang
g. Belum seimbangnya ketersediaan rumah dengan pertumbuhan jumlah keluarga
h. Pemenuhan SPM Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

   Permasalahan pada bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat antara lain:

   a. Masih rendahnya cakupan layanan kebakaran.
   b. Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran
   c. Belum adanya sistem informasi kebakaran berbasis Geographic Information System (GIS)
   d. Tingginya ancaman bahaya bencana alam seperti angin kencang, banjir, abrasi pantai, tanah longsor, gempa bumi, pergerakan tanah dan tsunami
   e. Indeks Ketahanan Daerah berada pada kategori belum optimal dalam mereduksi risiko bencana secara massive.
   f. Masih banyak masyarakat yang belum sadar dan peduli bencana
   g. Sarana dan prasarana penanganan bencana masih belum memadai apalagi jika terjadi beberapa tempat secara bersamaan.
   h. Masih minimnya pengetahuan masyarakat terhadap bencana
   i. Minimnya pendidikan kebencanaan di Kota Padang

6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

   Permasalahan pada bidang Sosial antara lain:

   a. Jumlah sasaran SPM Bidang Sosial yang masih relatif tinggi, sehingga membutuhkan alokasi anggaran yang memadai.
   b. Masih banyak masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan.

c. Belum maksimalnya pemberian bantuan kebutuhan dasar bagi masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

d. Belum semua bantuan yang diberikan memberikan daya ungkit optimal dalam mengangkat persoalan sosial (terutama ekonomi) bagi penerima bantuan

2.3.4. Permasalahan Pembangunan Daerah Berdasarkan Urusan Pemerintah Wajib yang Bukan Pelayanan Dasar

A. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Permasalahan utama bidang tenaga kerja di Kota Padang meliputi tingginya pengangguran terpelajar, kesenjangan antara keterampilan pencari kerja dan kebutuhan industri (*mismatch*), dominasi sektor informal, serta maraknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang menekan perusahaan local.

B. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan isu strategi nasional sesuai dengan inpres no 9 tahun 2000 tentang pembangunan gender dan Permendagri 67 tahun 2011 tentang pengarusutamaan gender.

Permasalahan pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak antara lain:

1. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dan belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan dan anak terutama untuk memberikan layanan perlindungan dan bantuan hukum yang inklusif.
2. Kasus kekerasan terhadap anak di Kota Padang didominasi kasus kekerasan seksual, walaupun kasus lainnya juga ada seperti kekerasan fisik, psikis, penelantaran dan ekploitasi terhadap anak. Kasus kekerasan terhadap anak ada yang dilakukan oleh keluarga terdekat sendiri dan ada juga yang dilakukan oleh orang lain. Penyebab terjadinya kasus kekerasan terutama kekerasan seksual pada anak yang dilakukan oleh orang-orang terdekat disebabkan oleh faktor ekonomi dan pendidikan yang rendah. Anak-anak yang berada pada keluarga yang kurang mampu, mereka melakukan interaksi dan melaksanakan aktivitas dalam keluarga pada ruang yang sama atau ruang yang terbatas dalam rumah tangga, sehingga hal ini memunculkan potensi atau peluang perlakuan yang tidak baik terjadi kepada anak dari anggota keluarga yang lain, apalagi sudah ada niat untuk melakukan perbuatan tidak senonoh dan kekerasan seksual tersebut. Kasus kekerasan ini juga karena dipengaruhi oleh kurangnya pendidikan dan pengetahuan dari keluarga tersebut, baik pengetahuan tentang etika, perilaku, adat budaya, apalagi pengetahuan agama.
3. Selain itu, kasus kekerasan terhadap perempuan juga masih ada terjadi di Kota Padang, namun angkanya tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan kasus kekerasan terhadap anak. Terjadinya kasus kekerasan terhadap perempuan seperti kekerasan dalam rumah tangga juga banyak dipengaruhi oleh

factor ekonomi dan pendidikan/pengetahuan. Sulitnya kehidupan ekonomi keluarga dapat memunculkan pertengkaran dalam rumah tangga, apalagi tidak didukung oleh pengetahuan yang memadai baik bagaimana menjalani kehidupan rumah tangga, serta tidak kuatnya ilmu agama dan iman yang dimiliki. Karena hal tersebutlah sering terjadi pertengkaran dan bahkan tindakan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga.

4. Tidak sebandingnya jumlah petugas dengan kasus yang ditangani. yang minim yang menjadi penyebab terhambatnya penanganan isu - isu yang ada
5. Perangkat daerah masih belum memahami Pengarusutamaan Gender, dilihat dari masih rendahnya Indek Pemberdayaan Gender (IDG)

C. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Permasalahan pada urusan Pemerintahan Bidang Pangan antara lain:

1. Lahan non irigasi sebagai lahan sumber pangan berkurang
2. Belum optimalnya jaminan terhadap pasokan dan harga komoditas pangan yang terintegrasi dan informatif
3. Belum optimalnya pemanfaatan lahan kosong sebagai sumber pangan
4. Masih kurangnya pengawasan dan pembinaan keamanan pangan
5. Belum beragamnya pola konsumsi pangan bergizi seimbang dan aman

D. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Permasalahan pada urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan antara lain:

1. Masalah sosial budaya masyarakat yang sulit melepaskan status tanah ulayatnya untuk pembangunan kepentingan umum walaupun sudah dilakukan ganti kerugian.
2. Adanya tanah fasum dan fasos yang belum bersertifikat sehingga memberikan peluang kepada masyarakat untuk mendirikan bangunan liar di lokasi tanah tersebut, sehingga lahan fasum dan fasos tidak berfungsi untuk sarana umum sebagaimana mestinya.
3. Masih banyak tanah pemerintah yang belum jelas status kepemilikannya.
4. Masih banyaknya konflik-konflik pertanahan yang harus ditindaklajuti.
5. Belum adanya penetapan regulasi tanah ulayat di Kota Padang
6. Masih banyak sengketa tanah masyarakat dan ulayat yang belum difasilitasi.

F. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Permasalahan pada urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup antara lain:

1. Jumlah daya tampung TPS yang tidak memadai.

   Jumlah daya tampung TPS tidak meningkat selama 5 tahun

terakhir, namun jumlah penduduk meningkat terus. Hal ini mengakibatkan rasio Tempat Penampungan Sementara (TPS) per satuan penduduk terus menurun.

2. Pengurangan sampah belum optimal (3R)

   Penanganan sampah yang Tingkat kesadaran masyarakat untuk melakukan pemilahan sampah di tingkat rumah tangga masih rendah

3. Sistem pengolahan sampah masih control landfill di TPA Tanah penutup tidak memadai karena tidak tersedianya anggaran yang memadai untuk kegiatan sanitary Landfill adalah sistem pengelolaan (pemusnahan) sampah dengan cara membuang dan menumpuk sampah di lokasi cekung, memadatkannya , dan kemudian menimbunnya dengan tanah.
4. Belum optimalnya kualitas penangan sampah dan air limbah domestik karena jumlah timbulan sampah yang tidak sebanding dengan cakupan pelayanan.
5. Masih rendahnya pemanfaatan teknologi ramah lingkungan dan berkelanjutan dalam pengolahan sampah.
6. Pengelolaan RTH belum optimal Fungsi RTH belum terselenggara dengan baik untuk fungsi ekologi, sosial, ekonomi dan arsitektural kota
7. Jumlah daya tampung lahan TPU yang tidak memadai Lahan pemakaman yang ada saat ini sudah penuh sehingga pelayanan sebagian memanfaatkan akses jalan masuk dan halaman kantor TPU, selain itu pemakaman yang dilaksanakan saat ini dengan memanfaatkan makam yang ada (tumpang sari).
8. Menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan akibat kegiatan Pembangunan
9. Belum optimalnya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

G. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Berdasarkan capaian kinerja urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil tahun 2021–2025, secara umum menunjukkan tren perbaikan pada sebagian besar indikator. Namun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian dalam peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan di Kota Padang, yaitu sebagai berikut :

1) Belum optimalnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan secara menyeluruh, meskipun rasio kepemilikan KTP elektronik telah mendekati 100%, masih terdapat sebagian kecil penduduk yang belum terlayani secara penuh.
2) Cakupan akta kelahiran belum sepenuhnya stabil dan merata, ditunjukkan dengan adanya fluktuasi capaian pada beberapa tahun pengamatan, yang mengindikasikan masih adanya kendala dalam konsistensi pelayanan dan pelaporan.

3) Masih adanya kesenjangan capaian akta kelahiran pada periode awal pengamatan, yang menunjukkan rendahnya kesadaran masyarakat serta keterbatasan akses layanan pada waktu tersebut, meskipun terjadi perbaikan signifikan pada tahun-tahun terakhir.
4) Rasio kepemilikan akta nikah masih belum optimal, meskipun menunjukkan tren peningkatan, hal ini mengindikasikan masih perlunya penguatan pencatatan peristiwa perkawinan secara resmi di masyarakat.
5) Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya administrasi kependudukan masih perlu ditingkatkan, terutama terkait pencatatan peristiwa vital seperti kelahiran, perkawinan, dan perubahan data kependudukan.
6) Masih terdapat tantangan dalam pemutakhiran data kependudukan secara berkelanjutan, meskipun sistem berbasis NIK telah diterapkan secara nasional, validitas dan konsistensi data masih perlu diperkuat.
7) Kesenjangan akses layanan administrasi kependudukan antar wilayah dan kelompok masyarakat, terutama pada kelompok rentan dan wilayah yang jauh dari pusat layanan.
8) Perlu penguatan layanan administrasi kependudukan yang lebih proaktif, cepat, dan berbasis digital, untuk meningkatkan kemudahan akses dan mempercepat kepemilikan dokumen kependudukan.

H. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan

Permasalahan pada urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan antara lain :

1) Belum optimalnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam Pembangunan
2) Kurang optimalnya peran lembaga ekonomi, pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan kerja sama kelurahan.

I. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dalam urusan pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana terdapat Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dan juga Program Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB). Tapi pemahaman Masyarakat terhadap program-program tersebut masih kurang. Oleh sebab itu peran Kampung KB masih perlu ditingkatkan melalui partisipasi masyarakat dan integrasi lintas sektor.

Selain itu pencapaian Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) peserta KB baru dan peserta KB aktif dan pencapaian peserta KB baru Pria dan pencapaian peserta KB aktifnya juga masih rendah.

J. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Permasalahan pada urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan antara lain:

1. Belum optimalnya pelayanan manajemen lalu lintas dan angkutan umum serta keselamatan transportasi
2. Belum terintegrasinya pelayanan angkutan umum karena belum tersedianya Feeder Trans Padang sebagai angkutan pengumpan Bus Trans Padang di semua koridor
3. Masih kurangnya ketersediaan tempat Parkir diluar Badan Jalan (*off street*) dan secara bertahap menghilangkan parkir di Badan Jalan (*On Street*) khususnya di Pusat Kegiatan Bisnis (CBD).
4. Banyaknya parkir liar di luar kawasan yang telah ditentukan
5. Belum optimalnya pemanfaatan IT untuk pengaturan, pengendalian dan pelayanan Transportasi (smart transportation) berupa *Area Traffic Control System* (ATCS), *Inteligent Transport System (ITS*) dan lain-lain
6. Masih kurangnya prasarana angkutan umum yg representatif dan terintegrasi, seperti halte dengan stasiun dan lain-lain
7. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang tertib lalu lintas dalam mewujudkan transportasi aman, nyaman dan ramah lingkungan
8. Masih kurangnya prasarana angkutan umum yg representatif dan terintegrasi, seperti halte dengan stasiun dan lain-lain.
9. Kurangnya Aksesibilitas transportasi layak disabilitas
10. Belum terlayani beberapa ruas jalan oleh angkutan massal per kotaan Trans Padang
11. Operasional Trans Padang masih bergantung kepada subsidi
12. Rekayasa laulintas yang dilakukan belum mampu mengatasi kemacetan terutama pada jam-jam sibuk
13. Belum optimalnya layanan Penerangan Jalan Umum di Kota Padang.
14. kurangnya peremajaan sarana peralatan pengujian kendaraan bermotor sehingga tidak efisien lagi untuk dioperasikan
15. Tempat pengujian kendaraan bermotor tidak representatif lagi sehingga menyebabkan terganggunya pemakai jalan akibat ketidaktersediaan tempat parkir bagi kendaraan yang melakukan pengujian

K. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Permasalahan pada urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika antara lain:

1) Kemampuan dan kualitas layanan Infrastruktur jaringan yang masih minim yang ditandai dengan banyaknya keluhan terkait

lemahnya koneksi jaringan atau unit-unit kerja yang belum terkoneksi jaringan

2) Masih kurangnya sumber daya aparatur yang memiliki skill dan kompetensi di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Dari personil yang ada saat ini juga diketahui tingkat literasi teknologi informasi komunikasi juga sangat minim.
3) Sistem informasi/aplikasi, server, jaringan yang saat ini dibangun belum dilengkapi dengan security sistem yang handal.

L. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Permasalahan pada urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah antara lain:

Meningkatnya jumlah koperasi tidak aktif di tahun 2025 sebanyak 402, pada tahun 2023 terdapat 365 Koperasi tidak aktif.

M. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Permasalahan pada urusan Bidang Penanaman Modal antara lain :

Permasalahan pada urusan Bidang Penanaman Modal antara lain yakni pada hambatan Investasi

Tanah ulayat: Sulitnya akses lahan untuk investor karena status kepemilikan adat.

Keterbatasan infrastruktur: Transportasi, energi, dan fasilitas pendukung belum optimal.

Tumpang tindih regulasi: Peraturan daerah dan pusat sering tidak sinkron, menghambat kepastian hukum bagi investor.

N. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Kepemudaan dan olahraga merupakan bagian dari urusan Pembangunan yang mengedepankan kreativitas generasi penerus bangsa. Pemuda merupakan potensi dalam penggerak pembangunan dimasa kini dan masa depan, Kota Padang konsisten untuk menyalurkan minat dan potensi Pemuda, melalui penyediaan sarana dan prasarana pendukung sebagai tempat mengembangkan kreativitas dan bakat Pemuda/Pemudi dibidang seni, budaya, olahraga dan lain-lain.

Untuk bidang olahraga kegiatan yang dilakukan masih pada tahap mengikutsertakan pemuda yang berbakat dibidang olah raga pada kejuaraan Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional. Permasalahan pada urusan pemuda dan olahraga adalah masih minimnya sarana dan prasarana olahraga sesuai standar.

0. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Permasalahan pada urusan Pemerintahan Bidang Statistik antara lain:

1) Belum optimalnya ketersediaan data statistik sectoral
2) Masih rendahnya pemahaman beberapa Perangkat Daerah yang telah menyampaikan data saat dilakukan verifikasi dan validasi
3) Belum optimalnya hasil forum satu data
4) Belum optimalnya koordinasi pemanfaatan portal satu data.

P. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Permasalahan pada urusan Pemerintahan Bidang Persandian antara lain:

1) Belum optimalnya pengamanan informasi;
2) Belum memadainya sarana dan prasarana persandian;
3) Terbatasnya sumber daya manusia yang ahli di bidang persandian

Q. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Pembangunan kebudayaan pada hakikatnya diarahkan pada upaya untuk mewujudkan ketahanan budaya. Ketahanan budaya sangat diperlukan, mengingat semakin pesatnya arus globalisasi yang akan membawa konsekuensi terjadinya ekspansi seni dan budaya global yang dapat mempengaruhi kelestarian budaya daerah, yang pada akhirnya akan berimplikasi kepada budaya nasional.

Permasalahan pada urusan kebudayaan adalah masih kurangnya penyelenggaraan festival seni dan budaya. Salah satu aktivitas dalam pengembangan Pariwisata berbasis budaya Adalah penyelenggaraan festival seni dan budaya di kota Padang, meskipun event ini belum mampu menembus pasar wisata manca negara secara luas. Oleh sebab itu, berbagai upaya dalam bentuk promosi dan kerja sama serta peningkatan kuantitas dan kualitas berbagai event perlu terus diupayakan agar bisa berkontribusi lebih banyak terhadap sektor pariwisata dan perekonomian di Kota Padang.

R. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Permasalahan utama di perpustakaan meliputi minimnya ketersediaan dan pembaruan koleksi buku, keterbatasan anggaran, karena akibat pengurangan Dana Transfer ke Daerah (TKD) kurangnya literasi dan minat kunjung masyarakat, serta kompetensi pustakawan yang belum optimal. Selain itu, perpustakaan sering terkendala fasilitas yang tidak memadai dan kendala teknis pada perpustakaan digital.

S. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Penyelenggaraan kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta pendampingan dan monitoring penerapan penggunaan sistem pola baru yang dikembangkan dengan sistem aplikasi kearsipan berbasis IT sesuai dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Arsip merupakan dokumen yang berisi data/informasi beberapa tahun ke belakang. Keberadaannya sangat penting untuk mengingatkan peristiwa / kejadian / kronologis pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, oleh karenanya memerlukan pengelolaan secara baku.

Dari data tahun 2024, belum seluruh SKPD melaksanakan penerapan arsip secara baku, hal ini disebabkan karena Kurang tertibnya penanganan arsip dan kurangnya pegawai yang berlatar belakang pendidikan ilmu kearsipan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka permasalahan pada urusan kearsipan adalah belum optimalnya pengelolaan dan penataan arsip di OPD.

2.3.5. Permasalahan Pembangunan Daerah Berdasarkan Urusan Pemerintahan Pilihan

A. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Permasalahan pada urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan antara lain:

1. Nilai produksi perikanan budidaya mengalami penurunan
2. Menurunnya pendapatan nelayan, pembudidaya ikan
3. Menurunnya pendapatan pengolah dan pemasar perikanan

B. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Permasalahan pada urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata antara lain:

1. Kenyamanan dan Keamanan (Pungli dan Parkir Liar): Insiden pemalakan atau pengusiran pengunjung oleh oknum juru parkir ilegal atau pihak warung yang sewenang-wenang sering merusak citra pariwisata.
2. Masalah Kebersihan: Masih rendahnya kesadaran lingkungan kerap menimbulkan masalah penumpukan sampah di berbagai kawasan wisata, yang memberikan kesan kumuh dan mengurangi daya tarik visual pengunjung.
3. Standar Pelayanan dan SDM: Kurangnya pelatihan bagi pelaku usaha lokal (seperti pedagang dan penyedia jasa) memicu masalah pelayanan yang kurang ramah, penetapan harga tidak wajar serta tata krama pelayanan yang buruk
4. Strategi Promosi dan Pemasaran Walaupun memiliki pesona keindahan alam dan budaya yang kuat, promosi pariwisata digital maupun konvensional masih dinilai lemah dan kalah

saing dengan daerah tetangga, sehingga lama tinggal (length of stay) wisatawan di Padang tergolong singkat
5. Masih rendahnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB.

C. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Permasalahan pada urusan Pemerintahan Bidang Pertanian antara lain :

1) Rendahnya pengembangan olahan produk pertanian, perkebunan dan peternakan
2) Belum optimalnya sarana prasarana pendukung aktivitas usaha pertanian, perkebunan, dan peternakan.

D. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Permasalahan pada urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan antara lain :

1) Konflik Relokasi dan Ketidakpuasan PKL : Penertiban dan pemindahan pedagang ke area baru, seperti lantai basemen Pasar Raya atau area relokasi, sering kali diwarnai penolakan. Pedagang mengeluhkan hilangnya pembeli dan ketidaksesuaian data pemerintah dengan kondisi di lapangan yang rawan memicu konflik antar pedagang.
2) Rendahnya Okupansi Kios Pasar Baru : Revitalisasi pasar kerap tidak diimbangi dengan jumlah pedagang yang menetap di dalamnya. Kios-kios baru yang disediakan pemerintah sering kali sepi karena pembeli lebih memilih berbelanja di lapak pinggir jalan. Hal ini menurunkan pendapatan pedagang secara drastisMasih adanya resistensi bagi pedagang kaki lima untuk dilakukan penataan
3) Belum optimalnya pendampingan kepada pedagang untuk modal distribusi pasar modern dan pasar digital
4) Persaingan Pasar Tradisional dan Modern : Masifnya pertumbuhan ritel modern di wilayah permukiman menggerus pangsa pasar tradisional. Pedagang kecil kesulitan bersaing baik dari segi kenyamanan, kelengkapan barang, maupun manajemen harga.

E. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Permasalahan pada urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian antara lain :

1) Belum terstandarisasi kualitas produk industri kecil dan menengah
2) Masih kurangnya jumlah produk IKM yang memenuhi standarisasi Nasional
3) Belum optimalnya pemanfaatan teknologi industri dan kurangnya ketersediaan dukungan sarana prasarana industri.

2.3.6. Permasalahan Pembangunan Daerah Berdasarkan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

A. Unsur Perencanaan

Permasalahan pada unsur Perencanaan antara lain:

1) Masih kurangnya jumlah tenaga perencana di perangkat daerah.
2) Masih kurangnya kompetensi SDM Perencana.
3) Data sektoral belum terintegrasi dan belum mutakhir
4) Tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang belum berorientasi *outcome.*
5) Belum optimalnya pemanfaatan hasil evaluasi dalam penyusunan dokumen perencanaan.

B. Unsur Keuangan

Permasalahan pada unsur keuangan antara lain:

1) Kurang maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah
2) Belum optimalnya pengelolaab pendapatan dan keuangan daerah
3) Belum optimalnya pemanfaatan asset daerah dalam rangka peningkatan pendapatan daerah

C. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Permasalahan pada unsur pengawasan antara lain:

1) Masih terbatasnya tenaga profesional yang memiliki kompetensi memadai di bidang pengawasan
2) Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan pengawasan
3) Belum tersedianya teknologi informasi dalam bidang pengawasan

D. Unsur Kepegawaian

Permasalahan pada unsur kepegawaian antara lain:

1) Belum optimalnya sistem tunjangan berbasis kinerja;
2) Belum optimalnya pengukuran kinerja unit kerja dan individu secara komprehensif;
3) Penempatan ASN belum sepenuhnya berbasis kompetensi;
4) Kurangnya pejabat fungsional tertentu yang memiliki keahlian.
5) Unsur Pendidikan dan Pelatihan
6) Masih rendahnya kompetensi dan kapabilitas aparatur
7) Belum optimalnya pengembangan kompetensi ASN yang berjenjang dan berkelanjutan
8) Belum adanya sertifikasi kompetensi pemerintahan pada setiap jenjang jabatan.
9) Rendahnya jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi setiap tahunnya.
10) Belum tersedianya data Kebutuhan Pengembangan Kompetensi berdasarkan analisis kebutuhan diklat

E. Unsur Penelitian dan Pengembangan

Permasalahan pada unsur Penelitian dan Pengembangan antara lain:

1) Penyebarluasan dan pemanfaatan hasil riset/penelitian sebagai dasar perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan pembangunan daerah belum berjalan baik.
2) Belum optimalnya kerja sama pengembangan penelitian yang berkelanjutan antar pemangku kepentingan (Dewan Riset Daerah).
3) Belum adanya formulasi tata cara monitoring dan evaluasi hasil-hasil kelitbangan yang dilaksanakan oleh semua perangkat daerah.

F. Unsur Kewilayahan

Permasalahan pada unsur kewilayahan antara lain:

1) Belum optimalnya pelayanan publik dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada kecamatan.
2) Belum optimalnya pelayanan public kepada Masyarakat
3) Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang yang terbatas
4) Keterbatasan SDM yang menguasai teknologi

G. Unsur Pemerintahan Umum

Permasalahan pada unsur Pemerintahan Umum antara lain:

1) Belum optimalnya pemahaman masyarakat tentang pendidikan politik berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.
2) Belum optimalnya partisipasi aktif kaum perempuan dalam dunia politik.
3) Masih adanya ancaman dan gangguan, kerawanan sosial politik terhadap masyarakat

2.4 Capaian Standar Pelayanan Minimal Kota Padang

Pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Kebutuhan dasar warga negara diartikan sebagai barang dan/atau jasa dengan kualitas dan jumlah tertentu yang berhak diperoleh oleh setiap individu agar dapat hidup secara layak. Dalam rangka menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warga negara sebagaimana dimaksud, maka pelaksanaan pelayanan dasar oleh pemerintah daerah agar berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, bahwa Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran dan ketepatan sasaran. Dengan keberadaan SPM, maka masyarakat dapat mengukur sejauh mana pemerintah daerah dapat memenuhi kewajibannya dalam menyediakan pelayanan publik khususnya yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Sebaliknya bagi

pemerintah daerah, SPM dapat dijadikan sebagai alat akuntabilitas pemerintah daerah terhadap upaya peningkatan aksesibilitas, kualitas, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pelayanan dasar kepada masyarakat. Dalam rangka menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat, setiap tahunnya pemerintah pusat melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penerapan SPM oleh pemerintah daerah.

Pelaksanaan SPM diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, yang juga merupakan penyempurnaan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Disamping itu juga mempedomani peraturan teknis terkait SPM yang diterbitkan oleh Kementerian terkait setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 serta Peraturan Wali Kota Padang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal.

2.4.1. Bidang Pendidikan

Jenis pelayanan dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal bidang Pendidikan sebagai berikut :

1) Pendidikan Anak Usia Dini,
2) Pendidikan Dasar
3) Pendidikan Kesetaraan

Realisasi SPM

Target Capaian kinerja Pemerintah Kota Padang dalam memberikan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan, sebagai berikut :

Tabel 2- 98 Realisasi SPM Bidang Pendidikan

No	Indikator Kinerja Jenis Layanan SPM	Capaian (%)	
		2024	2025
1 .	Pendidikan Dasar Usia Dini	100.00 %	100.00 %
2 .	Pendidikan Dasar	100.00 %	100.00 %
3 .	Pendidikan Kesetaraan	100.00 %	100.00 %

Sumber : *Laporan Penerapan dan Pencapaian SPM Kota Padang Tahun 2025, Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Padang*

2.4.2. Bidang Kesehatan

Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal bidang kesehatan sebagai berikut :

a) Pelayanan kesehatan ibu hamil
b) Pelayanan kesehatan ibu bersalin
c) Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
d) Pelayanan kesehatan balita

e) Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
f) Pelayanan kesehatan pada usia produktif
g) Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
h) Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
i) Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus (DM)
j) Pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat
k) Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkolosis
l) Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus melemahkan daya tahan tubuh (HIV)

Realisasi SPM

Target capaian kinerja Pemerintah Kota Padang dalam memberikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan sebagai berikut :

Tabel 2- 99 Realisasi SPM Bidang Kesehatan

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian (%)	
			2024	2025
1 .	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100	100
2 .	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100	100
3 .	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100	100
4 .	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100	100
5 .	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia pendidikan yang mendapatkan layanan kesehatan	100	100
6 .	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100	100
7 .	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100	100
8 .	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100	100
9 .	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah warga negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100	100
10 .	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat (ODGJ) yang mendapatkan layanan kesehatan	100	100
11 .	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah warga negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100	100
12 .	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	100	100

Sumber : Laporan Penerapan dan Pencapaian SPM Kota Padang Tahun 2025, Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Padang

2.4.3. Bidang Pekerjaan Umum

Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal bidang pekerjaan umum sebagai berikut :

a. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

Realisasi SPM

Capaian kinerja Pemerintah Kota Padang dalam memberikan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum sebagai berikut :

Tabel 2- 100 Target Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian (%)	
			2024	2025
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari- hari	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	100	100
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	100	100

Sumber : Laporan *Penerapan dan Pencapaian SPM Kota Padang Tahun 2025, Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Padang*

2.4.4. Bidang Perumahan Rakyat

Realisasi SPM

Target Capaian kinerja Pemerintah Kota Padang dalam memberikan Standar Pelayanan Minimal bidang Perumahan Rakyat, sebagai berikut :

Tabel 2- 101 Realisasi SPM Bidang Perumahan Rakyat

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian (%)	
			2024	2025
1	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	100

Sumber : Laporan Penerapan dan Pencapaian SPM Kota Padang Tahun 2025, Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Padang

2.4.5. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)

Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, jenis

pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sebagai berikut :

a. Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Satpol-PP)
b. Pelayanan Informasi Rawan Bencana (BPBD)
c. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (BPBD)
d. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (BPBD)
e. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Damkar)

Realisasi SPM

1. SATPOL PP

Target Capaian kinerja Pemerintah Kota Padang dalam memberikan Standar Pelayanan Minimal bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sub bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) sebagai berikut :

Tabel 2- 102 Realisasi SPM Satpol PP

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian	
			2024	2025
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Penegakan Perda Sesuai Mutu dan Pelayanan Ganti Rugi	Persentase pencapaian penerima layanan dasar	100	100

Sumber : Laporan Penerapan dan Pencapaian SPM Kota Padang Tahun 2025, Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Padang

2. Kebencanaan (BPBD)

Target capaian kinerja Pemerintah Kota Padang dalam memberikan Standar Pelayanan Minimal bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sub bidang Kebencanaan, sebagai berikut:

Tabel 2- 103 Target Pencapaian SPM Kebencanaan (BPBD)

No.	**Jenis Pelayanan Dasar**	**Indikator Pencapaian**	**Capaian (%)**	
			2024	**2025**
1	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	100
2	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	100
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	100

Sumber : Laporan Penerapan dan Pencapaian SPM Kota Padang Tahun 2025, Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Padang

3. Pemadam Kebakaran

Target capaian kinerja Pemerintah Kota Padang dalam memberikan Standar Pelayanan Minimal bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sub bidang Pemadam Kebakaran, sebagai berikut :

Tabel 2- 104 Target Pencapaian SPM Damkar

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian (%)	
			2024	2025
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)	Persentase layanan pemadaman yang dilakukan sesuai dengan Prosedur Operasional Standar (SOP) yang berlaku	100	100

Sumber : Laporan Penerapan dan Pencapaian SPM Kota Padang Tahun 2025, Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Padang

2.4.5. Bidang Sosial

Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tekhnis Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial, terdapat 5 jenis layanan Bidang Sosial yang harus dilaksanakan, dimana kewenangan Kabupaten / Kota adalah layanan keterlantaran diluar panti yaitu :

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlantar diluar panti.
2. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Anak terlantar diluar panti.
3. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Lanjut Usia terlantar diluar panti.
4. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti.
5. Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota.

Realisasi SPM

Target capaian kinerja Pemerintah Kota Padang dalam pemberian Standar Layanan Minimal (SPM) bidang Sosial sebagai berikut :

Tabel 2- 105 Realisasi SPM Bidang Sosial

No	**Jenis Pelayanan Dasar**	**Realisasi (%)**	
		2024	**2025**
1 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti	100	100
2 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti	100	100
3 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	100	100
4 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	100	100
5 .	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana	100	100

No	Jenis Pelayanan Dasar	Realisasi (%)	
		2024	2025
	Kabupaten/Kota		

Sumber : Laporan Penerapan dan Pencapaian SPM Kota Padang Tahun 2024, Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Padang

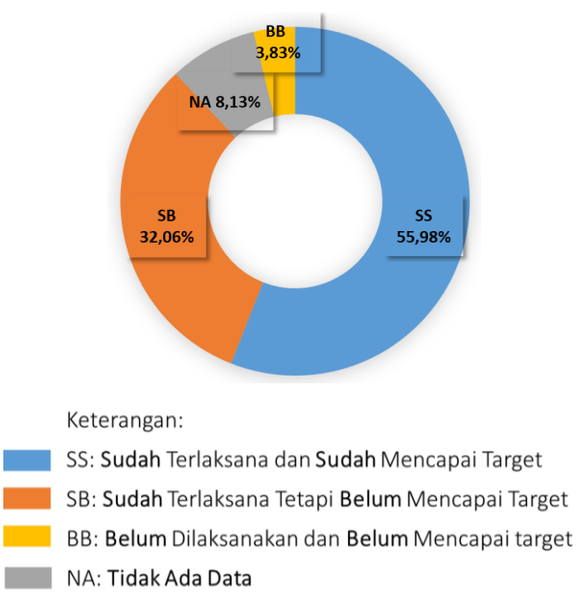
2.5. Capaian Pelaksanaan SDGs

Pada Perpres No. 59 Tahun 2017 telah ditetapkan target pelaksanaan TPB secara nasional. Kategori evaluasi capaian TPB adalah sebagai Berikut:

1. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target (SS);
2. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target (SB);
3. Indikator TPB yang belum dikerjakan dan belum tercapai (BB); dan
4. Indikator TPB yang tidak ada data (NA).

Berdasarkan hasil perhitungan dan pengolahan data menunjukkan bahwa indikator TPB di Kota Padang yang telah dilaksanakan dan mencapai target (SS) adalah 55,98% (117 dari total 222 indikator). Capaian SS ini mengalami peningkatan sebesar 9% dari tahun 2021, yaitu sebesar 46%. Bila dilihat dari 4 kategori di atas, proporsi pelaksanaan TPB Kota Padang secara umum didominasi dengan kategori SS, sedangkan untuk kategori SB dan BB berturut-turut adalah 32% dan 3,83%. Komposisi pelaksanaan TPB Kota Padang dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2- 67 Grafik Persentase Capaian Indikator TPB Kota Padang



Terdapat 117 indikator TPB dengan kategori yang sudah terlaksana dan sudah mencapai target (SS). TPB dengan capaian tertinggi adalah TPB 3 yaitu kehidupan sehat dan sejahtera yakni 16 indikator. Terdapat 67 indikator yang masuk kategori TPB yang

sudah terlaksana namun belum mencapai target (SB). TPB dengan capaian tertinggi untuk kategori SB ini juga merupakan TPB 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera) dengan 14 indikator, dan disusul dengan TPB 1 Tanpa Kemiskinan dengan 12 indikator. Rincian masing-masing indikator TPB dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2- 106 Capaian Indikator TPB Kota Padang

No	Nama TPB	Jumlah Indikator	Capaian			
			SS	SB	NA	BB
1	Tanpa Kemiskinan	25	13	12		
2	Tanpa Kelaparan	11	7	2	2	
3	Kehidupan sehat dan sejahtera	34	16	14	3	1
4	Pendidikan berkualitas	13	9	4		
5	Kesetaraan gender	14	7	4	2	1
6	Air bersih dan sanitasi layak	17	11	5		1
7	Menjamin akses energi					
8	Pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan layak	19	14	3	2	
9	Infrastruktur,industri dan inovasi	9	2	4	3	
10	Mengurangi kesenjangan	6	3	2		1
11	Kota dan permukiman berkelanjutan	14	11	2		1
12	Pola produksi dan Konsumsi berkelanjutan	5	2	3		
13	Penanganan perubahan iklim	2	2			
15	Pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat	4	2	1		1
16	Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kokoh	21	11	7	3	
17	Kemitraan untuk mencapai tujuan	15	7	4	2	2
Total		209	117	67	17	8
Persentase			55,9%	32,1%	8,2%	3,8%

Sumber : Bappeda Kota Padang, 2026

2.6. Realisasi Capaian Makro hingga Tahun 2025

Berdasarkan hasil capaian 12 Indikator Makro Pembangunan Kota Padang di tahun 2025 dapat disimpulkan ; 7 indikator makro telah melebihi target, 2 indikator sesuai target dan 3 indikator makro dibawah target RKPD 2025. Untuk konsistensi Pencapaian Kinerja yang lebih baik, target indikator makro pada RKPD Perubahan mempertimbangkan capaian pada tahun 2025.

Tabel 2- 107 Realisasi Capaian Misi RPJMD Hingga Tahun 2025

NO	INDIKATOR	SATUAN	2025		
			Target	Realisasi	Ket.
1	Pertumbuhan Ekonomi	Persentase	4,16	3,75	Dibawah target
2	PDRB Per Kapita ADHB (Rp. Juta)	Rp. Juta	97,52	92,21	Dibawah target
3	PDRB Per Kapita ADHK (Rp. Juta)	Rp. Juta	55,71	56,09	**Melebihi target**
4	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	84,51	84,93	**Melebihi target**
5	Angka Harapan Hidup (Tahun)	Tahun	75,37	75,59	**Melebihi target**
6	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	Tahun	16,58	16,58	sesuai target
	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	Tahun	11,64	11,64	sesuai target
8	Pengeluaran Per Kapita (Rp. Ribu)	Rp. Ribu	15.689	15.957	**Melebihi target**
9	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Persentase	9,88	9,7	**Melebihi target**
10	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	Jiwa	35.313	37.380	Dibawah target
11	Tingkat Kemiskinan (%)	Persentase	3,66	3,63	**Melebihi target**
12	Gini Ratio	Indeks	0,32	0.348	Dibawah target

Sumber : Bappeda Kota Padang, 2026

2.7. Realisasi Capaian Misi hingga Tahun 2025

Tabel 2- 108 Realisasi Capaian Misi RPJMD Hingga Tahun 2025

No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2025	Realisasi 2025
1.	Menguatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas profesional, responsif, kolaboratif, dan partisipatif	Indeks Reformasi Birokrasi	86	87,31
2.	Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	Mewujudkan Implementasi Kota Pintar dan Kota Sehat	Smart City Index	3,2	3,16
3.	Menguatkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya dengan Pendidikan Karakter	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul	Indeks Pembangunan Manusia	84,51	84,93

No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2025	Realisasi 2025
	Dan Pemberdayaan				
		Meningkatkan stabilitas sosial dan politik daerah	Indeks Rasa Aman	11	-3.41
4.	Mendorong Kemudahan Berinvestasi Demi Terbukanya Lapangan Pekerjaan	Mewujudkan Perekonomian Masyarakat yang adaptif dan kondusif	Indeks daya saing daerah	4,27	4,25
5.	Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Pariwisata yang Nyaman dan Berkesan	Indeks Kota Layak Huni	69,16	69,89
6.	Menguatkan Jaringan Ketahanan Bencana	Terwujudnya Kota Padang yang tanggap dan tangguh bencana	Indeks Risiko Bencana (IRB)	154,68	185,53
7.	Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif dengan Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	Mewujudkan Sektor perdagangan dan jasa yang tangguh	PDRB sektor perdagangan dan jasa (Miliar Rupiah)	30.744,63	62.850,61
8.	Menggerakkan Potensi Kota untuk Terwujudnya Industri Kreatif dan Pariwisata Berkelanjutan	Terwujudnya Meningkatkan perekonomian daerah dari sektor Industri Kreatif dan Pariwisata	PDRB sektor industri kreatif dan pariwisata (Miliar Rupiah)	1218,19	4160.11

Sumber : Bappeda Kota Padang, 2026

2.8. Realisasi Indikator Kinerja Kota (Indikator Kinerja Utama / IKU Kota) Tahun 2025

Realisasi Indikator Kinerja Utama di tahun 2025 sebagaimana digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 2- 109 Realisasi Indikator Kinerja Kota (Indikator Kinerja Utama / IKU Kota) Tahun 2025

No	Indikator	2025		ket
		Target	Realisasi	
1	Indeks Reformasi Birokrasi	86	87,31	**melebihi target**
2	Nilai SAKIP	78.68	78.84	**melebihi target**
3	Opini atas laporan keuangan pemerintah daerah	WTP	WTP	sesuai target
4	Indeks Reformasi Hukum	91	100	**melebihi target**

No	Indikator	2025		ket
		Target	Realisasi	
5	Indeks Pelayanan Publik	3,54	3,38	dibawah target
6	Indeks Pengawasan Arsip	84	96,39	**melebihi target**
7	Indeks Pencegahan Korupsi Daerah	95,2	77.65	dibawah target
8	Indeks Sistem Merit	0,71	0,66	dibawah target
9	Smart City Index	3,2	3,16	dibawah target
10	Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	3,96	4,17	Melebihi target (Data imperative. SPBE digunakan s/d 2025, selanjutnya mulai tahun 2026 diganti dengan indeks transformasi digital pilar pemerintahan)
11	Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintahan	-	-	Pengganti untu SPBE barlaku mulai 2026
12	Indeks Kesehatan	0,84	0,84	sesuai target
13	Peningkatan Penilaian Hasil Evaluasi Kota Sehat	0.01	0,88	**melebihi target**
14	Indeks Pembangunan Manusia	84,51	84,93	**melebihi target**
15	Indeks pembangunan Literasi masyarakat	86	18,76	perubahan cara perhitungan
16	Indeks Pendidikan	0,849	0,849	sesuai target
17	Indeks Pembangunan Kebudayaan	61,2	27	perubahan cara perhitungan
18	Indeks Pembangunan Pemuda	56,5	56,7	**melebihi target**
19	Indeks Pembangunan Gender	94,16		n/a
20	Indeks Rasa Aman	11	-3.41	dibawah target
21	Indeks Penyelenggaran Trantibumlinmas	65,0	76,32	melebihi target
22	Indeks Kerukunan Umat Beragama	77,37	85,02	melebihi target
23	Indeks Kesejahteraan Sosial	53,89	50,48	dibawah target
24	Indeks daya saing daerah	4,27	4,25	dibawah target
25	Nilai PMTB terhadap PDRB	29,94	28,38	dibawah target
26	Perbandingan orang yang bekerja thd angkatan kerja	90,12 %	90,30 %	**melebihi target**
27	Indeks Kota Layak Huni	69,16	69,89	melebihi target
28	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	77,36	80.68	melebihi target
29	Persentase Hunian Layak dan terjangkau	73,50	73,69	melebihi target
30	Indeks Infrastruktur	66,12		n/a
31	Rasio Konektivitas Wilayah	60,0	74	melebihi target
32	Indeks Risiko Bencana (IRB)	154,68	185,53	dibawah target
33	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,52	0,52	sesuai target
34	Presentase kejadian kebakaran yang ditangani sesuai SOP	100	100	sesuai target
35	Persentase penyelamatan kedaruratan yang terlayani sesuai SOP	100	100	sesuai target
36	PDRB sektor perdagangan dan jasa (Miliar Rupiah)	30.744,63	62.850,61	**melebihi target**
37	Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	0,32	0,32	sesuai target
38	Persentase Pertumbuhan PDRB	5,48	4,34	dibawah target

No	Indikator	2025		ket
		Target	Realisasi	
	sektor perdagangan dan jasa			
39	Persentase Pertumbuhan Net Ekspor	9,29	21,54	**melebihi target**
40	Kontribusi Lapangan usaha Perdagangan Terhadap PDRB	17,99	17,8	
41	Kontribusi Ekspor terhadap PDRB	7,108	11,15	**melebihi target**
43	PDRB sektor industri kreatif dan pariwisata (Miliar Rupiah)	1218,19	4160.11	**melebihi target**
44	Persentase Pertumbuhan Sektor PDRB Ekonomi Kreatif	7,43	9,8	**melebihi target**
45	Persentase Pertumbuhan sektor pariwisata	7,12	2,4	dibawah target
42	Nilai omset sektor koperasi dan UMKM (usaha mikro) (Rp Juta)	1.852.392 ,88	2.058.677,88	**melebihi target**
			1.326.568,69	pola hitungan baru

Sumber : Bappeda Kota Padang, 2026

2.9. Capaian Program Unggulan hingga Tahun 2025

untuk mempercepat akselerasi Pembangunan dikota Padang, pada RPJMD 2025 – 2029 ditetapkan 9 Program Unggulan dan 40 aktivasi sesuai dengan capaian hingga tahun 2025 diuraikan sebagai berikut :

1. Padang Amanah Padang Amanah

diwujudkan dalam bentuk aktivasi berupa :

a) Pemerintahan berintegritas dan bebas pungli;
   Untuk Upaya mewujudkan Aktivasi ini, Pemerintah Kota Padang melalui Perangkat Daerah Inspektorat melaksanakan kegiatan TKPPPK (Tim Koordinasi Pendidikan, Pencegahan Perilaku Koruptif) dengan bentuk Kegiatan penyuluhan ke sekolah – sekolah yang dilaksanakan dalam 3 hari. Selain itu juga dilakukanPenyuluhan di objek wisata Pantai Air Manis dan Pantai Padang terkait Pungutan liar.
b) Optimalisasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi;
   Penerapan pemakaian SSO (mengintegrasikan beberapa layanan ASN dalam satu aplikasi SSO) sebagai akses layanan kepegawaian secara online, dan telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi pemakaian SSO terintegrasi.
c) Pembangunan Masyarakat Tingkat RW.
d) Pemanfaatan aset untuk peningkatan pendapatan asli daerah.

2. Padang Juara Padang Juara

diwujudkan dalam bentuk aktivasi berupa :

a) Kartu Padang Juara;
   Kartu Padang Juara adalah program bantuan pendidikan dari Pemerintah Kota Padang bagi siswa dari keluarga kurang mampu serta peningkatan pemerataan pendidikan dengan memastikan setiap anak di Kota Padang mendapatkan akses pendidikan yang layak dan setara tanpa terkendala masalah ekonomi. Pada tahun 2025, Pemerintah Kota Padang telah menjalin Kerja sama dengan Yayasan Putera Sampoerna di

Bidang Pendidikan dengan melaksanakan Program Bantuan Pendidikan Tingkat Sarjana di Universitas Sampoerna angkatan 2025/2026. Sebanyak 6 orang mahasiswa warga Kota Padang sudah diberikan beasiswa pendidikan, dimana 3 orang ditanggung oleh Pemerintah Kota Padang dan 3 orang dibiayai oleh Yayasan Putera Sampoerna.

b) Revisi kurikulum dan sertifikasi Guru PAUD;
Memberikan kesempatan kepada guru TK/PAUD yang belum sertifikasi untuk melanjutkan Pendidikan yang linier dengan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). Guru TK/PAUD ini diberikan kesempatan melanjutkan dan diberikan bantuan Pendidikan Tingkat Sarjana di salah satu perguruan tinggi di Kota Padang, dimana pada tahun 2025 telah dibantu sebanyak 50 orang guru PAUD untuk biaya pendidikannya.

c) Revisi kurikulum dan sertifikasi TPQ/MDTA bagi siswa SD, MDTW/TQA bagi siswa SMP,
d) Madrasah Diniyah Wustho (MDW) bagi siswa SMP;
e) LKS dan seragam sekolah gratis bagi siswa kurang mampu;
Memberikan bantuan seragam sekolah dan buku Lembar Kerja Siswa (LKS) gratis bagi siswa SD dan SMP, khususnya bagi keluarga rentan miskin (terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dan Masysrakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Manfaat utamanya program ini meliputi pengurangan beban ekonomi orang tua, penurunan angka putus sekolah serta peningkatan motivasi belajar siswa.
Pada tahun 2025 telah diberikan bantuan LKS untuk 7.257 siswa SD dan sebanyak 6.878 siswa SMP. Untuk seragam sekolah gratis diberikan kepada 7.442 siswa SD dan 7.425 siswa SMP.

f) Padang Balomba.
Pada tahun 2025, di bidang olah raga kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olah Raga adalah mengadakan kejuaraan renang Sumatera Cup antar Club. Selain itu di bidang Pendidikan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang melaksanakan perlombaan kompetisi sains tingkat SD dan SMP.

3. Smart Surau Smart Surau
diwujudkan dalam bentuk aktivasi berupa :
a) Subuh mubarokah;
b) Remaja mesjid reborn;
c) Fasilitasi rumah tahfidz;
d) Ruang pembelajaran digital mesjid dan Wifi gratis.

4. Sinergi Nagari
diwujudkan dalam bentuk aktivasi berupa :
a) Optimalisasi peran Tungku Tigo Sajarangan dalam pemberdayaan masyarakat;

b) Sinergi pemerintah kota dengan organisasi masyarakat keagamaan, cendikiawan, dan adat.

5. Padang Melayani Padang Melayani

diwujudkan dalam bentuk aktivasi berupa :

a) BPJS kesehatan gratis;

Program BPJS Kesehatan Gratis merupakan upaya Pemerintah Kota Padang dalam meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat. Program ini bertujuan untuk mengurangi beban pembiayaan kesehatan serta menjamin tersedianya layanan kesehatan yang layak dan terjangkau bagi seluruh warga.

Melalui program ini, Pemerintah Kota Padang memberikan jaminan kepesertaan BPJS Kesehatan secara gratis kepada masyarakat yang berdomisili di Kota Padang dan terdaftar dengan KTP Kota Padang. Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan cakupan perlindungan kesehatan, mendorong pemerataan akses layanan kesehatan, serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh.

Pelaksanaan program ini juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pelayanan publik yang inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Melalui dinas Kesehatan kota padang telah dilaksanakan beberapa kegiatan yaitu :

- Membuat SK Walikota tentang kriteria penerima jaminan kesehatan
- Penandatanganan MoU bersama BPJS dan Rumah Sakit
- Pengaktifan kartu BPJS Kesehatan Gratis sesuai kriteria
- Sosialisasi pelaksanaan BPJS Kesehatan Gratis kepada masyarakat, kader dan melakukan kerja sama dengan Kominfo
- Evaluasi pelaksanaan BPJS Kesehatan Gratis

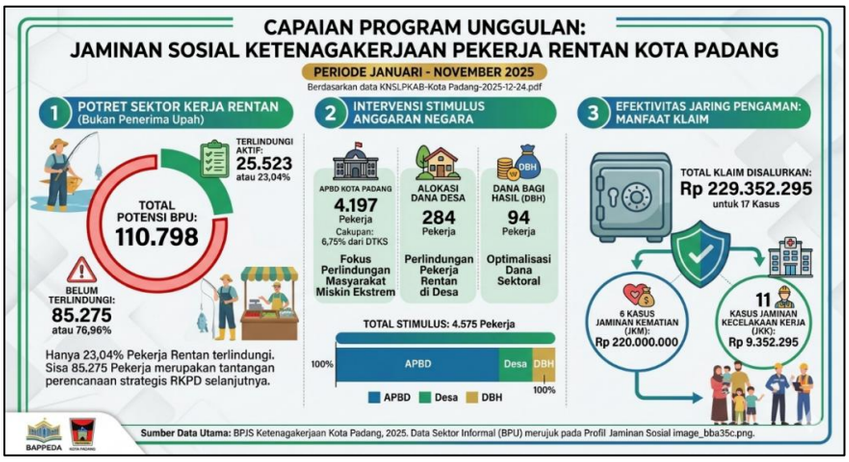
  Pada tahun 2025 telah direalisasikan anggaran untuk BPJS Gratis sebesar Rp. 34.134.230.000 untuk 54.977 jiwa.

  Selain itu, di Dinas Sosial juga telah dilakukan pemberian Rekomendasi Reaktifasi peserta PBIJK yang di Exclude (yang di non aktifkan/dikeluarkan). Rekomendasi Reaktifasi ini telah dilakukan untuk sejumlah 1.534 peserta.

b) BPJS ketenagakerjaan untuk pekerja rentan;

Kegiatan berupa Penjaminan Kematian melalui BPJS Ketenagakerjaan bagi masyarakat Kota Padang pekerja bukan penerima upah (pekerja rentan) dan untuk tahun 2025 telah dibayarkan BPJS Ketenagakerjaan untuk 731 orang di Dinas Sosial.

Gambar 2- 68 Capaian Program Unggulan : Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pekerja Rentan Kota Padang Periode Januari – November 2025



Sumber : Bappeda Kota Padang, 2026

Capaian perluasan perlindungan bagi sektor informal atau Bukan Penerima Upah (BPU) di Kota Padang menunjukkan urgensi intervensi anggaran yang kuat. Merujuk pada data Makro BPS dalam daftar gambar diatas, dari total potensi pekerja informal yang mencapai 110.798 jiwa, baru sebanyak 25.523 pekerja atau sekitar 23,04% yang telah memiliki kepesertaan aktif terlindungi. Sisa sebesar 85.275 pekerja atau 76,96% yang belum terlindungi menjadi tantangan strategis bagi pemerintah daerah, di mana sebagian kelompok rentan dan masyarakat miskin ekstrem di dalamnya telah diintervensi melalui skema jaring pengaman khusus berbasis anggaran negara. Melalui kolaborasi program unggulan, sebanyak 4.575 pekerja rentan berhasil diberikan stimulus perlindungan, dengan kontribusi dominan berasal dari APBD Kota Padang (4.197 pekerja), disusul oleh Alokasi Dana Desa (284 pekerja), dan Dana Bagi Hasil (94 pekerja). Keberadaan program intervensi perlindungan ini terbukti memberikan dampak perlindungan finansial yang nyata bagi keberlangsungan ekonomi keluarga pekerja saat menghadapi risiko kerja. Merujuk pada laporan dokumen KNSLPKAB-Kota Padang-2025-12-24.pdf, total jaring pengaman klaim manfaat yang berhasil disalurkan bagi sektor informal sepanjang periode Januari hingga November 2025 tercatat sebesar Rp229.352.295 untuk 17 kasus yang terjadi. Manfaat terbesar bersumber dari alokasi dana APBD Kota melalui penyaluran 6 kasus Jaminan Kematian (JKM) senilai Rp220.000.000, yang berperan penting dalam meminimalkan risiko jatuhnya keluarga ahli waris ke jurang kemiskinan baru. Sisanya didistribusikan dalam bentuk pembiayaan medis melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebanyak 9 kasus dari pos APBD Kota (Rp3.109.695) serta 2 kasus dari pos pekerja rentan desa (Rp6.242.600).

c) Bantuan pemerintah untuk kelompok pertanian dan perikanan;

Sebagai bagian dari implementasi Program Unggulan **Padang Melayani**, Pemerintah Kota Padang pada Tahun 2025 terus memperkuat dukungan terhadap sektor pertanian, peternakan, dan perikanan melalui penyaluran berbagai bentuk bantuan pemerintah yang tepat sasaran. Bantuan tersebut meliputi penyaluran **213.242 ekor bibit dan pakan ikan** kepada kelompok pembudidaya, **11.307 kg pakan ternak**, **9.111 kg pupuk**, **1.110 bibit ternak**, serta **1.000 bibit perkebunan**. Aktivasi bantuan ini merupakan upaya strategis pemerintah dalam meningkatkan kapasitas produksi, memperkuat ketahanan pangan daerah, serta mendorong peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani, peternak, dan pembudidaya ikan secara berkelanjutan.

Gambar 2- 69 Aktivasi Bantuan Pemerintah untuk Pertanian dan Perikanan Program Unggulan Padang Melayani Tahun 2025



Sumber : Bappeda Kota Padang, 2026

Realisasi bantuan pemerintah tersebut memberikan dampak positif terhadap penguatan sektor primer Kota Padang melalui peningkatan produktivitas usaha tani, peternakan, dan perikanan budidaya. Ketersediaan sarana produksi yang memadai mampu menekan biaya usaha,

meningkatkan kualitas hasil produksi, serta memperluas peluang peningkatan pendapatan masyarakat. Ke depan, Program Unggulan **Padang Melayani** akan terus diarahkan pada penguatan pelayanan publik yang responsif, peningkatan akses masyarakat terhadap bantuan produktif, serta pengembangan sistem pertanian dan perikanan yang modern, tangguh, dan berdaya saing guna mendukung terwujudnya ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif. Fasilitasi/insentif keluarga pasien kurang mampu;

d) Fasilitasi/insentif keluarga pasien kurang mampu;

Program fasilitasi/insentif bagi keluarga pasien kurang mampu merupakan bentuk kepedulian Pemerintah Kota Padang dalam mendukung aspek sosial dan kemanusiaan dalam pelayanan kesehatan. Program ini bertujuan untuk meringankan beban keluarga pasien yang mendampingi anggota keluarganya selama menjalani perawatan di fasilitas kesehatan.

Melalui program ini, Pemerintah Kota Padang menyediakan insentif berupa makanan gratis bagi keluarga pasien kurang mampu yang menunggu dan mendampingi pasien di ruang perawatan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Rasidin. Pemberian insentif ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar keluarga pasien selama masa perawatan serta memberikan kenyamanan dan dukungan moral.

Pelaksanaan program ini juga mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan kesehatan yang tidak hanya berfokus pada pasien, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan keluarga sebagai bagian integral dari proses penyembuhan.
Melalui RSUD Dr Rasidin telah dilakukan

- SK Walikota 630 Tahun 2025 tentang Kriteria Penerima Uang Makan Pendamping Pasien Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rasidin
- Sosialiasasi kepada seluruh kepala ruang rawatan
- Sudah di buat SOP Pelaksanaan kepada pasien

Pada tahun 2025 telah direalisasikan bantuan/insentif kepada keluarga pasien kurang mampu di RSUD dr. Rasidin sebanyak 77 orang keluarga pasien kurang mampu dengan anggaran Rp. 19.350.000,-.

e) Peduli “Warga Emas” pada sektor kesehatan, transportasi, dan pelayanan publik;
Program Peduli “Warga Emas” merupakan upaya Pemerintah Kota Padang dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti lanjut usia dan warga dengan keterbatasan akses layanan. Program ini dilaksanakan melalui penguatan pelayanan di sektor kesehatan, transportasi, dan pelayanan publik yang

lebih inklusif dan responsif.
Melalui dinas Kesehatan telah dilakukan:

- Melakukan sosialisasi ke Puskesmas terkait Program Unggulan Wali Kota Padang dan persiapan pelayanan untuk warga emas (alur pelayanan, SOP dan sarana prasarana)
- Pembinaan Tim Dinas Kesehatan (Assesment terkait manajemen, SDM dan sarana parasana) yang ada di Puskesmas terkait pelaksanaan peduli warga emas di Puskesmas
- Evaluasi terkait kesiapan Puskesmas dalam melaksanakan pelayanan Peduli Warga Emas
- Pelaksanaan kegiatan Peduli Warga Emas di Puskesmas, salah satunya berupa one stop service untuk warga emas.
- Di Dinas Sosial Kota Padang, kegiatan berupa pemberian makanan untuk disabilitas terlantar, lansia terlantar dan anak terlantar, dimana pada tahun 2025 juga telah diberikan bantuan makanan untuk 933 orang.
- Selain itu juga pemberian alat bantu untuk disabilitas dan lansia dan telah diberikan bantuan alat bantu untuk 89 orang.

f) Perlindungan anak dan perempuan terhadap kekerasan;
Program perlindungan anak dan perempuan terhadap kekerasan merupakan komitmen Pemerintah Kota Padang dalam menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat, khususnya kelompok rentan. Program ini bertujuan untuk mencegah serta menangani berbagai bentuk kekerasan terhadap anak dan perempuan secara terpadu dan berkelanjutan.

Peningkatan layanan perlindungan dilakukan melalui penyediaan layanan khusus yang responsif, mudah diakses, dan berorientasi pada kebutuhan korban. Upaya ini meliputi pencegahan, penanganan, serta pemulihan korban kekerasan melalui mekanisme pendampingan yang komprehensif, baik secara hukum, psikologis, maupun sosial.

Melalui program ini, diharapkan korban kekerasan terhadap anak dan perempuan memperoleh perlindungan yang optimal serta pemulihan yang layak, sekaligus mendorong peningkatan kesadaran masyarakat dalam mencegah terjadinya kekerasan di lingkungan keluarga dan sosial.
Melalui dinas DP3AP2KB telah dilakukan :

- Sosialisasi Penyediaan Layanan Pengaduan Perempuan Korban Kekerasan Di Kelurahan Batang Arau Pada Sub Keg. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Perempuan Korban Kekerasan.

- Sosialisasi Penyediaan Layanan Pengaduan Perempuan Korban Kekerasan di SMPN 28 Padang Pada Sub Keg. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Perempuan Korban Kekerasan.
- Sosialisasi Penyediaan Layanan Pengaduan Perempuan Korban Kekerasan di Kelurahan Limau Manis Pada Sub Keg. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Perempuan Korban Kekerasan.
- Sosialisasi Penyediaan Layanan Pengaduan Perempuan Korban Kekerasan di Kelurahan Kuranji Pada Sub Keg. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Perempuan Korban Kekerasan.
- Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) di Kelurahan Kampung Lapai Pada Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) Pada Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
- Sosialisasi Penyediaan Layanan Pengaduan Bagi Anak Korban Kekerasan di Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Pada Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
- Sosialisasi Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital (PAAREDI) di Kecamatan Lubuk Kilangan Pada Sub Kegiatan Penyediaan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
- Sosialisasi Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital (PAAREDI) di Kecamatan Koto Tangah Pada Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
- Sosialisasi Implementasi Manajemen Kasus bagi SDM Lembaga PATBM Azis Chan Pada Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan dan Penanganan bagi AMPK Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Sosialisasi Pencegahan Terhadap Kekerasan Anak di 11 Mesjid Kecamatan
- Join, Lets Talk & Share with P2TP2A dan Puspaga, Layanan Konseling/Curhat Permasalahan Remaja

g) Kemudahan izin investasi dan berusaha;
Pemerintah Kota Padang terus menunjukkan komitmen nyata dalam menciptakan iklim investasi dan berusaha yang kondusif melalui reformasi serta percepatan layanan perizinan di daerah. pelaksanaan program unggulan ketujuh ini mencatatkan performa yang sangat progresif dan berhasil melampaui target perencanaan yang telah ditetapkan. Keberhasilan ini menjadi salah satu katalisator penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kota dengan memangkas hambatan birokrasi bagi para pelaku usaha dan investor.
Secara spesifik, pada sektor Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), dan Surat Bukti Kepemilikan Bangunan, Pemerintah Kota Padang berhasil menyelesaikan sebanyak **1.667 dokumen** perizinan dari target awal yang dipatok sebanyak **1,000 dokumen**. Capaian mutlak yang menyentuh angka **167%** ini mencerminkan tingginya efektivitas aktivasi sistem pelayanan terpadu dan responsivitas aparatur dalam memproses legalitas aset bangunan usaha. Lonjakan realisasi ini tidak hanya memberikan kepastian hukum yang lebih cepat bagi pemilik gedung dan pelaku industri, tetapi juga memperkuat daya saing Kota Padang sebagai destinasi investasi yang ramah, efisien, dan akuntabel.

h) Peningkatan skill kepemudaan;
Program peningkatan skill kepemudaan yang diusung Pemerintah Kota Padang memberikan manfaat langsung untuk mempersiapkan generasi muda yang mandiri, berkarakter, dan berdaya saing global. Kegiatan pelatihan tahun 2025 yang telah dilaksanakan berupa pelatihan Bahasa Inggris.
Sepanjang tahun 2025, Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian telah secara masif melaksanakan program peningkatan kapasitas dan keahlian (vokasi) pemuda guna menekan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Berbagai pelatihan berbasis unit kompetensi sukses diselenggarakan dengan tingkat kelulusan uji kompetensi mencapai 100%, seperti pada program pelatihan otomotif kendaraan ringan, *digital marketing*, servis sepeda motor injeksi, perhotelan, hingga pelatihan teknis ponsel dan bahasa asing. Kegiatan strategis ini juga didukung oleh bimbingan teknis penumbuhan wirausaha baru (WUB) yang diikuti oleh 76 pelaku usaha serta kemitraan pemagangan dalam negeri bersama sektor industri. Selain itu, pelaksanaan Padang Job Fair 2025 di Gedung Bagindo Aziz Chan Youth Center yang menyediakan 806 lowongan kerja turut memfasilitasi para pencari kerja muda dalam mengakses peluang karir secara langsung.

Serangkaian intervensi pelatihan dan perluasan kesempatan kerja ini terbukti memberikan dampak positif

terhadap struktur ketenagakerjaan daerah. Melalui pembekalan *skill* yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Padang berhasil ditekan secara konsisten, dari semula 9,88% pada tahun 2024 menjadi 9,70% pada tahun 2025. Keberhasilan program ini tidak hanya mencetak generasi muda yang kompeten dan siap kerja di berbagai lini industri, tetapi juga berkontribusi langsung pada optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penguatan ekonomi masyarakat di Kota Padang.

6. Padang Rancak Padang Rancak diwujudkan dalam bentuk aktivasi berupa:

a) Taman tematik per kecamatan;
b) Pengendalian banjir terpadu;
c) Pengelolaan sampah terpadu dan penataan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) modern;
d) Perbaikan jalan dan drainase kota;
e) Trotoar ramah pejalan kaki;
f) Transportasi publik dan pemberhentian ramah warga.
g) Revitalisasi Pasar Raya dan pasar satelit

Gambar 2- 70 Aktivasi Progul Padang Rancak Tahun 2025



Intervensi pembangunan dan penataan infrastruktur fisik pasar berhasil mencapai target kinerja sebesar 100%. Realisasi program infrastruktur ini meliputi beberapa proyek strategis, di antaranya pembangunan fisik Pasar Ulak Karang, pelaksanaan revitalisasi Pasar Raya Fase VII, serta langkah penataan pedagang kaki lima (PKL) secara terpadu di kawasan Pasar Raya Barat dan koridor Permindo. Melalui ketercapaian target mutlak ini, program revitalisasi tidak hanya berhasil mengubah wajah pusat niaga Kota Padang menjadi lebih tertata, tertib, dan aman bagi aktivitas ekonomi Masyarakat.

7. Padang Sigap Padang Sigap diwujudkan dalam bentuk aktivasi berupa :

a) Dubalang kota;
   Pembentukan “Dubalang Kota” sebagai mitra aktif dalam menjaga keamanan berbasis kearifan local. Pada Tahun 2024 telah dilakukan rekrument dan pelatihan Dubalang Kota yang dilaksanakan di SPN Polda Sumbar selama 3 (tiga) hari pada tanggal 2 s.d 4 September 2024. Untuk sarana dan prasarana berupa Pakaian Dubalang serta pengadaan kendaraan Dubalang Kota juga telah di adakan pada tahun 2025.
b) Sigap Call Center;
   Untuk Sigap Call Center berupa penanganan terhadap korban bencana alam dan sosial dan telah diberikan bantuan berupa makanan, sandang, tempat pengungsian untuk 3.527 orang melalui Dinas Sosial Kota Padang.

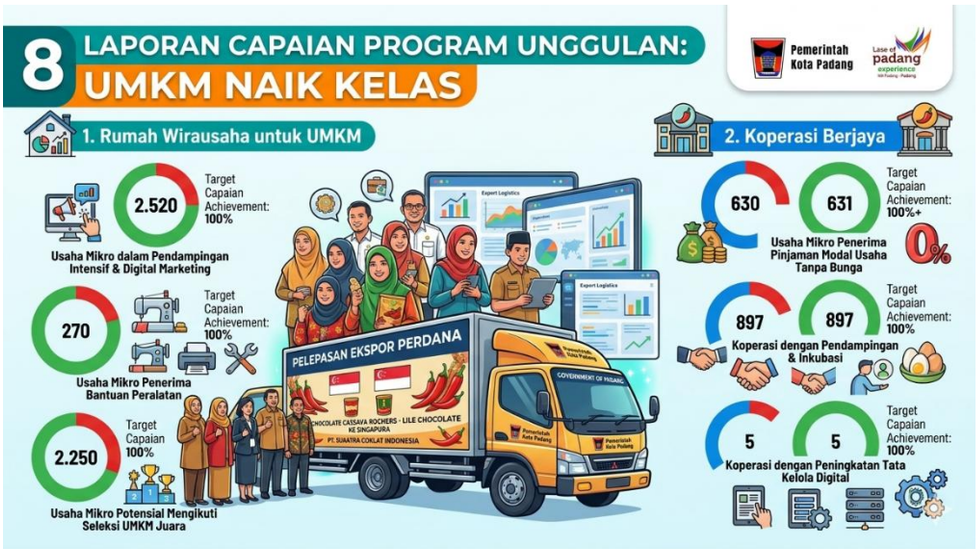
c) Dokter warga.
   Program Dokter Warga merupakan inovasi pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya bagi warga yang mengalami kendala dalam menjangkau fasilitas kesehatan.

   Dokter Warga adalah tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan secara langsung ke rumah warga. Layanan ini ditujukan bagi masyarakat dengan keterbatasan akses, baik karena kondisi fisik, usia lanjut, keterbatasan ekonomi, maupun hambatan lainnya.

   Melalui program ini, diharapkan masyarakat tetap memperoleh pelayanan kesehatan yang cepat, tepat, dan berkualitas tanpa harus datang ke fasilitas kesehatan. Program ini juga menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Padang dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang proaktif, merata, dan berkeadilan, serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh.
   Melalui dinas Kesehatan kota padang telah dilakukan:
   - Sosialisasi kegiatan Dokter Warga kepada tenaga kesehatan dan masyarakat terkait pemahaman program unggulan, SOP, alur pelayanan dan jadwal kunjungan Tim Warga dan kerja sama dengan Kominfo
   - Menerima panggilan dari masyarakat melalui PSC 119 terkait pertolongan kesehatan, dimana telah dibentuk zonasi pelayanan kegawatdaruratan jejaring PSC 119 dalam menindaklanjuti respon time 15 menit. Tahun 2025 telah dilayani sebanyak 978 orang.
   - Melakukan kunjungan berkala ke rumah warga yang memerlukan pelayanan Kesehatan sebanyak 382 kunjungan.
   - Melakukan pengumpulan data terkait jumlah kunjungan yang dilakukan oleh Dokter Warga di 24 Puskesmas.

1. UMKM Naik Kelas

Gambar 2- 71 Capaian Program Unggulan UMKM Naik Kelas Tahun 2025



Diwujudkan dalam bentuk aktivasi berupa :

a) Rumah wirausaha untuk Usaha mikro;

Program Unggulan UMKM Naik Kelas Pemerintah Kota Padang telah mencapai keberhasilan luar biasa, dengan 100% target terpenuhi pada semua metrik yang ada. Di bawah pilar "Rumah Wirausaha untuk UMKM", sebanyak 2.520 pelaku usaha mikro telah mendapatkan pendampingan intensif dan pelatihan digital marketing, sementara 270 pelaku usaha lainnya menerima bantuan peralatan vital untuk meningkatkan kapasitas produksi. Selain itu, seleksi "UMKM Juara" yang diikuti oleh 2,250 peserta potensial juga berjalan sukses penuh.

b) Koperasi berjaya.

Sektor koperasi juga menunjukkan performa gemilang melalui inisiatif "Koperasi Berjaya". Sebanyak 631 usaha mikro telah mendapatkan manfaat dari subsidi margin melalui pinjaman modal usaha tanpa bunga, melampaui target awal 630 peserta. Lebih jauh, 897 koperasi di Kota Padang telah menerima pendampingan dan inkubasi, dan 5 koperasi perintis telah sepenuhnya meningkatkan tata kelola digital mereka. Pencapaian ini menegaskan komitmen kuat Pemerintah Kota Padang dalam memajukan UMKM dan koperasi.

9. Jelajah Padang Jelajah Padang

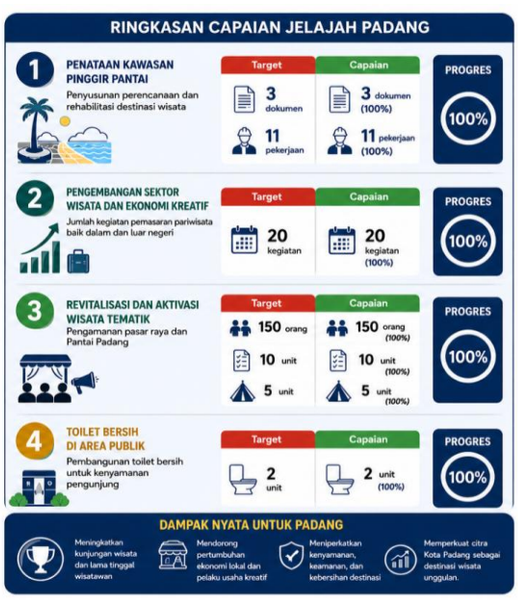
diwujudkan dalam bentuk aktivasi berupa :

a) Penataan kawasan pinggir pantai;
b) Pengembangan sektor wisata dan ekonomi kreatif;
c) Revitalisasi dan aktivasi wisata tematik
d) Toilet bersih di area publik.

Program Unggulan Jelajah Padang merupakan wujud komitmen Pemerintah Kota Padang dalam memperkuat sektor pariwisata melalui penataan destinasi, pengembangan ekonomi kreatif, revitalisasi kawasan wisata tematik, serta peningkatan kualitas fasilitas publik. Selama periode pelaksanaan, seluruh target utama berhasil dicapai sebesar 100 persen. Capaian tersebut meliputi penyusunan 3 dokumen perencanaan destinasi wisata, rehabilitasi 11 pekerjaan pada destinasi wisata, pelaksanaan 20 kegiatan pengembangan sektor wisata dan ekonomi kreatif, aktivasi wisata tematik yang melibatkan 150 orang, pengadaan 10 unit sarana pendukung dan 5 unit tenda pengamanan, serta pembangunan 2 unit toilet bersih di area publik. Keberhasilan ini menunjukkan efektivitas pelaksanaan program dalam memperkuat daya saing destinasi wisata Kota Padang secara terencana dan berkelanjutan.

e) Secara substantif, capaian Program Jelajah Padang memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas layanan kepariwisataan, kenyamanan pengunjung, serta penguatan aktivitas ekonomi masyarakat. Penataan kawasan dan penyediaan fasilitas publik yang memadai mendorong terciptanya destinasi yang lebih bersih, aman, dan menarik, sementara berbagai kegiatan promosi serta pengembangan ekonomi kreatif memperluas peluang usaha masyarakat dan memperkuat citra Kota Padang sebagai destinasi wisata unggulan. Ke depan, hasil yang telah dicapai menjadi fondasi penting untuk meningkatkan kolaborasi antarpemangku kepentingan, memperluas inovasi pengembangan destinasi, serta mewujudkan pariwisata yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan.

Gambar 2- 72 Capaian Progul Jelajah Padang Tahun 2025



Sumber : Dinas Pariwisata Kota Padang, 2026

2.10. Isu Strategis Pembangunan Daerah

Isu strategis yang berkembang dalam masyarakat global yang akan turut mempengaruhi tatanan kehidupan masyarakat antara lain:

1) Megatrend Dunia

Tantangan global ke depan akan semakin kompleks seiring dengan perubahan yang sangat cepat di segala bidang atau yang dikenal sebagai *megatrend global*. Perubahan global tersebut merupakan perubahan transformative berskala besar, berjangka waktu panjang, dan bersifat sangat masif terutama disebabkan oleh kemajuan teknologi digital dan komputasi termasuk kecerdasan buatan (*artificial intelligence*).

Terdapat sepuluh megatren global yang akan dihadapi menuju 2045. Megatren global memiliki dua sisi, yaitu memberikan potensi kemajuan bagi kondisi sosial ekonomi global, tetapi di sisi lain juga memberikan disrupsi. Perubahan-perubahan tersebut meliputi (i) perkembangan demografi global, (ii) geopolitik dan geoekonomi, (iii) perkembangan teknologi, (iv) peningkatan urbanisasi dunia, (v) konstelasi perdagangan global, (vi) tata kelola keuangan global, (vii) pertumbuhan kelas menengah (middle class), (viii) peningkatan persaingan pemanfaatan sumber daya alam, (ix) perubahan iklim, dan (x) pemanfaatan luar angkasa (*space economy*), dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2- 73 Megatren Global 2045



Sumber: RPJPN Tahun 2025-2045

Dalam upaya menghadapi megatrend dunia ini, maka pemerintah, perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya harus secara berhati-hati dalam merespon, mendiagnosa, menganalisis, mendesain strategi masa depan dan proses perencanaan yang konsisten dan berkelanjutan agar perubahan ini berdampak positif dan berkelanjutan.

2) *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (SDGs) yang selanjutnya disingkat TPB adalah agenda pembangunan global untuk mengakhiri kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan melindungi planet, melalui pencapaian 17 (tujuh belas) tujuan sampai Tahun 2030. Ketujuh belas tujuan TPB tersebut, yaitu (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; dan (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Pelaksanaan TPB di Indonesia diatur melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang memuat tujuan TPB, yaitu untuk 1) menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan; 2) menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat; 3) menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif; dan 4) terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Komitmen pencapaian TPB melibatkan berbagai pihak, tidak hanya pemerintah tetapi juga non-pemerintah, baik di tingkat nasional maupun daerah hingga desa. Komitmen pelaksanaan di tingkat nasional dilaksanakan melalui penyusunan Peta Jalan TPB 2030, Metadata Indikator TPB, Rencana Aksi Nasional (RAN), laporan tahunan, dan laporan kepada PBB yang disampaikan melalui *Voluntary National Review* (VNR). Sementara itu, komitmen pelaksanaan TPB di tingkat daerah terwujud dengan Rencana Aksi Daerah tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dan untuk keterlibatan pemangku kepentingan nonpemerintah terwujud melalui SDGs Center/Network/Hub di perguruan tinggi, serta perusahaan/asosiasi yang memiliki program/kegiatan berdasarkan empat pilar utama.

Penyusunan kebijakan, rencana dan perlu memperhatikan dan mempertimbangkan dampak dan/atau risiko lingkungan yang tidak diinginkan, yang telah dikaji secara mendalam sewaktu menyusun KLHS RPJMD Kota Padang Tahun 2025-2030. Analisis pencapaian TPB/SDGs di Kota Padang dilakukan dengan menyandingkan antara target indikator TPB/SDGs yang tertuang dalam Peraturan Presiden RI Nomor 59 Tahun 2017 dengan data TPB/SDGs Kota Padang sehingga diperoleh klasifikasi penilaian capaian indikator TPB/SDGs yang terbagi dalam 4 (empat) kategori: a. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target/SS b. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai

target/SB c. Indikator TPB yang tidak ada/belum ada data/NA d. Indikator TPB yang bukan kewenangan/BK

Setelah dilakukan crosscutting dan pengurutan prioritas, maka ditetapkan isu PB Strategis KLHS RPJMD Kota Padang Tahun 2025-2030 adalah sebagai berikut:

1. Masih tingginya angka kemiskinan,
2. Tingginya Kenakalan Remaja, Degradasi Moral,
3. Belum optimalnya pelayanan Kesehatan,
4. Belum optimalnya pengelolaan persampahan dan rendahnya kesadaran / partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah,
5. Belum tersedianya drainase yang memadai dan berdaya guna untuk separasi limbah dan air hujan,
6. Belum terpenuhinya sanitasi layak,
7. Tingginya Frekuensi dan intensitas Kebencanaan (Gempa, Tsunami, Kekeringan, Cuaca Ekstrim, dll),
8. Alih Fungsi lahan

2.10.1. Isu Strategis Nasional

Isu-isu Nasional menjadi perhatian dalam setiap proses perencanaan pembangunan di daerah maupun nasional. Bagaimanapun isu-isu yang dirumuskan ke depannya berusaha untuk menjawab serta mengantisipasi tantangan serta ancaman dalam jangka panjang. Dalam pembangaunan di Kota Padang berikut isustrategis nasional yang menjadi perhatian dalam perumusan masalah Pembangunan lima tahun adalah tantangan Pembangunan yang telah dirumuskan di dalam dokumen RPJMN 2025-2029.

RPJM Nasional adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029 dan telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2025. Selanjutnya, pembangunan nasional ke depan akan berpedoman pada RPJMN 2025-2029 yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program pasangan Presiden dan Wakil Presiden dan disusun berdasarkan RPJP Nasional 2025-2045.

RPJM Nasional memuat strategi Pembangunan Nasional, kebijakan umum, program kementerian/lembaga dan lintas kementerian/lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Dokumen ini akan menjadi panduan strategis dalam mencapai target pembangunan nasional demi mewujudkan Indonesia yang maju, inklusif, dan berkelanjutan.

Adapun Tantangan Pembangunan Nasional menurut RPJMN 2025-2029 adalah:

1) Rendahnya produktivitas; Tingkat produktivitas masih rendah di tengah persaingan global yang semakin meningkat. Mengacu pada rilis laporan *Asian Productivity Organization* (2024), rata-rata produktivitas Indonesia yang tercermin dari *Total Factor Productivity* selama tahun 2015-2022 hanya tumbuh positif sebesar 60 basis poin dari periode sebelumnya tahun 2010-2015 (-0,9 persen ke -0,3 persen). Kondisi produktivitas yang rendah di antaranya disebabkan oleh kualitas sumber daya manusia yang masih tertinggal, terlebih pada perempuan, produktivitas sektor ekonomi yang rendah, kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi yang tertinggal, serta kelembagaan seperti sistem insentif, regulasi, dan kepastian hukum yang masih lemah. Rendahnya produktivitas tenaga kerja perempuan dipengaruhi oleh lingkungan kerja yang belum mendukung mereka untuk masuk dan bertahan di pasar kerja, antara lain norma sosial budaya yang membebankan peran pengasuhan dan tugas domestik pada perempuan, jam kerja yang kurang fleksibel, serta minimnya akses layanan daycare berkualitas yang terjangkau.
2) Rendahnya kualitas sumber daya manusia; Rendahnya kualitas sumber daya manusia antara lain dicerminkan dari capaian rata-rata nilai *Programme for International Student Assessment* siswa Indonesia untuk semua aspek (membaca, matematika, dan sains) masih tertinggal dibandingkan siswa negara OECD. Selain itu, juga terdapat tantangan rendahnya daya saing tenaga kerja yang tercermin dari rendahnya pendidikan tenaga kerja. Data Survei Angkatan Kerja Nasional 2024 menunjukkan bahwa 52,32 peren penduduk yang termasuk angkatan kerja merupakan lulusan pendidikan rendah (SMP/MTs ke bawah).
3) Pergeseran struktur kelas masyarakat; Calon kelas menengah merupakan kelompok sosial ekonomi terbesar di Indonesia yang jumlahnya cenderung meningkat. Disisi lain, jumlah warga yang rentan miskin juga meningkat. Risiko pergeseran status dari kelas menengah menjadi calon kelas menengah dan rentan miskin,disebabkan oleh tingginya angka pemutusan hubungan kerja. Salah satu faktor yang memicu terjadinya pemutusan hubungan kerja adalah rendahnya daya beli masyarakat.
4) Kebutuhan hidup tinggi pada usia produktif; Berdasarkan data BPS (2023), jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) diproyeksikan mencapai 147,71juta jiwa. Hal ini menjadi tantangan pembangunan, yaitu tingginya kebutuhan hidup masyarakat dengan terbatasnya ketersediaan sumber daya alam (pangan, energi, dan air) serta lahan. Selain itu, terdapat kewajiban terhadap pemenuhan perlindungan sosial, jaminan kesehatan, pendidikan, dan pembukaan lapangan pekerjaan.
5) Krisis lingkungan; Perkembangan dunia saat ini dihadapkan dengan tiga krisis lingkungan yang mengancam masa depan bumi dan manusia, yaitu perubahan iklim, hilangnya

keanekaragaman hayati, serta polusi dan kerusakan lingkungan.

6) Geopolitik dan geoekonomi; Perkembangan risiko geopolitik dapat berdampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan dan tatanan global. Salah satu tantangan geopolitik yang perlu diantisipasi Indonesia adalah eskalasi pcrsaingan antamegara adidaya yang meluas dan memunculkan kekuatan baru. Kemunculan berbagai kekuatan baru telah memengaruhi perkembangan kondisi di kawasan maupun tatanan global, serta sikap Indonesia dalam dunia intemasional.

7) Tata kelola dan akuntabilitas pemerintah; Pemberantasan korupsi merupakan isu strategis yang membutuhkan sinergi dari semua pemangku kepentingan. Hal ini menjadi prasyarat upaya percepatan pencapaian sasaran pembangunan nasional. Selanjutnya, tata kelola data memainkan peran kunci dalam mendukung pembangunan nasional, terutama dalam pengambilan keputusan yang lebih akurat, efektif, dan berkelanjutan. Tingkat keamanan data privasi dan siber untuk data pemerintah dan nasional belum sepenuhnya dapat mengantisipasi terjadinya risiko peretasan dan pembajakan yang dapat menciptakan potensi pelanggaran privasi dan ancaman keamanan.

Selanjutnya RPJMN Tahun 2025-2029 memuat delapan Prioritas Nasional pembangunan jangka menengah. Prioritas Nasional ini merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden. Asta Cita sebagai Prioritas Nasional tersebut selaras dengan agenda transformasi RPJPN Tahun 2025-2045. Keterkaitan erat Prioritas Nasional dan strategi transformasi RPJPN Tahun 2025-2045 menjadi integrasi kebijakan yang tangguh untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka perencanaan Pembangunan Kota Padang periode 2025-2029 harus memperhatikan dan terintegrasi serta selaras dengan prioritas Pembangunan nasional. Prioritas Nasional adalah struktur pokok seluruh rencana pembangunan RPJMN Tahun 2O25-2O29. Untuk pencapaian sasarannya, setiap prioritas Nasional diterjemahkan dalam Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas yang memiliki sasaran terukur untuk memudahkan pelaksanaannya di Kementerian/ lambaga, Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha (BUMN, Swasta). Setiap Prioritas Nasional mencakup langkah-langkah strategis untuk mencapai keberhasilan pembangunan dalam periode jangka menengah 2025-2029.

Gambar 2- 74 Program Prioritas Pembangunan Nasional RPJMN 2025-2029



Sumber: RPJMN Tahun 2025-2029

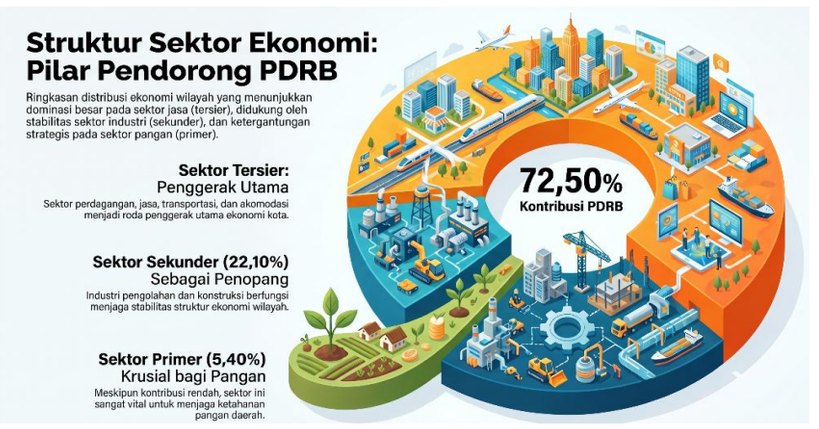
2.10.2. Isu strategis Daerah

Isu Strategis Kota Padang untuk pembangunan lima tahun ke depan sebagai berikut :

1) Resiliensi Pangan dan Pertanian

Perekonomian Kota Padang saat ini berada pada fase pemulihan yang stabil namun menghadapi tantangan struktural yang dinamis. Sebagai pusat perdagangan dan jasa di Sumatra Barat, struktur PDRB Kota Padang masih didominasi oleh sektor tersier. Namun, fluktuasi harga komoditas global dan nasional memberikan tekanan langsung pada tingkat inflasi daerah, khususnya pada kelompok pengeluaran bahan makanan *(volatile foods)*.

Gambar 2- 75 Struktur Sektor Ekonomi Pilar Pendorong PDRB Kota Padang



Sumber : BPS Kota Padang, 2026

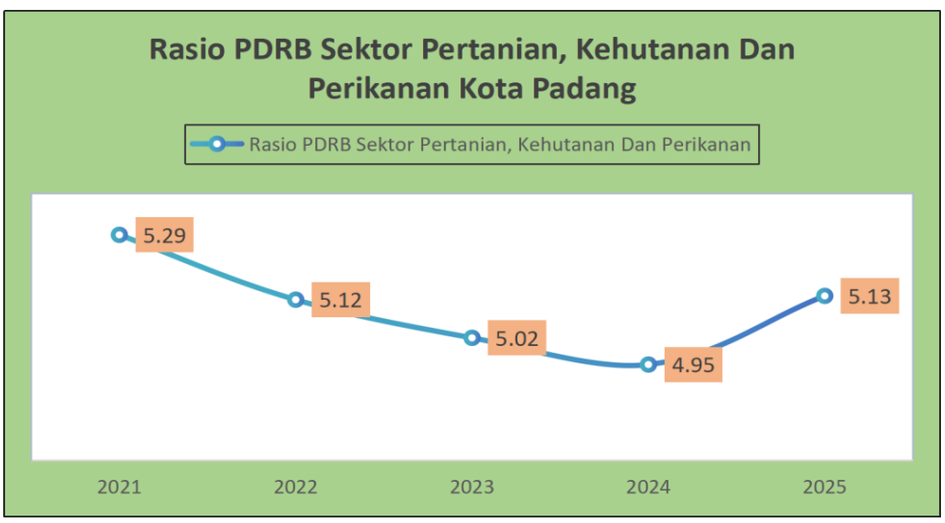
Dalam konteks resiliensi pangan, Kota Padang memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap pasokan pangan dari daerah *hinterland* (kabupaten/kota tetangga). Alih fungsi lahan pertanian yang terus terjadi akibat ekspansi kawasan permukiman dan perdagangan menjadi ancaman nyata bagi kapasitas produksi pangan lokal. Oleh karena itu, penguatan rantai pasok, optimalisasi lahan pertanian perkotaan (*urban farming*), serta penguatan cadangan pangan pemerintah daerah menjadi urgensi strategis guna memastikan stabilitas harga dan aksesibilitas pangan bagi seluruh lapisan masyarakat.

2) Ekonomi Hijau

Ekonomi Hijau adalah model pembangunan ekonomi untuk menunjang pembangunan berkelanjutan dengan fokus pada investasi, kapital dan infrastruktur, lapangan kerja dan keterampilan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan. Indeks Ekonomi Hijau ditujukan sebagai alat untuk mengukur progres dan capaian transformasi ekonomi menuju Ekonomi Hijau secara tangible, representatif, dan akurat.

Penghitungan Indeks Ekonomi Hijau pada level kota dilakukan dengan menghitung rasio PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (%) terhadap PDRB harga berlaku 2021-2025. Berdasarkan hasil perhitungan terhadap indikator Indeks Ekonomi Hijau Kota Padang pada tahun 2021-2025 diperoleh sebagai berikut:

Gambar 2- 76 Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanana Kota Padang Tahun 2021-2025

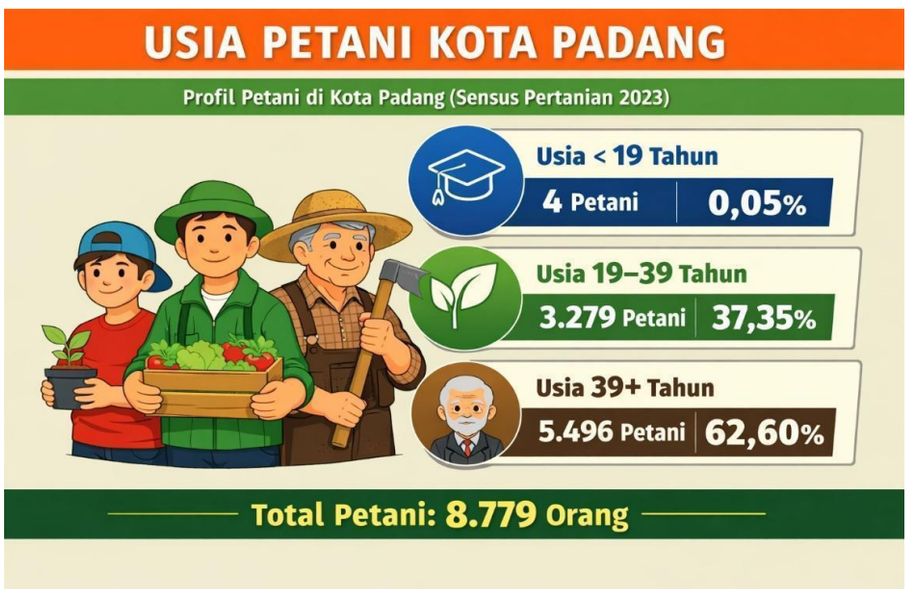


Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Padang, 2026

Dari data diatas dapat dilihat bahwa perkembangan nilai rasio PDRB subsektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tersebut mengalami fluktuasi. Rasio subsektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB terus menurun dari 5,29% pada tahun 2021 menjadi 4,95% pada tahun 2024. Hal ini terjadi kemungkinan diakibatkan luas lahan pertanian yang terus mengalami penurunan dari tahun 2021 ke tahun 2024. Dari tahun 2021-2024 luas sawah beririgasi berkurang

sebanyak 171.82Ha. Dari 4.133,31 di tahun 2021 ke 3.961,49 di Tahun 2024. Namun di tahun 2025 terjadi peningkatan menjadi 5.844,44Ha. Ini berakibat adanya *rebound* atau pemulihan kontribusi sektor, meski belum menyamai level 2021.

Gambar 2- 77 Profil Petani di Kota Padang Tahun 2022



Sumber: BPS Kota Padang, 2023

Pengurangan rasio PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan ini salah satunya juga disebabkan minat masyarakat khususnya generasi muda untuk berusaha di sektor pertanian makin berkurang. Gambar di atas menggambarkan struktur demografi petani dimana mayoritas (62,60%) berusia di atas 40 tahun, sementara hanya 0,05% yang berusia di bawah 19 tahun dan sisanya 37,35% petani dengan usia 19-39 tahun Kondisi ini menegaskan tantangan regenerasi tenaga kerja pertanian, sekaligus peluang untuk mendorong keterlibatan generasi muda melalui inovasi, teknologi, dan dukungan kebijakan. Selain itu belum maksimalnya pengelolaan sektor kehutanan untuk menjadi sumber PDRB Kota Padang menjadi salah satu penyebab rendahnya nilai indeks ekonomi hijau ini. Pemulihan di 2025 Bisa dikaitkan dengan kebijakan berupa intervensi pemerintah dalam bentuk bantuan untuk kelompok pertanian, perbaikan harga komoditas, atau peningkatan produksi. Pemulihan harus dijaga dengan program berkelanjutan (modernisasi pertanian, perlindungan lahan, diversifikasi usaha tani).

3) *Ekonomi Biru*

Ekonomi biru dipandang sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru di Kawasan barat Indonesia. Sektor ini berkaitan erat dengan perikanan yang tersusun atas dua komponen yaitu perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Data yang dihasilkan akan menunjukkan kondisi bahwa semakin tinggi persentase sektor perikanan dalam struktur PDRB, menandakan semakin baik pula kinerja dan produktivitas sektor perikanan di Kota Padang. Kondisi ini

sekaligus menunjukkan adanya peningkatan kuantitas, kualitas, dan nilai produksi perikanan di Kota Padang. Untuk mengukur perkembangan ekonomi biru, pada tahun 2023 lalu telah diluncurkan Indeks Ekonomi Biru Indonesia yang disusun dari beberapa indikator perekonomian makro, yang dapat mencerminkan perkembangan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan yang terkait dengan sektor Ekonomi Biru. Penghitungan Indeks Ekonomi Biru Indonesia/ Indonesia Blue Economy Index (IBEI) hingga saat ini masih berada pada tahapan pengembangan, sehingga untuk Kota Padang, indikator ini dihitung dari Kontribusi PDRB Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB. Nilai tersebut mencirikan kondisi sejauh mana pemanfaatan sumber daya laut telah berdampak pada ekonomi daerah.

Gambar 2- 78 Rasio PDRB Sektor Perikanan Kota Padang Tahun 2021-2025



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Padang, 2026

Grafik di atas menyajikan data mengenai kontribusi subsektor perikanan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kota Padang dari tahun 2021 hingga 2025. Secara umum kontribusi PDRB Sub Sektor Perikanan (%) di Kota Padang pada kurun waktu tahun 2021-2025 berfluktuasi. Data tersebut menunjukkan tren penurunan bertahap yang dimulai dari angka 3,45% pada tahun 2021 hingga mencapai titik terendah sebesar 3,28% pada tahun 2024. Namun, data tersebut menunjukkan adanya pemulihan signifikan pada tahun 2025 dengan kenaikan kembali ke angka 3,44%.

Dari 2021-2024, penyebab terjadinya penurunan bertahap kontribusi subsektor perikanan terhadap PDRB bisa dikarenakan faktor iklim, overfishing atau keterbatasan sarana dan kendala distribusi atau pasar yang membuat hasil perikanan kurang optimal masuk ke PDRB. Di 2025 ada pemulihan signifikan setelah tren menurun. Hal ini bisa diartikan adanya kebijakan atau program penguatan subsektor perikanan (misalnya bantuan nelayan, pengembangan budidaya,

atau perbaikan rantai pasok), perbaikan harga komoditas perikanan di pasar, dan peningkatan investasi atau inovasi di sektor perikanan.

4) *Pencegahan dan Pengendalian HIV/AIDS, Tuberkulosis dan Malaria (PP ATM)*

   Penanggulangan penyakit menular, khususnya HIV/AIDS, Tuberkulosis (TB), dan malaria, merupakan bagian penting dalam mendukung Prioritas Nasional (PN) bidang kesehatan, terutama dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagaimana tertuang dalam RPJMN. Fokus ini sejalan dengan agenda pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat sehat, produktif, dan berdaya saing.

   Di Kota Padang, perkembangan kasus HIV/AIDS menunjukkan tren peningkatan yang perlu mendapat perhatian serius. Kondisi ini berkaitan dengan masih terbatasnya cakupan deteksi dini, perilaku berisiko, serta stigma terhadap Orang dengan HIV/AIDS (ODHA). Hal ini menjadi tantangan dalam mendukung target nasional pengendalian HIV/AIDS menuju eliminasi pada tahun 2030, serta pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan.

   Tuberkulosis (TB) juga masih menjadi masalah kesehatan utama dengan beban kasus yang tinggi, khususnya pada kelompok usia produktif. Hal ini berimplikasi langsung terhadap produktivitas ekonomi dan kualitas tenaga kerja. Penanggulangan TB di Kota Padang perlu diperkuat untuk mendukung target nasional eliminasi TB tahun 2030, melalui peningkatan penemuan kasus, keberhasilan pengobatan, serta integrasi layanan TB-HIV sebagaimana diarahkan dalam kebijakan nasional.

   Sementara itu, malaria di Kota Padang relatif terkendali, namun tetap memerlukan kewaspadaan dalam rangka mempertahankan status eliminasi malaria nasional. Mobilitas penduduk dan potensi kasus impor menjadi faktor risiko yang harus diantisipasi melalui penguatan surveilans, deteksi dini, dan pengendalian vektor. Hal ini sejalan dengan prioritas nasional dalam menjaga keberlanjutan eliminasi malaria di Indonesia.

   Selain aspek penyakit, penguatan sistem kesehatan daerah juga menjadi bagian dari prioritas nasional, khususnya dalam transformasi sistem kesehatan. Di Kota Padang, masih terdapat tantangan dalam pemerataan akses layanan kesehatan, keterbatasan tenaga kesehatan, serta belum optimalnya layanan promotif dan preventif. Kondisi ini berdampak pada belum maksimalnya upaya pengendalian penyakit menular secara komprehensif dan berkelanjutan.

   Dengan demikian, isu strategis yang relevan dengan Prioritas Nasional dalam RKPD Kota Padang Tahun 2027 meliputi:

   - Meningkatnya kasus HIV/AIDS serta belum optimalnya

deteksi dini dan kesinambungan pengobatan dalam mendukung target eliminasi HIV nasional.

- Tingginya beban Tuberkulosis, khususnya pada usia produktif, yang menghambat pencapaian target eliminasi TB nasional.
- Perlunya mempertahankan status eliminasi malaria melalui kewaspadaan terhadap kasus impor dan penguatan surveilans.
- Belum optimalnya transformasi sistem kesehatan di daerah, terutama dalam pemerataan akses dan penguatan layanan promotif-preventif.
- Masih adanya stigma dan rendahnya literasi kesehatan masyarakat yang menghambat pencapaian target pembangunan kesehatan nasional.

Oleh karena itu, arah kebijakan yang perlu ditempuh adalah penguatan deteksi dini dan skrining aktif, integrasi layanan HIV-TB, peningkatan akses dan kualitas pengobatan, penguatan surveilans berbasis masyarakat, serta akselerasi transformasi sistem kesehatan daerah. Upaya ini diharapkan dapat berkontribusi langsung terhadap pencapaian Prioritas Nasional, khususnya dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas sumber daya manusia di Kota Padang.

2. *Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Kreatif dan Inovatif*

Isu Strategisnya adalah :

a. Pengembangan Pendidikan berkualitas
b. Pelatihan dan pengembangan kompetensi
c. Pengembangan lingkungan kreatif
d. Pengembangan budaya inovasi
e. Pemberdayaan masyarakat
f. Peningkatan akses teknologi dan informasi

1) Pembangunan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan

Isu Strategisnya adalah:

a. Divesifikasi sektor ekonomi
b. Pemberdayaan ekonomi lokal melalui usaha kecil dan mikro
c. Infrastruktur pendukung pembangunan ekonomi
d. Promosi investasi dan kemitraan pemerintah dan swasta
e. Pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan
f. Peningkatan daya saing
g. Pemberdayaan digital dan inovasi teknologi

2) Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih

Isu Strategisnya adalah:

a. Transparansi dan akuntabilitas
b. Partisipasi masyarakat
c. Pemberantasan korupsi
d. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia
e. Penggunaan teknologi informasi
f. Pemantauan kinerja dan evaluasi program
g. Perlindungan hak asasi manusia

3) Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum Daerah

Isu Strategisnya adalah:

a. Peningkatan keamanan dan ketertiban umum
b. Optimalisasi sistem keamanan
c. Penanggulangan kejahatan
d. Pengelolaan lalu lintas dan transportasi publik
e. Penanganan Krisis dan Bencana
f. Pemberdayaan Masyarakat dalam Keamanan
g. Perdamaian Sosial

4) Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi

Isu Strategisnya adalah:

a. Pelestarian dan Pemberdayaan Budaya Lokal
b. Ketahanan Ekologi
c. Peningkatan Kualitas Hidup dan Pemerataan Pembangunan
d. Penanganan Ketidaksetaraan dan Kemiskinan
e. Pengembangan Infrastruktur Ramah Lingkungan
f. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan

5) Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkualitas

Isu Strategisnya adalah:

a. Pengembangan Infrastruktur di Seluruh Wilayah
b. Pemberdayaan Ekonomi Lokal
c. Penyediaan Fasilitas Pendidikan dan Kesehatan Merata
d. Pengembangan Pusat-Pusat Pelayanan
e. Pemantapan Transportasi Publik
f. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
g. Konservasi Lingkungan dan Kearifan Lokal
h. Peningkatan Akses Teknologi Informasi

6) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kota yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan

Isu Strategisnya adalah:

a. Pengembangan Infrastruktur Berkualitas
b. Peningkatan Kualitas Bangunan Publik
c. Penyediaan Ruang Terbuka Publik
d. Inovasi Teknologi dalam Pelayanan Publik
e. Pengelolaan Sampah dan Limbah yang Berkelanjutan
f. Pemberdayaan Transportasi Berkelanjutan
g. Penghijauan dan Pelestarian Lingkungan
h. Peningkatan Daya Tahan Terhadap Bencana

7) Kesinambungan Pembangunan

Isu Strategisnya adalah:

a. Integrasi Pembangunan Berkelanjutan
b. Pemanfaatan Sumber Daya secara Bijaksana
c. Peningkatan Kualitas Hidup
d. Pemberdayaan Ekonomi yang Inklusif
e. Adopsi Teknologi Hijau dan Inovasi
f. Partisipasi Masyarakat dan Pemberdayaan Lokal
g. Resilien Kota terhadap Perubahan Iklim
h. Peningkatan Literasi Lingkungan dan Sosial

Isu strategis ini perlu didukung dengan empat transformasi yang menjadi program nasional, sebagai berikut:

a. Transformasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam (pembangunan Ekonomi Hijau); dengan memperhatikan isu strategis:
   1. Pengembangan Ekonomi Berkelanjutan
   2. Keadilan dan Pemerataan Ekonomi

3. Pengembangan Industri dan Inovasi
4. Liberalisasi Perdagangan dan peningkatan daya saing produk
5. Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan
6. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan

b. Transformasi dalam pembangunan sumber daya manusia dan pelestarian sosial budaya ini dengan isu strategis:
   1. Peningkatan Mutu Pelayanan Pendidikan
   2. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat berbasis keluarga
   3. Pemberdayaan Masyarakat berbasis kelurahan
   4. Pemajuan Kebudayaan dan Tatanan sosial berbasis budaya lokal
   5. Pelestarian warisan budaya dan sejarah
c. Transformasi dalam Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan; dengan isu strategis
   1. Infrastruktur yang Berkelanjutan
   2. Konektivitas dan Aksesibilitas
   3. Pengelolaan Risiko dan mitigasi bencana
   4. Adaptasi Perubahan Iklim dan Lingkungan
   5. Partisipasi Masyarakat dan Pemberdayaan
d. Transformasi dalam pembangunan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan dengan isu strategis
   1. Transparansi dan Akuntabilitas
   2. Anti Korupsi dan Etika Pemerintahan
   3. Kolaborasi Antar lembaga/institusi pemerintah
   4. Perubahan Budaya Organisasi dan Inovasi
   5. Peningkatan Kapasitas dan kualitas SDM

2.11. Inovasi Daerah

Dalam upaya menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks serta memperkuat daya saing daerah, Pemerintah Kota Padang secara konsisten menjadikan inovasi daerah sebagai salah satu strategi utama dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan ekosistem inovasi yang melibatkan seluruh Perangkat Daerah, pelaksanaan Kompetisi Antar Instansi Inovasi Kota Padang (Tari Indang), pembinaan dan pendampingan inovasi, serta pelaporan inovasi secara sistematis melalui aplikasi Indeks Inovasi Daerah (IID) yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Indeks Inovasi Daerah merupakan instrumen nasional yang digunakan untuk mengukur tingkat inovasi pemerintah daerah berdasarkan himpunan inovasi yang dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai bentuk pembaruan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penilaian ini merupakan implementasi amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 388 ayat (9) dan ayat (11), yang mengamanatkan bahwa Pemerintah Pusat melakukan penilaian terhadap inovasi daerah serta memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada pemerintah daerah yang berhasil melaksanakan inovasi. Ketentuan tersebut kemudian dijabarkan

lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah yang bertujuan meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah.

Komitmen Pemerintah Kota Padang dalam membangun budaya inovasi menunjukkan hasil yang positif. Hal ini tercermin dari peningkatan capaian Indeks Inovasi Daerah selama lima tahun terakhir sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2- 110 Indeks Inovasi Daerah Kota Padang Tahun 2021–2025

Tahun	Skor	Predikat
2021	47,44	Inovatif
2022	48,18	Inovatif
2023	61,17	Sangat Inovatif
2024	63,72	Sangat Inovatif
2025	67,64	Sangat Inovatif

Sumber: Bappeda Kota Padang, 2026

Selama periode 2021–2025, skor Indeks Inovasi Daerah Kota Padang meningkat sebesar 20,20 poin, dari 47,44 menjadi 67,64 atau mengalami peningkatan sekitar 42,6 persen. Sejak tahun 2023, Kota Padang berhasil mempertahankan predikat "Sangat Inovatif" selama tiga tahun berturut-turut. Capaian tersebut menunjukkan bahwa inovasi telah berkembang menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sekaligus mencerminkan meningkatnya komitmen pemerintah daerah dalam mendorong reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pada Tahun 2025, Pemerintah Kota Padang mencatat 157 inovasi daerah yang berasal dari berbagai Perangkat Daerah, kecamatan, puskesmas, serta satuan pendidikan. Dari jumlah tersebut, 65 inovasi (41,4%) telah memenuhi persyaratan administrasi dan evidensi sehingga dapat dikirim kepada Kementerian Dalam Negeri untuk dilakukan penilaian dalam Indeks Inovasi Daerah. Sebanyak 30 inovasi (19,1%) belum dapat diikutsertakan karena belum memenuhi kelengkapan evidensi yang dipersyaratkan, sedangkan 62 inovasi (39,5%) masih berada pada tahap inisiatif atau uji coba sehingga memerlukan pendampingan lebih lanjut agar dapat berkembang menjadi inovasi yang matang dan berkelanjutan.

Hasil evaluasi terhadap delapan aspek penilaian Indeks Inovasi Daerah menunjukkan bahwa Kota Padang memiliki kinerja yang sangat baik pada Aspek Hasil Inovasi, Aspek Sumber Daya Manusia, Aspek Anggaran, dan Aspek Dampak Inovasi. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah daerah telah memiliki kapasitas yang kuat dalam menghasilkan berbagai inovasi, didukung oleh keterlibatan aparatur yang cukup luas serta dukungan pembiayaan yang memadai. Berbagai inovasi yang dikembangkan juga telah memberikan manfaat nyata, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, pelayanan administrasi kependudukan, perpustakaan, perpajakan daerah, dan pelayanan publik lainnya.

Namun demikian, analisis juga menunjukkan bahwa Aspek Tata Kelola dan Aspek Kematangan Inovasi masih menjadi titik lemah yang perlu mendapat perhatian. Masih terdapat sejumlah inovasi yang belum memiliki dokumentasi dan evidensi yang lengkap sehingga tidak dapat diikutsertakan dalam penilaian nasional. Di sisi lain, sebagian inovasi masih berada pada tahap awal pengembangan dan belum memiliki regulasi pendukung, standar operasional prosedur, mekanisme monitoring dan evaluasi, maupun peluang replikasi pada Perangkat Daerah lain. Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan Kota Padang ke depan bukan lagi pada menghasilkan inovasi baru, tetapi memastikan inovasi tersebut dapat berkembang menjadi inovasi yang matang, terdokumentasi dengan baik, dan berkelanjutan.

Berdasarkan tingkat kematangannya, sebanyak 71 inovasi (45,2%) telah berada pada kategori Sangat Matang, 55 inovasi (35,0%) pada kategori Matang, 9 inovasi (5,7%) pada kategori Berkembang, dan 22 inovasi (14,0%) masih berada pada kategori Rintisan. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun hampir separuh inovasi telah mencapai tingkat kematangan yang tinggi, masih terdapat sejumlah inovasi yang memerlukan pembinaan, pendampingan, serta penguatan kelembagaan agar mampu memberikan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan.

Analisis sebaran inovasi juga memperlihatkan adanya ketimpangan antar Perangkat Daerah. Dari total 157 inovasi yang tercatat, sekitar 63 persen terkonsentrasi pada dua Perangkat Daerah, yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan 71 inovasi serta Dinas Kesehatan dengan 28 inovasi. Sebaliknya, sebagian besar Perangkat Daerah lainnya hanya memiliki satu hingga dua inovasi, bahkan masih terdapat perangkat daerah yang belum memiliki inovasi yang terdokumentasi secara optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa budaya inovasi belum berkembang secara merata di seluruh organisasi perangkat daerah.

Menariknya, jumlah inovasi yang banyak belum tentu diikuti oleh tingkat kematangan yang tinggi. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menjadi perangkat daerah dengan jumlah inovasi terbanyak, namun rata-rata skor kematangannya masih berada di bawah beberapa perangkat daerah lain. Sebaliknya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Kecamatan Nanggalo memiliki jumlah inovasi yang relatif lebih sedikit tetapi mampu menghasilkan inovasi dengan tingkat kematangan yang sangat tinggi. Temuan ini menunjukkan bahwa kualitas inovasi perlu menjadi perhatian yang sama pentingnya dengan kuantitas inovasi.

Di sisi lain, evaluasi juga menemukan bahwa beberapa inovasi strategis daerah, termasuk aplikasi digital berskala kota, masih memperoleh skor kematangan yang rendah akibat belum lengkapnya evidensi pendukung pada saat proses penilaian. Kondisi tersebut mengindikasikan perlunya penguatan tata kelola inovasi melalui sistem dokumentasi yang lebih baik, monitoring secara berkala, serta integrasi pengelolaan inovasi dalam satu basis data daerah sehingga setiap inovasi dapat dipantau perkembangan dan

keberlanjutannya.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, tantangan pengembangan inovasi daerah Kota Padang ke depan meliputi pemerataan budaya inovasi pada seluruh Perangkat Daerah, peningkatan kualitas tata kelola inovasi, percepatan peningkatan tingkat kematangan inovasi, penguatan keberlanjutan inovasi berbasis kelembagaan, serta integrasi berbagai inovasi digital dalam kerangka Smart City dan Satu Data Kota Padang. Pengembangan inovasi juga perlu diarahkan agar tidak hanya menghasilkan ide atau aplikasi baru, tetapi mampu menciptakan perubahan nyata terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, efisiensi pelayanan publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, arah kebijakan inovasi daerah pada periode pembangunan selanjutnya difokuskan pada penguatan tata kelola inovasi, peningkatan kualitas evidensi, pembinaan inovasi rintisan agar naik menjadi inovasi matang, pemerataan inovasi pada seluruh Perangkat Daerah, serta pengembangan inovasi yang adaptif terhadap transformasi digital. Dengan demikian, inovasi diharapkan menjadi budaya organisasi yang berkelanjutan dan mampu menjawab tuntutan pelayanan publik melalui prinsip *Faster, Easier, Cheaper, Smarter, dan Better*, sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, adaptif, inovatif, dan berdaya saing.

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi dan keuangan daerah dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Padang Tahun 2027 menjabarkan tentang kebijakan perekonomian daerah yang diambil sebagai dasar pencapaian bagi sasaran indikator ekonomi makro daerah. Kerangka ekonomi ini memberi gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro Kota Padang yang dipengaruhi oleh perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global, sedangkan kerangka pendanaan daerah memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan kemampuan pembelanjaan dan pembiayaan untuk pembangunan daerah tahun 2027.

Kerangka ekonomi dan pendanaan daerah ini menjadi dasar kebijakan perencanaan anggaran agar dapat dialokasikan secara efektif dan berbasis program prioritas disamping juga untuk mencapai program dalam RPJMD yang masuk dalam kategori program prioritas dan program yang berperan penting dalam mencapai target RPJMD. Diharapkan pertumbuhan ekonomi dapat tumbuh sesuai target dan pertumbuhan ekonomi juga meningkat secara kualitas untuk menurunkan kemiskinan, memperbaiki ketimpangan pendapatan, mengurangi angka pengangguran, dan meningkatkan IPM sebagai indikator kesejahteraan masyarakat

Rancangan kerangka ekonomi dan keuangan daerah tahun 2027 menjadi dasar dalam kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan prinsip untuk penyelesaian berbagai permasalahan kota yang tertuang dalam isu strategis dan program prioritas, serta perencanaan anggaran berbasis kinerja.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

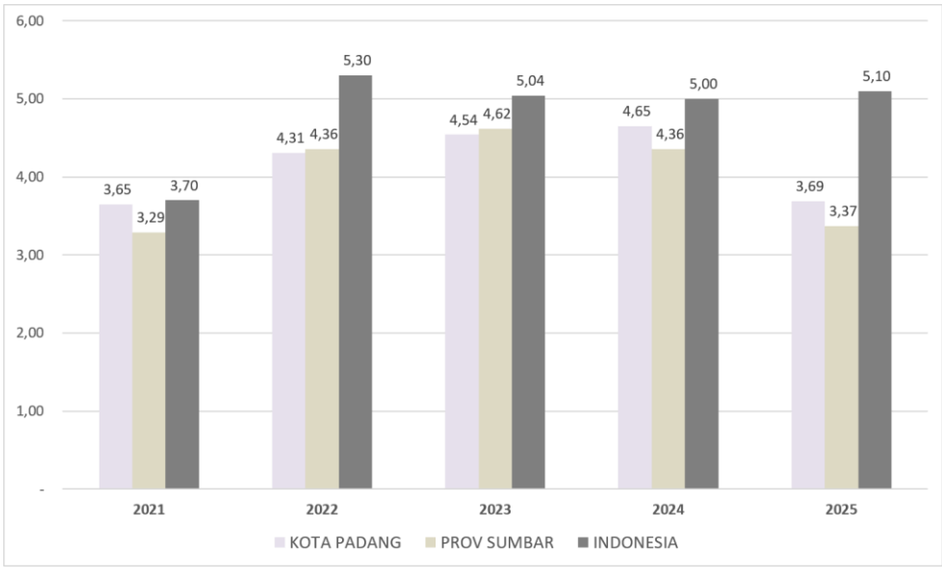
Arah pembangunan perekonomian Kota Padang diprioritaskan pada sektor yang memberikan kontribusi yang besar terhadap PDRB, menunjang visi dan misi pada RPJMD dan juga sektor yang memiliki prospek perkembangan yang baik dimasa mendatang. Selain itu juga pembangunan diarahkan pada terjaminnya integrasi antara pembangunan Kota Padang dengan Pembangunan Nasional dan Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2027.

3.1.1 Kondisi Makro Ekonomi Kota Padang Tahun 2025

A. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu tolok ukur keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2025, perekonomian Kota Padang berada pada pusaran dinamika yang kompleks, dipengaruhi oleh transisi makro ekonomi nasional, normalisasi pasca-pandemi di tingkat Provinsi Sumatera Barat, serta guncangan domestik spesifik berupa

bencana hidrometeorologi yang melanda pada bulan November 2025.



Sumber : BPS Sumatera Barat, 2026

Gambar 3-1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2021-2025

Pertumbuhan ekonomi Kota Padang selama periode 2021–2024 menunjukkan kecenderungan meningkat, yaitu dari 3,65 persen pada 2021 menjadi 4,31 persen pada 2022, 4,54 persen pada 2023, dan mencapai 4,65 persen pada 2024. Namun, pada 2025 pertumbuhan ekonomi Kota Padang melambat menjadi 3,69 persen. Capaian tersebut turun sebesar 0,96 poin persentase dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun masih mencatatkan pertumbuhan positif dan sedikit lebih tinggi dibandingkan capaian 2021, penurunan tersebut menunjukkan melemahnya momentum pemulihan dan ekspansi ekonomi daerah pada 2025.

Perlambatan ekonomi Kota Padang pada 2025 berlangsung searah dengan melemahnya perekonomian Sumatera Barat. Ekonomi Sumatera Barat hanya tumbuh 3,37 persen, lebih rendah dibandingkan 4,36 persen pada 2024. Perlambatan ekonomi Sumatera Barat terjadi dalam kondisi daerah yang menghadapi berbagai kejadian bencana serta adanya beberapa lapangan usaha yang mengalami kontraksi. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi mobilitas masyarakat, distribusi barang, aktivitas perdagangan, kunjungan wisatawan, investasi, dan daya beli masyarakat. Sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, pendidikan dan pelayanan di Sumatera Barat, perekonomian Kota Padang juga memiliki keterkaitan yang kuat dengan aktivitas ekonomi kabupaten/kota lainnya sehingga pelemahan ekonomi regional turut memengaruhi kinerja ekonomi kota.

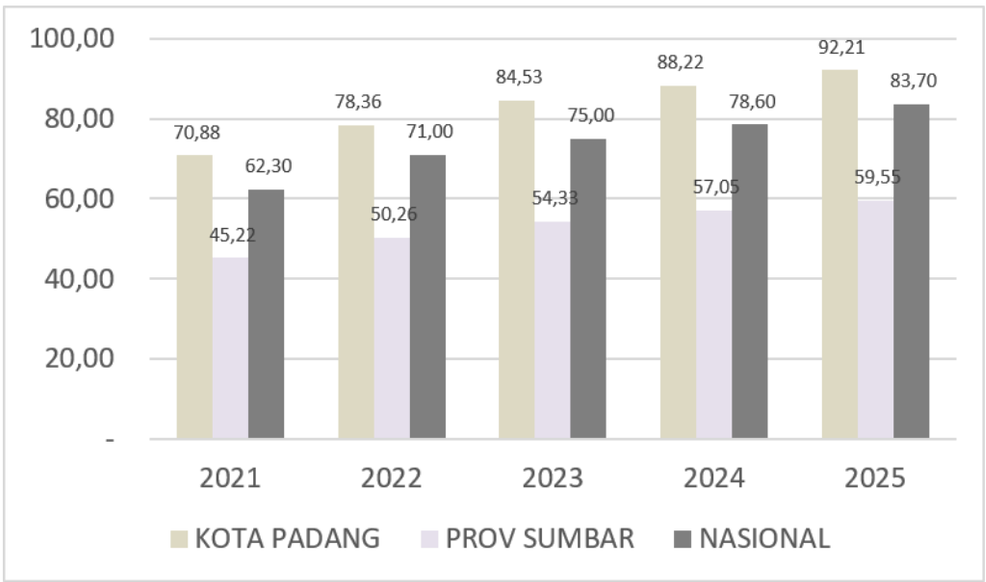
Jika dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat, pertumbuhan ekonomi Kota Padang pada 2025 masih berada pada posisi yang relatif lebih baik. Pertumbuhan Kota Padang sebesar 3,69 persen lebih tinggi 0,32 poin persentase dibandingkan pertumbuhan Sumatera Barat sebesar 3,37 persen. Posisi ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi perkotaan di Kota Padang masih relatif

lebih mampu menahan tekanan dibandingkan rata-rata kondisi provinsi. Akan tetapi, selisih yang tidak terlalu besar juga memperlihatkan bahwa ketahanan ekonomi Kota Padang belum sepenuhnya mampu menghindari dampak perlambatan ekonomi regional. Dibandingkan dengan kondisi nasional, posisi Kota Padang masih tertinggal cukup jauh. Berdasarkan diagram, ekonomi nasional tumbuh sekitar 5,10 persen pada 2025, sehingga pertumbuhan Kota Padang berada 1,41 poin persentase di bawah nasional.

Dengan demikian, capaian 2025 menempatkan Kota Padang pada posisi lebih baik daripada Provinsi Sumatera Barat, tetapi masih berada cukup jauh di bawah pertumbuhan nasional. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian dalam perumusan kebijakan pembangunan ekonomi daerah melalui penguatan konsumsi masyarakat, perdagangan dan jasa, pariwisata, ekonomi kreatif serta UMKM; peningkatan realisasi investasi; percepatan belanja pembangunan; dan penguatan ketahanan infrastruktur serta aktivitas ekonomi terhadap risiko bencana. Upaya tersebut diperlukan agar pertumbuhan ekonomi Kota Padang tidak hanya kembali meningkat, tetapi juga lebih berkualitas, inklusif dan mampu menciptakan kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

B. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku (ADHB) merupakan nilai Produk Domestik Regional Bruto suatu daerah pada harga yang berlaku pada tahun berjalan, kemudian dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Indikator ini menggambarkan rata-rata nilai tambah ekonomi yang dihasilkan oleh setiap penduduk dalam satu tahun.



Sumber : BPS Sumatera Barat, 2026

Gambar 3-2 PDRB per kapita ADHB Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2021-2025

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku Kota Padang menunjukkan peningkatan secara konsisten dari Rp70,88 juta per orang per tahun pada 2021 menjadi Rp92,21 juta pada 2025. Selama periode tersebut terjadi peningkatan sebesar Rp21,33 juta atau sekitar 30,09 persen. Perkembangan ini menunjukkan bahwa nilai tambah ekonomi yang dihasilkan Kota Padang tumbuh lebih cepat dibandingkan pertambahan jumlah penduduknya.

Pada 2025, PDRB per kapita Kota Padang mencapai Rp92,21 juta, meningkat Rp3,99 juta atau sekitar 4,52 persen dibandingkan capaian 2024 sebesar Rp88,22 juta. Peningkatan tersebut terjadi meskipun pertumbuhan ekonomi Kota Padang pada 2025 mengalami perlambatan menjadi 3,69 persen. Kondisi ini dapat terjadi karena PDRB per kapita yang digunakan merupakan PDRB atas dasar harga berlaku, sehingga kenaikannya tidak hanya dipengaruhi oleh peningkatan volume produksi, tetapi juga oleh perubahan harga barang dan jasa selama 2025.

Perlambatan ekonomi Kota Padang juga terjadi sejalan dengan kondisi perekonomian Sumatera Barat. Pada 2025, ekonomi Sumatera Barat tumbuh sebesar 3,37 persen, lebih rendah dibandingkan 4,37 persen pada 2024, sedangkan PDRB per kapitanya mencapai Rp59,55 juta. Sebaliknya, ekonomi nasional tumbuh relatif lebih kuat sebesar 5,11 persen dengan PDB per kapita mencapai Rp83,70 juta. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan nilai ekonomi per kapita nasional pada 2025 berlangsung lebih cepat dibandingkan Kota Padang dan Sumatera Barat.

Jika dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat, PDRB per kapita Kota Padang pada 2025 lebih tinggi sebesar Rp32,66 juta atau sekitar 54,84 persen. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Padang memiliki kapasitas penciptaan nilai tambah ekonomi per penduduk yang jauh lebih tinggi daripada rata-rata provinsi. Posisi tersebut mengindikasikan kuatnya konsentrasi kegiatan perdagangan, jasa, pemerintahan, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan berbagai aktivitas ekonomi perkotaan di Kota Padang. Dibandingkan dengan kondisi nasional, PDRB per kapita Kota Padang juga masih lebih tinggi sebesar Rp8,51 juta atau sekitar 10,17 persen. Namun, selisih Kota Padang dengan nasional mengecil dari Rp9,62 juta pada 2024 menjadi Rp8,51 juta pada 2025 karena PDB per kapita nasional tumbuh lebih cepat. Dengan demikian, posisi Kota Padang pada 2025 masih tergolong baik karena berada di atas rata-rata provinsi dan nasional.

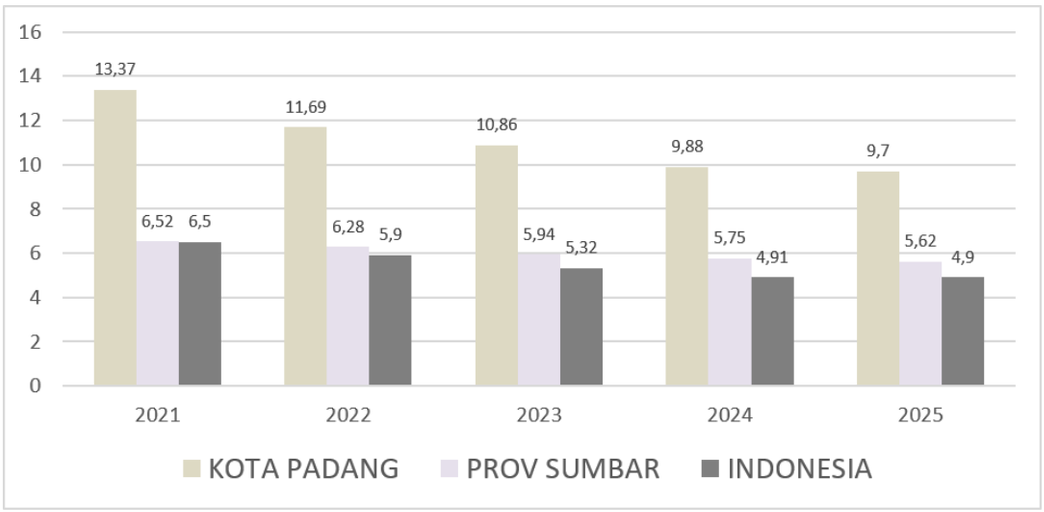
C. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Padang menunjukkan tren menurun selama periode 2021–2025. TPT Kota Padang turun dari 13,37 persen pada 2021 menjadi 11,69 persen pada 2022, 10,86 persen pada 2023, 9,88 persen pada 2024, dan 9,70 persen pada 2025. Secara keseluruhan, terjadi penurunan sebesar 3,67 poin persentase, yang menunjukkan adanya perbaikan penyerapan tenaga kerja setelah tingginya pengangguran pada 2021.

Pada 2025, TPT Kota Padang sebesar 9,70 persen, turun 0,18 poin persentase dibandingkan 2024. Meskipun mengalami perbaikan, laju penurunannya relatif melambat dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa penciptaan kesempatan kerja belum sepenuhnya mampu mengimbangi pertambahan angkatan kerja dan kebutuhan masyarakat terhadap pekerjaan. Sebagai wilayah perkotaan dan pusat pendidikan, perdagangan, pemerintahan, serta jasa, Kota Padang juga menghadapi masuknya pencari kerja dari daerah lain dan bertambahnya lulusan baru setiap tahun.

Jika dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat, TPT Kota Padang pada 2025 masih lebih tinggi 4,08 poin persentase, yaitu 9,70 persen dibandingkan 5,62 persen. Sementara itu, dibandingkan dengan tingkat nasional sebesar 4,90 persen, TPT Kota Padang lebih tinggi 4,80 poin persentase atau hampir dua kali lipat. Dengan demikian, posisi Kota Padang masih berada di atas rata-rata pengangguran provinsi maupun nasional, meskipun kesenjangannya secara bertahap semakin mengecil dibandingkan kondisi 2021.

Tingginya TPT Kota Padang dapat mengindikasikan masih adanya ketidaksesuaian antara keterampilan pencari kerja dengan kebutuhan dunia usaha, terbatasnya kesempatan kerja formal, serta tingginya preferensi masyarakat terhadap pekerjaan tertentu. Oleh karena itu, kebijakan ketenagakerjaan perlu diarahkan pada penguatan pendidikan dan pelatihan berbasis kebutuhan pasar kerja, pengembangan kewirausahaan dan UMKM, perluasan investasi yang menyerap tenaga kerja, serta penguatan keterhubungan antara lembaga pendidikan dengan dunia usaha dan industri.



Sumber : BPS Sumatera Barat, 2026

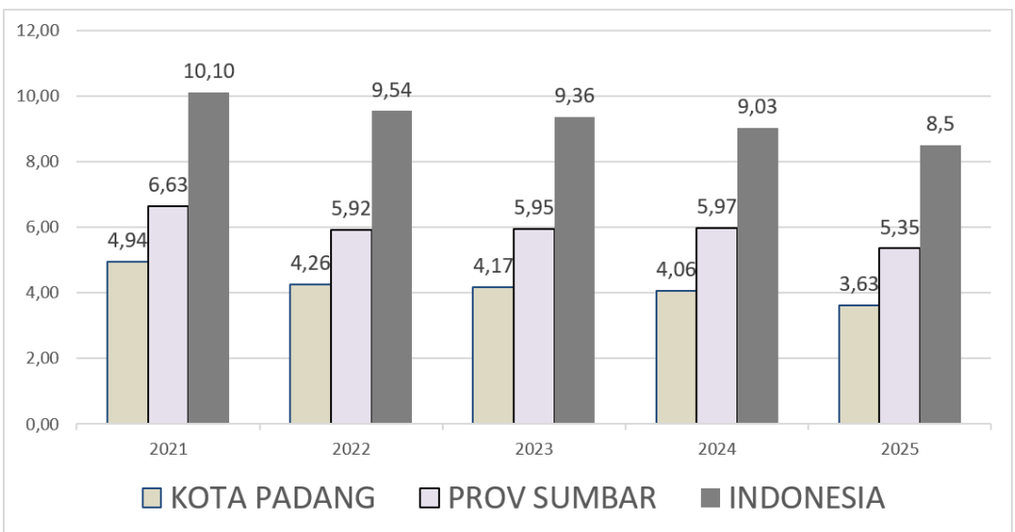
Gambar 3-3 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2021-2025

D.Tingkat Kemiskinan

Persentase penduduk miskin Kota Padang selama periode 2021–2025 menunjukkan tren penurunan yang konsisten. Tingkat kemiskinan menurun dari 4,94 persen pada tahun 2021 menjadi

4,26 persen pada tahun 2022, kemudian turun menjadi 4,17 persen pada tahun 2023, 4,06 persen pada tahun 2024, dan mencapai 3,68 persen pada tahun 2025. Secara keseluruhan, terjadi penurunan sebesar 1,26 poin persentase dalam lima tahun. Penurunan terbesar terjadi pada 2021–2022 sebesar 0,68 poin persentase dan 2024–2025 sebesar 0,38 poin persentase.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan Kota Padang secara konsisten berada di bawah rata-rata Provinsi Sumatera Barat dan nasional. Pada tahun 2025, persentase kemiskinan Kota Padang sebesar 3,68 persen, lebih rendah dibandingkan Provinsi Sumatera Barat sebesar 5,35 persen dan Indonesia sebesar 8,50 persen. Kondisi ini menggambarkan relatif lebih baiknya ketahanan ekonomi dan akses masyarakat Kota Padang terhadap kegiatan ekonomi, lapangan kerja, pelayanan sosial, serta berbagai program perlindungan dan pemberdayaan masyarakat.



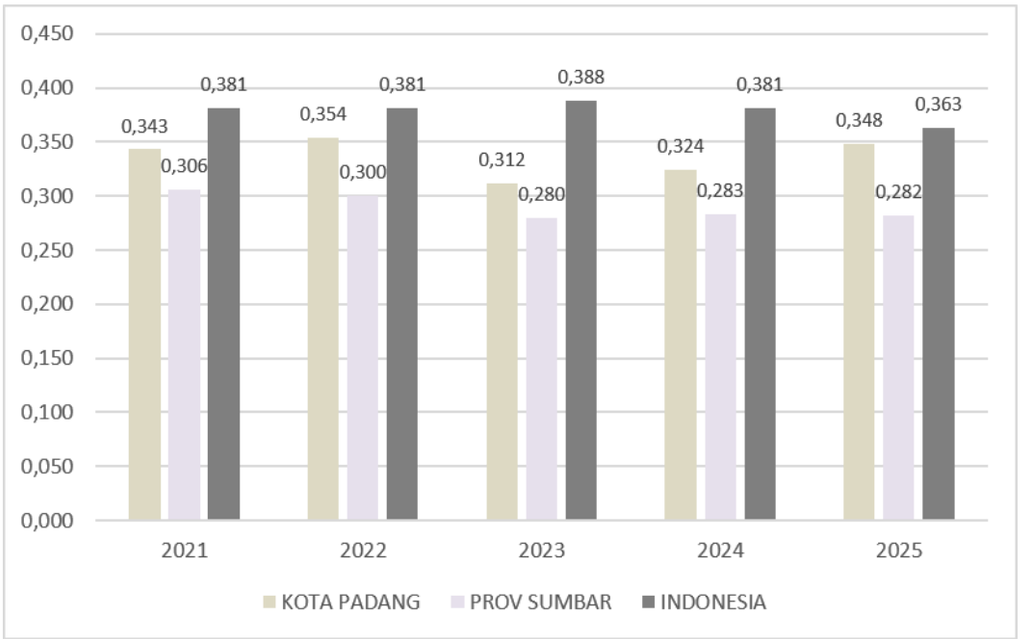
Sumber : BPS Sumatera Barat, 2026

Gambar 3-4 Tingkat Kemiskinan Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2021-2025

Meskipun capaian Kota Padang tergolong baik, pemerintah daerah tetap perlu memperkuat kebijakan penanggulangan kemiskinan agar penurunannya berlangsung berkelanjutan dan tidak hanya dipengaruhi oleh bantuan sosial jangka pendek. Kebijakan perlu diarahkan pada peningkatan kualitas dan perluasan kesempatan kerja, penguatan usaha mikro dan ekonomi produktif, pengendalian harga kebutuhan pokok, peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta pemutakhiran data kemiskinan secara berkala. Perhatian khusus juga perlu diberikan kepada kelompok rentan dan masyarakat yang berada sedikit di atas garis kemiskinan karena mudah kembali jatuh miskin akibat inflasi, kehilangan pekerjaan, bencana, maupun tekanan ekonomi lainnya.

E. Gini Ratio

Perkembangan Gini Ratio Kota Padang selama periode 2021–2025 menunjukkan pola yang berfluktuasi. Nilai Gini Ratio meningkat dari 0,343 pada tahun 2021 menjadi 0,354 pada tahun 2022, kemudian menurun cukup signifikan menjadi 0,312 pada tahun 2023. Setelah itu, ketimpangan kembali meningkat menjadi 0,324 pada tahun 2024 dan 0,348 pada tahun 2025. Secara keseluruhan, nilai Gini Ratio Kota Padang pada tahun 2025 lebih tinggi sebesar 0,005 poin dibandingkan tahun 2021, yang menunjukkan bahwa perbaikan ketimpangan pendapatan belum berlangsung secara konsisten.



Sumber : BPS Sumatera Barat, 2026

Gambar 3-5 Gini Ratio Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2021-2025

Dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat, Gini Ratio Kota Padang selalu berada pada tingkat yang lebih tinggi. Pada tahun 2025, Gini Ratio Kota Padang tercatat sebesar 0,348, sedangkan Provinsi Sumatera Barat sebesar 0,282, atau terdapat selisih sebesar 0,066 poin. Kesenjangan tersebut merupakan yang terbesar selama periode pengamatan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa distribusi pendapatan di Kota Padang relatif lebih tidak merata dibandingkan kondisi rata-rata kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat.

Namun demikian, Gini Ratio Kota Padang masih berada di bawah tingkat ketimpangan nasional sepanjang periode 2021–2025. Pada tahun 2025, nilai Gini Ratio Indonesia sebesar 0,363, hanya terpaut 0,015 poin dari Kota Padang. Penyempitan selisih tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan Gini Ratio Kota Padang pada 2024–2025, sementara nilai nasional menurun dari 0,388 pada tahun 2023 menjadi 0,363 pada tahun 2025. Hal ini perlu menjadi perhatian karena tingkat ketimpangan Kota Padang semakin mendekati rata-rata nasional.

Peningkatan Gini Ratio Kota Padang dalam dua tahun terakhir menunjukkan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan masyarakat belum sepenuhnya dinikmati secara merata. Meskipun persentase kemiskinan Kota Padang menunjukkan kecenderungan menurun, peningkatan ketimpangan mengindikasikan bahwa kenaikan pendapatan kemungkinan lebih banyak terkonsentrasi pada kelompok masyarakat tertentu. Dengan demikian, penurunan kemiskinan perlu diikuti dengan peningkatan kualitas dan pemerataan pertumbuhan ekonomi.

Ketimpangan ini dapat diperkecil melalui kebijakan pembangunan yang diarahkan pada pertumbuhan yang inklusif melalui perluasan kesempatan kerja produktif, peningkatan keterampilan tenaga kerja, penguatan usaha mikro dan kecil, serta peningkatan akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap pendidikan, kesehatan, permodalan, dan perlindungan sosial. Intervensi juga perlu diprioritaskan pada wilayah dan kelompok masyarakat dengan tingkat pendapatan rendah agar peningkatan aktivitas ekonomi mampu mengurangi ketimpangan sekaligus menjaga keberlanjutan penurunan kemiskinan.

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Kota Padang

Berdasarkan fenomena historis sisa dampak bencana November 2025 dan dinamika awal 2026, Kota Padang dihadapkan pada tiga tantangan struktural utama pada tahun 2027:

1. Kerentanan Logistik dan Inflasi Spasial

   Trauma interupsi rantai pasok akibat hancurnya jalur logistik barat Sumatera pada November 2025 membuktikan bahwa ketahanan pangan dan kestabilan harga di Kota Padang sangat rentan terhadap gangguan cuaca. Tantangan tahun 2027 adalah bagaimana membangun ekosistem logistik yang *inter-bencana* agar volatilitas harga barang pokok (*volatile foods*) tidak mendistorsi daya beli masyarakat ketika terjadi cuaca ekstrem.

2. Anomali Pertumbuhan vs Tingginya Pengangguran Perkotaan

   Mengacu pada catatan strategis Gubernur Sumatera Barat pada forum regional Triwulan II-2026, meskipun LPE Provinsi kembali menguat ke angka 5,02%, daerah ini masih dibayangi oleh tantangan pengangguran terbuka yang menempatkannya pada posisi tiga tertinggi di regional Sumatera. Sebagai ibu kota provinsi dan pusat edukasi, Kota Padang memikul beban migrasi tenaga kerja kerja formal terdidik. Tantangan tahun 2027 adalah memastikan pertumbuhan ekonomi bersifat inklusif dan padat karya, bukan hanya didorong oleh sektor tersier yang berbasis teknologi digital (e-commerce).

3. Depresiasi Modal Tetap Daerah (Kapasitas Fiskal Berbasis Kontingensi)

   Pasca-bencana 2025, ruang fiskal APBD Kota Padang tersedot untuk rekonstruksi dan rehabilitasi infrastruktur fisik dasar. Di tahun 2027, tantangannya adalah keterbatasan kapasitas fiskal daerah untuk melakukan ekspansi investasi modal baru, karena anggaran masih harus dialokasikan pada skema Rehabilitasi

dan Rekonstruksi Pasca Bencana yang berakhir pada Tahun 2027.

Di balik tantangan tersebut, sinyal makro Kuartal I-2026 memberikan optimisme tinggi bahwa ekonomi Kota Padang pada tahun 2027 berprospek cerah dan berpotensi kembali meningkat, yang ditopang oleh:

1. Akselerasi Sektor Pariwisata Terintegrasi MICE (*Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions*)

   Melejitnya pertumbuhan sektor akomodasi dan makan minum di tingkat provinsi hingga 17,77% pada awal 2026 menegaskan bahwa sektor pariwisata Sumatera Barat telah pulih seutuhnya pasca-bencana. Kota Padang sebagai pusat *hub* pariwisata memiliki prospek besar di tahun 2027 untuk merebut pasar wisata domestik dan regional, didukung oleh peningkatan kunjungan dan kegiatan skala nasional yang kembali normal.

2. Ledakan Transaksi Perdagangan Digital (E-Commerce) dan Sektor Jasa

   Data awal 2026 menunjukkan transaksi perdagangan elektronik di Sumatera Barat melonjak di atas 50%. Kota Padang, dengan penetrasi internet tertinggi di provinsi, memiliki basis UMKM digital yang kuat. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran serta Transportasi/Pergudangan diproyeksikan akan mengalami pemulihan berbentuk kurva V (*V-shaped recovery*) yang matang pada tahun 2027, mengompensasi hilangnya potensi pendapatan pada periode buruk tahun 2025.

3. Hilal Investasi Melalui Mainstreaming Infrastruktur "*Resilient City*"

   Transformasi kebijakan pembangunan pasca-bencana menjadi berkah tersendiri. Fokus pembangunan daerah beralih pada proyek-proyek *Green Infrastructure* dan ketahanan kota terintegrasi yang didanai melalui skema kemitraan atau bantuan pusat (seperti Inpres Jalan Daerah/IJD dan program penanggulangan banjir nasional). Investasi di bidang konstruksi tangguh bencana ini akan menjadi stimulan sekunder bagi PDRB Kota Padang pada tahun 2027.

3.1.3. Arah Kebijakan Ekonomi Nasional Tahun 2027

Perekonomian global pada tahun 2025 tumbuh sebesar 3,4 persen dan diprakirakan akan melambat menjadi 3,1 persen pada tahun 2026 (Internasional Monetary Fund/IMF, April 2026). Perlambatan tersebut utamanya dipengaruhi oleh ketidakpastian kebijakan tarif dan eskalasi konflik di Timur Tengah. Ketidakpastian tarif dan investigasi terhadap negara mitra oleh Amerika Serikat, termasuk Indonesia, berpotensi menekan kinerja perdagangan dan rantai pasok global.

Eskalasi konflik geopolitik tersebut memperbesar resiko kenaikan harga energi dan komoditas. Harga minyak mentah pada pertengahan April 2026 berada di kisaran US$100 per barel atau meningkat 76,43 persen secara year to date (YtD) sehingga

meningkatkan resiko imported inflation, menahan ruang pelonggaran moneter, dan mendorong perpindahan modal ke aset aman. Volatilitas juga terjadi pada batubara dan crude palm oil (CPO), dua komoditas ekspor utama Indonesia, yang masing-masig meningkat sebesar 23,95 persen dan 12,98 persen secara YtD. Namun, disisi lain aktivitas manufaktur global masih ekspansif, tecermin dari Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur Maret 2026 sebesar 51,30.

Tahun 2027, ekonomi global diproyeksikan tumbuh 3,2 persen ditopang terutama oleh Tiongkok dan India, masing-masing 4,0 persen dan 6,5 persen (IMF, April 2026). Pertumbuhan tersebut didukung oleh investasi teknologi, termasuk artificial intelligence (AI), namun tetap dibayangi ketidakpastian perdagangan dan geopolitik. Di sisi lain, tekanan perubahan iklim mendorong investasi rendah emisi dan produksi hijau, termasuk penerapan carbon border adjustment mechanism (CBAM) yang mempengaruhi pola perdagangan dan struktur industri global.

Di sisi domestik, stabilitas makro tahun 2025 tetap terjaga, ditopang pertumbuhan ekonomi 5,1 persen, inflasi terkendali, cadangan devisa kuat, dan surplus neraca perdagangan. Pertumbuhan ekonomi terutama didukung konsumsi rumah tangga, ekspor, investasi, serta sektor industri pengolahan, perdagangan, dan pertanian.

Pada triwulan I-2026, perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 5,6 persen year on year (YoY) didorong oleh akselerasi konsumsi masyarakat pada momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN); implementasi program prioritas pembangunan; serta peningkatan aktivitas produksi untuk memenuhi permintaan domestik yang meningkat. Kinerja ini menjadi sinyal positif dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi tahun 2026 sebesar 5,4 persen dan menjadi fondasi yang kuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi pada tahun 2027.

Dari sisi pengeluaran, sumber pertumbuhan utama ekonomi tahun 2026 akan didorong oleh konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor. Sementara itu, sumber pertumbuhan dari sisi lapangan usaha akan didorong utamanya oleh sektor industri pengolahan yang didukung oleh hilirisasi sektor-sektor prioritas serta program di sektor pertanian.

Secara kewilayahan, pertumbuhan ekonomi tahun 2026 akan terjaga melalui keseimbangan antara akselerasi hilirisasi di timur dan penguatan sektor manufaktur serta jasa di wilayah barat. Pertumbuhan Kawasan Timur Indonesia (KTI) diproyeksikan mencapai enam persen, dipicu oleh masifnya aktivitas hilirisasi nikel di Wilayah Maluku dan Sulawesi, pemulihan pariwisata di Bali–Nusa Tenggara, peningkatan sektor pertambangan, serta berlanjutnya konstruksi pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan. Sementara itu, Kawasan Barat Indonesia (KBI) diproyeksikan tumbuh sebesar 5,3 persen yang ditopang oleh kinerja wilayah Jawa melalui sektor industri dan jasa, serta wilayah Sumatera yang didorong oleh peningkatan permintaan komoditas unggulan dan pembangunan infrastruktur.

Tabel 3-1 Kinerja Perekonomian Tahun 2025 dan Outlook Tahun 2026 (Persen)

Komponen/Sektor	Tahun 2025		Outlook Tahun 2026	
	Pertumbuhan	Kontribusi	Pertumbuhan	Kontribusi
Sisi Pengeluaran				
- Konsumsi Rumah Tangga	5	53,9	5,1	53,8
- Konsumsi LNPRT	5,1	1,4	5,4	1,4
- Konsumsi Pemerintah	2,5	7,5	7,3	7,7
- PMTB/Investasi	5,1	28,8	5,3	28,7
- Ekspor Barang dan Jasa	7	22,9	5,5	22,4
- Impor Barang dan Jasa	4,8	20,5	6,3	20,2
Sisi Lapangan Usaha*				
- Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,3	13,1	5,1	12,8
- Industri Pengolahan	5,3	19,1	5,2	21,2
Sisi Kewilayahan				
- Kawasan Barat Indonesia	5,2	79,1	5,3	78,9
- Kawasan Timur Indonesia	4,8	20,9	6	21,1
Pertumbuhan Ekonomi	**5,1**		**5,4**	

Sumber : RKP Tahun 2027

Tahun 2027 sebagai tahun ketiga RPJMN Tahun 2025–2029 diarahkan untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi menuju target delapan persen pada 2029, dengan sasaran 2027 sebesar 5,9–7,5 persen. Pertumbuhan ini diharapkan meningkatkan gross national income (GNI) per kapita ke US$5.900–5.990, mempertahankan status negara berpendapatan menengah atas, serta mendukung agenda transisi hijau melalui penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dan peningkatan kualitas lingkungan.

Pembangunan difokuskan pada peningkatan kesejahteraan dan kualitas SDM melalui penurunan kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan serta peningkatan Indeks Modal Manusia. Selain itu, kesejahteraan petani dan penciptaan lapangan kerja formal menjadi indikator utama untuk memastikan pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Tabel 3-2 Sasaran Makro Pembangunan Tahun 2027

No.	Sasaran dan Indikator	Sasaran 2027
Sasaran Pembangunan Nasional		
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,9–7,5
2.	GNI Per Capita (US$)	5.900–5.990
3.	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	39,57
4.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	76,84
5.	a. Tingkat Kemiskinan (%)	6,0–6,5
	b. Tingkat Kemiskinan Ekstrem (%)	0,0
6.	Rasio Gini	0,362–0,367
7.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,30–4,87
8.	Indeks Modal Manusia	0,575
Indikator Pembangunan		
9.	Indeks Kesejahteraan Petani	0,8038

No.	Sasaran dan Indikator	Sasaran 2027
10.	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	40,81
Indikator Ekonomi Makro		
11.	Inflasi (%,YoY): Akhir Periode	2,5 ± 1,0
12.	Nilai Tukar Rupiah (Rp/US$)	16.800–17.500
13.	Cadangan Devisa (Miliar US$)	160,44–162,91
14.	Cadangan Devisa (dalam Bulan Impor)	5,3–5,5
15.	Neraca Transaksi Berjalan (% PDB)	(0,36) – (0,40)
16.	Kontribusi PDB Industri Pengolahan (%)	21,5
17.	Rasio PDB Pariwisata (%)	4,70–4,80
18.	Devisa Pariwisata (Miliar US$)	25,5–28,6
19.	Pendapatan Negara (% PDB)	11,82–12,40
20.	Penerimaan Perpajakan (% PDB)	10,02–10,50
21.	Keseimbangan Primer (% PDB)	0,42-(0,16)
22.	Surplus/Defisit APBN (% PDB)	(1,80)–(2,40)
23.	Pertumbuhan Investasi (PMTB) (%)	6,8–8,8
24.	Nilai Realisasi PMA dan PMDN (Triliun Rp)	2.361,6–2.451,0
25.	Nilai Realisasi PMA dan PMDN Sektor Sekunder (Triliun Rp)	1.114,8–1.180,4

Sumber : RKP Tahun 2027

3.1.4. Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2027

Perekonomian Sumatera Barat pada tahun 2025 relatif tetap terjaga meskipun menghadapi tekanan pada akhir tahun akibat bencana alam dan dinamika eksternal. Secara keseluruhan, capaian tahun 2025 menunjukkan bahwa perekonomian Sumatera Barat berada dalam kondisi relatif stabil meskipun terkoreksi mengalami perlambatan pertumbuhan dari 4,37% pada tahun 2024 menjadi **3,37%** pada tahun 2025. Namun dengan fondasi sosial yang menguat yang dapat dilihat dari perbaikan dari indikator kesejahteraan sosial seperti Tingkat kemiskinan menurun menjadi 5,31 persen dengan jumlah penduduk miskin berkurang menjadi 312,3 ribu jiwa. Tingkat Pengangguran Terbuka juga turun menjadi 5,52 persen, sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 77,27.

Pada tahun 2026 dan 2027 perekonomian Provinsi Sumatera Barat menghadapi tantangan yang cukup berat, namun masih berpeluang kuat untuk tumbuh. Kebutuhan akselerasi pertumbuhan di tengah pemulihan pascabencana menjadi tantangan utama perekonomian daerah. Target pertumbuhan sebesar 5,7 persen pada tahun 2026 dan **6,9 persen** pada tahun 2027 menuntut percepatan yang signifikan dari capaian 3,37 persen pada tahun 2025. Di sisi lain, sebahagian daerah masih menghadapi agenda rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur, pemulihan lahan pertanian, serta penguatan kembali aktivitas ekonomi masyarakat. Proses ini memerlukan waktu, koordinasi lintas sektor, dan dukungan pembiayaan yang memadai.

Dengan kondisi tersebut pemulihan pascabencana tidak hanya berfokus pada perbaikan, tetapi juga menjadi pengungkit aktivitas

ekonomi melalui pembangunan kembali infrastruktur, pemulihan lahan pertanian, dan penyerapan tenaga kerja. Proses ini dapat menghasilkan infrastruktur yang lebih tangguh sekaligus memperkuat daya beli masyarakat. Perbaikan konektivitas menjadi faktor kunci. Pembangunan tol Sicincin–Bukittinggi dan rencana flyover Sitinjau Lauik akan meningkatkan efisiensi distribusi, memperluas akses pasar, serta menurunkan biaya logistik. Di sisi lain, sektor pariwisata masih memiliki potensi besar untuk dikembangkan, dengan dampak lanjutan terhadap UMKM, ekonomi kreatif, dan sektor jasa.

Penguatan nilai tambah komoditas menjadi peluang strategis. Pengembangan industri pengolahan berbasis pertanian dan perikanan dapat meningkatkan nilai ekonomi di dalam daerah sekaligus menciptakan lapangan kerja. Sejalan dengan itu, pemanfaatan ekonomi digital mendorong UMKM menjadi lebih adaptif, memperluas akses pasar, dan meningkatkan ketahanan usaha. Dalam jangka panjang, pengembangan energi baru terbarukan berpotensi memperkuat ketahanan energi sekaligus menarik investasi berkelanjutan. Keterbatasan fiskal daerah dapat diantisipasi melalui inovasi pembiayaan, termasuk kemitraan dengan sektor swasta.

Prospek investasi daerah juga menunjukkan tren positif, didukung oleh peningkatan konektivitas, ketersediaan sumber daya, dan potensi pasar domestik. Peluang investasi terbuka pada sektor industri pengolahan, pariwisata terintegrasi, energi terbarukan, serta penguatan rantai pasok logistik dan perdagangan. Ke depan, fokus tidak hanya pada peningkatan investasi, tetapi juga pada kualitasnya. Investasi yang masuk perlu diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk itu, perbaikan iklim investasi perlu terus dilakukan melalui penyederhanaan perizinan, kepastian regulasi, serta penyediaan lahan dan infrastruktur pendukung.

Dengan kondisi tersebut, prospek pertumbuhan ekonomi tahun 2026-2027 diharapkan tetap terjaga. Hal ini bergantung pada konsistensi kebijakan dan keberlanjutan momentum pemulihan. Pertumbuhan yang diharapkan tidak hanya lebih tinggi, tetapi juga lebih merata, tangguh, dan berdampak bagi masyarakat.

Tabel 3-3 Proyeksi Indikator Makro Sumatera Barat Tahun 2026-2027

No	Indikator Makro dan Pembangunan	Realisasi		Target	
		2024	2025	2026	2027
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,37	3,37	5,7	6,9
2	PDRB ADHK Per Kapita (Rp. Juta)	34.167,59	34.854,51	36,87	38,9
3	PDRB ADHB Per Kapita (Rp. Juta)	57.047,21	59.550	69,59	77,31

No	Indikator Makro dan Pembangunan	Realisasi		Target	
		2024	2025	2026	2027
4	Indeks Gini (Rasio)	0,283	0,28	0,281	0,28
5	Tingkat Kemiskinan (%)	5,97	5,31	4,92	4,64
6	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	345,73	312,3	294,59	281,84
7	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,75	5,52	5,39	5,23
8	IPM	76,43	77,27	77,48	78,04
	- Usia Harapan Hidup (Tahun)	74,37	74,69	74,83	75,06
	- Harapan Lama Sekolah (Tahun)	14,3	14,31	14,62	14,77
	- Rata-rata Lama Sekoh (Tahun)	9,44	9,77	9,58	9,69
	- Pengeluaran per Kapita (Rp. Ribu)	11.718	12.041	12.074	12.262

Sumber : Hasil Analisis Bappeda Provinsi Sumatera Barat, 2026

Dalam mewujudkan kerangka tersebut, kebijakan ekonomi provinsi Sumatera Barat diarahkan untuk memperkuat struktur ekonomi yang lebih bernilai tambah, memperluas kesempatan kerja produktif, mempercepat penurunan kemiskinan, serta mendukung pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) di wilayah Sumatera Barat. Secara strategis, arah kebijakan ekonomi daerah difokuskan pada poin-poin besar sebagai berikut:

1) Transformasi Struktur Ekonomi dan Hilirisasi Sektor Unggulan

Penguatan sektor pertanian, perikanan, industri pengolahan, pariwisata halal, dan ekonomi kreatif melalui hilirisasi, peningkatan nilai tambah komoditas, modernisasi produksi, digitalisasi UMKM, serta integrasi dalam rantai pasok industri dan pasar ekspor, sejalan dengan agenda nasional penguatan industri dan ketahanan pangan, percepatan penurunan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan wilayah. Fokus Pemerintah Sumatera Barat untuk Tahun 2027 pada penguatan sektor ini antara lain mewajibkan Perangkat Daerah terkait untuk mengalihkan fokus dari produksi bahan mentah ke pengolahan, seperti pengolahan CPO, karet maupun kakao sebagai wujud hilirisasi sektor unggulan. Selanjutnya melakukan revitalisasi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif melalui pengembangan destinasi wisata berbasis komunitas, Geopark, digitalisasi pemasaran produk UMKM ekonomi kreatif unggulan agar menembus pasar nasional dan internasional.

Selanjutnya melakukan integrasi perlindungan sosial adaptif dan pemberdayaan ekonomi produktif melalui pendekatan graduasi, peningkatan akses layanan dasar, serta percepatan pembangunan

pada daerah afirmasi 3TP (khususnya Kepulauan Mentawai) dalam mendukung Rencana Induk Percepatan Pengentasan Kemiskinan Nasional 2025-2029. Fokus Pemerintah Sumatera Barat untuk Tahun 2027 pada penguatan sektor ini antara lain pemberdayaan UMKM khususnya pada digitalisasi pemarasan produk lokal dan peningkatan akses modal untuk menekan angka kemiskinan.

2) Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Penguatan pendidikan berkualitas (termasuk implementasi Wajib Belajar 13 Tahun), peningkatan layanan kesehatan dan gizi, pelatihan vokasi berbasis kebutuhan industri, serta pengembangan kewirausahaan muda dan perempuan untuk mendukung transformasi ekonomi dan peningkatan produktivitas tenaga kerja. Fokus Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk sektor ini pada:

- Pendidikan Vokasi, menyelaraskan kurikulum SMK dengan kebutuhan industri hilirisasi dan pariwisata,
- Penurunan prevalensi stunting secara masif agar mencapai angka satu digit di tahun 2027,
- Sumbar Pintar, lanjutan program unggulan berupa pemberian beasiswa dan bantuan biaya pendidikan.

3) Penguatan Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah

Percepatan pembangunan dan pemeliharaan jalan strategis, pelabuhan, jaringan logistik, serta dukungan terhadap Program Strategis Nasional (PSN) di bidang konektivitas, kawasan industri, pariwisata prioritas, dan energi baru terbarukan guna menurunkan biaya logistik dan membuka akses wilayah.

Fokus Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada penguatan infrastruktur dan konektivitas wilayah ini antara lain:

- Flyover Sitinjau Lauik, prioritas operasional Tahap I pada Agustus 2027 untuk kelancaran arus barang ke Jambi dan Riau.
- Jalan Tol Padang- Pekanbaru, yaitu percepatan pengerjaan seksi Sicincin-Bukittinggi guna menghubungkan pusat produksi pertanian dengan pasar regional
- Infrastruktur penunjang pariwisata antara lain perbaikan akses menuju destinasi unggulan yaitu Geopark dan wisata bahari.

4) Percepatan Investasi dan Reformasi Kemudahan Berusaha

Percepatan realisasi APBD sebagai stimulus ekonomi daerah, peningkatan realisasi PMA dan PMDN pada sektor prioritas, penyederhanaan perizinan melalui OSS dan integrasi RDTR digital, serta penguatan kepastian usaha dalam rangka mendukung reformasi struktural nasional.

Fokus Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk tahun 2027 antara lain:

- Digitalisasi layanan (Smart Province), berupa integrasi seluruh layanan publik dalam satu platform untuk mempermudah perizinan dan investasi.
- Optimalisasi pendapatan daerah dengan intensifikasi pajak dan retribusi melalui sistem digital guna mendanai proyek - proyek infrastruktur mandiri.

5) Stabilitas Harga dan Ketahanan Pangan

Penguatan pengendalian inflasi melalui optimalisasi peran TPID, operasi pasar, subsidi distribusi komoditas strategis, kerja sama antarwilayah dalam pengamanan pasokan, serta peningkatan produksi pangan lokal untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.

6) Pengembangan Ekonomi Hijau dan Ketahanan Lingkungan

Pengembangan energi baru terbarukan, desa mandiri energi, ekowisata, dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan sebagai bagian dari dukungan terhadap agenda nasional transisi energi dan pembangunan rendah karbon, dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan dan ketahanan bencana.

3.1.5. Arah Kebijakan Ekonomi Kota Padang Tahun 2027

Arah dan kebijakan ekonomi Kota Padang Tahun 2027 disusun dengan memperhatikan perkembangan indikator makro pembangunan daerah tahun 2025, target tahun 2026, serta sasaran yang hendak dicapai pada tahun 2027. Berdasarkan tabel indikator, perekonomian Kota Padang pada tahun 2027 diarahkan untuk tumbuh lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan. Hal ini terlihat dari target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan sebesar 6,88% pada tahun 2027, meningkat cukup tinggi dibandingkan realisasi tahun 2025 sebesar 3,69% dan target tahun 2026 sebesar 5,73%. Kenaikan target tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi Kota Padang pada tahun 2027 tidak hanya diarahkan pada pemulihan, tetapi juga pada percepatan aktivitas ekonomi daerah melalui peningkatan produktivitas, perluasan kesempatan kerja, penguatan sektor usaha, dan peningkatan daya saing ekonomi masyarakat.

Target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,88% merupakan sasaran yang cukup ambisius karena realisasi tahun 2025 masih berada di bawah target, yaitu 3,69% dari target 4,16%. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, arah kebijakan ekonomi tahun 2027 perlu difokuskan pada penguatan sumber-sumber pertumbuhan yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat, terutama sektor yang mampu menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan rumah tangga, serta mendorong aktivitas usaha mikro, kecil, dan menengah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi perlu diarahkan agar tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga berkualitas, yaitu mampu menurunkan pengangguran, mengurangi kemiskinan, meningkatkan daya beli, serta menjaga pemerataan pendapatan.

Dari sisi pendapatan masyarakat, target PDRB per kapita ADHB tahun 2027 ditetapkan sebesar Rp122,87 juta, meningkat dari realisasi tahun 2025 sebesar Rp92,21 juta. Sementara itu, PDRB per kapita ADHK ditargetkan meningkat dari Rp56,09 juta pada tahun 2025 menjadi Rp61,64 juta pada tahun 2027. Kenaikan PDRB per kapita ADHB menunjukkan adanya peningkatan nilai ekonomi nominal per penduduk, sedangkan kenaikan PDRB per kapita ADHK menunjukkan adanya pertumbuhan riil setelah memperhitungkan perubahan harga. Perbedaan peningkatan antara ADHB dan ADHK perlu menjadi perhatian karena peningkatan pendapatan nominal belum tentu sepenuhnya mencerminkan peningkatan kesejahteraan riil apabila tidak diikuti oleh penguatan daya beli masyarakat. Oleh karena itu, arah kebijakan ekonomi Kota Padang tahun 2027 perlu menekankan peningkatan produktivitas ekonomi riil, pengendalian inflasi daerah, stabilisasi harga kebutuhan pokok, serta peningkatan akses masyarakat terhadap pekerjaan dan sumber pendapatan yang layak.

Pada aspek kualitas sumber daya manusia, capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Padang tahun 2025 telah mencapai 84,93, lebih tinggi dibandingkan target tahun 2025 sebesar 84,51. Target IPM tahun 2027 ditetapkan sebesar 85,14, yang menunjukkan bahwa Kota Padang telah berada pada posisi pembangunan manusia yang relatif tinggi. Namun, peningkatan IPM ke depan tidak cukup hanya mempertahankan capaian yang sudah baik, tetapi perlu diarahkan pada peningkatan kualitas layanan dasar, terutama pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat. Hal ini sejalan dengan target Angka Harapan Hidup yang meningkat dari 75,59 tahun pada tahun 2025 menjadi 75,78 tahun pada tahun 2027. Kenaikan tersebut menunjukkan perlunya penguatan pelayanan kesehatan promotif dan preventif, peningkatan kualitas layanan kesehatan dasar, pengendalian penyakit, serta perbaikan lingkungan hidup yang mendukung kualitas hidup masyarakat.

Pada bidang pendidikan, Harapan Lama Sekolah ditargetkan meningkat dari 16,58 tahun pada tahun 2025 menjadi 16,61 tahun pada tahun 2027, sedangkan Rata-Rata Lama Sekolah meningkat dari 11,64 tahun menjadi 11,76 tahun. Meskipun peningkatannya relatif kecil, kedua indikator ini penting karena menunjukkan kualitas modal manusia jangka panjang. Harapan Lama Sekolah yang lebih tinggi dibandingkan Rata-Rata Lama Sekolah menunjukkan bahwa potensi pendidikan generasi mendatang lebih besar dibandingkan capaian pendidikan penduduk saat ini. Oleh karena itu, kebijakan tahun 2027 perlu diarahkan pada peningkatan akses pendidikan yang merata, pencegahan putus sekolah, penguatan pendidikan vokasi dan keterampilan kerja, serta peningkatan relevansi pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja. Dengan demikian, peningkatan kualitas pendidikan dapat berkontribusi langsung terhadap penurunan pengangguran dan peningkatan produktivitas ekonomi daerah.

Dari sisi kesejahteraan ekonomi rumah tangga, pengeluaran per kapita ditargetkan meningkat dari Rp15.957 ribu pada tahun 2025

menjadi Rp16.175 ribu pada tahun 2027. Kenaikan ini menunjukkan adanya target peningkatan kemampuan konsumsi masyarakat. Namun, peningkatan pengeluaran per kapita harus dipastikan berasal dari peningkatan pendapatan riil, bukan semata-mata akibat kenaikan harga. Oleh karena itu, arah kebijakan ekonomi Kota Padang tahun 2027 perlu memperhatikan stabilitas harga, ketersediaan bahan pokok, penguatan distribusi barang, peningkatan pendapatan masyarakat, serta perlindungan terhadap kelompok rentan. Daya beli masyarakat perlu dijaga karena menjadi salah satu pendorong utama aktivitas ekonomi lokal, terutama pada sektor perdagangan, jasa, dan usaha kecil.

Pada aspek ketenagakerjaan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ditargetkan turun dari 9,70% pada tahun 2025 menjadi 9,04% pada tahun 2027. Meskipun menunjukkan perbaikan, angka tersebut masih memerlukan perhatian serius karena pengangguran yang relatif tinggi dapat menjadi hambatan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Target penurunan TPT perlu didukung oleh kebijakan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas, peningkatan kompetensi tenaga kerja, penguatan pelatihan berbasis kebutuhan dunia usaha, serta pengembangan kewirausahaan. Pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan tinggi pada tahun 2027 harus dipastikan bersifat padat karya dan mampu menyerap tenaga kerja lokal, terutama kelompok usia produktif, lulusan baru, dan masyarakat berpendapatan rendah.

Pada aspek kemiskinan, jumlah penduduk miskin tahun 2025 tercatat 37.380 jiwa, lebih tinggi dibandingkan target tahun 2025 sebesar 35.313 jiwa. Pada tahun 2027, jumlah penduduk miskin ditargetkan turun menjadi 30.728 jiwa, sedangkan tingkat kemiskinan ditargetkan menurun dari 3,63% pada tahun 2025 menjadi 3,12% pada tahun 2027. Target ini menunjukkan bahwa penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu agenda penting dalam arah kebijakan ekonomi daerah. Penurunan kemiskinan perlu dilakukan melalui kebijakan yang lebih terarah, antara lain perbaikan basis data penduduk miskin, peningkatan efektivitas bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi keluarga miskin, perluasan akses kerja, peningkatan keterampilan, serta penguatan usaha produktif masyarakat. Dengan demikian, kebijakan penanggulangan kemiskinan tidak hanya bersifat bantuan sementara, tetapi juga mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.

Sementara itu, Gini Ratio tahun 2025 terealisasi sebesar 0,348, lebih tinggi dibandingkan target tahun 2025 sebesar 0,32. Pada tahun 2027, Gini Ratio kembali ditargetkan berada pada angka 0,32. Hal ini menunjukkan bahwa pemerataan pendapatan menjadi tantangan penting dalam pembangunan ekonomi Kota Padang. Peningkatan PDRB per kapita dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak akan memberikan dampak optimal apabila manfaatnya hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Oleh karena itu, arah kebijakan ekonomi tahun 2027 perlu memastikan agar pertumbuhan ekonomi berjalan inklusif, yaitu memberi manfaat kepada masyarakat berpendapatan rendah, pelaku usaha kecil, tenaga kerja informal, dan kelompok rentan. Pemerataan dapat

didorong melalui perluasan akses ekonomi, penguatan UMKM, peningkatan kualitas layanan dasar, serta pemerataan pembangunan antarwilayah. Indikator makro pembangunan Daerah Kota Padang Tahun 2025-2027 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3- 1 Target Indikator Makro Ekonomi Kota Padang Tahun 2025-2027

NO	INDIKATOR	SATUAN	Target 2025	Realisasi 2025	Target 2026	Target 2027
1	Pertumbuhan Ekonomi	Persentase	4,16	**3,69**	5,73	**6,88**
2	PDRB Per Kapita ADHB (Rp. Juta)	Rp. Juta	97,52	**92,21**	109,85	**122,87**
3	PDRB Per Kapita ADHK (Rp. Juta)	Rp. Juta	55,71	**56,09**	58,27	**61,64**
4	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	84,51	**84,93**	84,82	**85,14**
5	Angka Harapan Hidup (Tahun)	Tahun	75,37	**75,59**	75,57	**75,78**
6	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	Tahun	16,58	**16,58**	16,6	**16,61**
7	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	Tahun	11,64	**11,64**	11,74	**11,76**
8	Pengeluaran Per Kapita (Rp. Ribu)	Rp. Ribu	15.689	**15.957**	15.928	**16.175**
9	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Persentase	9,88	**9,7**	9,45	**9,04**
10	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	Jiwa	35.313	**37.380**	32.589	**30.728**
11	Tingkat Kemiskinan (%)	Persentase	3,66	**3,63**	3,34	**3,12**
12	Gini Ratio	Indeks	0,32	**0.348**	0,32	**0,32**

Sumber: BPS Kota Padang 2026 dan RPJMD Kota Padang 2025-2029

Berdasarkan Target Indikator makro kota Padang diatas Mengacu pada arahan sistem perencanaan nasional (Pedoman Umum Penyusunan RKPD melalui Program Strategis Nasional/Pro-SN) serta disandingkan dengan Program Unggulan Pemerintah Kota Padang, berikut arah kebijakan ekonomi untuk tahun 2027:

1. Pengendalian Inflasi Urban dan Kestabilan Harga Domestik

Sinkronisasi Pro-SN terkait Pengendalian Inflasi, Arah Kebijakan Daerah adalah memitigasi dampak pelebaran Gini Ratio (0,348), fokus utama diarahkan pada intervensi pasar untuk komoditas pangan pokok (volatile foods). Pemko Padang mengarahkan kebijakan pada **Aktivasi Kerja Sama Antar-Daerah (KAD)** guna mengamankan pasokan pangan berkala dan mencegah lonjakan harga musiman di wilayah perkotaan.

2. Transformasi Sektor Pertanian dan Penguatan Ketahanan Pangan Kota

Sinkronisasi Pro-SN terkait Swasembada Pangan/Irigasi serta Pendayagunaan Penyuluh Pertanian, Arah Kebijakan Daerah Mengoptimalkan lahan pertanian perkotaan produktif yang tersisa di koridor pinggiran kota (seperti Koto Tangah, Kuranji, Pauh, Lubuk Kilangan, Lubuk Begalung dan Bungus). Program diwujudkan melalui **Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier**, peningkatan kapasitas kelompok tani binaan melalui penyuluh lapangan tangguh bencana, serta stimulus program urban farming (pertanian pekarangan) berskala komunitas.

3. **Pemberdayaan UMKM, Hilirisasi Industri Kreatif, dan Koperasi Kelurahan**

Sinkronisasi Pro-SN terkait Percepatan Pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih serta Industrialisasi dan Hilirisasi Lapangan Pekerjaan, Arah Kebijakan Daerah untuk merespons tingginya angka pengangguran terbuka yang berada di level 9,70%, Program Unggulan Kota Padang difokuskan pada penciptaan wirausaha baru tangguh digital. Arah kebijakan 2027 memprioritaskan **Akses Pembiayaan Mikro Terarah melalui Lembaga Keuangan Mikro/Koperasi Kelurahan**, penyediaan ruang pameran industri kreatif terpadu (Youth Center), serta hilirisasi produk olahan makanan/kuliner lokal bernilai tambah tinggi melalui Sentra Rendang dan Rumah Wirausaha.

4. Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Berbasis Padat Karya

Sinkronisasi Pro-SN terkait Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan Eksretrim, Arah Kebijakan Daerah Menurunkan populasi penduduk miskin menuju target jangka menengah (di bawah 32.589 jiwa) melalui pergeseran strategi bantuan sosial konsumtif menjadi bantuan produktif. Kebijakan ini diwujudkan dengan pengintegrasian database kemiskinan dengan **Program Padat Karya** guna memastikan penyerapan tenaga kerja lokal dari keluarga rentan secara langsung.

5. Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan dan Resiliensi Perkotaan

Sinkronisasi Pro-SN terkait Pelestarian Lingkungan dan Pengelolaan Sampah, Arah Kebijakan untuk menghadapi risiko bencana wilayah, arah kebijakan dititikberatkan pada aspek keberlanjutan daya dukung lingkungan. Program unggulan meliputi **Modernisasi Tata Kelola Sampah Berbasis Ekonomi Sirkular** di tingkat kecamatan, peningkatan kapasitas reduksi sampah harian di TPA Air Dingin, serta pembangunan berkala infrastruktur fisik ramah lingkungan penyerap banjir perkotaan.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan instrumen strategis yang digunakan untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan. Dalam konteks pembangunan Kota Padang, kebijakan keuangan daerah diarahkan

untuk mendukung program prioritas yang tertuang dalam visi dan misi kepala daerah, serta selaras dengan sasaran pembangunan nasional dan provinsi. Pengelolaan anggaran difokuskan pada optimalisasi pendapatan asli daerah, efisiensi belanja yang berorientasi pada hasil (*outcome*), serta penguatan kapasitas fiskal daerah guna mewujudkan kemandirian keuangan yang berkelanjutan. Dengan demikian, arah kebijakan keuangan daerah menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mampu menjawab tantangan pembangunan secara adaptif dan berkelanjutan.Arah Kebijakan Pendapatan Daerah.

Belanja Daerah merupakan instrumen utama dalam mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, baik yang bersifat wajib maupun pilihan, sesuai dengan potensi dan karakteristik masing-masing daerah. Selain itu, Belanja Daerah juga mencakup pembiayaan untuk urusan pemerintahan penunjang sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara klasifikasi, Belanja Daerah terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Belanja Operasi mencakup pengeluaran yang digunakan untuk mendanai kegiatan rutin pemerintahan yang memberikan manfaat jangka pendek, seperti belanja pegawai, barang dan jasa, serta hibah. Sementara itu, Belanja Modal dialokasikan untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat jangka panjang, melampaui satu periode akuntansi, seperti pembangunan infrastruktur dan pengadaan peralatan. Belanja Tidak Terduga disediakan untuk membiayai keperluan mendesak yang sifatnya darurat dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, seperti penanganan bencana alam atau krisis kesehatan. Adapun Belanja Transfer merupakan pengeluaran dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah lainnya atau kepada pemerintah desa dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara menyeluruh. Seluruh klasifikasi belanja ini dirancang untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah secara efektif dan berkelanjutan.

Secara umum, kebijakan keuangan daerah Tahun 2027 diarahkan untuk mendukung pendanaan program-program pembangunan daerah yang strategis dan selaras dengan visi misi kepala daerah sebagai berikut:

1. Pemenuhan belanja yang dimandatkan (*mandatory spending*) antara lain:
    a. Pendidikan (20 %);
    b. Kesehatan (10 %);
    c. Infrastruktur (40 %);
    d. Belanja pegawai (30%);
    e. Serta pendanaan Kelurahan yang secara alokasi secara kumulatif telah mendekati batas minimal, sedangkan dalam hal peruntukan diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan.
2. Prioritas belanja program pembangunan daerah antara lain:

a. Pemenuhan belanja yang mendukung pencapaian visi misi kepala daerah;
b. Pemenuhan pendanaan dalam rangka belanja yang bersifat wajib dan mengikat serta pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) pada 6 urusan wajib pelayanan dasar;
c. SDG's (pengurangan kemiskinan) dan sinkronisasi prioritas program/ kegiatan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi;
d. Pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah; dan

3. Pemenuhan belanja Universal Health Coverage (UHC) mencapai 100% dengan pelayanan jaminan kesehatan gratis bagi warga Kota Padang tanpa ada klasisfikasi tertentu.

3.2.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan salah satu komponen utama dalam kerangka keuangan daerah yang menjadi dasar dalam menentukan kapasitas fiskal Pemerintah Daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam penyusunan RKPD Kota Padang Tahun 2027, arah kebijakan pendapatan daerah disusun secara realistis, terukur, dan akuntabel dengan memperhatikan perkembangan kinerja pendapatan daerah tahun-tahun sebelumnya, proyeksi kondisi ekonomi daerah, kebijakan fiskal nasional dan daerah, serta potensi sumber-sumber pendapatan yang dapat dioptimalkan.

Sesuai dengan pendekatan perencanaan pembangunan daerah, pendapatan daerah tidak hanya dipandang sebagai instrumen pembiayaan, tetapi juga sebagai cerminan kemampuan daerah dalam mengelola potensi fiskal secara mandiri dan berkelanjutan. Oleh karena itu, kebijakan pendapatan daerah diarahkan untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, peningkatan kualitas pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah, pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi pendapatan, serta penguatan basis data objek dan subjek pendapatan daerah.

Pada sisi lain, pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi tetap menjadi bagian penting dalam mendukung kesinambungan pendanaan pembangunan Kota Padang. Pengelolaan pendapatan transfer diarahkan agar sejalan dengan prioritas pembangunan daerah, mendukung pencapaian target kinerja pembangunan, serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, perencanaan pendapatan daerah Tahun 2027 perlu dilakukan secara cermat agar mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan pendanaan pembangunan dengan kemampuan fiskal daerah yang tersedia.

Dalam konteks penyusunan RKPD Kota Padang Tahun 2027, kebijakan pendapatan daerah diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kota Padang Tahun 2025–2029. Proyeksi

pendapatan daerah disusun dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian, rasionalitas, kepatuhan terhadap regulasi, serta potensi peningkatan penerimaan yang dapat dicapai melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah. Upaya tersebut diharapkan mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah, meningkatkan kualitas belanja pembangunan, dan memastikan keberlanjutan pendanaan program prioritas daerah pada tahun rencana.

Dengan arah kebijakan tersebut, pendapatan daerah Kota Padang Tahun 2027 diharapkan dapat dikelola secara lebih optimal, transparan, dan berorientasi pada peningkatan pelayanan publik. Penguatan pendapatan daerah menjadi prasyarat penting dalam mewujudkan pembangunan daerah yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, serta memperkuat daya saing Kota Padang secara berkelanjutan.

Berikut disajikan data Pendapatan Kota Padang Tahun 2023-2027 sebagai berikut:

Tabel 3-4 Pendapatan Daerah Kota Padang Tahun 2023-2027

No.	Jenis Pendapatan	2023			2024			2025			Target RKPD 2026	Target RKPD 2027
		Target	Realisasi	Persentase	Target	Realisasi	Persentase	Target	Realisasi	Persentase		
1.	**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**729.911.859.086,00**	**658.744.322.507,50**	**90,25**	**706.838.011.883,00**	**662.552.174.238,82**	**93,73**	**897.692.136.639,00**	**924.526.701.752,07**	**102,99**	**1.052.755.265.900,00**	**1.101.273.636.500,00**
1.1	Pajak Daerah	571.804.687.930,00	487.629.583.762,00	85,28	541.844.117.219,00	493.756.839.959,00	91,13	695.363.731.133,00	729.421.159.856,50	104,90	834.256.444.500,00	874.475.000.000,00
1.2	Retribusi Daerah	45.136.239.965,00	48.690.194.076,69	107,87	122.330.706.129,00	119.026.527.644,00	97,30	114.519.363.316,00	96.185.424.976,06	83,99	132.153.503.116,00	124.879.633.352,00
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20.067.188.004,00	20.067.188.003,00	100,00	22.137.335.408,00	22.137.335.408,21	100,00	23.290.287.153,00	23.640.612.561,26	101,50	27.290.287.150,00	39.500.000.000,00
1.4	Lain-lain PAD yang Sah	92.903.743.187,00	102.357.356.665,81	110,18	20.526.853.127,00	27.631.471.227,61	134,61	64.518.755.037,00	75.279.504.358,25	116,68	59.055.031.134,00	62.419.003.148,00
2.	**Pendapatan Transfer**	**1.697.892.484.142,00**	**1.648.795.781.756,00**	**97,11**	**1.845.776.283.964,00**	**1.864.993.191.170,00**	**101,04**	**1.972.147.334.944,59**	**1.920.800.496.691,00**	**97,40**	**1.943.391.139.189,00**	**1.521.695.380.422,00**
2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.560.517.771.223,00	1.537.962.466.174,00	98,55	1.714.524.331.525,00	1.733.125.087.487,00	101,08	1.878.838.317.192,00	1.816.334.451.190,00	96,67	1.860.680.329.043,00	1.456.385.442.000,00
2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	137.374.712.919,00	110.833.315.582,00	80,68	131.251.952.439,00	131.868.103.683,00	100,47	93.309.017.752,59	104.466.045.501,00	111,96	82.710.810.146,00	65.309.938.422,00
3.	**Lain-lain Pendapatan yang Sah**	**4.098.000.000,00**	**2.972.997.100,00**	**72,55**	**3.732.000.000,00**	**3.732.000.000,00**	**100,00**	**5.215.000.000,00**	**5.215.000.000,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
3.1	Pendapatan Hibah	4.098.000.000,00	2.972.997.100,00	72,55	3.732.000.000,00	3.732.000.000,00	100,00	1.215.000.000,00	1.215.000.000,00	100,00	0,00	0,00
3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	100,00	0,00	0,00

No.	Jenis Pendapatan	2023			2024			2025			Target RKPD 2026	Target RKPD 2027
		Target	Realisasi	Persentase	Target	Realisasi	Persentase	Target	Realisasi	Persentase		
	Pemerintah Daerah Lainnya											
	Jumlah	**2.431.902.343.228,00**	**2.310.513.101.363,50**	**95,01**	**2.556.346.295.847,00**	**2.531.277.365.408,82**	**99,02**	**2.875.054.471.583,59**	**2.850.542.198.443,07**	**99,15**	**2.996.146.405.089,00**	**2.622.969.016.922,00**

Berdasarkan perkembangan pendapatan daerah Kota Padang Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2025, kinerja pendapatan daerah menunjukkan kecenderungan yang semakin membaik dari sisi pencapaian terhadap target. Pada Tahun 2023, realisasi pendapatan daerah tercatat sebesar Rp2,310 triliun atau 95,01 persen dari target sebesar Rp2,431 triliun. Pada Tahun 2024, realisasi meningkat menjadi Rp2,531 triliun atau 99,02 persen dari target sebesar Rp2,556 triliun. Selanjutnya pada Tahun 2025, realisasi pendapatan daerah kembali meningkat menjadi Rp2,850 triliun atau 99,15 persen dari target sebesar Rp2,875 triliun. Kondisi ini menggambarkan bahwa perencanaan pendapatan daerah semakin mendekati kapasitas riil penerimaan daerah, meskipun masih terdapat beberapa komponen pendapatan yang memerlukan penguatan dari sisi akurasi proyeksi dan optimalisasi penerimaan.

Secara nominal, realisasi pendapatan daerah mengalami peningkatan dari Rp2,310 triliun pada Tahun 2023 menjadi Rp2,531 triliun pada Tahun 2024, atau tumbuh sekitar 9,55 persen. Pada Tahun 2025, realisasi pendapatan daerah kembali meningkat menjadi Rp2,850 triliun, atau tumbuh sekitar 12,61 persen dibandingkan realisasi Tahun 2024. Peningkatan ini terutama didorong oleh pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dan pendapatan transfer. Namun demikian, target pendapatan daerah Tahun 2027 ditetapkan sebesar Rp2,622 triliun, lebih rendah dibandingkan target RKPD Tahun 2026 sebesar Rp2,996 triliun. Penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh menurunnya target pendapatan transfer, sehingga perencanaan pendapatan Tahun 2027 perlu diarahkan secara lebih selektif, realistis, dan berbasis pada kapasitas fiskal yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dari sisi struktur pendapatan, pendapatan transfer masih menjadi komponen terbesar dalam pendapatan daerah Kota Padang. Pada Tahun 2025, realisasi pendapatan transfer mencapai Rp1,920 triliun atau sekitar 67,38 persen dari total realisasi pendapatan daerah. Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah mencapai Rp924,526 miliar atau sekitar 32,43 persen dari total realisasi pendapatan daerah. Komposisi ini menunjukkan bahwa ketergantungan fiskal daerah terhadap pendapatan transfer masih cukup besar. Namun, pada target Tahun 2027, kontribusi PAD diproyeksikan meningkat menjadi sekitar 41,99 persen dari total pendapatan daerah, sedangkan pendapatan transfer menurun menjadi sekitar 58,01 persen. Pergeseran struktur ini menunjukkan adanya arah penguatan kemandirian fiskal daerah, meskipun peningkatan proporsi PAD juga dipengaruhi oleh penurunan target transfer, bukan semata-mata karena pertumbuhan PAD.

Kinerja Pendapatan Asli Daerah menunjukkan perkembangan positif. Realisasi PAD meningkat dari Rp658,744 miliar pada Tahun 2023 menjadi Rp662,552 miliar pada Tahun 2024, dan meningkat signifikan menjadi Rp924,526 miliar pada Tahun 2025. Dari sisi pencapaian target, PAD meningkat dari 90,25 persen pada Tahun 2023 menjadi 93,73 persen pada Tahun 2024, dan melampaui target pada Tahun 2025 dengan capaian sebesar 102,99 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa kapasitas penerimaan daerah dari

sumber-sumber lokal mengalami penguatan, khususnya pada komponen pajak daerah dan lain-lain PAD yang sah. Target PAD Tahun 2027 sebesar Rp1,101 triliun juga menunjukkan arah kebijakan yang lebih progresif dalam memperkuat kemandirian fiskal Kota Padang.

Pajak daerah menjadi komponen utama pembentuk PAD. Pada Tahun 2025, realisasi pajak daerah mencapai Rp729,421 miliar atau sekitar 78,90 persen dari total PAD. Capaian pajak daerah juga menunjukkan peningkatan yang signifikan, dari 85,28 persen pada Tahun 2023 menjadi 91,13 persen pada Tahun 2024, dan melampaui target pada Tahun 2025 dengan capaian 104,90 persen. Target pajak daerah Tahun 2027 sebesar Rp874,475 miliar menunjukkan bahwa pajak daerah tetap menjadi tulang punggung PAD. Oleh karena itu, penguatan kebijakan pendapatan Tahun 2027 perlu diarahkan pada peningkatan kualitas basis data wajib pajak, perluasan objek pajak, peningkatan kepatuhan, digitalisasi layanan pembayaran, serta pengawasan dan pengendalian terhadap potensi kebocoran penerimaan.

Berbeda dengan pajak daerah, kinerja retribusi daerah menunjukkan fluktuasi. Pada Tahun 2023, realisasi retribusi daerah melampaui target dengan capaian 107,87 persen. Namun, pada Tahun 2024 capaian menurun menjadi 97,30 persen, dan pada Tahun 2025 kembali menurun menjadi 83,99 persen. Secara nominal, realisasi retribusi daerah pada Tahun 2025 sebesar Rp96,185 miliar, lebih rendah dibandingkan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp119,026 miliar. Kondisi ini menunjukkan bahwa retribusi daerah masih menghadapi tantangan dalam optimalisasi penerimaan, baik dari sisi efektivitas pelayanan, validitas potensi, kepatuhan pembayaran, maupun penyesuaian target terhadap kapasitas riil. Target retribusi Tahun 2027 sebesar Rp124,879 miliar perlu didukung dengan pembenahan tata kelola pemungutan, peningkatan kualitas layanan yang menjadi dasar pemungutan retribusi, serta evaluasi terhadap objek retribusi yang belum memberikan kontribusi optimal.

Komponen hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menunjukkan kinerja yang relatif stabil dan konsisten. Pada Tahun 2023 dan 2024, capaian komponen ini berada pada kisaran 100 persen, sedangkan pada Tahun 2025 meningkat menjadi 101,50 persen. Realisasi Tahun 2025 sebesar Rp23,640 miliar meningkat dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp22,137 miliar. Namun, target Tahun 2027 ditetapkan sebesar Rp39,500 miliar, atau meningkat cukup signifikan dibandingkan target Tahun 2026 sebesar Rp27,290 miliar. Peningkatan target ini perlu diikuti dengan penguatan kinerja badan usaha milik daerah, peningkatan tata kelola perusahaan daerah, serta perencanaan dividen yang realistis agar target yang ditetapkan dapat dicapai tanpa mengganggu keberlanjutan usaha.

Komponen lain-lain PAD yang sah juga menunjukkan capaian yang relatif tinggi terhadap target, yaitu 110,18 persen pada Tahun 2023, 134,61 persen pada Tahun 2024, dan 116,68 persen pada Tahun 2025. Meskipun demikian, secara nominal komponen ini cenderung berfluktuasi. Realisasi Tahun 2023 sebesar Rp102,357 miliar,

menurun menjadi Rp27,631 miliar pada Tahun 2024, kemudian meningkat kembali menjadi Rp75,279 miliar pada Tahun 2025. Fluktuasi tersebut menunjukkan bahwa komponen lain-lain PAD yang sah memiliki karakter penerimaan yang tidak seluruhnya bersifat reguler dan berulang. Oleh sebab itu, dalam penyusunan target Tahun 2027 sebesar Rp62,419 miliar, perlu diterapkan prinsip kehati-hatian agar proyeksi penerimaan tidak terlalu bergantung pada sumber-sumber yang bersifat insidental.

Pada kelompok pendapatan transfer, realisasi menunjukkan kinerja yang cukup baik, meskipun masih berfluktuasi. Realisasi pendapatan transfer pada Tahun 2023 sebesar Rp1,648 triliun atau 97,11 persen dari target. Pada Tahun 2024, realisasi meningkat menjadi Rp1,864 triliun atau 101,04 persen dari target. Pada Tahun 2025, realisasi kembali meningkat secara nominal menjadi Rp1,920 triliun, namun capaian terhadap target menurun menjadi 97,40 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan transfer masih menjadi sumber penerimaan yang besar, tetapi sangat dipengaruhi oleh kebijakan fiskal pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Target pendapatan transfer Tahun 2027 sebesar Rp1,521 triliun mengalami penurunan cukup besar dibandingkan target Tahun 2026 sebesar Rp1,943 triliun. Penurunan ini perlu menjadi perhatian dalam penyusunan belanja daerah, khususnya untuk menjaga keseimbangan antara kapasitas pendapatan dan kebutuhan pendanaan pembangunan.

Pendapatan transfer pemerintah pusat merupakan komponen terbesar dalam pendapatan transfer. Pada Tahun 2025, realisasi transfer pemerintah pusat sebesar Rp1,816 triliun atau 96,67 persen dari target. Target Tahun 2027 ditetapkan sebesar Rp1,456 triliun, menurun dibandingkan target Tahun 2026 sebesar Rp1,860 triliun. Penurunan ini menunjukkan bahwa ruang fiskal daerah yang bersumber dari pemerintah pusat diproyeksikan lebih terbatas pada Tahun 2027. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Padang perlu menyusun kebijakan belanja yang lebih selektif, memperkuat prioritas pembangunan, meningkatkan efektivitas belanja wajib dan mengikat, serta memastikan bahwa program prioritas daerah tetap dapat didanai secara memadai.

Sementara itu, pendapatan transfer antar daerah juga menunjukkan dinamika yang cukup tajam. Pada Tahun 2023, capaian transfer antar daerah hanya sebesar 80,68 persen, kemudian meningkat menjadi 100,47 persen pada Tahun 2024 dan 111,96 persen pada Tahun 2025. Namun, target Tahun 2027 sebesar Rp65,309 miliar lebih rendah dibandingkan target Tahun 2026 sebesar Rp82,710 miliar dan realisasi Tahun 2025 sebesar Rp104,466 miliar. Penurunan ini mengindikasikan bahwa pendapatan transfer antar daerah perlu diproyeksikan secara konservatif karena sangat bergantung pada kebijakan bagi hasil dan kemampuan keuangan pemerintah provinsi.

Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah memberikan kontribusi yang sangat kecil terhadap total pendapatan daerah. Pada Tahun 2025, realisasinya sebesar Rp5,215 miliar atau sekitar 0,18 persen dari total pendapatan daerah. Pada Tahun 2026 dan Tahun 2027, komponen ini tidak ditargetkan. Hal ini mencerminkan

pendekatan perencanaan yang berhati-hati, terutama karena pendapatan hibah dan penerimaan sejenis umumnya bersifat tidak tetap, bergantung pada kepastian komitmen, perjanjian, atau kebijakan pemberi hibah. Dengan demikian, tidak dimasukkannya target pada Tahun 2027 dapat dipandang sebagai bentuk kehati-hatian fiskal dalam menjaga kredibilitas proyeksi pendapatan daerah.

Secara umum, arah pendapatan daerah Kota Padang Tahun 2027 menunjukkan adanya tantangan fiskal yang perlu diantisipasi secara serius. Di satu sisi, PAD ditargetkan terus meningkat sebagai upaya memperkuat kemandirian fiskal daerah. Di sisi lain, pendapatan transfer diproyeksikan menurun cukup besar sehingga total pendapatan daerah Tahun 2027 lebih rendah dibandingkan target Tahun 2026. Kondisi ini menuntut adanya strategi pendapatan yang lebih terintegrasi, tidak hanya melalui peningkatan target penerimaan, tetapi juga melalui perbaikan tata kelola, penguatan basis data, peningkatan kualitas pelayanan, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengawasan terhadap seluruh sumber pendapatan daerah.

Dengan memperhatikan perkembangan tersebut, kebijakan pendapatan daerah dalam RKPD Kota Padang Tahun 2027 perlu diarahkan pada beberapa fokus utama, yaitu :

1. optimalisasi PAD yang tetap memperhatikan kapasitas ekonomi masyarakat
2. peningkatan akurasi perencanaan pendapatan
3. penguatan kinerja pajak daerah sebagai sumber utama PAD\
4. pembenahan tata kelola retribusi daerah
5. peningkatan kontribusi kekayaan daerah yang dipisahkan secara realistis
6. serta antisipasi terhadap penurunan pendapatan transfer.

Seiring dengan kebijakan pengalihan sebagian penerimaan PKB dan BBNKB menjadi Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang langsung masuk ke kas kabupaten/kota, terjadi perubahan struktur pendapatan daerah. Penerimaan yang sebelumnya dikelola oleh pemerintah provinsi beralih menjadi kewenangan kabupaten/kota.

Pengaruh utama dari kebijakan ini adalah :

Dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal daerah yang mandiri dan berkelanjutan, Pemerintah Daerah perlu melakukan optimalisasi penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, serta sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) lainnya. Upaya ini memerlukan perbaikan tata kelola pada setiap potensi pendapatan dengan memaksimalkan seluruh sumber daya yang tersedia. Optimalisasi tersebut dilakukan melalui langkah-langkah strategis berikut:

Intensifikasi pendapatan asli daerah melalui;

Pengembangan dan peningkatan fasilitas serta infrastruktur pelayanan publik yang berkaitan dengan pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya layanan pajak dan retribusi daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui implementasi

sistem informasi berbasis online, penyederhanaan prosedur administrasi, serta peningkatan akses dan kedekatan layanan kepada masyarakat.

1. Melakukan penyempurnaan terhadap sistem, mekanisme, dan prosedur pengelolaan serta pelayanan PAD agar berjalan lebih efektif, efisien, dan transparan melalui optimalisasi penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP).
2. Peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui program sosialisasi yang masif, perbaikan sistem pengendalian dan pengawasan, serta reformasi mekanisme pemungutan pajak yang lebih cepat, sederhana, dan akuntabel. Diterapkan pula sistem reward and punishment untuk mendorong kepatuhan.
3. Meningkatkan kompetensi dan profesionalitas sumber daya manusia, baik aparatur pemungut maupun pengelola PAD, melalui program pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan.
4. Membenahi sistem pemungutan pajak dan retribusi yang melibatkan pihak ketiga agar lebih transparan dan akuntabel, antara lain dengan memaksimalkan penggunaan sistem transaksi non-tunai.
5. Optimalisasi pajak daerah melalui opsen pajak kendaraan bermotor yang telah dimulai tahun 2025 dengan stimulus penghapusn pokok dan denda tertunggak berdasarkan kebijakan Provinsi Sumatera Barat.
6. Optimalisasi penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui perbaikan layanan pendaftaran objek pajak, mutasi objek/subjek PBB, pelayanan pembetulan dan salinan dokumen (SPPT/SKPD/STP), penanganan keberatan dan permohonan pengurangan pajak, serta pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi). Selain itu, kemudahan pembayaran PBB secara online juga didorong dengan menjalin kerja sama dengan bank-bank umum yang beroperasi di wilayah Kota. Tidak kalah penting juga melakukan evaluasi dan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang digunakan sebagai dasar dalam perhitungan PBB di Kota Padang.
7. Melakukan penyesuaian tarif pajak daerah dan retribusi daerah serta obyek pendapatan asli daerah lainnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan kondisi masyarakat.

Ekstensifikasi pendapatan asli daerah melalui:

1. Melaksanakan pendataan secara individual serta melakukan pemutakhiran data berdasarkan permohonan wajib pajak, termasuk menerapkan penyesuaian otomatis terhadap SPPT sesuai BPHTB yang telah tervalidasi.
2. Pendataan objek dan subjek pajak secara akurat dan berkala, termasuk pendataan ulang terhadap objek dan wajib pajak yang mengalami perubahan. Data yang lengkap, misalnya dari Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), menjadi dasar perhitungan potensi PAD dan penggalian potensi wajib pajak yang lebih optimal.
3. Melakukan evaluasi terhadap regulasi yang mengatur Pendapatan Asli Daerah serta menyusun kajian untuk

mengidentifikasi dan mengembangkan berbagai potensi sumber PAD.

4. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan melalui kegiatan sosialisasi kepada wajib pajak dan wajib retribusi, pemberian apresiasi kepada wajib pajak yang patuh, serta penerapan sanksi administratif bagi yang tidak memenuhi kewajiban.
5. Memperkuat tata kelola dan meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar mampu memberikan kontribusi yang lebih optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah.
6. Mempererat koordinasi dan harmonisasi antar perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pengelolaan pendapatan daerah.
7. Melakukan optimalisasi penerimaan pendapatan dengan pemanfaatan/ pengelolaan aset daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, termasuk pendapatan dari pihak ketiga;
8. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam upaya peningkatan penerimaan dari Transfer Antar Daerah maupun Dana Bagi Hasil dari Provinsi;
9. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terkait pelaksanaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB.
10. Peningkatan prestasi/ kinerja Pemerintah Kota Padang sebagai indikator dalam upaya perolehan Pendapatan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), seperti: Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID), Bantuan Keuangan dan sejenisnya dalam setiap tahunnya.
11. Percepatan pembangunan daerah melalui pengajuan Proyek Strategis kepada Pemerintah Pusat, yang direncanakan akan didanai melalui mekanisme Dana Alokasi Khusus (DAK).

Sehubungan dengan keterbatasan kemampuan Pendapatan Asli Daerah, pemerintah daerah perlu mengupayakan alternatif sumber pendanaan di luar APBD Kota Padang. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan mengoptimalkan pemanfaatan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP), dukungan dari lembaga sosial, komunitas, serta organisasi yang berada di Kota Padang, termasuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) daerah, serta berbagai sumber pembiayaan lainnya sebagaimana visi kepala daerah mengoptimalkan semua potensi.

3.2.2. Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan instrumen utama Pemerintah Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan, mewujudkan pelayanan publik, serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah. Dalam kerangka penyusunan RKPD Kota Padang Tahun 2027, belanja daerah diarahkan untuk mendanai program, kegiatan, dan subkegiatan prioritas yang selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah, prioritas pembangunan nasional, prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat, serta sasaran RPJMD Kota Padang Tahun 2025–2029.

Pengelolaan belanja daerah Kota Padang diarahkan untuk memihak pada kepentingan publik, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, perlindungan, serta peningkatan kualitas hidup. Belanja diarahkan pada program prioritas berbasis hasil sebagai instrumen pencapaian target pembangunan daerah, dengan penyesuaian komponen APBD mengikuti dinamika yang berkembang. Adapun arah kebijakan belanja Kota Padang tahun 2027 adalah :

1. Percepatan perwujudan program unggulan dan aktivasi perwujudan visi dan misi pembangunan.
2. Menjaga rasio belanja pegawai diluar tunjangan guru maksimal sebesar 30% dari belanja APBD setiap tahunnya.
3. Optimalisasi belanja Modal dengan rasio minimal 40% dari APBD guna meningkatkan sarana dan prasarana perekonomian rakyat serta peningkatan pelayanan publik.
4. Tambahan penghasilan bagi pegawai diberikan dengan mempertimbangkan beban kerja, lokasi penugasan, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi, serta pertimbangan objektif lainnya yang relevan.
5. Belanja barang/jasa dianggarkan melalui program dan kegiatan yang memperhatikan skala prioritas pembangunan Kota Padang.
6. Belanja hibah dialokasikan untuk mendukung pencapaian sasaran, program, dan kegiatan Pemerintah Kota Padang, sesuai kepentingan daerah dalam mendukung fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat, dengan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, serta manfaat bagi masyarakat.
7. Belanja bantuan sosial difokuskan untuk memberikan jaminan dan perlindungan sosial, pemberdayaan serta rehabilitasi sosial, termasuk penanggulangan kemiskinan dan bencana di Kota Padang.
8. Belanja tidak terduga dialokasikan untuk kebutuhan darurat yang tidak terprediksi sebelumnya, keperluan mendesak, pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya, serta bantuan sosial insidental.
9. Alokasi anggaran mandatori dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Koordinasi rutin dengan seluruh OPD Kota Padang dilakukan guna mendorong peningkatan penyerapan anggaran, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi agar belanja daerah berjalan efektif dan efisien.

Dalam penyusunan RKPD Kota Padang Tahun 2027, kebijakan belanja daerah diarahkan secara selektif dengan mengutamakan pemenuhan belanja wajib dan mengikat, pendanaan urusan pelayanan dasar, pencapaian Standar Pelayanan Minimal, serta pelaksanaan program prioritas daerah. Selain itu, belanja daerah juga perlu mendukung penanganan permasalahan strategis kota, peningkatan kualitas infrastruktur, penguatan ekonomi daerah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penanggulangan kemiskinan, pengendalian inflasi, dan peningkatan tata kelola pemerintahan.

Berikut disajikan Belanja Daerah Kota Padang Tahun 2023-2027 sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3-5 Belanja Daerah Kota Padang Tahun 2023-2027

		2023			2024			2025			Target RKPD 2026	Target RKPD 2027
No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Persentase	Anggaran	Realisasi	Persentase	Anggaran	Realisasi	Persentase		
1.	**Belanja Daerah**	**2.499.903.575.679,00**	**2.324.673.967.306,73**	**92,99**	**2.595.734.199.335,00**	**2.444.666.033.218,96**	**94,18**	**3.037.706.279.299,30**	**2.818.290.949.526,79**	**92,78**	**2.848.582.339.492,00**	**2.600.675.186.796,84**
	Belanja Operasi	2.060.126.171.675,00	1.924.093.923.572,24	93,40	2.338.143.451.546,25	2.212.037.177.578,08	94,61	2.551.891.477.231,01	2.372.205.977.851,54	92,96		
	Belanja Pegawai	1.045.359.849.326,00	966.108.721.300,00	92,42	1.282.569.246.434,00	1.232.855.581.482,00	96,12	1.476.201.673.908,15	1.379.474.802.972,00	93,45	1.876.952.077.860,00	1.602.091.714.014,27
	Belanja Barang dan Jasa	762.027.674.416,00	724.492.347.958,07	95,07	824.605.559.886,25	768.016.316.807,08	93,14	927.813.457.660,86	858.367.321.284,54	92,52	815.949.393.024,00	896.949.771.843,57
	Belanja Bunga	2.616.295.538,00	2.496.004.487,00	95,40	1.828.640.289,00	1.828.640.289,00	100,00	2.240.643.397,00	1.185.217.028,00	52,90	14.269.096.750,00	547.156.570,00
	Belanja Subsidi	30.544.086.437,00	29.446.327.138,97	96,41	43.590.096.932,00	36.019.946.021,00	82,63	52.129.785.815,00	45.510.141.938,00	87,30	58.500.000.000,00	61.600.026.271,00
	Belanja Hibah	197.791.983.200,00	185.058.844.688,20	93,56	176.591.728.005,00	168.370.780.679,00	95,34	70.587.373.450,00	69.022.217.029,00	97,78	39.552.634.170,00	37.711.268.098,00
	Belanja Bantuan Sosial	21.786.282.758,00	16.491.678.000,00	75,70	8.958.180.000,00	4.945.912.300,00	55,21	22.918.543.000,00	18.646.277.600,00	81,36	43.359.137.688,00	1.775.250.000,00
2.	**Belanja Modal**	**433.877.641.134,00**	**399.691.617.435,49**	**92,12**	**243.964.970.488,75**	**227.292.967.758,88**	**93,17**	**465.877.483.256,29**	**434.109.475.577,25**	**93,18**	**364.978.367.237,00**	**265.654.957.756,16**
	Belanja Modal Tanah				206.178.400,00		0,00	17.498.010.641,00	16.139.786.100,00	92,24	19.860.000.000,00	2.986.200.000,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	62.837.800.611,00	54.517.581.855,00	86,76	74.434.739.817,00	71.383.544.680,00	95,90	161.877.743.291,90	152.983.599.489,00	94,51	50.857.590.390,00	28.950.233.857,08
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	266.818.055.811,00	254.375.266.684,49	95,34	68.240.289.842,20	62.320.986.678,88	91,33	139.928.786.222,14	127.929.900.359,21	91,43	73.446.491.743,00	101.053.416.923,00
	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	92.862.497.906,00	77.850.106.979,00	83,83	87.330.324.176,55	79.789.212.355,00	91,36	134.095.162.540,25	125.187.294.946,04	93,36	220.614.285.104,00	117.891.756.376,08

		2023			2024			2025			Target RKPD 2026	Target RKPD 2027
No	**Jenis Belanja**	**Anggaran**	**Realisasi**	**Persentase**	**Anggaran**	**Realisasi**	**Persentase**	**Anggaran**	**Realisasi**	**Persentase**		
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	10.721.286.806,00	12.479.569.567,00	116,40	13.532.953.253,00	13.630.040.045,00	100,72	11.998.309.561,00	11.410.983.183,00	95,10	200.000.000,00	14.418.850.000,00
	Belanja Modal Aset Lainnya	638.000.000,00	469.092.350,00	73,53	220.485.000,00	169.184.000,00	76,73	479.471.000,00	457.911.500,00	95,50		354.500.600,00
3.	**Belanja Tidak Terduga**	**5.899.762.870,00**	**888.426.299,00**	**15,06**	**13.625.777.300,00**	**5.335.887.882,00**	**39,16**	**19.937.318.812,00**	**11.975.496.098,00**	**60,07**	**7.343.645.583,00**	**13.896.795.728,00**
	Belanja Tidak Terduga	5.899.762.870,00	888.426.299,00	15,06	13.625.777.300,00	5.335.887.882,00	39,16	19.937.318.812,00	11.975.496.098,00	60,07	7.343.645.583,00	13.896.795.728,00

Berdasarkan tabel perkembangan belanja daerah Kota Padang Tahun 2023–2025, kinerja realisasi belanja menunjukkan capaian yang relatif stabil pada kisaran di atas 92 persen. Realisasi belanja daerah pada Tahun 2023 mencapai Rp2,324 triliun atau 92,99 persen dari anggaran sebesar Rp2,499 triliun. Pada Tahun 2024, realisasi meningkat menjadi Rp2,444 triliun atau 94,18 persen, dan pada Tahun 2025 kembali meningkat secara nominal menjadi Rp2,818 triliun meskipun persentase realisasinya sedikit menurun menjadi 92,78 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa kapasitas pelaksanaan anggaran Pemerintah Kota Padang secara umum cukup baik, namun masih terdapat ruang perbaikan dalam percepatan pelaksanaan kegiatan, pengendalian kas, dan peningkatan kualitas perencanaan agar deviasi antara anggaran dan realisasi dapat semakin ditekan.

Struktur belanja daerah masih didominasi oleh belanja operasi, khususnya belanja pegawai serta belanja barang dan jasa. Pada Tahun 2025, realisasi belanja operasi mencapai Rp2,372 triliun dari anggaran sebesar Rp2,551 triliun atau 92,96 persen. Di dalamnya, belanja pegawai terealisasi sebesar Rp1,379 triliun, sedangkan belanja barang dan jasa terealisasi sebesar Rp858,367 miliar. Dominasi belanja operasi menunjukkan bahwa sebagian besar kapasitas fiskal daerah masih diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemenuhan kebutuhan rutin perangkat daerah. Oleh karena itu, perencanaan belanja Tahun 2027 perlu diarahkan pada penguatan efisiensi belanja operasional, pengendalian belanja rutin, serta memastikan bahwa belanja barang dan jasa benar-benar berkorelasi dengan pencapaian keluaran dan hasil pembangunan.

Belanja modal menunjukkan pola yang cukup dinamis. Realisasi belanja modal pada Tahun 2023 sebesar Rp399,691 miliar, menurun menjadi Rp227,292 miliar pada Tahun 2024, kemudian meningkat signifikan menjadi Rp434,109 miliar pada Tahun 2025. Peningkatan realisasi belanja modal Tahun 2025 mencerminkan adanya penguatan kembali belanja yang berorientasi pada penyediaan aset, infrastruktur, serta sarana dan prasarana pelayanan publik. Namun, target RKPD Tahun 2027 untuk belanja modal sebesar Rp265,654 miliar lebih rendah dibandingkan target RKPD Tahun 2026 sebesar Rp364,978 miliar. Hal ini mengindikasikan bahwa ruang fiskal untuk belanja pembangunan fisik pada Tahun 2027 cenderung lebih terbatas, sehingga perlu dilakukan penajaman prioritas terhadap kegiatan yang memiliki daya ungkit tinggi, tingkat kesiapan pelaksanaan yang memadai, serta manfaat langsung bagi masyarakat.

Pada komponen belanja hibah, subsidi, bantuan sosial, dan belanja tidak terduga terlihat adanya variasi penganggaran sesuai kebutuhan dan kebijakan daerah. Belanja hibah mengalami penurunan dari realisasi Rp185,058 miliar pada Tahun 2023 menjadi Rp69,022 miliar pada Tahun 2025, dengan target RKPD Tahun 2027 sebesar Rp37,711 miliar. Belanja bantuan sosial juga berfluktuasi, dari Rp16,491 miliar pada Tahun 2023, turun menjadi Rp4,945 miliar pada Tahun 2024, kemudian meningkat menjadi Rp18,646 miliar pada Tahun 2025, namun ditargetkan turun

menjadi Rp1,775 miliar pada Tahun 2027. Sementara itu, belanja tidak terduga pada Tahun 2027 ditargetkan sebesar Rp13,896 miliar, lebih tinggi dibandingkan target Tahun 2026 sebesar Rp7,343 miliar. Hal ini menunjukkan perlunya keseimbangan antara kebijakan antisipatif terhadap risiko fiskal, bencana, dan kondisi darurat dengan prinsip kehati-hatian serta akuntabilitas dalam penganggaran.

3.2.3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan komponen dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang digunakan untuk menutup defisit anggaran dan/atau memanfaatkan surplus anggaran dalam rangka menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat. Dalam kerangka penyusunan RKPD Kota Padang Tahun 2027, pembiayaan daerah diarahkan sebagai instrumen fiskal yang dikelola secara hati-hati, terukur, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan pembiayaan daerah Kota Padang Tahun 2027 disusun dengan memperhatikan prinsip keseimbangan antara kebutuhan pendanaan pembangunan dan kemampuan keuangan daerah. Dalam hal terdapat defisit anggaran, pembiayaan daerah diarahkan untuk menutup selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah secara rasional serta tetap menjaga kesehatan fiskal daerah. Sebaliknya, apabila terdapat surplus anggaran, maka pemanfaatannya diarahkan untuk mendukung penguatan kapasitas fiskal daerah, pembentukan cadangan pembiayaan, penyertaan modal daerah yang produktif, serta kebutuhan strategis lainnya yang memberikan manfaat bagi peningkatan pelayanan publik dan pembangunan daerah.

Adapun arah kebijakan pembiayaan daerah Kota Padang tahun 2027 sebagai berikut:

1. Penerimaan pembiayaan diutamakan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), dimana jumlahnya semakin menurun yang dialokasikan untuk menunjang optimalisasi pelaksanaan program-program prioritas pembangunan di daerah;
2. SILPA tahun berjalan dijadikan sebagai pedoman dasar untuk pengambilan kebijakan pada perhitungan anggaran. Apabila SILPA tahun berjalan yang dihasilkan positif, maka pemerintah daerah dapat memanfaatkan untuk menambah program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program, kegiatan, sub kegiatan yang telah dianggarkan, dan/ atau pengeluaran pembiayaan. Sedangkan apabila SILPA tahun berjalan terjadi negatif, maka pemerintah daerah mengurangi bahkan menghapus pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang kurang prioritas dan/ atau pengurangan volume program, kegiatan dan sub kegiatan;

3. Bila memungkinkan Pemerintah Daerah dapat menambah modal yang disetor dan/ atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan daerah, menunjang pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berikut disajikan pembiayaan daerah Kota Padang Tahun 2023-2027 sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 3-6 Pembiayaan Daerah Kota Padang Tahun 2023-2027

Jenis Belanja		Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025			Target 2026	Target 2027
		Anggaran	Realisasi	Persentase	Anggaran	Realisasi	Persentase	Anggaran	Realisasi	Persentase		
	Pembiayaan Daerah	**68.151.232.451,00**	**74.320.247.243,08**	**109,05**	**39.387.903.488,00**	**49.387.903.487,85**	**125,39**	**162.651.807.715,71**	**125.227.757.865,71**	**76,99**	**224.757.947.225,00**	**(114.919.000.000,00)**
5.	**Penerimaan Pembiayaan**	**89.801.232.451,00**	**89.801.232.451,08**	**100,00**	**60.159.381.300,00**	**60.159.381.299,85**	**100,00**	**173.423.285.527,71**	**135.999.235.677,71**	**78,42**	**250.000.000.000,00**	**-**
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	89.801.232.451,00	89.801.232.451,08	100,00	60.159.381.300,00	60.159.381.299,85	100,00	135.999.235.677,71	135.999.235.677,71	100,00	-	-
	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	0,00	-	-	0,00	37.424.049.850,00	–	0,00	250.000.000.000,00	-
6.	**Pengeluaran Pembiayaan**	**21.650.000.000,00**	**15.480.985.208,00**	**71,51**	**20.771.477.812,00**	**10.771.477.812,00**	**51,86**	**10.771.477.812,00**	**10.771.477.812,00**	**100,00**	**25.242.052.775,00**	**3.635.942.303,00**
	Penyertaan Modal Daerah	8.300.000.000,00	8.300.000.000,00	100,00	10.000.000.000,00	-	0,00	10.771.477.812,00	10.771.477.812,00	100,00	5.000.000.000,00	-
	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	7.180.985.208,00	7.180.985.208,00	100,00	10.771.477.812,00	10.771.477.812,00	100,00	10.771.477.812,00	10.771.477.812,00	100,00	10.771.477.812,00	3.635.942.303,00

Berdasarkan tabel tersebut, kinerja pembiayaan daerah Kota Padang menunjukkan pola yang cukup dinamis. Pada Tahun 2023, pembiayaan daerah terealisasi sebesar Rp74,32 miliar atau 109,05 persen dari anggaran sebesar Rp68,15 miliar. Capaian ini meningkat secara persentase pada Tahun 2024, dengan realisasi sebesar Rp49,39 miliar atau 125,39 persen dari anggaran sebesar Rp39,39 miliar. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembiayaan daerah pada dua tahun tersebut mampu mendukung penyeimbangan struktur APBD, terutama melalui optimalisasi penerimaan pembiayaan.

Namun pada Tahun 2025, realisasi pembiayaan daerah mengalami penurunan capaian menjadi 76,99 persen, yaitu dari anggaran sebesar Rp162,65 miliar terealisasi sebesar Rp125,23 miliar. Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh belum terealisasinya penerimaan pinjaman daerah yang dianggarkan sebesar Rp37,42 miliar, sementara sumber penerimaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya telah terealisasi penuh sebesar Rp135,99 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa SiLPA masih menjadi sumber utama penerimaan pembiayaan daerah, sedangkan komponen pinjaman daerah belum memberikan kontribusi terhadap realisasi pembiayaan pada tahun berjalan.

Dari sisi pengeluaran pembiayaan, terlihat bahwa realisasi mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2023, realisasi pengeluaran pembiayaan mencapai Rp15,48 miliar atau 71,51 persen, kemudian menurun pada Tahun 2024 menjadi Rp10,77 miliar atau 51,86 persen. Pada Tahun 2025, pengeluaran pembiayaan terealisasi penuh sebesar Rp10,77 miliar atau 100 persen. Komponen pengeluaran pembiayaan terutama digunakan untuk penyertaan modal daerah dan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, sehingga kebijakan ini perlu tetap diarahkan secara selektif, produktif, dan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah.

Target Tahun 2026 menunjukkan peningkatan pembiayaan daerah menjadi Rp224,76 miliar, dengan penerimaan pembiayaan ditargetkan sebesar Rp250 miliar dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp25,24 miliar. Sementara itu, target Tahun 2027 menunjukkan pembiayaan daerah bernilai negatif sebesar Rp114,92 miliar, sehingga perlu dicermati lebih lanjut dalam penyusunan RKPD dan postur APBD Tahun 2027. Secara perencanaan, kondisi ini mengindikasikan perlunya penguatan kualitas proyeksi pembiayaan, pengendalian pemanfaatan SiLPA, kehati-hatian dalam penggunaan pinjaman daerah, serta memastikan bahwa pengeluaran pembiayaan benar-benar mendukung prioritas pembangunan dan tidak membebani kesinambungan fiskal daerah.

3.2.4. Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun 2027

Dalam kerangka perencanaan tahun 2027, struktur APBD Kota Padang diproyeksikan terdiri atas pendapatan daerah sebesar Rp2,622 triliun, belanja daerah sebesar Rp2,880 triliun, dan pembiayaan netto sebesar Rp257,258 miliar. Dengan struktur tersebut, APBD Kota Padang Tahun 2027 mengalami defisit sebesar

Rp257,258 miliar, yang ditutup melalui pembiayaan netto sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan menjadi Rp0,00. Kondisi ini menunjukkan bahwa perencanaan anggaran tahun 2027 disusun secara berimbang melalui pemanfaatan instrumen pembiayaan daerah.

Dari sisi pendapatan, proyeksi pendapatan daerah Kota Padang Tahun 2027 sebesar Rp2,622 triliun masih didominasi oleh pendapatan transfer sebesar Rp1,522 triliun atau sekitar 58,01 persen dari total pendapatan daerah. Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan sebesar Rp1,101 triliun atau sekitar 41,99 persen. Komposisi ini menunjukkan bahwa kapasitas fiskal Kota Padang telah memiliki kontribusi PAD yang cukup signifikan, namun ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat dan antar daerah masih relatif besar.

Pada komponen PAD, sumber terbesar berasal dari pajak daerah sebesar Rp874,475 miliar, atau sekitar 79,41 persen dari total PAD. Hal ini menggambarkan bahwa pajak daerah masih menjadi tulang punggung kemandirian fiskal daerah. Selanjutnya, retribusi daerah diproyeksikan sebesar Rp124,880 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp39,500 miliar, dan lain-lain PAD yang sah sebesar Rp62,419 miliar. Ke depan, optimalisasi PAD perlu diarahkan melalui penguatan basis data pajak dan retribusi, intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan, digitalisasi layanan pemungutan, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi.

Dari sisi belanja, belanja daerah Tahun 2027 diproyeksikan sebesar Rp2,880 triliun. Komponen terbesar berada pada belanja operasi sebesar Rp2,601 triliun atau sekitar 90,29 persen dari total belanja daerah. Belanja operasi terutama didominasi oleh belanja pegawai sebesar Rp1,602 triliun dan belanja barang dan jasa sebesar Rp896,950 miliar. Kondisi ini menunjukkan bahwa ruang fiskal belanja daerah masih banyak terserap untuk kebutuhan rutin penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, sehingga diperlukan pengendalian belanja operasional agar tidak mengurangi kapasitas belanja pembangunan secara signifikan.

Sementara itu, belanja modal diproyeksikan sebesar Rp265,655 miliar atau sekitar 9,22 persen dari total belanja daerah. Belanja modal terbesar diarahkan untuk belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebesar Rp117,892 miliar, serta belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp101,053 miliar. Komposisi ini menunjukkan adanya orientasi belanja modal pada pemenuhan infrastruktur dasar dan sarana pelayanan publik. Namun demikian, proporsi belanja modal masih perlu terus diperkuat agar APBD lebih mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan konektivitas, dan kualitas layanan masyarakat.

Dengan adanya defisit sebesar Rp257,258 miliar, pembiayaan daerah memegang peran penting dalam menjaga keseimbangan APBD Tahun 2027. Penerimaan pembiayaan diproyeksikan sebesar Rp260,894 miliar yang seluruhnya bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp3,636 miliar digunakan untuk pembayaran

cicilan pokok utang yang jatuh tempo. Secara perencanaan, kondisi ini perlu dicermati agar pemanfaatan SiLPA benar-benar diarahkan untuk menutup kebutuhan prioritas yang produktif, terukur, dan tidak menimbulkan ketergantungan pembiayaan pada tahun-tahun berikutnya.

Tabel 3-7 Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Padang Tahun 2027

KODE	URAIAN	JUMLAH
4	**PENDAPATAN DAERAH**	
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**1.101.273.636.500,00**
4.1.01	Pajak Daerah	874.475.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	124.879.633.352,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	39.500.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	62.419.003.148,00
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.521.695.380.422,00**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.456.385.442.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	65.309.938.422,00
	Jumlah Pendapatan	**2.622.969.016.922,00**
5	**BELANJA DAERAH**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**2.663.252.321.007,84**
5.1.01	Belanja Pegawai	1.649.185.957.793,27
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	912.441.706.175,57
5.1.03	Belanja Bunga	547.156.570,00
5.1.04	Belanja Subsidi	61.600.025.271,00
5.1.05	Belanja Hibah	37.702.225.198,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.775.250.000,00
5.2	**BELANJA MODAL**	**335.308.122.306,16**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.141.200.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.188.829.457,08
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	165.312.985.873,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	117.891.756.376,08
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	17.418.850.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	354.500.600,00
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**13.896.795.728,00**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	13.896.795.728,00
	Jumlah Belanja	**3.012.457.239.042,00**
	Total Surplus/(Defisit)	**(389.488.222.120,00)**
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**0,00**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**3.635.942.303,00**
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	3.635.942.303,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**3.635.942.303,00**
	Pembiayaan Netto	**(3.635.942.303,00)**
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	**(393.124.164.423,00)**
	TOTAL APBD	**2.622.969.016.922,00**

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan Kota Padang Tahun 2027 dilakukan melalui pendekatan yang holistik, terukur, dan berorientasi pada hasil. Langkah ini diawali dengan analisis mendalam terhadap evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya, serta ketercapaian target-target pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Kota Padang Tahun 2025–2029. Prioritas dan sasaran yang ditetapkan juga mempertimbangkan berbagai dinamika aktual yang bersifat strategis dan mendesak, baik pada tingkat lokal maupun nasional, serta mengacu pada kerangka ekonomi daerah dan ketersediaan pendanaan pembangunan. Arahan dan direktif dari Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat turut menjadi kompas dalam menyelaraskan prioritas Kota Padang dengan kebijakan pembangunan provinsi.

Dalam penyusunannya, perhatian khusus juga diberikan terhadap usulan dari perangkat daerah yang telah disusun berdasarkan prakiraan maju dalam RKPD tahun sebelumnya. Fokus utama diarahkan pada pencapaian target Standar Pelayanan Minimal (SPM) di enam bidang penting, yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan sosial. Ini menjadi fondasi utama dalam menjamin hak dasar masyarakat atas pelayanan publik yang berkualitas.

Pemerintah Kota Padang juga menempatkan relevansi terhadap isu-isu strategis nasional dan Provinsi Sumatera Barat sebagai landasan penting, seperti ketimpangan kualitas sumber daya manusia antar wilayah, keterbatasan layanan infrastruktur dasar, rendahnya daya saing serta nilai tambah dari UMKM, sektor pariwisata, dan komoditas unggulan seperti pertanian dan perkebunan. Maka dari itu, kebijakan pembangunan diarahkan tidak hanya untuk menyelesaikan persoalan jangka pendek, tetapi juga mendorong lompatan kemajuan jangka menengah dan panjang.

Selaras dengan misi pembangunan dalam RPJMD, prioritas 2027 ditekankan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter, percepatan pembangunan infrastruktur yang inklusif dan berwawasan lingkungan, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang profesional dan adaptif. Aspek sosial-ekonomi seperti pengentasan pengangguran, pengembangan ekonomi kreatif, serta penguatan kelembagaan daerah juga mendapat perhatian yang signifikan.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.1.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional

Visi Presiden sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029 adalah **“Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”.** Visi ini menegaskan bahwa pembangunan nasional dilaksanakan melalui

kolaborasi seluruh elemen bangsa dengan memanfaatkan fondasi pembangunan yang telah terbentuk, guna mendorong transformasi Indonesia menjadi negara maju, berdaya saing, dan berkelanjutan pada tahun 2045.

Sebagai penjabaran operasional, visi tersebut diterjemahkan ke dalam Delapan Misi Presiden (Asta Cita) yang menjadi kerangka utama arah kebijakan pembangunan nasional. Asta Cita selanjutnya diimplementasikan melalui 17 Program Prioritas Presiden yang mencakup berbagai sektor strategis, serta diperkuat dengan pelaksanaan Program Hasil Terbaik Cepat (Quick Wins) sebagai instrumen percepatan untuk menghasilkan dampak nyata dalam jangka pendek. Keseluruhan kerangka ini dirancang untuk menjawab permasalahan dan tantangan pembangunan secara cepat, tepat, dan terukur, sekaligus membangun fondasi struktural yang kokoh bagi keberlanjutan pembangunan nasional.

Dalam RPJMN Tahun 2025-2029, arah kebijakan tersebut dikonsolidasikan ke dalam delapan Prioritas Nasional sebagai pilar utama pembangunan jangka menengah. Prioritas Nasional merupakan bentuk operasionalisasi langsung dari Asta Cita yang berfungsi sebagai kerangka integratif lintas sektor dan lintas wilayah. Setiap Prioritas Nasional dijabarkan lebih lanjut ke dalam Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas yang memiliki indikator dan target kinerja yang terukur.

Struktur perencanaan ini menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan, baik Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, maupun Badan Usaha (BUMN dan swasta), dalam menyusun program dan kegiatan secara selaras, terintegrasi, dan berorientasi hasil. Dengan demikian, keterpaduan antara perencanaan pusat dan daerah dapat terjaga, serta mampu mendorong efektivitas pelaksanaan pembangunan dalam mencapai sasaran nasional secara optimal. Adapun Misi RPJMN Tahun 2025-2029 yang juga menjadi Prioritas Nasional, yakni sebagai berikut :

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia, yang berfokus pada upaya simultan yang ditujukan untuk memperkokoh ideologi Pancasila, penguatan demokrasi, dan penegakan hak asasi manusia.
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru, yang bertujuan untuk mengawal keberhasilan proses pemantapan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi, yang bertujuan untuk mengawal keberhasilan proses melanjutkan pengembangan infrastruktur dan

meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan Agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.

4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas, yang bertujuan untuk mengawal keberhasilan memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri, yang bertujuan untuk membangun fondasi industrialisasi yang terintegrasi domestik dalam rangka meningkatkan nilai tambah ekonomi di dalam negeri yang berdaya saing global sehingga menjadi pengungkit perekonomian.
6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan, yang ditujukan untuk pemerataan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif sehingga berdampak pada pengentasan kemiskinan.
7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan, yang dilaksanakan melalui reformasi politik; reformasi hukum; reformasi tata kelola pemerintahan; dan pemberantasan narkoba, judi, dan penyelundupan; serta penguatan tata kelola Badan Usaha Milik Negara.
8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur, yang diarahkan untuk memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta meningkatkan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sasaran pembangunan menggambarkan kondisi yang diharapkan dalam mencapai penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi tinggi berkelanjutan. Kondisi yang diharapkan juga diperkuat dengan sasaran pada aspek politik luar negeri dan lingkungan. Pencapaian sasaran pembangunan nasional tahun 2025-2029 merupakan manifestasi dari penguatan transformasi menuju Indonesia Emas 2045. Adapun sasaran pembangunan nasional tahun 2025-2029 yakni :

1. Sasaran Pembangunan 1 yakni Meningkatkan pendapatan perkapita menuju setara negara maju yang ditandai dengan :
   a. Laju pertumbuhan ekonomi menuju 8% di tahun 2029

b. GNI per kapita meningkat jadi 8.000 USD di tahun 2029
c. Distribusi PDRB Maritim meningkat menjadi 9,1% di tahun 2029
d. PDB Manufaktur meningkat menjadi 21,9% di tahun 2029

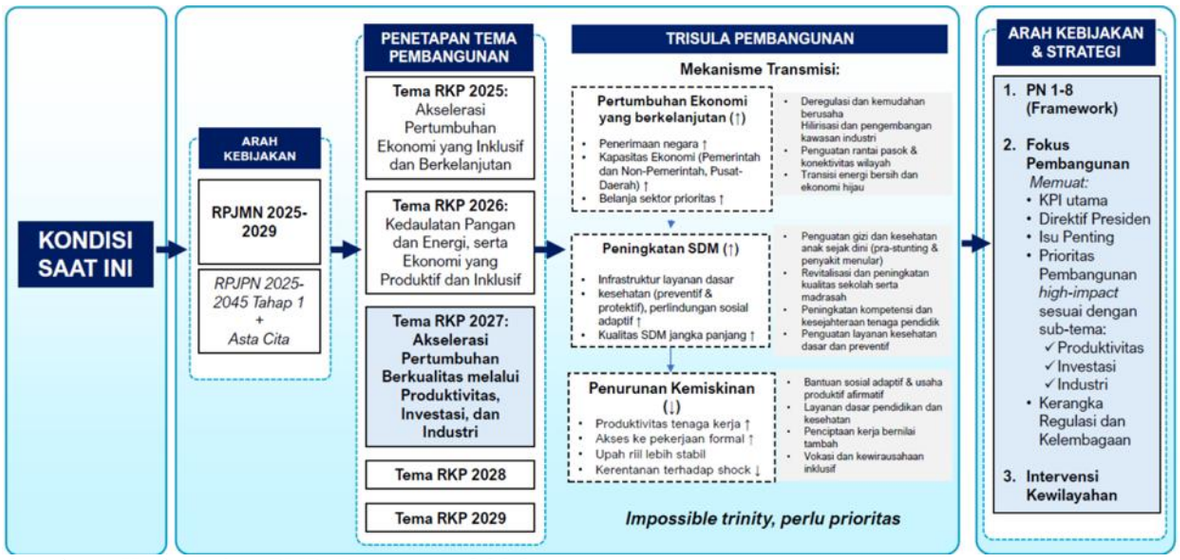
2. Sasaran Pembangunan 2 yakni Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat yang ditandai dengan Global Power Index menjadi peringkat 29 di tahun 2029
3. Sasaran Pembangunan 3 yakni Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang yang ditandai dengan :
   a. Tingkat Kemiskinan turun menjadi 4,5 - 5% di tahun 2009 serta kemiskinan ekstrem kurang dari 0,5% di tahun 2026
   b. Rasio Gini turun menjadi 0,372 - 0,375 di tahun 2029
   c. Kontribusi PDRB KTI meningkat menjadi 22,4% di tahun 2029
4. Sasaran Pembangunan 4 Daya Saing Sumber Daya Manusia meningkat yang ditandai dengan Indeks Modal Manusia menjadi 0,59 tahun 2029
5. Sasaran Pembangunan 5 Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca menurun menuju net Zero emission yang ditandai dengan :
   a. Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca menjadi 45,17 di tahun 2002
   b. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup meningkat menjadi 77,20 di tahun 2029

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional tahunan yang menjadi acuan utama dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah. RKP 2027 disusun secara sistematis, terintegrasi, dan berbasis kinerja, dengan memastikan konsistensi terhadap arah kebijakan RPJMN Tahun 2025-2029, kesinambungan pembangunan antarperiode, serta responsivitas terhadap dinamika perekonomian global dan domestik. Selain itu, RKP 2027 diarahkan untuk mempercepat transformasi struktural sebagai fondasi pencapaian visi Indonesia Emas 2045. Berdasarkan proses perencanaan yang komprehensif dan berbasis evaluasi kinerja pembangunan periode sebelumnya, ditetapkan tema RKP Tahun 2027, yaitu:

“Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas Investasi dan Industri”

Tema tersebut menegaskan fokus pembangunan pada peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui penguatan produktivitas, peningkatan kualitas investasi, serta percepatan hilirisasi dan industrialisasi. Investasi diposisikan sebagai penggerak utama transformasi ekonomi dalam mendorong nilai tambah, penciptaan lapangan kerja, dan daya saing, sementara sektor industri diperkuat sebagai tulang punggung pertumbuhan berbasis inovasi dan peningkatan kandungan lokal. Pelaksanaannya menuntut sinergi pusat dan daerah agar program berjalan efektif, terukur, dan berdampak nyata terhadap percepatan pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Gambar 4- 1 Dukungan Terhadap Tema Pembangunan



Sumber : Kedeputian PMP, Bappenas 2026

Pelaksanaan RKP Tahun 2027 juga difokuskan pada penguatan implementasi direktif Presiden melalui intervensi prioritas yang strategis dan berdampak langsung sebagai pengungkit pertumbuhan. Pendekatan ini diarahkan pada program berdaya ungkit tinggi (*high impact*), percepatan realisasi investasi, serta penguatan industri bernilai tambah. Kebijakan yang ditempuh diorientasikan untuk menghasilkan efek berganda (*multiplier effect*) terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan percepatan pembangunan nasional secara berkelanjutan

Arah kebijakan pembangunan dalam RKPD Tahun 2027 difokuskan pada penguatan transformasi ekonomi yang berkelanjutan melalui tiga pilar utama, yaitu peningkatan produktivitas, penguatan investasi, dan percepatan industrialisasi. Ketiga pilar ini dirumuskan sebagai respon strategis terhadap dinamika perekonomian nasional dan daerah, termasuk kebutuhan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang inklusif, memperkuat daya saing daerah, serta mempercepat pencapaian target pembangunan nasional yang berorientasi pada kemandirian dan keberlanjutan.

Pertama, peningkatan produktivitas diarahkan pada penguatan kualitas sumber daya manusia, penciptaan tenaga kerja produktif, serta akselerasi inovasi. Intervensi kebijakan difokuskan pada penguatan gizi masyarakat melalui program makan bergizi gratis, revitalisasi dan penguatan satuan pendidikan, pengembangan sekolah unggul, serta perluasan akses layanan kesehatan. Selain itu, penguatan pendidikan vokasi, literasi IPTEK, dan inovasi daerah menjadi instrumen utama dalam meningkatkan kualitas SDM. Dari sisi permintaan agregat, produktivitas didukung melalui penguatan perlindungan sosial dan daya beli masyarakat, antara lain melalui optimalisasi Kartu Kesejahteraan Sosial, Jaminan Sosial Nasional, serta penguatan koperasi desa/kelurahan dan pembiayaan perumahan rakyat. Transformasi ini diperkuat melalui digitalisasi tata kelola pemerintahan berbasis data terpadu, pengembangan layanan digital yang terintegrasi lintas sektor, serta penguatan regulasi dan

kelembagaan yang adaptif untuk mendukung kepastian berusaha dan stabilitas pembangunan.

Kedua, penguatan investasi diarahkan untuk menciptakan iklim investasi yang efisien, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi. Hal ini dilakukan melalui penyederhanaan dan kemudahan perizinan, penguatan investasi hijau, serta peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan konektivitas ekonomi, termasuk pengembangan wilayah tertinggal dan kawasan perbatasan. Selain itu, optimalisasi pembiayaan pembangunan didorong melalui kolaborasi pemerintah, BUMN/BUMD, dan skema pembiayaan inovatif, baik konvensional maupun syariah. Investasi juga diarahkan secara lebih selektif dan berorientasi ekspor melalui pengembangan kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, serta destinasi pariwisata prioritas guna memperkuat struktur ekonomi daerah yang berbasis nilai tambah.

Ketiga, percepatan industrialisasi ditempuh melalui penguatan industri nasional dan hilirisasi sumber daya alam strategis. Fokus pembangunan diarahkan pada pengembangan industri strategis nasional, termasuk pengelolaan sampah, industri pertahanan, serta pengembangan industri otomotif nasional. Pada saat yang sama, hilirisasi SDA diperkuat pada sektor kelautan dan perikanan, perkebunan dan kehutanan, serta mineral kritis untuk meningkatkan nilai tambah domestik. Arah kebijakan ini juga mendukung pencapaian agenda swasembada pangan, energi, dan air sebagai fondasi kemandirian ekonomi nasional. Ketiga pilar tersebut menjadi kerangka integratif dalam RKPD Tahun 2027 yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada transformasi struktural, peningkatan daya saing, dan pemerataan kesejahteraan secara berkelanjutan.

Sasaran pembangunan pada RKPD berpedoman pada RPJMD yang mengandung makna, bahwa prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah harus selaras dan sejalan dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD. Selain itu, rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas tahunan harus selaras dan sejalan dengan indikasi rencana program prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD. Untuk itu sasaran pembangunan dan target makro Kota Padang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4- 1 Target Makro Pembangunan Kota Padang Tahun 2025-2029

KOTA PADANG		TARGET
PDRB per kapita ADHB	2025	97,52
	2029	152,33
PDRB per kapita ADHK	2025	55,71
	2029	69,32
Pertumbuhan Ekonomi	2025	4,16
	2029	7,09
Jumlah Penduduk Miskin	2025	35.313
	2029	27.248
Indeks Pembangunan Manusia	2025	84,51
	2029	85,93
Angka Harapan Hidup	2025	75,37

KOTA PADANG		TARGET
	2029	76,19
Harapan Lama Sekolah	2025	16,59
	2029	16,64
Rata-Rata Lama Sekolah	2025	11,69
	2029	11,88
Pengeluaran Per Kapita	2025	15.689
	2029	16.695
Tingkat Kemiskinan (%)	2025	3,66
	2029	2,71
Gini Ratio	2025	0,32
	2029	0,31
Tingkat Pengangguran Terbuka	2025	9,88
	2029	8,43

Sumber : RPJMD Kota Padang 2025-2029

4.1.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat

Dengan mempertimbangkan potensi daerah, capaian pembangunan pada tahun sebelumnya, kondisi terkini, permasalahan yang dihadapi, isu-isu strategis, tantangan dan peluang yang ada, serta dinamika sosial dan budaya masyarakat Sumatera Barat, maka tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2027 tetap mengacu pada Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025–2029, yaitu:

“ Sumatera Barat Madani yang Maju dan Berkeadilan”

Dalam mewujudkan Visi melalui pelaksanaan Misi yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029, maka untuk kerangka perencanaan pembangunan daerah tahun 2027 diperlukan kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang dijalankan, memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud.

Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi diuraikan dalam matrik tabel berikut:

Tabel 4- 2 Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

VISI		
Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Maju & Berkeadilan		
Misi	Tujuan	Sasaran
Misi 1: Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas	Terwujudnya kualitas pembangunan manusia yang berdaya saing	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan untuk mendukung daya saing sumber daya manusia Meningkatnya kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat

VISI		
Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Maju & Berkeadilan		
Misi	Tujuan	Sasaran
Misi 2: Lumbung Pangan Nasional dan Ekonomi Berkelanjutan	Terwujudnya ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Meningkatnya produktivitas dan cadangan pangan yang berdaya saing serta keberlanjutan Meningkatnya daya saing sektor pertanian, perikanan, perkebunan, dan peternakan Meningkatnya daya saing pelaku ekonomi
Misi 3: Nagari/Desa Sebagai Basis Kemajuan	Kota sebagai pusat pertumbuhan dengan nagari/desa sebagai basis kemajuan yang mandiri dan berdaya saing	Meningkatnya kemandirian ekonomi desa/nagari berbasis potensi lokal Meningkatnya kualitas infrastruktur dan layanan dasar untuk mendukung pengembangan nagari/desa
Misi 4: Sumatera Barat Pusat Perdagangan dan Bisnis Sumatera Bagian Barat	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan melalui penguatan perdagangan, investasi, industri, dan inovasi	Meningkatkan investasi, perdagangan dan daya saing industri daerah Memperkuat ekosistem ketenagakerjaan dan pelaku usaha (UMKM dan industri kecil-menengah) sebagai pilar ekonomi daerah
Misi 5: Membangun Infrastruktur Berkeadilan dan Siap Tanggap Bencana	Terwujudnya infrastruktur yang inklusif, tangguh dan berkeadilan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, Pariwisata, Kesejahteraan Masyarakat dan Mitigasi Bencana	Meningkatnya resiliensi daerah terhadap bencana dan perubahan iklim Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah, kawasan pariwisata serta pemanfaatan teknologi informasi
Misi 6: Membangun Kehidupan Beradat dan Berbudaya Berbasis Agama, Kearifan Lokal Melalui Dukungan Keluarga yang Berkualitas	Terwujudnya masyarakat beradat dan berbudaya yang harmonis, religius, serta berbasis keluarga berkualitas	Meningkatnya perlindungan hak asasi manusia dan kesetaraan gender Terwujudnya lingkungan sosial yang aman dan harmonis berbasis keluarga berkualitas
Misi 7: Tingkatkan Daya Saing Wisata dan Akselerasi Ekonomi Kreatif untuk UMKM	Pariwisata yang berdaya saing dan akselerasi ekonomi kreatif untuk pertumbuhan yang berkelanjutan	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap ekonomi daerah Memperkuat dan mendorong pertumbuhan UMKM
Misi 8: Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Pelayanan Publik yang Efektif	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan pelayanan publik yang efektif berbasis digital	Efisiensi dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan Meningkatnya kualitas layanan publik Meningkatnya pendapatan daerah

Sumber : RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

Tujuan dan sasaran Misi Pertama**, "Gerak Cepat Sumbar Unggul : Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas"** terkait dengan isu strategis Pembangunan Sumber daya manusia dengan mewujudkan pemerataan akses, peningkatan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan Pendidikan; penyediaan beasiswa bagi siswa dan mahasiswa berprestasi serta tidak mampu; pemerataan akses Kesehatan (Sumbar Universal Health Coverage), peningkatan kualitas dan efektivitas pelayanan Kesehatan terutama pencegahan stunting dan penyakit menular serta penyediaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Garin, Guru Mengaji, Imam Mesjid serta pekerja Informal (Nelayan dan Petani)

Tujuan dan sasaran Misi Kedua, **"Gerak Cepat Sumbar Sejahtera : Lumbung Pangan Nasional dan Ekonomi Berkelanjutan"** terkait dengan isu strategis Ekonomi makro dan pengangguran dengan mengalokasikan anggaran 10% APBD pada sektor untuk peningkatan produksi, pertanian hilirisasi dan asuransi usaha tani guna meningkatkan pendapatan petani; pendayagunaan perhutanan sosial, untuk kesejahteraan rakyat dan pelestarian lingkungan; mengutamakan penggunaan Energi Baru Terbarukan (EBT) serta pengelolaan sampah bernilai ekonomi (circular economy)

Tujuan dan sasaran Misi Ketiga, **"Gerak Cepat Sumbar Berdaya : Nagari/Desa Sebagai Basis Kemajuan"** terkait dengan isu strategis Ekonomi makro dan pengangguran dengan mengaktivasi pusat kreativitas Nagari (Nagari Creative Hub), untuk mendorong inovasi dan wirausaha di Nagari melalui Internet Gratis, Aktivasi Medan Nan bapaneh, Suduik UMKM dan Teras Nagari; mengembangkan pariwisata berbasis Masyarakat pada nagari-nagari yang memiliki potensi pariwisata; menyediakan sarana dan prasarana aktivitas generasi muda melalui organisasi kepemudaan; serta memfasilitasi dan mendorong Bum-Nag menjadi penggerak ekonomi nagari.

Tujuan dan sasaran Misi Keempat, **"Gerak Cepat Sumbar Maju : Sumatera Barat Pusat Perdagangan dan Bisnis Sumatera Bagian Barat"** terkait dengan isu strategis Infrastruktur dan lingkungan hidup dengan mengembangkan Pelabuhan Teluk Bayur dan Teluk Tapang sebagai Pintu Perdagangan Indonesia Bagian Barat; mendorong, Membina dan Memfasilitasi UMKM untuk Ekspor; memfasilitasi pengembangan UMKM dan sentra produksi berbasis digital; akselerasi capaian program Milenial dan Women Entrepreneur serta meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan fasilitasi sertifikasi kompetensi/ keahlian

Tujuan dan sasaran Misi Kelima, **"Gerak Cepat Sumbar Kuat : Membangun Infrastruktur Berkeadilan dan Siap Tanggap Bencana"** terkait dengan isu strategis Infrastruktur dan lingkungan hidup dengan melakukan percepatan Penyelesaian dan Pembangunan Infrastruktur Strategis; pemantapan kondisi Infrastruktur terutama Jalan, Jembatan dan Irigasi Serta Percepatan Rehab dan Rekon Infrastruktur Pasca Bencana serta mewujudkan Nagari/Desa tangguh bencana.

Tujuan dan sasaran Misi Keenam, **"Gerak Cepat Sumbar Harmonis : Membangun Kehidupan Beradat dan Berbudaya Berbasiskan Agama, Kearifan Lokal Melalui Dukungan Keluarga yang Berkualitas"** terkait dengan isu strategis Perhatian terhadap karakter generasi muda dengan melakukan pencegahan Penyakit Masyarakat berbasis Keluarga, Kaum dan Nagari; menjadikan Kawasan Mesjid Raya Syech Ahmad Khatib Alminangkabawi sebagai pusat pembinaan ABS-SBK; perkuatan Pendidikan karakter bermuatan agama dan kearifan lokal; meningkatkan ketahanan keluarga, Perempuan dan perlindungan anak;pendampingan dan fasilitasi pada penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus lainnya serta penguatan Ekonomi Berbasis ABS-SBK, Pengembangan Ekonomi Syariah : Mendorong pertumbuhan ekonomi syariah.

Tujuan dan sasaran Misi Ketujuh, **"Gerak Cepat Sumbar Kreatif : Tingkatkan Daya Saing Wisata dan Akselerasi Ekonomi Kreatif untuk UMKM"** terkait dengan isu strategis Ekonomi makro dan pengangguran dengan melakukan pengembangan Destinasi Wisata berbasis Masyarakat yang Bersertifikasi CHSE (Clean/Bersih, Health/Sehat, Safety/Aman dan Enviroment/ Keberlanjutan Lingkungan); penguatan Potensi Wisata Halal; digitalisasi Promosi dan Pelayanan Kepariwisataan; penguatan Pelaku Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan serifikasi komptensi serta menjadikan Sumbar sebagai Pusat MICE wilayah barat Indonesia.

Tujuan dan sasaran Misi Delapan, **"Gerak Cepat Sumbar Responsif : Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Pelayanan Publik yang Efektif"** terkait dengan isu strategis Optimalisasi Kelembagaan dan tata kelola pemerintahan dengan mwlakukan digitalisasi pelayanan pemerintahan dan Keterbukaan Informasi Publik, Penguatan Pembangunan berbasis aspirasi; menjadi Birokrasi Terbuka dan Tempat Pembelajaran Bagi Mahasiswa/Siswa (Program Magang dan Menyediakan Co-working Space) serta konsultasi di semua perkantoran pemerintah Provinsi Sumatera Barat); serta mewujudkan kelembagaan tepat fungsi, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif dan Menguatkan Inovasi Daerah Sejalan dengan arah pembangunan dalam RPJMD, dengan memperhatikan pemulihan pertumbuhan ekonomi nasional dan Sumatera Barat, melalui upaya yang dilakukan secara terus menerus dalam rangka menggerakan ekonomi yang sehat dan merata dengan disertai dengan sikap kebijakan dan strategi yang waspada terhadap isu gejolak ekonomi baik secara nasional maupun di Sumatera Barat dan dukungan terhadap pencapaian Tema Pembangunan RKP Tahun 2027, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengusung Tema Provinsi Sumatera Barat Tahun 2027 yakni:

"Akselerasi Transformasi Ekonomi, Inklusi Sosial dan Ketahanan Pangan"

Adapun penjelasan Tema Provinsi Sumatera Barat Tahun 2027 adalah sebagai berikut :

1. Akselerasi Transformasi Ekonomi

   Akselerasi transformasi ekonomi diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang produktif dan berdaya saing melalui transformasi ekonomi desa berbasis badan usaha milik nagari dan koperasi, penguatan industri kecil, usaha kecil, dan sektor kreatif, pengembangan pariwisata berkelanjutan, serta pemanfaatan energi baru dan terbarukan.

2. Inklusi Sosial

   Inklusi sosial diarahkan untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat memperoleh akses yang adil terhadap peluang ekonomi dan layanan dasar, melalui peningkatan keterlibatan perempuan dan kelompok rentan dalam pasar kerja, serta perluasan akses sanitasi, air minum, dan perumahan layak.

3. Ketahanan Pangan

   Ketahanan pangan difokuskan pada peningkatan produktivitas dan keberlanjutan sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan sebagai penopang utama perekonomian daerah dan penyediaan pangan bagi masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, pembangunan juga memperhatikan upaya pemulihan pascabencana dan penguatan ketangguhan daerah, sejalan dengan karakteristik wilayah Provinsi Sumatera Barat yang memiliki tingkat kerawanan bencana. Pemilihan Tema Pembangunan Tahun 2027 merupakan penetapan fokus prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2027, dengan tetap tidak mengabaikan upaya pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 dan Pasal 298 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Tabel 4- 3 Proyeksi Indikator Makro Daerah Tahun 2027

No	Indikator Makro Pembangunan	Realisasi		Target	
		2024	2025	2026	2027
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,36	3,36	5,7	6,9
2	PDRB ADHK Per Kapita (Rp. Juta)	34.167,59		36,87	38,9
3	PDRB ADHB Per Kapita (Rp. Juta)	57.047,21		69,59	77,31
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,75	5,62	5,39	5,23
5	IPM	76,43	77,27	77,48	78,04
	- Angka Harapan Hidup (Tahun)	74,37	74,69	74,83	75,06
	- Harapan Lama Sekolah (Tahun)	14,3	14,31	14,62	14,77
	- Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	9,44	9,77	9,58	9,69
	- Pengeluaran per Kapita (Rp. Ribu)	76,43	77,27	77,48	78,04
6	Tingkat Kemiskinan (%)	5,97	5,35	4,92	4,64
7	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	345,73	312,35	294,59	281,84
8	Gini Rasio	0,283	0,281	0,281	0,28

Sumber : RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2025-2029

4.1.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Padang Tahun 2027

4.1.3.1 Visi, Misi dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Kota Padang

Tujuan dan sasaran pembangunan merupakan salah satu tahapan penting dalam proses perencanaan kebijakan. Keduanya merupakan rumusan yang menjadi terjemahan dan penjabaran dari visi dan misi pembangunan daerah, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Tahun 2025–2029, yaitu :

”Menggerakkan Segala Potensi Untuk Mewujudkan Kota Padang Sebagai Kota Pintar (Smart City) dan Kota Sehat, Berlandaskan Agama dan Budaya, Menuju Kota Maju dan Sejahtera”

Usaha-usaha perwujudan Visi RPJMD dijabarkan dalam Misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Menguatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif, dan Partisipatif
2. Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar dan Kota Sehat
3. Menguatkan Masyarakat Yang Beragama dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter dan Pemberdayaan
4. Mendorong Kemudahan Berinvestasi Demi Terbukanya Lapangan Pekerjaan
5. Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum Yang Hijau dan Berkualitas
6. Menguatkan Jaringan Ketahanan Bencana
7. Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan dan Jasa
8. Menggerakkan Potensi Kota Untuk Terwujudnya Industri Kreatif dan Pariwisata Berkelanjutan.

Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi diuraikan dalam matrik tabel berikut :

Tabel 4- 4 Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan pada RPJMD Kota Padang Tahun 2025-2029

VISI								
Menggerakkan Segala Potensi Untuk Mewujudkan Kota Padang Sebagai Kota Pintar (Smart City) Dan Kota Sehat, Berlandaskan Agama Dan Budaya, Menuju Kota Yang Maju Dan Sejahtera								
Misi	**Tujuan**	**Sasaran**	**Indikator**	**Target 2025**	**Realisasi 2025**	**RPJMD 2027**	**Target RKPD 2027**	**Ket**
Misi 1 : Menguatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	**Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas profesional, responsif, kolaboratif, dan partisipatif**		Indeks Reformasi Birokrasi	86	87,31	86,5	87,31	
		Meningkatnya kualitas integrasi pembangunan dari sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan kinerja	Nilai SAKIP	78.68	78.84	80	80	
		Meningkatkan Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang efektif, efisien dan akuntabel	Opini atas laporan keuangan pemerintah daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	

VISI								
Menggerakkan Segala Potensi Untuk Mewujudkan Kota Padang Sebagai Kota Pintar (Smart City) Dan Kota Sehat, Berlandaskan Agama Dan Budaya, Menuju Kota Yang Maju Dan Sejahtera								
Misi	**Tujuan**	**Sasaran**	**Indikator**	**Target 2025**	**Realisasi 2025**	**RPJMD 2027**	**Target RKPD 2027**	**Ket**
		Meningkatnya kualitas pemetaan regulasi, regulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi daerah	Indeks Reformasi Hukum	91	100	92	92	
		Meningkatkan Pelayanan Publik yang profesional, responsif dan bebas korupsi	Indeks Pelayanan Publik	3,54	3,38	3,56	3,56	
		Meningkatnya pengawasan arsip daerah	Indeks Pengawasan Arsip	84	96,39	86	86	
		Meningkatnya pencegahan perilaku korupsi	Indeks Pencegahan Korupsi Daerah	95,2	77.65	95,5	95,5	
		Meningkatnya sumber daya aparatur yang profesional dan berintegritas	Indeks Sistem Merit	0,71	0,66	0,75	0,75	

VISI								
Menggerakkan Segala Potensi Untuk Mewujudkan Kota Padang Sebagai Kota Pintar (Smart City) Dan Kota Sehat, Berlandaskan Agama Dan Budaya, Menuju Kota Yang Maju Dan Sejahtera								
Misi	**Tujuan**	**Sasaran**	**Indikator**	**Target 2025**	**Realisasi 2025**	**RPJMD 2027**	**Target RKPD 2027**	**Ket**
Misi 2 : Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	**Mewujudkan Implementasi Kota Pintar dan Kota Sehat**		Smart City Index	3,2	3,16	3,5	3,5	
		Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan berbasis digitalisasi dalam wujudkan smart city	Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	3,96	4,17	4,08	4,08	Data imperative. SPBE digunakan s/d 2025, selanjutnya mulai tahun 2026 diganti dengan indeks transformasi digital pilar pemerintahan
			Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintahan	-	-	1,7	1,7	
		Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	0,84	0,84	0,85	0,85	

VISI								
Menggerakkan Segala Potensi Untuk Mewujudkan Kota Padang Sebagai Kota Pintar (Smart City) Dan Kota Sehat, Berlandaskan Agama Dan Budaya, Menuju Kota Yang Maju Dan Sejahtera								
Misi	**Tujuan**	**Sasaran**	**Indikator**	**Target 2025**	**Realisasi 2025**	**RPJMD 2027**	**Target RKPD 2027**	**Ket**
		Tercapainya kondisi lingkungan hidup yang bersih, nyaman, aman dan kualitas hidup sehat.	Peningkatan Penilaian Hasil Evaluasi Kota Sehat	0.01	0,88	0.01	0.01	
Misi 3 : Menguatkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya dengan Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	**Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul**		Indeks Pembangunan Manusia	84,51	84,93	85,14	85,14	
		Meningkatnya literasi masyarakat Kota	Indeks pembangunan Literasi masyarakat	86	18,76	86	18,76	Mulai tahun 2025 terdapat perubahan cara perhitungan menggunakan instrumen dan metodologi terbaru sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor

VISI								
Menggerakkan Segala Potensi Untuk Mewujudkan Kota Padang Sebagai Kota Pintar (Smart City) Dan Kota Sehat, Berlandaskan Agama Dan Budaya, Menuju Kota Yang Maju Dan Sejahtera								
Misi	**Tujuan**	**Sasaran**	**Indikator**	**Target 2025**	**Realisasi 2025**	**RPJMD 2027**	**Target RKPD 2027**	**Ket**
								7 Tahun 2025 sehingga realisasi 2025 jauh dari target RPJMD, demikian halnya dengan realisasi 2026 akan jauh berbeda dibandingkan target pada RPJMD
		Meningkatkan pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	0,849	0,849	0,85	0,85	
		Meningkatnya pelestarian dan pembangunan kebudayaan daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan	61,2	27	61,4	61,4	
		Meningkatnya Peran Pemuda dalam pembangunan sumber daya manusia unggul	Indeks Pembangunan Pemuda	56,5	56,7	57	57	

VISI								
Menggerakkan Segala Potensi Untuk Mewujudkan Kota Padang Sebagai Kota Pintar (Smart City) Dan Kota Sehat, Berlandaskan Agama Dan Budaya, Menuju Kota Yang Maju Dan Sejahtera								
Misi	**Tujuan**	**Sasaran**	**Indikator**	**Target 2025**	**Realisasi 2025**	**RPJMD 2027**	**Target RKPD 2027**	**Ket**
		Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan daerah	Indeks Pembangunan Gender	94,16		94,37	94,37	
	Meningkatkan stabilitas sosial dan politik daerah		Indeks Rasa Aman	11	-3.41	10,6	10,6	
		Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Indeks Penyelenggaran Trantibumlinmas	65	76,32	66	66	
		Meningkatnya Toleransi beragama dan partisipasi politik	Indeks Kerukunan Umat Beragama	77,37	85,02	78,27	85,02	
		Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Indeks Kesejahteraan Sosial	53,89	50,48	54,69	54,69	

VISI								
Menggerakkan Segala Potensi Untuk Mewujudkan Kota Padang Sebagai Kota Pintar (Smart City) Dan Kota Sehat, Berlandaskan Agama Dan Budaya, Menuju Kota Yang Maju Dan Sejahtera								
Misi	**Tujuan**	**Sasaran**	**Indikator**	**Target 2025**	**Realisasi 2025**	**RPJMD 2027**	**Target RKPD 2027**	**Ket**
Misi 4 : Mendorong Kemudahan Berinvestasi Demi Terbukanya Lapangan Pekerjaan	**Mewujudkan Perekonomian Masyarakat yang adaptif dan kondusif**		Indeks daya saing daerah	4,27	4,25	4,35	4,35	
		Meningkatkan Realisasi Investasi	Nilai PMTB terhadap PDRB	29,94	28,38	30	30	
		Meningkatkan Tingkat Kesempatan Kerja	Perbandingan orang yang bekerja thd angkatan kerja	90,12%	90,30%	91,15%	0,9115	
Misi 5 : Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	**Mewujudkan Kota Layak Huni**		Indeks Kota Layak Huni	69,16	69,89	69,63	69,63	
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	77,36	80.68	77,75	77,79	Imperatif Provinsi Sumatera Barat

VISI								
Menggerakkan Segala Potensi Untuk Mewujudkan Kota Padang Sebagai Kota Pintar (Smart City) Dan Kota Sehat, Berlandaskan Agama Dan Budaya, Menuju Kota Yang Maju Dan Sejahtera								
Misi	**Tujuan**	**Sasaran**	**Indikator**	**Target 2025**	**Realisasi 2025**	**RPJMD 2027**	**Target RKPD 2027**	**Ket**
		Meuwujudkan hunian layak dan terjangkau	Persentase Hunian Layak dan terjangkau	73,5	73,69	75,98	75,98	
		Mengembangkan dan merevitalisasi sarana serta prasarana umum yang ramah lingkungan dan hijau	Indeks Infrastruktur	66,12	67,05	67,03	67,03	
		Meningkatnya Kualitas Transportasi Publik	Rasio Konektivitas Wilayah	60	74	60,4	60,4	
Misi 6 : Menguatkan Jaringan Ketahanan Bencana	**Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim**		Indeks Risiko Bencana (IRB)	154,68	185,53	153,39 - 152,12	153,39 - 152,12	
		Penguatan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana dan perubahan iklim	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,52	0,52	0,55	0,55	

VISI								
Menggerakkan Segala Potensi Untuk Mewujudkan Kota Padang Sebagai Kota Pintar (Smart City) Dan Kota Sehat, Berlandaskan Agama Dan Budaya, Menuju Kota Yang Maju Dan Sejahtera								
Misi	**Tujuan**	**Sasaran**	**Indikator**	**Target 2025**	**Realisasi 2025**	**RPJMD 2027**	**Target RKPD 2027**	**Ket**
Misi 7 : Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif dengan Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	Mewujudkan Sektor perdagangan dan jasa yang tangguh		PDRB sektor perdagangan dan jasa (Miliar Rupiah)	30.744,63	62.850,61	34.500,68	34500,68	
		Meningkatnya kemampuan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan	Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	0,32	0,32	0,36	0,36	
		Meningkatnya Kontribusi Sektor perdagangan dan jasa terhadap perekonomian Daerah	Persentase Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan dan jasa	5,48	4,34	6,05	6,05	
		Meningkatnya daya saing produk daerah	Persentase Pertumbuhan Net Ekspor	9,29	21,54	9,48	9,48	

VISI								
Menggerakkan Segala Potensi Untuk Mewujudkan Kota Padang Sebagai Kota Pintar (Smart City) Dan Kota Sehat, Berlandaskan Agama Dan Budaya, Menuju Kota Yang Maju Dan Sejahtera								
Misi	**Tujuan**	**Sasaran**	**Indikator**	**Target 2025**	**Realisasi 2025**	**RPJMD 2027**	**Target RKPD 2027**	**Ket**
		Meningkatkan Lapangan Usaha Perdagangan	Kontribusi Lapangan usaha Perdagangan Terhadap PDRB	17,99	17,8	18,61	18,61	
		Meningkatnya daya saing produk daerah dan transaksi perdagangan	Kontribusi Ekspor terhadap PDRB	7,108	11,15	7,138	7,138	
		Meningkatkan perekonomian daerah dari sektor Koperasi dan UMKM (Usaha Mikro)	Nilai omset sektor koperasi dan UMKM (usaha mikro) (Rp Juta)	1.852.392,88	2.058.677,88	2.038.358,31	2038358,31	
					1.326.568,69	1.420.038,72		Pola perhitungan baru
Misi 8 : Menggerakkan Potensi Kota untuk Terwujudnya Industri Kreatif dan Pariwisata Berkelanjutan	**Terwujudnya Meningkatkan perekonomian daerah dari sektor Industri Kreatif dan Pariwisata**		PDRB sektor industri kreatif dan pariwisata (Miliar Rupiah)	1218,19	4160.11	1374,19	1374,19	

VISI								
Menggerakkan Segala Potensi Untuk Mewujudkan Kota Padang Sebagai Kota Pintar (Smart City) Dan Kota Sehat, Berlandaskan Agama Dan Budaya, Menuju Kota Yang Maju Dan Sejahtera								
Misi	**Tujuan**	**Sasaran**	**Indikator**	**Target 2025**	**Realisasi 2025**	**RPJMD 2027**	**Target RKPD 2027**	**Ket**
		Meningkatnya Kontribusi Industri Kreatif terhadap Perekonomian Daerah	Persentase Pertumbuhan Sektor PDRB Ekonomi Kreatif	7,43	9,8	7,54	7,54	
		Meningkatnya Kontribusi sektor pariwisata terhadap Perekonomian Daerah	Persentase Pertumbuhan sektor pariwisata	7,12	2,4	8,98	8,98	

Sumber : RPJMD Kota Padang Tahun 2025-2029

Berdasarkan pada visi dan misi pembangunan daerah Kota Padang tahun 2025-2029, maka berikut disajikan tujuan pembangunan Kota Padang tahun 2025-2029.

1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas profesional, responsif, kolaboratif, dan partisipatif

   Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas profesional, responsif, kolaboratif, dan partisipatif merupakan tujuan pertama dari misi pertama, yaitu misi menguatkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, responsif, inovatif dan partisipatif. Keberhasilan pencapaian tujuan ini akan diukur dengan indikator meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi. Sasaran yang ingin dicapai yaitu

   a) Meningkatnya kualitas integrasi pembangunan dari sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang diukur melalui meningkatnya nilai evaluasi SAKIP;
   b) Meningkatnya tata kelola keuangan dan aset daerah yang efektif, efisien dan akuntabel yang diukur melalui opini Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan keuangan pemerintah daerah;
   c) Meningkatnya kualitas pemetaan regulasi, regulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi daerah.
   d) Peningkatan Pelayanan Publik yang profesional, responsif dan bebas korupsi
   e) Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan berbasis digitalisasi dalam wujudkan smart city
   f) Meningkatnya pengawasan arsip daerah
   g) Meningkatnya pencegahan perilaku korupsi
   h) Meningkatnya sumber daya aparatur yang profesional dan berintegritas.
2. Mewujudkan Peningkatan Implementasi Kota Pintar

   Kota Padang sebagai Smart City merupakan kota yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mengatasi masalah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Mewujudkan Peningkatan Implementasi Kota Pintar merupakan tujuan pertama pada misi kedua yakni Meningkatkan penerapan smart government dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan berbasis digital dalam wujudkan smart city.

3. Mewujudkan Peningkatan Implementasi Kota Sehat

   Kota sehat adalah kondisi suatu daerah yang bersih, aman, nyaman, dan sehat untuk dihuni penduduk Kota Padang. Mewujudkan Peningkatan Implementasi Kota Sehat merupakan tujuan kedua pada misi kedua yakni Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar dan Kota Sehat. Keberhasilan tujuan ini diukur melalui peningkatan nilai evaluasi Kota Sehat. Sasaran yang ingin dicapai dengan tujuan ini yaitu tercapainya kondisi lingkungan hidup yang bersih, nyaman, aman dan kualitas hidup sehat yang diukur melalui hasil evaluasi kota sehat.

4. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul

   Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul merupakan tujuan pertama dari misi ketiga yaitu Menguatkan Masyarakat Yang Beragama dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter dan Pemberdayaan. Keberhasilan tujuan ini diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia dan evaluasi program smart surau yang juga merupakan program unggulan Walikota dan Wakil Walikota Padang. Sasaran yang ingin dicapai pada tujuan ini yakni peningkatan akses dan pemerataan serta kualitas pendidikan kesehatan, keagamaan dan perlindungan perempuan dan anak.

5. Menjaga stabilitas sosial dan politik daerah

   Menjaga stabilitas sosial dan politik daerah merupakan tujuan kedua dari misi ketiga yaitu Menguatkan Masyarakat Yang Beragama dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter dan Pemberdayaan. Tujuan ini diukur melalui Indeks rasa aman. Sasaran yang ingin dicapai pada tujuan ini Meningkatnya Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, Meningkatnya Toleransi beragama dan partisipasi politik dan Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat serta Meningkatkan peran surau dalam membangun karakter pemuda

6. Mewujudkan Peningkatan Kualitas Iklim Usaha dan Investasi Untuk Mendukung Penciptaan Lapangan Kerja Baru

   Mewujudkan Perekonomian Masyarakat yang adaptif dan kondusif yang ditandai dengan meningkatnya realisasi investasi dan meningkatnya tingkat kesempatan kerja. Tujuan ini diukur melalui Indeks daya saing daerah.

7. Mewujudkan Kota Layak Huni

   Mewujudkan Kota Layak Huni merupakan tujuan dari pelaksanaan misi kelima pada RPJMD yakni Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum Yang Hijau dan Berkualitas. Tujuan ini akan diukur melalui Indeks Kota Layak Huni. Sasaran yang ingin dicapai dengan tujuan ini yaitu:

   a) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang diukur melalui indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
   b) Mewujudkan hunian layak dan terjangkau;
   c) Mengembangkan dan merevitalisasi sarana serta prasarana umum yang ramah lingkungan dan hijau;
   d) Meningkatnya kualitas transportasi publik yang diukur melalui rasio konektivitas daerah.

8. Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

   Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim merupakan tujuan dari misi keenam pada RPJMD yakni Menguatkan Jaringan Ketahanan Bencana. Tujuan ini akan diukur melalui Indeks Risiko Bencana. Sasaran yang ingin dicapai dengan tujuan ini yaitu penguatan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana dan perubahan iklim yang diukur melalui Indeks Ketahanan Daerah (IKD) termasuk dalam hal ini upaya melalui peningkatan penguatan

kebijakan dan kelembagaan, perencanaan penanggulangan bencana, pengembangan sistem informasi dan logistik, penanganan tematik kawasan rawan bencana, mitigasi bencana, penguatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana serta pengembangan sistem pemulihan bencana.

9. Mewujudkan Sektor Perdagangan dan Jasa Yang Tangguh

   Mewujudkan Sektor Perdagangan dan Jasa Yang Tangguh merupakan tujuan kedua dari misi ketujuh pada RPJMD yakni mengembangkan perekonomian masyarakat yang adaptif dan kondusif melalui penguatan sektor perdagangan dan jasa. Tujuan ini akan diukur melalui Kontribusi Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB. Sasaran yang ingin dicapai dengan tujuan ini yaitu:

   a) Meningkatnya kemampuan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan
   b) Peningkatan lapangan usaha perdagangan diukur melalui kontribusi lapangan usaha perdagangan terhadap PDRB;
   c) Meningkatnya daya saing produk daerah
   d) Peningkatan Lapangan Usaha Perdagangan;
   e) Meningkatnya daya saing produk daerah dan transaksi perdagangan.
   f) Meningkatkan perekonomian daerah dari sektor Koperasi dan UMKM

10. Terwujudnya Peningkatan Perekonomian Daerah Dari Sektor Industri Kreatif dan Pariwisata

    Terwujudnya Peningkatan Perekonomian Daerah Dari Sektor Industri Kreatif dan Pariwisata merupakan tujuan pertama pada misi kedelapan yakni Menggerakkan Potensi Kota Untuk Terwujudnya Industri Kreatif dan Pariwisata Berkelanjutan. Indikator yang digunakan pada tujuan ini adalah Pertumbuhan PDRB sektor industri kreatif dan pariwisata. Sasaran yang ingin dicapai pada tujuan ini yaitu:

    a) Meningkatnya kontribusi industri kreatif terhadap perekonomian daerah yang diukur melalui rasio PDRB dari sektor ekonomi kreatif;
    b) Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah yang diukur melalui rasio PDRB dari sektor pariwisata;

4.1.3.2 Strategi Pembangunan Kota Padang

Strategi dan Arah kebijakan yang dirumuskan mempertimbangkan 9 (sembilan) Program Unggulan dan 40 (empat puluh) aktivasi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang 2025-2029 yakni sebagai berikut:

1. Padang Amanah

   Padang Amanah diwujudkan dalam bentuk aktivasi berupa:

   a) Pemerintahan berintegritas dan bebas pungli;
   b) Optimalisasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi;
   c) Pembangunan Masyarakat Tingkat RW

2. Padang Juara
   Padang Juara diwujudkan dalam bentuk aktivasi berupa:
   a) Kartu Padang Juara;
   b) Revisi kurikulum dan sertifikasi Guru PAUD;
   c) Revisi kurikulum dan sertifikasi TPQ/MDTA bagi siswa SD, MDTW/TQA bagi siswa SMP,
   d) Madrasah Diniyah Wustho (MDW) bagi siswa SMP;
   e) LKS dan seragam sekolah gratis bagi siswa kurang mampu;
   f) Padang Balomba
3. Smart Surau
   Smart Surau diwujudkan dalam bentuk aktivasi berupa:
   a) Subuh mubarokah;
   b) Remaja mesjid reborn;
   c) Fasilitasi rumah tahfidz;
   d) Ruang pembelajaran digital mesjid dan Wifi gratis.
4. Sinergi Nagari
   Sinergi Nagari diwujudkan dalam bentuk aktivasi berupa:
   a) Optimalisasi peran *Tungku Tigo Sajarangan* dalam pemberdayaan masyarakat;
   b) Sinergi pemerintah kota dengan organisasi masyarakat keagamaan, cendekiawan, dan adat
5. Padang Melayani
   Padang Melayani diwujudkan dalam bentuk aktivasi berupa:
   a) BPJS kesehatan gratis;
   b) BPJS ketenagakerjaan untuk pekerja rentan;
   c) Bantuan pemerintah untuk kelompok pertanian dan perikanan;
   d) Fasilitasi/insentif keluarga pasien kurang mampu;
   e) Peduli “Warga Emas” pada sektor kesehatan, transportasi, dan pelayanan publik;
   f) Perlindungan anak dan perempuan terhadap kekerasan;
   g) Kemudahan izin investasi dan berusaha;
   h) Peningkatan skill kepemudaan;
   i) Pemanfaatan aset untuk peningkatan pendapatan asli daerah
6. Padang Rancak
   Padang Rancak diwujudkan dalam bentuk aktivasi berupa:
   a) Taman tematik per kecamatan;
   b) Pengendalian banjir terpadu;
   c) Pengelolaan sampah terpadu dan penataan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) modern;
   d) Perbaikan jalan dan drainase kota;
   e) Trotoar ramah pejalan kaki;
   f) Transportasi publik dan pemberhentian ramah warga.
   g) Revitalisasi Pasar Raya dan pasar satelit
7. Padang Sigap
   Padang Sigap diwujudkan dalam bentuk aktivasi berupa:
   a) Dubalang kota;
   b) Sigap Call Center;
   c) Dokter warga.

8. UMKM Naik Kelas
   UMKM Naik Kelas diwujudkan dalam bentuk aktivasi berupa:
   a) Rumah wirausaha untuk UMKM;
   b) Koperasi berjaya
9. Jelajah Padang
   Jelajah Padang diwujudkan dalam bentuk aktivasi berupa:
   a) Penataan kawasan pinggir pantai;
   b) Pengembangan sektor wisata dan ekonomi kreatif;
   c) Revitalisasi dan aktivasi wisata tematik;
   d) Toilet bersih di area publik

5 (lima) Strategi yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Padang Tahun 2025- 2029 adalah sebagai berikut;

1. Menciptakan Padang Juara Melalui Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Kreatif dan Inovatif.

   Strategi *"Menciptakan Padang Juara Melalui Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Kreatif dan Inovatif"* diarahkan untuk membentuk ekosistem pengembangan SDM yang berdaya saing tinggi, adaptif terhadap perubahan zaman, serta memiliki semangat berinovasi. Langkah taktisnya mencakup penyediaan akses pendidikan yang merata dan berkualitas sejak usia dini hingga pendidikan tinggi, didukung dengan kurikulum yang mendorong keterampilan abad 21 seperti berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, dan literasi digital. Pemerintah daerah perlu memperluas program pelatihan vokasional berbasis potensi lokal dan kebutuhan pasar kerja, serta mengembangkan inkubasi kewirausahaan bagi generasi muda. Kolaborasi dengan dunia usaha, perguruan tinggi, dan komunitas kreatif juga didorong untuk menciptakan ruang-ruang inovasi dan ekspresi, seperti *Rumah Wirausaha*, kelas industri, dan program magang terintegrasi. Di samping itu, insentif dan apresiasi bagi talenta berprestasi turut diberikan untuk menumbuhkan semangat kompetitif dan kebanggaan terhadap daerah. Dengan strategi ini, Kota Padang diharapkan mampu melahirkan sumber daya manusia unggul yang menjadi pilar utama dan mewujudkan visi Walikota Padang. Adapun strategi taktis dapat dijabarkan pada poin-poin di bawah ini.

   - Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan di Semua Jenjang
     1. Program beasiswa daerah untuk siswa/mahasiswa berprestasi dan kurang mampu.
     2. Revitalisasi sekolah dan fasilitas pendidikan, termasuk laboratorium, perpustakaan, dan ruang praktik.
     3. Peningkatan kompetensi guru dan tenaga pendidik melalui pelatihan digital, pedagogik, dan sertifikasi profesional.
     4. Penguatan pendidikan karakter dan budaya lokal di kurikulum.
   - Pengembangan Keterampilan dan Daya Saing Tenaga Kerja Lokal

1. Pelatihan vokasi dan keterampilan kerja berbasis potensi daerah (pariwisata, maritim, ekonomi kreatif, pertanian, dll).
2. Inkubator wirausaha muda dan UMKM digital untuk mencetak pelaku usaha baru.
3. Kursus gratis bersertifikat berbasis teknologi dan industri kreatif (desain grafis, coding, digital marketing, dll).

- Mendorong Ekosistem Inovasi dan Kreativitas di Kalangan Muda
  1. Pendirian "Rumah Wirausaha" atau ruang kolaborasi di kecamatan atau kawasan strategis.
  2. Kompetisi inovasi dan festival ide kreatif bagi pelajar, mahasiswa, dan komunitas lokal.
  3. Kemitraan dengan universitas dan startup untuk riset terapan dan hilirisasi inovasi.
  4. Peningkatan Kesehatan Masyarakat Sebagai Fondasi SDM Berkualitas
  5. Program pencegahan stunting dan gizi seimbang sejak kehamilan hingga usia dini.
  6. Layanan kesehatan primer berbasis digital dan peningkatan fasilitas Puskesmas.
  7. Pelatihan kader kesehatan dan penyuluhan keluarga sehat berbasis komunitas.
- Penguatan Peran Keluarga dan Masyarakat dalam Pembangunan SDM
  1. Pemberdayaan keluarga dan parenting edukatif, khususnya dalam pengasuhan usia emas.
  2. Gerakan literasi keluarga (literasi baca, finansial, dan digital).
  3. Kolaborasi dengan tokoh masyarakat, agama, dan adat dalam membentuk karakter generasi muda.
- Transformasi Digital dalam Layanan Pendidikan dan SDM
  1. Platform Digital yang mengintegrasikan layanan beasiswa, pelatihan, dan mentoring.
  2. Digitalisasi sistem pendidikan dan pelatihan kerja, termasuk monitoring berbasis data.
  3. Pelatihan literasi digital menyeluruh bagi guru, siswa, dan tenaga kerja.

2. Meningkatkan Pelayanan Kota Padang terkait pengembangan ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan (khususnya untuk pengembangan Perdagangan, kepariwisataan dan UMKM).

   Strategi *"Meningkatkan Pelayanan Kota Padang Terkait Pengembangan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan"* diarahkan pada penciptaan iklim usaha yang kondusif dan pelayanan publik yang proaktif untuk mendorong pertumbuhan sektor perdagangan, kepariwisataan, dan UMKM secara terpadu. Langkah taktis meliputi penyederhanaan perizinan usaha melalui

sistem digital yang terintegrasi, pendampingan usaha berbasis klaster ekonomi lokal, serta penyediaan data dan informasi pasar secara real time melalui platform daring. Untuk sektor perdagangan, difokuskan pada penguatan jaringan distribusi, revitalisasi pasar tradisional, termasuk optimalisasi Pasar Raya Fase VII sebagai pusat perdagangan modern yang representatif dan strategis, serta promosi produk unggulan daerah melalui pameran maupun kerja sama antar daerah. Dalam bidang kepariwisataan, peningkatan pelayanan diarahkan pada digitalisasi layanan destinasi, peningkatan kapasitas SDM pariwisata, dan pengembangan paket wisata tematik yang berbasis budaya dan alam. Sementara bagi UMKM, disiapkan akses yang lebih luas terhadap pembiayaan, pelatihan manajemen usaha, dan fasilitasi sertifikasi produk serta pemasaran digital. Pendekatan kolaboratif antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan komunitas juga menjadi kunci dalam memastikan pembangunan ekonomi yang inklusif, inovatif, dan berkelanjutan di Kota Padang. Adapun strategi taktis dapat dijabarkan pada poin-poin di bawah ini.

- Penguatan Ekosistem Perdagangan Lokal yang Modern dan Terintegrasi

    1. Revitalisasi dan digitalisasi pasar rakyat
    2. Pengembangan sistem distribusi logistik kota (pasar induk, gudang, cold storage)
    3. Fasilitasi sertifikasi halal, SNI, dan legalitas usaha bagi pelaku perdagangan

- Pengembangan Pariwisata Berbasis Keunggulan Lokal dan Berkelanjutan.

    1. Penataan kawasan wisata prioritas (pantai, religi, heritage)
    2. Peningkatan kapasitas SDM pariwisata (guide, homestay, pelaku jasa wisata)
    3. Promosi pariwisata digital & event berskala nasional

- Transformasi UMKM Menuju Bisnis Produktif, Inovatif dan Digital

    1. Inkubasi UMKM naik kelas: manajemen, kemasan, branding, pembukuan
    2. Fasilitasi e-commerce dan digital marketing bagi pelaku UMKM
    3. Bantuan peralatan dan modal usaha berbasis potensi kelurahan/kecamatan.

- Pelayanan Terpadu Berbasis Digital Untuk Pelaku Ekonomi

    1. Integrasi sistem pelayanan perizinan dan informasi usaha (OSS daerah)
    2. Pengembangan Dashboard Ekonomi Kota Padang (real-time data UMKM, wisata, perdagangan)

3. Mewujudkan Padang Amanah Melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Baik dan Bersih.

   Strategi *"Mewujudkan Padang Amanah Melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Baik, dan Bersih"* dijabarkan secara taktis melalui penguatan sistem transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam setiap aspek pemerintahan. Pemerintah daerah perlu mengimplementasikan mekanisme pengawasan internal yang ketat dan independen, termasuk pengembangan aplikasi digital untuk pelaporan dan pemantauan kinerja aparatur secara real time. Pendidikan dan pelatihan integritas bagi seluruh pegawai negeri dan pejabat publik harus rutin dilakukan untuk membangun budaya kerja yang jujur dan profesional. Selain itu, pemberdayaan masyarakat melalui forum konsultasi dan pengawasan publik memperkuat fungsi kontrol sosial dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Penegakan aturan dan sanksi tegas terhadap praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme juga menjadi prioritas utama. Dengan pendekatan ini, tata kelola pemerintahan di Kota Padang diharapkan semakin transparan, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas serta berintegritas tinggi. Adapun strategi taktis dapat dijabarkan pada poin-poin di bawah ini.

   - Penguatan Sistem Integritas dan Anti-Korupsi

     1. Penerapan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM di seluruh OPD.
     2. Pembentukan dan penguatan unit pengendalian gratifikasi (UPG) dan whistleblowing system (WBS).
     3. Pendidikan antikorupsi dan internalisasi nilai ASN BerAKHLAK.

   - Digitalisasi dan Transparansi Tata Kelola

     1. Pengembangan dashboard kinerja dan keuangan OPD berbasis digital.
     2. Open Data Padang: publikasi data perencanaan, penganggaran, dan capaian kinerja.
     3. Optimalisasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) lintas OPD.

   - Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme ASN

     1. Pendidikan dan pelatihan kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural dengan menganggarkan beasiswa ASN.
     2. Penerapan sistem merit dalam rekrutmen, promosi, dan mutasi ASN.
     3. Penilaian kinerja berbasis e-Kinerja yang terintegrasi.

- Pelayanan Publik yang Adaptif, Cepat, dan Berbasis Masyarakat

    1. Reformasi birokrasi layanan melalui Mal Pelayanan Publik (MPP).
    2. Pemanfaatan aplikasi pengaduan publik (LAPOR, Call Center Kota Padang, SP4N) yang terintegrasi.
    3. Pengukuran rutin IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) dan tindak lanjut keluhan.

- Perencanaan dan Penganggaran yang Partisipatif dan Akuntabel

    1. Penguatan Musrenbang tematik dan inklusif, berbasis kelompok rentan dan pemuda.
    2. Penerapan e-Planning dan e-Budgeting terintegrasi.
    3. Pelaporan kinerja berbasis hasil (outcome-based reporting).

4. Menjaga Stabilitas Ketenteraman dan Ketertiban Umum Daerah dengan Sinergi Nagari.

   Strategi *"Menjaga Stabilitas Ketenteraman dan Ketertiban Umum Daerah dengan Sinergi Nagari"* dapat dijabarkan secara taktis melalui penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, perangkat nagari, serta unsur adat dan budaya lokal, termasuk peran strategis *Dubalang Kota* sebagai penjaga adat dan ketertiban. Pemerintah daerah perlu memfasilitasi pembentukan dan penguatan peran *Dubalang Kota* sebagai mitra aktif dalam menjaga keamanan berbasis kearifan lokal, melalui pelatihan, pembekalan hukum dasar, dan integrasi dengan sistem pengamanan formal seperti Satpol PP dan Linmas. Forum komunikasi rutin antar pemangku kepentingan di tingkat nagari juga harus melibatkan *Dubalang*, bersama KAN, Bamus, tokoh adat, dan tokoh masyarakat lainnya, untuk mendeteksi dini potensi konflik serta menyusun langkah penyelesaian secara preventif dan partisipatif. Peran *Dubalang Kota* ini dilengkapi dengan dukungan teknologi pelaporan cepat serta sistem penghargaan berbasis kinerja sosial, sehingga menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan berakar kuat pada nilai-nilai adat dan kebersamaan masyarakat nagari di wilayah perkotaan.

5. Peningkatan Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi dengan Smart Surau dan Padang Sigap

   Strategi *"Peningkatan Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi dengan Smart Surau dan Padang Sigap"* bertujuan membangun ketangguhan masyarakat melalui pendekatan integratif yang menggabungkan nilai-nilai lokal, pemanfaatan teknologi, dan penguatan peran komunitas. Konsep *Smart Surau* dikembangkan sebagai pusat pembinaan spiritual, sosial, dan edukasi berbasis teknologi, di mana surau tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga ruang belajar digital, pusat literasi budaya, dan wadah dialog lintas generasi. Sementara itu, *Padang Sigap* difungsikan sebagai sistem kewaspadaan dan respon cepat masyarakat terhadap isu sosial, kebencanaan, maupun kerusakan lingkungan, dengan melibatkan kelompok pemuda, tokoh masyarakat, dan aparat

kewilayahan secara sinergis. Peningkatan kapasitas komunitas dilakukan melalui pelatihan tanggap darurat, penyusunan peta risiko partisipatif, dan penguatan jejaring komunikasi berbasis aplikasi lokal. Dengan pendekatan ini, masyarakat didorong untuk menjadi aktor utama dalam menjaga harmoni sosial, merawat warisan budaya, serta melestarikan lingkungan secara adaptif dan berkelanjutan.

4.1.4 Tema Pembangunan Kota Padang Tahun 2027

Pemilihan tema Pembangunan Tahun 2027 merupakan pemilihan terhadap fokus prioritas pembangunan yang akan dilakukan pada tahun 2027, dengan tetap tidak mengabaikan upaya pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan pada Pasal 18 dan pasal 298 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun tema Pembangunan Kota Padang tahun 2027 adalah

"Penguatan pondasi transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan dasar guna mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan"

Penguatan pondasi mencerminkan fokus pada penguatan aspek-aspek mendasar pembangunan, seperti regulasi, kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, sistem perencanaan dan penganggaran, serta mekanisme pembinaan internal. Pondasi ini dibangun sebagai landasan yang kokoh untuk mendorong transformasi pembangunan yang berkelanjutan, sekaligus menciptakan iklim investasi yang kondusif dan meningkatkan kemudahan berusaha di Kota Padang.

Transformasi Tata Kelola Pemerintahan mengandung arti adanya perubahan sistemik dan terencana dalam manajemen pemerintahan yang lebih :

- Bersih dan akuntabel
- Efisien dan responsif
- Berbasis data dan digitalisasi
- Transparan dan partisipatif, melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Pelayanan Dasar Inklusif mengarah pada peningkatan akses dan kualitas pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan infrastruktur dasar lainnya yang :

- Menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan (perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin).
- Tidak diskriminatif, baik secara wilayah maupun kelompok sosial.
- Mendorong aktivitas ekonomi guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota Padang.

Pembangunan Berkelanjutan menekankan pentingnya pembangunan yang:

- Mempertimbangkan dimensi jangka panjang, keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi.
- Mengedepankan prinsip efisiensi sumber daya, ramah lingkungan, ketahanan pangan dan daya dukung daerah.
- Memastikan keberlanjutan pelayanan publik dan pembiayaan pembangunan di masa mendatang.

Hal ini diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan yang tidak hanya menguntungkan saat ini tetapi juga menjamin keberlanjutan untuk generasi mendatang.
Pemilihan tema Pembangunan Tahun 2027 merupakan pemilihan terhadap fokus prioritas pembangunan yang akan dilakukan pada tahun 2027, dengan tetap tidak mengabaikan upaya pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatan pada Pasal 18 dan pasal 298 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun proyeksi Target Indikator Makro Kota Padang tahun 2027 sebagai berikut :

Tabel 4- 5 Target Indikator Makro Kota Padang Tahun 2027

No	Indikator	Satuan	Target
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	6,88
2	PDRB Per Kapita ADHB	Juta per kapita	122,87
3	PDRB Per Kapita ADHK	Juta per kapita	61,64
4	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	85,14
5	Angka Harapan Hidup	Tahun	75,78
6	Harapan Lama Sekolah	Tahun	16,61
7	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	11,76
8	Pengeluaran Per Kapita	Rp. Ribu	16.175
9	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	9,04
10	Jumlah Penduduk Miskin	Jiwa	3.072
11	Tingkat Kemiskinan	Persen	3,12
12	Gini Ratio	Indeks	0,32

Sumber : RPJMD Kota Padang tahun 2025-2029

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan

4.2.1 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2027

Prioritas Pembangunan Nasional tahun 2027 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4- 6 Prioritas Pembangunan, Sasaran dan Arah Kebijakan Nasional 2025-2029

NO	SASARAN/ INDIKATOR	TARGET 2027	ARAH KEBIJAKAN	
PN 1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)			
1	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan HAM		1	Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Nasional
a	Indeks Demokrasi Indonesia	2,12 – 85,66	2	Penguatan Komunikasi Publik dan Media
b	Indeks HAM	2,80	3	Penguatan Lembaga Demokrasi
			4	Pengarusutamaan, Pemajuan, dan Penegakan HAM
PN 2	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara Dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru			
1	Terjaganya kedaulatan negara dan penguatan stabilitas keamanan nasional sebagai fondasi pelaksanaan Pembangunan			Kedaulatan Negara Dan Stabilitas Keamanan Nasional
a	Asia Power Index (Military Capability)	17,0	1	Pembangunan postur pertahanan
b	Asia Power Index (Diplomatic Influence)	65,8	2	Pembangunan dan pengembangan industri pertahanan
c	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	68,00	3	Penguatan komponen Cadangan dan komponen pendukung
d	Global Cybersecurity Index	95	4	Penguatan intelijen dan keamanan dalam negeri
e	Indeks Keamanan Laut Nasional	61	5	Peningkatan keamanan siber, sandi, dan sinyal
2	Meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan yang berkualitas secara berkelanjutan dengan pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus) - Pangan		6	Peningkatan keamanan laut dan hidrooseanografi
a	Indeks Ketahanan Pangan	75,4	7	Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat
b	Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%)	2,38	8	Peningkatan profesionalisme pelayanan kepolisian
c	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PoU)	6,55	9	Penguatan diplomasi asta cita dan diplomasi ekonomi.
3	Meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan energi secara berkelanjutan dengan pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus) - Energi			Swasembada Pangan, Energi, Dan Air
a	Indeks Ketahanan Energi	6,82	10	Pengembangan KSPP/lumbung pangan
b	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	20,00	11	Penguatan cadangan pangan nasional

NO	SASARAN/ INDIKATOR	TARGET 2027	ARAH KEBIJAKAN	
4	Meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan dengan pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus) - Air		12	Pengembangan pangan hewani
a	Indeks Ketahanan Air Nasional	3,50	13	Pengembangan pangan akuatik (blue food)
b	Kapasitas tampungan air	60,16	14	Pengembangan pangan lokal dan nabati
c	kses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%	42,24	15	Fortifikasi dan biofortifikasi pangan
d	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	17,00	16	Pengembangan kelembagaan ekonomi, regenerasi sumber daya manusia, riset, inovasi, modernisasi dan digitalisasi pertanian dan perikanan yang adaptif dan inklusif;
5	Terwujudnya perekonomian nasional yang progresif, inklusif, dan berkelanjutan		17	Penguatan produksi komoditas pertanian bernilai tambah tinggi.
a	Posisi Ekonomi Syariah Indonesia di Tingkat Global (peringkat)	2	18	Peningkatan penyediaan energi
b	Indonesia Blue Economy Index (IBEI)	41,26	19	Perluasan akses dan jangkauan pelayanan energi;
c	Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global (peringkat)	41	20	Penguatan transisi energi berkeadilan dari energi fosil ke pemanfaatan energi bersih.
6	Terwujudnya transformasi ekonomi hijau		21	Penyediaan pasokan air berkelanjutan
a	Indeks Ekonomi Hijau	71,01	22	Konservasi sumber daya air
b	Indeks Kualitas Pengelolaan Sampah (IKPS)	60,00	23	Pengembangan SPAM terintegrasi hulu ke hilir
c	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	28 (17 terdaur ulang)	24	Penyediaan dan pengawasan sanitasi aman, berkelanjutan, dan berketahanan iklim berbasis CWIS (Citywide Inclusive Sanitation)
d	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kumulatif (%)	19,07	25	Pengembangan terpadu pesisir utara Jawa Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Biru, Ekonomi Hijau
e	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Tahunan (%)	27,35		Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Biru, Ekonomi Hijau
f	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,47	26	Penguatan industri dan UMKM halal
g	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	76,67	27	Penguatan ekspor halal dan kerjasama ekonomi internasional
			28	Penguatan ekosistem halal
			29	Penguatan keuangan syariah
			30	Penguatan dana sosial syariah
			31	Penguatan faktor pendukung ekonomi digital serta penguatan ekonomi dan industri digital
			32	Penguatan tata kelola ekonomi biru
			33	Peningkatan pengelolaan konservasi perairan dan ekosistem pesisir

NO	SASARAN/ INDIKATOR	TARGET 2027	ARAH KEBIJAKAN	
			34	Peningkatan produktivitas perikanan yang terintegrasi, modern, dan berkelanjutan
			35	Pengembangan industri garam dan produk olahan hasil 99 laut
			36	Penguatan industri transportasi laut
			37	Pengembangan pariwisata berbasis bahari dan danau; serta
			38	Pengembangan iptek, inovasi, dan SDM ekonomi biru
			39	Penguatan ekosistem ekonomi sirkular
			40	Penguatan pengelolaan keanekaragaman hayati ekosistem, spesies, dan genetik;
			41	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan tata ruang
			42	Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir
			43	Pembangunan rendah karbon
			44	Peningkatan pekerjaan hijau/green jobs
			45	Penguatan pengelolaan hutan lestari
PN 3	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi			
1	Terwujudnya Pengembangan Infrastruktur yang Berkelanjutan		1	Pengembangan Konektivitas dan Layanan Transportasi Multimoda
a	Stok Infrastruktur terhadap PDB (%)	47,00	2	Peningkatan Konektivitas Digital dan Transisi Energi Listrik
2	Meningkatnya Total Aset Sektor Keuangan terhadap PDB		3	Pendalaman Sektor Keuangan
a	Total Aset Sektor Keuangan/PDB (%)	188,04	4	Peningkatan Produktivitas UMKM dan Koperasi
b	Aset Perbankan/PDB (%)	64,51	5	Pembangunan Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan
c	Aset Dana Pensiun/PDB (%)	7,63	6	Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual
d	Aset Asuransi/PDB (%)	9,30		
e	Kapitalisasi Pasar Modal/PDB (%)	59,90		
f	Total Kredit/PDB (%)	38,46		
g	Inklusi Keuangan (%)	91,50		
3	Meningkatnya Lapangan Kerja yang Berkualitas			
a	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	37,95		
b	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDB (%)	1,12		
c	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (%)	3,15		
d	Rasio Kewirausahaan (%)	3,18		
4	Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata			
a	Rasio PDB Pariwisata (%)	4,60-4,70		
b	Devisa Pariwisata (miliar USD)	22,00-24,70		

NO	SASARAN/ INDIKATOR	TARGET 2027	ARAH KEBIJAKAN	
5	Meningkatnya Proporsi PDB Ekonomi Kreatif			
a	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)	7,40-8,00		
PN 4	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia, Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas			
1	Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang Merata			Pendidikan Berkualitas Yang Merata
a	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di atas 15 Tahun (Tahun)	9,45	1	Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 Tahun Pendidikan Prasekolah dan 12 Tahun Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah)
b	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,36	2	Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran
c	Rata-rata Nilai PISA		3	Penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas
	(a) Membaca (b) Matematika (c) Sains	396 404 416	4	Penguatan pendidikan tinggi berkualitas yang merata dan pengembangan Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematic (STEAM)
d	Rata-rata Nilai Asesmen Tingkat Nasional:			Kesehatan Untuk Semua
	(a) Literasi Membaca (b) Numerasi	65,89 58,86	5	Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat secara holistic berdasarkan siklus kehidupan
e	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi (%)	65,89 58,86	6	Pemberian makan bergizi gratis untuk pemenuhan gizi
f	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	11,49	7	Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat
g	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	68,50	8	Penguatan pelayanan kesehatan dan tata Kelola
2	Terwujudnya Kesehatan untuk Semua			Iptek, Inovasi, Dan Produktivitas Tenaga Kerja
a	Usia Harapan Hidup (UHH) (Tahun)	74,68	9	Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi dan produktivitas tenaga kerja
b	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate) (Rata-rata Kelahiran per Wanita Usia Subur 15–49 Tahun)	2,10	10	Peningkatan kontribusi iptek dan inovasi dalam pembangunan nasional
c	Angka Kematian Ibu (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	109	11	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN)
d	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita (%)	17,50		Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, Dan Masyarakat Inklusif
e	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk)	252	12	Peningkatan Ketangguhan Keluarga
f	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	98,70	13	Peningkatan kualitas perlindungan anak
3	Terwujudnya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif		14	Peningkatan Kualitas Pemuda

NO	SASARAN/ INDIKATOR	TARGET 2027	ARAH KEBIJAKAN	
a	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	73,83	15	Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan dari kekerasan
b	Indeks Perlindungan Anak	72,33	16	Peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia
c	Indeks Pembangunan Pemuda	67,24		Prestasi Olahraga Indonesia Di Tingkat Dunia Dan Budaya Berolahraga Di Masyarakat
d	Indeks Ketimpangan Gender	0,421	17	Peningkatan Pembinaan Prestasi Olahraga;
e	Indeks Pembangunan Gender	92,11-92,21	18	Peningkatan pembinaan prestasi olahraga dan pengembangan pembudayaan olahraga yang inklusif.
f	Mobilitas Penduduk Lanjut Usia (%)	94,50		
g	Mobilitas Penduduk Penyandang Disabilitas (%)	69,50		
4	Menguatnya Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Tenaga Kerja			
a	Peringkat Indeks Inovasi Global	52		
b	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,44–4,96		
c	Pengeluaran Iptek dan Inovasi (% PDB)	0,31		
d	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	56,40–59,31		
5	Meningkatnya Prestasi Olahraga Indonesia di Tingkat Dunia dan Budaya Berolahraga di Masyarakat			
a	Peringkat pada Asian Games	9–11		
b	Peringkat pada Asian Para Games	5–7		
c	Peringkat pada ASEAN Para Games	1–2		
d	Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Aktif Berolahraga	10,80–11,94		
PN 5	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri			
1	Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah, Produktivitas dan Daya Saing Industri Pengolahan		1	Pengembangan hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi inovasi, serta berorientasi ekspor
a	Rasio PDB Industri Pengolahan (%)	21,20	2	Pengembangan aglomerasi industri di KI/KEK prioritas sebagai pusat pertumbuhan baru
2	Terwujudnya Peningkatan Integrasi Ekonomi Domestik dan Global		3	Optimalisasi Backbone integrasi ekonomi dan perkuatan sistem logistik nasional
a	Biaya Logistik (% PDB)	13,30	4	Peningkatan Investasi untuk integrasi ekonomi domestik dan global

NO	SASARAN/ INDIKATOR	TARGET 2027	ARAH KEBIJAKAN	
b	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDB)	29,40	5	Peningkatan Perdagangan Domestik, antarwilayah, dan ekspor serta peningkatan partisipasi dalam rantai nilai global
c	Ekspor Barang dan Jasa (% PDB)	22, 7	6	Optimalisasi Investasi Strategis Danantara
PN 6	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan			
1	Mempercepat Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pemerataan		1	Sistem Pendataan Sosial Ekonomi Terintegrasi
a	Tingkat Kemiskinan (%)	6,5-7,5	2	Perlindungan Sosial yang Adaptif dan Inklusif
b	Tingkat Kemiskinan Ekstrem (%)	0-0,5	3	Peningkatan Akses Lapangan Kerja dan Penumbuhan Usaha Berkelanjutan dan Inovatif
c	Proporsi Penduduk Kelas Menengah (%)	18,2	4	Percepatan Penyediaan Perumahan dan Pemukiman
d	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	34,99	5	Peningkatan Kemandirian Perdesaan yang Berkelanjutan
e	Persentase Penyandang Disabilitas yang Bekerja di Sektor Formal (%)	10,40	6	Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan
2	Meningkatkan Akses Rumah Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan		7	Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)
a	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	68,66		
3	Mewujudkan Pembangunan Kemandirian Perdesaan dari Bawah sebagai Sumber Pendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan			
a	Persentase Desa Mandiri (%)	23,91		
4	Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi			
a	Proporsi PDRB Perkotaan terhadap PDB Nasional (%)	57,70		
b	Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap PDB Nasional (%)	44,58		
5	Meningkatnya Usaha Inovatif dan Berkelanjutan di Tingkat Desa/Kelurahan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih			
a	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (%)	30		
PN 7	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan			
1	Terwujudnya Supremasi Hukum yang Transparan, Adil, dan Tidak Memihak serta Sistem Politik yang Fungsional		1	Reformasi Politik dan Tata Kelola Pemilu
a	Indeks Pembangunan Hukum	0,70	2	Reformasi Hukum
b	Indeks Persepsi Korupsi	40	3	Penguatan Kelembagaan, Pelayanan dan Penegakan Hukum
c	Indeks Integritas Partai Politik	65,00 - 66,99	4	Transformasi Sistem Penuntutan dan Advocaat Generaal

NO	SASARAN/ INDIKATOR	TARGET 2027	ARAH KEBIJAKAN	
2	Terwujudnya Birokrasi Pemerintahan yang Adaptif dan Melayani		5	Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
a	Indeks Reformasi Birokrasi Nasional	72,8	6	Penerapan Prinsip Meritokrasi dan Reformasi Manajemen ASN
b	Indeks Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri	94	7	Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pembangunan
3	Terwujudnya Masyarakat yang Bebas dari Penyalahgunaan Narkoba		8	Penataan Desentralisasi dan Otonomi Daerah
	Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika (%)	1,70	9	Pemerintah Digital
4	Terwujudnya Tata Kelola BUMN yang Baik untuk Meningkatkan Kontribusi BUMN sebagai Agen Pembangunan		10	Pelindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri, termasuk pekerja migran Indonesia
a	Return on Asset (RoA) BUMN	3,26	11	Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)
5	Tercapainya Peningkatan Pendapatan Negara yang Optimal dengan Tetap Menjaga Iklim Investasi, Didukung Upaya Mewujudkan Reformasi Fiskal Secara Komprehensif Melalui Optimalisasi Belanja Negara serta Perluasan Sumber dan Pengembangan Inovasi Pembiayaan		12	Peningkatan Produktivitas BUMN
a	Rasio Pendapatan Negara terhadap PDB	12,17-13,35	13	Optimalisasi Pendapatan Negara
b	Rasio Perpajakan terhadap PDB (%)	10,46-11,40	14	Optimalisasi Belanja Negara
6	Tercapainya Tingkat Inflasi yang Rendah dan Stabil untuk Mendukung Stabilitas serta Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan		15	Perluasan Sumber dan Pengembangan InovasI Pembiayaan
a	Tingkat Inflasi (persen)	2,5 ± 1,0	16	Pengendalian Inflasi.
PN 8	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur			
1	Terwujudnya Kehidupan Beragama yang Maslahat dan Berkebudayaan Maju		1	Penguatan kerukunan umat beragama dan layanan keagamaan transformatif untuk mewujudkan kehidupan beragama maslahat
a	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	66,15	2	Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan serta Penguatan Karakter Bangsa
b	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	58,99	3	Pembangunan Berketahanan Iklim
c	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	77,14	4	Pengelolaan Risiko Bencana yang Efisien dan Tepat Guna.
2	Terwujudnya Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim			
a	Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana Relatif terhadap PDB (%)	0,136		

Sumber : RKP tahun 2027

4.2.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2027

4.2.2.1 Pemenuhan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Provinsi serta Belanja bersifat mengikat Tahun 2027

Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang terdapat pada Bidang Urusan Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Ketenteramanan dan Ketertiban Umum serta Sosial, yang kemudian dalam target serta pelaksanaannya berpedoman kepada Standar Pelayanan Minimal yang mengacu pada Peraturan Pemerntah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang kemudian diatur lebih detail oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, yang kemudian secara lebih teknis pengaturan perhitungan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan diatur dengan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota.
5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang kemudian juga dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 bahwa Prioritas Pertama penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah diprioritaskan untuk membiayai belanja wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar.

Merujuk pada Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan daerah maka definisi :

1. Belanja wajib yakni belanja yang harus dikeluarkan dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar masyarakat, dalam hal ini adalah pencapaian terhadap target Standar Pelayanan Minimal pada 6 Bidang yakni Pendidikan, Kesehatan,

Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat dan Sosial

2. Belanja mengikat yakni belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan, dan jika merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD yang dikeluarkan setiap tahunnya dan penjabaran lebih detail bahwa belanja mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan, seperti belanja pegawai, dan belanja barang dan jasa.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal bahwa terdapat jenis pelayanan dasar, penerima layanan dasar dan target serta mutu minimal layanan dasar yang harus dipenuhi setiap tahunnya oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 4- 7 Jenis Pelayanan Dasar dan Target Penerima Layanan Dasar Tahun 2027

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas waktu capaian
Bidang Pendidikan				
1	Pendidikan Menengah	Jumlah warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan menengah	100%	Setiap tahun
2	Pendidikan Khusus	Jumlah Warga Negara usia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam Pendidikan khusus	100%	Setiap tahun
Bidang Kesehatan				
1	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Jumlah penduduk yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas waktu capaian
2	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	Jumlah penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun
Bidang Pekerjaan Umum				
1	Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	100%	Setiap tahun
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota	100%	Setiap tahun
Bidang Perumahan Rakyat				
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	Setiap tahun
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	Setiap tahun
Bidang Ketenteraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat				
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di provinsi	100%	Setiap tahun
Bidang Sosial				
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial	100%	Setiap tahun

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas waktu capaian
	terlantar di dalam panti	dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti		
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti	Jumlah Warga Negara anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	100%	Setiap tahun
3	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di dalam panti	100%	Setiap tahun
4	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	Jumlah Warga Negara korban bencana provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	100%	Setiap tahun

Dalam pencapaian target Standar Pelayanan Minimal pada 6 (enam) bidang urusan tersebut maka terdapat beberapa arah kebijakan yakni :

A. Bidang Pendidikan

Dalam upaya pencapaian target Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan maka akan dilakukan beberapa arah kebijakan yakni :

1. Pemenuhan terhadap Standar satuan pendidikan yang terdiri atas standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian.
2. Penyediaan perlengkapan dasar Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang terdiri dari 1 (satu) paket buku teks pelajaran sesuai dengan kurikulum per Peserta Didik per tahun serta 1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester.
3. Penyediaan Perlengkapan Dasar Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang terdiri dari 1 (satu) paket buku

teks pelajaran sesuai dengan kurikulum per Peserta Didik per tahun serta 1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester.

4. Penyediaan Perlengkapan Dasar Peserta Didik Pendidikan Khusus yang terdiri dari 1 (satu) paket materi ajar sesuai dengan ragam disabilitas dan sesuai dengan kurikulum per Peserta Didik per tahun, serta 1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester.
5. Pemenuhan Standar Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Sekolah Menengah Atas, Sekola Menengah Kejuruan dan Pendidikan Khusus
6. Pemenuhan terhadap Standar Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas, yakni :
    - Kualitas pendidik, paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) serta memiliki sertifikat pendidik.
    - Kualitas tenaga kependidikan yakni kepala sekolah, paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1), memiliki sertifikat pendidik dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.
    - Kualitas tenaga kependidikan yakni tenaga laboratorium, paling rendah memiliki ijazah SMA/sederajat.
    - Kulitas tenaga kependidikan yakni tenaga penunjang lainnya, paling rendah memiliki ijazah SMA/sederajat.
7. Pemenuhan terhadap Standar Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan, yakni :
    - Kualitas pendidik, paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) serta memiliki sertifikat pendidik.
    - Kualitas tenaga kependidikan yakni kepala sekolah, paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1), memiliki sertifikat pendidik dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.
    - Kualitas tenaga kependidikan yakni tenaga laboratorium/bengkel/workshop paling rendah memiliki ijazah SMA/SMK/sederajat yang relevan dengan kebutuhan laboratorium/bengkel/ workshop.
    - Kulitas tenaga kependidikan yakni tenaga penunjang lainnya, paling rendah memiliki ijazah SMA/sederajat.
8. Pemenuhan terhadap Standar Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Khusus, yakni :
    - Pendidik terdiri atas guru kelas dan guru mata pelajaran sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1), serta memiliki sertifikat pendidik.

- Kualitas tenaga kependidikan yakni kepala sekolah, paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1), memiliki sertifikat pendidik dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.
- Kulitas tenaga kependidikan yakni tenaga penunjang lainnya, paling rendah memiliki ijazah SMA/sederajat

B. Bidang Kesehatan

Dalam upaya pencapaian target Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan maka akan dilakukan beberapa arah kebijakan yakni :

1. Edukasi pengurangan risiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana Provinsi secara berkelanjutan dan tepat sasaran.
2. Menyediakan pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduk terdampak bencana/ berpotensi bencana Provinsi pada saat tanggap darutat dengan melakukan :
   - mobilisasi tim penanggulangan krisis kesehatan
   - memberikan pelayanan kesehatan dasar di fasilitas pelayanan kesehatan
   - memberikan pelayanan kesehatan rujukan
   - menyediakan seluruh kebutuhan logistik kesehatan.
3. Menyediakan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi melalui :
   - melakukan kajian epidemiologis penemuan kasus dan identifikasi faktor risiko melalui penyelidikan epidemiologis
   - penatalaksanaan penderita pada kasus konfirmasi, probable dan suspek yang mencakup kegiatan pemeriksaan, pengobatan, perawatan dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina sesuai standar yang telah ditetapkan
   - melakukan penyuluhan
   - melakukan pencegahan dan pengebalan sesuai dengan jenis penyakit
   - melakukan penanganan jenazah, jika diperlukan
   - pemusnahan penyebab penyakit, jika diperlukan
   - melakukan upaya penanggulangan kesehatan masyarakat lainnya, jika diperlukan antara lain meliburkan sekolah dan/atau menutup fasilitas umum untuk sementara waktu.

C. Bidang Pekerjaan Umum

Dalam upaya pencapaian target Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum maka akan dilakukan beberapa arah kebijakan yakni :

1. pemenuhan kebutuhan Air Minum Curah lintas kabupaten/kota, dengan penerima layanan yakni

penyelenggara sistem penyediaan air minum oleh badan usaha milik daerah dan unit pelaksana teknis daerah pada Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang menjadi penerima Air Minum Curah lintas kabupaten/kota.

2. penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik regional lintas kabupaten/kota, dengan penerima pelayanan yakni Rumah Tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik regional, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada Area Berisiko Pencemaran Air Limbah Domestik dan dekat badan air.

D. Bidang Perumahan Rakyat

Dalam upaya pencapaian target Standar Pelayanan Minimal bidang Perumahan Rakyat maka akan dilakukan beberapa arah kebijakan yakni :

1. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi
2. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi berupa pendampingan/pembinaan, pembimbingan, penyuluhan, pemberian pelayanan informasi serta bantuan teknis.

Pemberian bantuan teknis sebagaimana Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, yakni : pendampingan penggantian kerugian, penyusunan Rencana Tapak dan Detail Engineering Design (DED) Rumah Susun Umum atau Rumah Khusus, pembangunan Rumah Susun Umum, pembangunan Rumah Khusus, dan/atau pengadaan tanah bagi masyarakat terkena relokasi program pemerintah daerah.

E. Bidang Ketenteraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat

Dalam upaya pencapaian target Standar Pelayanan Minimal bidang Ketenteraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat maka akan dilakukan beberapa arah kebijakan yakni:

1. Pemenuhan terhadap standar operasional prosedur Satpol PP.
2. Pemenuhan terhadap standar sarana prasarana Satpol PP berupa standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pemenuhan terhadap standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat berupa standar teknis terkait standar jumlah dan kualitas personil/sumber daya manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. pemenuhan terhadap standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada meliputi :

- pelayanan kerugian materil berupa kerusakan atas barang atau aset pribadi yang diakibatkan dari penegakan pelanggaran Perda dan Perkada
- Pelayanan pengobatan berupa tindakan pertolongan pertama bagi warga negara yang terkena cidera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cidera fisik sedang dan/atau berat.

F. Bidang Sosial

Dalam upaya pencapaian target Standar Pelayanan Minimal bidang Sosial maka akan dilakukan beberapa arah kebijakan yakni :

1. Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di dalam Panti Sosial melalui penyediaan permakanan, sandang, asrama yang mudah diakses, alat bantu, perbekalan kesehatan, bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial, bimbingan keterampilan hidup sehari-hari, pembuatan nomor induk kependudukan, penyediaan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar, pelayanan penelusuran keluarga; dan/atau pelayanan reunifikasi keluarga.
2. Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di dalam Panti Sosial melalui penyediaan pengasuhan, permakanan, sandang, asrama yang mudah diakses, perbekalan kesehatan, bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial, bimbingan keterampilan hidup sehari-hari, pembuatan akta kelahiran, penyediaan nomor induk kependudukan, dan kartu identitas Anak, akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar, pelayanan penelusuran keluarga, . pelayanan reunifikasi keluarga; dan/atau penyediaan akses layanan pengasuhan kepada keluarga pengganti.
3. Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di dalam Panti Sosial melalui permakanan, sandang, asrama yang mudah diakses, alat bantu, perbekalan kesehatan, bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial, bimbingan keterampilan hidup sehari-hari, fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akses ke layanan kesehatan dasar, pelayanan penelusuran keluarga, pelayanan reunifikasi keluarga, dan/atau pemulasaraan.
4. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial di dalam Panti Sosial melalui penyediaan permakanan, sandang, asrama/cottage yang mudah di akses, perbekalan kesehatan, bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial, bimbingan keterampilan dasar, fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan/atau kartu identitas Anak, akses ke layanan kesehatan dasar, dan/atau pemulangan ke daerah asal.
5. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah provinsi melalui penyediaan permakanan, sandang,

tempat penampungan pengungsi, penanganan khusus bagi kelompok rentan dan pemberian dukungan psikososial.

4.2.2.2 Prioritas, Sasaran dan Arah Kebijakan Provinsi Tahun 2027

Tahun 2027 merupakan tahun kedua dari periodesasi RPJMD Povinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 sehingga sebagai bahan evaluasi untuk menetapkan langkah-langkah percepatan pencapaian target yang belum dapat direalisasikan dan melakukan penyesuaian kebijakan pembangunan daerah bila diperlukan adalh hasil evaluasi pelaksanaan tahun 2024.

Arah kebijakan pembangunan dan prioritas pembangunan daerah tahun 2026 disesuaikan dengan Visi dan Misi RPJMD 2025-2029 yang responsif dan tanggap terhadap upaya peningkatan Pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta juga dalam upaya mitigasi terhadap ketidakpastian perkembangan ekonomi global, regional dan lokal serta guna mendukung pencapaian Tema RKP yang juga menjadi penekanan dalam penentuan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah tahun 2027.

Adapun Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2027 dan arah kebijakan pembangunan pada masing-masing Prioritas yakni sebagai berikut.

Prioritas Pembangunan 1 : Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas

Pembangunan manusia merupakan fondasi utama dalam mendorong kemajuan suatu daerah. Prioritas pembangunan pertama dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2025–2029 ini menempatkan pendidikan dan kesehatan sebagai dua sektor kunci yang harus ditangani secara terpadu, sistematis, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang unggul, sehat, cerdas, dan kompetitif di tingkat nasional maupun global.

Sumatera Barat memiliki potensi besar dalam hal nilai-nilai budaya, religiusitas, serta semangat belajar masyarakatnya. Namun, data menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan serius yang perlu diatasi, seperti ketimpangan akses dan kualitas pendidikan antarwilayah, rendahnya rata-rata lama sekolah, tingginya angka putus sekolah di tingkat SMA/SMK, serta kurangnya ketersediaan fasilitas pendidikan dan tenaga pengajar berkualitas, khususnya di wilayah 3T (terdepan, terpencil, dan tertinggal).

Di sisi kesehatan, angka prevalensi stunting masih cukup tinggi di beberapa kabupaten/kota. Angka kematian ibu dan bayi yang belum sepenuhnya terkendali menunjukkan bahwa akses layanan kesehatan ibu-anak masih perlu ditingkatkan, baik dari sisi cakupan maupun mutu layanan. Selain itu, beban penyakit tidak menular (PTM) seperti hipertensi dan diabetes juga meningkat, menambah tantangan sistem kesehatan daerah.

Untuk itu, prioritas pembangunan ini diarahkan untuk mengintegrasikan seluruh upaya pembangunan pendidikan dan

kesehatan yang mampu menjawab tantangan zaman. Pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada kuantitas, tetapi juga kualitas dan relevansi terhadap dunia kerja, serta kesehatan yang tidak hanya kuratif tetapi juga promotif dan preventif.

Sehingga pelaksanaan prioritas Pembangunan pertama ini tidak hanya ditujukan untuk mengejar target angka statistik pembangunan manusia, tetapi lebih dari itu, diarahkan pada pembangunan karakter, kecerdasan, kesehatan mental dan fisik masyarakat Sumatera Barat agar menjadi manusia yang tangguh, adaptif, dan mampu berkontribusi dalam dunia yang terus berubah. Pendidikan dan kesehatan menjadi dua kunci utama dalam membuka masa depan masyarakat yang lebih cerah, dan pemerintah provinsi berkomitmen untuk melaksanakannya dengan dukungan semua elemen.

Sasaran dan indikator kinerja pada Prioritas Pembangunan 1 : Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas tahun 2027 dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 4- 8 Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas Tahun 2027

TUJUAN/SASARAN PER MISI	INDIKATOR KINERJA	2027	
		Satuan	Target
PRIORITAS 1. PENDIDIKAN MERATA, KESEHATAN BERKUALITAS			
Tujuan : Terwujudnya kualitas pembangunan manusia yang berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	78,04
	Indeks Modal Manusia	Indeks	0,61
Sasaran 1 Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan untuk mendukung daya saing sumber daya manusia	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	Tahun	9,69
	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,58
	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	Persen	13,72
Sasaran 2 Meningkatnya kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat untuk mendukung produktivitas	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	Tahun	74,82
	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	Per 100.000 kelahiran hidup	98
	Prevalensi *Stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	Persen	18,00

Sumber : RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan tersebut pada Tahun 2027 difokuskan pada :

1. Peningkatan Akses Pendidikan Menengah dan Khusus melalui peningkatan sarana dan prasarana sekolah seperti pembangunan ruang kelas baru (RKB) terutama di wilayah dengan angka partisipasi sekolah yang sangat tinggi, serta memperluas akses pendidikan inklusif untuk anak berkebutuhan khusus.
2. Peningkatan Mutu Guru dan Tenaga Kependidikan SMA/SMK melalui pelatihan berjenjang, sertifikasi, serta program penguatan kompetensi digital dan pedagogik, guru SMA/SMK di bawah kewenangan provinsi akan didukung agar mampu menciptakan pembelajaran yang bermutu.
3. Revitalisasi SMK berbasis Kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) yang dilakukan melalui penyelarasan kurikulum SMK dengan kebutuhan industri lokal dan nasional, termasuk peningkatan kemitraan industri dan program magang siswa.
4. Peningkatan Layanan Pendidikan Kejar Paket dan Kesetaraan yang bertujuan untuk mengurangi disparitas pendidikan, melalui perluasan layanan pendidikan non-formal bagi masyarakat usia produktif yang tidak menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah.
5. Perluasan Layanan Kesehatan Rujukan Provinsi, yang diperkuat melalui pembangunan, peningkatan fasilitas, dan SDM RSUD provinsi agar mampu menangani kasus rujukan spesialistik seperti jantung, kanker, dan penyakit tidak menular lainnya.
6. Penguatan Program Kesehatan Ibu, Anak dan Remaja, yang difokus pada peningkatan cakupan imunisasi, layanan antenatal dan postnatal, serta edukasi gizi remaja dan ibu hamil sebagai bagian dari strategi penurunan angka stunting dan kematian ibu.
7. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA, dengan menyediakan layanan kesehatan jiwa di rumah sakit daerah provinsi dan memperkuat peran Puskesmas dalam penanganan awal gangguan jiwa dan kecanduan narkotika/psikotropika.
8. Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Pendidikan dan Kesehatan melalui pengembangan sistem manajemen pembelajaran daring untuk SMA/SMK, serta mengintegrasikan sistem informasi kesehatan berbasis digital untuk meningkatkan efisiensi pelayanan di fasyankes provinsi.

Prioritas Pembangunan 2 : Lumbung Pangan Nasional dan Ekonomi Berkelanjutan

Provinsi Sumatera Barat memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, terutama di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan. Wilayah ini dikenal dengan produk pertanian unggulan seperti beras, jagung, hortikultura, kopi,

gambir, ternak sapi, hingga perikanan air tawar yang menyebar di berbagai nagari. Selain menjadi penggerak utama ekonomi rakyat, sektor-sektor ini memiliki potensi besar untuk memperkuat ketahanan pangan nasional serta menjadi fondasi ekonomi daerah yang berkelanjutan.

Namun demikian, kontribusi sektor-sektor primer tersebut terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumatera Barat masih belum optimal. Masih tingginya ketergantungan petani pada sistem tradisional, rendahnya pemanfaatan teknologi dan digitalisasi pertanian, belum kuatnya sistem rantai pasok dan logistik pangan, serta minimnya industrialisasi produk pertanian menyebabkan nilai tambah produk daerah belum maksimal. Di sisi lain, eksploitasi sumber daya alam yang kurang terkendali dan belum terintegrasi dengan prinsip-prinsip keberlanjutan telah menimbulkan tekanan terhadap daya dukung lingkungan dan mengancam ketahanan ekosistem jangka panjang.

Prioritas pembangunan ini diarahkan untuk menjadikan Sumatera Barat sebagai lumbung pangan nasional berbasis kawasan, yang produktif dan berkelanjutan. Pembangunan pertanian akan dilakukan secara transformasional, dengan penguatan teknologi, inovasi, hilirisasi produk, dan keterhubungan ke pasar, tanpa mengabaikan aspek keberlanjutan lingkungan dan ekonomi hijau. Tujuan akhirnya adalah menciptakan ekonomi daerah yang tumbuh stabil, berkeadilan, dan mampu mengangkat kesejahteraan petani, nelayan, pekebun, serta masyarakat adat yang menggantungkan hidup dari sumber daya alam.

Pelaksanaan prioritas Pembangunan 2, akan menjadi tulang punggung ekonomi rakyat dan ketahanan pangan Sumatera Barat dalam jangka panjang. Kebijakan yang berpihak pada petani, nelayan, dan pelaku usaha lokal dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan akan menjadi fondasi utama pertumbuhan ekonomi yang adil, inklusif, dan tahan terhadap perubahan global. Prioritas ini akan dilaksanakan secara kolaboratif dan berbasis data, dengan mengedepankan partisipasi aktif masyarakat dan kemitraan strategis antarlevel pemerintahan

Sasaran dan indikator kinerja pada Prioritas Pembangunan Lumbung Pangan Nasional Dan Ekonomi Berkelanjutan tahun 2027 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4- 9 Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Lumbung Pangan Nasional dan Ekonomi Berkelanjutan Tahun 2027

TUJUAN/SASARAN PER MISI	INDIKATOR KINERJA	2027	
		Satuan	Target
MISI 2. LUMBUNG PANGAN NASIONAL DAN EKONOMI BERKELANJUTAN			
Tujuan : Terwujudnya ketahanan	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Persen	6,90
	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	79,44

TUJUAN/SASARAN PER MISI	INDIKATOR KINERJA	2027	
		Satuan	Target
pangan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan			
Sasaran 1 Meningkatnya produktivitas dan cadangan pangan yang berkualitas dan berdaya saing serta keberlanjutan dengan transformasi sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan dan peternakan	Produktivitas PDRB lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan (Rp)	Rp.	86.365.206
	Prevalansi ketidakcukupan konsumsi pangan *(Prevalence of Undernourishment)* (%)	Persen	5,99
Sasaran 2 Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan	Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI) (Indeks)	Indeks	29,68
	Indeks Ekonomi Hijau Daerah (Indeks)	Indeks	70,33
	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	Persen	57,10

Sumber : Rancangan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan tersebut pada Tahun 2027 difokuskan pada :

1. Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan Berbasis Komoditas Unggulan Daerah, melalui pembentukan dan penguatan kawasan sentra produksi padi, jagung, hortikultura, sapi potong, dan perikanan air tawar di daerah potensial. Pendekatan kawasan ini bertujuan untuk efisiensi investasi infrastruktur, penguatan kelembagaan petani, serta kemudahan akses pembiayaan dan pemasaran.
2. Modernisasi Pertanian melalui Mekanisasi, Digitalisasi, dan Pertanian Presisi yakni Transformasi sistem produksi pertanian dilakukan melalui bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), penerapan teknologi irigasi tetes dan hidroponik, serta penggunaan sensor dan drone dalam sistem pertanian presisi. Selain itu juga didorong dengan pemanfaatan platform digital untuk pencatatan panen, akses pupuk, dan penjualan produk.
3. Hilirisasi dan Industrialisasi Produk Pangan dan Pertanian Lokal. Arah kebijakan ini mendukung pembangunan agroindustri kecil dan menengah di sentra produksi dengan mendorong kerja sama antara petani, koperasi, dan pelaku industri pengolahan. Produk seperti beras organik kemasan, kopi siap seduh, rendang kaleng, dan olahan ikan akan menjadi fokus utama.
4. Penguatan Rantai Pasok dan Sistem Logistik Pangan Terintegrasi, yang dimulai dengan membangun sistem logistik pangan berbasis kawasan, termasuk cold storage, pasar induk serta digitalisasi sistem distribusi antar kabupaten/kota yang bertujuan untuk menekan fluktuasi harga dan mengurangi food loss.

5. Perlindungan dan Peningkatan Kesejahteraan Petani, Nelayan, dan Peternak melalui pemberian asuransi usaha tani dan nelayan, fasilitasi akses pembiayaan melalui KUR dan koperasi, serta pelatihan berkelanjutan yang akan difokuskan pada kelompok rentan, seperti petani gurem dan peternak kecil.
6. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Ekosistem Secara Berkelanjutan melalui perkuatan program rehabilitasi hutan dan lahan kritis, perlindungan keanekaragaman hayati, serta pelibatan masyarakat dalam konservasi kawasan lindung. Ini dilakukan sejalan dengan penilaian Indeks Ekonomi Hijau dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah (IKH).
7. Peningkatan Kontribusi Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam Sistem Energi Provinsi, dengan mendorong pembangunan pembangkit mikrohidro, biogas skala rumah tangga, dan pemanfaatan panel surya di fasilitas publik serta kawasan produksi pangan yang juga merupakan bagian dari kebijakan bauran energi dan mitigasi perubahan iklim.
8. Penguatan Sistem Peringatan Dini dan Ketahanan terhadap Krisis Pangan dan Iklim melalui penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi risiko perubahan iklim dan krisis pangan dilakukan melalui sistem peringatan dini kekeringan, gagal panen, serta sistem pemantauan stok dan harga pangan secara digital.

Prioritas Pembangunan 3 : Nagari/Desa Sebagai Basis Kemajuan

Sumatera Barat memiliki struktur sosial dan kultural yang unik melalui keberadaan nagari sebagai entitas pemerintahan dan kehidupan masyarakat yang berakar kuat dalam adat dan tradisi. Nagari tidak hanya menjadi satuan administratif terkecil, tetapi juga pusat kehidupan sosial, budaya, ekonomi, serta pendidikan informal masyarakat Minangkabau. Dalam konteks pembangunan daerah, nagari/desa memiliki posisi strategis sebagai basis produksi, penyedia sumber daya, dan pelestari nilai-nilai lokal yang mendukung pembangunan kota sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan layanan publik.

Namun, kenyataannya, banyak nagari/desa masih menghadapi tantangan serius seperti rendahnya akses terhadap infrastruktur dasar, minimnya produktivitas ekonomi lokal, keterbatasan kapasitas kelembagaan, serta tingginya angka kemiskinan dan pengangguran terbuka. Ketimpangan pembangunan antara kota dan desa memperlebar jurang sosial-ekonomi yang berdampak pada migrasi penduduk usia produktif ke kota, melemahkan kekuatan produksi di perdesaan.

Oleh karena itu, pembangunan nagari/desa tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan administratif atau sektoral, tetapi harus

bersifat integratif, partisipatif, dan berbasis pada potensi lokal. Nagari/desa harus difasilitasi menjadi "basis kemajuan", yakni sebagai wilayah yang mandiri secara ekonomi, kuat dalam kelembagaan, berdaya saing melalui pengelolaan potensi lokal, serta berdaya dalam membangun warganya.

Prioritas pembangunan ini bertujuan menciptakan hubungan sinergis antara kota dan desa/nagari/kota sebagai pusat pertumbuhan yang berorientasi pada jasa, perdagangan, dan teknologi, sedangkan nagari sebagai basis produksi pangan, budaya, dan inovasi lokal. Pembangunan desa tidak lagi diposisikan sebagai pelengkap pembangunan kota, tetapi sebagai kekuatan utama yang menopang ekonomi daerah secara merata dan berkelanjutan.

Sehingga Pembangunan nagari/desa bukan semata-mata tentang mengejar status administratif "desa maju" atau "desa mandiri", tetapi bagaimana menjadikan desa sebagai pusat kehidupan masyarakat yang sejahtera, berdaya, produktif, dan lestari. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memandang bahwa kebangkitan desa adalah syarat utama untuk menciptakan Sumatera Barat yang berkeadilan dan berkemajuan, di mana kekuatan adat, budaya, dan potensi lokal dipadukan dengan inovasi dan teknologi modern untuk membangun masa depan.

Sasaran dan indikator kinerja pada Prioritas Nagari/Desa Sebagai Basis Kemajuan pada tahun 2027 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4- 10 Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Nagari/Desa Sebagai Basis Kemajuan Tahun 2027

TUJUAN/SASARAN PER MISI	INDIKATOR KINERJA	2027	
		Satuan	Target
MISI 3. NAGARI/DESA SEBAGAI BASIS KEMAJUAN			
Tujuan : Nagari/Desa Sebagai Basis Kemajuan Yang Mandiri Dan Berdaya Saing Untuk Mendukung Kota Sebagai Pusat Pertumbuhan	Tingkat Pengangguran Tebuka (%)	Persen	5,23
	Proporsi kontribusi PDRB Kota terhadap Provinsi (%)	Persen	39,54
	Persentase rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten (%)	Persen	6.87
	Indeks Desa (Indeks)	Indeks	8,97
Sasaran 1 Meningkatnya kemandirian desa/nagari berbasis potensi lokal	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (% PDRB)	Persen	1,33
	Tingkat Pengangguran Perdesaan (%)	Persen	4,42
	Tingkat Kemiskinan Perdesaan (%)	Persen	5.49
Sasaran 2 Meningkatnya kualitas infrastruktur dan layanan	Rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	Persen	68,59

TUJUAN/SASARAN PER MISI	INDIKATOR KINERJA	2027	
		Satuan	Target
dasar untuk mendukung kesejahteraan masyarakat desa/nagari/kelurahan	Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman (%)	Persen	12,50
	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	Persen	47,12
	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	Persen	47,50
	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	Persen	28,59

Sumber : RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan tersebut pada Tahun 2027 difokuskan pada :

1. Pengembangan Ekonomi Nagari/Desa Berbasis Potensi Lokal melalui mendorong setiap nagari/desa untuk mengembangkan produk unggulan lokal berbasis pertanian, perikanan, peternakan, kerajinan tangan, maupun kuliner tradisional. Dukungan dari Pemerintah provinsi yakni memfasilitasi pendampingan teknis, legalitas usaha, pelabelan, sertifikasi halal, dan akses pasar melalui digitalisasi.
2. Pembangunan dan Penguatan Nagari/Desa Creative Hub. Creative Hub akan dikembangkan di nagari sebagai pusat pelatihan keterampilan, digitalisasi, kewirausahaan muda, dan pengembangan produk ekonomi kreatif. Fasilitas ini akan menjadi pusat inovasi dan tempat berjejaring pelaku UMKM lokal dan komunitas kreatif.
3. Peningkatan Akses Infrastruktur Dasar yang Merata dan Berkelanjutan, yang akan fokus pada pembangunan jalan provinsi yang menghubungkan pusat produksi dengan pasar, akses air bersih, listrik desa, sanitasi, serta pengelolaan sampah berbasis nagari. Infrastruktur ini menjadi kunci penggerak produktivitas dan kesejahteraan masyarakat desa.
4. Penguatan Kapasitas dan Tata Kelola Pemerintahan Nagari/Desa melalui program pelatihan manajemen pembangunan desa/nagari berbasis data, transparansi keuangan, dan pengelolaan program partisipatif. Pemprov akan memperkuat peran lembaga Bamus, KAN, dan Lembaga Kemasyarakatan Nagari dalam mendukung demokrasi lokal.
5. Pengembangan BUMNag dan Inkubasi Bisnis Desa, dengan cara memfasilitasi pengembangan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) agar mampu mengelola unit usaha secara profesional, termasuk dukungan sistem informasi keuangan, integrasi dengan e-commerce, dan kemitraan dengan sektor swasta.

6. Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran Terbuka di Desa/Nagari, yang dilakukan dengan Program padat karya produktif, pelatihan keterampilan kerja, dan fasilitasi kewirausahaan pemuda desa akan diperluas. Pemerintah provinsi juga akan mendorong pemanfaatan Dana Transfer Umum (DTU) untuk program pemberdayaan ekonomi kelompok rentan di desa.
7. Digitalisasi Nagari/Desa dan Sistem Informasi Terintegrasim, demgan mendorong nagari untuk memiliki sistem informasi digital berbasis data penduduk, potensi wilayah, serta layanan berbasis elektronik. Ini juga mendukung program open data nagari untuk perencanaan pembangunan partisipatif dan transparan.
8. Penguatan Sinergi Kota-Desa melalui Skema Pembangunan Terintegrasi Wilayah, dengan upaya yang akkan dilakukan yakni menyusun masterplan pengembangan kawasan agropolitan dan minapolitan berbasis keterhubungan kota–nagari. Pendekatan ini mendukung integrasi produksi, distribusi, dan pasar dalam satu ekosistem ekonomi wilayah.

Prioritas Pembangunan 4 : Sumatera Barat Pusat Perdagangan dan Bisnis Sumatera Bagian Barat

Sumatera Barat memiliki posisi strategis sebagai salah satu provinsi yang terletak di jalur pesisir barat Pulau Sumatera, dengan akses langsung ke Samudra Hindia. Wilayah ini didukung oleh kekayaan sumber daya alam, budaya yang khas, dan infrastruktur yang mulai terbangun seperti pelabuhan, jalan nasional, dan kawasan industri.

Namun demikian, potensi ini belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat dalam beberapa tahun terakhir masih tertumpu pada sektor konsumsi dan pertanian, sementara kontribusi sektor industri pengolahan dan perdagangan masih tergolong rendah. Terbatasnya kawasan industri yang terintegrasi, rendahnya investasi swasta, minimnya inovasi industri berbasis teknologi, serta keterbatasan akses UMKM ke pasar ekspor dan digital menjadi tantangan utama dalam membangun ekonomi daerah yang kuat. Misi pembangunan ini diarahkan untuk mengubah struktur ekonomi Sumatera Barat menjadi lebih produktif, berorientasi ekspor, berbasis inovasi, dan mampu menyerap tenaga kerja yang lebih besar.

Dengan menjadikan Sumatera Barat sebagai pusat perdagangan dan bisnis Sumatera bagian barat, diharapkan peran daerah ini dalam rantai pasok nasional dan regional semakin menguat, sehingga membuka peluang kesejahteraan yang merata bagi masyarakat. Sehingga Pembangunan ekonomi yang kuat dan tahan krisis hanya dapat dicapai jika Sumatera Barat mampu mengelola sumber daya lokalnya menjadi kekuatan industri dan perdagangan yang terintegrasi dan berbasis inovasi. Transformasi ekonomi daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis nilai tambah lokal menjadi prioritas

utama. Pemerintah provinsi akan memainkan peran sebagai regulator, fasilitator, sekaligus akselerator ekosistem perdagangan dan bisnis yang sehat, kompetitif, dan adil bagi semua lapisan masyarakat

Sasaran dan indikator kinerja pada Prioritas Sumatera Barat Pusat Perdagangan Dan Bisnis Sumatera Bagian Barat pada tahun 2027 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4- 11 Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Sumatera Barat Pusat Perdagangan dan Bisnis Sumatera Bagian Barat Tahun 2027

TUJUAN/SASARAN PER MISI	INDIKATOR KINERJA	2027	
		Satuan	Target
MISI 4. SUMATERA BARAT PUSAT PERDAGANGAN DAN BISNIS SUMATERA BAGIAN BARAT			
Tujuan Terwujudnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan melalui penguatan perdagangan, investasi, industri, dan inovasi	Indeks Daya Saing Daerah (Indeks)	Indeks	3,72
	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	Persen	30,52
	Tingkat Inflasi (%)	Persen	2,10 - 3,52
Sasaran 1 Meningkatkan investasi, perdagangan, dan daya saing industri daerah	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%PDRB)	Persen	7,98-7,92
	Total Dana Pihak Ketiga / PDRB (%)	Persen	17,99
	Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	Persen	0,99
	Nilai Transaksi Saham Per Kapita (Rupiah)	Rp.	3.477.413
	Total Kredit/PDRB (%)	Persen	26.78
	Konsumsi listrik per kapita (kWh)	kWh	769.71
	Intensitas energi primer (SBM/Rp Miliar)	SBM/Rp Miliar	134.82
Sasaran 2 Memperkuat ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif dan berkualitas	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	Persen	77,26
	Persentase Penyandang Disabilitas yang Bekerja di Sektor Formal (%)	Persen	18,00
	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	Persen	41,05
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	Persen	60,02-61,87
Sasaran 3	Inklusi Keuangan (%)	Persen	88.49

TUJUAN/SASARAN PER MISI	INDIKATOR KINERJA	2027	
		Satuan	Target
Mendorong pertumbuhan usaha kecil dan industri kecil-menengah sebagai pilar ekonomi daerah	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (%)	Persen	2,72

Sumber : RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan tersebut pada Tahun 2027 difokuskan pada:

1. Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri, dan Zona Logistik Terpadu, dengan mendorong percepatan pembangunan dan pengoperasian kawasan industri seperti Kawasan Industri Padang (KIP) dan inisiasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) berbasis maritim, halal, atau agroindustri di wilayah strategis seperti Pasaman Barat atau Pesisir Selatan. Kawasan ini akan didesain terintegrasi dengan pelabuhan, pusat logistik, dan infrastruktur penunjang investasi.
2. Peningkatan Daya Saing Investasi dan Reformasi Iklim Usaha Daerah, dengan mempercepat digitalisasi layanan perizinan investasi melalui OSS-RBA, penyusunan peta potensi investasi daerah, pemberian insentif fiskal/nonfiskal, serta penyederhanaan regulasi daerah yang menghambat masuknya investasi. Promosi investasi akan diperkuat dalam forum nasional dan internasional.
3. Revitalisasi Industri Pengolahan Lokal Berbasis SDA dan Budaya Lokal, dengan mengembangkan industri bernilai tambah dari komoditas unggulan seperti rendang, kopi, gambir, pisang, rotan, dan kerajinan berbasis budaya Minangkabau. Revitalisasi ini termasuk peningkatan mutu produksi, sertifikasi halal, desain kemasan, dan penguatan brand lokal untuk menembus pasar global.
4. Penguatan Ekosistem UMKM, Wirausaha Baru, dan Digitalisasi Ekonomi, dengan cara UMKM akan difasilitasi melalui pelatihan keterampilan bisnis, integrasi ke dalam e-commerce nasional dan global, fasilitasi permodalan berbasis KUR dan fintech, serta pendampingan hukum usaha. Program wirausaha muda berbasis teknologi dan inovasi akan ditumbuhkan di kalangan generasi milenial dan pelajar.
5. Pengembangan Pusat Distribusi Regional, dan Sistem Logistik Daerah dengan melakukan pengembangan pusat distribusi logistik akan dikembangkan di titik-titik strategis untuk menjamin efisiensi distribusi barang antar kabupaten/kota. Sistem logistik akan ditopang dengan digitalisasi sistem informasi stok dan harga.
6. Penguatan Ketenagakerjaan Berbasis Kompetensi dan Link-and-Match Industri, melalui Pelatihan vokasi dan sertifikasi kerja akan diperluas melalui BLK provinsi dan

kerja sama dengan dunia industri. Pusat Pelatihan dan Sertifikasi Profesi (PPSP) akan disiapkan di kawasan industri agar tersedia tenaga kerja kompeten yang siap diserap oleh dunia usaha dan industri.

7. Akselerasi Pengembangan Ekonomi Inovatif dan Industri Berbasis Teknologi, dengan mendirikan Inkubator Bisnis Daerah (IBD) dan memperkuat kerja sama dengan perguruan tinggi dan pelaku industri dalam riset terapan. Skema insentif untuk start-up teknologi, ekonomi kreatif digital, dan industri 4.0 akan didorong melalui hibah riset dan kemitraan swasta.
8. Penguatan Branding dan Diplomasi Ekonomi Provinsi di Level Nasional dan Internasional, dengan membangun citra sebagai provinsi "Rendang Valley" atau “Minang Halal Hub” di kancah nasional dan internasional melalui promosi produk unggulan di event perdagangan nasional, diplomasi ekonomi dengan negara sahabat, dan sinergi diaspora Minangkabau di luar negeri.

Prioritas Pembangunan 5 : Membangun Infrastruktur Berkeadilan dan Siap Tanggap Bencana

Pembangunan infrastruktur adalah tulang punggung kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur yang memadai dan berkeadilan memastikan bahwa semua wilayah, baik kota maupun nagari terpencil, memiliki akses terhadap layanan dasar, peluang ekonomi, dan jaminan keselamatan dari ancaman bencana.

Bagi Sumatera Barat, yang memiliki kontur geografis kompleks dan rawan terhadap berbagai bencana geologi (gempa bumi, tsunami, longsor) serta hidrometeorologi (banjir, kekeringan), pembangunan infrastruktur tidak hanya tentang “pembangunan fisik,” tetapi juga tentang daya tahan dan keberlanjutan.

Masih banyak wilayah di Sumatera Barat yang belum terlayani secara optimal oleh infrastruktur dasar. Jalan provinsi di beberapa daerah masih rusak atau belum terhubung dengan baik, ketersediaan air bersih belum merata, serta pengelolaan sanitasi dan persampahan belum efisien. Di sisi lain, pesatnya pertumbuhan pariwisata dan industri kreatif belum diiringi oleh infrastruktur pendukung yang memadai, seperti jalan ke objek wisata, fasilitas umum, dan konektivitas digital. Rendahnya mitigasi risiko bencana juga memperparah kerentanan masyarakat terhadap perubahan iklim dan peristiwa ekstrem.

Dengan demikian, pembangunan infrastruktur lima tahun ke depan diarahkan tidak hanya untuk membangun konektivitas fisik, tetapi juga memastikan keberlanjutan, ketangguhan terhadap bencana, efisiensi energi, serta kemampuan adaptasi terhadap perubahan iklim. Prinsip “*no one left behind*” menjadi landasan dalam membangun infrastruktur yang inklusif dan adil.

Pembangunan infrastruktur tidak lagi dipandang semata dari aspek konektivitas fisik, tetapi juga sebagai alat transformasi sosial, ekonomi, dan ekologis. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

berkomitmen membangun infrastruktur yang berkeadilan, yang menjangkau daerah tertinggal, tangguh bencana, dengan sistem mitigasi dan peringatan dini, serta berkelanjutan, dengan energi terbarukan dan ramah lingkungan. Dengan prioritas ini, infrastruktur menjadi fondasi menuju Sumatera Barat yang maju, aman, inklusif, dan berdaya saing global.

Adapun sasaran dan indikator kinerja pada Prioritas Membangun Infrastruktur Berkeadilan Dan Siap Tanggap Bencana Tahun 2027 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4- 12 Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Membangun Infrastruktur Berkeadilan dan Siap Tanggap Bencana Tahun 2027

TUJUAN/SASARAN PER MISI	INDIKATOR KINERJA	2027	
		Satuan	Target
MISI 5. MEMBANGUN INFRASTRUKTUR BERKEADILAN DAN SIAP TANGGAP BENCANA			
Tujuan Terwujudnya infrastruktur yang inklusif, tangguh bencana, dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pariwisata, kesejahteraan masyarakat dan mitigasi bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks)	Indeks	78.37
	Indeks Kinerja Infrastruktur (Indeks)	Indeks	47,27
Sasaran 1 Meningkatnya Resiliensi Daerah Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Indeks Risiko Bencana (IRB) (Indeks)	Indeks	138,71
	Persentase Penurunan Emisi GRK (%) (kumulatif)	Persen	19,76
	Persentase Penurunan Emisi GRK (%) (tahunan)	Persen	31,97
Sasaran 2 Terwujudnya pengelolaan sumber daya air yang produktif dan berkelanjutan	Kapasitas Air Baku (m^3/detik)	m^3/detik	1.77
	IKSI (Indeks Kinerja Sistem Irigasi)	Indeks	70,83
Sasaran 3 Memperkuat konektivitas dan aksesibilitas wilayah, kawasan pariwisata, serta pemanfaatan teknologi dalam pembangunan infrastruktur	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks	6,45
	Rata-rata Waktu Tempuh pada Lintas Utama Jalan Provinsi	Rata-rata	2,75

Sumber : RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan tersebut pada Tahun 2027 difokuskan pada :

1. Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan Provinsi Berbasis Konektivitas Ekonomi dan Pariwisata. Pemerintah provinsi akan

memprioritaskan pembangunan dan perbaikan jalan yang menghubungkan pusat-pusat produksi dengan pasar, serta membuka akses ke kawasan wisata unggulan. Aksesibilitas ini akan mendorong distribusi barang, jasa, dan wisatawan secara lebih efisien.

2. Penguatan Sistem Drainase, Irigasi, dan Infrastruktur Pengendalian Banjir, dengan cara membangun dan memperbaiki saluran irigasi teknis untuk mendukung ketahanan pangan, serta memperkuat tanggul dan saluran drainase di daerah rawan banjir seperti Padang, Solok Selatan, dan Pesisir Selatan. Pendekatan berbasis DAS (daerah aliran sungai) akan diterapkan untuk manajemen risiko banjir terpadu.
3. Pengembangan Infrastruktur Air Bersih dan Sanitasi Aman di Kawasan Tertinggal dan Rentan, melalui pemenuhan hak atas air bersih dan sanitasi layak menjadi prioritas, terutama di nagari-nagari dengan angka kemiskinan tinggi. Pemerintah provinsi akan bekerja sama dengan kabupaten/kota dan BUMD untuk membangun instalasi pengolahan air, pipa distribusi, dan fasilitas sanitasi ramah lingkungan.
4. Digitalisasi Infrastruktur dan Pemerataan Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), dengan memperluas cakupan jaringan internet, terutama di daerah tertinggal dan sekolah-sekolah, untuk mendukung pendidikan digital dan ekonomi berbasis teknologi. Penguatan infrastruktur TIK juga akan mendukung sistem peringatan dini bencana dan manajemen data pembangunan.
5. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Pariwisata yang Ramah Lingkungan, dengan membangun fasilitas dasar wisata seperti jalan akses, toilet umum, jalur pejalan kaki, papan informasi, dan pengelolaan sampah akan dibangun atau diperbaiki di lokasi wisata prioritas. Infrastruktur ini dirancang berprinsip green infrastructure dan mendukung pelestarian lanskap budaya dan alam.
6. Pembangunan Infrastruktur Mitigasi Bencana dan Sistem Peringatan Dini Multibencana dengan memperkuat bangunan evakuasi tsunami, jalur evakuasi, serta membangun dan memperluas sistem peringatan dini (early warning system) berbasis komunitas. Kerja sama dengan BMKG, BNPB, dan pemerintah kabupaten/kota akan diprioritaskan dalam wilayah rawan gempa dan longsor.
7. Pengelolaan Energi Berkelanjutan dan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT), dengan mengembangkan PLTMH (mikrohidro), PLTS (tenaga surya) di sekolah dan kantor pemerintah, serta sistem biogas rumah tangga. Program ini mendukung bauran energi yang rendah karbon serta mengurangi ketergantungan pada energi fosil.
8. Pengembangan Infrastruktur Lingkungan antara lainn Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau (RTH), dengan memperluas pembangunan fasilitas pengolahan sampah terpadu, TPA dengan teknologi ramah lingkungan, serta memperluas RTH di kawasan perkotaan untuk mengurangi efek

urban heat island dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Prioritas Pembangunan 6 : Membangun Kehidupan Beradat dan Berbudaya Berbasiskan Agama, Kearifan Lokal Melalui Dukungan Keluarga yang Berkualitas

Sumatera Barat adalah salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki kekuatan identitas budaya dan religius yang sangat kuat. Nilai-nilai adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah (ABS-SBK) menjadi falsafah hidup masyarakat Minangkabau yang telah teruji menjaga harmoni sosial, tata kehidupan bermasyarakat, serta struktur keluarga yang tangguh dan inklusif. Nilai ini pula yang menjadi keunikan sekaligus kekuatan sosial dalam pembangunan daerah.

Namun, dalam dua dekade terakhir, arus globalisasi, digitalisasi, dan pergeseran nilai di tengah masyarakat telah menghadirkan tantangan baru. Mulai dari lunturnya tradisi dan budaya lokal di generasi muda, meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan, hingga melemahnya fungsi keluarga dalam pendidikan karakter dan ketahanan sosial. Selain itu, eksklusivisme beragama, polarisasi sosial, serta meningkatnya intoleransi menjadi sinyal penting perlunya penguatan kembali pondasi nilai-nilai budaya dan keagamaan dalam sistem sosial masyarakat.

Oleh karena itu, prioritas pembangunan ini diarahkan untuk menghidupkan kembali kekuatan budaya, agama, dan kearifan lokal sebagai penyangga utama harmoni masyarakat, serta memperkuat peran keluarga sebagai unit terkecil pembangunan sosial. Sumatera Barat tidak hanya berupaya membangun fisik, tetapi juga karakter, spiritualitas, dan harmoni sosial warganya.

Pembangunan Sumatera Barat tidak hanya tentang infrastruktur dan ekonomi, tetapi juga tentang jiwa masyarakatnya. Dengan memperkuat kehidupan beradat dan berbudaya, serta menempatkan keluarga sebagai pilar sosial yang utama, Provinsi Sumatera Barat menegaskan bahwa pembangunan yang sejati adalah yang mencerdaskan, memuliakan, dan menyejahterakan masyarakat secara utuh, lahir dan batin. Melalui komitmen bersama dan kolaborasi antar elemen masyarakat, kita akan membangun Sumatera Barat yang harmonis, religius, dan penuh martabat budaya.

Sasaran dan indikator kinerja pada Prioritas Membangun Kehidupan Beradat Dan Berbudaya Berbasiskan Agama, Kearifan Lokal Melalui Dukungan Keluarga Yang Berkualitas pada tahun 2027 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4- 13 Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Membangun Kehidupan Beradat dan Berbudaya Berbasiskan Agama, Kearifan Lokal Melalui Dukungan Keluarga yang Berkualitas Tahun 2027

TUJUAN/SASARAN PER MISI	INDIKATOR KINERJA	2027	
		Satuan	Target
MISI 6. MEMBANGUN KEHIDUPAN BERADAT DAN BERBUDAYA BERBASISKAN AGAMA, KEARIFAN LOKAL MELALUI DUKUNGAN KELUARGA YANG BERKUALITAS			
Tujuan : Terwujudnya masyarakat beradat dan berbudaya yang harmonis, religius, serta berbasis keluarga berkualitas	Indeks Demokrasi Indonesia (Indeks)	Indeks	81,10-81,97
	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Indeks	73,62
Sasaran 1 Memperkuat nilai adat, budaya, dan kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Indeks	61.71 - 61.84
Sasaran 2 Meningkatnya perlindungan hak asasi manusia dan kesetaraan	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Indeks	71,73 - 72,02
	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,339
	Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM (%)	Persen	74,66
Sasaran 3 Terwujudnya lingkungan sosial yang aman dan harmonis berbasis keluarga berkualitas	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	Persen	71,25
	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	62,58
	Persentase penanganan pelanggaran Perda yang diselesaikan	Persen	94,60
	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan (Indeks)	Indeks	3,068

Sumber : RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan tersebut pada Tahun 2027 :

1. Pelestarian dan Revitalisasi Nilai-Nilai Adat, Tradisi, dan Warisan Budaya Lokal, dengan akan memperkuat peran Lembaga Adat Nagari (KAN), Mamak Kepala Waris, dan lembaga pendidikan adat dalam menanamkan nilai-nilai budaya lokal di masyarakat, termasuk melalui festival budaya, revitalisasi rumah gadang, dukungan terhadap seniman tradisional, serta integrasi pendidikan adat dalam kurikulum lokal.
2. Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Agama dan Kearifan Lokal, dengan mendorong pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah menengah yang berlandaskan nilai ABS-SBK, serta menyusun modul pendidikan multikultural berbasis agama, adat, dan kemajemukan untuk membentuk siswa yang toleran, peduli sosial, dan taat nilai.

3. Revitalisasi Fungsi Masjid dan Surau sebagai Pusat Pembinaan Sosial dan Generasi Muda, dengan Masjid dan surau akan dikuatkan perannya sebagai pusat pendidikan informal, kegiatan keagamaan, konseling keluarga, pelatihan keterampilan remaja, dan penguatan ekonomi umat. Program "Masjid Ramah Anak dan Remaja" serta "Surau Digital" akan menjadi inovasi ke depan.
4. Peningkatan Kualitas dan Ketahanan Keluarga sebagai Pilar Sosial Masyarakat, melalui kerja sama dengan instansi vertikal dan organisasi masyarakat, maka akan menjalankan program "Sekolah Orang Tua," konseling keluarga, layanan perencanaan keluarga berbasis budaya, dan peningkatan indeks ketahanan keluarga melalui kampung keluarga berkualitas (Kampung KB Plus).
5. Perlindungan Hak Asasi Manusia, Kesetaraan Gender, dan Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender dan Anak, dengan memperkuat Unit Layanan Terpadu (ULT) perlindungan perempuan dan anak, menyediakan rumah aman untuk korban kekerasan, membangun sistem pelaporan kekerasan yang mudah diakses, serta memperkuat partisipasi perempuan dalam pengambilan kebijakan pembangunan.
6. Penguatan Toleransi, Moderasi Beragama, dan Kerukunan Sosial, dengan cara Pemerintah daerah akan memperkuat forum kerukunan umat beragama (FKUB), mendorong dialog antar agama dan etnis, serta mendukung pelaksanaan program Moderasi Beragama melalui pelibatan tokoh adat, pemuda lintas iman, dan media sosial.
7. Pengembangan Infrastruktur Budaya dan Kelembagaan Sosial Berbasis Komunitas, dengan melakukan Pembangunan pusat budaya daerah, perpustakaan nagari, ruang ekspresi seniman lokal, dan komunitas literasi adat akan didorong agar tumbuh di setiap kabupaten/kota. Pemerintah provinsi juga akan mendukung digitalisasi naskah kuno, arsip adat, dan peninggalan sejarah Minangkabau.
8. Pengarusutamaan Nilai Budaya dan Agama dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan menyusun setiap dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan provinsi akan diintegrasikan dengan nilai-nilai budaya, norma agama, dan indikator sosial berbasis adat, seperti indeks pembangunan kebudayaan dan indeks ketahanan keluarga sebagai acuan penyusunan program pembangunan.

Prioritas Pembangunan 7 : Tingkatkan Daya Saing Wisata dan Akselerasi Ekonomi Kreatif untuk UMKM

Sumatera Barat memiliki kekayaan destinasi wisata alam, budaya, sejarah, dan kuliner yang luar biasa. Keindahan beberapa destinasi wisata alam di Sumatera Barat seperti Danau Maninjau, kemegahan Lembah Harau, potensi wisata bahari Mandeh, hingga

kekayaan tradisi dan seni Minangkabau menjadikan provinsi ini sebagai salah satu destinasi pariwisata unggulan di Indonesia.

Selain itu, Sumatera Barat juga dikenal dengan kekuatan kulinernya, seperti rendang yang diakui sebagai salah satu makanan terenak di dunia, serta potensi ekonomi kreatif di bidang kriya, musik tradisional, dan fashion berbasis budaya. Namun demikian, potensi tersebut belum sepenuhnya termanfaatkan secara optimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan menciptakan lapangan kerja baru.

Tantangan utama yang dihadapi meliputi keterbatasan infrastruktur dan fasilitas wisata, rendahnya kualitas pelayanan pariwisata, kurangnya promosi digital dan akses pasar, serta keterbatasan kapasitas pelaku UMKM dan ekonomi kreatif untuk naik kelas. Industri kreatif juga masih menghadapi hambatan dalam hal inkubasi bisnis, akses ke teknologi, dan pembiayaan.

Oleh karena itu, pembangunan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif lima tahun ke depan diarahkan untuk menciptakan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Sektor ini akan diintegrasikan dengan pengembangan UMKM, pelestarian budaya lokal, pemberdayaan masyarakat, dan pemanfaatan teknologi digital. Pemerintah provinsi akan menjadi katalisator dalam mendorong transformasi pariwisata dan industri kreatif sebagai pilar ekonomi baru Sumatera Barat.

Pariwisata dan ekonomi kreatif bukan hanya menjadi penggerak ekonomi baru, tetapi juga wahana pelestarian budaya dan penguatan identitas daerah. Sumatera Barat dengan nilai-nilai budaya Minangkabau, keindahan alam, serta semangat kewirausahaan masyarakatnya memiliki semua syarat untuk menjadi destinasi unggulan nasional dan global. Dengan komitmen, kolaborasi, dan inovasi, Sumatera Barat siap menjadikan sektor ini sebagai motor pertumbuhan yang inklusif, berkelanjutan, dan membanggakan

Sasaran dan indikator kinerja pada Prioritas Tingkatkan Daya Saing Pariwisata Dan Akselerasi Ekonomi Kreatif Untuk UMKM pada Tahun 2027 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4- 14 Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Tingkatkan Daya Saing Wisata dan Akselerasi Ekonomi Kreatif untuk UMKM Tahun 2027

TUJUAN/SASARAN PER MISI	INDIKATOR KINERJA	2027	
		Satuan	Target
MISI 7. TINGKATKAN DAYA SAING PARIWISATA DAN AKSELERASI EKONOMI KREATIF UNTUK USAHA KECIL			
Tujuan : Pariwisata yang berdaya saing dan akselerasi ekonomi kreatif untuk pertumbuhan yang berkelanjutan	Rasio PDRD Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (PDRDB Akomodasi Makan Minum dan PDRB Jasa lainnya) (%)	Persen	2,65

TUJUAN/SASARAN PER MISI	INDIKATOR KINERJA	2027	
		Satuan	Target
Sasaran 1 Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap ekonomi daerah	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	Persen	1,46
	Jumlah tamu Wisatawan Mancanegara (Ribu orang)	RIbu orang	47,43
Sasaran 2 Memperkuat peran ekonomi kreatif dalam mendukung pertumbuhan usaha kecil	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Kreatif Nasional (%)	Persen	1,09
	Rasio kewirausaahan Provinsi (%)	Persen	4,17

Sumber : RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan tersebut pada Tahun 2027 difokuskan pada :

1. Pengembangan Destinasi Pariwisata Unggulan Berbasis Kawasan dan Budaya Lokal, dengan difokuskan pada pengembangan kawasan wisata prioritas. Pendekatan pembangunan kawasan meliputi peningkatan infrastruktur akses, penataan kawasan, fasilitas umum ramah wisatawan, serta penguatan narasi budaya lokal dalam pengelolaan destinasi.
2. Penguatan SDM dan Layanan Kepariwisataan Berbasis Kompetensi dan Keramahtamahan, melalui pelatihan terpadu, sertifikasi profesi pemandu wisata, pengelola homestay, dan pelaku jasa wisata lainnya, pemerintah akan meningkatkan kualitas layanan wisata. Program “Hospitality for Nagari Tourism” akan dilaksanakan di desa wisata.
3. Peningkatan Promosi dan Branding Wisata Sumatera Barat di Tingkat Nasional dan Global, dengan strategi promosi akan menggunakan pendekatan digital melalui platform media sosial, website pariwisata terpadu, kolaborasi dengan influencer, serta partisipasi dalam event pariwisata nasional dan internasional. Branding seperti “Minang Heritage Tourism” dan “Rendang Valley” akan diperkuat.
4. Pembangunan Ekosistem UMKM Pendukung Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, melalui UMKM kuliner, kerajinan tangan, fesyen etnik, dan seni pertunjukan akan diberikan pelatihan, fasilitasi pameran, akses pembiayaan, serta integrasi ke dalam paket wisata. Pemerintah provinsi akan bekerja sama dengan marketplace nasional untuk memperluas pemasaran produk UMKM lokal.
5. Akselerasi Pengembangan Desa Wisata dan Kampung Kreatif, dengan setiap kabupaten/kota akan difasilitasi untuk mengembangkan desa wisata berbasis partisipasi masyarakat, dengan dukungan BUMNag Pariwisata, Creative Hub, dan kelembagaan lokal. Kampung kreatif akan menjadi ruang interaksi seni, ekonomi digital, dan pelestarian tradisi.
6. Inovasi dan Digitalisasi Industri Kreatif Lokal, dengan membangun Inkubator Industri Kreatif di kota/kabupaten yang memiliki potensi tinggi di bidang animasi, film,

musik, fotografi, kuliner, dan desain grafis. Pemanfaatan teknologi digital dan platform digital akan menjadi motor akselerasi inovasi pelaku ekonomi kreatif muda.

7. Penyediaan Infrastruktur Pendukung dan Insentif Investasi Pariwisata dan Ekraf, dengan memperbaiki infrastruktur konektivitas menuju destinasi wisata, menyediakan ruang publik kreatif seperti taman budaya dan amphiteater, serta memberikan insentif untuk investasi pariwisata seperti hotel, resort, dan pusat oleh-oleh berbasis budaya.
8. Kolaborasi Multipihak dalam Pengembangan Ekosistem Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dengan memperkuat sinergi dengan pelaku usaha, komunitas seni, lembaga pendidikan, diaspora Minangkabau, serta kementerian/lembaga nasional. Kolaborasi ini mencakup penguatan riset pasar, pengembangan kurikulum ekonomi kreatif, dan pertukaran pelaku seni antar daerah.

Prioritas Pembangunan 8 : Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Pelayanan Publik yang Efektif

Pemerintahan yang bersih, transparan, dan efektif merupakan prasyarat mutlak bagi terwujudnya pembangunan daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan. Di tengah meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap akuntabilitas dan layanan publik yang responsif, reformasi tata kelola pemerintahan bukan lagi sekadar komitmen administratif, melainkan kebutuhan mendesak yang menjadi fondasi dari semua sektor pembangunan. Sumatera Barat memiliki tradisi pemerintahan berbasis nilai-nilai kearifan lokal, yang menjunjung tinggi musyawarah, etika sosial, dan amanah dalam pengelolaan kepentingan bersama.

Namun dalam praktiknya, tantangan seperti keterbatasan integrasi sistem birokrasi, masih adanya celah korupsi, lambatnya pelayanan publik, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital, menjadi penghambat dalam mewujudkan pemerintahan yang modern, responsif, dan terpercaya. Oleh karena itu, prioritas pembangunan ini diarahkan pada transformasi sistem pemerintahan menuju tata kelola yang digital, transparan, dan adaptif, serta peningkatan kualitas layanan publik yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berkomitmen membangun birokrasi yang profesional, pelayanan yang cepat dan mudah, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pengawasan, dan evaluasi kebijakan.

Sasaran dan indikator kinerja pada Prioritas Tata Kelola Pemerintahan Bersih Dan Pelayanan Publik Yang Efektif pada Tahun 2027 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4- 15 Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Pelayanan Publik yang Efektif Tahun 2027

TUJUAN/SASARAN PER MISI	INDIKATOR KINERJA	2027	
		Satuan	Target
MISI 8. TATA KELOLA PEMERINTAHAN BERSIH DAN PELAYANAN PUBLIK YANG EFEKTIF			
Tujuan : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan pelayanan publik yang efektif berbasis digital	Indeks Integritas Nasional (Indeks)	Indeks	74,66
Sasaran 1 Efisiensi dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks)	Indeks	4,01
	Indeks Pemerintahan Digital (Indeks)	Indeks	2,00
	Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	Indeks	87,75
Sasaran 2 Meningkatnya kualitas layanan publik	Indeks Pelayanan Publik (Indeks)	Indeks	4,01
Sasaran 3 Meningktanya Pendapatan Daerah	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	Persen	2,172
	Return on Aset (ROA) BUMD (%)	Persen	1,175

Sumber : RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan tersebut pada Tahun 2027 difokuskan pada :

1. Transformasi Digital Pemerintahan melalui Penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dengan membangun dan menyempurnakan sistem e-government, termasuk portal layanan terpadu, sistem informasi manajemen keuangan, kepegawaian, perencanaan, dan pengawasan. Semua layanan Perangkat Daerah ditargetkan terdigitalisasi dengan interoperabilitas data antar sektor untuk efisiensi dan akuntabilitas.
2. Reformasi Birokrasi Menuju Birokrasi yang Agile, Melayani, dan Antikorupsi, meliputi penyederhanaan struktur organisasi, penguatan kinerja berbasis output dan outcome, peningkatan kapasitas SDM ASN, dan penguatan pengawasan internal. Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) akan diperluas ke seluruh Perangkat Daerah.
3. Penguatan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Digital dan Responsif terhadap Kebutuhan Masyarakat, dengan mengembangkan Public Service Super App yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan publik seperti perizinan, pendidikan, kesehatan, hingga pengaduan secara daring, cepat, dan user-friendly. Standar pelayanan minimum (SPM) di setiap sektor akan dievaluasi dan ditingkatkan.

4. Peningkatan Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan, melalui anggaran, kinerja, dan dokumen publik lainnya disajikan secara terbuka melalui portal transparansi antara lain Dashboard Pembangunan dan Website Sumbar2045. Forum Musrenbang, konsultasi publik, dan kanal aspirasi digital akan diperkuat agar masyarakat ikut mengawasi dan memberikan masukan terhadap program pembangunan daerah.
5. Penguatan Sistem Integritas, Etika Publik, dan Pencegahan Korupsi di Seluruh Level Pemerintahan, dengan memperkuat unit pengendalian gratifikasi, sistem pelaporan harta kekayaan, whistleblower system, dan integrasi pendidikan antikorupsi dalam pelatihan ASN. Kerja sama dengan KPK, Ombudsman, dan BPKP akan ditingkatkan untuk mewujudkan pemerintahan yang bebas dari praktik koruptif.
6. Optimalisasi Pendapatan Daerah melalui Digitalisasi Pajak dan Inovasi Pendapatan, dengan menerapkan sistem digitalisasi terhadap sumber-sumber penerimaan secara terintegrasi. Selain itu, potensi pajak dan retribusi baru dari sektor digital, pariwisata, dan layanan publik akan dieksplorasi sesuai kewenangan provinsi.
7. Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Kinerja dan Evidence-Based Policy, dengan membangun proses perencanaan pembangunan yang lebih mengutamakan data-driven planning, menyelaraskan RPJMD, Renstra OPD, dan RKPD dengan indikator kinerja utama (IKU). Pemanfaatan big data dan dashboard monitoring akan dikembangkan untuk pengambilan keputusan yang cepat dan tepat.
8. Ekstensifikasi Objek dan Subjek Pajak serta Retribusi, dengan memperluas basis pajak melalui mendata dan memverifikasi objek pajak yang belum tergali, seperti kendaraan tidak terdaftar, penggunaan air permukaan oleh sektor swasta, dan kegiatan pariwisata berbasis jasa. Potensi retribusi dari layanan pendidikan, kesehatan, dan pelayanan umum akan diperbaharui melalui Kajian Potensi PAD (KPPAD) tahunan.
9. Penguatan Fungsi BUMD dan Diversifikasi Sumber Pendapatan Non-Pajak, dengan mendorong BUMD untuk meningkatkan kontribusi dividen dengan model bisnis yang efisien dan berbasis pasar.
10. Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah sebagai Sumber Pendapatan. Aset-aset milik daerah yang belum produktif akan diidentifikasi dan ditata ulang untuk disewakan, dikerjasamakan, atau dijadikan objek investasi. Digitalisasi manajemen aset (e-Asset Management) dan sistem tracking pemanfaatan aset akan menjadi alat pengawas utama.
11. Peningkatan Kepatuhan dan Kesadaran Wajib Pajak melalui Edukasi dan Inovasi Pelayanan, dengan cara

Kampanye sadar pajak, layanan Samsat Keliling Digital, pembayaran melalui QRIS, serta penghargaan bagi wajib pajak teladan akan ditingkatkan. Tujuannya adalah meningkatkan tax compliance melalui pendekatan edukatif dan pelayanan yang mudah serta terpercaya.

12. Penerapan Reward and Punishment bagi OPD Pengelola PAD, dengan menetapkan indikator kinerja yang jelas bagi OPD pengelola PAD, dengan skema insentif atas kinerja optimal dan penalti administratif terhadap kelalaian. Monitoring dan evaluasi berbasis data akan dilakukan per triwulan.

4.2.3 Prioritas Pembangunan Kota Padang Tahun 2027

Perencanaan pembangunan daerah Kota Padang Tahun 2027 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Tahun 2025–2029, yang akan dituangkan secara operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Padang Tahun 2027.

Kebijakan pembangunan Kota Padang pada tahun 2027 diarahkan untuk mendukung tema: "Penguatan Pondasi Transformasi Tata Kelola yang Inklusif dan Berkelanjutan". Tema ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kota Padang dalam membangun fondasi yang kokoh bagi transformasi tata kelola pemerintahan yang adaptif, transparan, akuntabel, serta partisipatif, guna mendukung akselerasi pembangunan daerah secara berkelanjutan dan merata. Dalam penjabarannya dirumuskan 8 (delapan) prioritas pembangunan daerah, yaitu :

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif
2. Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat
3. Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan.
4. Kemudahan Berinvestasi Demi Terbukanya Lapangan Pekerjaan
5. Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas.
6. Menguatkan Jaringan Ketahanan Bencana
7. Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa
8. Optimalisasi Potensi Kota untuk Terwujudnya Industri Kreatif dan Pariwisata Berkelanjutan

Prioritas 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif

Prioritas ini bertujuan untuk memperkuat fondasi transformasi birokrasi di Kota Padang melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas menjadi prasyarat dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Pemerintah Kota Padang berkomitmen untuk mendorong birokrasi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, cepat dalam pengambilan keputusan, serta

mampu memberikan pelayanan publik yang adaptif terhadap dinamika perubahan.

Di sisi lain, inovasi tata kelola didorong melalui pemanfaatan teknologi informasi, penyederhanaan proses bisnis, dan penguatan kapasitas aparatur. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan juga terus diperluas, guna mewujudkan pemerintahan yang inklusif dan berbasis aspirasi warga. Dengan demikian, prioritas ini menjadi landasan penting bagi keberhasilan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Sasaran dan Indikator kinerja pada prioritas pembangunan 1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif Tahun 2027 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 4- 16 Sasaran dan Target Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif Tahun 2027

Uraian	Indikator Kinerja	Target 2027	
		Satuan	Volume
Prioritas 1 . Menguatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif			
Tujuan : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas profesional, responsif, kolaboratif, dan partisipatif	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	86,5
Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas integrasi pembangunan dari sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan kinerja	Nilai SAKIP	Nilai	80
Sasaran 2 : Meningkatkan Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang efektif, efisien dan akuntabel	Opini atas laporan keuangan pemerintah daerah	Opini	WTP
Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas pemetaan regulasi, regulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi daerah	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	92
Sasaran 4 : Peningkatan Pelayanan Publik yang profesional, responsif dan bebas korupsi	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3,56
Sasaran 5 : Meningkatnya pengawasan arsip daerah	Indeks Pengawasan Arsip	Indeks	86
Sasaran 6 : Meningkatnya pencegahan perilaku korupsi	Indeks Pencegahan Korupsi Daerah	Indeks	95,5
Sasaran 7 : Meningkatnya sumber daya aparatur yang profesional dan berintegritas	Indeks Sistem Merit	Indeks	0,75

Adapun arah kebijakan dari prioritas 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif tahun 2027 difokuskan kepada :

1. Menciptakan Pemerintahan Berintegritas & Bebas Pungli
2. Pengotimalisasian Pelayanan Publik Berbasis Teknologi
3. Meningkatkan Pembangunan Masyarakat Tingkat RW
4. Meningkatkan Pelayanan kepada "Warga Emas" Pada Sektor Kesehatan, Transportasi, & Pelayanan Publik.

Prioritas 2. Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat

Prioritas ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya Kota Padang sebagai kota pintar (smart city) dan kota sehat, melalui pendekatan yang terintegrasi antara pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan layanan dasar, dan penguatan sistem tata kelola perkotaan. Pengembangan kota pintar difokuskan pada digitalisasi layanan publik, penyediaan infrastruktur teknologi informasi, integrasi sistem data lintas sektor, serta peningkatan literasi digital bagi masyarakat dan aparatur. Hal ini diharapkan mampu menciptakan pelayanan publik yang efisien, transparan, dan berbasis kebutuhan warga.

Untuk mewujudkan Padang sebagai Kota Sehat, arah kebijakan difokuskan pada penguatan implementasi 9 tatanan Kota Sehat secara terintegrasi melalui pendekatan lintas sektor (cross-cutting OPD) dengan prinsip kolaboratif, berbasis wilayah, dan berkelanjutan.

1. Penguatan Tata Kelola Kota Sehat Terintegrasi

2. Meningkatkan peran Bappeda, Dinas Kesehatan, dan OPD terkait dalam perencanaan, penganggaran, serta monitoring evaluasi berbasis indikator Kota Sehat pada seluruh tatanan.

3. Peningkatan Kualitas Permukiman dan Sarana Prasarana Dasar

Mempercepat pemenuhan akses air bersih, sanitasi layak, pengelolaan persampahan, dan penataan kawasan kumuh melalui sinergi Dinas PUPR, Perkim, DLH, dan kecamatan/kelurahan.

4. Penguatan Kawasan, Sarana, dan Layanan Sehat

Mengoptimalkan penyediaan fasilitas umum sehat (pasar, sekolah, tempat kerja, ruang publik) melalui kolaborasi Dinas Kesehatan, Disdik, Disdag, Disnaker, dan OPD teknis lainnya.

5. Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

Memperkuat promosi kesehatan berbasis masyarakat melalui pendekatan edukatif lintas OPD dan pemberdayaan kader, sekolah, serta komunitas.

6. Pengendalian Risiko Kesehatan Lingkungan dan Bencana

Mengintegrasikan upaya mitigasi bencana, pengendalian pencemaran, dan kesiapsiagaan kesehatan melalui BPBD, DLH, Dinkes, serta OPD pendukung.

7. Penguatan Ketahanan Pangan dan Gizi Masyarakat

Meningkatkan akses pangan aman dan bergizi melalui sinergi Dinas Pangan, Pertanian, Perikanan, dan Dinas Kesehatan.

8. Pengembangan Kawasan Pariwisata Sehat dan Ramah Lingkungan

Mendorong pengelolaan destinasi wisata yang bersih, aman, dan sehat melalui Dinas Pariwisata, DLH, dan pelaku usaha.

9. Peningkatan Produktivitas dan Kesehatan Tempat Kerja

10. Memastikan standar K3 dan kesehatan lingkungan kerja melalui Disnaker, Dinkes, serta dunia usaha.

Penguatan Inovasi, Digitalisasi, dan Partisipasi Masyarakat

Mengembangkan inovasi layanan Kota Sehat berbasis digital serta meningkatkan peran aktif masyarakat, dunia usaha, dan akademisi.

Pendekatan Cross-Cutting OPD dimana Seluruh tatanan dilaksanakan melalui integrasi program lintas OPD dengan pengarusutamaan kesehatan dalam setiap kebijakan (health in all policies), dukungan pembiayaan terintegrasi, serta penguatan peran kecamatan/kelurahan sebagai lokus implementasi.

Dengan strategi ini, diharapkan terwujud peningkatan kualitas lingkungan dan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan menuju Padang sebagai Kota Sehat.

Sementara itu, pencapaian Kota Sehat diwujudkan melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, penguatan upaya promotif dan preventif, penataan lingkungan permukiman yang sehat, serta pengendalian risiko kesehatan masyarakat. Pendekatan partisipatif, kolaboratif, dan berbasis data menjadi kunci dalam memperkuat capaian indikator-indikator Kota Sehat, seperti derajat kesehatan masyarakat, akses sanitasi layak, ruang terbuka hijau, serta pengurangan stunting dan penyakit menular.

Sinergi antara dimensi “pintar” dan “sehat” ini menjadi pilar penting dalam membangun Kota Padang yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.

Sasaran dan Indikator kinerja pada prioritas pembangunan 2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat Tahun 2027 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 4- 17 Sasaran dan Target Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat Tahun 2027

Uraian	Indikator Kinerja	Target 2027	
		Satuan	Volume
Prioritas 2 . Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat			
Tujuan 1. Mewujudkan Peningkatan Implementasi Kota Pintar dan Kota Sehat	Smart City Index	Indeks	3,5
Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan berbasis	Indeks Transformasi	Indeks	1,7

Uraian	Indikator Kinerja	Target 2027	
		Satuan	Volume
digitalisasi dalam wujudkan *smart city*	Digital Pilar Pemerintahan		
Sasaran 2 : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Indeks	0,85
Sasaran 3 : Tercapainya kondisi lingkungan hidup yang bersih, nyaman, aman dan kualitas hidup sehat.	Peningkatan Penilaian Hasil Evaluasi Kota Sehat	Persen	0.01

Adapun arah kebijakan dari prioritas 2 : Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat Tahun 2027 difokuskan kepada:

1. Menyediakan Kartu Padang Juara bagi siswa kurang mampu
2. Merevisi Kurikulum & Sertifikasi Guru PAUD
3. Penyediaan LKS & Seragam Sekolah Gratis Bagi Siswa Kurang Mampu
4. Menyediakan BPJS Kesehatan Gratis

Prioritas 3. Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan.

Prioritas ini menekankan pentingnya pembangunan manusia yang tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga kuat dalam nilai-nilai spiritual, etika, dan budaya lokal. Pemerintah Kota Padang mendorong penguatan karakter masyarakat melalui penyelenggaraan pendidikan yang menanamkan nilai-nilai keagamaan, toleransi, kedisiplinan, dan kecintaan terhadap budaya daerah sejak usia dini. Pendidikan karakter ini dilaksanakan secara terpadu melalui jalur formal, non-formal, dan informal, dengan melibatkan peran keluarga, sekolah, komunitas, serta lembaga keagamaan dan adat.

Selain itu, pemberdayaan masyarakat menjadi instrumen penting dalam membentuk warga yang aktif, mandiri, dan berdaya saing. Pemerintah daerah akan memfasilitasi ruang-ruang ekspresi budaya, pengembangan ekonomi berbasis budaya lokal, serta revitalisasi warisan sejarah dan kearifan lokal sebagai identitas kota. Dengan pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan, prioritas ini bertujuan menciptakan tatanan sosial yang harmonis, religius, serta berakar kuat pada nilai-nilai budaya Minangkabau dan kebangsaan.

Sasaran dan Indikator kinerja pada prioritas pembangunan 3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan Tahun 2027 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 4- 18 Sasaran dan Target Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan Tahun 2027

Uraian	Indikator Kinerja	Target 2027	
		Satuan	Volume
Prioritas 3 : Menguatkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan			
Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	85,14
Sasaran 1 : Meningkatnya literasi masyarakat Kota	Indeks pembangunan Literasi masyarakat	Indeks	18,76
Sasaran 3 : Meningkatkan pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	Indeks	0,850
Sasaran 4 : Meningkatnya Peran Pemuda dalam pembangunan sumber daya manusia unggul	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	57,0
Sasaran 5 : Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan daerah	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	94,37
Tujuan 2 : Meningkatkan stabilitas sosial dan politik daerah	Indeks Rasa Aman	Indeks	10,6
Sasaran 1 : Meningkatnya Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Indeks Penyelenggaran Trantibumlinmas	Indeks	66,0
Sasaran 2 : Meningkatnya Toleransi beragama dan partisipasi politik	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	85,02
Sasaran 3 : Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	54,69

Adapun arah kebijakan dari prioritas 3 : Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan Tahun 2027 difokuskan kepada:

1. Revisi Kurikulum & Sertifikasi TPQ/MDTA Bagi Siswa SD, MDTW/TQA Bagi Siswa SMP
2. Menggalakan Madrasah Diniyah Wustho (MDW) Bagi Siswa SMP
3. Menyiapkan event Padang Balomba
4. Menggalakan Subuh Mubarokah
5. Menciptakan Remaja Mesjid Reborn
6. Mefasilitasi kebutuhan Rumah Tahfidz
7. Menyiapkan Ruang Pembelajaran Digital Mesjid & Wifi Gratis
8. Menyiapkan Dokter Warga
9. Memberikan Fasilitasi/Insentif Keluarga Pasien Kurang Mampu
10. Optimalisasi Peran Tungku Tigo Sajarangan dalam Pemberdayaan Masyarakat
11. Menyenergikan peran Pemerintah Kota Dengan Ormas Keagamaan, Cendekiawan & Adat
12. Meciptakan dan mengoptimalkan peran Dubalang Kota

13. Perlindungan Anak & Perempuan Terhadap Kekerasan.

Prioritas 4. Kemudahan Berinvestasi Demi Terbukanya Lapangan Pekerjaan

Prioritas ini diarahkan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, transparan, dan efisien guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif serta membuka seluas-luasnya peluang kerja bagi masyarakat. Pemerintah Kota Padang berkomitmen untuk menyederhanakan prosedur perizinan, meningkatkan kepastian hukum dan kemudahan berusaha, serta memperkuat dukungan infrastruktur dan konektivitas kawasan strategis investasi. Digitalisasi layanan perizinan melalui sistem OSS (Online Single Submission), percepatan pengurusan lahan, dan fasilitasi kemitraan antara pelaku usaha besar dan UMKM juga menjadi fokus utama.

Di samping itu, penyediaan tenaga kerja lokal yang kompeten melalui pelatihan vokasi, sertifikasi, serta penyelarasan pendidikan dan kebutuhan pasar kerja menjadi bagian integral dari strategi pembangunan ekonomi. Investasi yang masuk diharapkan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan semata, tetapi juga memberikan dampak sosial melalui penciptaan lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penguatan ekonomi lokal. Dengan demikian, kemudahan berinvestasi menjadi salah satu pilar strategis dalam memperkuat ketahanan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kota Padang secara berkelanjutan.

Sasaran dan Indikator kinerja pada prioritas pembangunan 4 Kemudahan Berinvestasi Demi Terbukanya Lapangan Pekerjaan Tahun 2027 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 4- 19 Sasaran dan Target Kemudahan Berinvestasi Demi Terbukanya Lapangan Pekerjaan Tahun 2027

Uraian	Indikator Kinerja	Target 2027	
		Satuan	Volume
Prioritas 4 : Mendorong Kemudahan Berinvestasi Demi Terbukanya Lapangan Pekerjaan			
Tujuan 1 : Mewujudkan Perekonomian Masyarakat yang adaptif dan kondusif	Indeks daya saing daerah	Indeks	4,35
Sasaran 1 : Meningkatkan Realisasi Investasi	Nilai PMTB terhadap PDRB	Nilai	30,00
Sasaran 2 : Meningkatkan Tingkat Kesempatan Kerja	Perbandingan orang yang bekerja thd angkatan kerja	Persen	91,15

Adapun arah kebijakan dari prioritas 4 : Kemudahan Berinvestasi Demi Terbukanya Lapangan Pekerjaan Tahun 2027 difokuskan kepada:

1. Kemudahan Izin Investasi & Berusaha
2. Peningkatan Skill Kepemudaan

Priorotas 5. Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas.

Prioritas ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur publik yang mendukung mobilitas, produktivitas, dan kualitas hidup masyarakat, dengan tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan lingkungan. Pemerintah Kota Padang berfokus pada pembangunan dan revitalisasi sarana dan prasarana umum yang ramah lingkungan, inklusif, aman, dan tahan terhadap bencana. Hal ini mencakup penataan ruang publik seperti taman kota, trotoar, fasilitas transportasi massal, drainase, serta infrastruktur dasar lainnya yang terintegrasi dengan konsep kota hijau (*green city*).

Upaya ini juga diarahkan untuk mendukung penurunan emisi, peningkatan ruang terbuka hijau, pengelolaan sampah yang berkelanjutan, dan efisiensi energi. Pembangunan infrastruktur dilakukan dengan pendekatan partisipatif dan berbasis kebutuhan masyarakat, serta memperhatikan aspek estetika, fungsionalitas, dan aksesibilitas bagi seluruh kelompok, termasuk lansia dan penyandang disabilitas. Dengan prioritas ini, Kota Padang menargetkan terwujudnya lingkungan perkotaan yang sehat, berkelanjutan, dan berdaya saing, sebagai fondasi penting dalam mendukung transformasi tata kelola yang inklusif.

Sasaran dan Indikator kinerja pada prioritas pembangunan 5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas Tahun 2027 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 4- 20 Sasaran dan Target Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas Tahun 2027

Uraian	Indikator Kinerja	Target 2027	
		Satuan	Volume
Prioritas 5 : Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas			
Tujuan 1 : Mewujudkan Kota Layak Huni	Indeks Kota Layak Huni	Indeks	69,63
Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	77,79
Sasaran 2 : Mewujudkan hunian layak dan terjangkau	Persentase Hunian Layak dan terjangkau	Persen	75,98
Sasaran 3 : Mengembangkan dan merevitalisasi sarana serta prasarana umum yang ramah lingkungan dan hijau	Indeks Infrastruktur	Indeks	67,03
Sasaran 4 : Meningkatnya Kualitas Transportasi Publik	Rasio Konektivitas Wilayah	Persen	60,4

Adapun arah kebijakan dari prioritas 5 : Kemudahan Berinvestasi Demi Terbukanya Lapangan Pekerjaan Tahun 2027 difokuskan kepada:

1. Perbaikan Jalan & Drainase Kota
2. Optimalisasi Taman Tematik per Kecamatan
3. Pengelolaan Sampah Terpadu & Penataan TPA Modern
4. PenyediaanTrotoar Ramah Pejalan Kaki
5. Menyiapkan Transportasi Publik & Pemberhentian Ramah Warga

Prioritas 6. Menguatkan Jaringan Ketahanan Bencana

Prioritas ini menegaskan pentingnya penguatan sistem ketangguhan daerah dalam menghadapi risiko bencana, mengingat Kota Padang merupakan wilayah dengan tingkat kerentanan bencana yang tinggi, seperti gempa bumi, tsunami, banjir, dan tanah longsor. Pemerintah Kota Padang berkomitmen membangun jaringan ketahanan bencana yang terintegrasi melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, sistem peringatan dini, serta partisipasi aktif masyarakat dalam upaya mitigasi dan kesiapsiagaan.

Penguatan dilakukan melalui pemutakhiran data risiko bencana berbasis spasial, penyusunan rencana kontinjensi lintas sektor, pengembangan infrastruktur tangguh bencana, serta peningkatan literasi kebencanaan di sekolah, komunitas, dan tempat kerja. Kolaborasi multipihak antara pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga pendidikan, serta masyarakat sipil menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem ketangguhan yang berkelanjutan.

Dengan pendekatan ini, diharapkan Kota Padang mampu bertransformasi menjadi kota yang tidak hanya responsif terhadap bencana, tetapi juga adaptif dan pulih lebih cepat (*build back better*), demi menjamin keselamatan jiwa, kelangsungan pembangunan, dan perlindungan aset masyarakat.

Sasaran dan Indikator kinerja pada prioritas pembangunan 6 Menguatkan Jaringan Ketahanan Bencana Tahun 2027 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 4- 21 Sasaran dan Target Menguatkan Jaringan Ketahanan Bencana Tahun 2027

Uraian	Indikator Kinerja	Target 2027	
		Satuan	Volume
Prioritas 6 : Menguatkan Jaringan Ketahanan Bencana			
Tujuan 1 : Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	153,39 - 152,12
Sasaran 1 : Penguatan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana dan perubahan iklim	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Indeks	0,55

Adapun arah kebijakan dari prioritas 6 : Menguatkan Jaringan Ketahanan Bencana Tahun 2027 difokuskan kepada:

1. Memperkuat Sigap Call Center
2. Pengendalian Banjir Terpadu

Prioritas 7. Pengembangan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa

Prioritas ini bertujuan untuk memperkuat struktur perekonomian Kota Padang melalui pengembangan sektor perdagangan dan jasa yang inklusif, tangguh, serta mampu beradaptasi terhadap dinamika ekonomi global dan transformasi digital. Pemerintah Kota Padang mendorong terciptanya ekosistem usaha yang kondusif dengan penyederhanaan regulasi, kemudahan akses pembiayaan, serta penguatan kapasitas pelaku usaha, khususnya UMKM, koperasi, dan pelaku ekonomi kreatif.

Transformasi digital dalam sektor perdagangan menjadi bagian penting melalui fasilitasi adopsi teknologi, pengembangan pasar daring (e-commerce), serta pemanfaatan platform digital untuk promosi produk lokal. Di sisi lain, pengembangan sektor jasa diarahkan pada peningkatan kualitas layanan dan daya saing, termasuk jasa keuangan, transportasi, logistik, dan pariwisata berbasis kearifan lokal.

Melalui prioritas ini, Kota Padang diharapkan mampu meningkatkan kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), memperluas kesempatan kerja, serta memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat secara berkelanjutan dan merata.

Sasaran dan Indikator kinerja pada prioritas pembangunan 7 Pengembangan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa Tahun 2027 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 4- 22 Sasaran dan Target Pengembangan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa Tahun 2027

Uraian	Indikator Kinerja	Target 2027	
		Satuan	Volume
Prioritas 7 : Pengembangan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa			
Tujuan 1 : Mewujudkan Sektor perdagangan dan jasa yang tangguh	PDRB sektor perdagangan dan jasa	Miliar	34.500,68
Sasaran 1 : Meningkatnya kemampuan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan	Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	Persen	0,36
Sasaran 2 : Meningkatnya Kontribusi Sektor perdagangan dan jasa terhadap perekonomian Daerah	Persentase Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan dan jasa	Persen	6,05
Sasaran 3 : Meningkatnya daya saing produk daerah	Persentase Petumbuhan Net Ekspor	Persen	9,48

Uraian	Indikator Kinerja	Target 2027	
		Satuan	Volume
Sasaran 4 : Peningkatan Lapangan Usaha Perdagangan	Kontribusi Lapangan usaha Perdagangan Terhadap PDRB	Persen	18,61
Sasaran 5 : Meningkatnya daya saing produk daerah dan transaksi perdagangan	Kontribusi Ekspor terhadap PDRB	Persen	7,138

Adapun arah kebijakan dari prioritas 7 : Pengembangan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa Tahun 2027 difokuskan kepada:

1. Penyediaan BPJS Ketenagakerjaan Untuk Pekerja Rentan
2. Penyediaan Bantuan Pemerintah Untuk Kelompok Pertanian & Perikanan
3. Revitalisasi Pasar Raya & Pasar Satelit
4. Meningkatkan peran Rumah Wirausaha Untuk UMKM
5. Mewujudkan Koperasi Berjaya
6. Pemanfaatan Aset Untuk Peningkatan PAD

Prioritas 8. Optimalisasi Potensi Kota untuk Terwujudnya Industri Kreatif dan Pariwisata Berkelanjutan

Prioritas ini berfokus pada upaya mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Kota Padang melalui pengembangan sektor industri kreatif dan pariwisata yang berbasis potensi lokal, nilai budaya, dan keberlanjutan lingkungan. Pemerintah Kota Padang mendorong identifikasi, promosi, dan pemanfaatan aset-aset strategis daerah—seperti warisan budaya, destinasi alam, sentra kerajinan, dan kuliner khas—sebagai motor penggerak pertumbuhan industri kreatif dan pariwisata.

Penguatan dilakukan melalui peningkatan kapasitas SDM kreatif, fasilitasi pembiayaan, serta penyediaan infrastruktur dan ruang publik yang mendukung aktivitas seni, budaya, dan ekonomi kreatif. Dalam sektor pariwisata, pendekatan pengembangan destinasi diarahkan pada pariwisata berbasis komunitas, edukasi, dan pelestarian lingkungan, dengan mendorong sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.

Dengan strategi ini, Kota Padang diharapkan mampu membentuk ekosistem kreatif yang produktif dan berdaya saing, serta menghadirkan destinasi wisata yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan—sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat identitas dan daya tarik kota di tingkat regional maupun global.

Sasaran dan Indikator kinerja pada prioritas pembangunan 8 Optimalisasi Potensi Kota untuk Terwujudnya Industri Kreatif dan Pariwisata Berkelanjutan Tahun 2027 dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 4- 23 Sasaran dan Target Optimalisasi Potensi Kota untuk Terwujudnya Industri Kreatif dan Pariwisata Berkelanjutan Tahun 2027

Uraian	Indikator Kinerja	Target 2027	
		Satuan	Volume
Prioritas 8 : Menggerakkan Potensi Kota untuk Terwujudnya Industri Kreatif dan Pariwisata Berkelanjutan			
Tujuan 1 : Terwujudnya peningkatan perekonomian daerah dari sektor Industri Kreatif dan Pariwisata	PDRB sektor industri kreatif dan pariwisata	Miliar	1374,19
Sasaran 1 : Meningkatnya Kontribusi Industri Kreatif terhadap Perekonomian Daerah	Persentase Pertumbuhan Sektor PDRB Ekonomi Kreatif	Persen	7,54
Sasaran 2 : Meningkatnya Kontribusi sektor pariwisata terhadap Perekonomian Daerah	Persentase Pertumbuhan sektor pariwisata	Persen	8,98
Sasaran 3 : Meningkatkan perekonomian daerah dari sektor Koperasi dan UMKM (Usaha Mikro)	Nilai omset sektor koperasi dan Usaha Mikro dan UMKM	Juta	2.038.358,31

Adapun arah kebijakan dari prioritas 8 : Menggerakkan Potensi Kota untuk Terwujudnya Industri Kreatif dan Pariwisata Berkelanjutan 2027 difokuskan kepada:

1. Penataan Kawasan Pinggir Pantai
2. Pengembangan Sektor Wisata & Ekonomi Kreatif
3. Revitalisasi & Aktivasi Wisata Tematik
4. Penyediaan Toilet Bersih di Area Publik

4.2.4 Pemenuhan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kota Padang Tahun 2027

Pemenuhan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Padang Tahun 2027 merupakan agenda prioritas yang bersifat wajib dan menjadi ukuran dasar dalam menjamin terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat atas pelayanan publik yang berkualitas. Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, Pemerintah Kota Padang berkomitmen untuk mengintegrasikan pencapaian SPM ke dalam seluruh proses perencanaan dan penganggaran tahun 2027.

Pada tahun 2027, Pemerintah Kota Padang akan mengarahkan program dan kegiatan secara terukur untuk meningkatkan capaian indikator SPM, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Fokus

diarahkan pada peningkatan cakupan layanan, kecepatan respons pelayanan, keterjangkauan, serta peningkatan kapasitas aparatur dan infrastruktur pendukung. Selain itu, penguatan integrasi data dan monitoring berbasis sistem informasi SPM juga menjadi langkah strategis untuk memastikan efektivitas dan akuntabilitas pencapaian. Dengan pemenuhan SPM secara konsisten dan berkelanjutan, Kota Padang menargetkan terwujudnya pelayanan dasar yang setara dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, sebagai fondasi dalam membangun kualitas hidup dan daya saing daerah.Target Pelayanan Minimal Kota Padang Tahun 2027 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4- 24 Target Standar Pelayanan Minimal Kota Padang Tahun 2027

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target % Capaian
1	Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan		
1	Usia Dini	Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%
2	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia 7- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100%
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	100%
3	Pendidikan kesetaraan	Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesataraan	100%
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	100%
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	100%
2	Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan		
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%
		Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target % Capaian
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%
		Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100%
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%
		Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100%
4	Pelayanan kesehatan balita	100% (sesuai dengan jumlah bayi baru lahir yang akan dipenuhi	100%
		Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100%
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%
		Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100%
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%
		Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100%
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%
		Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100%
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia hipertensi usia 15 tahun ke atas yang akan dipenuhi)	100%
		Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target % Capaian
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes militus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%
		Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100%
10	Pesentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%
		Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100%
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%
		Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100%
12	Pelayananan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus)	Penerima layanan dasar	100%
		Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%
3	Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum		
1	Penyedian kebutuhan Pokok Air Minum sehari hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum sehari hari	100%
2	Penyedian Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik	100%
4	Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat		
1	Penyedian & rehabilitasi rumah yang layak huni bagi	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target % Capaian
	korban bencana Kab/kota		
2	Fasilitasi penyedian rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah Daerah KabupatenKota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitasi penyedian rumah layak huni	100%
5	Standar Pelayanan Minimal Bidang Trantibumlinmas		
1	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100%
2	Pelayanan Informasi rawan Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi Rawan bencana	100%
3	Pelayanan Pencagahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%
4	Pelayanan Penyelamatan Korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%
6	Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial		
1	Rehabilitasi Sosial dasar disabilitas penyandang terlantar diluar panti	Persentase Penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasar diluar panti	100%
2	Reahabilitasi sosial anak terlantar diluar panti	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhannya di luar panti	100%
3	Rehabilitasi dasar lanjut sosial usia terlantar diluar panti	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhannya di luar pant	100%

4.2.5 Program Unggulan Kota Padang Tahun 2027

Satu Tujuan untuk Kejayaan Kota Padang merupakan perwujudan dari komitmen politik Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Nasional Tahun 2024. Inisiatif strategis ini dirancang sebagai respons terhadap berbagai persoalan nyata yang dihadapi masyarakat, terutama dalam bidang ekonomi, sosial, dan pelayanan dasar, serta menjadi instrumen utama dalam mendorong peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Dengan pendekatan yang holistik dan responsif, Satu Tujuan untuk Kejayaan Kota Padang berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar warga melalui intervensi kebijakan yang mendukung peningkatan pendapatan, perluasan perlindungan sosial, dan akses yang merata terhadap layanan publik. Implementasi program ini mengedepankan prinsip inklusivitas, keadilan sosial, dan keberlanjutan, sehingga memperkuat ketahanan sosial-ekonomi masyarakat serta mendorong pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah Kota Padang secara menyeluruh, berkeadilan, dan berdaya saing. Satujuan di terjemahkan dalam 9 program unggulan dan 40 aktivasi yang dapat disajikan sebagai berikut :

1. Padang Amanah
   Padang Amanah diwujudkan dalam bentuk aktivasi berupa:
   a. Pemerintahan berintegritas dan bebas pungli;
   b. Optimalisasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi;
   c. Pembangunan Masyarakat Tingkat RW.
2. Padang Juara
   Padang Juara diwujudkan dalam bentuk aktivasi berupa:
   a. Kartu Padang Juara;
   b. Revisi kurikulum dan sertifikasi Guru PAUD;
   c. Revisi kurikulum dan sertifikasi TPQ/MDTA bagi siswa SD, MDTW/TQA bagi siswa SMP,
   d. Madrasah Diniyah Wustho (MDW) bagi siswa SMP;
   e. LKS dan seragam sekolah gratis bagi siswa kurang mampu;
   f. Padang Balomba.
3. Smart Surau
   Smart Surau diwujudkan dalam bentuk aktivasi berupa:
   a. Subuh mubarokah;
   b. Remaja mesjid reborn;
   c. Fasilitasi rumah tahfidz;
   d. Ruang pembelajaran digital mesjid dan Wifi gratis.
4. Sinergi Nagari
   Sinergi Nagari diwujudkan dalam bentuk aktivasi berupa:
   a. Optimalisasi peran *Tungku Tigo Sajarangan* dalam pemberdayaan masyarakat;
   b. Sinergi pemerintah kota dengan organisasi masyarakat keagamaan, cendekiawan, dan adat.
5. Padang Melayani
   Padang Melayani diwujudkan dalam bentuk aktivasi berupa:
   a. BPJS kesehatan gratis;
   b. BPJS ketenagakerjaan untuk pekerja rentan;

c. Bantuan pemerintah untuk kelompok pertanian dan perikanan;
d. Fasilitasi/insentif keluarga pasien kurang mampu;
e. Peduli "Warga Emas" pada sektor kesehatan, transportasi, dan pelayanan publik;
f. Perlindungan anak dan perempuan terhadap kekerasan;
g. Kemudahan izin investasi dan berusaha;
h. Peningkatan skill kepemudaan;
i. Pemanfaatan aset untuk peningkatan pendapatan asli daerah.

6. Padang Rancak
   Padang Rancak diwujudkan dalam bentuk aktivasi berupa:
   a. Taman tematik per kecamatan;
   b. Pengendalian banjir terpadu;
   c. Pengelolaan sampah terpadu dan penataan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) modern;
   d. Perbaikan jalan dan drainase kota;
   e. Trotoar ramah pejalan kaki;
   f. Transportasi publik dan pemberhentian ramah warga.
   g. Revitalisasi Pasar Raya dan pasar satelit
7. Padang Sigap
   Padang Sigap diwujudkan dalam bentuk aktivasi berupa:
   a. Dubalang kota;
   b. Sigap Call Center;
   c. Dokter warga.
8. UMKM Naik Kelas
   UMKM Naik Kelas diwujudkan dalam bentuk aktivasi berupa:
   a. Rumah wirausaha untuk UMKM;
   b. Koperasi berjaya.
9. Jelajah Padang
   Jelajah Padang diwujudkan dalam bentuk aktivasi berupa:
   a. Penataan kawasan pinggir pantai;
   b. Pengembangan sektor wisata dan ekonomi kreatif;
   c. Revitalisasi dan aktivasi wisata tematik;
   d. Toilet bersih di area publik.

4.2.6 Penyelarasan dan Dukungan RKPD Kota Padang Terhadap RKPD Provinsi dan RKP 2027

Dalam rangka menjamin konsistensi dan sinergi perencanaan pembangunan antara tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, penyusunan RKPD Kota Padang Tahun 2027 dilakukan dengan memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 serta RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2027.

Penyelarasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan pembangunan daerah selaras dengan agenda pembangunan nasional dan provinsi, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan secara integratif dan efektif. Selain itu, sinergi lintas level pemerintahan juga menjadi landasan dalam optimalisasi sumber daya pembangunan, baik dari sisi pendanaan, kelembagaan, maupun dukungan kebijakan.

Berikut disajikan tabel matriks penyelarasan dan dukungan RKPD Kota Padang terhadap RKPD Provinsi Sumatera Barat dan RKP Tahun 2027, yang menggambarkan keterkaitan antara prioritas pembangunan nasional, provinsi, dan prioritas Kota Padang Tahun 2027

Tabel 4- 25 Sinkronisasi Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025-2029 Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 dan Kota Padang Tahun 2025-2029

Agenda Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Nasional	Tujuan Pembangunan Sumatera Barat	Sasaran Pembangunan Sumatera Barat	Tujuan Pembangunan Kota Padang	Sasaran Pembangunan Kota Padang
1. Transformasi Sosial	1. Kesehatan untuk semua	Terwujudnya kualitas pembangunan manusia yang berdaya saing	1. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan untuk mendukung daya saing sumber daya manusia.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul	1. Meningkatnya literasi masyarakat Kota 2. Meningkatkan derajat kesehatan Masyarakat 3. Meningkatkan pendidikan Masyarakat 4. Meningkatnya Peran Pemuda dalam pembangunan sumber daya manusia unggul 5. Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan daerah
	2. Pendidikan Berkualitas Merata		2. Meningkatnya kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat untuk mendukung produktivitas.		
	3. Perlindungan Sosial Adaptif		-		
2. Transformasi Ekonomi	1. Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi	Terwujudnya ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	1. Meningkatnya produktivitas dan cadangan pangan yang berkualitas dan berkelanjutan. 2. Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.	1. Mewujudkan Perekonomian Masyarakat yang adaptif dan kondusif	1. Meningkatkan Realisasi Investasi 2. Meningkatkan Tingkat Kesempatan Kerja 1. Meningkatnya kemampuan keuangan

Agenda Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Nasional	Tujuan Pembangunan Sumatera Barat	Sasaran Pembangunan Sumatera Barat	Tujuan Pembangunan Kota Padang	Sasaran Pembangunan Kota Padang
	2. Pertumbuhan Ekonomi	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan melalui penguatan perdagangan, inovasi, industri dan inovasi	1. Meningkatkan investasi, perdagangan dan daya saing daerah. 2. Memperkuat ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif dan berkualitas. 3. Mendorong pertumbuhan UMKM dan industri kecil menengah sebagai pilar ekonomi.	2. Mewujudkan Sektor perdagangan dan jasa yang tangguh	daerah dalam pembiayaan Pembangunan 2. Meningkatnya Kontribusi Sektor perdagangan dan jasa terhadap perekonomian Daerah 3. Meningkatnya daya saing produk daerah 4. Peningkatan Lapangan Usaha Perdagangan 5. Meningkatnya daya saing produk daerah dan transaksi perdagangan
	3. Penerapan Ekonomi Hijau	Pariwisata yang berdaya saing dan akselerasi ekonomi kreatif untuk pertumbuhan yang berkelanjutan - -	1. Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah. 2. Memperkuat peran ekonomi kreatif dalam mendorong pertumbuhan UMKM. - -	1. Terwujudnya peningkatan perekonomian daerah dari sektor Industri Kreatif dan Pariwisata	1. Meningkatnya Kontribusi Industri Kreatif terhadap Perekonomian Daerah 2. Meningkatnya Kontribusi sektor pariwisata terhadap Perekonomian Daerah 3. Meningkatkan perekonomian daerah dari sektor Koperasi dan UMKM
	4. Transformasi Digital				

Agenda Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Nasional	Tujuan Pembangunan Sumatera Barat	Sasaran Pembangunan Sumatera Barat	Tujuan Pembangunan Kota Padang	Sasaran Pembangunan Kota Padang
	5. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global			1. Mewujudkan Peningkatan Implementasi Kota Pintar dan Kota Sehat	1. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan berbasis digitalisasi dalam wujudkan smart city 2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 3. Tercapainya kondisi lingkungan hidup yang bersih, nyaman, aman dan kualitas hidup sehat.
	6. Perkotaan dan Perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	Kota sebagai pusat pertumbuhan dengan nagari/desa sebagai basis kemajuan yang mandiri dan berdaya saing	1. Meningkatnya kemandirian ekonomi desa/nagari berbasis potensi lokal. 2. Meningkatnya kualitas infrastruktur desa/kelurahan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat desa/nagari/kelurahan.	1. Mewujudkan Kota Layak Huni	1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup 2. Mewujudkan hunian layak dan terjangkau 3. Mengembangkan dan merevitalisasi sarana serta prasarana umum yang ramah lingkungan dan hijau 4. Meningkatnya Kualitas Transportasi Publik
3. Transformasi Tata Kelola	1. Regulasi Tata Kelola yang Berintegrasi dan Adaptif	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan pelayanan publik yang efektif	1. Efisiensi dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan.	**1.** Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas profesional, responsif, kolaboratif, dan partisipatif	**1.** Meningkatnya kualitas integrasi pembangunan dari sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan kinerja

Agenda Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Nasional	Tujuan Pembangunan Sumatera Barat	Sasaran Pembangunan Sumatera Barat	Tujuan Pembangunan Kota Padang	Sasaran Pembangunan Kota Padang
					2. Meningkatnya kualitas integrasi pembangunan dari sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan kinerja **3.** Meningkatnya kualitas pemetaan regulasi, regulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi daerah **4.** Peningkatan Pelayanan Publik yang profesional, responsif dan bebas korupsi **5.** Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan berbasis digitalisasi dalam wujudkan smart city **6.** Meningkatnya pengawasan arsip daerah **7.** Meningkatnya pencegahan perilaku korupsi **8.** Meningkatnya sumber daya aparatur yang

Agenda Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Nasional	Tujuan Pembangunan Sumatera Barat	Sasaran Pembangunan Sumatera Barat	Tujuan Pembangunan Kota Padang	Sasaran Pembangunan Kota Padang
					profesional dan berintegritas
4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia	1. Hukum berkeadilan, keamanan nasional tangguh, dan demokrasi substansial			**1.** Meningkatkan stabilitas sosial dan politik daerah	**1.** Meningkatnya Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan Masyarakat **2.** Meningkatnya Toleransi beragama dan partisipasi politik **3.** Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat
	2. Stabilitas Ekonomi Makro				
	3. Ketangguhan diplomasi dan pertahanan berdaya gentar kawasan				
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	1. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	Terwujudnya masyarakat beradab dan berbudaya yang harmonis, religius, serta berbasis keluarga berkualitas	1. Memperkuat nilai adat, budaya dan kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat.		
	2. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif		2. Meningkatnya perlindungan hak asasi manusia dan kesetaraan gender. 3. Terwujudnya perlindungan sosial yang aman dan harmonisasi berbasis keluarga berkualitas.		

Agenda Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Nasional	Tujuan Pembangunan Sumatera Barat	Sasaran Pembangunan Sumatera Barat	Tujuan Pembangunan Kota Padang	Sasaran Pembangunan Kota Padang
	3. Lingkungan Hidup Berkualitas		-		
	4. Berketahanan Energi, Air dan Kem Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim serta Kemandirian Pangan	Terwujudnya infrastruktur yang inklusif, tangguh bencana dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat	1. Meningkatnya resiliensi daerah terhadap bencana dan perubahan iklim. 2. Terwujudnya pengelolaan sumber daya air yang produktif dan berkelanjutan. 3. Memperkuat konektivitas dan aksesibilitas wilayah serta pemanfaatan teknologi dalam pembangunan infrastruktur.	**1.** Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	1. Penguatan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana dan perubahan iklim
	5. Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim				

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menjabarkan prioritas pembangunan daerah secara sistematis, terukur, dan terintegrasi, sebagai landasan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dokumen ini disusun berdasarkan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, dan top-down-bottom-up, dengan mengacu pada dokumen perencanaan jangka menengah daerah Kota Padang Tahun 2025-2029, prioritas pembangunan nasional, serta masukan dari musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di berbagai tingkatan. Setiap program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja diarahkan untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan capaian indikator kinerja utama, kondisi riil daerah, serta isu-isu strategis yang berkembang. Program dan kegiatan disusun secara tematik, holistik, integratif, dan spasial, guna memastikan sinergi antarsektor dan antarwilayah, serta memperkuat efektivitas pembangunan.

Pendanaan kegiatan pembangunan daerah direncanakan secara cermat dengan mengidentifikasi berbagai sumber pembiayaan, baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah , Dana Transfer Umum dan Khusus dari Pemerintah Pusat, Dana Alokasi Khusus, serta sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Alokasi anggaran dilakukan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas, serta berorientasi pada hasil (outcome-based). Setiap kegiatan dirinci secara detail dalam dokumen RKPD Tahun 2027, mencakup nama program dan kegiatan, lokasi pelaksanaan, target capaian, indikator kinerja, kelompok sasaran, estimasi kebutuhan anggaran, sumber pendanaan, instansi pelaksana, serta waktu pelaksanaan. Penyusunan rencana kerja dan pendanaan ini juga memuat strategi pengendalian, monitoring, dan evaluasi sebagai upaya memastikan konsistensi pelaksanaan pembangunan dengan rencana yang telah ditetapkan.

5.1 Rencana Kerja

Dalam menyusun Rencana Kerja Daerah, terdapat beberapa aspek penting yang harus diperhatikan secara seksama agar dokumen perencanaan tersebut bersifat strategis, operasional, serta dapat diimplementasikan secara efektif adalah :

1. Kesesuaian dengan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah :
   Rencana kerja harus mengacu pada RPJMD Kota Padang tahun 2025-2029, serta mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah. Konsistensi ini penting untuk menjaga kesinambungan kebijakan dan prioritas pembangunan tahunan
2. Identifikasi Permasalahan dan Potensi Daerah :
   Penyusunan rencana kerja harus diawali dengan analisis situasi yang mencakup permasalahan utama yang dihadapi daerah serta potensi unggulan yang dapat dikembangkan. Analisis ini perlu didukung dengan data dan informasi yang valid, mutakhir, dan relevan

3. Penetapan Prioritas Pembangunan :
   Program dan kegiatan harus disusun berdasarkan skala prioritas, dengan mempertimbangkan urgensi, dampak, keterjangkauan anggaran, serta keterkaitannya dengan sasaran pembangunan nasional dan kebutuhan masyarakat. Prioritas pembangunan juga harus mempertimbangkan prinsip keadilan, inklusivitas, dan keberlanjutan
4. Pendekatan Partisipatif dan Kolaboratif :
   Proses penyusunan harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik dari unsur pemerintah, legislatif, masyarakat, dunia usaha, maupun akademisi. Partisipasi masyarakat melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan menjadi dasar dalam memastikan rencana kerja mencerminkan aspirasi publik.
5. Penyusunan Program dan Kegiatan yang Terukur :
   Setiap program dan kegiatan perlu dirumuskan secara spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu (prinsip SMART). Harus disertai dengan indikator kinerja, target capaian, lokasi pelaksanaan, kelompok sasaran, serta output dan outcome yang diharapkan.
6. Perencanaan Penganggaran yang Realistis dan Transparan :
   Kebutuhan pendanaan harus dihitung secara cermat dan disesuaikan dengan kapasitas fiskal daerah. Sumber pembiayaan dapat berasal dari PAD, dana transfer pusat, maupun sumber lainnya yang sah. Alokasi anggaran harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan regulasi.
7. Integrasi Antarsektor dan Antarwilayah :
   Perencanaan harus mengedepankan integrasi lintas sektor dan wilayah, guna menghindari tumpang tindih program serta memastikan sinergi antarlembaga dalam pencapaian tujuan pembangunan.
8. Pengendalian, Monitoring, dan Evaluasi :
   Rencana kerja harus dilengkapi dengan strategi pengendalian dan mekanisme evaluasi kinerja secara berkala, untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan dan target yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi digunakan sebagai masukan dalam penyusunan rencana tahun berikutnya.

5.2 Pendanaan Daerah

Pendanaan program dan kegiatan prioritas dilaksanakan dengan kolaborasi potensi sumber-sumber pendanaan daerah yang ada antara lain bersumber dari pemerintah/APBN, APBD Provinsi Sumatera Barat dan APBD Kota Padang, serta sumber pendanaan lainnya.

Program kegiatan yang dilaksanakan pada RKPD Tahun 2027 merupakan penjabaran dari pelaksanaan program kegiatan yang tertuang dalam RPJMD Kota Padang Tahun 2025-2029. Berikut disajikan Rencana Kerja dan Pendanaan pada RKPD tahun 2027 :

Tabel V-1 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Padang Tahun 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN					**1.119.276.444.387,00**					**970.040.808.877,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**1.109.893.444.387,00**					**969.201.508.877,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**					**1.109.893.444.387,00**					**969.201.508.877,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**765.615.065.887,00**					**787.485.528.877,00**	
		Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah					***764.225.065.887,00***					***786.522.448.877,00***	
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					102.000.000,00					303.600.000,00	
		-					102.000.000,00					303.600.000,00	
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					15.000.000,00					14.520.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	15.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	4 Dokumen	14.520.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					15.000.000,00					14.520.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	1 Dokumen	14.520.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					15.000.000,00					14.520.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	1 Dokumen	14.520.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					15.000.000,00					14.520.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	2 Dokumen	14.520.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					15.000.000,00					14.520.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	2 Dokumen	14.520.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					15.000.000,00					60.500.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	15.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	14 Laporan	60.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					12.000.000,00					170.500.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	12.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	14 Laporan	170.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					754.805.306.965,00					775.854.175.708,00	
		-					754.805.306.965,00					775.854.175.708,00	
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					751.792.117.165,00					775.311.418.108,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	6773 Orang/bulan	6773 Orang/bulan	6773 Orang/bulan	751.792.117.165,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Profesi Guru DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tambahan Penghasilan Guru	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	6773 Orang/bulan	775.311.418.108,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					3.013.189.800,00					542.757.600,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.013.189.800,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	12 Dokumen	542.757.600,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					0,00					0,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	12 Dokumen	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					0,00					0,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	12 Dokumen	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					0,00					0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	12 Laporan	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan					0,00					0,00	
		Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	1 Dokumen	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					0,00					0,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	18 Laporan	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					0,00					0,00	
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	1 Dokumen	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					1.297.637.300,00					1.608.069.699,00	
		-					1.297.637.300,00					1.608.069.699,00	
	1.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD					0,00					10.000.000,00	
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	2 Dokumen	10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					1.247.637.300,00					1.388.069.699,00	
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.247.637.300,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	12 Dokumen	1.388.069.699,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD					0,00					50.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	12 Laporan	0 Laporan	12 Laporan	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	12 Laporan	50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	1.01.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD					0,00					55.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	12 Laporan	55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					50.000.000,00					55.000.000,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	12 Laporan	55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					0,00					0,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	12 Laporan	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD					0,00					50.000.000,00	
		Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	0 Dokumen	12 Dokumen	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	12 Dokumen	50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					0,00					1.029.375.740,00	
		-					0,00					1.029.375.740,00	
	1.01.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai					0,00					250.000.000,00	
		Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	0 Unit	1 Unit	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	1 Unit	250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					0,00					60.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	200 Paket	0 Paket	200 Paket	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	200 Paket	60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					0,00					75.000.000,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6773 Dokumen	0 Dokumen	6773 Dokumen	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	6773 Dokumen	75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	1.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian					0,00					25.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	2 Dokumen	25.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					0,00					31.435.740,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	12 Dokumen	31.435.740,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.05.0006	Pemulangan Pegawai yang Pensiun					0,00					0,00	
		Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	0 Orang	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.05.0007	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas					0,00					100.000.000,00	
		Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	2 Laporan	0 Laporan	2 Laporan	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	2 Laporan	100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.05.0008	Pemindahan Tugas ASN					0,00					0,00	
		Terlaksananya Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	0 Orang	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					0,00					159.500.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	29 Orang	0 Orang	29 Orang	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	29 Orang	159.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					0,00					198.520.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	6773 Orang	0 Orang	6773 Orang	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	6773 Orang	198.520.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					0,00					129.920.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	29 Orang	0 Orang	29 Orang	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	29 Orang	129.920.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					2.479.000.000,00					2.158.199.790,00	
		-					2.479.000.000,00					2.158.199.790,00	
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor					100.000.000,00					24.200.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	1 Paket	24.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					1.000.000.000,00					750.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10 Paket	1.000.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	1 Paket	750.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					50.000.000,00					150.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	0 Paket	1 Paket	50.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	1 Paket	150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					99.000.000,00					99.750.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	99.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	1 Paket	99.750.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					65.000.000,00					52.499.790,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	65.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	1 Paket	52.499.790,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					15.000.000,00					31.500.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	15.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	12 Dokumen	31.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material					0,00					100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	0 Paket	1 Paket	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	1 Paket	100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu					100.000.000,00					89.250.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	12 Laporan	89.250.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					250.000.000,00					330.750.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	250.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	12 Laporan	330.750.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					100.000.000,00					0,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	100.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	1 Dokumen	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					700.000.000,00					530.250.000,00	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	700.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	12 Dokumen	530.250.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					1.917.121.622,00					3.583.950.000,00	
		-					1.917.121.622,00					3.583.950.000,00	
	1.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					0,00					600.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0 Unit	1 Unit	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	1 Unit	600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					0,00					2.400.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit	0 Unit	6 Unit	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	6 Unit	2.400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar					0,00					0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	0 Unit	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.07.0004	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor					0,00					0,00	
		Tersedianya Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	0 Unit	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					1.000.000.000,00					150.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	0 Unit	1 Unit	1.000.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	1 Unit	150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					300.000.000,00					26.250.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	300.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	1 Unit	26.250.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya					0,00					0,00	
		Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	0 Unit	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud					0,00					0,00	
		Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	0 Unit	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					174.000.000,00					182.700.000,00	
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	5 Unit	174.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	5 Unit	182.700.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					243.000.000,00					150.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	0 Unit	5 Unit	243.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	5 Unit	150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	1.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					200.121.622,00					75.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0 Unit	2 Unit	200.121.622,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	2 Unit	75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.125.000.000,00					777.074.545,00	
		-					1.125.000.000,00					777.074.545,00	
	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					12.600.000,00					10.491.390,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	12.600.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	24 Laporan	10.491.390,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					850.000.000,00					512.776.845,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	36 Laporan	850.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	36 Laporan	512.776.845,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					0,00					100.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	0 Laporan	12 Laporan	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	12 Laporan	100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					262.400.000,00					153.806.310,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	262.400.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	12 Laporan	153.806.310,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					3.689.000.000,00					2.008.730.350,00	
		-					3.689.000.000,00					2.008.730.350,00	
	1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					24.000.000,00					25.200.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	24.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	1 Unit	25.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					500.000.000,00					302.337.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	55 Unit	55 Unit	55 Unit	500.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	55 Unit	302.337.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan dan Perizinan Alat Besar					0,00					0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	0 Unit	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor					0,00					0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	0 Unit	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel					0,00					30.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 Unit	0 Unit	50 Unit	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	50 Unit	30.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					115.000.000,00					78.750.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	55 Unit	55 Unit	55 Unit	115.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	55 Unit	78.750.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya					0,00					0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	0 Unit	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud					0,00					0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	0 Unit	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					3.000.000.000,00					1.419.943.350,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	3.000.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	1 Unit	1.419.943.350,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					50.000.000,00					52.500.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	1 Unit	52.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					0,00					50.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	76 Unit	0 Unit	76 Unit	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	76 Unit	50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah					0,00					50.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	1 Ha	0 Ha	1 Ha	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	1 Ha	50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.13	Penataan Organisasi					200.000.000,00					162.353.045,00	
		-					200.000.000,00					162.353.045,00	
	1.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan					0,00					0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	2 Dokumen	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana					0,00					25.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	12 Laporan	0 Laporan	12 Laporan	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	12 Laporan	25.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi					200.000.000,00					37.353.045,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	2 Dokumen	37.353.045,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	1.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana					0,00					75.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	12 Dokumen	0 Dokumen	12 Dokumen	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	12 Dokumen	75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah					0,00					25.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	2 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	2 Dokumen	25.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**					**343.928.378.500,00**					**181.505.980.000,00**	
		Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah					***290.198.378.500,00***					***173.855.480.000,00***	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					167.243.661.700,00					93.819.290.000,00	
		-					167.243.661.700,00					93.819.290.000,00	
	1.01.02.2.01.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)					230.500.000,00					0,00	
		Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit	0 Unit	0 Unit	230.500.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	1 Unit	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU					0,00					5.500.000,00	
		Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang	0 Ruang	1 Ruang	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	1 Ruang	5.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah					2.000.000.000,00					5.500.000,00	
		Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	0 Ruang	1 Ruang	2.000.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	1 Ruang	5.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah					2.000.000.000,00					0,00	
		Ruang Perpustakaan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	0 Ruang	1 Ruang	2.000.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	1 Ruang	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah					14.094.626.900,00					454.400.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	10 Unit	10 Unit	1 Unit	14.094.626.900,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	1 Unit	454.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0007	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah					0,00					0,00	
		Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Terbangun	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	0 Unit	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU					2.000.000.000,00					0,00	
		Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Ruang	0 Ruang	1 Ruang	2.000.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	0 Ruang	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah					2.000.000.000,00					0,00	
		Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Ruang	0 Ruang	1 Ruang	2.000.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	0 Ruang	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah					2.000.000.000,00					0,00	
		Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Ruang	0 Ruang	1 Ruang	2.000.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	0 Ruang	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0013	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah					1.200.000.000,00					0,00	
		Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	0 Unit	0 Unit	1 Unit	1.200.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	0 Unit	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah					3.098.000.000,00					550.000.000,00	
		Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	1 Paket	1 Paket	1 Paket	3.098.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	1 Paket	550.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0015	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah					0,00					0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	0 Paket	0 Paket	0 Paket	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	0 Paket	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah					0,00					0,00	
		Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	0 Paket	0 Paket	0 Paket	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	0 Paket	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0019	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah					2.500.000.000,00					550.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 Unit	0 Unit	1 Unit	2.500.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	1 Unit	550.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa					1.100.000.000,00					660.000.000,00	
		Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1860 Peserta Didik	1860 Peserta Didik	800 Peserta Didik	1.100.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	1860 Peserta Didik	660.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar					0,00					0,00	
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	0 Orang	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar					893.734.800,00					220.000.000,00	
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1 Orang	1 Orang	100 Orang	893.734.800,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	1 Orang	220.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah					150.000.000,00					220.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	300 Satuan Pendidikan	150.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	1 Satuan Pendidikan	220.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					80.693.050.000,00					81.781.650.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	268 Satuan Pendidikan	80.693.050.000,00	Kota Padang	DAK Non Fisik-BOS Reguler	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	1 Satuan Pendidikan	81.781.650.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					0,00					110.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Tenaga Pengelola Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	268 Orang	268 Orang	268 Orang	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	268 Orang	110.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar					0,00					0,00	
		Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	0 Ruang	0 Ruang	0 Ruang	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	0 Ruang	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0032	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar					0,00					0,00	
		Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Ruang	0 Ruang	0 Ruang	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	0 Ruang	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0033	Pemeliharaan Mebel Sekolah					0,00					0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	0 Unit	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan					150.000.000,00					55.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	1 Orang	0 Orang	1 Orang	150.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	1 Orang	55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan					150.000.000,00					55.000.000,00	
		Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	1 Konten Digital	1 Konten Digital	1 Konten Digital	150.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	1 Konten Digital	55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan					150.000.000,00					11.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	268 Orang	0 Orang	268 Orang	150.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	268 Orang	11.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan					0,00					5.500.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	4 Dokumen	0 Dokumen	4 Dokumen	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	4 Dokumen	5.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan					0,00					5.500.000,00	
		Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	1 Dokumen	5.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan					50.000.000,00					5.500.000,00	
		Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	3 Komunitas	0 Komunitas	3 Komunitas	50.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	3 Komunitas	5.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0042	Penyediaan infrastruktur TIK					0,00					0,00	
		Tersedianya infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	0 Paket	0 Paket	0 Paket	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	0 Paket	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi					100.000.000,00					5.500.000,00	
		Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan	0 Kegiatan	1 Kegiatan	100.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	1 Kegiatan	5.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0044	Penataan Ruang/Sudut Baca					0,00					0,00	
		Ruang/Sudut Baca yang Tertata	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	0 Ruang	0 Ruang	0 Ruang	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	0 Ruang	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0045	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik					2.500.000.000,00					0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	0 Buku	0 Buku	1000 Buku	2.500.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	0 Buku	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik					900.000.000,00					0,00	
		Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	0 Paket	1000 Paket	900.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	1 Paket	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru					15.000.000.000,00					247.500.000,00	
		Ruang Kelas Baru bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	3 Ruang	3 Ruang	1 Ruang	15.000.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	3 Ruang	247.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah					9.445.000.000,00					1.100.000.000,00	
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	20 Unit	20 Unit	10 Unit	9.445.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	20 Unit	1.100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan					500.000.000,00					0,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	0 Orang	0 Orang	100 Orang	500.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	0 Orang	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik					0,00					0,00	
		Terselenggaranya Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	9 Satuan Pendidikan	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	0 Satuan Pendidikan	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah					12.474.000.000,00					1.100.000.000,00	
		Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	1 Ruang	4 Ruang	12.474.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	1 Ruang	1.100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar					5.969.750.000,00					6.451.650.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1800 Peserta Didik	1800 Peserta Didik	7458 Peserta Didik	5.969.750.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	1800 Peserta Didik	6.451.650.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik					5.895.000.000,00					220.090.000,00	
		Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	1 Paket	1 Paket	5.895.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	1 Paket	220.090.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					138.944.567.400,00					60.266.190.000,00	
		-					138.944.567.400,00					60.266.190.000,00	
	1.01.02.2.02.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)					15.000.000.000,00					550.000.000,00	
		Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit	1 Unit	1 Unit	15.000.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	1 Unit	550.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU					3.000.000.000,00					110.000.000,00	
		Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang	1 Ruang	3.000.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	1 Ruang	110.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah					2.760.000.000,00					0,00	
		Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	0 Ruang	0 Ruang	1 Ruang	2.760.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	0 Ruang	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium					2.500.000.000,00					0,00	
		Ruang Laboratorium yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	1 Ruang	0 Ruang	1 Ruang	2.500.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	1 Ruang	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0007	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula					2.500.000.000,00					0,00	
		Ruang Serba Guna/Aula yang Terbangun	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	0 Ruang	0 Ruang	1 Ruang	2.500.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	0 Ruang	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0008	Pembangunan Asrama Sekolah					0,00					0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Asrama Sekolah yang Terbangun	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	0 Unit	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0009	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah					2.000.000.000,00					0,00	
		Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Terbangun	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	0 Unit	0 Unit	1 Unit	2.000.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	0 Unit	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0010	Pembangunan Fasilitas Parkir					2.000.000.000,00					0,00	
		Fasilitas Parkir yang Terbangun	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	0 Unit	0 Unit	0 Unit	2.000.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	0 Unit	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0011	Pembangunan Kantin Sekolah					2.500.000.000,00					0,00	
		Kantin Sekolah yang Terbangun	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	0 Unit	0 Unit	1 Unit	2.500.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	0 Unit	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah					9.013.000.000,00					550.000.000,00	
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	1 Unit	2 Unit	9.013.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	1 Unit	550.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah					6.950.000.000,00					550.000.000,00	
		Ruang kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Ruang	4 Ruang	1 Ruang	6.950.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	4 Ruang	550.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah					2.000.000.000,00					0,00	
		Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Ruang	0 Ruang	1 Ruang	2.000.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	0 Ruang	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah					2.500.000.000,00					0,00	
		Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Ruang	0 Ruang	1 Ruang	2.500.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	0 Ruang	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium					2.500.000.000,00					0,00	
		Laboratorium yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	0 Ruang	1 Ruang	2.500.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	0 Ruang	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula					1.000.000.000,00					0,00	
		Ruang Serba Guna/Aula yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	0 Ruang	0 Ruang	1 Ruang	1.000.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	0 Ruang	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah					1.240.000.000,00					550.000.000,00	
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1.240.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	1 Unit	550.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah					3.180.000.000,00					1.100.000.000,00	
		Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1 Paket	1 Paket	555 Paket	3.180.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	1 Paket	1.100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah					0,00					55.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 Unit	1 Unit	3 Unit	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	1 Unit	55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama					11.256.300.000,00					12.688.240.000,00	
		Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1820 Peserta Didik	1820 Peserta Didik	9456 Peserta Didik	11.256.300.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	1820 Peserta Didik	12.688.240.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa					750.000.000,00					990.000.000,00	
		Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1878 Peserta Didik	1878 Peserta Didik	1878 Peserta Didik	750.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	1878 Peserta Didik	990.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					0,00					0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	0 Orang	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					584.367.400,00					220.000.000,00	
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1 Orang	1 Orang	100 Orang	584.367.400,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	1 Orang	220.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah					1.389.950.000,00					0,00	
		Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	246 Satuan Pendidikan	246 Satuan Pendidikan	45 Satuan Pendidikan	1.389.950.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	246 Satuan Pendidikan	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama					42.098.950.000,00					42.098.950.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	98 Satuan Pendidikan	98 Satuan Pendidikan	98 Satuan Pendidikan	42.098.950.000,00	Kota Padang	DAK Non Fisik-BOS Reguler	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	98 Satuan Pendidikan	42.098.950.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama					0,00					0,00	
		Dana BOS Sekolah Menengah Pertama yang Terkelola dengan Baik	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	306 Orang	0 Orang	0 Orang	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	306 Orang	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0046	Pemeliharaan Mebel Sekolah					0,00					0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 Unit	1 Unit	0 Unit	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	1 Unit	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan					100.000.000,00					34.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	1 Orang	0 Orang	45 Orang	100.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	1 Orang	34.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan					300.000.000,00					0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	1 Konten Digital	1 Konten Digital	1 Konten Digital	300.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	1 Konten Digital	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan					100.000.000,00					0,00	
		Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	0 Orang	0 Orang	45 Orang	100.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	0 Orang	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan					0,00					0,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	0 Dokumen	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan					0,00					0,00	
		Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	0 Dokumen	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan					0,00					0,00	
		Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	3 Komunitas	0 Komunitas	0 Komunitas	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	3 Komunitas	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi					100.000.000,00					0,00	
		Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan	0 Kegiatan	1 Kegiatan	100.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	1 Kegiatan	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0056	Penataan Ruang/Sudut Baca					0,00					0,00	
		Ruang/Sudut Baca yang Tertata	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	0 Ruang	0 Ruang	0 Ruang	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	0 Ruang	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik					0,00					0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	0 Satuan Pendidikan	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru					10.100.000.000,00					220.000.000,00	
		Ruang Kelas Baru Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1 Ruang	1 Ruang	1 Ruang	10.100.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	1 Ruang	220.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik					0,00					0,00	
		Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	0 Buku	0 Buku	0 Buku	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	0 Buku	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik					1.050.000.000,00					0,00	
		Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	100 Paket	0 Paket	1 Paket	1.050.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	100 Paket	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU					1.200.000.000,00					0,00	
		Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	0 Ruang	1 Ruang	1.200.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	1 Ruang	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik					9.272.000.000,00					550.000.000,00	
		Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	4 Paket	4 Paket	1 Paket	9.272.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	4 Paket	550.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)					29.300.949.400,00					20.915.100.000,00	
		-					29.300.949.400,00					20.915.100.000,00	
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD					3.302.252.000,00					550.000.000,00	
		Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	1 Unit	2 Unit	1 Unit	3.302.252.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	1 Unit	550.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD					574.428.200,00					0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Mebel PAUD yang Tersedia	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	1 Paket	1 Paket	0 Paket	574.428.200,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	1 Paket	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0008	Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD					0,00					0,00	
		Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia	Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia	0 Paket	0 Paket	0 Paket	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	0 Paket	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD					0,00					0,00	
		Perlengkapan PAUD yang Tersedia	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	0 Paket	0 Paket	0 Paket	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	0 Paket	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD					0,00					0,00	
		Biaya Personil Peserta Didik PAUD Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	0 Peserta Didik	0 Peserta Didik	0 Peserta Didik	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	0 Peserta Didik	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD					6.600.000.000,00					9.900.000.000,00	
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	1100 Orang	1100 Orang	1100 Orang	6.600.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	1100 Orang	9.900.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD					1.530.000.000,00					770.000.000,00	
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	200 Orang	200 Orang	450 Orang	1.530.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	200 Orang	770.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD					950.000.000,00					0,00	
		Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	5 Satuan Pendidikan	5 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	950.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	5 Satuan Pendidikan	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD					8.648.100.000,00					8.648.100.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	117 Satuan Pendidikan	117 Satuan Pendidikan	500 Satuan Pendidikan	8.648.100.000,00	Kota Padang	DAK Non Fisik-BOS Reguler	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	117 Satuan Pendidikan	8.648.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD					300.000.000,00					0,00	
		Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	0 Orang	0 Orang	0 Orang	300.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	0 Orang	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0020	Pemeliharaan Mebel Sekolah					200.000.000,00					0,00	
		Terpeliharanya Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dipelihara	0 Unit	0 Unit	0 Unit	200.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	0 Unit	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0022	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan					0,00					0,00	
		Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	0 Orang	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0023	Pengembangan konten digital untuk pendidikan					0,00					0,00	
		Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	0 Konten Digital	0 Konten Digital	0 Konten Digital	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	0 Konten Digital	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan					0,00					11.000.000,00	
		Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	1 Orang	0 Orang	1 Orang	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	1 Orang	11.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan					0,00					0,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	0 Dokumen	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan					300.000.000,00					22.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	1 Dokumen	22.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU					500.000.000,00					220.000.000,00	
		Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang	0 Ruang	1 Ruang	500.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	1 Ruang	220.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan					300.000.000,00					22.000.000,00	
		Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	1 Komunitas	0 Komunitas	1 Komunitas	300.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	1 Komunitas	22.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru					2.500.000.000,00					0,00	
		Ruang Kelas Baru bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	0 Ruang	0 Ruang	2.500.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	0 Ruang	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0031	Penyediaan infrastruktur TIK					250.000.000,00					0,00	
		Tersedianya infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	0 Paket	0 Paket	0 Paket	250.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	0 Paket	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0032	Penataan Ruang/Sudut Baca					0,00					0,00	
		Ruang/Sudut Baca yang Tertata	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	0 Ruang	0 Ruang	0 Ruang	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	0 Ruang	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0033	Pembangunan Perpustakaan Sekolah					0,00					0,00	
		Perpustakaan Sekolah yang terbangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	0 Ruang	0 Ruang	0 Ruang	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	0 Ruang	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0034	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik					100.000.000,00					0,00	
		Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	0 Peserta didik	0 Peserta didik	0 Peserta didik	100.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	0 Peserta didik	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	1.01.02.2.03.0035	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik					0,00					0,00	
		Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	0 Buku	0 Buku	0 Buku	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	0 Buku	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0036	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah					0,00					0,00	
		Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Ruang	0 Ruang	0 Ruang	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	0 Ruang	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0037	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi					50.000.000,00					33.000.000,00	
		Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan	0 Kegiatan	1 Kegiatan	50.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	1 Kegiatan	33.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0038	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula					0,00					0,00	
		Ruang Serba Guna/Aula yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	0 Ruang	0 Ruang	0 Ruang	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	0 Ruang	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan					0,00					0,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	0 Orang	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)					0,00					0,00	
		Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	0 Unit	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik					500.000.000,00					299.000.000,00	
		Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	1 Paket	125 Paket	500.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	1 Paket	299.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0042	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah					1.166.169.200,00					220.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1.166.169.200,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	1 Unit	220.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD					1.530.000.000,00					220.000.000,00	
		Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1.530.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	1 Paket	220.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan					8.439.200.000,00					6.505.400.000,00	
		-					8.439.200.000,00					6.505.400.000,00	
	1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan					0,00					0,00	
		Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan diterima oleh peserta didik	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	0 Peserta Didik	0 Peserta Didik	0 Peserta Didik	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	0 Peserta Didik	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan					492.000.000,00					492.000.000,00	
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	164 Orang	164 Orang	0 Orang	492.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	164 Orang	492.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan					0,00					0,00	
		Pendidik dan tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	0 Orang	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan					1.120.000.000,00					541.200.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	3 Satuan Pendidikan	3 Satuan Pendidikan	164 Satuan Pendidikan	1.120.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	3 Satuan Pendidikan	541.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan					5.107.200.000,00					5.107.200.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	24 Satuan Pendidikan	24 Satuan Pendidikan	27 Satuan Pendidikan	5.107.200.000,00	Kota Padang	DAK Non Fisik-BOS Reguler	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	24 Satuan Pendidikan	5.107.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	1.01.02.2.04.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan					50.000.000,00					0,00	
		Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	0 Orang	0 Orang	0 Orang	50.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	0 Orang	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0021	Pemeliharaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan					0,00					200.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan	0 Unit	0 Unit	24 Unit	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	0 Unit	200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0024	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan					0,00					0,00	
		Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	0 Orang	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0025	Pengembangan konten digital untuk pendidikan					0,00					0,00	
		Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	0 Konten Digital	0 Konten Digital	0 Konten Digital	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	0 Konten Digital	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0026	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan					20.000.000,00					0,00	
		Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	0 Orang	0 Orang	0 Orang	20.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	0 Orang	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan					0,00					0,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	0 Dokumen	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0028	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan					50.000.000,00					0,00	
		Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	50.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	1 Dokumen	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0030	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan					50.000.000,00					0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	0 Komunitas	0 Komunitas	0 Komunitas	50.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	0 Komunitas	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0031	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi					50.000.000,00					0,00	
		Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	50.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	0 Kegiatan	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0032	Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan					0,00					0,00	
		Pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang mendapat sertifikat kompetensi	Pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang mendapat sertifikat kompetensi	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	0 Orang	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0033	Penyediaan infrastruktur TIK					0,00					0,00	
		Tersedianya infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	0 Paket	0 Paket	0 Paket	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	0 Paket	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0034	Penataan Ruang/Sudut Baca					0,00					0,00	
		Ruang/Sudut Baca yang Tertata	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	0 Ruang	0 Ruang	0 Ruang	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	0 Ruang	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0035	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik					0,00					0,00	
		Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	0 Peserta Didik	0 Peserta Didik	0 Peserta Didik	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	0 Peserta Didik	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0036	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik					200.000.000,00					165.000.000,00	
		Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	200 Paket	200 Paket	138 Paket	200.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	200 Paket	165.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0037	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik					0,00					0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	0 Buku	0 Buku	0 Buku	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	0 Buku	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0038	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU					0,00					0,00	
		Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	2 Ruang	0 Ruang	0 Ruang	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	2 Ruang	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0039	Pembangunan Ruang Kelas Baru					0,00					0,00	
		Ruang Kelas Baru bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	0 Ruang	0 Ruang	0 Ruang	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	0 Ruang	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0040	Pengadaan Perlengkapan Sekolah					0,00					0,00	
		Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	0 Paket	0 Paket	0 Paket	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	0 Paket	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0041	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah					1.000.000.000,00					0,00	
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Unit	0 Unit	0 Unit	1.000.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	0 Unit	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0042	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan					0,00					0,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	0 Orang	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0043	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium					0,00					0,00	
		Ruang Laboratorium yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Ruang	0 Ruang	0 Ruang	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	0 Ruang	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0044	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)					0,00					0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	0 Unit	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0045	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah					0,00					0,00	
		Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	0 Paket	0 Paket	0 Paket	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	0 Paket	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik					0,00					0,00	
		Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	0 Peserta Didik	0 Peserta Didik	0 Peserta Didik	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	0 Peserta Didik	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0047	Pembangunan Ruang Laboratorium					0,00					0,00	
		Ruang Laboratorium yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	0 Ruang	0 Ruang	0 Ruang	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	0 Ruang	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0048	Pengadaan Mebel Sekolah					0,00					0,00	
		Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	0 Paket	0 Paket	0 Paket	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	0 Paket	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0049	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah					0,00					0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	0 Unit	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0061	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah					300.000.000,00					0,00	
		Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	0 Ruang	0 Ruang	300.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	1 Ruang	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3.	**1.01.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**					**350.000.000,00**					**100.000.000,00**	
		Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan					***350.000.000,00***					***50.000.000,00***	
	1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar					0,00					50.000.000,00	
		-					0,00					50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	1.01.03.2.01.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar					0,00					0,00	
		Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar Tersusun	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	0 Dokumen	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.03.2.01.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar					0,00					0,00	
		Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar Tersedia	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	0 Buku	0 Buku	0 Buku	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	0 Buku	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar					0,00					0,00	
		Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Meningkat Kompetensinya	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	0 Orang	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar					0,00					0,00	
		Buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar yang telah dinilai/ditelaah	Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar yang telah dinilai/ditelaah	0 Buku	0 Buku	0 Buku	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	0 Buku	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.03.2.01.0006	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar					0,00					50.000.000,00	
		Tersusunnya model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar yang tersusun	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	1 Dokumen	50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.03.2.01.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar					0,00					0,00	
		Tersusunnya Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	0 Dokumen	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal					350.000.000,00					50.000.000,00	
		-					350.000.000,00					50.000.000,00	
	1.01.03.2.02.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal					50.000.000,00					0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Tersusun	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	50.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	0 Dokumen	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.03.2.02.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal					0,00					0,00	
		Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Tersedia	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia	Buku	0 Buku	0 Buku	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	0 Buku	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.03.2.02.0004	Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal					0,00					0,00	
		Buku teks muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang telah dinilai/ditelaah	Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang telah dinilai	0 Buku	0 Buku	0 Buku	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	0 Buku	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.03.2.02.0005	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal					200.000.000,00					50.000.000,00	
		Tersusunnya model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	200.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	6 Dokumen	50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.03.2.02.0006	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal					100.000.000,00					0,00	
		Tersusunnya Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	100.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	0 Dokumen	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
4.	**1.01.04**	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**					**0,00**					**110.000.000,00**	
		Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan					***0,00***					***55.000.000,00***	
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan					0,00					110.000.000,00	
		-					0,00					110.000.000,00	
	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan					0,00					55.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	1 Dokumen	55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan					0,00					55.000.000,00	
		Terlaksananya Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	1 Laporan	55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
5.	**1.01.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**					**0,00**					**0,00**	
	1.01.05.2.01	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					0,00					0,00	
		-					0,00					0,00	
	1.01.05.2.01.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					0,00					0,00	
		Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Terverifikasi	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	-	-	0 Dokumen	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.05.2.01.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					0,00					0,00	
		Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	-	-	0 Dokumen	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					0,00					0,00	
		-					0,00					0,00	
	1.01.05.2.02.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					0,00					0,00	
		Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Terverifikasi	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	-	-	0 Dokumen	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.05.2.02.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					0,00					0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	-	-	0 Dokumen	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.05.2.02.0003	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					0,00					0,00	
		Terlaksananya Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	-	-	0 Dokumen	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**9.383.000.000,00**					**839.300.000,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**					**9.383.000.000,00**					**839.300.000,00**	
6.	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**					**5.165.000.000,00**					**770.000.000,00**	
		Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan					***5.165.000.000,00***					***748.000.000,00***	
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota					2.225.000.000,00					330.000.000,00	
		-					2.225.000.000,00					330.000.000,00	
	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan					1.225.000.000,00					22.000.000,00	
		Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	1 Objek	1 Objek	1 Objek	1.225.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	1 Objek	22.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan					1.000.000.000,00					308.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	175 Orang	175 Orang	175 Orang	1.000.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	175 Orang	308.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota					1.155.000.000,00					418.000.000,00	
		-					1.155.000.000,00					418.000.000,00	
	2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya					1.155.000.000,00					418.000.000,00	
		Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	1 Objek	1 Objek	1 Objek	1.155.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	1 Objek	418.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	2.22.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan					0,00					0,00	
		Tersedianya Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	0 Sertifikat	0 Sertifikat	0 Sertifikat	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	0 Sertifikat	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota					1.785.000.000,00					22.000.000,00	
		-					1.785.000.000,00					22.000.000,00	
	2.22.02.2.03.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat					300.000.000,00					0,00	
		Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	0 Objek	0 Objek	0 Objek	300.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	0 Objek	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.03.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat					245.000.000,00					0,00	
		Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	0 Orang	0 Orang	0 Orang	245.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	0 Orang	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat					1.240.000.000,00					22.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1.240.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	1 Unit	22.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
7.	**2.22.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**					**1.368.000.000,00**					**0,00**	
	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota					1.368.000.000,00					0,00	
		-					1.368.000.000,00					0,00	
	2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional					468.000.000,00					0,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	-	-	0 Orang	468.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.03.2.01.0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan					500.000.000,00					0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Tersedianya Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi	-	-	0 Sertifikat	500.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional					400.000.000,00					0,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-	-	0 Lembaga	400.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
8.	**2.22.04**	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**					**800.000.000,00**					**0,00**	
	2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					800.000.000,00					0,00	
		-					800.000.000,00					0,00	
	2.22.04.2.01.0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota					100.000.000,00					0,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	-	-	0 Orang	100.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.04.2.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah					700.000.000,00					0,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Sejarah yang Diakses Masyarakat	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	-	-	0 Dokumen	700.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
9.	**2.22.05**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**					**750.000.000,00**					**36.300.000,00**	
		Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan					***600.000.000,00***					***18.150.000,00***	
	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota					150.000.000,00					0,00	
		-					150.000.000,00					0,00	
	2.22.05.2.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya					0,00					0,00	
		Terlaksananya Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	0 Objek	0 Objek	0 Objek	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	0 Objek	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya					150.000.000,00					0,00	
		Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	0 Objek	0 Objek	0 Objek	150.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	0 Objek	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota					600.000.000,00					36.300.000,00	
		-					600.000.000,00					36.300.000,00	
	2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya					150.000.000,00					0,00	
		Terlaksananya Cagar Budaya yang Dilindungi	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	0 Objek	0 Objek	0 Objek	150.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	0 Objek	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya					250.000.000,00					18.150.000,00	
		Terlaksanakannya Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	1 Objek	0 Objek	1 Objek	250.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	1 Objek	18.150.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.02.0003	Pemanfaatan Cagar Budaya					200.000.000,00					18.150.000,00	
		Terlaksananya Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	1 Objek	1 Objek	1 Objek	200.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	1 Objek	18.150.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
10.	**2.22.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**					**1.300.000.000,00**					**33.000.000,00**	
		Meningkatnya tata kelola museum					***1.100.000.000,00***					***11.000.000,00***	
	2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota					1.300.000.000,00					33.000.000,00	
		-					1.300.000.000,00					33.000.000,00	
	2.22.06.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu					400.000.000,00					0,00	
		Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	0 Unit	0 Unit	0 Unit	400.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	0 Unit	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.06.2.01.0002	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman					200.000.000,00					11.000.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	Orang	1 Orang	1 Orang	200.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	1 Orang	11.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.06.2.01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum					200.000.000,00					11.000.000,00	
		Meningkatnya Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	1 Unit	0 Unit	1 Unit	200.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	1 Unit	11.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.06.2.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum					0,00					11.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	Unit	1 Unit	1 Unit	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	Unit	11.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.06.2.01.0005	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum					500.000.000,00					0,00	
		Terlaksananya Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	0 Unit	0 Unit	0 Unit	500.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	0 Unit	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		DINAS KESEHATAN					**380.092.018.433,00**					**465.806.166.684,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**380.092.018.433,00**					**465.806.166.684,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**					**380.092.018.433,00**					**465.806.166.684,00**	
11.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**297.798.154.633,00**					**358.083.669.769,00**	
		Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah					***297.326.154.633,00***					***357.965.669.769,00***	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					35.000.000,00					131.000.000,00	
		-					35.000.000,00					131.000.000,00	
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2.000.000,00					10.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 Dokumen	10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					5.000.000,00					20.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	1 Dokumen	20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					7.000.000,00					20.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	7.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	1 Dokumen	20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					7.000.000,00					10.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	7.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	1 Dokumen	10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					7.000.000,00					10.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	7.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	1 Dokumen	10.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					2.000.000,00					10.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	1 Laporan	10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					5.000.000,00					51.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	1 Laporan	51.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					257.862.950.233,00					314.943.797.669,00	
		-					257.862.950.233,00					314.943.797.669,00	
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					256.562.950.333,00					313.293.797.669,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2707 Orang/bulan	2120 Orang/bulan	2132 Orang/bulan	256.562.950.333,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	2455 Orang/bulan	313.293.797.669,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					1.299.999.900,00					1.650.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.299.999.900,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	12 Dokumen	1.650.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					2.299.363.400,00					2.230.514.100,00	
		-					2.299.363.400,00					2.230.514.100,00	
	1.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					2.277.363.400,00					2.206.514.100,00	
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.277.363.400,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	12 Dokumen	2.206.514.100,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					22.000.000,00					24.000.000,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	22.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	12 Laporan	24.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					872.500.000,00					929.100.000,00	
		-					872.500.000,00					929.100.000,00	
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor					27.500.000,00					28.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	27.500.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	1 Paket	28.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					300.000.000,00					350.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	300.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	1 Paket	350.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	1 Paket	1 Paket	300.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	1 Paket	350.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					11.000.000,00					11.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	1 Paket	1 Paket	11.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	0 Paket	11.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	11.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	1 Paket	11.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					190.000.000,00					195.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	190.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	1 Paket	195.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	1 Paket	1 Paket	190.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	0 Paket	195.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					20.000.000,00					20.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	0 Paket	2 Paket	20.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	0 Paket	20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	20.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	2 Paket	20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					2.000.000,00					2.100.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	24 Dokumen	24 Dokumen	2.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	24 Dokumen	2.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu					22.000.000,00					23.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	22.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	12 Laporan	23.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	0 Laporan	12 Laporan	22.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	0 Laporan	23.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					300.000.000,00					300.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	300.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	12 Laporan	300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					122.000.000,00					48.000.000,00	
		-					122.000.000,00					48.000.000,00	
	1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					100.000.000,00					24.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	6 Unit	50 Unit	100.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	5 Unit	24.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					22.000.000,00					24.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	9 Unit	9 Unit	22.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	9 Unit	24.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.105.000.000,00					1.106.000.000,00	
		-					1.105.000.000,00					1.106.000.000,00	
	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					5.000.000,00					6.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	1 Laporan	6.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					1.100.000.000,00					1.100.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.100.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	12 Laporan	1.100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					4.586.000.000,00					4.688.383.000,00	
		-					4.586.000.000,00					4.688.383.000,00	
	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					36.000.000,00					26.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	36.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	1 Unit	26.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					1.700.000.000,00					1.600.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	37 Unit	37 Unit	93 Unit	1.700.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	37 Unit	1.600.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	93 Unit	93 Unit	93 Unit	1.700.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	93 Unit	1.600.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel					100.000.000,00					387.200.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	140 Unit	140 Unit	105 Unit	100.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	140 Unit	387.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					150.000.000,00					242.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	370 Unit	307 Unit	330 Unit	150.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	360 Unit	242.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 Unit	9 Unit	330 Unit	150.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	9 Unit	242.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					2.600.000.000,00					2.433.183.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	7 Unit	2 Unit	2.600.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	7 Unit	2.433.183.000,00	DINAS KESEHATAN
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2.600.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	2 Unit	2.433.183.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD					30.915.341.000,00					34.006.875.000,00	
		-					30.915.341.000,00					34.006.875.000,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					30.915.341.000,00					34.006.875.000,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	24 Unit Kerja	30.915.341.000,00	Kota Padang	Pendapatan dari BLUD	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	1 Unit Kerja	34.006.875.000,00	DINAS KESEHATAN
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	24 Unit Kerja	24 Unit Kerja	24 Unit Kerja	30.915.341.000,00	Kota Padang	Pendapatan dari BLUD	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	24 Unit Kerja	34.006.875.000,00	DINAS KESEHATAN
12.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**					**81.287.318.300,00**					**105.875.939.915,00**	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat					***81.000.598.300,00***					***105.378.939.915,00***	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					8.242.000.000,00					8.242.188.038,00	
		-					8.242.000.000,00					8.242.188.038,00	
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas					2.777.000.000,00					2.467.352.038,00	
		Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	5 Unit	5 Unit	6 Unit	2.777.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	5 Unit	2.467.352.038,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya					50.000.000,00					300.000.000,00	
		Tersedianya Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	5 Unit	6 Unit	5 Unit	50.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	5 Unit	300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan					405.000.000,00					500.000.000,00	
		Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	51 Unit	20 Unit	51 Unit	405.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	51 Unit	500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	18 Unit	16 Unit	51 Unit	405.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	18 Unit	500.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan					5.000.000.000,00					4.964.836.000,00	
		Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	5.000.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	1 Paket	4.964.836.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan					10.000.000,00					10.000.000,00	
		Terlaksananya distribusi Alat Kesehatan, Obat,Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	1 Paket	10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					72.953.778.300,00					97.435.751.877,00	
		-					72.953.778.300,00					97.435.751.877,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					219.932.500,00					2.000.000.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	13369 Orang	13369 Orang	15658 Orang	219.932.500,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	13369 Orang	2.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					50.000.000,00					139.912.058,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	16692 Orang	15314 Orang	15658 Orang	50.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	16002 Orang	139.912.058,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir					283.626.000,00					96.000.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	15525 Orang	14878 Orang	15039 Orang	283.626.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	15201 Orang	96.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita					21.047.000,00					88.112.200,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	49197 Orang	36078 Orang	39357 Orang	21.047.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	42637 Orang	88.112.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					3.821.000,00					1.050.148.405,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	57177 Orang	57177 Orang	73513 Orang	3.821.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	96018 Orang	1.050.148.405,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif					30.000.000,00					35.000.000,00	
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	668916 Orang	617975 Orang	630335 Orang	30.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	642941 Orang	35.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					6.720.000,00					97.820.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	85920 Orang	68736 Orang	74464 Orang	6.720.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	80192 Orang	97.820.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi					24.200.000,00					26.620.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	65727 Orang	61744 Orang	62361 Orang	24.200.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	62984 Orang	26.620.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus					34.087.500,00					2.850.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	18833 Orang	17747 Orang	17925 Orang	34.087.500,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	18104 Orang	2.850.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					270.000.000,00					4.350.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	2169 Orang	2052 Orang	2077 Orang	270.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	2102 Orang	4.350.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					101.800.000,00					3.806.102.443,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	13414 Orang	21185 Orang	18279 Orang	101.800.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	16211 Orang	3.806.102.443,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV					51.800.000,00					125.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	23000 Orang	22000 Orang	22000 Orang	51.800.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	23000 Orang	125.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)					30.000.000,00					30.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	7 Dokumen	8 Dokumen	7 Dokumen	30.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	7 Dokumen	30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana					10.000.000,00					30.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	4 Dokumen	3 Dokumen	4 Dokumen	10.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	4 Dokumen	30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					338.090.000,00					3.700.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	338.090.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	1 Dokumen	3.700.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					121.312.500,00					1.680.004.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	121.312.500,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	12 Dokumen	1.680.004.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan					40.000.000,00					100.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	1 Dokumen	100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	12 Dokumen	100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya					2.910.000,00					35.000.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	2.910.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	20 Dokumen	35.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					70.000.000,00					345.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	36 Dokumen	34 Dokumen	36 Dokumen	70.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	36 Dokumen	345.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA					15.500.000,00					15.500.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Penyalahguna NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	40 Orang	40 Orang	40 Orang	15.500.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	40 Orang	15.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat					70.388.488.000,00					65.000.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	26 Dokumen	26 Dokumen	26 Dokumen	70.388.488.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	26 Dokumen	65.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	26 Dokumen	70.388.488.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	12 Dokumen	65.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat					300.000.000,00					300.000.000,00	
		Terselenggaranya Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	1 Dokumen	300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas					50.000.000,00					2.900.000.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	1 Dokumen	2.900.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					50.000.000,00					200.500.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	50.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	12 Dokumen	200.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah					20.000.000,00					110.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Terlaksananya Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	52 Dokumen	52 Dokumen	52 Dokumen	20.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	52 Dokumen	110.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)					68.150.800,00					425.000.000,00	
		Tersedia dan Terkelolanya Public Safety Center (PSC 119) yang Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit	1 Unit	1 Unit	68.150.800,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	1 Unit	425.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis					10.000.000,00					25.000.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2484 Orang	3923 Orang	3385 Orang	10.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	3002 Orang	25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)					10.000.000,00					22.000.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	250 Orang	290 Orang	280 Orang	10.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	270 Orang	22.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria					5.000.000,00					11.500.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	10 Orang	10 Orang	10 Orang	5.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	10 Orang	11.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok					9.355.000,00					50.000.000,00	
		Terlaksananya penerapan kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	6 Tatanan	6 Tatanan	6 Tatanan	9.355.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	6 Tatanan	50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					6.720.000,00					152.732.771,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	6.720.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	12 Dokumen	152.732.771,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak					17.468.000,00					110.000.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	17.468.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	12 Dokumen	110.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi					31.800.000,00					1.536.300.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	26 Dokumen	26 Dokumen	26 Dokumen	31.800.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	26 Dokumen	1.536.300.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0050	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji					10.000.000,00					13.500.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	2 Dokumen	13.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi					10.000.000,00					45.000.000,00	
		-					10.000.000,00					45.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan					10.000.000,00					45.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	1 Dokumen	45.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					81.540.000,00					153.000.000,00	
		-					81.540.000,00					153.000.000,00	
	1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya					11.112.000,00					5.000.000,00	
		Tersedianya Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	3 Unit	6 Unit	6 Unit	11.112.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	2 Unit	5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					17.728.000,00					18.000.000,00	
		Meningkatnya Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	27 Unit	27 Unit	27 Unit	17.728.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	27 Unit	18.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan					52.700.000,00					130.000.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	1 Unit	1 Unit	101 Unit	52.700.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	1 Unit	130.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	101 Unit	101 Unit	101 Unit	52.700.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	101 Unit	130.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		-					72.953.778.300,00					97.435.751.877,00	
	1.02.02.2.02.0053	Pengambilan, Pemeriksaan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional					0,00					22.000.000,00	
		Terdistribusinya Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	-	-	58 Paket	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	-	22.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0054	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja					1.950.000,00					165.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-	-	2 Laporan	1.950.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	-	165.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular					200.000.000,00					850.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-	-	1 Laporan	200.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	-	850.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular					50.000.000,00					4.930.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-	-	1 Laporan	50.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	-	4.930.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0059	Deteksi Dini Kesehatan Jiwa dan Penyalahgunaan Napza di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah					0,00					12.000.000,00	
		Terlaksananya Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	-	-	4600 Orang	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	-	12.000.000,00	DINAS KESEHATAN
13.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**					**55.000.000,00**					**638.677.600,00**	
		Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan					***55.000.000,00***					***638.677.600,00***	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota					50.000.000,00					200.000.000,00	
		-					50.000.000,00					200.000.000,00	
	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan					50.000.000,00					200.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	24 Dokumen	24 Dokumen	24 Dokumen	50.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	24 Dokumen	200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					5.000.000,00					438.677.600,00	
		-					5.000.000,00					438.677.600,00	
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					5.000.000,00					438.677.600,00	
		Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	210 Orang	120 Orang	150 Orang	5.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	180 Orang	438.677.600,00	DINAS KESEHATAN
		Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	20 Orang	0 Orang	150 Orang	5.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	20 Orang	438.677.600,00	DINAS KESEHATAN
14.	**1.02.04**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**					**99.085.000,00**					**257.879.400,00**	
		Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman					***99.085.000,00***					***257.879.400,00***	
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)					25.000.000,00					64.936.400,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		-					25.000.000,00					64.936.400,00	
	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)					25.000.000,00					64.936.400,00	
		Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	60 Dokumen	60 Dokumen	60 Dokumen	25.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	60 Dokumen	64.936.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga					38.210.000,00					30.000.000,00	
		-					38.210.000,00					30.000.000,00	
	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga					38.210.000,00					30.000.000,00	
		Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	12 Dokumen	12 Dokumen	1 Dokumen	38.210.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	0 Dokumen	30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan					15.875.000,00					25.000.000,00	
		-					15.875.000,00					25.000.000,00	
	1.02.04.2.05.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan					15.875.000,00					25.000.000,00	
		Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	15.875.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	3 Dokumen	25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga					20.000.000,00					137.943.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		-					20.000.000,00					137.943.000,00	
	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan					20.000.000,00					137.943.000,00	
		Terlaksananya Pemeriksaan Post Market pada Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	40 Unit	40 Unit	40 Unit	20.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	40 Unit	137.943.000,00	DINAS KESEHATAN
15.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**					**852.460.500,00**					**950.000.000,00**	
		Meningkatnya kualitas perberdayaan masyarakat di bidang kesehatan					***852.460.500,00***					***950.000.000,00***	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					823.110.500,00					700.000.000,00	
		-					823.110.500,00					700.000.000,00	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat					823.110.500,00					700.000.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	823.110.500,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	1 Dokumen	700.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					29.350.000,00					250.000.000,00	
		-					29.350.000,00					250.000.000,00	
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat					29.350.000,00					250.000.000,00	
		Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	29.350.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	1 Dokumen	250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		RSUD Dr. RASIDIN					**56.640.100.756,00**					**2.075.893.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**56.640.100.756,00**					**2.075.893.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**					**56.640.100.756,00**					**2.075.893.000.000,00**	
16.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**55.740.100.756,00**					**1.741.046.535.528,00**	
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					181.400.000,00					281.400.000,00	
		-					181.400.000,00					281.400.000,00	
	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					181.400.000,00					281.400.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	12 Dokumen	181.400.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	-	281.400.000,00	RSUD Dr. RASIDIN
	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					703.604.200,00					1.403.604.200,00	
		-					703.604.200,00					1.403.604.200,00	
	1.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					703.604.200,00					1.403.604.200,00	
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	12 Dokumen	703.604.200,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	-	1.403.604.200,00	RSUD Dr. RASIDIN
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					32.400.000,00					246.300.000,00	
		-					32.400.000,00					246.300.000,00	
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor					0,00					39.230.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	-	1 Paket	0,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Kuranji || Kelurahan Sungai Sapih || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	-	39.230.000,00	RSUD Dr. RASIDIN
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					0,00					132.070.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-	1 Paket	0,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Kuranji || Kelurahan Sungai Sapih || 0	-	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	-	132.070.000,00	RSUD Dr. RASIDIN
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					0,00					0,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	-	1 Paket	0,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Kuranji || Kelurahan Sungai Sapih || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	-	0,00	RSUD Dr. RASIDIN
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					32.400.000,00					75.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	12 Laporan	32.400.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Kuranji || Kelurahan Sungai Sapih || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	-	75.000.000,00	RSUD Dr. RASIDIN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.829.991.156,00					4.080.000.628,00	
		-					2.829.991.156,00					4.080.000.628,00	
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					2.829.991.156,00					4.080.000.628,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	-	12 Laporan	2.829.991.156,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	-	4.080.000.628,00	RSUD Dr. RASIDIN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.992.705.400,00					3.821.706.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		-					1.992.705.400,00					3.821.706.000,00	
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					475.706.000,00					475.706.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	-	37 Unit	475.706.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	-	475.706.000,00	RSUD Dr. RASIDIN
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					267.000.000,00					300.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	-	9 Unit	267.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	-	300.000.000,00	RSUD Dr. RASIDIN
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					1.249.999.400,00					3.046.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	7 Unit	1.249.999.400,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Kuranji || Kelurahan Sungai Sapih || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	-	3.046.000.000,00	RSUD Dr. RASIDIN
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD					50.000.000.000,00					1.731.213.524.700,00	
		-					50.000.000.000,00					1.731.213.524.700,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					50.000.000.000,00					1.731.213.524.700,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	-	1 Unit Kerja	50.000.000.000,00	Kota Padang	Pendapatan dari BLUD	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	-	1.731.213.524.700,00	RSUD Dr. RASIDIN
17.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**					**900.000.000,00**					**334.814.964.472,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					700.000.000,00					332.574.964.472,00	
		-					700.000.000,00					332.574.964.472,00	
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan					100.000.000,00					1.000.000.000,00	
		Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	-	-	16 Unit	100.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Kuranji || Kelurahan Sungai Sapih || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	-	1.000.000.000,00	RSUD Dr. RASIDIN
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan					0,00					800.000.000,00	
		Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	-	-	7 Unit	0,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Kuranji || Kelurahan Sungai Sapih || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	-	800.000.000,00	RSUD Dr. RASIDIN
	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit					600.000.000,00					329.774.964.472,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Tersedianya Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	-	-	1 Unit	600.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Kuranji || Kelurahan Sungai Sapih || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	-	329.774.964.472,00	RSUD Dr. RASIDIN
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan					0,00					1.000.000.000,00	
		Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	-	-	1 Paket	0,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Kuranji || Kelurahan Sungai Sapih || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	-	1.000.000.000,00	RSUD Dr. RASIDIN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					200.000.000,00					2.145.000.000,00	
		-					200.000.000,00					2.145.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					0,00					600.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	-	12 Dokumen	0,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Kuranji || Kelurahan Sungai Sapih || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	-	600.000.000,00	RSUD Dr. RASIDIN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan					0,00					50.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	-	-	12 Dokumen	0,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Kuranji || Kelurahan Sungai Sapih || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	-	50.000.000,00	RSUD Dr. RASIDIN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat					200.000.000,00					1.495.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	-	-	12 Dokumen	200.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Kuranji || Kelurahan Sungai Sapih || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	-	1.495.000.000,00	RSUD Dr. RASIDIN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi					0,00					50.000.000,00	
		-					0,00					50.000.000,00	
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan					0,00					50.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	-	1 Dokumen	0,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Kuranji || Kelurahan Sungai Sapih || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	-	50.000.000,00	RSUD Dr. RASIDIN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					0,00					45.000.000,00	
		-					0,00					45.000.000,00	
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan					0,00					45.000.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	-	-	1 Unit	0,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Kuranji || Kelurahan Sungai Sapih || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	-	45.000.000,00	RSUD Dr. RASIDIN
18.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**					**0,00**					**31.500.000,00**	
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					0,00					31.500.000,00	
		-					0,00					31.500.000,00	
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					0,00					31.500.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	-	-	20 Orang	0,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Kuranji || Kelurahan Sungai Sapih || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	-	31.500.000,00	RSUD Dr. RASIDIN
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					**147.435.144.725,00**					**208.099.652.613,39**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**147.435.144.725,00**					**208.099.652.613,39**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**					**147.435.144.725,00**					**208.099.652.613,39**	
19.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**24.431.790.785,00**					**24.540.092.850,00**	
		Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah					***24.431.790.785,00***					***24.436.592.850,00***	
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					2.880.000,00					7.000.000,00	
		-					2.880.000,00					7.000.000,00	
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2.880.000,00					3.500.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Dokumen	2 Dokumen	2.880.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	3 Dokumen	3.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					0,00					3.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Laporan	2 Laporan	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Laporan	3.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					17.010.961.385,00					18.210.866.850,00	
		-					17.010.961.385,00					18.210.866.850,00	
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					16.439.515.385,00					17.515.946.850,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	164 Orang/bulan	156 Orang/bulan	130 Orang/bulan	16.439.515.385,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	164 Orang/bulan	17.515.946.850,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					571.446.000,00					691.920.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	571.446.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	1 Dokumen	691.920.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					0,00					3.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	1 Laporan	3.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					925.512.300,00					571.383.800,00	
		-					925.512.300,00					571.383.800,00	
	1.03.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					925.512.300,00					571.383.800,00	
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	925.512.300,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Dokumen	571.383.800,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					965.613.700,00					878.799.400,00	
		-					965.613.700,00					878.799.400,00	
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor					25.107.400,00					30.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Paket	1 Paket	25.107.400,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Paket	30.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					149.212.800,00					200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Paket	1 Paket	149.212.800,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Paket	200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					325.676.000,00					80.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	325.676.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Paket	80.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					154.529.400,00					154.529.400,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	154.529.400,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Paket	154.529.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					30.220.000,00					0,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Dokumen	30 Dokumen	30.220.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Dokumen	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu					40.130.000,00					0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Laporan	1 Laporan	40.130.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Laporan	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					194.980.500,00					344.270.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	194.980.500,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Laporan	344.270.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					45.757.600,00					70.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	45.757.600,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Dokumen	70.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					289.139.600,00					300.000.000,00	
		-					289.139.600,00					300.000.000,00	
	1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					64.139.600,00					0,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	0 Unit	10 Unit	64.139.600,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Unit	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					225.000.000,00					300.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0 Unit	3 Unit	225.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	0 Unit	300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					516.834.000,00					403.680.000,00	
		-					516.834.000,00					403.680.000,00	
	1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					5.670.000,00					6.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Laporan	1 Laporan	5.670.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Laporan	6.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					511.164.000,00					397.680.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	511.164.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Laporan	397.680.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					4.720.849.800,00					4.168.362.800,00	
		-					4.720.849.800,00					4.168.362.800,00	
	1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					36.000.000,00					0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	0 Unit	1 Unit	36.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Unit	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					1.421.050.000,00					1.364.450.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	76 Unit	76 Unit	76 Unit	1.421.050.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	76 Unit	1.364.450.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan dan Perizinan Alat Besar					1.800.000.000,00					2.050.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	9 Unit	9 Unit	9 Unit	1.800.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	9 Unit	2.050.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel					0,00					0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	100 Unit	0 Unit	0 Unit	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	100 Unit	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					167.950.000,00					100.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	Unit	0 Unit	167.950.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	100 Unit	100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					1.045.849.800,00					553.912.800,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	2 Unit	1.045.849.800,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	3 Unit	553.912.800,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					250.000.000,00					100.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	52 Unit	Unit	2 Unit	250.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	52 Unit	100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
20.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**					**19.957.177.758,00**					**40.225.000.000,00**	
		Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi					***19.957.177.758,00***					***25.425.000.000,00***	
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					7.688.857.000,00					16.325.000.000,00	
		-					7.688.857.000,00					16.325.000.000,00	
	1.03.02.2.01.0031	Rehabilitasi Check Dam					380.000.000,00					1.600.000.000,00	
		Terehabilitasinya Check Dam	Jumlah Check Dam yang Direhabilitasi	2 Unit	Unit	3 Unit	380.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	3 Unit	1.600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0073	Operasi dan Pemeliharaan Sungai					3.036.767.000,00					4.000.000.000,00	
		Beroperasi dan Terpeliharanya Sungai	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara	0.9 KM	1.2 KM	1.4 KM	3.036.767.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	1.1 KM	4.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0080	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai					0,00					1.925.000.000,00	
		Beroperasi dan Terpeliharanya Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	1.2 KM	KM	0.9 KM	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	1.55 KM	1.925.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0083	Operasi dan Pemeliharaan Check Dam					0,00					800.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Beroperasi dan Terpeliharanya Check Dam	Jumlah Check Dam yang Dioperasikan dan Dipelihara	5 Unit	4 Unit	6 Unit	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	8 Unit	800.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai					750.000.000,00					3.500.000.000,00	
		Terlaksananya Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	0.4 KM	0.5 KM	0.8 KM	750.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	0.4 KM	3.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0101	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing					3.033.000.000,00					2.600.000.000,00	
		Meningkatnya Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan	0.3 KM	4 KM	3.8 KM	3.033.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	4.3 KM	2.600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0104	Pembangunan Check Dam					0,00					1.100.000.000,00	
		Terbangunnya Check Dam	Jumlah Check Dam yang Dibangun	1 Unit	Unit	1 Unit	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	1 Unit	1.100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0118	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota					489.090.000,00					800.000.000,00	
		Tersusunnya Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	7 Dokumen	3 Dokumen	7 Dokumen	489.090.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	8 Dokumen	800.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					12.268.320.758,00					23.900.000.000,00	
		-					12.268.320.758,00					23.900.000.000,00	
	1.03.02.2.02.0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan					720.000.000,00					6.000.000.000,00	
		Terbangunnya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	0.61 KM	KM	0.8 KM	720.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	0.79 KM	6.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan					0,00					4.000.000.000,00	
		Meningkatnya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	0.19 KM	KM	0.3 KM	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	0.21 KM	4.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan					3.986.725.008,00					6.000.000.000,00	
		Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	0.18 KM	0.21 KM	0.25 KM	3.986.725.008,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	0.29 KM	6.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan					4.373.219.450,00					4.000.000.000,00	
		Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 KM	1.2 KM	1.38 KM	4.373.219.450,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	1.65 KM	4.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0044	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi					2.199.231.300,00					3.000.000.000,00	
		Terfasilitasinya operasional kegiatan Pengelola Irigasi	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi	2 Lembaga	2 Lembaga	29 Lembaga	2.199.231.300,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	2 Lembaga	3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0050	Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa					989.145.000,00					900.000.000,00	
		Tersusunnya Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa	Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun	8 Dokumen	6 Dokumen	8 Dokumen	989.145.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	9 Dokumen	900.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
21.	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**					**973.136.000,00**					**1.140.000.000,00**	
		Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum					***973.136.000,00***					***1.140.000.000,00***	
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota					973.136.000,00					1.140.000.000,00	
		-					973.136.000,00					1.140.000.000,00	
	1.03.03.2.01.0022	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan					0,00					0,00	
		Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	1 Unit	Unit	2 Unit	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	Unit	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)					195.636.000,00					300.000.000,00	
		Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	4 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	195.636.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	Dokumen	300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan					777.500.000,00					0,00	
		Meningkatnya Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	20 Liter/Detik	20 Liter/Detik	0 Liter/Detik	777.500.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	20 Liter/Detik	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan					0,00					0,00	
		Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	35 Liter/Detik	20 Liter/Detik	0 Liter/Detik	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	28 Liter/Detik	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0031	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan					0,00					840.000.000,00	
		Teroptimalisasinya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	1 Unit	Unit	2 Unit	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	3 Unit	840.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
22.	**1.03.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**					**195.636.000,00**					**424.402.556,00**	
		Meningkatnya layanan persampahan regional					***195.636.000,00***					***424.402.556,00***	
	1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota					195.636.000,00					424.402.556,00	
		-					195.636.000,00					424.402.556,00	
	1.03.04.2.01.0013	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS					0,00					224.402.556,00	
		Meningkatnya TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan	0 Ton/hari	0 Ton/hari	200 Ton/hari	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	0 Ton/hari	224.402.556,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.04.2.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan					195.636.000,00					200.000.000,00	
		Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	2 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen	195.636.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	2 Dokumen	200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
23.	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**					**5.407.454.182,00**					**3.150.000.000,00**	
		Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah					***5.407.454.182,00***					***3.150.000.000,00***	
		-					5.407.454.182,00					3.150.000.000,00	
	1.03.05.2.01.0019	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)					0,00					200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Teroptimalisasinya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	1 Unit	200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)					2.930.000.000,00					1.000.000.000,00	
		Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	35 Unit	50 Unit	1 Unit	2.930.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	35 Unit	1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0045	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)					195.636.000,00					400.000.000,00	
		Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	4 Dokumen	Dokumen	4 Dokumen	195.636.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	4 Dokumen	400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota					5.407.454.182,00					3.150.000.000,00	
		-					5.407.454.182,00					3.150.000.000,00	
	1.03.05.2.01.0048	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)					0,00					0,00	
		Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	-	-	50 Orang	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0049	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat					0,00					1.550.000.000,00	
		Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	-	-	5 M^3/Hari	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	-	1.550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0050	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat					2.281.818.182,00					0,00	
		Meningkatnya Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	-	-	100 M^3/Hari	2.281.818.182,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
24.	**1.03.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**					**32.085.558.099,99**					**7.400.000.000,00**	
		Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan					***32.085.558.099,99***					***7.400.000.000,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota					32.085.558.099,99					7.400.000.000,00	
		-					32.085.558.099,99					7.400.000.000,00	
	1.03.06.2.01.0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan					0,00					0,00	
		Meningkatnya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	0 Sistem Drainase Perkotaan	0 Sistem Drainase Perkotaan	0 Sistem Drainase Perkotaan	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	0 Sistem Drainase Perkotaan	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan					5.524.700.000,00					0,00	
		Terehabilitasinya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	Sistem Drainase Perkotaan	1 Sistem Drainase Perkotaan	0 Sistem Drainase Perkotaan	5.524.700.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	Sistem Drainase Perkotaan	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan					14.763.300.000,00					0,00	
		Terbangunnya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	1 Sistem Drainase Perkotaan	1 Sistem Drainase Perkotaan	0 Sistem Drainase Perkotaan	14.763.300.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	1 Sistem Drainase Perkotaan	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan					989.210.000,00					700.000.000,00	
		Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	7 Dokumen	Dokumen	7 Dokumen	989.210.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	7 Dokumen	700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan					10.808.348.099,99					6.700.000.000,00	
		Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	11 Sistem Drainase Perkotaan	1 Sistem Drainase Perkotaan	11 Sistem Drainase Perkotaan	10.808.348.099,99	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	11 Sistem Drainase Perkotaan	6.700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
25.	**1.03.08**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**					**9.000.000.000,00**					**17.450.000.000,00**	
		Meningkatnya kualitas bangunan gedung					***9.000.000.000,00***					***17.450.000.000,00***	
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung					9.000.000.000,00					17.450.000.000,00	
		-					9.000.000.000,00					17.450.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG					220.000.000,00					450.000.000,00	
		Terselenggaranya Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	1000 Dokumen	1000 Dokumen	1000 Dokumen	220.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	1000 Dokumen	450.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		-					9.000.000.000,00					17.450.000.000,00	
	1.03.08.2.01.0034	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota					8.780.000.000,00					17.000.000.000,00	
		Terlaksananya Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung yang dibangun, dimanfaatkan, dilestarikan dan/atau dibongkar untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1 Bangunan Gedung	8.780.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	-	17.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
26.	**1.03.09**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**					**490.530.000,00**					**1.412.251.208,00**	
		Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata					***490.530.000,00***					***1.412.251.208,00***	
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota					490.530.000,00					1.412.251.208,00	
		-					490.530.000,00					1.412.251.208,00	
	1.03.09.2.01.0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota					490.530.000,00					1.000.000.000,00	
		Tersusunnya Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	6 Dokumen	Dokumen	11 Dokumen	490.530.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	7 Dokumen	1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.09.2.01.0011	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota					0,00					412.251.208,00	
		Terlaksananya Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan	1 Kawasan	1 Kawasan	1 Kawasan	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	1 Kawasan	412.251.208,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
27.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**					**53.669.469.098,71**					**111.696.925.862,39**	
		Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman					***53.669.469.098,71***					***111.696.925.862,39***	
		-					53.669.469.098,71					111.696.925.862,39	
	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan					989.210.000,00					2.500.000.000,00	
		Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	6 Dokumen	Dokumen	9 Dokumen	989.210.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	8 Dokumen	2.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan					500.000.000,00					1.200.000.000,00	
		Jalan/Jembatan yang mendapatkan Survey Kondisi	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	629.671 KM	630 KM	2 KM	500.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	629.671 KM	1.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0051	Pemeliharaan Rutin Jalan					12.773.770.775,01					17.000.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	68 KM	22 KM	624 KM	12.773.770.775,01	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	68 KM	17.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0053	Pembangunan Jalan					1.850.000.000,00					2.000.000.000,00	
		Terlaksananya Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan	40 KM	10 KM	5 KM	1.850.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	57 KM	2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0055	Rehabilitasi Jalan					25.690.760.700,00					61.000.808.171,39	
		Terlaksananya Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	2.225 KM	0.338 KM	40 KM	25.690.760.700,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	1.473 KM	61.000.808.171,39	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0056	Pemeliharaan Berkala Jalan					0,00					0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	2.22 KM	1 KM	0 KM	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	1.8 KM	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0057	Penggantian Jembatan					0,00					10.068.020.891,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Terlaksananya Penggantian Jembatan	Panjang Jembatan yang dilakukan penggantian	160 Meter	Meter	144 Meter	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	120 Meter	10.068.020.891,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0067	Pemeliharaan Rutin Jembatan					3.436.424.900,00					5.000.000.000,00	
		Terpeliharanya Jembatan Secara Rutin	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	20 Jembatan	1 Jembatan	264 Jembatan	3.436.424.900,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	20 Jembatan	5.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0069	Pembangunan Jembatan					8.429.302.723,70					12.928.096.800,00	
		Terlaksananya Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun	20 Meter	12 Meter	34 Meter	8.429.302.723,70	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	16 Meter	12.928.096.800,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota					53.669.469.098,71					111.696.925.862,39	
		-					53.669.469.098,71					111.696.925.862,39	
	1.03.10.2.01.0059	Rekonstruksi Jalan					0,00					0,00	
		Terlaksananya Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	-	-	0 KM	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
28.	**1.03.11**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**					**210.666.901,76**					**285.980.137,00**	
		Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi					***210.666.901,76***					***185.980.137,00***	
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi					122.896.300,16					70.000.000,00	
		-					122.896.300,16					70.000.000,00	
	1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis					113.340.800,16					70.000.000,00	
		Terfasilitasinya Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	60 Orang	Orang	50 Orang	113.340.800,16	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	45 Orang	70.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.01.0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi					9.555.500,00					0,00	
		Kelembagaan Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	0 Lembaga	0 Lembaga	0 Lembaga	9.555.500,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	0 Lembaga	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					67.415.801,00					115.980.137,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		-					67.415.801,00					115.980.137,00	
	1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota					61.500.000,00					65.980.137,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	1 Dokumen	Dokumen	4 Dokumen	61.500.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	1 Dokumen	65.980.137,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.02.0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi					5.915.801,00					50.000.000,00	
		Beroperasinya Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	1 Layanan Informasi	Layanan Informasi	1 Layanan Informasi	5.915.801,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	1 Layanan Informasi	50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi					20.354.800,60					100.000.000,00	
		-					20.354.800,60					100.000.000,00	
	1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota					15.374.800,00					50.000.000,00	
		Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	1 Paket Pekerjaan	Paket Pekerjaan	30 Paket Pekerjaan	15.374.800,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	1 Paket Pekerjaan	50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.04.0010	Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota					4.980.000,60					50.000.000,00	
		Tersusunnya Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	4.980.000,60	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	1 Dokumen	50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
29.	**1.03.12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**					**1.013.725.899,54**					**375.000.000,00**	
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang					***913.725.899,54***					***275.000.000,00***	
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota					400.000.000,00					95.000.000,00	
		-					400.000.000,00					95.000.000,00	
	1.03.12.2.01.0007	Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang					0,00					0,00	
		Tersampaikannya informasi penataan ruang kepada masyarakat	Jumlah publikasi informasi penataan ruang	Publikasi	Publikasi	1 Publikasi	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	Publikasi	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0009	Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota					400.000.000,00					95.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Terpenuhinya dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi	dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi	1 Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	400.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	1 Dokumen	95.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota					40.000.499,54					100.000.000,00	
		-					40.000.499,54					100.000.000,00	
	1.03.12.2.02.0008	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang					40.000.499,54					100.000.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan pemahaman dan tanggung jawabMasyarakat	Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	1 Kegiatan	Kegiatan	1 Kegiatan	40.000.499,54	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	1 Kegiatan	100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		-					299.695.400,00					130.000.000,00	
	1.03.12.2.03.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang					29.995.400,00					50.000.000,00	
		Terlaksananya kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang untuk meningkatkan kerja sama antarpemangku kepentingan	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	1 Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	29.995.400,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	1 Dokumen	50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03.0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang					100.000.000,00					30.000.000,00	
		Tersedianya dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	1 Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	1 Dokumen	30.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03.0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang					100.000.000,00					50.000.000,00	
		Tersedia dan terlaksananya pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1 Sistem Informasi	Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	100.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	1 Sistem Informasi	50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota					274.030.000,00					50.000.000,00	
		-					274.030.000,00					50.000.000,00	
	1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang					274.030.000,00					50.000.000,00	
		Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	274.030.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	1 Dokumen	50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang					0,00					0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Terlaksananya Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	0 Laporan	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota					299.695.400,00					130.000.000,00	
		-					299.695.400,00					130.000.000,00	
	1.03.12.2.03.0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang					69.700.000,00					0,00	
		Terlayaninya permohonan dokumen Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku yaitu 20 hari	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	-	-	0 Layanan	69.700.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN					**57.404.090.390,00**					**143.032.041.364,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**57.404.090.390,00**					**143.032.041.364,00**	
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**					**57.404.090.390,00**					**143.032.041.364,00**	
30.	**1.04.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**10.605.221.160,00**					**12.776.015.870,00**	
		Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah					***10.600.221.160,00***					***12.601.015.870,00***	
	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					10.000.000,00					115.000.000,00	
		-					10.000.000,00					115.000.000,00	
	1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					5.000.000,00					20.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	8 Dokumen	5.000.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	2 Dokumen	20.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					0,00					15.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	2 Dokumen	15.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					0,00					15.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	2 Dokumen	15.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					0,00					15.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	2 Dokumen	15.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					0,00					15.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	2 Dokumen	15.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					5.000.000,00					20.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	8 Laporan	5.000.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	4 Laporan	20.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					0,00					15.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	0 Laporan	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	3 Laporan	15.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					8.213.662.101,00					9.181.698.270,00	
		-					8.213.662.101,00					9.181.698.270,00	
	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					7.900.186.101,00					8.663.298.270,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	66 Orang/bulan	58 Orang/bulan	55 Orang/bulan	7.900.186.101,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	62 Orang/bulan	8.663.298.270,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					313.476.000,00					503.400.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	313.476.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Dokumen	503.400.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					0,00					15.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	2 Laporan	15.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					706.555.200,00					696.253.500,00	
		-					706.555.200,00					696.253.500,00	
	1.04.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					706.555.200,00					696.253.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	706.555.200,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Dokumen	696.253.500,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					613.205.159,00					795.320.000,00	
		-					613.205.159,00					795.320.000,00	
	1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor					5.997.400,00					20.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	5.997.400,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Paket	20.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					124.801.300,00					300.520.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	10 Paket	124.801.300,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Paket	300.520.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					0,00					10.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	3 Paket	10.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					137.201.959,00					50.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	52 Paket	52 Paket	52 Paket	137.201.959,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	52 Paket	50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					50.000.000,00					12.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	14 Paket	14 Paket	14 Paket	50.000.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	14 Paket	12.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					10.000.000,00					20.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2258 Dokumen	2258 Dokumen	1000 Dokumen	10.000.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	2258 Dokumen	20.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu					25.000.000,00					22.800.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	25.000.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Laporan	22.800.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					249.994.500,00					350.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan	120 Laporan	120 Laporan	249.994.500,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	120 Laporan	350.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					10.210.000,00					10.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	200 Dokumen	200 Dokumen	200 Dokumen	10.210.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	200 Dokumen	10.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					140.026.200,00					308.850.700,00	
		-					140.026.200,00					308.850.700,00	
	1.04.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					0,00					142.400.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	0 Unit	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	5 Unit	142.400.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					40.026.200,00					32.485.200,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	12 Unit	40.026.200,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	10 Unit	32.485.200,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					0,00					33.965.500,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	8 Unit	0 Unit	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	8 Unit	33.965.500,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					100.000.000,00					100.000.000,00	
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Unit	100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					228.300.000,00					262.368.000,00	
		-					228.300.000,00					262.368.000,00	
	1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					6.300.000,00					6.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	370 Laporan	370 Laporan	1 Laporan	6.300.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	370 Laporan	6.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					192.000.000,00					226.368.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	192.000.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Laporan	226.368.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					30.000.000,00					30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	30.000.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Laporan	30.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					693.472.500,00					1.416.525.400,00	
		-					693.472.500,00					1.416.525.400,00	
	1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					36.000.000,00					24.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	36.000.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Unit	24.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					390.850.000,00					465.740.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit	21 Unit	21 Unit	390.850.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	21 Unit	465.740.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel					0,00					5.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	31 Unit	31 Unit	0 Unit	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	31 Unit	5.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					39.640.000,00					30.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	46 Unit	46 Unit	47 Unit	39.640.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	46 Unit	30.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					226.982.500,00					866.785.400,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	226.982.500,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	1 Unit	866.785.400,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					0,00					25.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	31 Unit	31 Unit	31 Unit	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	31 Unit	25.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
31.	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**					**888.815.200,00**					**2.441.888.600,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah					***888.815.200,00***					***2.341.888.600,00***	
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota					0,00					841.463.800,00	
		-					0,00					841.463.800,00	
	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana					0,00					297.058.800,00	
		Terehabilitasinya Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	5 Unit Rumah	5 Unit Rumah	0 Unit Rumah	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	5 Unit Rumah	297.058.800,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana					0,00					296.695.000,00	
		Terbangunnya rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	5 Unit Rumah	5 Unit Rumah	0 Unit Rumah	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	5 Unit Rumah	296.695.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.03.0009	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota					0,00					247.710.000,00	
		Terbangunnya Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	5 Unit Rumah	5 Unit Rumah	0 Unit Rumah	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	5 Unit Rumah	247.710.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus					888.815.200,00					1.050.424.800,00	
		-					888.815.200,00					1.050.424.800,00	
	1.04.02.2.05.0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus					888.815.200,00					1.050.424.800,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	888.815.200,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	3 Dokumen	1.050.424.800,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan					0,00					550.000.000,00	
		-					0,00					550.000.000,00	
	1.04.02.2.06.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik					0,00					100.000.000,00	
		Tersusunnya Kesepakatan Komitmen dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	1 Dokumen	100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	1.04.02.2.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan					0,00					150.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian dalam Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	4 Laporan	2 Laporan	0 Laporan	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	2 Laporan	150.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.06.0005	Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman					0,00					100.000.000,00	
		Terbentuknya/terpeliharanya Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Terbangun/Terpelihara	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	0 Sistem Informasi	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	1 Sistem Informasi	100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.06.0006	Fasilitasi Pemenuhan Kesesuaian Rencana Tapak dan Lantai Perumahan					0,00					200.000.000,00	
		Terwujudnya Kesesuaian Rencana Tapak dan Lantai Perumahan	Jumlah Dokumen Rencana Tapak dan Lantai Perumahan yang Diselaraskan	3 Dokumen	3 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	3 Dokumen	200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
32.	**1.04.03**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**					**1.282.400.000,00**					**83.050.846.894,00**	
		Meningkatnya kualitas kawasan permukiman					***1.282.400.000,00***					***83.000.846.894,00***	
	1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman					0,00					300.000.000,00	
		-					0,00					300.000.000,00	
	1.04.03.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman					0,00					300.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	3 Laporan	3 Laporan	0 Laporan	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	3 Laporan	300.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha					0,00					620.000.000,00	
		-					0,00					620.000.000,00	
	1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP					0,00					210.000.000,00	
		Tersusun/Tereview/Terlegalisasinya Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	1 Dokumen	210.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.02.0012	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh					0,00					50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Terbinanya Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina	1 Kelompok Masyarakat	0 Kelompok Masyarakat	0 Kelompok Masyarakat	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	1 Kelompok Masyarakat	50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.02.0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh					0,00					310.000.000,00	
		Terlaksananya Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	2 Dokumen	2 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	2 Dokumen	310.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.02.0015	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah					0,00					50.000.000,00	
		Meningkatnya Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Rumah Tangga yang Terfasilitasi Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	50 Rumah Tangga	0 Rumah Tangga	0 Rumah Tangga	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	50 Rumah Tangga	50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha					1.282.400.000,00					82.130.846.894,00	
		-					1.282.400.000,00					82.130.846.894,00	
	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni					0,00					2.500.000.000,00	
		Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	37 Unit Rumah	37 Unit Rumah	0 Unit Rumah	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	37 Unit Rumah	2.500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0003	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU					0,00					75.000.000,00	
		Terlaksananya Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	1 Dokumen	75.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh					0,00					1.545.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	8 Laporan	8 Laporan	0 Laporan	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	8 Laporan	1.545.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh					0,00					150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Terlaksananya Pendataan dan Verifikasi Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	1 Dokumen	150.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh					1.282.400.000,00					73.810.378.894,00	
		Terlaksananya Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	20 Ha	40 Ha	1.5 Ha	1.282.400.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	50 Ha	73.810.378.894,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh					0,00					4.050.468.000,00	
		Terlaksananya Pemugaran di Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	1 Ha	2 Ha	0 Ha	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	2 Ha	4.050.468.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
33.	**1.04.04**	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**					**1.850.000.000,00**					**5.312.790.000,00**	
		Persentase Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh diluar Kawasan Kumuh yang ditingkatkan kualitasnya					***1.850.000.000,00***					***5.312.790.000,00***	
	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota					1.850.000.000,00					5.312.790.000,00	
		-					1.850.000.000,00					5.312.790.000,00	
	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha					1.850.000.000,00					5.312.790.000,00	
		Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	119 Unit Rumah	107 Unit Rumah	36 Unit Rumah	1.850.000.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	101 Unit Rumah	5.312.790.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
34.	**1.04.05**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**					**42.777.654.030,00**					**39.450.500.000,00**	
		Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) permukiman					***42.777.654.030,00***					***39.450.500.000,00***	
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan					42.777.654.030,00					39.450.500.000,00	
		-					42.777.654.030,00					39.450.500.000,00	
	1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan					0,00					1.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	14 Dokumen	21 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	14 Dokumen	1.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan					0,00					200.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	5 Laporan	5 Laporan	0 Laporan	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	5 Laporan	200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0008	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan					1.500.000.000,00					6.150.500.000,00	
		Terlaksananya Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	40 Lokasi	40 Lokasi	10 Lokasi	1.500.000.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	40 Lokasi	6.150.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang					0,00					100.000.000,00	
		Terlaksananya Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	5 Laporan	5 Laporan	0 Laporan	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	5 Laporan	100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan					41.277.654.030,00					32.000.000.000,00	
		Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	230 Lokasi	260 Lokasi	135 Lokasi	41.277.654.030,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	142 Lokasi	32.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA					**42.460.611.983,00**					**56.658.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**42.460.611.983,00**					**56.658.000.000,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**					**42.460.611.983,00**					**56.658.000.000,00**	
35.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**38.318.211.883,00**					**54.444.557.197,00**	
		Meningkatnya efektivitas dan efisien pelaksanaan urusan pemerintahan daerah					***38.270.211.883,00***					***54.379.307.197,00***	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					55.000.000,00					70.000.000,00	
		-					55.000.000,00					70.000.000,00	
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					7.000.000,00					10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	7.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	2 Dokumen	10.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					7.000.000,00					10.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	7.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	1 Dokumen	10.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					7.000.000,00					10.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	7.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	1 Dokumen	10.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					7.000.000,00					10.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	7.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	1 Dokumen	10.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					7.000.000,00					10.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	7.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	1 Dokumen	10.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					10.000.000,00					10.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	10.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	8 Laporan	10.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					10.000.000,00					10.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	10.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	5 Laporan	10.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					36.496.100.976,00					44.451.293.081,00	
		-					36.496.100.976,00					44.451.293.081,00	
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					36.017.912.976,00					44.201.293.081,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	470 Orang/bulan	470 Orang/bulan	470 Orang/bulan	36.017.912.976,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	470 Orang/bulan	44.201.293.081,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					478.188.000,00					250.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	478.188.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	12 Dokumen	250.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					0,00					7.395.204.600,00	
		-					0,00					7.395.204.600,00	
	1.05.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					0,00					7.395.204.600,00	
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	12 Dokumen	7.395.204.600,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					0,00					0,00	
		-					0,00					0,00	
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					0,00					0,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	470 Paket	0 Paket	0 Paket	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	0 Paket	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					243.625.800,00					896.221.153,00	
		-					243.625.800,00					896.221.153,00	
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor					9.989.700,00					23.289.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16 Paket	16 Paket	16 Paket	9.989.700,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	16 Paket	23.289.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					0,00					564.283.085,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket	0 Paket	0 Paket	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	50 Paket	564.283.085,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					30.356.100,00					60.831.668,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30 Paket	30 Paket	30 Paket	30.356.100,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	30 Paket	60.831.668,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					14.998.800,00					32.747.400,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket	9 Paket	9 Paket	14.998.800,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	9 Paket	32.747.400,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					10.000.000,00					24.570.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2850 Dokumen	2850 Dokumen	2850 Dokumen	10.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	2850 Dokumen	24.570.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu					9.940.000,00					5.250.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	289 Laporan	289 Laporan	289 Laporan	9.940.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	289 Laporan	5.250.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					161.791.000,00					180.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	21 Laporan	21 Laporan	21 Laporan	161.791.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	21 Laporan	180.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					6.550.200,00					5.250.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	6.550.200,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	1 Dokumen	5.250.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					0,00					0,00	
		-					0,00					0,00	
	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					0,00					0,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	0 Unit	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					0,00					0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	5 Unit	0 Unit	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	0 Unit	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					0,00					0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	0 Unit	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya					0,00					0,00	
		Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	0 Unit	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					0,00					0,00	
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	0 Unit	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					0,00					0,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	0 Unit	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					0,00					0,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	0 Unit	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					262.597.780,00					304.709.895,00	
		-					262.597.780,00					304.709.895,00	
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					10.495.800,00					11.025.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	800 Laporan	800 Laporan	800 Laporan	10.495.800,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	800 Laporan	11.025.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					252.101.980,00					293.684.895,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	252.101.980,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	6 Laporan	293.684.895,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					0,00					0,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	0 Laporan	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					0,00					0,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	0 Laporan	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.260.887.327,00					1.327.128.468,00	
		-					1.260.887.327,00					1.327.128.468,00	
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					36.000.000,00					25.200.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	36.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	1 Unit	25.200.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					961.470.000,00					1.021.807.500,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	44 Unit	44 Unit	44 Unit	961.470.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	444 Unit	1.021.807.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel					0,00					0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	0 Unit	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					45.480.000,00					47.775.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	100 Unit	100 Unit	45.480.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	100 Unit	47.775.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					175.837.327,00					177.345.968,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	175.837.327,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	1 Unit	177.345.968,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					42.100.000,00					55.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	65 Unit	65 Unit	65 Unit	42.100.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	65 Unit	55.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					0,00					0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	0 Unit	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
36.	**1.05.02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**					**4.142.400.100,00**					**2.213.442.803,00**	
		Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum					***3.642.400.100,00***					***1.963.442.803,00***	
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					3.642.400.100,00					1.879.502.038,00	
		-					3.642.400.100,00					1.879.502.038,00	
	1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota					0,00					150.697.038,00	
		Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	1 Dokumen	150.697.038,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum					265.500.000,00					244.755.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	265.500.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	12 Dokumen	244.755.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum					2.117.580.400,00					250.000.000,00	
		Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraandalam Teknik Pencegahan Kejahatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.117.580.400,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	12 Dokumen	250.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0014	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas					500.000.000,00					200.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	0 Orang	0 Orang	470 Orang	500.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	0 Orang	200.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan					729.319.800,00					904.050.000,00	
		Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, PengamTerlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalananan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	729.319.800,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	12 laporan	904.050.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa					0,00					100.000.000,00	
		Terlaksananya Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	44 Laporan	0 Laporan	44 Laporan	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	44 Laporan	100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah					29.999.900,00					30.000.000,00	
		Tersedianya Pelayanan dasar kepada warga negara yang terkena Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	29.999.900,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	1 Laporan	30.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0025	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja					0,00					0,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas	470 Orang	470 Orang	0 Orang	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	470 Orang	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota					500.000.000,00					333.940.765,00	
		-					500.000.000,00					333.940.765,00	
	1.05.02.2.02.0004	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					0,00					0,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Penyuluhan pada Pelanggar Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	0 laporan	0 laporan	0 laporan	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	0 laporan	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0007	Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					0,00					0,00	
		Terlaksananya Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	0 Laporan	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0008	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah					0,00					0,00	
		Terlaksananya Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan	0 laporan	0 laporan	0 laporan	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	0 laporan	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0009	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah					0,00					0,00	
		Terlaksananya Pemberkasan Hasil Penyidikan oleh PPNS Penegak Perda	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	0 Dokumen	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					0,00					83.940.765,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	1 Laporan	83.940.765,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah					500.000.000,00					250.000.000,00	
		Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	500.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	12 Laporan	250.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		-					500.000.000,00					333.940.765,00	
	1.05.02.2.02.0014	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					0,00					0,00	
		Tersusunnya SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-	0 Dokumen	0,00	Kota Padang	-	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	-	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH					**11.630.805.802,00**					**127.194.765.278,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**11.623.976.602,00**					**127.189.765.278,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**					**11.623.976.602,00**					**127.189.765.278,00**	
37.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**9.627.270.402,00**					**120.438.446.750,00**	
		Meningkatnya efektivitas dan efisien pelaksanaan urusan pemerintahan daerah					***9.627.270.402,00***					***119.927.266.750,00***	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					0,00					30.000.000,00	
		-					0,00					30.000.000,00	
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					0,00					5.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6 Menguatkan Jaringan Ketahanan Bencana	2 Dokumen	5.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					0,00					5.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6 Menguatkan Jaringan Ketahanan Bencana	1 Dokumen	5.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					0,00					5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6 Menguatkan Jaringan Ketahanan Bencana	1 Dokumen	5.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					0,00					5.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6 Menguatkan Jaringan Ketahanan Bencana	1 Dokumen	5.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					0,00					5.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6 Menguatkan Jaringan Ketahanan Bencana	1 Dokumen	5.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					0,00					5.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	2 Laporan	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6 Menguatkan Jaringan Ketahanan Bencana	4 Laporan	5.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					8.133.911.702,00					8.955.843.662,00	
		-					8.133.911.702,00					8.955.843.662,00	
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					7.945.511.702,00					8.779.663.662,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	68 Orang/bulan	68 Orang/bulan	70 Orang/bulan	7.945.511.702,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	6 Menguatkan Jaringan Ketahanan Bencana	68 Orang/bulan	8.779.663.662,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					188.400.000,00					176.180.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	188.400.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6 Menguatkan Jaringan Ketahanan Bencana	1 Dokumen	176.180.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					0,00					176.180.000,00	
		-					0,00					176.180.000,00	
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					0,00					176.180.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	Paket	75 Paket	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6 Menguatkan Jaringan Ketahanan Bencana	Paket	176.180.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					160.980.700,00					491.800.000,00	
		-					160.980.700,00					491.800.000,00	
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor					0,00					15.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	50 Paket	61 Paket	1 Paket	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6 Menguatkan Jaringan Ketahanan Bencana	50 Paket	15.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					0,00					120.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	1 Paket	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6 Menguatkan Jaringan Ketahanan Bencana	5 Paket	120.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					44.372.700,00					15.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	1 Paket	44.372.700,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6 Menguatkan Jaringan Ketahanan Bencana	5 Paket	15.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					6.300.000,00					45.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	1 Paket	6.300.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6 Menguatkan Jaringan Ketahanan Bencana	2 Paket	45.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu					24.733.000,00					46.800.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	24.733.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	1 Laporan	46.800.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					85.575.000,00					250.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	15 Laporan	1 Laporan	85.575.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6 Menguatkan Jaringan Ketahanan Bencana	15 Laporan	250.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					0,00					55.734.200,00	
		-					0,00					55.734.200,00	
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					0,00					55.734.200,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Unit	7 Unit	4 Unit	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6 Menguatkan Jaringan Ketahanan Bencana	7 Unit	55.734.200,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					160.350.000,00					168.888.888,00	
		-					160.350.000,00					168.888.888,00	
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					160.350.000,00					168.888.888,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	61 Laporan	61 Laporan	1 Laporan	160.350.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6 Menguatkan Jaringan Ketahanan Bencana	61 Laporan	168.888.888,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.172.028.000,00					110.560.000.000,00	
		-					1.172.028.000,00					110.560.000.000,00	
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					36.000.000,00					45.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	20 Unit	36.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6 Menguatkan Jaringan Ketahanan Bencana	1 Unit	45.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					867.240.000,00					110.000.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 Unit	40 Unit	34 Unit	867.240.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6 Menguatkan Jaringan Ketahanan Bencana	40 Unit	110.000.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel					0,00					10.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	10 Unit	5 Unit	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6 Menguatkan Jaringan Ketahanan Bencana	5 Unit	10.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					268.788.000,00					255.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	268.788.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6 Menguatkan Jaringan Ketahanan Bencana	1 Unit	255.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		-					1.172.028.000,00					110.560.000.000,00	
	1.05.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					0,00					250.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	1 Unit	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6 Menguatkan Jaringan Ketahanan Bencana	-	250.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
38.	**1.05.03**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**					**1.996.706.200,00**					**6.751.318.528,00**	
		Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana					***1.892.606.200,00***					***5.531.318.528,00***	
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota					913.998.900,00					1.400.000.000,00	
		-					913.998.900,00					1.400.000.000,00	
	1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)					913.998.900,00					1.400.000.000,00	
		Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana bagi warga negara termasuk kelompok rentan per jenis ancaman bencana sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	0 Orang	0 Orang	20000 Orang	913.998.900,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6 Menguatkan Jaringan Ketahanan Bencana	0 Orang	1.400.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana					***978.607.300,00***					***4.831.318.528,00***	
		-					978.607.300,00					4.131.318.528,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	1.05.03.2.02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana					524.213.000,00					2.751.318.528,00	
		Terlaksananya penguatan kapasitas kawasan rawan bencana dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	1 Kawasan	1 Kawasan	3 Kawasan	524.213.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6 Menguatkan Jaringan Ketahanan Bencana	1 Kawasan	2.751.318.528,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana					0,00					1.000.000.000,00	
		-					0,00					1.000.000.000,00	
	1.05.03.2.04.0008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota					0,00					300.000.000,00	
		Tersedianya Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknnis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P)	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	100 Orang	100 Orang	35 Orang	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6 Menguatkan Jaringan Ketahanan Bencana	100 Orang	300.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota					0,00					700.000.000,00	
		Tersedianya dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota yang sah dan legal	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6 Menguatkan Jaringan Ketahanan Bencana	1 Dokumen	700.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat					***1.082.707.300,00***					***4.261.318.528,00***	
		-					978.607.300,00					4.131.318.528,00	
	1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota					454.394.300,00					830.000.000,00	
		Tersedianya alat perlindungan diri (APD) bagi individu, keluarga dan petugas untuk kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	100 Unit	100 Unit	20 Unit	454.394.300,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6 Menguatkan Jaringan Ketahanan Bencana	100 Unit	830.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana					104.100.000,00					220.000.000,00	
		-					104.100.000,00					220.000.000,00	
	1.05.03.2.03.0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas					0,00					30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Terlaksananya Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6 Menguatkan Jaringan Ketahanan Bencana	1 Laporan	30.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota					0,00					30.000.000,00	
		Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana Penanganan Awal Untuk Penetapan Status Darurat Bencana Paling Lama 1 X 24 Jam	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6 Menguatkan Jaringan Ketahanan Bencana	1 Dokumen	30.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota					104.100.000,00					100.000.000,00	
		Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	750 Orang	750 Orang	35 Orang	104.100.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6 Menguatkan Jaringan Ketahanan Bencana	750 Orang	100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota					0,00					30.000.000,00	
		Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	800 Orang	800 Orang	35 Orang	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6 Menguatkan Jaringan Ketahanan Bencana	800 Orang	30.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana					0,00					30.000.000,00	
		Terlaksananya Pengerahan dan Pengorganisasian Komando Penanganan Darurat Bencana Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6 Menguatkan Jaringan Ketahanan Bencana	1 Laporan	30.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana					978.607.300,00					4.131.318.528,00	
		-					978.607.300,00					4.131.318.528,00	
	1.05.03.2.02.0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota					0,00					250.000.000,00	
		Tersedianya dokumen Rencana Kontinjensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) yang sah dan legal	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	-	-	1 Dokumen	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6 Menguatkan Jaringan Ketahanan Bencana	-	250.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0030	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota					0,00					300.000.000,00	
		Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi untuk warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	-	-	50 Orang	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6 Menguatkan Jaringan Ketahanan Bencana	-	300.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**					**6.829.200,00**					**5.000.000,00**	
39.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**6.829.200,00**					**5.000.000,00**	
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					6.829.200,00					5.000.000,00	
		-					6.829.200,00					5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	X.XX.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					6.829.200,00					5.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	6.829.200,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6 Menguatkan Jaringan Ketahanan Bencana	1 Laporan	5.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		DINAS PEMADAM KEBAKARAN					**22.694.302.551,00**					**31.225.972.800,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**22.694.302.551,00**					**31.225.972.800,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**					**22.694.302.551,00**					**31.225.972.800,00**	
40.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**21.067.250.251,00**					**25.975.972.800,00**	
		Meningkatnya efektivitas dan efisien pelaksanaan urusan pemerintahan daerah					***21.026.250.251,00***					***25.565.972.800,00***	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					30.000.000,00					180.000.000,00	
		-					30.000.000,00					180.000.000,00	
	1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					5.000.000,00					20.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Padang Timur || Kelurahan Jati || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6 Menguatkan Jaringan Ketahanan Bencana	1 Dokumen	20.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					5.000.000,00					20.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Padang Timur || Kelurahan Jati || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6 Menguatkan Jaringan Ketahanan Bencana	1 Dokumen	20.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					5.000.000,00					20.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Padang Timur || Kelurahan Jati || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6 Menguatkan Jaringan Ketahanan Bencana	1 Dokumen	20.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					5.000.000,00					20.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Padang Timur || Kelurahan Jati || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6 Menguatkan Jaringan Ketahanan Bencana	1 Dokumen	20.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					5.000.000,00					50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Padang Timur || Kelurahan Jati || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6 Menguatkan Jaringan Ketahanan Bencana	1 Laporan	50.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					5.000.000,00					50.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Padang Timur || Kelurahan Jati || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6 Menguatkan Jaringan Ketahanan Bencana	1 Laporan	50.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					17.704.497.451,00					21.837.275.229,00	
		-					17.704.497.451,00					21.837.275.229,00	
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					17.534.457.451,00					21.671.075.229,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	191 Orang/bulan	196 Orang/bulan	191 Orang/bulan	17.534.457.451,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Padang Timur || Kelurahan Jati || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	6 Menguatkan Jaringan Ketahanan Bencana	191 Orang/bulan	21.671.075.229,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					170.040.000,00					166.200.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	170.040.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Padang Timur || Kelurahan Jati || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6 Menguatkan Jaringan Ketahanan Bencana	12 Dokumen	166.200.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					346.344.200,00					644.003.200,00	
		-					346.344.200,00					644.003.200,00	
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor					10.000.000,00					46.529.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	26 Paket	22 Paket	21 Paket	10.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Padang Timur || Kelurahan Jati || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6 Menguatkan Jaringan Ketahanan Bencana	24 Paket	46.529.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					5.000.000,00					66.541.200,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	9 Paket	5 Paket	4 Paket	5.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Padang Timur || Kelurahan Jati || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6 Menguatkan Jaringan Ketahanan Bencana	7 Paket	66.541.200,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					46.238.800,00					60.086.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	46 Paket	42 Paket	41 Paket	46.238.800,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Padang Timur || Kelurahan Jati || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6 Menguatkan Jaringan Ketahanan Bencana	44 Paket	60.086.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					18.140.000,00					60.760.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	21 Paket	17 Paket	16 Paket	18.140.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Padang Timur || Kelurahan Jati || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6 Menguatkan Jaringan Ketahanan Bencana	19 Paket	60.760.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					10.000.000,00					27.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2350 Dokumen	2310 Dokumen	2320 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Padang Timur || Kelurahan Jati || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6 Menguatkan Jaringan Ketahanan Bencana	2330 Dokumen	27.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu					20.750.000,00					67.600.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	20.750.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Padang Timur || Kelurahan Jati || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6 Menguatkan Jaringan Ketahanan Bencana	12 Laporan	67.600.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					230.664.000,00					287.248.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	230.664.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Padang Timur || Kelurahan Jati || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6 Menguatkan Jaringan Ketahanan Bencana	14 Laporan	287.248.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					5.551.400,00					28.239.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	5.551.400,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Padang Timur || Kelurahan Jati || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6 Menguatkan Jaringan Ketahanan Bencana	12 Dokumen	28.239.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					96.339.400,00					194.665.200,00	
		-					96.339.400,00					194.665.200,00	
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					14.014.000,00					70.086.200,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	35 Unit	15 Unit	15 Unit	14.014.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Padang Timur || Kelurahan Jati || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6 Menguatkan Jaringan Ketahanan Bencana	25 Unit	70.086.200,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					82.325.400,00					124.579.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	82.325.400,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Padang Timur || Kelurahan Jati || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6 Menguatkan Jaringan Ketahanan Bencana	1 Unit	124.579.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					263.599.600,00					427.415.900,00	
		-					263.599.600,00					427.415.900,00	
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					12.600.000,00					12.600.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12.600.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Padang Timur || Kelurahan Jati || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6 Menguatkan Jaringan Ketahanan Bencana	12 Laporan	12.600.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					249.999.600,00					260.814.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	480 Laporan	480 Laporan	480 Laporan	249.999.600,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Padang Timur || Kelurahan Jati || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6 Menguatkan Jaringan Ketahanan Bencana	480 Laporan	260.814.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					1.000.000,00					154.001.900,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Padang Timur || Kelurahan Jati || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6 Menguatkan Jaringan Ketahanan Bencana	12 Laporan	154.001.900,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.626.469.600,00					2.692.613.271,00	
		-					2.626.469.600,00					2.692.613.271,00	
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					36.000.000,00					36.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	36.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Padang Timur || Kelurahan Jati || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6 Menguatkan Jaringan Ketahanan Bencana	1 Unit	36.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					2.119.030.000,00					2.106.613.271,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	43 Unit	39 Unit	38 Unit	2.119.030.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Padang Timur || Kelurahan Jati || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6 Menguatkan Jaringan Ketahanan Bencana	41 Unit	2.106.613.271,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					54.520.000,00					250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	55 Unit	55 Unit	55 Unit	54.520.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Padang Timur || Kelurahan Jati || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6 Menguatkan Jaringan Ketahanan Bencana	55 Unit	250.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					415.919.600,00					250.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	415.919.600,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Padang Timur || Kelurahan Jati || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6 Menguatkan Jaringan Ketahanan Bencana	1 Unit	250.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					1.000.000,00					50.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	24 Unit	24 Unit	24 Unit	1.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Padang Timur || Kelurahan Jati || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6 Menguatkan Jaringan Ketahanan Bencana	24 Unit	50.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
41.	**1.05.04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**					**1.627.052.300,00**					**5.250.000.000,00**	
		Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran					***1.348.706.000,00***					***4.367.000.000,00***	
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota					1.348.706.000,00					4.367.000.000,00	
		-					1.348.706.000,00					4.367.000.000,00	
	1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota					1.000.000,00					135.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen NSPM yang Berkaitan Dengan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6 Menguatkan Jaringan Ketahanan Bencana	12 Dokumen	135.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota					1.209.692.000,00					1.552.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	360 Laporan	360 Laporan	12 Laporan	1.209.692.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6 Menguatkan Jaringan Ketahanan Bencana	360 Laporan	1.552.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran					0,00					150.000.000,00	
		Tersedianya Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	20 Orang	20 Orang	20 Orang	0,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Padang Timur || Kelurahan Jati || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6 Menguatkan Jaringan Ketahanan Bencana	20 Orang	150.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri					113.514.000,00					2.470.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	30 Unit	30 Unit	30 Unit	113.514.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Padang Timur || Kelurahan Jati || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6 Menguatkan Jaringan Ketahanan Bencana	30 Unit	2.470.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.01.0018	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran					24.500.000,00					60.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	Dokumen	0 Dokumen	24.500.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Padang Timur || Kelurahan Jati || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6 Menguatkan Jaringan Ketahanan Bencana	Dokumen	60.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
		Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran					***278.346.300,00***					***783.000.000,00***	
		-					0,00					250.000.000,00	
	1.05.04.2.02.0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran					0,00					100.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen yang Memuat Data Bangunan Gedung Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6 Menguatkan Jaringan Ketahanan Bencana	12 Dokumen	100.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran					103.688.400,00					82.900.000,00	
		-					103.688.400,00					82.900.000,00	
	1.05.04.2.03.0001	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran					103.688.400,00					82.900.000,00	
		Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	103.688.400,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6 Menguatkan Jaringan Ketahanan Bencana	12 Dokumen	82.900.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran					165.157.900,00					252.000.000,00	
		-					165.157.900,00					252.000.000,00	
	1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat					165.157.900,00					252.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Setiap Tahunnya	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	800 Orang	400 Orang	200 Orang	165.157.900,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6 Menguatkan Jaringan Ketahanan Bencana	600 Orang	252.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia					9.500.000,00					298.100.000,00	
		-					9.500.000,00					298.100.000,00	
	1.05.04.2.05.0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia					6.100.000,00					100.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	1 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	6.100.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6 Menguatkan Jaringan Ketahanan Bencana	1 Laporan	100.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.05.0002	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi					3.400.000,00					198.100.000,00	
		Tersedianya Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar Secara Berkala, Sah, dan Legal	Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.400.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Padang Timur || Kelurahan Jati || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6 Menguatkan Jaringan Ketahanan Bencana	1 Dokumen	198.100.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran					0,00					250.000.000,00	
		-					0,00					250.000.000,00	
	1.05.04.2.02.0003	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran					0,00					150.000.000,00	
		Tersedianya Laporan yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memiliki Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Laporan yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	-	-	12 Laporan	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6 Menguatkan Jaringan Ketahanan Bencana	-	150.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
		DINAS SOSIAL					**23.339.851.440,00**					**21.555.811.884,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**23.339.851.440,00**					**21.555.811.884,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**					**23.339.851.440,00**					**21.555.811.884,00**	
42.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**14.714.172.500,00**					**11.845.927.571,00**	
		Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintah daerah					***14.709.672.500,00***					***11.756.927.571,00***	
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					32.999.600,00					33.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		-					32.999.600,00					33.000.000,00	
	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					3.999.900,00					4.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	3.999.900,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	2 Dokumen	4.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					3.499.800,00					3.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.499.800,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Dokumen	3.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					5.500.000,00					5.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.500.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Dokumen	5.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					4.499.900,00					4.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.499.900,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Dokumen	4.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					4.500.000,00					4.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.500.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Dokumen	4.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					4.500.000,00					4.500.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	4.500.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	2 Laporan	4.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					6.500.000,00					6.500.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6.500.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Laporan	6.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					7.431.388.888,00					8.342.464.000,00	
		-					7.431.388.888,00					8.342.464.000,00	
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					7.202.068.888,00					8.100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63 Orang/bulan	63 Orang/bulan	62 Orang/bulan	7.202.068.888,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Padang Barat || Kelurahan Ujung Gurun || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	63 Orang/bulan	8.100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					229.320.000,00					242.464.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	229.320.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Dokumen	242.464.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					380.360.500,00					391.643.571,00	
		-					380.360.500,00					391.643.571,00	
	1.06.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					380.360.500,00					391.643.571,00	
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	380.360.500,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Dokumen	391.643.571,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					505.714.800,00					523.350.000,00	
		-					505.714.800,00					523.350.000,00	
	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor					10.960.900,00					12.100.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	10.960.900,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Paket	12.100.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					22.806.700,00					25.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	22.806.700,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Paket	25.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					7.477.100,00					8.250.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	1 Paket	1 Paket	7.477.100,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Paket	8.250.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					49.986.700,00					55.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	49.986.700,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Paket	55.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					49.998.200,00					55.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	49.998.200,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Paket	55.000.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					16.500.000,00					17.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	216 Dokumen	216 Dokumen	216 Dokumen	16.500.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	216 Dokumen	17.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu					39.970.000,00					40.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	39.970.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Laporan	40.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					299.441.000,00					300.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	60 Laporan	60 Laporan	299.441.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	60 Laporan	300.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					8.574.200,00					11.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	8.574.200,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Dokumen	11.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					4.951.018.912,00					844.000.000,00	
		-					4.951.018.912,00					844.000.000,00	
	1.06.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					263.344.000,00					410.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	1 Unit	1 Unit	263.344.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	3 Unit	410.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					14.109.900,00					22.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	3 Unit	14.109.900,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	5 Unit	22.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya					366.200.000,00					0,00	
		Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	0 Unit	1 Unit	1 Unit	366.200.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	0 Unit	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					4.307.365.012,00					412.000.000,00	
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	1 Unit	1 Unit	4.307.365.012,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Unit	412.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					409.895.200,00					531.600.000,00	
		-					409.895.200,00					531.600.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					5.997.600,00					6.600.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	600 Laporan	500 Laporan	500 Laporan	5.997.600,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	550 Laporan	6.600.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					249.905.200,00					275.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	249.905.200,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Laporan	275.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					153.992.400,00					250.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	153.992.400,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	2 Laporan	250.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.002.794.600,00					1.179.870.000,00	
		-					1.002.794.600,00					1.179.870.000,00	
	1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					35.989.000,00					24.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	35.989.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Unit	24.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					473.240.000,00					500.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	70 Unit	64 Unit	67 Unit	473.240.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	70 Unit	500.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					19.840.000,00					25.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45 Unit	38 Unit	45 Unit	19.840.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	45 Unit	25.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					439.765.600,00					550.870.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	439.765.600,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Unit	550.870.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					33.960.000,00					35.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	6 Unit	6 Unit	33.960.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	6 Unit	35.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					0,00					45.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	21 Unit	21 Unit	21 Unit	0,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	21 Unit	45.000.000,00	DINAS SOSIAL
43.	**1.06.02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**					**4.675.440.800,00**					**5.755.430.783,00**	
		Meningkatnya partisipasi aktif PSKS dan LKS dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial dan tertanganinya warga migran korban tindak kekerasan					***4.675.440.800,00***					***5.755.430.783,00***	
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota					4.675.440.800,00					5.755.430.783,00	
		-					4.675.440.800,00					5.755.430.783,00	
	1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota					1.759.771.300,00					3.580.430.783,00	
		Meningkatnya Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	1200 Keluarga	3014 Keluarga	1000 Keluarga	1.759.771.300,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	1200 Keluarga	3.580.430.783,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota					1.081.409.300,00					475.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	96 Lembaga	96 Lembaga	96 Lembaga	1.081.409.300,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	96 Lembaga	475.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0012	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)					172.674.600,00					150.000.000,00	
		Meningkatnya Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang	100 Orang	172.674.600,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	100 Orang	150.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota					1.661.585.600,00					1.550.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya	422 Orang	422 Orang	393 Orang	1.661.585.600,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	422 Orang	1.550.000.000,00	DINAS SOSIAL
44.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**					**1.775.197.740,00**					**1.704.453.530,00**	
		Meningkatnya kemandirian sosial Disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gelandangan dan pengemis serta PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Napza					***1.775.197.740,00***					***1.454.453.530,00***	
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial					1.640.197.840,00					1.559.453.530,00	
		-					1.640.197.840,00					1.559.453.530,00	
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan					342.098.600,00					344.453.530,00	
		Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	933 Orang	933 Orang	933 Orang	342.098.600,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	933 Orang	344.453.530,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang					49.999.900,00					250.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	140 Orang	100 Orang	20 Orang	49.999.900,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	120 Orang	250.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu					369.999.900,00					125.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	83 Orang	83 Orang	83 Orang	369.999.900,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	83 Orang	125.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga					149.999.800,00					125.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang	100 Orang	149.999.800,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	100 Orang	125.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial					400.000.000,00					325.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	150 Orang	150 Orang	400.000.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	150 Orang	325.000.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat					150.000.000,00					125.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang	100 Orang	150.000.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	100 Orang	125.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar					158.099.840,00					60.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	50 Orang	50 Orang	158.099.840,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	50 Orang	60.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan					19.999.800,00					175.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	33 Orang	33 Orang	33 Orang	19.999.800,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	33 Orang	175.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0014	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota					0,00					30.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	40 Orang	40 Orang	0,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	40 Orang	30.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial					134.999.900,00					145.000.000,00	
		-					134.999.900,00					145.000.000,00	
	1.06.04.2.02.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga					75.000.000,00					75.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	40 Orang	40 Orang	75.000.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	40 Orang	75.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota					59.999.900,00					70.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	35 Dokumen	35 Dokumen	35 Dokumen	59.999.900,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	35 Dokumen	70.000.000,00	DINAS SOSIAL
45.	**1.06.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**					**1.259.750.600,00**					**1.275.000.000,00**	
		Terlindunginya masyarakat kurang mampu dari resiko sosial dan ekonomi serta memiliki akses terhadap pemenuhan dasar yang layak					***1.259.750.600,00***					***1.275.000.000,00***	
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					1.259.750.600,00					1.275.000.000,00	
		-					1.259.750.600,00					1.275.000.000,00	
	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					299.999.800,00					400.000.000,00	
		Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	355717 Orang	355717 Orang	355717 Orang	299.999.800,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	355717 Orang	400.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat					257.050.900,00					160.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang	100 Orang	257.050.900,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	100 Orang	160.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga					177.700.000,00					140.000.000,00	
		Terpenuhinya Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	22000 Orang	22000 Orang	22000 Orang	177.700.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	22000 Orang	140.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					275.000.000,00					275.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	118119 Usulan	118119 Usulan	118119 Usulan	275.000.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	118119 Usulan	275.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0010	Fasilitasi bantuan stimulan modal usaha dan pendampingan bagi Fakir Miskin Kabupaten/Kota					249.999.900,00					300.000.000,00	
		Terlaksananya fasilitasi bantuan stimulan modal usaha dan pendampingan bagi Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga fakir miskin yang memperoleh bantuan stimulan modal dan pendampingan usaha Lintas Daerah	100 Orang	0 Orang	40 Orang	249.999.900,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	100 Orang	300.000.000,00	DINAS SOSIAL
46.	**1.06.06**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**					**765.461.800,00**					**865.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan non alam serta mengurangi dampak bencana					***665.461.800,00***					***730.000.000,00***	
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota					634.061.800,00					740.000.000,00	
		-					634.061.800,00					740.000.000,00	
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan					275.000.000,00					280.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	550 Orang	550 Orang	550 Orang	275.000.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6 Menguatkan Jaringan Ketahanan Bencana	550 Orang	280.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang					209.061.800,00					250.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	550 Orang	550 Orang	550 Orang	209.061.800,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6 Menguatkan Jaringan Ketahanan Bencana	550 Orang	250.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan					50.000.000,00					75.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	40 Orang	40 Orang	50.000.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6 Menguatkan Jaringan Ketahanan Bencana	40 Orang	75.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial					50.000.000,00					60.000.000,00	
		Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50.000.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6 Menguatkan Jaringan Ketahanan Bencana	50 Orang	60.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0007	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi					50.000.000,00					75.000.000,00	
		Tersedianya Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	20 Orang	20 Orang	50.000.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6 Menguatkan Jaringan Ketahanan Bencana	20 Orang	75.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota					131.400.000,00					125.000.000,00	
		-					131.400.000,00					125.000.000,00	
	1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana					46.000.000,00					30.000.000,00	
		Terlaksananya Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Kampung	0 Kampung	4 Kampung	46.000.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6 Menguatkan Jaringan Ketahanan Bencana	4 Kampung	30.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana					30.000.000,00					35.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	120 Orang	40 Orang	80 Orang	30.000.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6 Menguatkan Jaringan Ketahanan Bencana	100 Orang	35.000.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	1.06.06.2.02.0003	Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda					55.400.000,00					60.000.000,00	
		Tersedianya Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkat Kapasitasnya	Jumlah Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkat Kapasitasnya	40 Orang	0 Orang	40 Orang	55.400.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6 Menguatkan Jaringan Ketahanan Bencana	40 Orang	60.000.000,00	DINAS SOSIAL
47.	**1.06.07**	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**					**149.828.000,00**					**110.000.000,00**	
		Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan					***149.828.000,00***					***110.000.000,00***	
	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota					149.828.000,00					110.000.000,00	
		-					149.828.000,00					110.000.000,00	
	1.06.07.2.01.0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota					51.013.800,00					0,00	
		Terlaksananya Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	51.013.800,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	0 Dokumen	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota					98.814.200,00					110.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	50 Makam	50 Makam	368 Makam	98.814.200,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	50 Makam	110.000.000,00	DINAS SOSIAL
		DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN					**14.542.981.216,00**					**20.505.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**14.059.881.216,00**					**19.528.801.455,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**					**14.059.881.216,00**					**19.528.801.455,00**	
48.	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**11.077.681.216,00**					**11.550.045.730,00**	
		Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah					***11.077.681.216,00***					***11.540.045.730,00***	
	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					30.881.400,00					56.595.200,00	
		-					30.881.400,00					56.595.200,00	
	2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					4.319.400,00					8.773.900,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	4.319.400,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4 Kemudahan Berinvestasi Demi Terbukanya Lapangan Pekerjaan	2 Dokumen	8.773.900,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					4.715.200,00					6.762.900,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.715.200,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4 Kemudahan Berinvestasi Demi Terbukanya Lapangan Pekerjaan	1 Dokumen	6.762.900,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	2.07.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					4.661.400,00					7.497.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.661.400,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4 Kemudahan Berinvestasi Demi Terbukanya Lapangan Pekerjaan	1 Dokumen	7.497.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					4.147.200,00					6.753.100,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.147.200,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4 Kemudahan Berinvestasi Demi Terbukanya Lapangan Pekerjaan	1 Dokumen	6.753.100,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					4.095.300,00					6.808.300,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.095.300,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4 Kemudahan Berinvestasi Demi Terbukanya Lapangan Pekerjaan	1 Dokumen	6.808.300,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					4.618.700,00					10.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	4.618.700,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4 Kemudahan Berinvestasi Demi Terbukanya Lapangan Pekerjaan	12 Laporan	10.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					4.324.200,00					10.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	4.324.200,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4 Kemudahan Berinvestasi Demi Terbukanya Lapangan Pekerjaan	2 Laporan	10.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					8.412.473.006,00					8.491.931.571,00	
		-					8.412.473.006,00					8.491.931.571,00	
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					8.254.073.006,00					8.231.931.571,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 Orang/bulan	53 Orang/bulan	53 Orang/bulan	8.254.073.006,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	53 Orang/bulan	8.231.931.571,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					158.400.000,00					260.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	9 Dokumen	158.400.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4 Kemudahan Berinvestasi Demi Terbukanya Lapangan Pekerjaan	12 Dokumen	260.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					869.052.600,00					1.047.815.018,00	
		-					869.052.600,00					1.047.815.018,00	
	2.07.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					869.052.600,00					1.047.815.018,00	
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	34 Dokumen	34 Dokumen	34 Dokumen	869.052.600,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4 Kemudahan Berinvestasi Demi Terbukanya Lapangan Pekerjaan	34 Dokumen	1.047.815.018,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					339.216.810,00					523.516.459,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		-					339.216.810,00					523.516.459,00	
	2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor					9.997.000,00					50.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	15 Paket	9.997.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4 Kemudahan Berinvestasi Demi Terbukanya Lapangan Pekerjaan	15 Paket	50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					24.986.100,00					30.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	15 Paket	24.986.100,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4 Kemudahan Berinvestasi Demi Terbukanya Lapangan Pekerjaan	15 Paket	30.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					147.270.210,00					150.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100 Paket	80 Paket	80 Paket	147.270.210,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4 Kemudahan Berinvestasi Demi Terbukanya Lapangan Pekerjaan	100 Paket	150.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					0,00					121.352.459,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	10 Paket	10 Paket	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Kemudahan Berinvestasi Demi Terbukanya Lapangan Pekerjaan	12 Paket	121.352.459,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					12.500.000,00					35.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2180 Dokumen	2180 Dokumen	2180 Dokumen	12.500.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4 Kemudahan Berinvestasi Demi Terbukanya Lapangan Pekerjaan	2180 Dokumen	35.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu					11.050.000,00					25.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	300 Laporan	300 Laporan	300 Laporan	11.050.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4 Kemudahan Berinvestasi Demi Terbukanya Lapangan Pekerjaan	300 Laporan	25.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					133.413.500,00					112.164.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	133.413.500,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4 Kemudahan Berinvestasi Demi Terbukanya Lapangan Pekerjaan	24 Laporan	112.164.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					0,00					0,00	
		-					0,00					0,00	
	2.07.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					0,00					0,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	15 Unit	15 Unit	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Unit	0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					0,00					0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5 Unit	5 Unit	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Kemudahan Berinvestasi Demi Terbukanya Lapangan Pekerjaan	Unit	0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					375.382.400,00					683.867.482,00	
		-					375.382.400,00					683.867.482,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	2.07.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					5.594.400,00					12.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	120 Laporan	100 Laporan	99 Laporan	5.594.400,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4 Kemudahan Berinvestasi Demi Terbukanya Lapangan Pekerjaan	120 Laporan	12.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					369.788.000,00					300.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	369.788.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4 Kemudahan Berinvestasi Demi Terbukanya Lapangan Pekerjaan	6 Laporan	300.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					0,00					371.867.482,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	0 Laporan	4 Laporan	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4 Laporan	371.867.482,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.050.675.000,00					746.320.000,00	
		-					1.050.675.000,00					746.320.000,00	
	2.07.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					36.000.000,00					31.320.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	36.000.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4 Kemudahan Berinvestasi Demi Terbukanya Lapangan Pekerjaan	1 Unit	31.320.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					239.910.000,00					170.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	25 Unit	25 Unit	239.910.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	25 Unit	170.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel					22.750.000,00					20.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	25 Unit	25 Unit	25 Unit	22.750.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4 Kemudahan Berinvestasi Demi Terbukanya Lapangan Pekerjaan	25 Unit	20.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					99.959.800,00					85.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	15 Unit	15 Unit	99.959.800,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4 Kemudahan Berinvestasi Demi Terbukanya Lapangan Pekerjaan	15 Unit	85.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					652.055.200,00					350.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	3 Unit	652.055.200,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4 Kemudahan Berinvestasi Demi Terbukanya Lapangan Pekerjaan	3 Unit	350.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					0,00					90.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	10 Unit	5 Unit	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Kemudahan Berinvestasi Demi Terbukanya Lapangan Pekerjaan	10 Unit	90.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
49.	**2.07.02**	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**					**0,00**					**0,00**	
		Terkelolanya informasi tenaga kerja					***0,00***					***0,00***	
	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)					0,00					0,00	
		-					0,00					0,00	
	2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro					0,00					0,00	
		Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	0 Dokumen	0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.02.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro					0,00					0,00	
		Terlaksananya fasilitasi penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0,00	Kota Padang	-	-	0 Orang	0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
50.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**					**1.608.800.000,00**					**2.544.456.050,00**	
		Meningkatnya produktivitas tenaga kerja					***1.608.800.000,00***					***2.304.456.050,00***	
		-					1.608.800.000,00					1.176.456.050,00	
	2.07.03.2.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja					0,00					312.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	5 Lembaga	0 Lembaga	5 Lembaga	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5 Lembaga	312.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.03.2.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota					0,00					420.000.000,00	
		Tersedianya Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	6 Unit	0 Unit	25 Unit	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6 Unit	420.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.03.2.01.0006	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas					0,00					0,00	
		Terlaksananya Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Jumlah kesepakatan/koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun n	2 Kesepakatan	0 Kesepakatan	20 Kesepakatan	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Kesepakatan	0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta					0,00					480.000.000,00	
		-					0,00					480.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta					0,00					480.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	6 Lembaga	0 Lembaga	56 Lembaga	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5 Lembaga	480.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.03.2.03	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja					0,00					240.000.000,00	
		-					0,00					240.000.000,00	
	2.07.03.2.03.0001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi					0,00					240.000.000,00	
		Tersedianya Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	5 Perizinan	0 Perizinan	44 Perizinan	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5 Perizinan	240.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.03.2.04	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil					0,00					408.000.000,00	
		-					0,00					408.000.000,00	
	2.07.03.2.04.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil					0,00					408.000.000,00	
		Terlaksananya Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	11 Perusahaan	0 Perusahaan	106 Perusahaan	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	10 Perusahaan	408.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					0,00					240.000.000,00	
		-					0,00					240.000.000,00	
	2.07.03.2.05.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja					0,00					240.000.000,00	
		Terlaksananya Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	4 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3 Dokumen	240.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi					1.608.800.000,00					1.176.456.050,00	
		-					1.608.800.000,00					1.176.456.050,00	
	2.07.03.2.01.0008	Pengembangan Prasarana dan Sarana Pelatihan Vokasi					0,00					0,00	
		Terlaksananya pengembangan prasarana dan sarana pelatihan vokasi	Jumlah prasarana dan sarana pelatihan vokasi yang dibangun dan/atau dikembangkan pada tahun n	-	-	0 Unit	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.03.2.01.0009	Proses Pelaksanaan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi					1.608.800.000,00					444.456.050,00	
		Terlaksananya Proses Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	-	-	165 Orang	1.608.800.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4 Kemudahan Berinvestasi Demi Terbukanya Lapangan Pekerjaan	-	444.456.050,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
51.	**2.07.04**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**					**308.100.000,00**					**1.200.699.675,00**	
		Meningkatnya penempatan tenaga kerja					***308.100.000,00***					***1.200.699.675,00***	
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota					308.100.000,00					825.699.675,00	
		-					308.100.000,00					825.699.675,00	
	2.07.04.2.01.0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja					0,00					0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Tersedianya SDM Pelayanan antar Kerja (Pengantar Kerja dan Petugas antar Kerja)	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	0 Orang	0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja					0,00					0,00	
		Terwujudnya Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	0 Orang	0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja					0,00					0,00	
		Terlaksananya Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	0 Orang	0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.04.2.01.0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan					108.100.000,00					175.000.000,00	
		Terselenggaranya Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	30 Orang	18 Orang	30 Orang	108.100.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	30 Orang	175.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja					200.000.000,00					650.699.675,00	
		Terwujudnya Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	230 Orang	88 Orang	150 Orang	200.000.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	200 Orang	650.699.675,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.04.2.02	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					0,00					0,00	
		-					0,00					0,00	
	2.07.04.2.02.0001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS Secara Terintegrasi					0,00					0,00	
		Tersedianya Sumber Daya Perizinan LPTKS Secara Terintegrasi	Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi	0 Lembaga	0 Lembaga	0 Lembaga	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	0 Lembaga	0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.04.2.02.0002	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS					0,00					0,00	
		Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	0 Lembaga	0 Lembaga	0 Lembaga	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	0 Lembaga	0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja					0,00					375.000.000,00	
		-					0,00					375.000.000,00	
	2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online					0,00					0,00	
		Terselenggaranya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	0 Orang	0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja					0,00					375.000.000,00	
		Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	425 Orang	300 Orang	400 Orang	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	375 Orang	375.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
52.	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**					**1.065.300.000,00**					**4.233.600.000,00**	
		Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi					***1.065.300.000,00***					***3.883.600.000,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					79.476.000,00					500.000.000,00	
		-					79.476.000,00					500.000.000,00	
	2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan					0,00					200.000.000,00	
		Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	80 Perusahaan	Perusahaan	0 Perusahaan	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Kemudahan Berinvestasi Demi Terbukanya Lapangan Pekerjaan	80 Perusahaan	200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.05.2.01.0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan					0,00					150.000.000,00	
		Terlaksananya Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	30 Perusahaan	Perusahaan	0 Perusahaan	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Kemudahan Berinvestasi Demi Terbukanya Lapangan Pekerjaan	30 Perusahaan	150.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan					79.476.000,00					150.000.000,00	
		Terselenggaranya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	5 Laporan	Laporan	1 Laporan	79.476.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	5 Laporan	150.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota					985.824.000,00					3.733.600.000,00	
		-					985.824.000,00					3.733.600.000,00	
	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					0,00					160.000.000,00	
		Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	12 Perkara	4 Perkara	2 Perkara	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Kemudahan Berinvestasi Demi Terbukanya Lapangan Pekerjaan	12 Perkara	160.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					0,00					200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Terselesaikannya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	80 Perkara	50 Perkara	60 Perkara	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Kemudahan Berinvestasi Demi Terbukanya Lapangan Pekerjaan	80 Perkara	200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.05.2.02.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi					0,00					15.000.000,00	
		Terselenggaranya Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	30 Asosiasi dan Serikat Pekerja	12 Asosiasi dan Serikat Pekerja	40 Asosiasi dan Serikat Pekerja	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Kemudahan Berinvestasi Demi Terbukanya Lapangan Pekerjaan	12 Asosiasi dan Serikat Pekerja	15.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota					0,00					40.000.000,00	
		Terlaksananya Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Kemudahan Berinvestasi Demi Terbukanya Lapangan Pekerjaan	1 Lembaga	40.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja					985.824.000,00					3.318.600.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	38000 Orang	15000 Orang	25000 Orang	985.824.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4 Kemudahan Berinvestasi Demi Terbukanya Lapangan Pekerjaan	38000 Orang	3.318.600.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**					**483.100.000,00**					**976.198.545,00**	
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**					**483.100.000,00**					**976.198.545,00**	
53.	**3.31.02**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**					**483.100.000,00**					**928.948.545,00**	
		Meningkatnya realisasi pembangunan industri					***483.100.000,00***					***628.948.545,00***	
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota					483.100.000,00					928.948.545,00	
		-					483.100.000,00					928.948.545,00	
	3.31.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota					0,00					328.948.545,00	
		Tersusunnya Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	3 Dokumen	Dokumen	2 Dokumen	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Kemudahan Berinvestasi Demi Terbukanya Lapangan Pekerjaan	3 Dokumen	328.948.545,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri					150.000.000,00					300.000.000,00	
		Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	6 Dokumen	3 Dokumen	5 Dokumen	150.000.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4 Kemudahan Berinvestasi Demi Terbukanya Lapangan Pekerjaan	6 Dokumen	300.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat					333.100.000,00					300.000.000,00	
		Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	7 Dokumen	3 Dokumen	7 Dokumen	333.100.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4 Kemudahan Berinvestasi Demi Terbukanya Lapangan Pekerjaan	7 Dokumen	300.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
54.	**3.31.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**					**0,00**					**21.000.000,00**	
		Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian					***0,00***					***21.000.000,00***	
	3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota					0,00					21.000.000,00	
		-					0,00					21.000.000,00	
	3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota					0,00					10.000.000,00	
		Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Kemudahan Berinvestasi Demi Terbukanya Lapangan Pekerjaan	1 Dokumen	10.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)					0,00					11.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Terfasilitasinya verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Kemudahan Berinvestasi Demi Terbukanya Lapangan Pekerjaan	1 Dokumen	11.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
55.	**3.31.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**					**0,00**					**26.250.000,00**	
		Meningkatnya pemanfaatan informasi industri					***0,00***					***26.250.000,00***	
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota					0,00					26.250.000,00	
		-					0,00					26.250.000,00	
	3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)					0,00					15.000.000,00	
		Terfasilitasinya Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Kemudahan Berinvestasi Demi Terbukanya Lapangan Pekerjaan	1 Dokumen	15.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.04.2.01.0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas					0,00					11.250.000,00	
		Terdiseminasi dan Terpublikasikannya Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINAS	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 Dokumen	11.250.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA					**15.752.252.467,00**					**20.000.579.900,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**15.752.252.467,00**					**19.979.579.900,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**					**10.495.138.467,00**					**11.553.097.363,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
56.	**2.08.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**8.826.778.967,00**					**10.027.060.877,00**	
		Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah					***8.826.778.967,00***					***9.927.060.877,00***	
	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					0,00					4.000.000,00	
		-					0,00					4.000.000,00	
	2.08.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					0,00					4.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	5 Laporan	4.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					7.190.158.867,00					8.691.783.577,00	
		-					7.190.158.867,00					8.691.783.577,00	
	2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					6.972.718.867,00					8.479.013.577,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang/bulan	56 Orang/bulan	55 Orang/bulan	6.972.718.867,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	58 Orang/bulan	8.479.013.577,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					217.440.000,00					212.770.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	217.440.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 Dokumen	212.770.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					108.331.600,00					126.723.000,00	
		-					108.331.600,00					126.723.000,00	
	2.08.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					108.331.600,00					126.723.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	108.331.600,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	Dokumen	126.723.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					418.234.500,00					258.292.300,00	
		-					418.234.500,00					258.292.300,00	
	2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor					10.152.300,00					6.143.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	6 Paket	10.152.300,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	6 Paket	6.143.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					111.909.300,00					30.704.900,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	5 Paket	111.909.300,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	5 Paket	30.704.900,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					20.219.200,00					17.752.400,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	20.219.200,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	1 Paket	17.752.400,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					71.359.600,00					25.211.700,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	10 Paket	71.359.600,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	10 Paket	25.211.700,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					8.349.100,00					8.710.300,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	8.349.100,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	2 Paket	8.710.300,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					3.960.000,00					9.890.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.960.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	1 Dokumen	9.890.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu					9.886.500,00					9.880.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	9.886.500,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	1 Laporan	9.880.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					182.398.500,00					150.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	182.398.500,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	1 Laporan	150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					205.536.700,00					200.000.000,00	
		-					205.536.700,00					200.000.000,00	
	2.08.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					105.536.700,00					100.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	0 Unit	5 Unit	105.536.700,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	20 Unit	100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					100.000.000,00					100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	2 Unit	100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					0,00					0,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	2 Unit	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	0 Unit	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					203.300.500,00					182.840.800,00	
		-					203.300.500,00					182.840.800,00	
	2.08.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1.990.800,00					2.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.990.800,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	1 Laporan	2.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					201.309.700,00					180.840.800,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	201.309.700,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	12 Laporan	180.840.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					0,00					0,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0 Laporan	12 Laporan	0,00	Kota Padang	-	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	0 Laporan	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
		-					701.216.800,00					563.421.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	2.08.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					36.000.000,00					24.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	36.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	Unit	24.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					387.340.000,00					336.400.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	42 Unit	42 Unit	39 Unit	387.340.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	42 Unit	336.400.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					27.730.000,00					29.120.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	50 Unit	50 Unit	27.730.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	50 Unit	29.120.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					122.636.800,00					173.901.200,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	2 Unit	122.636.800,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	2 Unit	173.901.200,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					701.216.800,00					563.421.200,00	
		-					701.216.800,00					563.421.200,00	
	2.08.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					127.510.000,00					0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	1 Unit	127.510.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
57.	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**					**451.802.900,00**					**488.257.305,00**	
		Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan Peran perempuan dalam pembangunan					***451.802.900,00***					***388.257.305,00***	
		-					114.803.400,00					90.700.000,00	
	2.08.02.2.01.0007	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota					0,00					45.700.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan kab/ kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	1 Laporan	45.700.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota					114.803.400,00					90.700.000,00	
		-					114.803.400,00					90.700.000,00	
	2.08.02.2.01.0015	Advokasi dan sosialisasi terkait penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota					21.777.400,00					0,00	
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi terkait penyelenggaraan PUG Kewenangan Kab/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) terkait penyelenggaraan PUG Kewenangan Kab/Kota	-	-	52 Lembaga	21.777.400,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.01.0016	Bimbingan Teknis dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG bagi Perangkat Daerah Tingkat Kab/Kota					93.026.000,00					45.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG bagi Perangkat Daerah Tingkat Kab/Kota	Jumlah SDM Perangkat Daerah Kab/Kota yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan	-	-	170 Orang	93.026.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	-	45.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota					234.999.500,00					167.557.305,00	
		-					234.999.500,00					167.557.305,00	
	2.08.02.2.02.0010	Pengembangan Ruang Bersama Indonesia kewenangan Kab/Kota					35.000.000,00					50.000.000,00	
		Terlaksananya pengembangan Ruang Bersama Indonesia di tingkat kab/kota	Jumlah kegiatan pengembangan Ruang Bersama Indonesia	-	-	1 Kegiatan	35.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	-	50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.02.0011	Bimbingan teknis dan pendampingan SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kab/Kota					149.999.600,00					37.557.305,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Pendampingan SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM organisasi kemasyarakatan, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan	-	-	33 Orang	149.999.600,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	-	37.557.305,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.02.0012	Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan/atau ekonomi Kewenangan Kab/Kota					0,00					30.000.000,00	
		Terlaksananya pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan kewenangan Kab/Kota	Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan kewenangan Kab/Kota	-	-	1 Laporan	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	-	30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.02.0013	Advokasi dan sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan/atau ekonomi Kewenangan Kab/Kota					49.999.900,00					50.000.000,00	
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan/atau ekonomi Kewenangan Kab/Kota	Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	-	-	2 Lembaga	49.999.900,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	-	50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota					102.000.000,00					230.000.000,00	
		-					102.000.000,00					230.000.000,00	
	2.08.02.2.03.0012	Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kab/Kota					0,00					15.000.000,00	
		Terlaksananya pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kab/Kota	Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kab/Kota	-	-	1 Laporan	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	-	15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.03.0013	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kab/Kota					50.000.000,00					50.000.000,00	
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	-	-	1 Lembaga	50.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	-	50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.03.0014	Kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kab/Kota					52.000.000,00					165.000.000,00	
		Terlaksananya kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kab/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	-	-	1 Dokumen	52.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	-	165.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
58.	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**					**301.317.500,00**					**146.804.270,00**	
		Menurunnya kekerasan terhadap perempuan					***301.317.500,00***					***146.804.270,00***	
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota					139.950.000,00					35.730.000,00	
		-					139.950.000,00					35.730.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	2.08.03.2.01.0009	Advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kab/Kota					128.595.000,00					35.730.000,00	
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat Kab/Kota, dan masyarakat	Jumlah kegiatan advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tingkat Kab/Kota, dan masyarakat	-	-	11 Kegiatan	128.595.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	-	35.730.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.01.0012	Bimbingan Teknis dan pendampingan SDM yang terkait langsung pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Kewenangan Kab/Kota					11.355.000,00					0,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan pendampingan SDM yang terkait langsung pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	Jumlah SDM yang mendapat Bimbingan Teknis pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Kewenangan Kab/Kota	-	-	220 Orang	11.355.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota					85.866.000,00					77.823.170,00	
		-					85.866.000,00					77.823.170,00	
	2.08.03.2.02.0010	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota					24.820.000,00					29.171.800,00	
		Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	-	-	20 Orang	24.820.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	-	29.171.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.02.0012	Layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota					18.320.000,00					17.083.370,00	
		Tersedianya layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan pendampingan tenaga ahli di Tingkat Kab/Kota	-	-	20 Orang	18.320.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	17.083.370,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	2.08.03.2.02.0014	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota					29.550.000,00					23.316.800,00	
		Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kab/Kota	-	-	25 Orang	29.550.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	-	23.316.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.02.0017	Layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota					13.176.000,00					8.251.200,00	
		Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	-	-	10 Orang	13.176.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	8.251.200,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					75.501.500,00					33.251.100,00	
		-					75.501.500,00					33.251.100,00	
	2.08.03.2.03.0011	Bimbingan teknis dan pendampingan SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota					37.309.000,00					13.251.100,00	
		Terlaksananya Bimbingan teknis dan pendampingan SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan	-	-	55 Orang	37.309.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	-	13.251.100,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.03.0013	Advokasi dan sosialisasi Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota					38.192.500,00					20.000.000,00	
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat Kab/Kota (lembaga pemerintah dan non pemerintah) yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	-	-	1 Lembaga	38.192.500,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	-	20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
59.	**2.08.04**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**					**383.887.000,00**					**378.071.505,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Meningkatnya Kualitas Keluarga Dalam Mendukung Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak, serta perlindungan Perempuan dan Anak					***383.887.000,00***					***378.071.505,00***	
	2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota					313.887.100,00					278.071.505,00	
		-					313.887.100,00					278.071.505,00	
	2.08.04.2.02.0007	peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota					313.887.100,00					278.071.505,00	
		Terlaksananya peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas	115 Lembaga	115 Lembaga	115 Lembaga	313.887.100,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	115 Lembaga	278.071.505,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.04.2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota					69.999.900,00					100.000.000,00	
		-					69.999.900,00					100.000.000,00	
	2.08.04.2.03.0004	layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA LingkupKabupaten/Kota					69.999.900,00					100.000.000,00	
		Terlaksananya layanan penerimaan pengaduan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Kabupaten/Kota	100 Orang	50 Orang	100 Orang	69.999.900,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	100 Orang	100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
60.	**2.08.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**					**27.867.800,00**					**56.935.136,00**	
		Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak					***27.867.800,00***					***56.935.136,00***	
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					27.867.800,00					56.935.136,00	
		-					27.867.800,00					56.935.136,00	
	2.08.05.2.01.0006	Penguatan Penyelenggaraan Aplikasi Simfoni PPA untuk Penyediaan Data Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Berkualitas					0,00					10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Terwujudnya data kekerasan terhadap perempuan dan anak yang valid, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui optimalisasi penyelenggaraan Aplikasi Simfoni PPA di daerah	Jumlah dokumen laporan penyelenggaraan Aplikasi Simfoni PPA, mencakup beberapa hal, seperti: pelaksanan Bimtek di tingkat daerah, komposisi penyelenggara, pengelolaan data, Kebijakan & SOP pendukung, mekanisme validasi, pemanfaatan data, rencana tindak lanjut, dan lain sebagainya	-	-	1 Dokumen	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	-	10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.05.2.01.0007	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kab/Kota					27.867.800,00					31.935.136,00	
		Tersedianya Data Gender dan Anak tingkat Kab/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak tingkat Kab/Kota yang Tersedia	-	-	1 Dokumen	27.867.800,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	-	31.935.136,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.05.2.01.0008	Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak					0,00					15.000.000,00	
		Terlaksananya Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak	Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dan anak	-	-	10 Lembaga	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	-	15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
61.	**2.08.06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**					**152.500.400,00**					**180.037.474,00**	
		Terjaminnya Pemenuhan Hak Semua anak secara komprehensif					***152.500.400,00***					***150.037.474,00***	
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota					77.000.300,00					110.037.474,00	
		-					77.000.300,00					110.037.474,00	
	2.08.06.2.01.0007	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak kewenangan Kab/Kota					30.000.100,00					30.000.000,00	
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kab/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kab/Kota	-	-	55 Lembaga	30.000.100,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	-	30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	2.08.06.2.01.0009	Bimbingan Teknis dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kab/Kota					35.000.100,00					30.037.474,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM Perangkat Daerah Kab/Kota serta lembaga non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan Kab/Kota yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan	-	-	52 Orang	35.000.100,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	-	30.037.474,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.2.01.0010	Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak kewenangan Kab/Kota					12.000.100,00					50.000.000,00	
		Terlaksananya pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak kewenangan Kab/Kota	Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak kewenangan Kab/Kota	-	-	1 Laporan	12.000.100,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	-	50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota					75.500.100,00					70.000.000,00	
		-					75.500.100,00					70.000.000,00	
	2.08.06.2.02.0010	Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan penguatan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota					21.500.100,00					15.000.000,00	
		Terlaksananya pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	-	-	1 Laporan	21.500.100,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	-	15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.2.02.0012	Bimbingan teknis dan pendampingan SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota					29.000.100,00					30.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan teknis dan pendampingan SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan.	-	-	33 Orang	29.000.100,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	-	30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	2.08.06.2.02.0013	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota					24.999.900,00					25.000.000,00	
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Lembaga tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	-	-	12 Lembaga	24.999.900,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	-	25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
62.	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**					**350.983.900,00**					**275.930.796,00**	
		Meningkatnya Pencegahan dan Penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak					***350.983.900,00***					***255.930.796,00***	
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota					141.541.500,00					61.917.796,00	
		-					141.541.500,00					61.917.796,00	
	2.08.07.2.01.0012	Kerjasama pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) Kewenangan Kab/Kota					21.336.500,00					20.000.000,00	
		Terlaksananya kerjasama para pihak termasuk pemerintah dan lembaga non pemerintah termasuk lembaga masyarakat dalam pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) di tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kerjasama yang melibatkan para pihak baik pemerintah maupun lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat dalam pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) di tingkat Kabupaten/Kota	-	-	1 Dokumen	21.336.500,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	-	20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.01.0014	Advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kab/Kota					120.205.000,00					20.000.000,00	
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat Kab/Kota dan masyarakat.	Jumlah kegiatan advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) tingkat Kab/Kota dan masyarakat.	-	-	12 Kegiatan	120.205.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	-	20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.01.0015	Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) Kewenangan Kab/Kota					0,00					21.917.796,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Terlaksananya Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) Kewenangan Kab/Kota	-	-	1 Laporan	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	-	21.917.796,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					189.571.700,00					139.013.000,00	
		-					189.571.700,00					139.013.000,00	
	2.08.07.2.02.0016	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota					34.820.700,00					23.550.000,00	
		Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Daerah Kab/Kota	-	-	40 Orang	34.820.700,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	-	23.550.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.02.0017	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota					23.300.000,00					25.000.000,00	
		Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Kab/Kota	-	-	75 Orang	23.300.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	-	25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.02.0020	Layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota					63.275.000,00					10.000.000,00	
		Tersedianya layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus Tingkat Daerah Kab/Kota	-	-	10 Orang	63.275.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	-	10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.02.0021	Layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota					55.000.000,00					25.463.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Tersedianya layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan pendampingan tenaga ahli di Tingkat Daerah Kab/Kota	-	-	75 Orang	55.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	-	25.463.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.02.0022	Layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota					13.176.000,00					15.000.000,00	
		Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	-	-	10 Orang	13.176.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	-	15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.02.0023	Layanan spesifik bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota					0,00					40.000.000,00	
		Tersedianya Layanan spesifik bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan spesifik Tingkat Daerah Kab/Kota	-	-	20 Orang	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	-	40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					19.870.700,00					75.000.000,00	
		-					19.870.700,00					75.000.000,00	
	2.08.07.2.03.0016	Bimbingan teknis dan pendampingan SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota					19.870.700,00					75.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan teknis dan pendampingan SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	-	-	210 Orang	19.870.700,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	-	75.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.03.0018	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus kewenangan Kab/Kota					0,00					0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Terlaksananya Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus kewenangan Kab/Kota	Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	-	-	4 Laporan	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**					**5.257.114.000,00**					**8.426.482.537,00**	
63.	**2.14.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**					**399.400.000,00**					**465.096.600,00**	
		Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk					***399.400.000,00***					***465.096.600,00***	
		-					214.400.000,00					287.096.600,00	
	2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga					0,00					65.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	0,00	Kota Padang	DAK Non Fisik-BOKB-KB	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	1 Laporan	65.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga					0,00					0,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Kota Padang	-	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	0 Dokumen	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB					102.000.000,00					40.000.000,00	
		Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	102.000.000,00	Kota Padang	DAK Non Fisik-BOKB-KB	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	1 Dokumen	40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0018	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana					0,00					0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0,00	Kota Padang	-	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	0 Laporan	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0026	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain					50.000.000,00					135.000.000,00	
		Dibentuknya Rumah Data Kependudukan yang aktif di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	20 Unit	22 Unit	0 Unit	50.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	30 Unit	135.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk					185.000.000,00					178.000.000,00	
		-					185.000.000,00					178.000.000,00	
	2.14.02.2.01.0040	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung Keluarga Berkualitas					0,00					10.000.000,00	
		Terintegrasinya Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang melaksanakan penanganan isu terpadu kependudukan	-	-	1 Kampung KB	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	-	10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0042	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas					165.000.000,00					53.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Persentase DASHAT di Kampung Keluarga Berkualitas	-	-	11 Kelompok	165.000.000,00	Kota Padang	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	-	53.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0043	Fasilitasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas					0,00					90.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Terwujudnya Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas klasifikasi Mandiri	-	-	70 Kampung KB	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	-	90.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0052	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS Sesuai Isu Lokal Kabupaten/KotaPengembangan media dan materi edukasi kependudukan sesuai dengan isu dan kearifan lokal bagi Sekolah Siaga Kependudukan (SSK), Pramuka Peduli Kependudukan (Pramuka PK), ASN Peduli Kependudukan (ASN PK), dan Masyarakat Peduli Kependudukan (Mass PK).					20.000.000,00					25.000.000,00	
		Tersedianya media dan materi edukasi kependudukan sesuai dengan isu dan kearifan lokal bagi Sekolah Siaga Kependudukan (SSK), Pramuka Peduli Kependudukan (Pramuka PK), ASN Peduli Kependudukan (ASN PK), dan Masyarakat Peduli Kependudukan (Mass PK).	Jumlah media dan materi edukasi kependudukan sesuai dengan isu dan kearifan lokal bagi Sekolah Siaga Kependudukan (SSK), Pramuka Peduli Kependudukan (Pramuka PK), ASN Peduli Kependudukan (ASN PK), dan Masyarakat Peduli Kependudukan (Mass PK).	-	-	1 Dokumen	20.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	-	25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					214.400.000,00					287.096.600,00	
		-					214.400.000,00					287.096.600,00	
	2.14.02.2.02.0030	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga					62.400.000,00					47.096.600,00	
		Terlaksananya Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Kecamatan dan desa kleurahan yang melaksanakan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	-	-	11 Laporan	62.400.000,00	Kota Padang	DAK Non Fisik-BOKB-KB	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	-	47.096.600,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0035	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga					0,00					0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Terlaksananya Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Kecamatan dan desa keluarhan yang memanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan	-	-	0 Laporan / Dokumen	0,00	Kota Padang	-	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
64.	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**					**1.280.314.000,00**					**4.191.799.375,00**	
		Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan keluarga berencana (KB)					***1.280.314.000,00***					***4.191.799.375,00***	
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal					205.000.000,00					1.198.000.000,00	
		-					205.000.000,00					1.198.000.000,00	
	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK					0,00					39.000.000,00	
		Terlaksananya Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	1 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	0,00	Kota Padang	DAK Non Fisik-BOKB-KB	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	1 Laporan	39.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0009	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana					0,00					0,00	
		Terlaksananya Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Unit	0 Unit	1 Unit	0,00	Kota Padang	DAK Non Fisik-BOKB-KB	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	0 Unit	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana					165.000.000,00					500.000.000,00	
		Terkelolanya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	11 Laporan	11 Laporan	11 Laporan	165.000.000,00	Kota Padang	DAK Non Fisik-BOKB-KB	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	Laporan	500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)					0,00					184.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Terlaksananya Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	11 Laporan	11 Laporan	11 Laporan	0,00	Kota Padang	DAK Non Fisik-BOKB-KB	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	11 Laporan	184.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang					0,00					125.000.000,00	
		Terlaksananya Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Kota Padang	DAK Non Fisik-BOKB-KB	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	1 Dokumen	125.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal					0,00					150.000.000,00	
		Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Kota Padang	DAK Non Fisik-BOKB-KB	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	1 Dokumen	150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja					40.000.000,00					200.000.000,00	
		Terlaksananya Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	5 Organisasi	5 Organisasi	5 Organisasi	40.000.000,00	Kota Padang	DAK Non Fisik-BOKB-KB	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	5 Organisasi	200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)					305.000.000,00					1.098.200.000,00	
		-					305.000.000,00					1.098.200.000,00	
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)					78.000.000,00					831.600.000,00	
		Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	909 Orang	909 Orang	909 Orang	78.000.000,00	Kota Padang	DAK Non Fisik-BOKB-KB	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	909 Orang	831.600.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	2.14.03.2.02.0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB					227.000.000,00					127.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	11 Organisasi	0 Organisasi	11 Organisasi	227.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	11 Organisasi	127.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)					0,00					55.000.000,00	
		Terlaksananya Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	11 Laporan	0 Laporan	11 Laporan	0,00	Kota Padang	DAK Non Fisik-BOKB-KB	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	11 Laporan	55.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota					770.314.000,00					1.895.599.375,00	
		-					770.314.000,00					1.895.599.375,00	
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)					693.814.000,00					847.499.375,00	
		Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	2185 Orang	2185 Orang	2185 Orang	693.814.000,00	Kota Padang	DAK Non Fisik-BOKB-KB	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	2185 Orang	847.499.375,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0010	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi					0,00					100.000.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	25 Orang	0 Orang	25 Orang	0,00	Kota Padang	DAK Non Fisik-BOKB-KB	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	25 Orang	100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	2.14.03.2.03.0017	Fasilitasi dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan					0,00					0,00	
		Terlaksananya kegiatan fasilitasi dan pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	Jumlah kegiatan pembinaan Tim Pendamping Keluarga dalam melakukan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	12 Kegiatan	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	0 Kegiatan	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
		-					305.000.000,00					1.098.200.000,00	
	2.14.03.2.02.0009	Peningkatan Kapasitas Pencegahan Stunting bagi Tenaga Lini Lapangan					0,00					82.500.000,00	
		Salah satu bentuk peningkatan kapasitas yang diberikan kepada tenaga lini lapangan dan pengelola program Bangga Kencana berupa Dukungan Operasional. Kegiatan yang diadakan di Balai Penyuluhan KB atau di luar Balai Penyuluhan KB Kegiatan, minimal 6 (Enam) kali dalam 1 (satu) tahun. Kegiatan peningkatan kapasitas pencegahan stunting bagi tenaga lini lapangan dapat dilakukan secara berkelompok melalui luring dan/atau daring. Kegiatan ini juga dapat difasilitasi oleh Penyuluh KB dan PLKB dan/atau mitra kerja lainnya.	Jumlah Laporan peningkatan kapasitas yang diberikan kepada tenaga lini lapangan dan pengelola program Bangga Kencana berupa Dukungan Operasional	-	-	11 Laporan / Dokumen	0,00	Kota Padang	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	-	82.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0012	Pencabutan Implan					0,00					2.100.000,00	
		Tercapainya pelayanan pencabutan implan	Jumlah pelayanan pencabutan implan	-	-	10 Orang	0,00	Kota Padang	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	-	2.100.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
		-					770.314.000,00					1.895.599.375,00	
	2.14.03.2.03.0018	Penggerakan Pelayanan KB MOP					0,00					12.600.000,00	
		Tercapainya target akseptor MOP	Jumlah akseptor MOP	-	-	7 Orang	0,00	Kota Padang	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	-	12.600.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0019	Penggerakan Pelayanan KB MOW					0,00					336.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Tercapainya target akseptor MOW	Jumlah Akseptor MOW	-	-	80 Orang	0,00	Kota Padang	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	-	336.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0020	Penggerakan Pelayanan KB Implan					0,00					325.000.000,00	
		Tercapainya target akseptor Implan	Jumlah Akseptor Implan	-	-	1000 Orang	0,00	Kota Padang	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	-	325.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0023	Penggerakan Pelayanan KB IUD					0,00					198.000.000,00	
		Tercapainya target akseptor IUD	Jumlah Akseptor IUD	-	-	600 Orang	0,00	Kota Padang	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	-	198.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0029	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya					76.500.000,00					76.500.000,00	
		Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	-	-	12 Laporan	76.500.000,00	Kota Padang	DAK Non Fisik-BOKB-KB	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	-	76.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0031	Promosi dan KIE Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi berdasarkan siklus hidup					0,00					0,00	
		Terlaksananya promosi dan KIE Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi berdasarkan siklus hidup	laporan kegiatan promosi dan KIE Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi berdasarkan siklus hidup	-	-	1 Laporan / Dokumen	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
65.	**2.14.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**					**3.577.400.000,00**					**3.769.586.562,00**	
		Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera (KS)					***3.577.400.000,00***					***3.769.586.562,00***	
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga					350.000.000,00					788.186.562,00	
		-					350.000.000,00					788.186.562,00	
	2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))					200.000.000,00					350.000.000,00	
		Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	200.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	-	1 Laporan	350.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)					0,00					130.000.000,00	
		Terlaksananya Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga(BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	10 Unit	10 Unit	10 Unit	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	10 Unit	130.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)					100.000.000,00					78.000.000,00	
		Terlaksananya Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	104 Orang	0 Orang	104 Orang	100.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	104 Orang	78.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	2.14.04.2.01.0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)					0,00					50.000.000,00	
		Terlaksananya Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	11 Laporan	11 Laporan	11 Laporan	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	11 Laporan	50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)					0,00					45.000.000,00	
		Tersedianya biaya operasional bagi kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	450 Orang	0 Orang	450 Orang	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	450 Orang	45.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
		-					3.227.400.000,00					2.981.400.000,00	
	2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)					1.731.060.000,00					1.417.000.000,00	
		Terlaksananya Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	11 laporan	11 laporan	11 laporan	1.731.060.000,00	Kota Padang	DAK Non Fisik-BOKB-KB	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	11 laporan	1.417.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
		-					350.000.000,00					788.186.562,00	
	2.14.04.2.01.0033	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra)					0,00					38.400.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra)	-	-	1 Laporan / Dokumen	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	-	38.400.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	2.14.04.2.01.0034	Pembentukan dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL					50.000.000,00					34.386.562,00	
		Terlaksananya aktifitas lansia sesuai tujuh dimensi lansia tangguh dalam mewujudkan lansia yang Sehat, Mandiri, Aktif dan Produktif	Jumlah lansia yang menjadi anggota Sekolah Lansia di kelompok Bina Keluarga Lansia	-	-	11 Kegiatan	50.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	-	34.386.562,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0042	Pelaksanaan Register dan Registrasi Palayanan KB pada FASYANKES					0,00					0,00	
		Terlaksananya Register dan Registrasi Pelayanan KB pada FASYANKES	Jumlah Fasyankes dan TPMB setara fasyankes yang melaksanakan register dan registrasi pelaynan KB	-	-	86 Lokasi	0,00	Kota Padang	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0043	Pelaksanaan Pemutakhiran Data Keluarga Beresiko Stunting (Verval KRS)					0,00					62.400.000,00	
		Terlaksananya Pmutakhran Data Keluarga Beresiko Stunting (Verval KRS)	Jumlah desa/keluarhan yang melaksakan Pemutakhiran data KRS	-	-	104 Desa/Kelurahan	0,00	Kota Padang	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	-	62.400.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga					3.227.400.000,00					2.981.400.000,00	
		-					3.227.400.000,00					2.981.400.000,00	
	2.14.04.2.02.0009	Pendampingan Keluarga Risiko Stunting (KRS) oleh TPK (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)					1.496.340.000,00					1.564.400.000,00	
		Terlaksananya Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting yang mendapat pendampingan	-	-	11 Keluarga	1.496.340.000,00	Kota Padang	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	-	1.564.400.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**					**0,00**					**21.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
66.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**0,00**					**21.000.000,00**	
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					0,00					21.000.000,00	
		-					0,00					21.000.000,00	
	X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					0,00					4.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2 Dokumen	4.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	X.XX.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					0,00					2.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2 Dokumen	2.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	X.XX.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					0,00					2.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2 Dokumen	2.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	X.XX.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					0,00					4.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2 Dokumen	4.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	X.XX.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					0,00					4.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2 Dokumen	4.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	X.XX.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					0,00					4.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4 Laporan	4.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
		DINAS PERIKANAN DAN PANGAN					**18.377.004.439,00**					**23.340.845.500,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**13.353.876.663,00**					**18.217.466.421,00**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**					**13.353.876.663,00**					**18.217.466.421,00**	
67.	**2.09.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**12.680.767.663,00**					**15.923.402.671,00**	
		Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah					***12.662.767.663,00***					***15.863.402.671,00***	
	2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					21.000.000,00					70.000.000,00	
		-					21.000.000,00					70.000.000,00	
	2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					3.000.000,00					10.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	3.000.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	2 Dokumen	10.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					3.000.000,00					10.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	1 Dokumen	10.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					3.000.000,00					10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	1 Dokumen	10.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					3.000.000,00					10.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	1 Dokumen	10.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					3.000.000,00					10.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	1 Dokumen	10.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					3.000.000,00					10.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	12 Laporan	10.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					3.000.000,00					10.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	2 Laporan	10.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					9.264.141.763,00					12.481.294.347,00	
		-					9.264.141.763,00					12.481.294.347,00	
	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					9.045.861.763,00					12.207.409.447,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang/bulan	75 Orang/bulan	75 Orang/bulan	9.045.861.763,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	75 Orang/bulan	12.207.409.447,00	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					218.280.000,00					252.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	218.280.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	1 Dokumen	252.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					0,00					9.885.600,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	1 Laporan	9.885.600,00	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					0,00					4.999.500,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	4 Laporan	1 Laporan	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	4 Laporan	4.999.500,00	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					0,00					6.999.800,00	
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	2 Dokumen	6.999.800,00	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					167.177.400,00					217.339.700,00	
		-					167.177.400,00					217.339.700,00	
	2.09.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					167.177.400,00					207.339.600,00	
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	167.177.400,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	1 Dokumen	207.339.600,00	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					0,00					10.000.100,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	1 Laporan	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	12 Laporan	10.000.100,00	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah					0,00					4.991.000,00	
		-					0,00					4.991.000,00	
	2.09.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah					0,00					4.991.000,00	
		Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	12 Dokumen	4.991.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					570.929.100,00					555.262.200,00	
		-					570.929.100,00					555.262.200,00	
	2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor					30.008.200,00					29.999.100,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	30.008.200,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	1 Paket	29.999.100,00	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					0,00					120.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	1 Paket	120.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					35.925.700,00					12.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	35.925.700,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	1 Paket	12.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					122.820.900,00					65.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	122.820.900,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	1 Paket	65.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					81.486.300,00					40.006.700,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	81.486.300,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	1 Paket	40.006.700,00	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					20.000.000,00					20.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	4 Dokumen	20.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu					63.978.000,00					49.997.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	1 Laporan	63.978.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	12 Laporan	49.997.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					216.710.000,00					213.260.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	216.710.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	12 Laporan	213.260.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	2.09.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					0,00					4.999.400,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	1 Dokumen	4.999.400,00	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					0,00					25.000.000,00	
		-					0,00					25.000.000,00	
	2.09.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					0,00					25.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	6 Unit	6 Unit	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	8 Unit	25.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.682.633.400,00					1.704.788.000,00	
		-					1.682.633.400,00					1.704.788.000,00	
	2.09.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					0,00					4.788.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	1 Laporan	4.788.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					1.682.633.400,00					1.700.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.682.633.400,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	1 Laporan	1.700.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					974.886.000,00					864.727.424,00	
		-					974.886.000,00					864.727.424,00	
	2.09.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					36.000.000,00					36.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	36.000.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	1 Unit	36.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					495.050.000,00					547.136.224,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	53 Unit	53 Unit	47 Unit	495.050.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	53 Unit	547.136.224,00	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					79.780.000,00					80.050.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 Unit	70 Unit	70 Unit	79.780.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	70 Unit	80.050.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					159.166.800,00					49.945.200,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	4 Unit	159.166.800,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	4 Unit	49.945.200,00	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					204.889.200,00					151.596.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	4 Unit	204.889.200,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	1 Unit	151.596.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
68.	**2.09.03**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**					**583.100.000,00**					**1.850.380.875,00**	
		Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat					***583.100.000,00***					***1.850.380.875,00***	
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan					235.000.000,00					332.380.875,00	
		-					235.000.000,00					332.380.875,00	
	2.09.03.2.01.0009	Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal					90.000.000,00					125.000.000,00	
		Terlaksananya pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	90.000.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	1 Laporan	125.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota					0,00					25.000.000,00	
		Berkembangnya Kelembagaan Distribusi Pangan kabupaten/kota	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	2 Unit	2 Unit	2 Unit	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	2 Unit	25.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	2.09.03.2.01.0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis					125.000.000,00					155.380.875,00	
		Terlaksananya pemantauan stok, pasokan dan harga pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	125.000.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	2 Laporan	155.380.875,00	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)					0,00					12.000.000,00	
		Tersedianya Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	1 Dokumen	12.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0020	Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota					20.000.000,00					15.000.000,00	
		Tersedianya data proyeksi neraca pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	1 Dokumen	15.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota					75.000.000,00					748.000.000,00	
		-					75.000.000,00					748.000.000,00	
	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota					75.000.000,00					748.000.000,00	
		Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	65 Ton	60 Ton	58 Ton	75.000.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	57 Ton	748.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi					273.100.000,00					770.000.000,00	
		-					273.100.000,00					770.000.000,00	
	2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun					23.000.000,00					70.000.000,00	
		Terlaksananya Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	23.000.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	2 Dokumen	70.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal					250.100.000,00					700.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	250.100.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	1 Laporan	700.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
69.	**2.09.04**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**					**30.009.000,00**					**390.920.375,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Meningkatnya penanganan kerawanan pangan					***30.009.000,00***					***370.920.375,00***	
	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan					0,00					20.000.000,00	
		-					0,00					20.000.000,00	
	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan					0,00					20.000.000,00	
		Tersusunnya Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	1 Dokumen	20.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota					30.009.000,00					370.920.375,00	
		-					30.009.000,00					370.920.375,00	
	2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota					30.009.000,00					350.920.375,00	
		Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	30.009.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	2 Laporan	350.920.375,00	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	2.09.04.2.02.0005	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota					0,00					20.000.000,00	
		Tersedianya Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	1 Dokumen	20.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
70.	**2.09.05**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**					**60.000.000,00**					**52.762.500,00**	
		Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan					***60.000.000,00***					***52.762.500,00***	
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota					60.000.000,00					52.762.500,00	
		-					60.000.000,00					52.762.500,00	
	2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota					60.000.000,00					52.762.500,00	
		Penerbitan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	60.000.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	2 Dokumen	52.762.500,00	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**					**5.023.127.776,00**					**5.123.379.079,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**					**5.023.127.776,00**					**5.123.379.079,00**	
71.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**					**3.410.416.000,00**					**2.714.319.681,00**	
		Meningkatnya produksi perikanan tangkap					***3.410.416.000,00***					***2.714.319.681,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota					139.000.000,00					75.000.000,00	
		-					139.000.000,00					75.000.000,00	
	3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan					35.000.000,00					20.000.000,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	35.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	5 Dokumen	20.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	3.25.03.2.01.0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap					104.000.000,00					55.000.000,00	
		Tersedianya Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	20500 Unit	0 Unit	16000 Unit	104.000.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	17500 Unit	55.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota					3.271.416.000,00					2.624.319.681,00	
		-					3.271.416.000,00					2.624.319.681,00	
	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil					3.098.316.000,00					2.594.319.681,00	
		Meningkatnya Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	360 Orang	200 Orang	300 Orang	3.098.316.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	320 Orang	2.594.319.681,00	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil					173.100.000,00					30.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	10 Kelompok	7 Kelompok	10 Kelompok	173.100.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	10 Kelompok	30.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)					0,00					15.000.000,00	
		-					0,00					15.000.000,00	
	3.25.03.2.03.0001	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)					0,00					15.000.000,00	
		Ditetapkannya SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	-	-	12 Dokumen	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	-	15.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
72.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**					**816.099.876,00**					**1.314.806.092,00**	
		Meningkatnya produksi perikanan budidaya					***816.099.876,00***					***814.806.092,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil					448.000.000,00					500.000.000,00	
		-					448.000.000,00					500.000.000,00	
	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil					448.000.000,00					500.000.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	15 Kelompok	15 Kelompok	10 Kelompok	448.000.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	12 Kelompok	500.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan					368.099.876,00					814.806.092,00	
		-					368.099.876,00					814.806.092,00	
	3.25.04.2.04.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					0,00					24.806.092,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	4 Dokumen	24.806.092,00	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					49.999.976,00					500.000.000,00	
		Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 Unit	3 Unit	5 Unit	49.999.976,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	5 Unit	500.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	3.25.04.2.04.0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					49.999.900,00					150.000.000,00	
		Tersedianya Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	49.999.900,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	10 Dokumen	150.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					235.000.000,00					80.000.000,00	
		Tersedianya Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Unit	2 Unit	2 Unit	235.000.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	2 Unit	80.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	3.25.04.2.04.0010	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat					33.100.000,00					60.000.000,00	
		Terbinanya Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	64 Unit	80 Unit	96 Unit	33.100.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	80 Unit	60.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
73.	**3.25.05**	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**					**30.000.000,00**					**36.933.750,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Meningkatnya kelestarian laut dan keanekaragaman hayati					***30.000.000,00***					***36.933.750,00***	
	3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota					30.000.000,00					36.933.750,00	
		-					30.000.000,00					36.933.750,00	
	3.25.05.2.01.0007	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota					30.000.000,00					36.933.750,00	
		Usaha Penangkapan Ikan dan/atau Usaha Pengangkutan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota Yang Diawasi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	1 Pelaku Usaha	1 Pelaku Usaha	1 Pelaku Usaha	30.000.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	1 Pelaku Usaha	36.933.750,00	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
74.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**					**766.611.900,00**					**1.057.319.556,00**	
		meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat					***766.611.900,00***					***1.057.319.556,00***	
	3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil					7.935.900,00					50.000.000,00	
		-					7.935.900,00					50.000.000,00	
	3.25.06.2.01.0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko					7.935.900,00					50.000.000,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	7.935.900,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	12 Dokumen	50.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil					16.394.000,00					73.000.000,00	
		-					16.394.000,00					73.000.000,00	
	3.25.06.2.02.0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko					16.394.000,00					73.000.000,00	
		Terlaksananya pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	9 Unit Usaha	6 Unit Usaha	7 Unit Usaha	16.394.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	8 Unit Usaha	73.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota					742.282.000,00					934.319.556,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		-					742.282.000,00					934.319.556,00	
	3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					460.136.200,00					804.000.000,00	
		Meningkatnya Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	60 Ton	56 Ton	57 Ton	460.136.200,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	58 Ton	804.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
	3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					282.145.800,00					130.319.556,00	
		Tersedianya Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	20 Pelaku Usaha	8 Pelaku Usaha	8 Pelaku Usaha	282.145.800,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	14 Pelaku Usaha	130.319.556,00	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
		DINAS PERTANAHAN					**5.004.411.652,00**					**6.573.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**5.004.411.652,00**					**6.573.000.000,00**	
	2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**					**5.004.411.652,00**					**6.573.000.000,00**	
75.	**2.10.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**4.777.863.852,00**					**5.707.547.200,00**	
		Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah					***4.777.863.852,00***					***5.402.547.200,00***	
	2.10.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					0,00					40.000.000,00	
		-					0,00					40.000.000,00	
	2.10.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					0,00					5.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Kemudahan Berinvestasi Demi Terbukanya Lapangan Pekerjaan	2 Dokumen	5.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					0,00					5.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Kemudahan Berinvestasi Demi Terbukanya Lapangan Pekerjaan	1 Dokumen	5.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					0,00					5.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Kemudahan Berinvestasi Demi Terbukanya Lapangan Pekerjaan	1 Dokumen	5.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					0,00					5.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Kemudahan Berinvestasi Demi Terbukanya Lapangan Pekerjaan	1 Dokumen	5.000.000,00	DINAS PERTANAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	2.10.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					0,00					5.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Kemudahan Berinvestasi Demi Terbukanya Lapangan Pekerjaan	1 Dokumen	5.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					0,00					10.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan	0 Laporan	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Kemudahan Berinvestasi Demi Terbukanya Lapangan Pekerjaan	12 Laporan	10.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					0,00					5.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	0 Laporan	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Kemudahan Berinvestasi Demi Terbukanya Lapangan Pekerjaan	3 Laporan	5.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					4.235.901.452,00					4.563.393.271,00	
		-					4.235.901.452,00					4.563.393.271,00	
	2.10.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					4.127.661.452,00					4.399.893.271,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/bulan	33 Orang/bulan	28 Orang/bulan	4.127.661.452,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	4 Kemudahan Berinvestasi Demi Terbukanya Lapangan Pekerjaan	33 Orang/bulan	4.399.893.271,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					108.240.000,00					158.500.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	108.240.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4 Kemudahan Berinvestasi Demi Terbukanya Lapangan Pekerjaan	12 Dokumen	158.500.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					0,00					5.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Kemudahan Berinvestasi Demi Terbukanya Lapangan Pekerjaan	1 Laporan	5.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					2.660.100,00					73.000.000,00	
		-					2.660.100,00					73.000.000,00	
	2.10.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD					2.660.100,00					5.000.000,00	
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.660.100,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4 Kemudahan Berinvestasi Demi Terbukanya Lapangan Pekerjaan	1 Dokumen	5.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					0,00					58.000.000,00	
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Kemudahan Berinvestasi Demi Terbukanya Lapangan Pekerjaan	1 Dokumen	58.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD					0,00					5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	1 Laporan	5.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					0,00					5.000.000,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Kemudahan Berinvestasi Demi Terbukanya Lapangan Pekerjaan	1 Laporan	5.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					156.452.100,00					400.950.000,00	
		-					156.452.100,00					400.950.000,00	
	2.10.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor					3.388.600,00					20.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	20 Paket	4 Paket	3.388.600,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4 Kemudahan Berinvestasi Demi Terbukanya Lapangan Pekerjaan	20 Paket	20.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					20.383.900,00					50.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	5 Paket	1 Paket	20.383.900,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4 Kemudahan Berinvestasi Demi Terbukanya Lapangan Pekerjaan	2 Paket	50.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					1.530.000,00					10.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	4 Paket	1.530.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4 Kemudahan Berinvestasi Demi Terbukanya Lapangan Pekerjaan	4 Paket	10.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					26.605.600,00					45.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25 Paket	25 Paket	36 Paket	26.605.600,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4 Kemudahan Berinvestasi Demi Terbukanya Lapangan Pekerjaan	25 Paket	45.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					11.580.000,00					35.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	3 Paket	11.580.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4 Kemudahan Berinvestasi Demi Terbukanya Lapangan Pekerjaan	8 Paket	35.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					4.560.000,00					11.200.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.560.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4 Kemudahan Berinvestasi Demi Terbukanya Lapangan Pekerjaan	12 Dokumen	11.200.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu					17.020.000,00					39.750.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	17.020.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4 Kemudahan Berinvestasi Demi Terbukanya Lapangan Pekerjaan	12 Laporan	39.750.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					71.384.000,00					180.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	25 Laporan	10 Laporan	71.384.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4 Kemudahan Berinvestasi Demi Terbukanya Lapangan Pekerjaan	25 Laporan	180.000.000,00	DINAS PERTANAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	2.10.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					0,00					10.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	50 Dokumen	50 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Kemudahan Berinvestasi Demi Terbukanya Lapangan Pekerjaan	50 Dokumen	10.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					0,00					119.000.000,00	
		-					0,00					119.000.000,00	
	2.10.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					0,00					59.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	2 Unit	0 Unit	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Kemudahan Berinvestasi Demi Terbukanya Lapangan Pekerjaan	2 Unit	59.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					0,00					25.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	3 Unit	0 Unit	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Kemudahan Berinvestasi Demi Terbukanya Lapangan Pekerjaan	2 Unit	25.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					0,00					20.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	8 Unit	0 Unit	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Kemudahan Berinvestasi Demi Terbukanya Lapangan Pekerjaan	3 Unit	20.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					0,00					15.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	1 Unit	0 Unit	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Kemudahan Berinvestasi Demi Terbukanya Lapangan Pekerjaan	3 Unit	15.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					3.780.000,00					73.803.929,00	
		-					3.780.000,00					73.803.929,00	
	2.10.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					3.780.000,00					12.600.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	3.780.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4 Kemudahan Berinvestasi Demi Terbukanya Lapangan Pekerjaan	12 Laporan	12.600.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					0,00					46.203.929,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Kemudahan Berinvestasi Demi Terbukanya Lapangan Pekerjaan	12 Laporan	46.203.929,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					0,00					5.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	0 Laporan	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Kemudahan Berinvestasi Demi Terbukanya Lapangan Pekerjaan	12 Laporan	5.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					0,00					10.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Kemudahan Berinvestasi Demi Terbukanya Lapangan Pekerjaan	12 Laporan	10.000.000,00	DINAS PERTANAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	2.10.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					379.070.200,00					437.400.000,00	
		-					379.070.200,00					437.400.000,00	
	2.10.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					36.000.000,00					32.400.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	36.000.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4 Kemudahan Berinvestasi Demi Terbukanya Lapangan Pekerjaan	1 Unit	32.400.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					203.370.000,00					200.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	22 Unit	13 Unit	203.370.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4 Kemudahan Berinvestasi Demi Terbukanya Lapangan Pekerjaan	22 Unit	200.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					15.550.000,00					25.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	47 Unit	47 Unit	23 Unit	15.550.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4 Kemudahan Berinvestasi Demi Terbukanya Lapangan Pekerjaan	47 Unit	25.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					124.150.200,00					180.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	124.150.200,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4 Kemudahan Berinvestasi Demi Terbukanya Lapangan Pekerjaan	1 Unit	180.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
76.	**2.10.04**	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**					**17.947.300,00**					**106.491.000,00**	
		Meningkatnya Penyelesaian sengketa tanah garapan					***17.947.300,00***					***106.491.000,00***	
	2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota					17.947.300,00					106.491.000,00	
		-					17.947.300,00					106.491.000,00	
	2.10.04.2.01.0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					12.156.300,00					56.491.000,00	
		Terlaksananya Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	6 Berita Acara	6 Berita Acara	3 Berita Acara	12.156.300,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4 Kemudahan Berinvestasi Demi Terbukanya Lapangan Pekerjaan	6 Berita Acara	56.491.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.04.2.01.0005	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					5.791.000,00					50.000.000,00	
		Terinventarisasinya Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	6 Dokumen	6 Dokumen	3 Dokumen	5.791.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4 Kemudahan Berinvestasi Demi Terbukanya Lapangan Pekerjaan	6 Dokumen	50.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
77.	**2.10.05**	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**					**56.545.700,00**					**206.500.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Meningkatnya Penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan					***56.545.700,00***					***206.500.000,00***	
	2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					56.545.700,00					206.500.000,00	
		-					56.545.700,00					206.500.000,00	
	2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					56.545.700,00					206.500.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	50 Dokumen	25 Dokumen	25 Dokumen	56.545.700,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4 Kemudahan Berinvestasi Demi Terbukanya Lapangan Pekerjaan	25 Dokumen	206.500.000,00	DINAS PERTANAHAN
78.	**2.10.06**	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**					**12.888.800,00**					**88.290.000,00**	
		Meningkatnya akses masyarakat terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)					***12.888.800,00***					***88.290.000,00***	
	2.10.06.2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					12.888.800,00					88.290.000,00	
		-					12.888.800,00					88.290.000,00	
	2.10.06.2.01.0008	Inventarisasi Subjek Redistribusi Tanah					12.888.800,00					88.290.000,00	
		Tersedianya Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	100 Dokumen	100 Dokumen	1 Dokumen	12.888.800,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4 Kemudahan Berinvestasi Demi Terbukanya Lapangan Pekerjaan	100 Dokumen	88.290.000,00	DINAS PERTANAHAN
79.	**2.10.07**	**PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT**					**8.265.500,00**					**53.433.700,00**	
		Meningkatnya tata kelola tanah ulayat					***8.265.500,00***					***53.433.700,00***	
	2.10.07.2.01	Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota					8.265.500,00					53.433.700,00	
		-					8.265.500,00					53.433.700,00	
	2.10.07.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					8.265.500,00					53.433.700,00	
		Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	8 Laporan	1 Laporan	8.265.500,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4 Kemudahan Berinvestasi Demi Terbukanya Lapangan Pekerjaan	12 Laporan	53.433.700,00	DINAS PERTANAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
80.	**2.10.08**	**PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG**					**116.455.000,00**					**358.000.000,00**	
		Meningkatnya Pengelolaan tanah kosong					***116.455.000,00***					***258.000.000,00***	
	2.10.08.2.01	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong					0,00					50.000.000,00	
		-					0,00					50.000.000,00	
	2.10.08.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					0,00					50.000.000,00	
		Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong	10 Laporan	10 Laporan	0 Laporan	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Kemudahan Berinvestasi Demi Terbukanya Lapangan Pekerjaan	10 Laporan	50.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.08.2.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong					116.455.000,00					308.000.000,00	
		-					116.455.000,00					308.000.000,00	
	2.10.08.2.02.0001	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong					102.563.800,00					208.000.000,00	
		Terlaksananya Inventarisasi Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.	20 Laporan	20 Laporan	1 Laporan	102.563.800,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4 Kemudahan Berinvestasi Demi Terbukanya Lapangan Pekerjaan	20 Laporan	208.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.08.2.02.0002	Pemanfaatan Tanah Kosong					13.891.200,00					50.000.000,00	
		Terlaksanannya Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong	20 Dokumen	20 Dokumen	1 Dokumen	13.891.200,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4 Kemudahan Berinvestasi Demi Terbukanya Lapangan Pekerjaan	20 Dokumen	50.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.08.2.02.0003	Koordinasi Pemanfaatan Tanah Kosong					0,00					50.000.000,00	
		Terlaksananya koordinasi pemanfataan Tanah Kosong dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara koordinasi dalam rangka pemanfataan tanah kosong dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	20 Berita Acara	20 Berita Acara	0 Berita Acara	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Kemudahan Berinvestasi Demi Terbukanya Lapangan Pekerjaan	20 Berita Acara	50.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
81.	**2.10.10**	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**					**14.445.500,00**					**52.738.100,00**	
		Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah					***14.445.500,00***					***52.738.100,00***	
	2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota					14.445.500,00					52.738.100,00	
		-					14.445.500,00					52.738.100,00	
	2.10.10.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah					14.445.500,00					27.738.100,00	
		Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	50 Laporan	50 Laporan	1 Laporan	14.445.500,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4 Kemudahan Berinvestasi Demi Terbukanya Lapangan Pekerjaan	50 Laporan	27.738.100,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.10.2.01.0004	Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota					0,00					25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Terlaksananya tahapan Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota (KT skala kecil)	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota	15 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Kemudahan Berinvestasi Demi Terbukanya Lapangan Pekerjaan	15 Dokumen	25.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP					**155.384.559.069,00**					**180.466.158.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**155.384.559.069,00**					**180.466.158.000,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**					**155.384.559.069,00**					**180.466.158.000,00**	
82.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**65.249.735.524,00**					**79.641.451.063,00**	
		Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah					***65.249.735.524,00***					***79.641.451.063,00***	
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					4.047.300,00					11.502.700,00	
		-					4.047.300,00					11.502.700,00	
	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					1.601.200,00					3.834.900,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	1.601.200,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	6 Dokumen	3.834.900,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					1.208.300,00					3.709.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	1.208.300,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	5 Laporan	3.709.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1.237.800,00					3.958.800,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	1.237.800,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	6 Laporan	3.958.800,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					63.682.874.524,00					77.071.974.843,00	
		-					63.682.874.524,00					77.071.974.843,00	
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					63.490.212.824,00					76.515.463.083,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	860 Orang/bulan	860 Orang/bulan	860 Orang/bulan	63.490.212.824,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	860 Orang/bulan	76.515.463.083,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	2.11.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					186.350.000,00					544.512.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	186.350.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	12 Dokumen	544.512.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					6.311.700,00					11.999.760,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	6.311.700,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	8 Dokumen	11.999.760,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					277.223.500,00					726.647.320,00	
		-					277.223.500,00					726.647.320,00	
	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor					8.800.000,00					9.600.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	5 Paket	8.800.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	5 Paket	9.600.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					0,00					260.676.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	6 Paket	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	6 Paket	260.676.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					0,00					24.406.800,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	1 Paket	4 Paket	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	4 Paket	24.406.800,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					44.942.100,00					86.865.600,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	44.942.100,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	3 Paket	86.865.600,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					52.815.400,00					67.730.520,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	52.815.400,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	2 Paket	67.730.520,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					7.860.000,00					18.249.600,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	7.860.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	Dokumen	18.249.600,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu					3.640.000,00					21.040.800,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	3.640.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	12 Laporan	21.040.800,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					159.166.000,00					238.078.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	159.166.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	12 Laporan	238.078.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					0,00					23.150.400,00	
		-					0,00					23.150.400,00	
	2.11.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					0,00					23.150.400,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	65 Unit	Unit	65 Unit	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	65 Unit	23.150.400,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					518.724.000,00					650.917.400,00	
		-					518.724.000,00					650.917.400,00	
	2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					4.750.200,00					7.891.200,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	4.750.200,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	12 Laporan	7.891.200,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					447.787.200,00					550.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	447.787.200,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	3 Laporan	550.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					66.186.600,00					93.026.200,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	66.186.600,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	3 Laporan	93.026.200,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					766.866.200,00					1.157.258.400,00	
		-					766.866.200,00					1.157.258.400,00	
	2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					36.000.000,00					28.800.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	36.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	1 Unit	28.800.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					635.260.000,00					762.312.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50 Unit	50 Unit	50 Unit	635.260.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	50 Unit	762.312.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel					0,00					6.144.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	14 Unit	20 Unit	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	20 Unit	6.144.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					55.070.000,00					84.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	125 Unit	118 Unit	125 Unit	55.070.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	125 Unit	84.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					0,00					245.992.800,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	1 Unit	245.992.800,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					40.536.200,00					30.009.600,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 Unit	25 Unit	25 Unit	40.536.200,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	25 Unit	30.009.600,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
83.	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**					**498.978.569,00**					**1.358.960.070,00**	
		Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup					***498.978.569,00***					***1.358.960.070,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota					423.992.669,00					1.042.523.000,00	
		-					423.992.669,00					1.042.523.000,00	
	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut					33.415.800,00					75.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	33.415.800,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	2 Dokumen	75.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim					34.459.200,00					65.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	34.459.200,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	1 Dokumen	65.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0010	Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota					2.662.500,00					50.000.000,00	
		Terlaksananya upaya mitigasi perubahan iklim di Tingkat kabupaten/kota	Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2.662.500,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	2 Laporan	50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0011	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah					48.455.200,00					76.983.000,00	
		Dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	48.455.200,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	2 Dokumen	76.983.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota					304.999.969,00					775.540.000,00	
		Terlaksananya pengujian di laboratorium lingkungan	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	1500 Dokumen	1500 Dokumen	1500 Dokumen	304.999.969,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	1500 Dokumen	775.540.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota					74.985.900,00					316.437.070,00	
		-					74.985.900,00					316.437.070,00	
	2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat					74.985.900,00					316.437.070,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Terlaksananya Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	74.985.900,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	12 Laporan	316.437.070,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
84.	**2.11.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**					**10.447.624.800,00**					**10.500.000.000,00**	
		Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI)					***10.447.624.800,00***					***10.500.000.000,00***	
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota					10.447.624.800,00					10.500.000.000,00	
		-					10.447.624.800,00					10.500.000.000,00	
	2.11.04.2.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati					0,00					0,00	
		Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang Disusun	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	0 Dokumen	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)					10.447.624.800,00					10.500.000.000,00	
		Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	28 Ha	28 Ha	28 Ha	10.447.624.800,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	28 Ha	10.500.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
85.	**2.11.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**					**232.039.900,00**					**218.634.938,00**	
		Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang ditertibkan					***232.039.900,00***					***218.634.938,00***	
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					232.039.900,00					218.634.938,00	
		-					232.039.900,00					218.634.938,00	
	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH					201.540.000,00					127.579.000,00	
		Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan/atau Pemenuhan Ketentuan Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	40 Dokumen	31 Dokumen	25 Dokumen	201.540.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	40 Dokumen	127.579.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup					30.499.900,00					91.055.938,00	
		Seluruh Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang diawasi	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Badan Usaha	15 Badan Usaha	30 Badan Usaha	30.499.900,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	75 Badan Usaha	91.055.938,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
86.	**2.11.08**	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**					**62.439.100,00**					**94.347.209,00**	
		Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup					***62.439.100,00***					***94.347.209,00***	
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					62.439.100,00					94.347.209,00	
		-					62.439.100,00					94.347.209,00	
	2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup					2.800.600,00					54.000.000,00	
		Terlaksananya Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2.800.600,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	2 Dokumen	54.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat					59.638.500,00					40.347.209,00	
		Meningkatnya jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup skala kabupaten/kota yang terdaftar di kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitas dan Kompetensi SDM nya	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	3 Lembaga	3 Lembaga	3 Lembaga	59.638.500,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	3 Lembaga	40.347.209,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
87.	**2.11.09**	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**					**1.239.213.500,00**					**1.383.375.058,00**	
		Menigkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup					***1.239.213.500,00***					***1.383.375.058,00***	
	2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					1.239.213.500,00					1.383.375.058,00	
		-					1.239.213.500,00					1.383.375.058,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup					1.239.213.500,00					1.383.375.058,00	
		Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	3 Entitas	3 Entitas	3 Entitas	1.239.213.500,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	3 Entitas	1.383.375.058,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
88.	**2.11.10**	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**					**53.257.700,00**					**103.837.585,00**	
		Meningkatnya penyelesaian sengketa / kasus tindak pidana lingkungan hidup					***53.257.700,00***					***103.837.585,00***	
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota					53.257.700,00					103.837.585,00	
		-					53.257.700,00					103.837.585,00	
	2.11.10.2.01.0005	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota					20.111.000,00					50.000.000,00	
		Diselesaikannya sengketa lingkungan hidup yang ditangani baik Melalui Pengadilan ataupun di Luar Pengadilan yang merupakan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	20 Perkara	20 Perkara	15 Perkara	20.111.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	20 Perkara	50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.10.2.01.0009	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota					33.146.700,00					53.837.585,00	
		Pengelolaan pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang dikelola	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola	15 Pengaduan	20 Pengaduan	15 Pengaduan	33.146.700,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	15 Pengaduan	53.837.585,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
89.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**					**77.601.269.976,00**					**87.165.552.077,00**	
		Meningkatnya tata kelola persampahan					***77.601.269.976,00***					***87.165.552.077,00***	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah					77.601.269.976,00					87.165.552.077,00	
		-					77.601.269.976,00					87.165.552.077,00	
	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan					235.174.300,00					431.830.000,00	
		Meningkatnya Pemahaman, Kesadaran, Kepedulian, dan Peran Aktif Masyarakat dan Para Pihak Lainnya dalam Pengelolaan Sampah	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	5 Kelompok	5 Kelompok	3 Kelompok	235.174.300,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	5 Kelompok	431.830.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0009	Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah					13.712.259.500,00					15.717.542.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	205 Unit	205 Unit	208 Unit	13.712.259.500,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	210 Unit	15.717.542.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan					26.001.676.800,00					27.412.250.615,00	
		Sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	220000 Ton	223600 Ton	220600 Ton	26.001.676.800,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	222000 Ton	27.412.250.615,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0016	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah					32.924.318.276,00					36.004.087.908,00	
		Luas pelayanan pengumpulan sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah	100 Persentase	83.2 Persentase	85.2 Persentase	32.924.318.276,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	90.1 Persentase	36.004.087.908,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan					625.000.000,00					1.200.000.000,00	
		Sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	52925 Ton	16425 Ton	650 Ton	625.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	25550 Ton	1.200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional					4.102.841.100,00					6.399.841.554,00	
		Sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	138700 Ton	175200 Ton	169725 Ton	4.102.841.100,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	156950 Ton	6.399.841.554,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL					**10.569.042.996,00**					**12.928.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**10.569.042.996,00**					**12.928.000.000,00**	
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**					**10.569.042.996,00**					**12.928.000.000,00**	
90.	**2.12.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**8.780.887.443,00**					**9.969.249.745,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah					***8.778.787.443,00***					***9.969.249.745,00***	
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					5.747.700,00					5.833.900,00	
		-					5.747.700,00					5.833.900,00	
	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					600.000,00					666.600,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	600.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	2 Dokumen	666.600,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					600.000,00					877.800,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	600.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Dokumen	877.800,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					600.000,00					572.100,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	600.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Dokumen	572.100,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					900.000,00					633.200,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	900.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Dokumen	633.200,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					900.000,00					694.300,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	900.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Dokumen	694.300,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					1.248.600,00					829.100,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.248.600,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Laporan	829.100,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					899.100,00					1.560.800,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	899.100,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	4 Laporan	1.560.800,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					8.017.212.243,00					9.045.057.210,00	
		-					8.017.212.243,00					9.045.057.210,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					7.874.652.243,00					8.908.497.210,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72 Orang/bulan	72 Orang/bulan	68 Orang/bulan	7.874.652.243,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	72 Orang/bulan	8.908.497.210,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					142.560.000,00					136.560.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	142.560.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Dokumen	136.560.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					252.547.500,00					219.776.600,00	
		-					252.547.500,00					219.776.600,00	
	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor					6.408.000,00					14.999.500,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	6.408.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Paket	14.999.500,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					106.949.600,00					15.447.600,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	1 Paket	0 Paket	106.949.600,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Paket	15.447.600,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					29.461.400,00					14.938.600,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	29.461.400,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	3 Paket	14.938.600,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					8.490.000,00					9.993.500,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	8.490.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Paket	9.993.500,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					5.905.000,00					11.800.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1175 Dokumen	1175 Dokumen	587 Dokumen	5.905.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1175 Dokumen	11.800.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu					4.881.500,00					2.597.400,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	4.881.500,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Laporan	2.597.400,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					90.452.000,00					150.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18 Laporan	12 Laporan	16 Laporan	90.452.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	16 Laporan	150.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					240.520.000,00					272.000.000,00	
		-					240.520.000,00					272.000.000,00	
	2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					2.520.000,00					2.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	2.520.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Laporan	2.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					238.000.000,00					270.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	238.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	24 Laporan	270.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					264.860.000,00					426.582.035,00	
		-					264.860.000,00					426.582.035,00	
	2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					36.000.000,00					24.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	36.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Unit	24.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					208.260.000,00					183.300.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	17 Unit	17 Unit	208.260.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	17 Unit	183.300.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					20.600.000,00					20.440.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit	20 Unit	20.600.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	20 Unit	20.440.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					0,00					178.842.035,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Unit	178.842.035,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					0,00					20.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	0 Unit	0 Unit	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	2 Unit	20.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
91.	**2.12.02**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**					**1.170.176.200,00**					**1.991.955.815,00**	
		meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk					***1.170.176.200,00***					***1.991.955.815,00***	
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk					1.040.901.362,00					1.864.678.977,00	
		-					1.040.901.362,00					1.864.678.977,00	
	2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan					196.636.300,00					290.598.900,00	
		Tersedianya Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	1600 Dokumen	1000 Dokumen	500 Dokumen	196.636.300,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1000 Dokumen	290.598.900,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk					784.558.262,00					1.350.000.000,00	
		Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	120000 Dokumen	50000 Dokumen	50000 Dokumen	784.558.262,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	100000 Dokumen	1.350.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk					53.017.300,00					155.954.900,00	
		Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	53.017.300,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Laporan	155.954.900,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0005	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan					6.689.500,00					68.125.177,00	
		Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	50000 Dokumen	20000 Dokumen	20000 Dokumen	6.689.500,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	40000 Dokumen	68.125.177,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk					129.274.838,00					127.276.838,00	
		-					129.274.838,00					127.276.838,00	
	2.12.02.2.03.0005	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk					129.274.838,00					127.276.838,00	
		Tersosialisasinya Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	129.274.838,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	4 Laporan	127.276.838,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
92.	**2.12.03**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**					**176.021.253,00**					**170.301.600,00**	
		meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil					***176.021.253,00***					***170.301.600,00***	
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil					157.699.700,00					136.883.200,00	
		-					157.699.700,00					136.883.200,00	
	2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting					157.699.700,00					136.883.200,00	
		Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	22000 Dokumen	22000 Dokumen	24000 Dokumen	157.699.700,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	22000 Dokumen	136.883.200,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil					18.321.553,00					33.418.400,00	
		-					18.321.553,00					33.418.400,00	
	2.12.03.2.02.0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil					4.546.553,00					19.643.200,00	
		Terlaksananya Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	4.546.553,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Laporan	19.643.200,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0009	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil					13.775.000,00					13.775.200,00	
		Terlaksananya Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	13.775.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	3 Dokumen	13.775.200,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
93.	**2.12.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**					**370.714.800,00**					**721.687.375,00**	
		meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan					***370.714.800,00***					***721.687.375,00***	
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan					291.958.100,00					415.032.575,00	
		-					291.958.100,00					415.032.575,00	
	2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan					200.000.000,00					360.000.000,00	
		Terlaksananya Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	2 Dokumen	360.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan					91.958.100,00					55.032.575,00	
		Terlaksananya Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	91.958.100,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	4 Dokumen	55.032.575,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan					78.756.700,00					306.654.800,00	
		-					78.756.700,00					306.654.800,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	2.12.04.2.03.0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan					0,00					71.654.800,00	
		Tersosialisasinya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	0 Laporan	2 Laporan	0 Laporan	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	2 Laporan	71.654.800,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0008	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan					78.756.700,00					235.000.000,00	
		Terlaksananya Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	78.756.700,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Dokumen	235.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
94.	**2.12.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**					**71.243.300,00**					**74.805.465,00**	
		meningkatnya kualitas profil kependudukan					***71.243.300,00***					***74.805.465,00***	
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan					71.243.300,00					74.805.465,00	
		-					71.243.300,00					74.805.465,00	
	2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain					71.243.300,00					74.805.465,00	
		Tersusunnya Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	71.243.300,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	2 Dokumen	74.805.465,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
		DINAS PERHUBUNGAN					**158.847.550.347,00**					**157.997.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**158.847.550.347,00**					**157.997.000.000,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**					**158.847.550.347,00**					**157.997.000.000,00**	
95.	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**32.975.993.976,00**					**30.557.282.101,00**	
		Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah					***32.975.993.976,00***					***30.499.282.101,00***	
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					62.407.500,00					135.000.000,00	
		-					62.407.500,00					135.000.000,00	
	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					10.207.500,00					60.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	10.207.500,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Dokumen	60.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					52.200.000,00					75.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	52.200.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Laporan	75.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					19.253.311.576,00					19.765.885.147,00	
		-					19.253.311.576,00					19.765.885.147,00	
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					18.874.471.576,00					19.107.885.147,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	197 Orang/bulan	197 Orang/bulan	197 Orang/bulan	18.874.471.576,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	197 Orang/bulan	19.107.885.147,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					371.340.000,00					650.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	371.340.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Dokumen	650.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan					0,00					3.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	2 Dokumen	3.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					7.500.000,00					5.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	7.500.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Laporan	5.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					9.680.329.100,00					6.098.396.954,00	
		-					9.680.329.100,00					6.098.396.954,00	
	2.15.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					9.680.329.100,00					6.098.396.954,00	
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	9.680.329.100,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Dokumen	6.098.396.954,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah					0,00					5.000.000,00	
		-					0,00					5.000.000,00	
	2.15.01.2.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah					0,00					5.000.000,00	
		Tersedianya Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Dokumen	5.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					308.450.000,00					395.000.000,00	
		-					308.450.000,00					395.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					308.450.000,00					350.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	308.450.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Paket	350.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					0,00					25.000.000,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Dokumen	25.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					0,00					20.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	20 Orang	0 Orang	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	20 Orang	20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					796.874.300,00					800.000.000,00	
		-					796.874.300,00					800.000.000,00	
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor					15.000.000,00					30.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Paket	30.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					89.988.400,00					220.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	89.988.400,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Paket	220.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					74.997.500,00					140.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	74.997.500,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	4 Paket	140.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					299.999.800,00					130.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	299.999.800,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	3 Paket	130.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu					11.895.000,00					25.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	11.895.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Laporan	25.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					299.999.500,00					250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	60 Laporan	60 Laporan	299.999.500,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	60 Laporan	250.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					4.994.100,00					5.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.994.100,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Dokumen	5.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					328.999.900,00					620.000.000,00	
		-					328.999.900,00					620.000.000,00	
	2.15.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar					0,00					0,00	
		Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	0 Unit	1 Unit	0 Unit	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	0 Unit	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					69.000.000,00					0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	15 Unit	0 Unit	69.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	0 Unit	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					200.000.000,00					300.000.000,00	
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	2 Unit	2 Unit	200.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	3 Unit	300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					0,00					200.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	0 Unit	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	2 Unit	200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					59.999.900,00					120.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	5 Unit	59.999.900,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	5 Unit	120.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					591.263.200,00					759.000.000,00	
		-					591.263.200,00					759.000.000,00	
	2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1.990.800,00					3.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300 Laporan	300 Laporan	300 Laporan	1.990.800,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	300 Laporan	3.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					589.272.400,00					750.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	589.272.400,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Laporan	750.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					0,00					6.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	0 Laporan	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	2 Laporan	6.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.954.358.400,00					1.979.000.000,00	
		-					1.954.358.400,00					1.979.000.000,00	
	2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					36.000.000,00					24.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	36.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Unit	24.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					1.282.070.000,00					1.300.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	62 Unit	62 Unit	62 Unit	1.282.070.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	62 Unit	1.300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel					25.000.000,00					20.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	10 Unit	25.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	10 Unit	20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					64.620.000,00					65.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	30 Unit	30 Unit	64.620.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	30 Unit	65.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					519.998.400,00					520.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit	5 Unit	519.998.400,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	5 Unit	520.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					26.670.000,00					50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	50 Unit	50 Unit	26.670.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	50 Unit	50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
96.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**					**125.871.556.371,00**					**127.439.717.899,00**	
		Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat					***125.811.556.371,00***					***72.229.717.899,00***	
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota					59.152.339.000,00					60.000.000.000,00	
		-					59.152.339.000,00					60.000.000.000,00	
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota					4.726.735.000,00					5.000.000.000,00	
		Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	600 Unit	500 Unit	300 Unit	4.726.735.000,00	Kota Padang	Pajak Penerangan Jalan	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	600 Unit	5.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan					54.425.604.000,00					55.000.000.000,00	
		Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	2100 Unit	2500 Unit	3000 Unit	54.425.604.000,00	Kota Padang	Pajak Penerangan Jalan	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	3000 Unit	55.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C					20.000.000,00					20.000.000,00	
		-					20.000.000,00					20.000.000,00	
	2.15.02.2.03.0006	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C					20.000.000,00					20.000.000,00	
		Terlaksananya pengawasan terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	1 Dokumen	20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir					622.000.000,00					241.153.000,00	
		-					622.000.000,00					241.153.000,00	
	2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota					622.000.000,00					241.153.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	622.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	1 Laporan	241.153.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					594.000.000,00					1.177.000.000,00	
		-					594.000.000,00					1.177.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					0,00					401.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	0 Unit	1 Unit	0 Unit	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Unit	401.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					534.000.000,00					626.000.000,00	
		Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	534.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	2 Dokumen	626.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					60.000.000,00					150.000.000,00	
		Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	9 Unit	9 Unit	9 Unit	60.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	9 Unit	150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota					1.938.501.500,00					9.181.564.899,00	
		-					1.938.501.500,00					9.181.564.899,00	
	2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota					300.001.500,00					786.500.000,00	
		Terawasinya dan Terkendalinya Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	300.001.500,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	2 Laporan	786.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0013	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)					0,00					210.000.000,00	
		Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	5 Unit	5 Unit	0 Unit	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	5 Unit	210.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota					50.000.000,00					200.000.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	2 Dokumen	200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota					15.000.000,00					50.000.000,00	
		Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	1 Laporan	50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas					823.500.000,00					1.000.000.000,00	
		Terlaksananya Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	823.500.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	6 Dokumen	1.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota					50.000.000,00					200.000.000,00	
		Terlaksananya penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	50.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	2 Laporan	200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0018	Penyelenggaraan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas					700.000.000,00					6.735.064.899,00	
		Terselenggaranya Sistem Manajemen Transportasi Cerdas	Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas	21 Unit	21 Unit	21 Unit	700.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	21 Unit	6.735.064.899,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota					20.000.000,00					20.000.000,00	
		-					20.000.000,00					20.000.000,00	
	2.15.02.2.07.0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin					10.000.000,00					10.000.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	10.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	4 Laporan	10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.07.0008	Penetapan Dokumen Teknis Andalalin					10.000.000,00					10.000.000,00	
		Ditetapkannya Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin	Jumlah Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin yang ditetapkan	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	10.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	6 Dokumen	10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					63.524.715.871,00					55.300.000.000,00	
		-					63.524.715.871,00					55.300.000.000,00	
	2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota					0,00					300.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Terkendalinya dan Terawasinya Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2 Laporan	2 Laporan	0 Laporan	0,00	Kota Padang	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	2 Laporan	300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					63.524.715.871,00					55.000.000.000,00	
		Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	152 Unit	87 Unit	85 Unit	63.524.715.871,00	Kota Padang	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	152 Unit	55.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					0,00					1.500.000.000,00	
		-					0,00					1.500.000.000,00	
	2.15.02.2.11.0003	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					0,00					1.500.000.000,00	
		Terkendalinya Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	4 Dokumen	1.500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					**23.900.614.116,00**					**23.645.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**23.900.614.116,00**					**23.645.000.000,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**					**23.279.764.116,00**					**23.081.262.804,00**	
97.	**2.16.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**9.340.588.116,00**					**11.790.031.816,00**	
		Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah					***9.340.588.116,00***					***11.763.042.316,00***	
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					0,00					74.385.200,00	
		-					0,00					74.385.200,00	
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					0,00					5.397.900,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	2 Dokumen	5.397.900,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					0,00					5.397.900,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	1 Dokumen	5.397.900,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	2.16.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					0,00					5.397.900,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	1 Dokumen	5.397.900,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					0,00					5.397.900,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	1 Dokumen	5.397.900,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					0,00					5.397.900,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	1 Dokumen	5.397.900,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					0,00					5.397.900,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	1 Laporan	5.397.900,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					0,00					10.997.900,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	12 Laporan	10.997.900,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah					0,00					15.499.900,00	
		Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	1 Dokumen	15.499.900,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah					0,00					15.500.000,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	40 Data	40 Data	40 Data	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	40 Data	15.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					8.581.770.816,00					9.915.286.568,00	
		-					8.581.770.816,00					9.915.286.568,00	
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					8.312.830.816,00					9.601.969.180,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 Orang/bulan	80 Orang/bulan	80 Orang/bulan	8.312.830.816,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	80 Orang/bulan	9.601.969.180,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					268.940.000,00					313.317.388,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	268.940.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	12 Dokumen	313.317.388,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					375.517.300,00					652.667.160,00	
		-					375.517.300,00					652.667.160,00	
	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor					3.846.000,00					11.258.707,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	3.846.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	1 Paket	11.258.707,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					0,00					115.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	4 Paket	2 Paket	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	2 Paket	115.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					0,00					57.500.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	0 Paket	1 Paket	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	1 Paket	57.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					71.417.200,00					70.071.605,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	71.417.200,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	4 Paket	70.071.605,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					0,00					53.836.848,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	4 Paket	53.836.848,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					28.800.000,00					15.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	28.800.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	12 Dokumen	15.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu					11.998.100,00					30.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	11.998.100,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	12 Laporan	30.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					259.456.000,00					300.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	259.456.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	12 Laporan	300.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					0,00					749.987.837,00	
		-					0,00					749.987.837,00	
	2.16.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					0,00					678.385.042,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit	4 Unit	8 Unit	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	4 Unit	678.385.042,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					0,00					71.602.795,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	35 Unit	52 Unit	20 Unit	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	25 Unit	71.602.795,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.260.000,00					39.333.960,00	
		-					1.260.000,00					39.333.960,00	
	2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1.260.000,00					3.333.960,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	12 Laporan	1 Laporan	1.260.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	1 Laporan	3.333.960,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					0,00					36.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	0 Laporan	12 Laporan	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	12 Laporan	36.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					382.040.000,00					358.371.091,00	
		-					382.040.000,00					358.371.091,00	
	2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					36.000.000,00					32.400.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	36.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	1 Unit	32.400.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					316.640.000,00					243.800.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	10 Unit	15 Unit	316.640.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	15 Unit	243.800.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					29.400.000,00					58.730.175,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	30 Unit	35 Unit	29.400.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	40 Unit	58.730.175,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					0,00					23.440.916,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	6 Unit	6 Unit	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	6 Unit	23.440.916,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
98.	**2.16.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**					**1.314.626.000,00**					**2.904.183.320,00**	
		Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah					***1.314.626.000,00***					***2.604.183.320,00***	
		-					1.314.626.000,00					2.904.183.320,00	
	2.16.02.2.01.0014	Relasi Media					0,00					400.000.000,00	
		Terlaksananya Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	1 Laporan	400.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					1.314.626.000,00					2.904.183.320,00	
		-					1.314.626.000,00					2.904.183.320,00	
	2.16.02.2.01.0025	Pelayanan Informasi Publik serta Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik					26.785.000,00					1.000.000.000,00	
		Tersedianya Pelayanan Informasi Publik bagi masyarakat dan terlaksananya Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Persentase permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	-	-	100 %	26.785.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	-	1.000.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0026	Sosialisasi/Diseminasi Informasi serta Pengelolaan Media Komunikasi Publik					1.197.265.000,00					700.000.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi/Diseminasi Informasi serta Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah khalayak yang terpapar informasi publik	-	-	85 Orang	1.197.265.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	-	700.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0029	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini Publik, dan Aspirasi Publik					36.421.000,00					85.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring Informasi Kebijakan, Opini Publik, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	-	-	1 Rekomendasi	36.421.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	-	85.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0030	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik					0,00					119.183.320,00	
		Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	-	-	55 Orang	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	-	119.183.320,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0031	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat					54.155.000,00					300.000.000,00	
		Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Komunitas Informasi Masyarakat yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	-	-	5 Komunitas	54.155.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	-	300.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	2.16.02.2.01.0032	Penyusunan Konten					0,00					300.000.000,00	
		Terlaksananya Penyusunan Konten	Jumlah Konten Komunikasi Publik	-	-	1000 Konten	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	-	300.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
99.	**2.16.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**					**12.624.550.000,00**					**8.387.047.668,00**	
		Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika					***12.624.550.000,00***					***8.137.047.668,00***	
		-					12.624.550.000,00					8.387.047.668,00	
	2.16.03.2.02.0038	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas					274.550.000,00					150.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	274.550.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	1 Dokumen	150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					12.624.550.000,00					8.387.047.668,00	
		-					12.624.550.000,00					8.387.047.668,00	
	2.16.03.2.02.0040	Penyediaan Akses Internet					7.200.000.000,00					7.185.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dan UPTD, termasuk ruang publik dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	-	-	42 Titik	7.200.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	-	7.185.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0042	Koordinasi pengelolaan aplikasi, data/informasi, dan layanan pemerintah daerah berbasis elektronik yang terintegrasi					550.000.000,00					250.000.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan aplikasi, data/informasi, dan layanan pemerintah daerah berbasis elektronik yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	-	-	10 Layanan	550.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	-	250.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0043	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota					1.151.110.000,00					250.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	-	-	42 Titik	1.151.110.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	-	250.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0044	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional dan Penyelenggaraan Pusat Kendali Pemerintah Daerah					3.448.890.000,00					552.047.668,00	
		Terlaksananya koordinasi dalam rangka pemanfaatan Ekosistem Pusat Data Nasional dan Penyelenggaraan Pusat Kendali Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Ekosistem Pusat Data Nasional dan laporan operasionalisasi pusat kendali	-	-	1 Aplikasi	3.448.890.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	-	552.047.668,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**					**115.648.000,00**					**113.024.696,00**	
100.	**2.20.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**					**115.648.000,00**					**113.024.696,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Tercapainya kolaborasi, intregrasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan sistem statistik Nasional (SSN)					***115.648.000,00***					***76.024.696,00***	
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota					115.648.000,00					113.024.696,00	
		-					115.648.000,00					113.024.696,00	
	2.20.02.2.01.0018	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia					0,00					37.000.000,00	
		Tersedianya Statistik Sektoral yang memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	80 %	0 %	80 %	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	80 %	37.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0020	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral					40.993.000,00					37.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	80 Orang	80 Orang	80 Orang	40.993.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	80 Orang	37.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0021	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar					74.655.000,00					24.024.696,00	
		Terlaksananya Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	80 %	77.8 %	80 %	74.655.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	80 %	24.024.696,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0022	Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral					0,00					15.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Melalui Forum Satu Data Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	2 Laporan	0 Laporan	2 Laporan	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	2 Laporan	15.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**					**505.202.000,00**					**450.712.500,00**	
101.	**2.21.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**					**505.202.000,00**					**450.712.500,00**	
		Meningkatnya keamanan siber dan sandi lingkungan Pemerintah Daerah					***505.202.000,00***					***285.356.250,00***	
		-					505.202.000,00					450.712.500,00	
	2.21.02.2.01.0006	Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan					155.202.000,00					165.356.250,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	5 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	155.202.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	2 Laporan	165.356.250,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					505.202.000,00					450.712.500,00	
		-					505.202.000,00					450.712.500,00	
	2.21.02.2.01.0009	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah					350.000.000,00					120.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Bupati/Walikota, Keputusan Bupati/Walikota maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian	-	-	1 Dokumen	350.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	-	120.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.0010	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik					0,00					165.356.250,00	
		Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	-	-	2 Laporan	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	-	165.356.250,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					**17.152.889.588,00**					**30.889.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**17.152.889.588,00**					**30.889.000.000,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**					**17.152.889.588,00**					**30.889.000.000,00**	
102.	**2.17.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**15.265.487.588,00**					**18.875.535.053,00**	
		Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah					***15.265.487.588,00***					***18.823.700.153,00***	
	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					0,00					8.451.830,00	
		-					0,00					8.451.830,00	
	2.17.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					0,00					1.140.630,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	1 Dokumen	1.140.630,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2.17.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					0,00					900.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	1 Dokumen	900.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2.17.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					0,00					1.470.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	1 Dokumen	1.470.200,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2.17.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					0,00					1.240.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	1 Dokumen	1.240.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2.17.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					0,00					1.151.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan	0 Laporan	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	3 Laporan	1.151.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2.17.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					0,00					2.550.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	7 Laporan	0 Laporan	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	7 Laporan	2.550.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					14.851.909.515,00					17.886.422.623,00	
		-					14.851.909.515,00					17.886.422.623,00	
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					14.851.909.515,00					17.614.067.923,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	162 Orang/bulan	162 Orang/bulan	155 Orang/bulan	14.851.909.515,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	162 Orang/bulan	17.614.067.923,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2.17.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					0,00					260.040.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	12 Dokumen	260.040.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2.17.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					0,00					12.314.700,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	0 Laporan	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	12 Laporan	12.314.700,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					47.004.173,00					316.342.700,00	
		-					47.004.173,00					316.342.700,00	
	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor					0,00					13.501.800,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	0 Paket	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	1 Paket	13.501.800,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					0,00					24.283.200,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	0 Paket	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	2 Paket	24.283.200,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					6.050.773,00					65.592.600,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	40 Paket	40 Paket	4 Paket	6.050.773,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	40 Paket	65.592.600,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					2.965.400,00					31.154.100,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	2.965.400,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	1 Paket	31.154.100,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					0,00					12.424.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	2 Dokumen	12.424.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu					7.990.000,00					31.210.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	7.990.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	12 Laporan	31.210.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					29.998.000,00					135.688.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	96 Laporan	96 Laporan	12 Laporan	29.998.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	96 Laporan	135.688.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					0,00					2.489.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8 Optimalisasi Potensi Kota untuk Terwujudnya Industri Kreatif dan Pariwisata Berkelanjutan	1 Dokumen	2.489.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					25.000.000,00					99.587.000,00	
		-					25.000.000,00					99.587.000,00	
	2.17.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					0,00					19.115.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	0 Unit	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	1 Unit	19.115.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2.17.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					25.000.000,00					80.472.000,00	
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	1 Unit	80.472.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					106.903.700,00					159.534.000,00	
		-					106.903.700,00					159.534.000,00	
	2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					0,00					4.309.200,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	1 Laporan	4.309.200,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					106.903.700,00					155.224.800,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	2 Laporan	106.903.700,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	3 Laporan	155.224.800,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					234.670.200,00					353.362.000,00	
		-					234.670.200,00					353.362.000,00	
	2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					35.989.000,00					24.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	35.989.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	1 Unit	24.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					81.480.000,00					166.650.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	18 Unit	18 Unit	81.480.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	18 Unit	166.650.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2.17.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel					0,00					3.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	4 Unit	4 Unit	0 Unit	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	4 Unit	3.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					4.380.000,00					17.200.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 Unit	24 Unit	1 Unit	4.380.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	24 Unit	17.200.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					106.111.200,00					119.442.800,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	106.111.200,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	1 Unit	119.442.800,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2.17.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					6.710.000,00					23.069.200,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	6.710.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	1 Unit	23.069.200,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2.17.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					0,00					51.834.900,00	
		-					0,00					51.834.900,00	
	2.17.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					0,00					51.834.900,00	
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	0 Dokumen	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	-	51.834.900,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
103.	**2.17.03**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**					**5.005.000,00**					**100.000.000,00**	
		Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi					***5.005.000,00***					***50.000.000,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota					5.005.000,00					100.000.000,00	
		-					5.005.000,00					100.000.000,00	
	2.17.03.2.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi					0,00					50.000.000,00	
		Pelaksanaan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	40 Unit Usaha	40 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0,00	Kota Padang	-	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	40 Unit Usaha	50.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota					5.005.000,00					50.000.000,00	
		Pelaksanaan proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	897 Unit Usaha	897 Unit Usaha	897 Unit Usaha	5.005.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	897 Unit Usaha	50.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
104.	**2.17.04**	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**					**5.005.000,00**					**200.000.000,00**	
		Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi					***5.005.000,00***					***200.000.000,00***	
	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					5.005.000,00					200.000.000,00	
		-					5.005.000,00					200.000.000,00	
	2.17.04.2.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan					5.005.000,00					200.000.000,00	
		Terlaksananya Penilaian Kesehatan Koperasi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	440 Unit Usaha	440 Unit Usaha	440 Unit Usaha	5.005.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	440 Unit Usaha	200.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
105.	**2.17.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**					**700.000.000,00**					**300.000.000,00**	
		Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian					***700.000.000,00***					***300.000.000,00***	
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota					700.000.000,00					300.000.000,00	
		-					700.000.000,00					300.000.000,00	
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi					700.000.000,00					300.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	200 Orang	480 Orang	280 Orang	700.000.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	200 Orang	300.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
106.	**2.17.06**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**					**211.192.000,00**					**2.784.500.000,00**	
		Meningkatnya produktivitas koperasi					***211.192.000,00***					***2.774.500.000,00***	
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota					211.192.000,00					2.784.500.000,00	
		-					211.192.000,00					2.784.500.000,00	
	2.17.06.2.01.0003	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi					0,00					5.000.000,00	
		Meningkatnya Penumbuhan Kesadaran Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat Dalam Peningkatan Taraf Hidup Melalui Kehidupan Berkoperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	5 Kelompok Masyarakat	5 Kelompok Masyarakat	0 Kelompok Masyarakat	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	5 Kelompok Masyarakat	5.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2.17.06.2.01.0004	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota					0,00					5.000.000,00	
		Fasilitasi kemitraan antar koperasi maupun antara Koperasi dengan badan hukum lainnya termasuk UMKM, bagi Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	3 Unit Usaha	3 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	3 Unit Usaha	5.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha					0,00					1.779.500.000,00	
		Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	2000 Unit Usaha	1000 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	2000 Unit Usaha	1.779.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2.17.06.2.01.0006	Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota					175.000.000,00					530.000.000,00	
		Pemulihan Usaha Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota dalam kondisi darurat melalui restrukturisasi kredit, rekonstruksi usaha, bantuan modal, dan/atau bantuan bentuk lain	Jumlah Koperasi yang dipulihkan usahanya	12 Unit Usaha	12 Unit Usaha	4 Unit Usaha	175.000.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	12 Unit Usaha	530.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2.17.06.2.01.0007	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota					0,00					5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya	1 Unit Usaha	1 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	1 Unit Usaha	5.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2.17.06.2.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota					36.192.000,00					460.000.000,00	
		Peningkatan iklim usaha Koperasi melalui aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan, dan inovasi teknologi bagi Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	40 Unit Usaha	40 Unit Usaha	40 Unit Usaha	36.192.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	40 Unit Usaha	460.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
107.	**2.17.07**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**					**0,00**					**6.213.900.207,00**	
		Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri					***0,00***					***6.213.900.207,00***	
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan					0,00					6.213.900.207,00	
		-					0,00					6.213.900.207,00	
	2.17.07.2.01.0016	Perkuatan Kemitraan antara Instansi Pemerintah dengan Kelembagaan lainnya untuk pemberdayaan UMKM					0,00					16.000.000,00	
		Terfasilitasinya perkuatan Kemitraan antara Instansi Pemerintah dengan Kelembagaan lainnya untuk pemberdayaan UMKM	Jumlah Kemitraan antara Instansi Pemerintah dengan Kelembagaan lainnya untuk pemberdayaan UMKM	-	-	0 Lembaga	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	-	16.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0017	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Pelaku Usaha dalam Literasi Hukum					0,00					6.022.900.207,00	
		Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Pelaku Usaha dalam Literasi Hukum	Jumlah pelaku usaha yang meningkat pemahamannya dan pengetahuannya dalam literasi hukum	-	-	0 Orang	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	-	6.022.900.207,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0021	Pembinaan dan Fasilitasi Pelaku Usaha dalam Pembentukan Badan Hukum Berusaha					0,00					150.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaku Usaha dalam Pembentukan Badan Hukum Berusaha	Jumlah Pelaku Usaha yang terfasilitasi Pembentukan Badan Hukum Berusaha	-	-	0 Orang	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	-	150.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0022	Pembinaan dan Fasilitasi Perizinan Berusaha bagi UMKM					0,00					20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi Perizinan Berusaha bagi UMKM	Jumlah UMKM yang terfasilitasi Perizinan Berusaha	-	-	0 Unit Usaha	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	-	20.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0023	Fasilitasi Integrasi Basis Data Tunggal UMKM					0,00					5.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Integrasi Basis Data Tunggal UMKM	Jumlah Kegiatan Hasil Fasilitasi Integrasi dan Sinkronisasi Data UMKM	-	-	0 Kegiatan	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	-	5.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
108.	**2.17.08**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**					**966.200.000,00**					**2.415.064.740,00**	
		Meningkatnya daya saing UMKM					***966.200.000,00***					***2.415.064.740,00***	
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil					966.200.000,00					2.415.064.740,00	
		-					966.200.000,00					2.415.064.740,00	
	2.17.08.2.01.0010	Penyusunan Kebijakan Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan					0,00					2.074.065.140,00	
		Tersusunnya Kebijakan Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Jumlah Kebijakan Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	-	-	0 Dokumen	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	-	2.074.065.140,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2.17.08.2.01.0019	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM					966.200.000,00					340.999.600,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada unit usaha UMKM	Jumlah Unit Usaha UMKM yang memperoleh pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi	-	-	196 Unit Usaha	966.200.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	-	340.999.600,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU					**9.762.894.016,00**					**11.807.548.192,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**9.762.894.016,00**					**11.807.548.192,00**	
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**					**9.762.894.016,00**					**11.807.548.192,00**	
109.	**2.18.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**9.532.758.016,00**					**10.650.500.000,00**	
		Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah					***9.532.758.016,00***					***10.541.500.000,00***	
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					0,00					23.500.000,00	
		-					0,00					23.500.000,00	
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					0,00					3.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Kemudahan Berinvestasi Demi Terbukanya Lapangan Pekerjaan	3 Dokumen	3.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					0,00					2.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Kemudahan Berinvestasi Demi Terbukanya Lapangan Pekerjaan	1 Dokumen	2.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					0,00					3.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Kemudahan Berinvestasi Demi Terbukanya Lapangan Pekerjaan	1 Dokumen	3.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					0,00					3.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Kemudahan Berinvestasi Demi Terbukanya Lapangan Pekerjaan	1 Dokumen	3.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					0,00					3.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Kemudahan Berinvestasi Demi Terbukanya Lapangan Pekerjaan	1 Dokumen	3.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					0,00					4.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Kemudahan Berinvestasi Demi Terbukanya Lapangan Pekerjaan	1 Laporan	4.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					0,00					5.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Kemudahan Berinvestasi Demi Terbukanya Lapangan Pekerjaan	3 Laporan	5.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					6.786.745.875,00					7.369.000.000,00	
		-					6.786.745.875,00					7.369.000.000,00	
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					6.677.545.875,00					7.200.000.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/bulan	48 Orang/bulan	60 Orang/bulan	6.677.545.875,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	4 Kemudahan Berinvestasi Demi Terbukanya Lapangan Pekerjaan	48 Orang/bulan	7.200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					109.200.000,00					169.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	109.200.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Kemudahan Berinvestasi Demi Terbukanya Lapangan Pekerjaan	12 Dokumen	169.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					542.857.900,00					530.000.000,00	
		-					542.857.900,00					530.000.000,00	
	2.18.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					542.857.900,00					530.000.000,00	
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	542.857.900,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Kemudahan Berinvestasi Demi Terbukanya Lapangan Pekerjaan	12 Dokumen	530.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					431.073.641,00					822.000.000,00	
		-					431.073.641,00					822.000.000,00	
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor					10.328.883,00					22.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	10.328.883,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Kemudahan Berinvestasi Demi Terbukanya Lapangan Pekerjaan	1 Paket	22.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					0,00					310.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	7 Paket	8 Paket	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Kemudahan Berinvestasi Demi Terbukanya Lapangan Pekerjaan	8 Paket	310.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					0,00					50.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Kemudahan Berinvestasi Demi Terbukanya Lapangan Pekerjaan	1 Paket	50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					96.329.518,00					100.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	96.329.518,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Kemudahan Berinvestasi Demi Terbukanya Lapangan Pekerjaan	1 Paket	100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					100.927.340,00					60.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	6 Paket	100.927.340,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Kemudahan Berinvestasi Demi Terbukanya Lapangan Pekerjaan	1 Paket	60.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					4.212.000,00					10.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.212.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Kemudahan Berinvestasi Demi Terbukanya Lapangan Pekerjaan	12 Dokumen	10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu					39.712.400,00					80.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	39.712.400,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Kemudahan Berinvestasi Demi Terbukanya Lapangan Pekerjaan	12 Laporan	80.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					179.563.500,00					190.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	179.563.500,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Kemudahan Berinvestasi Demi Terbukanya Lapangan Pekerjaan	12 Laporan	190.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					296.100.000,00					350.000.000,00	
		-					296.100.000,00					350.000.000,00	
	2.18.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					0,00					170.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	5 Unit	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Kemudahan Berinvestasi Demi Terbukanya Lapangan Pekerjaan	5 Unit	170.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					296.100.000,00					180.000.000,00	
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	296.100.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Kemudahan Berinvestasi Demi Terbukanya Lapangan Pekerjaan	1 Unit	180.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					329.746.800,00					356.000.000,00	
		-					329.746.800,00					356.000.000,00	
	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					8.618.400,00					6.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	8.618.400,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Kemudahan Berinvestasi Demi Terbukanya Lapangan Pekerjaan	12 Laporan	6.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					321.128.400,00					350.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	321.128.400,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Kemudahan Berinvestasi Demi Terbukanya Lapangan Pekerjaan	12 Laporan	350.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.146.233.800,00					1.200.000.000,00	
		-					1.146.233.800,00					1.200.000.000,00	
	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					36.000.000,00					30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	36.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Kemudahan Berinvestasi Demi Terbukanya Lapangan Pekerjaan	1 Unit	30.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					359.890.000,00					400.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	20 Unit	20 Unit	359.890.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Kemudahan Berinvestasi Demi Terbukanya Lapangan Pekerjaan	20 Unit	400.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					39.960.000,00					50.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	133 Unit	133 Unit	30 Unit	39.960.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Kemudahan Berinvestasi Demi Terbukanya Lapangan Pekerjaan	133 Unit	50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					675.703.800,00					670.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	2 Unit	675.703.800,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Kemudahan Berinvestasi Demi Terbukanya Lapangan Pekerjaan	2 Unit	670.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					34.680.000,00					50.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	12 Unit	20 Unit	34.680.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Kemudahan Berinvestasi Demi Terbukanya Lapangan Pekerjaan	12 Unit	50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
110.	**2.18.03**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**					**88.536.000,00**					**760.000.000,00**	
		Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal					***88.536.000,00***					***760.000.000,00***	
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					88.536.000,00					760.000.000,00	
		-					88.536.000,00					760.000.000,00	
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota					88.536.000,00					480.000.000,00	
		Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	88.536.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Kemudahan Berinvestasi Demi Terbukanya Lapangan Pekerjaan	1 Dokumen	480.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota					0,00					280.000.000,00	
		Tersusunnya strategi promosi penanaman modal yang menjadi kewewenangan kab/kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Kemudahan Berinvestasi Demi Terbukanya Lapangan Pekerjaan	Dokumen	280.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
111.	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**					**57.600.000,00**					**375.000.000,00**	
		Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko					***57.600.000,00***					***375.000.000,00***	
		-					57.600.000,00					375.000.000,00	
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik					57.600.000,00					120.000.000,00	
		Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	35 Pelaku Usaha	25 Pelaku Usaha	30 Pelaku Usaha	57.600.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Kemudahan Berinvestasi Demi Terbukanya Lapangan Pekerjaan	30 Pelaku Usaha	120.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko					0,00					125.000.000,00	
		Tersedianya dan terkelolanya Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	12 Pelaku Usaha	12 Pelaku Usaha	1 Pelaku Usaha	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Kemudahan Berinvestasi Demi Terbukanya Lapangan Pekerjaan	12 Pelaku Usaha	125.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota					57.600.000,00					375.000.000,00	
		-					57.600.000,00					375.000.000,00	
	2.18.04.2.01.0009	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko					0,00					130.000.000,00	
		Terlaksananya Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	-	-	1 Kegiatan Usaha	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Kemudahan Berinvestasi Demi Terbukanya Lapangan Pekerjaan	-	130.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
112.	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**					**0,00**					**22.048.192,00**	
		Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal					***0,00***					***22.048.192,00***	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					0,00					22.048.192,00	
		-					0,00					22.048.192,00	
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal					0,00					22.048.192,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	45 Kegiatan Usaha	45 Kegiatan Usaha	1 Kegiatan Usaha	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Kemudahan Berinvestasi Demi Terbukanya Lapangan Pekerjaan	45 Kegiatan Usaha	22.048.192,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
113.	**2.18.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**					**84.000.000,00**					**0,00**	
		Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal					***84.000.000,00***					***0,00***	
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					84.000.000,00					0,00	
		-					84.000.000,00					0,00	
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik					84.000.000,00					0,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	84.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Kemudahan Berinvestasi Demi Terbukanya Lapangan Pekerjaan	1 Dokumen	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA					**25.753.636.009,00**					**20.981.338.915,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**25.753.636.009,00**					**20.981.338.915,00**	
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**					**25.753.636.009,00**					**20.981.338.915,00**	
114.	**2.19.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**8.235.534.109,00**					**8.266.881.927,00**	
		Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah					***8.229.534.109,00***					***8.166.881.927,00***	
	2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					59.262.500,00					63.000.000,00	
		-					59.262.500,00					63.000.000,00	
	2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					6.511.700,00					7.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	6.511.700,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	0 Dokumen	7.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					6.000.000,00					7.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 Dokumen	7.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	2.19.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					6.626.000,00					7.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	6.626.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 Dokumen	7.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					6.000.000,00					6.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 Dokumen	6.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					5.147.200,00					6.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.147.200,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 Dokumen	6.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					16.863.000,00					15.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	16.863.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	13 Laporan	15.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					12.114.600,00					15.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	12.114.600,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6 Laporan	15.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					6.000.773.627,00					7.010.000.000,00	
		-					6.000.773.627,00					7.010.000.000,00	
	2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					5.797.253.627,00					6.805.000.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 Orang/bulan	46 Orang/bulan	46 Orang/bulan	5.797.253.627,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	46 Orang/bulan	6.805.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					203.520.000,00					205.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	203.520.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 Dokumen	205.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					227.204.600,00					5.000.000,00	
		-					227.204.600,00					5.000.000,00	
	2.19.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					216.663.200,00					0,00	
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	216.663.200,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 Dokumen	0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					10.541.400,00					5.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	10.541.400,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2 Laporan	5.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					470.369.800,00					453.000.000,00	
		-					470.369.800,00					453.000.000,00	
	2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor					24.840.100,00					25.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	24.840.100,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 Paket	25.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					48.179.000,00					80.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	48.179.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 Paket	80.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					17.425.200,00					15.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	17.425.200,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 Paket	15.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					60.001.000,00					50.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	60.001.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 Paket	50.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					25.130.500,00					15.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	25.130.500,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 Paket	15.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					9.400.000,00					10.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	9.400.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 Dokumen	10.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu					20.750.000,00					8.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	20.750.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 Laporan	8.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					254.895.000,00					245.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	254.895.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	20 Laporan	245.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					9.749.000,00					5.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	9.749.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 Dokumen	5.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					37.917.200,00					25.000.000,00	
		-					37.917.200,00					25.000.000,00	
	2.19.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					0,00					0,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	0 Unit	0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					37.917.200,00					25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	37.917.200,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 Unit	25.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					405.670.000,00					351.881.927,00	
		-					405.670.000,00					351.881.927,00	
	2.19.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					5.670.000,00					5.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	5.670.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 Laporan	5.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					400.000.000,00					346.881.927,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	400.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 Laporan	346.881.927,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					0,00					0,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 Laporan	0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.034.336.382,00					359.000.000,00	
		-					1.034.336.382,00					359.000.000,00	
	2.19.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					36.000.000,00					24.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	36.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 Unit	24.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					189.492.082,00					180.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	9 Unit	9 Unit	189.492.082,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	9 Unit	180.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					37.730.000,00					45.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit	60 Unit	60 Unit	37.730.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	60 Unit	45.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					771.114.300,00					110.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	771.114.300,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 Unit	110.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
115.	**2.19.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**					**1.497.400.000,00**					**960.108.706,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Meningkatnya daya saing kepemudaan					***1.497.400.000,00***					***960.108.706,00***	
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota					1.412.400.000,00					750.108.706,00	
		-					1.412.400.000,00					750.108.706,00	
	2.19.02.2.01.0019	Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/Kota					0,00					150.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/Kota Yang ditingkatkan kapasitasnya	-	-	5 Orang	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	150.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0021	Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas kepemimpinan pemuda tingkat kabpuaten/kota					1.332.400.000,00					530.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Jumlah Pemuda tingkat Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas kepemimpinannya	-	-	200 Orang	1.332.400.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	530.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0023	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota					80.000.000,00					70.108.706,00	
		Terlaksananya Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota	-	-	1 Dokumen	80.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	70.108.706,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					85.000.000,00					210.000.000,00	
		-					85.000.000,00					210.000.000,00	
	2.19.02.2.02.0005	Penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota					85.000.000,00					210.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	-	-	3 Organisasi	85.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	210.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
116.	**2.19.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**					**16.020.701.900,00**					**10.544.748.282,00**	
		Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga					***16.020.701.900,00***					***10.544.748.282,00***	
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi					5.205.701.900,00					3.700.000.000,00	
		-					5.205.701.900,00					3.700.000.000,00	
	2.19.03.2.05.0009	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan					2.983.701.900,00					1.700.000.000,00	
		Tersedianya dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	2.983.701.900,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 Unit	1.700.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					950.000.000,00					4.199.748.282,00	
		-					950.000.000,00					4.199.748.282,00	
	2.19.03.2.02.0007	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan festival, pekan, dan kejuaraan olahraga					0,00					449.748.282,00	
		Terlaksananya Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan festival, pekan dan kejuaraan olahraga lingkup Pendidikan, Masyarakat, dan Prestasi tingkat Provinsi, temasuk olahraga disabilitas	Jumlah peserta dan pendamping yang mengikuti festival, pekan dan kejuaraan olahraga lingkup Pendidikan, Masyarakat, dan Prestasi tingkat Provinsi, termasuk olahraga disabilitas	-	-	65 Orang	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	449.748.282,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.02.0008	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Prestasi Tingkat Kabupaten/Kota					950.000.000,00					3.750.000.000,00	
		Terlaksananya Pekan dan Kejuaraan Olahraga Prestasi Tingkat Kabupaten/Kota, termasuk olahraga disabilitas	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Prestasi Tingkat Kabupaten/Kota yang terselenggara, termasuk olahraga disabilitas	-	-	5 Kegiatan	950.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	3.750.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi					700.000.000,00					800.000.000,00	
		-					700.000.000,00					800.000.000,00	
	2.19.03.2.03.0012	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga					150.000.000,00					200.000.000,00	
		Terlaksananya pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	-	-	5 Orang	150.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	200.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03.0013	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota					300.000.000,00					350.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota, termasuk olahraga disabilitas	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan, termasuk olahraga disabilitas	-	-	72 Orang	300.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	350.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03.0015	Identifikasi dan Seleksi Olahragawan Daerah					250.000.000,00					250.000.000,00	
		Terlaksananya Identifikasi dan Seleksi Olahragawan Daerah, termasuk olahraga disabilitas	Jumlah Olahragawan Daerah yang diidentifikasi dan diseleksi, termasuk olahraga disabilitas	-	-	450 Orang	250.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	250.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga					9.165.000.000,00					1.845.000.000,00	
		-					9.165.000.000,00					1.845.000.000,00	
	2.19.03.2.04.0007	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait					9.165.000.000,00					1.565.000.000,00	
		Meningkatnya Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait, termasuk olahraga disabilitas	Jumlah Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan lembaga terkait yang terlaksana, termasuk olahraga disabilitas	-	-	1 Kerja Sama	9.165.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	1.565.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.04.0008	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota					0,00					280.000.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota sesuai standar nasional, termasuk olahraga disabilitas	Jumlah Lembaga yang terstandar nasional dalam pengelolaan Organisasi Keolahragaan di Kab/kota, temasuk olahraga disabilitas	-	-	1 Lembaga	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	280.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
		-					5.205.701.900,00					3.700.000.000,00	
	2.19.03.2.05.0012	Peningkatan Partisipasi dan Pemassalan Olahraga di Masyarakat					2.222.000.000,00					2.000.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi dan Pemasalan Olahraga di Masyarakat di tingkat kabupaten/kota	Jumlah Peserta yang terfasilitasi dalam Pemasalan Olahraga Masyarakat di tingkat kabupaten/kota	-	-	4 Orang	2.222.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	2.000.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
117.	**2.19.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**					**0,00**					**1.209.600.000,00**	
		Meningkatnya kualitas kepramukaan					***0,00***					***1.209.600.000,00***	
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan					0,00					1.209.600.000,00	
		-					0,00					1.209.600.000,00	
	2.19.04.2.01.0010	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah					0,00					1.209.600.000,00	
		Terselenggaranya Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	-	-	100 Laporan	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	1.209.600.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN					**8.590.019.664,00**					**10.545.500.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**8.590.019.664,00**					**10.545.500.000,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**					**8.486.143.464,00**					**10.224.357.500,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
118.	**2.23.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**8.277.070.964,00**					**9.416.832.500,00**	
		Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah					***7.610.570.964,00***					***9.214.332.500,00***	
	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					0,00					51.315.500,00	
		-					0,00					51.315.500,00	
	2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					0,00					1.575.100,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	2 Dokumen	1.575.100,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					0,00					1.436.100,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	1 Dokumen	1.436.100,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					0,00					1.386.100,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	1 Dokumen	1.386.100,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					0,00					1.827.400,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	1 Dokumen	1.827.400,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					0,00					1.708.900,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	1 Dokumen	1.708.900,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					0,00					25.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	18 Laporan	25.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	2.23.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					0,00					18.381.900,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	4 Laporan	18.381.900,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					6.176.340.564,00					7.320.517.000,00	
		-					6.176.340.564,00					7.320.517.000,00	
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					6.082.260.564,00					7.190.517.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	54 Orang/bulan	54 Orang/bulan	54 Orang/bulan	6.082.260.564,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	54 Orang/bulan	7.190.517.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					94.080.000,00					130.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	94.080.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	12 Dokumen	130.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					278.629.000,00					385.000.000,00	
		-					278.629.000,00					385.000.000,00	
	2.23.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					278.629.000,00					385.000.000,00	
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	13 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	278.629.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	13 Dokumen	385.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					376.771.000,00					540.500.000,00	
		-					376.771.000,00					540.500.000,00	
	2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor					7.635.000,00					22.500.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	7.635.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	1 Paket	22.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					81.368.200,00					150.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	10 Paket	5 Paket	81.368.200,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	5 Paket	150.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					49.980.100,00					77.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	49.980.100,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	1 Paket	77.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					58.116.700,00					80.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	58.116.700,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	3 Paket	80.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					9.734.000,00					25.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	9.734.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	1 Paket	25.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					15.974.000,00					22.500.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	730 Dokumen	730 Dokumen	730 Dokumen	15.974.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	730 Dokumen	22.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu					3.965.000,00					8.500.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	20 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	3.965.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	20 Laporan	8.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					149.998.000,00					150.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	149.998.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	18 Laporan	150.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					0,00					5.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	1 Dokumen	5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					191.822.400,00					406.000.000,00	
		-					191.822.400,00					406.000.000,00	
	2.23.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					4.989.600,00					6.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	4 Laporan	4.989.600,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	12 Laporan	6.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					186.832.800,00					400.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	186.832.800,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	12 Laporan	400.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		-					587.008.000,00					713.500.000,00	
	2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					36.000.000,00					24.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	36.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	1 Unit	24.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					261.950.000,00					295.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	12 Unit	12 Unit	261.950.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	12 Unit	295.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel					0,00					5.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	3 Unit	3 Unit	3 Unit	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	3 Unit	5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					7.100.000,00					17.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	23 Unit	23 Unit	23 Unit	7.100.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	23 Unit	17.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya					7.000.000,00					7.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	1 Unit	7.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	1 Unit	7.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					265.278.000,00					350.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	2 Unit	265.278.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	2 Unit	350.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					666.500.000,00					0,00	
		-					666.500.000,00					0,00	
	2.23.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					166.500.000,00					0,00	
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	1 Unit	166.500.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					500.000.000,00					0,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	1 Unit	500.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					587.008.000,00					713.500.000,00	
		-					587.008.000,00					713.500.000,00	
	2.23.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					9.680.000,00					15.500.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	14 Unit	9.680.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	-	15.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
119.	**2.23.02**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**					**209.072.500,00**					**807.525.000,00**	
		Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan					***209.072.500,00***					***777.525.000,00***	
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					96.763.600,00					401.000.000,00	
		-					96.763.600,00					401.000.000,00	
	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan					4.987.100,00					45.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar Di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	120 Perpustakaan	120 Perpustakaan	120 Perpustakaan	4.987.100,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	120 Perpustakaan	45.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					26.999.700,00					26.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Terlaksananya Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	115 Perpustakaan	61 Perpustakaan	78 Perpustakaan	26.999.700,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	95 Perpustakaan	26.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota					0,00					50.000.000,00	
		Terlaksananya pembinaan perpustakaan umum dan khusus sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan standar nasional perpustakaan	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan	27 Perpustakaan	12 Perpustakaan	17 Perpustakaan	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	22 Perpustakaan	50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					14.956.700,00					30.000.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	105 Orang	105 Orang	105 Orang	14.956.700,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	105 Orang	30.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan					49.820.100,00					150.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan Kabupaten/Kota untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	500 Eksemplar	450 Eksemplar	546 Eksemplar	49.820.100,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	600 Eksemplar	150.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					112.308.900,00					406.525.000,00	
		-					112.308.900,00					406.525.000,00	
	2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial					34.996.600,00					30.000.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	34.996.600,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	1 Perpustakaan	30.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca					19.983.700,00					356.525.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	50 Orang	50 Orang	50 Orang	19.983.700,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	50 Orang	356.525.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat					57.328.600,00					20.000.000,00	
		Meningkatnya Keterlibatan Satuan Pendidikan Dasar dan masyarakat dalam Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	398 Lokus	390 Lokus	392 Lokus	57.328.600,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	394 Lokus	20.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		-					96.763.600,00					401.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik					0,00					100.000.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik dengan Manajemen Layanan TIK	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	-	-	1 Perpustakaan	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	-	100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**					**103.876.200,00**					**321.142.500,00**	
120.	**2.24.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**					**100.364.000,00**					**221.445.000,00**	
		Meningkatnya Tata Kelola Arsip Dinamis dan Statis					***100.364.000,00***					***171.445.000,00***	
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota					50.362.000,00					76.445.000,00	
		-					50.362.000,00					76.445.000,00	
	2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis					0,00					12.000.000,00	
		Terkelolanya Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	10500 Berkas	Berkas	10500 Berkas	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	10500 Berkas	12.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis					15.361.400,00					39.445.000,00	
		Terkelolanya Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	29496 Berkas	29496 Berkas	29496 Berkas	15.361.400,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	29496 Berkas	39.445.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota					35.000.600,00					25.000.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	43 Laporan	43 Laporan	43 Laporan	35.000.600,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	43 Laporan	25.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota					19.999.600,00					25.000.000,00	
		-					19.999.600,00					25.000.000,00	
	2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis					19.999.600,00					25.000.000,00	
		Terlaksananya Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	150 Arsip	150 Arsip	150 Arsip	19.999.600,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	150 Arsip	25.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota					30.002.400,00					120.000.000,00	
		-					30.002.400,00					120.000.000,00	
	2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN					0,00					25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Tersedianya Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	3000 Pengguna	1000 Pengguna	1500 Pengguna	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	2000 Pengguna	25.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota					30.002.400,00					95.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	43 Laporan	43 Laporan	43 Laporan	30.002.400,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	43 Laporan	95.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
121.	**2.24.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**					**3.512.200,00**					**80.797.500,00**	
		Meningkatnya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip sesuai NSPK					***3.512.200,00***					***70.797.500,00***	
	2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun					3.512.200,00					35.000.000,00	
		-					3.512.200,00					35.000.000,00	
	2.24.03.2.01.0003	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun					1.521.000,00					24.000.000,00	
		Terlaksananya Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	2000 Berkas	1800 Berkas	2000 Berkas	1.521.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	2000 Berkas	24.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.2.01.0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun					1.991.200,00					11.000.000,00	
		Tersusunnya Daftar Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	2000 Arsip	2000 Arsip	2000 Arsip	1.991.200,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	2000 Arsip	11.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.2.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota					0,00					20.000.000,00	
		-					0,00					20.000.000,00	
	2.24.03.2.02.0001	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana					0,00					10.000.000,00	
		Terlaksananya Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	100 Arsip	Arsip	100 Arsip	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	100 Arsip	10.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.2.02.0002	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana					0,00					10.000.000,00	
		Terlaksananya Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencama	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	100 Arsip	Arsip	100 Arsip	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	100 Arsip	10.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	2.24.03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan					0,00					25.797.500,00	
		-					0,00					25.797.500,00	
	2.24.03.2.03.0001	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota					0,00					10.797.500,00	
		Terkelolanya Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	100 Daftar	Daftar	100 Daftar	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	100 Daftar	10.797.500,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.2.03.0002	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota					0,00					15.000.000,00	
		Terkelolanya Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	1000 Arsip	Arsip	1000 Arsip	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1000 Arsip	15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
122.	**2.24.04**	**PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP**					**0,00**					**18.900.000,00**	
		Meningkatnya Akses masyarakat terhadap penggunanaan arsip yang bersifat tertutup					***0,00***					***18.900.000,00***	
	2.24.04.2.01	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota					0,00					18.900.000,00	
		-					0,00					18.900.000,00	
	2.24.04.2.01.0003	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup					0,00					0,00	
		Terlasksananya Penyusunan dan Penerapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan	SOP	SOP	1 SOP	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	SOP	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.04.2.01.0004	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup					0,00					18.900.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	40 Arsip	Arsip	40 Arsip	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	40 Arsip	18.900.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		DINAS PARIWISATA					**19.800.801.271,00**					**27.741.125.777,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**					**19.800.801.271,00**					**27.741.125.777,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**					**19.800.801.271,00**					**27.741.125.777,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
123.	**3.26.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**14.487.315.771,00**					**17.186.103.110,00**	
		Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah					***14.487.315.771,00***					***17.174.974.610,00***	
	3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					20.424.251,00					76.789.447,00	
		-					20.424.251,00					76.789.447,00	
	3.26.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					10.424.251,00					23.361.700,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	10.424.251,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4 Dokumen	23.361.700,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					0,00					3.709.500,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1 Dokumen	3.709.500,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					0,00					3.709.500,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1 Dokumen	3.709.500,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					0,00					3.709.500,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1 Dokumen	3.709.500,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					0,00					3.709.500,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1 Dokumen	3.709.500,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					0,00					17.127.300,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	0,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	12 Laporan	17.127.300,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					10.000.000,00					21.462.447,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34 Laporan	34 Laporan	34 Laporan	10.000.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	34 Laporan	21.462.447,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					10.784.067.915,00					11.865.266.013,00	
		-					10.784.067.915,00					11.865.266.013,00	
	3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					10.521.849.915,00					11.664.266.013,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	137 Orang/bulan	137 Orang/bulan	137 Orang/bulan	10.521.849.915,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	137 Orang/bulan	11.664.266.013,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					262.218.000,00					201.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	262.218.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1 Dokumen	201.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					662.642.100,00					902.311.950,00	
		-					662.642.100,00					902.311.950,00	
	3.26.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					649.989.600,00					882.393.200,00	
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	649.989.600,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1 Dokumen	882.393.200,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					12.652.500,00					19.918.750,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	12.652.500,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1 Laporan	19.918.750,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					526.982.425,00					243.015.500,00	
		-					526.982.425,00					243.015.500,00	
	3.26.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor					32.649.125,00					15.340.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 Paket	9 Paket	9 Paket	32.649.125,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	9 Paket	15.340.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					33.421.200,00					29.873.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	29 Paket	29 Paket	29 Paket	33.421.200,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	29 Paket	29.873.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					11.682.500,00					15.497.500,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	44 Paket	44 Paket	44 Paket	11.682.500,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	44 Paket	15.497.500,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					10.095.600,00					15.560.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	19 Paket	19 Paket	19 Paket	10.095.600,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	19 Paket	15.560.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					0,00					6.320.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3 Dokumen	6.320.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu					50.000.500,00					34.425.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1500 Laporan	1500 Laporan	1500 Laporan	50.000.500,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1500 Laporan	34.425.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					389.133.500,00					126.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	50 Laporan	50 Laporan	389.133.500,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	50 Laporan	126.000.000,00	DINAS PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					42.684.400,00					781.139.000,00	
		-					42.684.400,00					781.139.000,00	
	3.26.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya					42.684.400,00					781.139.000,00	
		Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	42.684.400,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1 Unit	781.139.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					576.517.380,00					708.740.200,00	
		-					576.517.380,00					708.740.200,00	
	3.26.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					0,00					6.955.200,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	0,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1 Laporan	6.955.200,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					520.759.980,00					556.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	520.759.980,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10 Laporan	556.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					55.757.400,00					145.785.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	55.757.400,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1 Laporan	145.785.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.873.997.300,00					2.608.841.000,00	
		-					1.873.997.300,00					2.608.841.000,00	
	3.26.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					211.860.000,00					372.430.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	30 Unit	30 Unit	211.860.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	30 Unit	372.430.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					63.400.000,00					76.860.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	50 Unit	50 Unit	63.400.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	50 Unit	76.860.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					1.000.000.000,00					1.878.620.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	2 Unit	1.000.000.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2 Unit	1.878.620.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					562.737.300,00					280.931.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	7 Unit	7 Unit	562.737.300,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	7 Unit	280.931.000,00	DINAS PARIWISATA
		-					1.873.997.300,00					2.608.841.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	3.26.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					36.000.000,00					0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	-	1 Unit	36.000.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel					0,00					0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-	-	1000 Unit	0,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	0,00	DINAS PARIWISATA
124.	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**					**1.905.500.000,00**					**4.788.545.168,00**	
		Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata					***1.905.500.000,00***					***4.788.545.168,00***	
	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota					69.339.100,00					332.554.168,00	
		-					69.339.100,00					332.554.168,00	
	3.26.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota					69.339.100,00					332.554.168,00	
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	58 Laporan	50 Laporan	52 Laporan	69.339.100,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	54 Laporan	332.554.168,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					1.836.160.900,00					4.455.991.000,00	
		-					1.836.160.900,00					4.455.991.000,00	
	3.26.02.2.03.0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					0,00					0,00	
		Tersedianya Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	0 Dokumen	6 Dokumen	5 Dokumen	0,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	0 Dokumen	0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					0,00					900.000.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	5 Lokasi	1 Lokasi	5 Lokasi	0,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5 Lokasi	900.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					1.581.160.900,00					2.685.991.000,00	
		Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	4 Unit	4 Unit	4 Unit	1.581.160.900,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4 Unit	2.685.991.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					255.000.000,00					870.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	95 Laporan	75 Laporan	80 Laporan	255.000.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	85 Laporan	870.000.000,00	DINAS PARIWISATA
125.	**3.26.03**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**					**1.358.000.000,00**					**3.816.669.499,00**	
		Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata					***1.358.000.000,00***					***3.816.669.499,00***	
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota					1.358.000.000,00					3.816.669.499,00	
		-					1.358.000.000,00					3.816.669.499,00	
	3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri					0,00					162.933.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	30 Dokumen	30 Dokumen	30 Dokumen	0,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	30 Dokumen	162.933.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri					4.316.000,00					336.000.000,00	
		Meningkatnya Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	3 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	4.316.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3 Dokumen	336.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota					1.353.684.000,00					3.267.736.499,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	10 Kegiatan	12 Kegiatan	10 Kegiatan	1.353.684.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10 Kegiatan	3.267.736.499,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri					0,00					50.000.000,00	
		Terlaksananya Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	3 Promosi	3 Promosi	3 Promosi	0,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3 Promosi	50.000.000,00	DINAS PARIWISATA
126.	**3.26.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**					**2.049.985.500,00**					**1.949.808.000,00**	
		Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif					***2.049.985.500,00***					***1.949.808.000,00***	
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar					1.317.585.500,00					1.696.200.000,00	
		-					1.317.585.500,00					1.696.200.000,00	
	3.26.05.2.01.0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif					1.317.585.500,00					1.696.200.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Terfasilitasinya Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	4 Laporan	11 Laporan	4 Laporan	1.317.585.500,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4 Laporan	1.696.200.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif					732.400.000,00					253.608.000,00	
		-					732.400.000,00					253.608.000,00	
	3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif					732.400.000,00					253.608.000,00	
		Terlaksanya Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	100 Orang	5 Orang	100 Orang	732.400.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	100 Orang	253.608.000,00	DINAS PARIWISATA
		DINAS PERTANIAN					**22.353.276.223,00**					**45.318.500.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**					**22.353.276.223,00**					**45.318.500.000,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**					**22.268.276.223,00**					**43.793.500.000,00**	
127.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**19.411.313.202,00**					**29.456.500.000,00**	
		Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah					***19.371.313.202,00***					***28.951.500.000,00***	
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					17.035.367,00					140.500.000,00	
		-					17.035.367,00					140.500.000,00	
	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					5.098.362,40					45.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	5 Dokumen	2 Dokumen	5.098.362,40	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Koto Tangah || Kelurahan Lubuk Minturun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	2 Dokumen	45.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					2.503.500,00					7.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.503.500,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Koto Tangah || Kelurahan Lubuk Minturun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	1 Dokumen	7.500.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					2.390.704,60					7.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.390.704,60	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Koto Tangah || Kelurahan Lubuk Minturun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	1 Dokumen	7.500.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					2.538.900,00					7.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.538.900,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Koto Tangah || Kelurahan Lubuk Minturun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	1 Dokumen	7.500.000,00	DINAS PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	3.27.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					2.501.700,00					7.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.501.700,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Koto Tangah || Kelurahan Lubuk Minturun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	1 Dokumen	7.500.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					0,00					7.500.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	0,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Koto Tangah || Kelurahan Lubuk Minturun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	12 Laporan	7.500.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					2.002.200,00					8.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	6 Laporan	4 Laporan	2.002.200,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Koto Tangah || Kelurahan Lubuk Minturun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	6 Laporan	8.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah					0,00					50.000.000,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	3 Data	3 Data	3 Data	0,00	Kota Padang	-	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	3 Data	50.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					17.314.718.935,00					25.555.000.000,00	
		-					17.314.718.935,00					25.555.000.000,00	
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					17.014.678.935,00					25.000.000.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	148 Orang/bulan	188 Orang/bulan	120 Orang/bulan	17.014.678.935,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Koto Tangah || Kelurahan Lubuk Minturun || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	148 Orang/bulan	25.000.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					300.040.000,00					550.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	24 Dokumen	24 Dokumen	12 Dokumen	300.040.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Koto Tangah || Kelurahan Lubuk Minturun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	24 Dokumen	550.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					0,00					5.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	0,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Koto Tangah || Kelurahan Lubuk Minturun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	1 Laporan	5.000.000,00	DINAS PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	3.27.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					881.193.300,00					970.000.000,00	
		-					881.193.300,00					970.000.000,00	
	3.27.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD					0,00					5.000.000,00	
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Koto Tangah || Kelurahan Lubuk Minturun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	1 Dokumen	5.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					881.193.300,00					960.000.000,00	
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	13 Dokumen	13 Dokumen	1 Dokumen	881.193.300,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Koto Tangah || Kelurahan Aie Pacah || 0 || Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Koto Tangah || Kelurahan Lubuk Minturun || 0 || Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Lubuk Kilangan || Kelurahan Indarung || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	13 Dokumen	960.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					0,00					5.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	4 Laporan	0,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Koto Tangah || Kelurahan Lubuk Minturun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	1 Laporan	5.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					223.365.500,00					590.000.000,00	
		-					223.365.500,00					590.000.000,00	
	3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor					20.000.000,00					40.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	5 Paket	20.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Koto Tangah || Kelurahan Lubuk Minturun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	4 Paket	40.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					0,00					50.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	5 Paket	0,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Koto Tangah || Kelurahan Lubuk Minturun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	2 Paket	50.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					0,00					50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	2 Paket	10 Paket	0,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Koto Tangah || Kelurahan Lubuk Minturun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	3 Paket	50.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					40.000.000,00					50.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	40.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Koto Tangah || Kelurahan Lubuk Minturun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	3 Paket	50.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					10.000.000,00					20.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	0 Paket	10.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Koto Tangah || Kelurahan Lubuk Minturun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	3 Paket	20.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu					0,00					20.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Koto Tangah || Kelurahan Lubuk Minturun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	12 Laporan	20.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					153.365.500,00					350.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	153.365.500,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Koto Tangah || Kelurahan Lubuk Minturun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	12 Laporan	350.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					0,00					10.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Koto Tangah || Kelurahan Lubuk Minturun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	3 Dokumen	10.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					0,00					350.000.000,00	
		-					0,00					350.000.000,00	
	3.27.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					0,00					100.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Koto Tangah || Kelurahan Lubuk Minturun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	0 Unit	100.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					0,00					100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	45 Unit	30 Unit	0,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Koto Tangah || Kelurahan Lubuk Minturun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	11 Unit	100.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					0,00					50.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	10 Unit	5 Unit	0,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Koto Tangah || Kelurahan Padang Sarai || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	6 Unit	50.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					0,00					100.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 Unit	6 Unit	12 Unit	0,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Koto Tangah || Kelurahan Lubuk Minturun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	9 Unit	100.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					320.000.100,00					375.000.000,00	
		-					320.000.100,00					375.000.000,00	
	3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					0,00					5.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	300 Laporan	0,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Koto Tangah || Kelurahan Lubuk Minturun || 0	-	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	1 Laporan	5.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					320.000.100,00					370.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	320.000.100,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Koto Tangah || Kelurahan Lubuk Minturun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	12 Laporan	370.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					655.000.000,00					1.476.000.000,00	
		-					655.000.000,00					1.476.000.000,00	
	3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					36.000.000,00					36.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	36.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Koto Tangah || Kelurahan Lubuk Minturun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	1 Unit	36.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					349.000.000,00					700.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	104 Unit	112 Unit	102 Unit	349.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Koto Tangah || Kelurahan Lubuk Minturun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	112 Unit	700.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel					5.000.000,00					15.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	40 Unit	40 Unit	30 Unit	5.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Koto Tangah || Kelurahan Lubuk Minturun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	40 Unit	15.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					20.000.000,00					35.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45 Unit	35 Unit	40 Unit	20.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Koto Tangah || Kelurahan Lubuk Minturun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	50 Unit	35.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					225.000.000,00					650.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit	3 Unit	225.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Koto Tangah || Kelurahan Lubuk Minturun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	5 Unit	650.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					20.000.000,00					40.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	35 Unit	20.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Koto Tangah || Kelurahan Lubuk Minturun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	4 Unit	40.000.000,00	DINAS PERTANIAN
128.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**					**1.831.366.555,40**					**4.350.000.000,00**	
		Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian					***1.831.366.555,40***					***4.315.000.000,00***	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian					867.840.155,40					2.275.000.000,00	
		-					867.840.155,40					2.275.000.000,00	
	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi					139.840.100,00					175.000.000,00	
		Terawasinya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	139.840.100,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	4 Laporan	175.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian					728.000.055,40					1.800.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	728.000.055,40	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	12 Laporan	1.800.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0003	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih					0,00					300.000.000,00	
		Tersedianya benih bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk biji/benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	45 Ton	44 Ton	21 Ton	0,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	32 Ton	300.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota					438.526.400,00					780.000.000,00	
		-					438.526.400,00					780.000.000,00	
	3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman					88.526.300,00					200.000.000,00	
		Meningkatnya Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	88.526.300,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Koto Tangah || Kelurahan Lubuk Minturun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	1 Dokumen	200.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman					0,00					30.000.000,00	
		Termanfaatkannya SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Koto Tangah || Kelurahan Lubuk Minturun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	1 Dokumen	30.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota					0,00					45.000.000,00	
		-					0,00					45.000.000,00	
	3.27.02.2.03.0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil					0,00					20.000.000,00	
		Terawasinya Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	1 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	0,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	1 Laporan	20.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.03.0002	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak					0,00					25.000.000,00	
		Terawasinya Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	0,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	1 Laporan	25.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.04	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer					0,00					20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		-					0,00					20.000.000,00	
	3.27.02.2.04.0001	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan					0,00					20.000.000,00	
		Terperiksanya Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	0,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	1 Laporan	20.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota					0,00					30.000.000,00	
		-					0,00					30.000.000,00	
	3.27.02.2.05.0004	Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan					0,00					15.000.000,00	
		Terjaminnya Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar	15 Ton	0 Ton	10 Ton	0,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	15 Ton	15.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.05.0008	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak					0,00					15.000.000,00	
		Terjaminnya peredaran benih/bibit ternak	Jumlah benih/bibit ternak yang beredar	0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	0,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	0 Laporan	15.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain					525.000.000,00					1.200.000.000,00	
		-					525.000.000,00					1.200.000.000,00	
	3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain					525.000.000,00					1.200.000.000,00	
		Tersedianya bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	5000 Ekor	5000 Ekor	5000 Ekor	525.000.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	5000 Ekor	1.200.000.000,00	DINAS PERTANIAN
		-					438.526.400,00					780.000.000,00	
	3.27.02.2.02.0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman					350.000.100,00					550.000.000,00	
		Terjaminnya kemurnian dan kelestarian SDG tanaman	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	-	-	1 Varietas Unggul Baru (VUB)	350.000.100,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Koto Tangah || Kelurahan Lubuk Minturun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	-	550.000.000,00	DINAS PERTANIAN
129.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**					**524.997.865,60**					**8.667.000.000,00**	
		Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian					***524.997.865,60***					***8.667.000.000,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian					0,00					15.000.000,00	
		-					0,00					15.000.000,00	
	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya					0,00					15.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 Laporan	Laporan	12 Laporan	0,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	1 Laporan	15.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0005	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian					0,00					0,00	
		Terkendali dan termanfaatkannya kawasan pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	Ha	3.180 Ha	0,35 Ha	0,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	Ha	0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0014	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota					0,00					0,00	
		Ditetapkannya Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan	1 Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	0,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	1 Dokumen	0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian					524.997.865,60					8.652.000.000,00	
		-					524.997.865,60					8.652.000.000,00	
	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani					0,00					300.000.000,00	
		Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2 Unit	Unit	1 Unit	0,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	2 Unit	300.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit					0,00					1.050.000.000,00	
		Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	7 Unit	3 Unit	7 Unit	0,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	5 Unit	1.050.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya					200.000.000,00					3.052.000.000,00	
		Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	8 Unit	3 Unit	4 Unit	200.000.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	6 Unit	3.052.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani					0,00					3.150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		terehabilitasi dan terpeliharanya jaringan irigasi usaha tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	15 Unit	8 Unit	7 Unit	0,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	15 Unit	3.150.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0014	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskeswan					0,00					250.000.000,00	
		Terbangun, terehabilitasi, terpelihara dan beroperasinya Puskeswan	Jumlah Puskeswan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	1 Unit	Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Nanggalo || Kelurahan Kampung Olo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	1 Unit	250.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan					324.997.865,60					850.000.000,00	
		Terbangun, terehabilitasi, terpelihara dan beroperasinya rumah potong hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	1 Unit	1 Unit	2 Unit	324.997.865,60	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Koto Tangah || Kelurahan Aie Pacah || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	1 Unit	850.000.000,00	DINAS PERTANIAN
130.	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**					**310.564.600,00**					**720.000.000,00**	
		Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner					***310.564.600,00***					***695.000.000,00***	
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota					150.044.100,00					190.000.000,00	
		-					150.044.100,00					190.000.000,00	
	3.27.04.2.01.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis					0,00					25.000.000,00	
		Terbentuknya kader zoonosis	Jumlah kader zoonosis	23 Orang	31 Orang	50 Orang	0,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	16 Orang	25.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.01.0005	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan					0,00					15.000.000,00	
		Terlaksananya surveilans penyakit hewan dan zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	1 Wilayah	2 Wilayah	4 Wilayah	0,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	2 Wilayah	15.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					150.044.100,00					150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Menurunnya kasus penyakit hewan menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	2 Laporan	3 Laporan	10 Laporan	150.044.100,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	2 Laporan	150.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota					0,00					60.000.000,00	
		-					0,00					60.000.000,00	
	3.27.04.2.02.0005	Pengawasan Peredaran Produk Hewan					0,00					25.000.000,00	
		Terlaksananya pengawasan peredaran produk hewan	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	0,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	1 Laporan	25.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.02.0006	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM					0,00					35.000.000,00	
		Terawasi dan terperiksanya kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM	Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM	2 Laporan	2 Laporan	12 Laporan	0,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	2 Laporan	35.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota					129.996.300,00					350.000.000,00	
		-					129.996.300,00					350.000.000,00	
	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner					129.996.300,00					350.000.000,00	
		Tersedianya Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	3000 Laporan	2500 Laporan	12 Laporan	129.996.300,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	3000 Laporan	350.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner					30.524.200,00					120.000.000,00	
		-					30.524.200,00					120.000.000,00	
	3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan					30.524.200,00					100.000.000,00	
		Terawasinya Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	30.524.200,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	1 Laporan	100.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.04.0007	Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan					0,00					20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan	Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi	1 Orang	Orang	2 Orang	0,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	1 Orang	20.000.000,00	DINAS PERTANIAN
131.	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**					**40.034.000,00**					**260.000.000,00**	
		Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian					***40.034.000,00***					***230.000.000,00***	
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota					40.034.000,00					260.000.000,00	
		-					40.034.000,00					260.000.000,00	
	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan					40.034.000,00					200.000.000,00	
		Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	250 Ha	250 Ha	150 Ha	40.034.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	250 Ha	200.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.05.2.01.0006	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan					0,00					30.000.000,00	
		Tertanggulanginya pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	0,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	1 Laporan	30.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.05.2.01.0007	Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan kesehatan hewan					0,00					30.000.000,00	
		Terlaksananya Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	1 laporan	laporan	1 laporan	0,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	1 laporan	30.000.000,00	DINAS PERTANIAN
132.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**					**150.000.000,00**					**340.000.000,00**	
		Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian					***150.000.000,00***					***340.000.000,00***	
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian					150.000.000,00					340.000.000,00	
		-					150.000.000,00					340.000.000,00	
	3.27.07.2.01.0009	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian					0,00					170.000.000,00	
		Termanfaatkannya teknologi inovasi pertanian yang didesiminasikan oleh penyuluh pertanian	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	-	-	1 Dokumen	0,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	-	170.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0013	Penumbuhkembangan Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani di Kecamatan dan Desa					150.000.000,00					100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Terlaksananya Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Petani dan Kelemagaan Ekonomi Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekoomi Petani (KEP) di Kecamatan dan Desa yang ditumbuhkan dan ditingkatkan kapasitasnya	-	-	2 Unit	150.000.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	-	100.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0015	Pelaksanaan Pengembangan Metode Penyuluhan Pertanian Tingkat Kabupaten/Kota					0,00					50.000.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Metode Penyuluhan Pertanian Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Pengembangan Metode Penyuluhan oleh penyuluh pertanian	-	-	1 Laporan	0,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	50.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0016	Penyediaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP dan Desa					0,00					20.000.000,00	
		Tersedia Sarana dan prasarana serta Terpeliharanya sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP dan Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP dan Desa yang tersedia dan terpelihara	-	-	3 Unit	0,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Koto Tangah || Kelurahan Lubuk Minturun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	-	20.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**					**85.000.000,00**					**1.525.000.000,00**	
133.	**3.28.04**	**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**					**85.000.000,00**					**1.525.000.000,00**	
		Meingkatnya kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya					***85.000.000,00***					***1.325.000.000,00***	
	3.28.04.2.01	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota					85.000.000,00					1.525.000.000,00	
		-					85.000.000,00					1.525.000.000,00	
	3.28.04.2.01.0006	Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Kabupaten/Kota					85.000.000,00					200.000.000,00	
		Terlaksananya Pelayanan Pemanfaatan Hutan di TAHURA	Jumlah Permohonan Pelayanan Pemanfaatan di TAHURA yang Ditindak Lanjuti	2 Permohonan	10 Permohonan	12 Permohonan	85.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Lubuk Kilangan || Kelurahan Indarung || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	1 Permohonan	200.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.28.04.2.01.0007	Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Kabupaten/Kota					0,00					20.000.000,00	
		Terlaksananya Kerja Sama Penyelenggara TAHURA Kabupaten/Kota	Jumlah Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Lubuk Kilangan || Kelurahan Indarung || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	1 Dokumen	20.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.28.04.2.01.0011	Perencanaan Pengelolaan TAHURA					0,00					40.000.000,00	
		Tersusun dan Ditetapkannya Dokumen Rencana Pengelolaan TAHURA (Jangka Panjang dan Jangka Pendek)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan TAHURA (Jangka Panjang dan Jangka Pendek) yang Disusun dan Ditetapkan	0 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen	0,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Lubuk Kilangan || Kelurahan Indarung || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	1 Dokumen	40.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.28.04.2.01.0014	Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota					0,00					1.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Terlaksananya Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota	Luas Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota yang diamankan	240 Ha	240 Ha	24 Ha	0,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Lubuk Kilangan || Kelurahan Indarung || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	240 Ha	1.000.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.28.04.2.01.0015	Pemulihan Ekosistem TAHURA Kabupaten/Kota					0,00					200.000.000,00	
		Terlaksananya pemulihan ekosistem Tahura Kabupaten/Kota	Luas areal Tahura yang dilakukan pemulihan ekosistem	240 Ha	240 Ha	24 Ha	0,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	240 Ha	200.000.000,00	DINAS PERTANIAN
		-					85.000.000,00					1.525.000.000,00	
	3.28.04.2.01.0018	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA Kabupaten/Kota					0,00					65.000.000,00	
		Peningkatan pendapatan Usaha Ekonomi produktif masyarakat	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi produktif	-	-	3 Kelompok Masyarakat	0,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Lubuk Kilangan || Kelurahan Indarung || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	-	65.000.000,00	DINAS PERTANIAN
		DINAS PERDAGANGAN					**35.143.988.667,00**					**0,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**					**35.143.988.667,00**					**0,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**					**35.143.988.667,00**					**0,00**	
134.	**3.30.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**29.618.989.251,00**					**0,00**	
		Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah					***29.588.989.251,00***					***0,00***	
	3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					30.000.000,00					0,00	
		-					30.000.000,00					0,00	
	3.30.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					10.000.000,00					0,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	2 Dokumen	0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					10.000.000,00					0,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	2 Dokumen	0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					0,00					0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Padang Utara || Kelurahan Lolong Belanti || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	2 Dokumen	0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					10.000.000,00					0,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Padang Utara || Kelurahan Lolong Belanti || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	12 Laporan	0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					0,00					0,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	12 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Padang Utara || Kelurahan Lolong Belanti || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	12 Laporan	0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					25.875.798.347,00					0,00	
		-					25.875.798.347,00					0,00	
	3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					25.753.296.347,00					0,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	334 Orang/bulan	334 Orang/bulan	301 Orang/bulan	25.753.296.347,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	334 Orang/bulan	0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					122.502.000,00					0,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	122.502.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Padang Utara || Kelurahan Lolong Belanti || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	12 Dokumen	0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					922.018.500,00					0,00	
		-					922.018.500,00					0,00	
	3.30.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					922.018.500,00					0,00	
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	922.018.500,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	12 Dokumen	0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah					10.000.000,00					0,00	
		-					10.000.000,00					0,00	
	3.30.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah					10.000.000,00					0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	12 Dokumen	0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					85.078.900,00					0,00	
		-					85.078.900,00					0,00	
	3.30.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor					4.999.200,00					0,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	4.999.200,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	1 Paket	0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					0,00					0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket	0 Paket	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	0 Paket	0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					4.965.900,00					0,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	4.965.900,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	1 Paket	0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					4.996.800,00					0,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	4.996.800,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	1 Paket	0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					10.120.000,00					0,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	10.120.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	12 Dokumen	0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu					10.001.500,00					0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	10.001.500,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	12 Laporan	0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					49.995.500,00					0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	49.995.500,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	12 Laporan	0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					0,00					0,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	12 Dokumen	0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					0,00					0,00	
		-					0,00					0,00	
	3.30.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					0,00					0,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	3 Unit	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	1 Unit	0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					0,00					0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	6 Unit	1 Unit	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	7 Unit	0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.455.186.204,00					0,00	
		-					1.455.186.204,00					0,00	
	3.30.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1.071.000,00					0,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.071.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	12 Laporan	0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					1.454.115.204,00					0,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.454.115.204,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	12 Laporan	0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					0,00					0,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan	5 Laporan	12 Laporan	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	4 Laporan	0,00	DINAS PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.240.907.300,00					0,00	
		-					1.240.907.300,00					0,00	
	3.30.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					36.000.000,00					0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	36.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	1 Unit	0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					250.840.000,00					0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32 Unit	32 Unit	32 Unit	250.840.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	32 Unit	0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel					3.000.000,00					0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	18 Unit	18 Unit	18 Unit	3.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	18 Unit	0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					5.840.000,00					0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	21 Unit	21 Unit	2 Unit	5.840.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	21 Unit	0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					935.467.300,00					0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 Unit	11 Unit	11 Unit	935.467.300,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	11 Unit	0,00	DINAS PERDAGANGAN
		-					1.240.907.300,00					0,00	
	3.30.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					9.760.000,00					0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	5 Unit	9.760.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	-	0,00	DINAS PERDAGANGAN
135.	**3.30.02**	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**					**0,00**					**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha					***0,00***					***0,00***	
	3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang					0,00					0,00	
		-					0,00					0,00	
	3.30.02.2.02.0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang					0,00					0,00	
		Tersedianya Dokumen Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	6 Dokumen	6 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	6 Dokumen	0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.02.2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota					0,00					0,00	
		-					0,00					0,00	
	3.30.02.2.06.0001	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya					0,00					0,00	
		Terlaksanakannya Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Laporan	12 Laporan	0 Laporan	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	12 Laporan	0,00	DINAS PERDAGANGAN
136.	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**					**532.400.000,00**					**0,00**	
		Meningkatnya Kualitas Sarana Perdagangan dan Distibusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi					***532.400.000,00***					***0,00***	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan					532.400.000,00					0,00	
		-					532.400.000,00					0,00	
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan					0,00					0,00	
		Tersedianya Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	9 Unit	9 Unit	0 Unit	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	9 Unit	0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan					532.400.000,00					0,00	
		Tersedianya Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	9 Unit	9 Unit	9 Unit	532.400.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	9 Unit	0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya					0,00					0,00	
		-					0,00					0,00	
	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan					0,00					0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12 Dokumen	12 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	12 Dokumen	0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.03.2.02.0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan					0,00					0,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12 Dokumen	12 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	12 Dokumen	0,00	DINAS PERDAGANGAN
137.	**3.30.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**					**9.999.900,00**					**0,00**	
		Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting					***9.999.900,00***					***0,00***	
	3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota					0,00					0,00	
		-					0,00					0,00	
	3.30.04.2.01.0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat					0,00					0,00	
		Tersedianya Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	12 Laporan	12 Laporan	0 Laporan	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	12 Laporan	0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota					9.999.900,00					0,00	
		-					9.999.900,00					0,00	
	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota					9.999.900,00					0,00	
		Tersedianya Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	9.999.900,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	12 Laporan	0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					0,00					0,00	
		-					0,00					0,00	
	3.30.04.2.03.0002	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi					0,00					0,00	
		Tersedianya Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	12 Laporan	12 Laporan	0 Laporan	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	12 Laporan	0,00	DINAS PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
138.	**3.30.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**					**0,00**					**0,00**	
		Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor					***0,00***					***0,00***	
	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					0,00					0,00	
		-					0,00					0,00	
	3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan					0,00					0,00	
		Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pelaksanaan Misi Dagang	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	3 Pelaku Usaha	3 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	3 Pelaku Usaha	0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.05.2.01.0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor					0,00					0,00	
		Meningkatnya Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	3 Produk	3 Produk	0 Produk	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	3 Produk	0,00	DINAS PERDAGANGAN
139.	**3.30.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**					**9.999.870,00**					**0,00**	
		Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk					***9.999.870,00***					***0,00***	
		-					9.999.870,00					0,00	
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang					9.999.870,00					0,00	
		Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Terhadap Ketentuan yang Berlaku	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	3665 Unit	3665 Unit	3665 Unit	9.999.870,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	3665 Unit	0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan					9.999.870,00					0,00	
		-					9.999.870,00					0,00	
	3.30.06.2.01.0003	Penyidikan Metrologi Legal					0,00					0,00	
		Terlaksananya Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal	-	-	0 Unit	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	-	0,00	DINAS PERDAGANGAN
140.	**3.30.07**	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**					**4.972.599.646,00**					**0,00**	
		Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri					***4.972.599.646,00***					***0,00***	
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri					4.972.599.646,00					0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		-					4.972.599.646,00					0,00	
	3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota					10.000.000,00					0,00	
		Terlaksananya Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	25 UMKM	25 UMKM	25 UMKM	10.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	25 UMKM	0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota					4.962.599.646,00					0,00	
		Meningkatnya Akses Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	36 UMKM	36 UMKM	36 UMKM	4.962.599.646,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	36 UMKM	0,00	DINAS PERDAGANGAN
		SEKRETARIAT DAERAH					**36.242.274.157,00**					**40.616.144.733,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**					**36.242.274.157,00**					**40.616.144.733,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**					**36.242.274.157,00**					**40.616.144.733,00**	
141.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**66.350.408.941,00**					**76.404.794.645,00**	
		Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah					***36.240.001.857,00***					***40.584.144.733,00***	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					274.833.400,00					380.293.400,00	
		-					274.833.400,00					380.293.400,00	
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					3.387.800,00					20.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	3.387.800,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	2 Dokumen	20.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					2.272.300,00					12.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.272.300,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Dokumen	12.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					2.272.300,00					12.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.272.300,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Dokumen	12.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					14.295.000,00					28.651.800,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	14.295.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Dokumen	28.651.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					17.295.000,00					34.269.800,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	17.295.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Dokumen	34.269.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					229.431.300,00					253.371.800,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	229.431.300,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	14 Laporan	253.371.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					5.879.700,00					20.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	1 Laporan	5.879.700,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	4 Laporan	20.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					31.042.652.055,00					36.750.826.218,00	
		-					31.042.652.055,00					36.750.826.218,00	
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					30.199.568.555,00					35.084.118.428,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	266 Orang/bulan	266 Orang/bulan	261 Orang/bulan	30.199.568.555,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Koto Tangah || Kelurahan Aie Pacah || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	266 Orang/bulan	35.084.118.428,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					640.260.000,00					1.423.915.808,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	640.260.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Koto Tangah || Kelurahan Aie Pacah || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Dokumen	1.423.915.808,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					202.823.500,00					242.791.982,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3000 Dokumen	3000 Dokumen	3000 Dokumen	202.823.500,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Koto Tangah || Kelurahan Aie Pacah || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	3000 Dokumen	242.791.982,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					6.909.533.702,00					6.043.412.118,00	
		-					6.909.533.702,00					6.043.412.118,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					4.924.788.702,00					3.485.025.115,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	4.924.788.702,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Koto Tangah || Kelurahan Aie Pacah || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	2 Orang/Bulan	3.485.025.115,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN TATA PEMERINTAHAN					**546.593.050,00**					**1.053.402.105,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**					**546.593.050,00**					**1.053.402.105,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**					**546.593.050,00**					**1.053.402.105,00**	
142.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**					**36.102.869.140,00**					**18.060.518.622,00**	
		meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat					***546.593.050,00***					***1.053.402.105,00***	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan					546.593.050,00					1.053.402.105,00	
		-					546.593.050,00					1.053.402.105,00	
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan					55.195.600,00					120.811.168,00	
		Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	18 Dokumen	18 Dokumen	18 Dokumen	55.195.600,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	18 Dokumen	120.811.168,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan					246.902.050,00					468.592.868,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	246.902.050,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	6 Dokumen	468.592.868,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah					244.495.400,00					463.998.069,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	244.495.400,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	5 Dokumen	463.998.069,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
		BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					**34.882.276.990,00**					**15.714.595.297,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**					**34.882.276.990,00**					**15.714.595.297,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**					**34.882.276.990,00**					**15.714.595.297,00**	
143.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**					**36.102.869.140,00**					**18.060.518.622,00**	
		meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat					***34.882.276.990,00***					***15.714.595.297,00***	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat					34.882.276.990,00					15.714.595.297,00	
		-					34.882.276.990,00					15.714.595.297,00	
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual					28.512.770.752,00					13.198.102.297,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	28.512.770.752,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Dokumen	13.198.102.297,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial					449.778.000,00					478.385.000,00	
		Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	449.778.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Dokumen	478.385.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat					515.028.238,00					420.258.000,00	
		Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	515.028.238,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Dokumen	420.258.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.02.2.02.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing					5.404.700.000,00					1.617.850.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	6 Keluarga	6 Keluarga	6 Keluarga	5.404.700.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	6 Keluarga	1.617.850.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
		BAGIAN HUKUM					**475.954.800,00**					**916.673.720,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**					**475.954.800,00**					**916.673.720,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**					**475.954.800,00**					**916.673.720,00**	
144.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**					**36.102.869.140,00**					**18.060.518.622,00**	
		meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat					***475.954.800,00***					***916.673.720,00***	
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum					475.954.800,00					916.673.720,00	
		-					475.954.800,00					916.673.720,00	
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah					101.455.900,00					173.247.800,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	840 Dokumen	840 Dokumen	840 Dokumen	101.455.900,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	840 Dokumen	173.247.800,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum					297.969.000,00					632.730.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	14 Kasus	10 Kasus	11 Kasus	297.969.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Kasus	632.730.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum danPengelolaan Informasi Hukum					76.529.900,00					110.695.920,00	
		Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	840 Dokumen	840 Dokumen	840 Dokumen	76.529.900,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	840 Dokumen	110.695.920,00	BAGIAN HUKUM
		BAGIAN KERJASAMA					**198.044.300,00**					**375.847.500,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**					**198.044.300,00**					**375.847.500,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**					**198.044.300,00**					**375.847.500,00**	
145.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**					**36.102.869.140,00**					**18.060.518.622,00**	
		meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat					***198.044.300,00***					***375.847.500,00***	
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah					198.044.300,00					375.847.500,00	
		-					198.044.300,00					375.847.500,00	
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri					55.487.800,00					150.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	65 Dokumen	50 Dokumen	55 Dokumen	55.487.800,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	60 Dokumen	150.000.000,00	BAGIAN KERJASAMA
	4.01.02.2.04.0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri					95.144.100,00					180.450.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	18 Dokumen	14 Dokumen	16 Dokumen	95.144.100,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	16 Dokumen	180.450.000,00	BAGIAN KERJASAMA
	4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama					47.412.400,00					45.397.500,00	
		Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	47.412.400,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Laporan	45.397.500,00	BAGIAN KERJASAMA
		BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM					**192.199.100,00**					**316.111.522,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**					**192.199.100,00**					**316.111.522,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**					**192.199.100,00**					**316.111.522,00**	
146.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**					**521.587.400,00**					**1.066.861.522,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang di tindaklanjuti					***192.199.100,00***					***316.111.522,00***	
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian					192.199.100,00					316.111.522,00	
		-					192.199.100,00					316.111.522,00	
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD					85.991.700,00					140.111.522,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 Dokumen	2 Dokumen	0 Dokumen	85.991.700,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	2 Dokumen	140.111.522,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian					53.749.600,00					98.000.000,00	
		Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	5 Laporan	5 Laporan	0 Laporan	53.749.600,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	5 Laporan	98.000.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil					52.457.800,00					78.000.000,00	
		Terlaksananya Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	4 Dokumen	4 Dokumen	0 Dokumen	52.457.800,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	4 Dokumen	78.000.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
		BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA					**230.015.600,00**					**540.750.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**					**230.015.600,00**					**540.750.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**					**230.015.600,00**					**540.750.000,00**	
147.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**					**521.587.400,00**					**1.066.861.522,00**	
		Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang di tindaklanjuti					***230.015.600,00***					***540.750.000,00***	
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa					230.015.600,00					540.750.000,00	
		-					230.015.600,00					540.750.000,00	
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa					129.068.400,00					225.750.000,00	
		Terkelolanya Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	52 Dokumen	52 Dokumen	52 Dokumen	129.068.400,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	52 Dokumen	225.750.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik					27.319.300,00					120.000.000,00	
		Terkelolanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	52 Dokumen	52 Dokumen	52 Dokumen	27.319.300,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	52 Dokumen	120.000.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa					73.627.900,00					195.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	52 Orang	52 Orang	52 Orang	73.627.900,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	52 Orang	195.000.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA
		BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN PERENCANAAN					**99.372.700,00**					**210.000.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**					**99.372.700,00**					**210.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**					**99.372.700,00**					**210.000.000,00**	
148.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**					**521.587.400,00**					**1.066.861.522,00**	
		Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang di tindaklanjuti					***99.372.700,00***					***210.000.000,00***	
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan					99.372.700,00					210.000.000,00	
		-					99.372.700,00					210.000.000,00	
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan					83.576.700,00					110.000.000,00	
		Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 Laporan	1 Laporan	12 Laporan	83.576.700,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Laporan	110.000.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN PERENCANAAN
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan					15.796.000,00					100.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	13 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	15.796.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	13 Laporan	100.000.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN PERENCANAAN
		BAGIAN ORGANISASI					**236.743.500,00**					**603.750.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**					**236.743.500,00**					**603.750.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**					**236.743.500,00**					**603.750.000,00**	
149.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**66.350.408.941,00**					**76.404.794.645,00**	
		Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah					***236.743.500,00***					***603.750.000,00***	
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi					236.743.500,00					603.750.000,00	
		-					236.743.500,00					603.750.000,00	
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan					67.462.000,00					260.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	67.462.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	2 Dokumen	260.000.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi					68.517.500,00					60.750.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	68.517.500,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Dokumen	60.750.000,00	BAGIAN ORGANISASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana					76.739.000,00					243.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	76.739.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Dokumen	243.000.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah					24.025.000,00					40.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	24.025.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Dokumen	40.000.000,00	BAGIAN ORGANISASI
		BAGIAN UMUM					**27.807.696.784,00**					**35.184.899.912,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**					**27.807.696.784,00**					**35.184.899.912,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**					**27.807.696.784,00**					**35.184.899.912,00**	
150.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**66.350.408.941,00**					**76.404.794.645,00**	
		Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah					***27.795.225.784,00***					***35.172.428.912,00***	
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					2.282.163.000,00					2.287.933.758,00	
		-					2.282.163.000,00					2.287.933.758,00	
	4.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					2.282.163.000,00					2.259.281.958,00	
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.282.163.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Koto Tangah || Kelurahan Aie Pacah || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Dokumen	2.259.281.958,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD					0,00					28.651.800,00	
		Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	0,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Koto Tangah || Kelurahan Aie Pacah || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Laporan	28.651.800,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					12.253.298.300,00					15.449.547.045,00	
		-					12.253.298.300,00					15.449.547.045,00	
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor					460.018.300,00					670.960.212,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	460.018.300,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Koto Tangah || Kelurahan Aie Pacah || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Paket	670.960.212,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					259.179.000,00					2.429.931.349,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	259.179.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Koto Tangah || Kelurahan Aie Pacah || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Paket	2.429.931.349,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					729.014.100,00					1.604.670.464,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	729.014.100,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Padang Barat || Kelurahan Padang Pasir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Paket	1.604.670.464,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					335.082.300,00					415.751.438,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	6 Paket	335.082.300,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Koto Tangah || Kelurahan Aie Pacah || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	6 Paket	415.751.438,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					264.613.600,00					619.436.053,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	6 Paket	264.613.600,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Koto Tangah || Kelurahan Aie Pacah || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	6 Paket	619.436.053,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					176.500.000,00					306.593.361,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2101 Dokumen	1854 Dokumen	1920 Dokumen	176.500.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Koto Tangah || Kelurahan Aie Pacah || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1952 Dokumen	306.593.361,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu					5.815.456.000,00					6.008.473.701,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	510 Laporan	375 Laporan	405 Laporan	5.815.456.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Koto Tangah || Kelurahan Aie Pacah || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	442 Laporan	6.008.473.701,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					4.213.435.000,00					3.393.730.467,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	342 Laporan	259 Laporan	270 Laporan	4.213.435.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Koto Tangah || Kelurahan Aie Pacah || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	293 Laporan	3.393.730.467,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					0,00					1.299.071.812,00	
		-					0,00					1.299.071.812,00	
	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					0,00					817.919.002,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	12 Unit	11 Unit	0,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Koto Tangah || Kelurahan Aie Pacah || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	11 Unit	817.919.002,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					0,00					481.152.810,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	4 Unit	4 Unit	0,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Koto Tangah || Kelurahan Aie Pacah || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	6 Unit	481.152.810,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.911.644.000,00					2.915.902.900,00	
		-					2.911.644.000,00					2.915.902.900,00	
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					25.704.000,00					79.281.216,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	25.704.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Koto Tangah || Kelurahan Aie Pacah || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Laporan	79.281.216,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					2.885.940.000,00					2.836.621.684,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	2.885.940.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Koto Tangah || Kelurahan Aie Pacah || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Laporan	2.836.621.684,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					6.847.425.484,00					9.069.669.146,00	
		-					6.847.425.484,00					9.069.669.146,00	
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					447.340.000,00					486.676.104,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	25 Unit	25 Unit	25 Unit	447.340.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Koto Tangah || Kelurahan Aie Pacah || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	25 Unit	486.676.104,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					2.202.570.000,00					2.148.322.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	120 Unit	117 Unit	117 Unit	2.202.570.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Koto Tangah || Kelurahan Aie Pacah || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	117 Unit	2.148.322.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel					25.000.000,00					66.629.480,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	6 Unit	8 Unit	25.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Koto Tangah || Kelurahan Aie Pacah || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	8 Unit	66.629.480,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					249.500.000,00					238.349.268,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	260 Unit	245 Unit	8 Unit	249.500.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Koto Tangah || Kelurahan Aie Pacah || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	250 Unit	238.349.268,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					3.581.638.484,00					4.875.121.253,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	4 Unit	3.581.638.484,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Koto Tangah || Kelurahan Aie Pacah || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	4 Unit	4.875.121.253,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					341.377.000,00					693.724.977,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1211 Unit	1174 Unit	4 Unit	341.377.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Koto Tangah || Kelurahan Aie Pacah || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1200 Unit	693.724.977,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					0,00					560.846.064,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	3 Unit	0,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Koto Tangah || Kelurahan Aie Pacah || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	3 Unit	560.846.064,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					6.909.533.702,00					6.043.412.118,00	
		-					6.909.533.702,00					6.043.412.118,00	
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					389.745.000,00					683.387.003,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	389.745.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Koto Tangah || Kelurahan Aie Pacah || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	2 Paket	683.387.003,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					1.595.000.000,00					1.875.000.000,00	
		Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	2*12 Orang/Bulan	1.595.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	2 Orang/Bulan	1.875.000.000,00	BAGIAN UMUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah					1.515.950.000,00					1.591.917.248,00	
		-					1.515.950.000,00					1.591.917.248,00	
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah					598.618.400,00					825.545.728,00	
		Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	12 Paket	598.618.400,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	8 Paket	825.545.728,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah					418.352.200,00					427.171.520,00	
		Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	8 Paket	0 Paket	12 Paket	418.352.200,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	8 Paket	427.171.520,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah					498.979.400,00					339.200.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	8 Paket	0 Paket	12 Paket	498.979.400,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	8 Paket	339.200.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					12.471.000,00					12.471.000,00	
		-					12.471.000,00					12.471.000,00	
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					12.471.000,00					12.471.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	-	5 Paket	12.471.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Koto Tangah || Kelurahan Aie Pacah || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	-	12.471.000,00	BAGIAN UMUM
		BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN					**2.063.694.500,00**					**0,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**					**2.063.694.500,00**					**0,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**					**2.063.694.500,00**					**0,00**	
151.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**66.350.408.941,00**					**76.404.794.645,00**	
		Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah					***2.063.694.500,00***					***0,00***	
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan					2.063.694.500,00					0,00	
		-					2.063.694.500,00					0,00	
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan					1.912.401.700,00					0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.912.401.700,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 Laporan	0,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan					14.304.400,00					0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	14.304.400,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 Laporan	0,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan					136.988.400,00					0,00	
		Terlaksananya Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	136.988.400,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 Laporan	0,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
		SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH					**73.280.849.090,00**					**83.521.800.667,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**					**73.280.849.090,00**					**83.521.800.667,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**					**73.280.849.090,00**					**83.521.800.667,00**	
152.	**4.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**44.699.520.990,00**					**51.359.403.632,00**	
		Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah					***44.699.520.990,00***					***51.063.708.332,00***	
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					76.205.200,00					167.646.000,00	
		-					76.205.200,00					167.646.000,00	
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					7.582.400,00					30.456.500,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	7.582.400,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	2 Dokumen	30.456.500,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					7.427.400,00					14.866.300,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	7.427.400,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Dokumen	14.866.300,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					7.632.700,00					15.456.800,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	7.632.700,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Dokumen	15.456.800,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					7.559.400,00					14.695.300,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	7.559.400,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Dokumen	14.695.300,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					7.351.300,00					14.695.300,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	7.351.300,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Dokumen	14.695.300,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					31.000.100,00					62.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	31.000.100,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	3 Laporan	62.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					7.651.900,00					15.475.800,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	7.651.900,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	4 Laporan	15.475.800,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					8.414.573.441,00					8.979.029.512,00	
		-					8.414.573.441,00					8.979.029.512,00	
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					8.175.799.741,00					8.501.789.512,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	40 Orang/bulan	40 Orang/bulan	8.175.799.741,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	40 Orang/bulan	8.501.789.512,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					223.730.000,00					447.240.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	223.730.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Dokumen	447.240.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					7.547.000,00					15.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	7.547.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Laporan	15.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					7.496.700,00					15.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan	1 Laporan	7.496.700,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	18 Laporan	15.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					2.197.673.700,00					2.081.580.300,00	
		-					2.197.673.700,00					2.081.580.300,00	
	4.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					2.197.673.700,00					2.081.580.300,00	
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.197.673.700,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Dokumen	2.081.580.300,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					13.000.000,00					89.957.053,00	
		-					13.000.000,00					89.957.053,00	
	4.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					0,00					4.978.153,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Dokumen	4.978.153,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					13.000.000,00					84.978.900,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	15 Orang	15 Orang	13.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	15 Orang	84.978.900,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.890.893.600,00					6.740.902.158,00	
		-					1.890.893.600,00					6.740.902.158,00	
	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor					20.003.500,00					29.994.900,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	21 Paket	21 Paket	21 Paket	20.003.500,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	21 Paket	29.994.900,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					18.680.000,00					99.996.600,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	19 Paket	19 Paket	19 Paket	18.680.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	19 Paket	99.996.600,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					37.471.300,00					74.996.900,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	55 Paket	55 Paket	55 Paket	37.471.300,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	55 Paket	74.996.900,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					159.620.600,00					320.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	25 Paket	25 Paket	25 Paket	159.620.600,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	25 Paket	320.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					175.011.000,00					350.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	175.011.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	3 Dokumen	350.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu					838.495.200,00					899.989.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	838.495.200,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Laporan	899.989.200,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					641.612.000,00					4.965.924.558,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	641.612.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Laporan	4.965.924.558,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					387.460.200,00					602.871.800,00	
		-					387.460.200,00					602.871.800,00	
	4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					5.322.300,00					82.871.800,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	3 Unit	5.322.300,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	3 Unit	82.871.800,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					137.311.900,00					260.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	137.311.900,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Unit	260.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					244.826.000,00					260.000.000,00	
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	244.826.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Unit	260.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					973.227.120,00					1.038.913.700,00	
		-					973.227.120,00					1.038.913.700,00	
	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1.990.800,00					3.994.200,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.990.800,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Laporan	3.994.200,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					911.316.320,00					949.999.500,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	911.316.320,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Laporan	949.999.500,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					59.920.000,00					59.920.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	59.920.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Laporan	59.920.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					0,00					25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Laporan	25.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					3.139.306.700,00					3.328.503.300,00	
		-					3.139.306.700,00					3.328.503.300,00	
	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					231.680.000,00					214.900.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	5 Unit	5 Unit	231.680.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	5 Unit	214.900.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					463.140.000,00					352.400.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	37 Unit	37 Unit	37 Unit	463.140.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	37 Unit	352.400.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel					6.000.000,00					6.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	1 Unit	6.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Unit	6.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					5.900.000,00					6.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	1 Unit	5.900.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Unit	6.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					2.135.586.700,00					2.149.203.300,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	2.135.586.700,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Unit	2.149.203.300,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					297.000.000,00					600.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	297.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Unit	600.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD					26.749.052.129,00					27.318.008.509,00	
		-					26.749.052.129,00					27.318.008.509,00	
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD					26.165.429.929,00					26.722.954.009,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	45 Orang/Bulan	45 Orang/Bulan	45 Orang/Bulan	26.165.429.929,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	45 Orang/Bulan	26.722.954.009,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD					471.122.200,00					475.055.500,00	
		Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	5 Paket	471.122.200,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	5 Paket	475.055.500,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD					112.500.000,00					119.999.000,00	
		Terlaksananya Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45 Orang	45 Orang	45 Orang	112.500.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	45 Orang	119.999.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD					858.128.900,00					1.011.991.300,00	
		-					858.128.900,00					1.011.991.300,00	
	4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD					11.597.300,00					11.995.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	11.597.300,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Laporan	11.995.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD					835.284.600,00					850.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	835.284.600,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Laporan	850.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD					11.247.000,00					149.996.300,00	
		Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	11.247.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	4 Paket	149.996.300,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
153.	**4.02.02**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**					**28.581.328.100,00**					**32.162.397.035,00**	
		meningkatnya kualitas persidangan dan kajian perundang-undangan					***28.494.887.300,00***					***30.528.777.035,00***	
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD					1.815.255.800,00					2.404.256.000,00	
		-					1.815.255.800,00					2.404.256.000,00	
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah					1.708.054.000,00					2.213.856.000,00	
		Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	6 Dokumen	1.708.054.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	4 Dokumen	2.213.856.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.01.0006	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah					107.201.800,00					190.400.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	1200 Orang	1200 Orang	100 Orang	107.201.800,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1200 Orang	190.400.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran					4.528.179.100,00					4.827.240.000,00	
		-					4.528.179.100,00					4.827.240.000,00	
	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS					832.352.600,00					900.000.000,00	
		Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	832.352.600,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Dokumen	900.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS					832.345.500,00					900.000.000,00	
		Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	832.345.500,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Dokumen	900.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD					599.999.800,00					613.620.000,00	
		Terlaksananya Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	599.999.800,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Dokumen	613.620.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan					594.999.800,00					613.620.000,00	
		Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	594.999.800,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Dokumen	613.620.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD					1.668.481.400,00					1.800.000.000,00	
		Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1.668.481.400,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	2 Dokumen	1.800.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan					130.498.700,00					179.913.100,00	
		-					130.498.700,00					179.913.100,00	
	4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum					28.813.600,00					40.000.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	28.813.600,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Laporan	40.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur					28.813.600,00					40.000.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	28.813.600,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Laporan	40.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat					28.813.600,00					40.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	28.813.600,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Laporan	40.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian					28.813.600,00					40.000.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	28.813.600,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Laporan	40.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan					15.244.300,00					19.913.100,00	
		Terlaksananya Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	15.244.300,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Dokumen	19.913.100,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD					6.381.904.100,00					5.574.678.200,00	
		-					6.381.904.100,00					5.574.678.200,00	
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD					4.044.834.500,00					3.478.714.100,00	
		Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	4.044.834.500,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	6 Dokumen	3.478.714.100,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli					422.400.000,00					360.000.000,00	
		Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	9 Orang	9 Orang	9 Orang	422.400.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	9 Orang	360.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat					158.192.200,00					199.939.000,00	
		Terselenggaranya Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	158.192.200,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	3 Dokumen	199.939.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD					13.549.900,00					19.999.900,00	
		Tersusunnya Rencana Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	13.549.900,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Dokumen	19.999.900,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD					1.742.927.500,00					1.516.025.200,00	
		Terlaksananya Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.742.927.500,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Dokumen	1.516.025.200,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat					3.337.157.700,00					4.994.067.700,00	
		-					3.337.157.700,00					4.994.067.700,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah					55.060.200,00					99.999.900,00	
		Terselenggaranya Kunjungan Kerja DPRD	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	55.060.200,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	3 Laporan	99.999.900,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD					7.487.500,00					10.000.000,00	
		Tersusunnya Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	45 Dokumen	45 Dokumen	45 Dokumen	7.487.500,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	45 Dokumen	10.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses					3.274.610.000,00					4.884.067.800,00	
		Terlaksananya Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3.274.610.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	3 Dokumen	4.884.067.800,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah					321.795.400,00					450.051.400,00	
		-					321.795.400,00					450.051.400,00	
	4.02.02.2.07.0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi					321.795.400,00					450.051.400,00	
		Tersusunnya Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	321.795.400,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	3 Dokumen	450.051.400,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD					12.066.537.300,00					13.732.190.635,00	
		-					12.066.537.300,00					13.732.190.635,00	
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD					12.066.537.300,00					13.732.190.635,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	17 Dokumen	17 Dokumen	17 Dokumen	12.066.537.300,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	17 Dokumen	13.732.190.635,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					**17.300.541.998,00**					**17.125.000.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**					**17.300.541.998,00**					**17.125.000.000,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**					**16.587.927.198,00**					**16.746.693.368,00**	
154.	**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**14.658.172.998,00**					**13.327.965.184,00**	
		Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah					***14.658.172.998,00***					***13.322.965.184,00***	
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					0,00					5.000.000,00	
		-					0,00					5.000.000,00	
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					0,00					2.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	3 Dokumen	2.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					0,00					1.500.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	0 Laporan	4 Laporan	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	4 Laporan	1.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					0,00					1.500.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Laporan	1.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					10.305.580.398,00					10.502.024.684,00	
		-					10.305.580.398,00					10.502.024.684,00	
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					10.090.012.398,00					10.291.294.684,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64 Orang/bulan	64 Orang/bulan	62 Orang/bulan	10.090.012.398,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	64 Orang/bulan	10.291.294.684,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					215.568.000,00					208.730.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	215.568.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Dokumen	208.730.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					0,00					2.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Laporan	2.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					541.658.000,00					726.888.500,00	
		-					541.658.000,00					726.888.500,00	
	5.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					541.658.000,00					726.888.500,00	
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	541.658.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Dokumen	726.888.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					138.135.000,00					45.000.000,00	
		-					138.135.000,00					45.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					120.000.000,00					0,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	0 Orang	24 Orang	120.000.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	0 Orang	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					18.135.000,00					45.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	64 Orang	64 Orang	62 Orang	18.135.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	64 Orang	45.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.196.252.400,00					601.195.600,00	
		-					1.196.252.400,00					601.195.600,00	
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor					27.592.300,00					15.135.600,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	27.592.300,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Paket	15.135.600,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					396.130.200,00					28.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0 Paket	1 Paket	396.130.200,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Paket	28.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					21.552.900,00					0,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	0 Paket	1 Paket	21.552.900,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Paket	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					158.950.000,00					35.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	158.950.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Paket	35.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					95.549.000,00					38.200.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	95.549.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Paket	38.200.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					8.644.000,00					8.200.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	8.644.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Dokumen	8.200.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu					60.007.000,00					70.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	60.007.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Laporan	70.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					427.827.000,00					406.660.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	427.827.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Laporan	406.660.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					607.880.100,00					10.000.000,00	
		-					607.880.100,00					10.000.000,00	
	5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					4.904.100,00					10.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	0 Unit	1 Unit	4.904.100,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Unit	10.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					356.231.600,00					368.106.400,00	
		-					356.231.600,00					368.106.400,00	
	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1.260.000,00					1.500.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.260.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Laporan	1.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					354.971.600,00					366.606.400,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	354.971.600,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Laporan	366.606.400,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.512.435.500,00					1.069.750.000,00	
		-					1.512.435.500,00					1.069.750.000,00	
	5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					40.440.000,00					36.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	40.440.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Unit	36.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					399.210.000,00					351.430.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	24 Unit	24 Unit	399.210.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	24 Unit	351.430.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel					0,00					3.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	0 Unit	1 Unit	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Unit	3.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					21.300.000,00					20.570.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit	29 Unit	29 Unit	21.300.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	29 Unit	20.570.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					969.135.500,00					580.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	969.135.500,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Unit	580.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					82.350.000,00					78.750.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	10 Unit	1 Unit	82.350.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	10 Unit	78.750.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		-					607.880.100,00					10.000.000,00	
	5.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					401.040.000,00					0,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	-	1 Unit	401.040.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					201.936.000,00					0,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	1 Unit	201.936.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
155.	**5.01.02**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**					**1.253.394.100,00**					**2.446.323.000,00**	
		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah					***893.074.100,00***					***2.346.516.000,00***	
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan					1.049.372.800,00					2.262.468.000,00	
		-					1.049.372.800,00					2.262.468.000,00	
	5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah					0,00					17.335.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Tersedianya Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah di dalam Rancangan Awal RPJMD/RKPD	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Dokumen	17.335.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik					360.320.000,00					68.289.000,00	
		Terlaksananya Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	1 Berita Acara	1 Berita Acara	360.320.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Berita Acara	68.289.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah					33.550.000,00					99.807.000,00	
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	1 Berita Acara	1 Berita Acara	33.550.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Berita Acara	99.807.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota					360.320.000,00					117.668.000,00	
		Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	1 Berita Acara	1 Berita Acara	360.320.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Berita Acara	117.668.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan					10.890.000,00					15.759.000,00	
		Tersedianya Usulan-Usulan yang Telah Terverifikasi oleh Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	208 Usulan	208 Usulan	208 Usulan	10.890.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	208 Usulan	15.759.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota					284.292.800,00					1.943.610.000,00	
		Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	284.292.800,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	2 Dokumen	1.943.610.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah					25.080.000,00					84.048.000,00	
		-					25.080.000,00					84.048.000,00	
	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah					25.080.000,00					0,00	
		Terinputnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	25.080.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	0 Dokumen	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota					0,00					84.048.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	1 Buku	1 Buku	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Buku	84.048.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah					110.419.300,00					99.807.000,00	
		-					110.419.300,00					99.807.000,00	
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah					110.419.300,00					99.807.000,00	
		Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	110.419.300,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	2 Laporan	99.807.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah					68.522.000,00					0,00	
		-					68.522.000,00					0,00	
	5.01.02.2.04.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota					68.522.000,00					0,00	
		Terlaksananya Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	68.522.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	0 Dokumen	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
156.	**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**					**676.360.100,00**					**972.405.184,00**	
		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan					***399.884.100,00***					***400.000.000,00***	
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan					399.884.100,00					400.000.000,00	
		-					399.884.100,00					400.000.000,00	
	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					100.132.100,00					150.000.000,00	
		Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	100.132.100,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Dokumen	150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur					60.160.000,00					60.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	60.160.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	4 Laporan	60.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur					39.740.000,00					40.000.000,00	
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	39.740.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Laporan	40.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					150.072.000,00					100.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	150.072.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Dokumen	100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan					49.780.000,00					50.000.000,00	
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	49.780.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Laporan	50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia					***105.835.000,00***					***372.000.000,00***	
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia					105.835.000,00					372.000.000,00	
		-					105.835.000,00					372.000.000,00	
	5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan					14.940.000,00					70.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	14.940.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Laporan	70.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan					13.675.000,00					60.000.000,00	
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	13.675.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Laporan	60.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia					55.245.000,00					175.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	55.245.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	4 Laporan	175.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia					21.975.000,00					67.000.000,00	
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	21.975.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Laporan	67.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA					***170.641.000,00***					***200.405.184,00***	
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)					170.641.000,00					200.405.184,00	
		-					170.641.000,00					200.405.184,00	
	5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian					44.961.000,00					65.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	44.961.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Laporan	65.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian					44.875.000,00					50.000.000,00	
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	44.875.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Laporan	50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA					44.955.000,00					45.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	44.955.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Laporan	45.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA					35.850.000,00					40.405.184,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	35.850.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Laporan	40.405.184,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**					**712.614.800,00**					**378.306.632,00**	
157.	**5.05.02**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**					**386.422.600,00**					**231.654.000,00**	
		Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan					***386.422.600,00***					***231.654.000,00***	
	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan					158.650.000,00					231.654.000,00	
		-					158.650.000,00					231.654.000,00	
	5.05.02.2.01.0013	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan					0,00					190.000.000,00	
		Terlaksananya Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Rekomendasi	190.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.01.0014	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan					158.650.000,00					41.654.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	158.650.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Laporan	41.654.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		-					227.772.600,00					0,00	
	5.05.02.2.02.0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata					0,00					0,00	
		Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	0 Dokumen	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan					227.772.600,00					0,00	
		-					227.772.600,00					0,00	
	5.05.02.2.02.0006	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan					227.772.600,00					0,00	
		Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	-	-	1 Dokumen	227.772.600,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
158.	**5.05.03**	**PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH**					**326.192.200,00**					**146.652.632,00**	
		Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah					***326.192.200,00***					***146.652.632,00***	
		-					326.192.200,00					146.652.632,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	5.05.03.2.02.0006	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual					0,00					70.000.000,00	
		Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI)	1 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Laporan	70.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.03.2.02.0012	Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi					223.532.200,00					76.652.632,00	
		Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	1 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	223.532.200,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Laporan	76.652.632,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.03.2.02	Invensi dan Inovasi					326.192.200,00					146.652.632,00	
		-					326.192.200,00					146.652.632,00	
	5.05.03.2.02.0018	Bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi					102.660.000,00					0,00	
		Terlaksananya bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi	Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi	-	-	1 Pelatihan	102.660.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH					**42.410.511.235,00**					**71.695.991.968,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**					**42.410.511.235,00**					**71.695.991.968,00**	
	5.02	**KEUANGAN**					**42.410.511.235,00**					**71.695.991.968,00**	
159.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**18.038.745.340,00**					**19.119.964.753,00**	
		Meningkatnya efektivitas dan efisien pelaksanaan urusan pemerintahan daerah					***18.038.745.340,00***					***19.012.675.483,00***	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					85.423.300,00					263.044.555,00	
		-					85.423.300,00					263.044.555,00	
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					27.165.300,00					103.676.169,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	27.165.300,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	4 Dokumen	103.676.169,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					8.206.800,00					9.908.215,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	8.206.800,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Dokumen	9.908.215,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					7.644.800,00					9.244.961,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	7.644.800,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Dokumen	9.244.961,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					8.468.500,00					10.037.475,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	8.468.500,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Dokumen	10.037.475,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					7.888.800,00					10.477.368,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	7.888.800,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Dokumen	10.477.368,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					16.772.500,00					111.094.567,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	5 Laporan	1 Laporan	16.772.500,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	5 Laporan	111.094.567,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					9.276.600,00					8.605.800,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	9.276.600,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Laporan	8.605.800,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					13.871.612.678,00					13.606.727.739,00	
		-					13.871.612.678,00					13.606.727.739,00	
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					13.417.052.678,00					13.107.577.739,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang/bulan	75 Orang/bulan	75 Orang/bulan	13.417.052.678,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	75 Orang/bulan	13.107.577.739,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					454.560.000,00					499.150.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	454.560.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Dokumen	499.150.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					518.349.000,00					675.053.600,00	
		-					518.349.000,00					675.053.600,00	
	5.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					518.349.000,00					675.053.600,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	518.349.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Dokumen	675.053.600,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					40.000.000,00					40.000.000,00	
		-					40.000.000,00					40.000.000,00	
	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					0,00					0,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	75 Paket	75 Paket	0 Paket	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	0 Paket	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					40.000.000,00					40.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	10 Orang	10 Orang	40.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	10 Orang	40.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.104.750.643,00					1.258.244.343,00	
		-					1.104.750.643,00					1.258.244.343,00	
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor					41.226.480,00					40.749.154,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	19 Paket	19 Paket	19 Paket	41.226.480,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	19 Paket	40.749.154,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					256.099.100,00					136.002.354,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	256.099.100,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Paket	136.002.354,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					23.615.883,00					63.009.666,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	23.615.883,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	3 Paket	63.009.666,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					139.273.500,00					182.656.156,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	139.273.500,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	4 Paket	182.656.156,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					65.000.000,00					108.456.543,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	65.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	2 Paket	108.456.543,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					13.242.855,00					27.809.995,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	13.242.855,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	2 Dokumen	27.809.995,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu					109.099.325,00					146.555.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	109.099.325,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Laporan	146.555.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					432.570.000,00					527.159.800,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	432.570.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Laporan	527.159.800,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					24.623.500,00					25.845.675,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	24.623.500,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Dokumen	25.845.675,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					185.253.000,00					462.485.737,00	
		-					185.253.000,00					462.485.737,00	
	5.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					0,00					107.289.270,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	1 Unit	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	0 Unit	107.289.270,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					0,00					107.289.270,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	0 Unit	107.289.270,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					60.253.000,00					122.907.197,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	3 Unit	60.253.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	3 Unit	122.907.197,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					125.000.000,00					125.000.000,00	
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	125.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Unit	125.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					386.948.400,00					650.884.815,00	
		-					386.948.400,00					650.884.815,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					4.800.000,00					12.274.815,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	4.800.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Laporan	12.274.815,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					377.998.400,00					633.150.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	377.998.400,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Laporan	633.150.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					4.150.000,00					5.460.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	4.150.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Laporan	5.460.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.846.408.319,00					2.163.523.964,00	
		-					1.846.408.319,00					2.163.523.964,00	
	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					36.000.000,00					36.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	36.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Unit	36.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					810.590.000,00					810.590.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	52 Unit	52 Unit	52 Unit	810.590.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	52 Unit	810.590.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					68.505.000,00					64.340.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	90 Unit	90 Unit	90 Unit	68.505.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	90 Unit	64.340.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					931.313.319,00					1.198.223.964,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	931.313.319,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Unit	1.198.223.964,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					0,00					54.370.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	33 Unit	33 Unit	33 Unit	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	33 Unit	54.370.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
160.	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**					**16.388.870.498,00**					**36.415.928.109,00**	
		Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan					***270.954.300,00***					***1.014.431.869,75***	
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah					270.954.300,00					1.014.431.869,75	
		-					270.954.300,00					1.014.431.869,75	
	5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah					67.444.900,00					110.880.598,50	
		Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	516 Laporan	516 Laporan	516 Laporan	67.444.900,00	Kota Padang	Dana Bagi Hasil (DBH)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	516 Laporan	110.880.598,50	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban					26.442.600,00					73.803.975,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	636 Dokumen	636 Dokumen	636 Dokumen	26.442.600,00	Kota Padang	Dana Bagi Hasil (DBH)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	636 Dokumen	73.803.975,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran					24.393.600,00					29.190.446,25	
		Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	43 Laporan	43 Laporan	43 Laporan	24.393.600,00	Kota Padang	Dana Bagi Hasil (DBH)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	43 Laporan	29.190.446,25	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah					21.480.200,00					93.660.367,50	
		Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	43 Laporan	43 Laporan	43 Laporan	21.480.200,00	Kota Padang	Dana Bagi Hasil (DBH)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	43 Laporan	93.660.367,50	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota					115.389.700,00					301.905.600,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	115.389.700,00	Kota Padang	Dana Bagi Hasil (DBH)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	2 Dokumen	301.905.600,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah					8.119.700,00					9.580.882,50	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	50 Dokumen	50 Dokumen	50 Dokumen	8.119.700,00	Kota Padang	Dana Bagi Hasil (DBH)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	50 Dokumen	9.580.882,50	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan danPertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota					7.683.600,00					395.410.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	1152 Orang	1152 Orang	1152 Orang	7.683.600,00	Kota Padang	Dana Bagi Hasil (DBH)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1152 Orang	395.410.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Meningkatnya tata kelola anggaran					***1.132.663.300,00***					***2.552.119.442,00***	
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah					1.121.463.300,00					1.802.419.442,00	
		-					1.121.463.300,00					1.802.419.442,00	
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS					58.886.600,00					115.736.465,00	
		Tersusunnya KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	58.886.600,00	Kota Padang	Dana Bagi Hasil (DBH)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	2 Dokumen	115.736.465,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS					58.256.600,00					116.643.174,00	
		Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	58.256.600,00	Kota Padang	Dana Bagi Hasil (DBH)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	2 Dokumen	116.643.174,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD					20.167.700,00					29.276.102,00	
		Terlaksananya Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	53 Dokumen	53 Dokumen	53 Dokumen	20.167.700,00	Kota Padang	Dana Bagi Hasil (DBH)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	53 Dokumen	29.276.102,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD					20.039.300,00					24.052.148,00	
		Terlaksananya Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	53 Dokumen	53 Dokumen	53 Dokumen	20.039.300,00	Kota Padang	Dana Bagi Hasil (DBH)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	53 Dokumen	24.052.148,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD					38.111.400,00					84.448.258,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Terlaksananya Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	53 Dokumen	53 Dokumen	53 Dokumen	38.111.400,00	Kota Padang	Dana Bagi Hasil (DBH)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	53 Dokumen	84.448.258,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD					24.834.500,00					88.359.156,00	
		Terlaksananya Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	53 Dokumen	53 Dokumen	53 Dokumen	24.834.500,00	Kota Padang	Dana Bagi Hasil (DBH)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	53 Dokumen	88.359.156,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD					88.711.600,00					196.573.543,00	
		Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	88.711.600,00	Kota Padang	Dana Bagi Hasil (DBH)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	2 Dokumen	196.573.543,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD					85.722.000,00					190.747.039,00	
		Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	85.722.000,00	Kota Padang	Dana Bagi Hasil (DBH)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	2 Dokumen	190.747.039,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran					726.733.600,00					896.729.021,00	
		Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	726.733.600,00	Kota Padang	Dana Bagi Hasil (DBH)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Dokumen	896.729.021,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan					0,00					24.021.866,00	
		Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Kota Padang	Dana Bagi Hasil (DBH)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Dokumen	24.021.866,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah					0,00					22.110.907,00	
		Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Kota Padang	Dana Bagi Hasil (DBH)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Dokumen	22.110.907,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan					0,00					13.721.763,00	
		Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Kota Padang	Dana Bagi Hasil (DBH)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Dokumen	13.721.763,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah					11.200.000,00					749.700.000,00	
		-					11.200.000,00					749.700.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah					11.200.000,00					480.900.000,00	
		Terlaksananya Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	11.200.000,00	Kota Padang	Dana Bagi Hasil (DBH)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Dokumen	480.900.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.05.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota					0,00					268.800.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	54 Orang	54 Orang	54 Orang	0,00	Kota Padang	Dana Bagi Hasil (DBH)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	54 Orang	268.800.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Meningkatnya tata kelola perbendaharaan					***14.985.252.898,00***					***32.849.376.797,25***	
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah					541.300.600,00					1.019.945.562,75	
		-					541.300.600,00					1.019.945.562,75	
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah					230.954.200,00					358.273.917,75	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1456 Dokumen	1456 Dokumen	1456 Dokumen	230.954.200,00	Kota Padang	Dana Bagi Hasil (DBH)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1456 Dokumen	358.273.917,75	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah					66.385.900,00					82.470.150,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	66.385.900,00	Kota Padang	Dana Bagi Hasil (DBH)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Dokumen	82.470.150,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank					0,00					32.732.355,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Kota Padang	Dana Bagi Hasil (DBH)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Dokumen	32.732.355,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)					30.541.500,00					62.732.355,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	30.541.500,00	Kota Padang	Dana Bagi Hasil (DBH)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Laporan	62.732.355,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan					24.472.600,00					30.976.680,00	
		Tersedianya Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	24.472.600,00	Kota Padang	Dana Bagi Hasil (DBH)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Dokumen	30.976.680,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota					188.946.400,00					452.760.105,00	
		Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Orang	1 Orang	100 Orang	188.946.400,00	Kota Padang	Dana Bagi Hasil (DBH)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Orang	452.760.105,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah					14.443.952.298,00					31.829.431.234,50	
		-					14.443.952.298,00					31.829.431.234,50	
	5.02.02.2.04.0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah					547.156.570,00					24.285.785.651,50	
		Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	547.156.570,00	Kota Padang	Dana Bagi Hasil (DBH)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Laporan	24.285.785.651,50	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak					13.896.795.728,00					7.543.645.583,00	
		Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	13.896.795.728,00	Kota Padang	Dana Bagi Hasil (DBH)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Laporan	7.543.645.583,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
161.	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**					**7.982.895.397,00**					**16.160.099.106,00**	
		Meningkatnya tata kelola aset daerah					***7.982.895.397,00***					***16.160.099.106,00***	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah					7.982.895.397,00					16.160.099.106,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		-					7.982.895.397,00					16.160.099.106,00	
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga					65.202.186,00					81.855.083,00	
		Tersedianya Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	70 Dokumen	70 Dokumen	1 Dokumen	65.202.186,00	Kota Padang	Dana Bagi Hasil (DBH)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	70 Dokumen	81.855.083,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah					8.722.105,00					77.561.681,00	
		Tersedianya Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	8.722.105,00	Kota Padang	Dana Bagi Hasil (DBH)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	2 Dokumen	77.561.681,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah					46.618.481,00					58.556.873,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	100 Laporan	100 Laporan	1 Laporan	46.618.481,00	Kota Padang	Dana Bagi Hasil (DBH)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	100 Laporan	58.556.873,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah					29.279.095,00					7.590.690.175,00	
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	29.279.095,00	Kota Padang	Dana Bagi Hasil (DBH)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Laporan	7.590.690.175,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah					129.048.391,00					143.045.769,00	
		Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	129.048.391,00	Kota Padang	Dana Bagi Hasil (DBH)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	2 Laporan	143.045.769,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah					22.758.140,00					30.062.505,00	
		Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	22.758.140,00	Kota Padang	Dana Bagi Hasil (DBH)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Laporan	30.062.505,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah					7.547.395.771,00					7.872.568.814,00	
		Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	7.547.395.771,00	Kota Padang	Dana Bagi Hasil (DBH)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Dokumen	7.872.568.814,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah					107.503.535,00					286.251.899,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	107.503.535,00	Kota Padang	Dana Bagi Hasil (DBH)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Laporan	286.251.899,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota					26.367.693,00					19.506.307,00	
		Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	636 Orang	636 Orang	636 Orang	26.367.693,00	Kota Padang	Dana Bagi Hasil (DBH)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	636 Orang	19.506.307,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		BADAN PENDAPATAN DAERAH					**83.296.470.758,00**					**92.592.431.576,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**					**83.296.470.758,00**					**92.592.431.576,00**	
	5.02	**KEUANGAN**					**83.296.470.758,00**					**92.592.431.576,00**	
162.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**70.882.243.758,00**					**88.049.270.456,00**	
		Meningkatnya efektivitas dan efisien pelaksanaan urusan pemerintahan daerah					***70.882.243.758,00***					***88.049.270.456,00***	
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					62.360.494.860,00					79.401.023.554,00	
		-					62.360.494.860,00					79.401.023.554,00	
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					62.039.855.116,00					79.064.351.554,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	395 Orang/bulan	395 Orang/bulan	395 Orang/bulan	62.039.855.116,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	395 Orang/bulan	79.064.351.554,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					320.639.744,00					336.672.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	320.639.744,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Dokumen	336.672.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					705.355.300,00					622.018.800,00	
		-					705.355.300,00					622.018.800,00	
	5.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					705.355.300,00					622.018.800,00	
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	705.355.300,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Dokumen	622.018.800,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah					18.575.300,00					19.504.000,00	
		-					18.575.300,00					19.504.000,00	
	5.02.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah					18.575.300,00					19.504.000,00	
		Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	319 Dokumen	319 Dokumen	319 Dokumen	18.575.300,00	Kota Padang	Dana Bagi Hasil (DBH)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	319 Dokumen	19.504.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					2.790.495.198,00					2.063.656.600,00	
		-					2.790.495.198,00					2.063.656.600,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor					33.641.700,00					29.812.600,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	33.641.700,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	2 Paket	29.812.600,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					803.293.100,00					991.327.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	3 Paket	5 Paket	803.293.100,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	5 Paket	991.327.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					185.700.800,00					163.310.900,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	5 Paket	185.700.800,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	5 Paket	163.310.900,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					1.142.910.698,00					266.979.300,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1.142.910.698,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Paket	266.979.300,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					266.985.400,00					222.655.500,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	266.985.400,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	2 Paket	222.655.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					14.500.000,00					29.137.500,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	14.500.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Dokumen	29.137.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu					98.723.500,00					103.663.300,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	98.723.500,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Laporan	103.663.300,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					174.945.000,00					183.498.400,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	174.945.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Laporan	183.498.400,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					69.795.000,00					73.272.100,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	69.795.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Dokumen	73.272.100,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					1.657.195.300,00					244.612.200,00	
		-					1.657.195.300,00					244.612.200,00	
	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					153.324.300,00					244.612.200,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	2 Unit	153.324.300,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	2 Unit	244.612.200,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					1.503.871.000,00					0,00	
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	1 Unit	1.503.871.000,00	Kota Padang	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	5 Unit	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					768.490.000,00					4.091.992.500,00	
		-					768.490.000,00					4.091.992.500,00	
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					12.600.000,00					13.261.500,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12.600.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Laporan	13.261.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					678.400.000,00					3.997.650.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	678.400.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Laporan	3.997.650.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					77.490.000,00					81.081.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	77.490.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Laporan	81.081.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.581.637.800,00					1.606.462.802,00	
		-					2.581.637.800,00					1.606.462.802,00	
	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					36.000.000,00					25.200.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	36.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Unit	25.200.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					1.185.600.000,00					1.360.852.500,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	68 Unit	68 Unit	68 Unit	1.185.600.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	68 Unit	1.360.852.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel					8.000.000,00					8.400.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit	5 Unit	8.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	5 Unit	8.400.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					1.261.271.900,00					116.507.602,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	6 Unit	6 Unit	1.261.271.900,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	6 Unit	116.507.602,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					90.765.900,00					95.502.700,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	145 Unit	145 Unit	145 Unit	90.765.900,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	145 Unit	95.502.700,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
163.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**					**12.414.227.000,00**					**4.543.161.120,00**	
		Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan					***12.414.227.000,00***					***4.543.161.120,00***	
		-					12.414.227.000,00					4.543.161.120,00	
	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah					20.187.850,00					21.197.200,00	
		Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	20.187.850,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	12 Dokumen	21.197.200,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah					213.420.000,00					513.420.050,00	
		Terlaksanannya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	213.420.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	10 Dokumen	513.420.050,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah					72.321.250,00					41.917.300,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	17 Laporan	17 Laporan	17 Laporan	72.321.250,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	17 Laporan	41.917.300,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital					***12.414.227.000,00***					***4.543.161.120,00***	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					12.414.227.000,00					4.543.161.120,00	
		-					12.414.227.000,00					4.543.161.120,00	
	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah					3.507.632.700,00					543.843.300,00	
		Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3.507.632.700,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	3 Laporan	543.843.300,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan					***12.414.227.000,00***					***4.543.161.120,00***	
		-					12.414.227.000,00					4.543.161.120,00	
	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah					315.375.000,00					331.143.800,00	
		Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	315.375.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	2 Dokumen	331.143.800,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah					23.228.300,00					27.666.400,00	
		Tersedianya Hasil Analis Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	23.228.300,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	5 Dokumen	27.666.400,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah					93.507.700,00					689.330.600,00	
		Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	100 Laporan	100 Laporan	100 Laporan	93.507.700,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	100 Laporan	689.330.600,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah					306.633.600,00					733.657.200,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	3 Unit	3 Unit	3 Unit	306.633.600,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	3 Unit	733.657.200,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah					5.232.111.500,00					19.021.800,00	
		Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	5.232.111.500,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	4 Laporan	19.021.800,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					416.947.900,00					477.652.700,00	
		Terpenuhinya Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	14674 Obyek Pajak	14674 Obyek Pajak	14674 Obyek Pajak	416.947.900,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	14674 Obyek Pajak	477.652.700,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah					93.782.300,00					110.947.300,00	
		Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	224948 Dokumen	224948 Dokumen	224948 Dokumen	93.782.300,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	224948 Dokumen	110.947.300,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah					1.844.390.600,00					744.940.770,00	
		Tersedianya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	9 Layanan	9 Layanan	9 Layanan	1.844.390.600,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	9 Layanan	744.940.770,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah					254.600.700,00					267.330.700,00	
		Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	254.600.700,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	12 Dokumen	267.330.700,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah					20.087.600,00					21.092.000,00	
		Terlaksananya Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	300 Dokumen	300 Dokumen	300 Dokumen	20.087.600,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	300 Dokumen	21.092.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					**12.389.026.723,00**					**20.284.000.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**					**12.389.026.723,00**					**20.284.000.000,00**	
	5.03	**KEPEGAWAIAN**					**11.003.926.873,00**					**15.769.000.000,00**	
164.	**5.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**9.598.728.573,00**					**11.884.000.000,00**	
		Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah					***9.587.728.573,00***					***11.704.000.000,00***	
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					23.500.000,00					75.000.000,00	
		-					23.500.000,00					75.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2.500.000,00					10.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	2.500.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	2 Dokumen	10.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					2.500.000,00					10.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Dokumen	10.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					3.000.000,00					10.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Dokumen	10.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					2.500.000,00					10.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Dokumen	10.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					3.000.000,00					10.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Dokumen	10.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					7.000.000,00					15.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	7.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	14 Laporan	15.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					3.000.000,00					10.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	3.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	4 Laporan	10.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					8.676.353.473,00					10.450.351.600,00	
		-					8.676.353.473,00					10.450.351.600,00	
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					8.488.505.473,00					10.229.671.600,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	66 Orang/bulan	66 Orang/bulan	66 Orang/bulan	8.488.505.473,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	66 Orang/bulan	10.229.671.600,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	5.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					187.848.000,00					220.680.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	187.848.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Dokumen	220.680.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					23.100.000,00					100.000.000,00	
		-					23.100.000,00					100.000.000,00	
	5.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					0,00					0,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	66 Paket	0 Paket	66 Paket	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	0 Paket	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					23.100.000,00					100.000.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	160 Orang	160 Orang	160 Orang	23.100.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	160 Orang	100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					556.774.500,00					911.108.000,00	
		-					556.774.500,00					911.108.000,00	
	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor					9.818.800,00					12.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	9.818.800,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	2 Paket	12.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					12.425.200,00					200.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	1 Paket	3 Paket	12.425.200,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	3 Paket	200.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					0,00					100.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	0 Paket	2 Paket	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	2 Paket	100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					24.026.300,00					30.108.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	2 Paket	4 Paket	24.026.300,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	4 Paket	30.108.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					24.194.500,00					30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	24.194.500,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	4 Paket	30.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					6.980.000,00					14.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	13 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	6.980.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	13 Dokumen	14.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu					7.450.000,00					15.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	7.450.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Laporan	15.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					468.949.500,00					505.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90 Laporan	50 Laporan	60 Laporan	468.949.500,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	70 Laporan	505.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					2.930.200,00					5.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10000 Dokumen	5000 Dokumen	10000 Dokumen	2.930.200,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	10000 Dokumen	5.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					0,00					50.000.000,00	
		-					0,00					50.000.000,00	
	5.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					0,00					0,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0 Unit	1 Unit	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	2 Unit	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					0,00					50.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8 Unit	0 Unit	0 Unit	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	3 Unit	50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					10.530.000,00					9.000.000,00	
		-					10.530.000,00					9.000.000,00	
	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					2.010.000,00					3.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	2.010.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Laporan	3.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					8.520.000,00					6.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	8.520.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Laporan	6.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					308.470.600,00					288.540.400,00	
		-					308.470.600,00					288.540.400,00	
	5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					36.000.000,00					23.990.400,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	36.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Unit	23.990.400,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					199.350.000,00					169.550.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	11 Unit	11 Unit	199.350.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	11 Unit	169.550.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					33.370.000,00					80.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	200 Unit	180 Unit	185 Unit	33.370.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	190 Unit	80.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					39.750.600,00					15.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	39.750.600,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Unit	15.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
165.	**5.03.02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**					**1.405.198.300,00**					**3.885.000.000,00**	
		Meningkanya kualitas penilaian kinerja ASN					***22.000.000,00***					***370.000.000,00***	
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur					46.000.000,00					370.000.000,00	
		-					46.000.000,00					370.000.000,00	
	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur					7.000.000,00					80.000.000,00	
		Terlaksananya Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	7.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Dokumen	80.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai					7.000.000,00					20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Terlaksananya Pemberian Penghargaan bagi ASN	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	350 Orang	300 Orang	350 Orang	7.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	350 Orang	20.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN					10.000.000,00					100.000.000,00	
		Meningkatnya Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	15 Orang	25 Orang	15 Orang	10.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	15 Orang	100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN					10.000.000,00					130.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	10.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	4 Laporan	130.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai					7.000.000,00					30.000.000,00	
		Terlaksananya Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	7.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	20 Dokumen	30.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0010	Evaluasi Disiplin ASN					5.000.000,00					10.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	5.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	4 Laporan	10.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian					***687.100.000,00***					***1.350.000.000,00***	
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN					701.100.000,00					1.380.000.000,00	
		-					701.100.000,00					1.380.000.000,00	
	5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN					7.000.000,00					15.000.000,00	
		Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	7.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Dokumen	15.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN					50.000.000,00					100.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Laporan	100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0007	Evaluasi Pemberhentian ASN					23.100.000,00					20.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	23.100.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Dokumen	20.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN					607.000.000,00					1.215.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Terfasilitasinya Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	10 Lembaga	10 Lembaga	10 Lembaga	607.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	10 Lembaga	1.215.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian					7.000.000,00					15.000.000,00	
		Terkelolanya Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	7.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	2 Dokumen	15.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian					7.000.000,00					15.000.000,00	
		Terkelolanya Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	7.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Dokumen	15.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN					***612.000.000,00***					***1.825.000.000,00***	
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN					612.000.000,00					1.825.000.000,00	
		-					612.000.000,00					1.825.000.000,00	
	5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN					7.000.000,00					15.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	250 Orang	100 Orang	220 Orang	7.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	240 Orang	15.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center					500.000.000,00					1.000.000.000,00	
		Terkelolanya Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	3 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	500.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	4 Dokumen	1.000.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN					100.000.000,00					800.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	210 Orang	150 Orang	170 Orang	100.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	190 Orang	800.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN					5.000.000,00					10.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	65 Orang	0 Orang	50 Orang	5.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	50 Orang	10.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN					***46.098.300,00***					***310.000.000,00***	
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN					46.098.300,00					310.000.000,00	
		-					46.098.300,00					310.000.000,00	
	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN					8.000.000,00					15.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Terlaksananya Mutasi ASN yang Meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	8.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Dokumen	15.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN					9.998.300,00					20.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	9.998.300,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	2 Dokumen	20.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN					28.100.000,00					275.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pengembangan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	28.100.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Dokumen	275.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**					**1.385.099.850,00**					**4.515.000.000,00**	
166.	**5.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**					**1.385.099.850,00**					**4.515.000.000,00**	
		Persentase pegawai yang pemahamannya meningkat setelah mengikuti diklat/pelatihan/e-learning					***1.385.099.850,00***					***4.515.000.000,00***	
	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis					515.100.000,00					1.715.000.000,00	
		-					515.100.000,00					1.715.000.000,00	
	5.04.02.2.01.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum					7.000.000,00					15.000.000,00	
		Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	7.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Dokumen	15.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum					508.100.000,00					1.700.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	950 Orang	564 Orang	600 Orang	508.100.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	800 Orang	1.700.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional					869.999.850,00					2.800.000.000,00	
		-					869.999.850,00					2.800.000.000,00	
	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan					869.999.850,00					2.800.000.000,00	
		Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	3 Laporan	3 Laporan	2 Laporan	869.999.850,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	2 Laporan	2.800.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		INSPEKTORAT					**17.674.631.445,00**					**31.214.714.217,00**	
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**					**17.624.831.445,00**					**31.014.714.217,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**					**17.624.831.445,00**					**31.014.714.217,00**	
167.	**6.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**17.189.725.545,00**					**27.164.714.217,00**	
		Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah					***17.129.725.545,00***					***27.034.306.885,00***	
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					17.500.000,00					40.277.385,00	
		-					17.500.000,00					40.277.385,00	
	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2.500.000,00					5.292.988,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2.500.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	3 Dokumen	5.292.988,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					2.500.000,00					5.446.609,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Dokumen	5.446.609,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					3.200.000,00					5.514.792,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.200.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Dokumen	5.514.792,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	6.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					1.800.000,00					6.427.756,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.800.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Dokumen	6.427.756,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					1.800.000,00					6.462.544,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.800.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Dokumen	6.462.544,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					2.500.000,00					5.333.341,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2.500.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	2 Laporan	5.333.341,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					3.200.000,00					5.799.355,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	1 Laporan	3.200.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	4 Laporan	5.799.355,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					16.713.979.545,00					17.291.699.770,00	
		-					16.713.979.545,00					17.291.699.770,00	
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					16.615.297.545,00					17.000.000.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	84 Orang/bulan	86 Orang/bulan	87 Orang/bulan	16.615.297.545,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	84 Orang/bulan	17.000.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					95.920.000,00					283.373.730,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	95.920.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Dokumen	283.373.730,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					2.762.000,00					8.326.040,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2.762.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Laporan	8.326.040,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					50.000.000,00					2.301.500.000,00	
		-					50.000.000,00					2.301.500.000,00	
	6.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					0,00					1.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	77 Dokumen	79 Dokumen	44 Dokumen	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	77 Dokumen	1.500.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					50.000.000,00					2.000.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	77 Orang	79 Orang	67 Orang	50.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	77 Orang	2.000.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					0,00					300.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	84 Orang	86 Orang	60 Orang	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	84 Orang	300.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					133.154.800,00					1.220.199.014,00	
		-					133.154.800,00					1.220.199.014,00	
	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor					5.983.000,00					11.941.156,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	14 Paket	12 Paket	12 Paket	5.983.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Paket	11.941.156,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					0,00					126.500.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	5 Paket	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	2 Paket	126.500.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					0,00					31.050.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	5 Paket	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Paket	31.050.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					16.569.400,00					53.143.194,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	14 Paket	12 Paket	12 Paket	16.569.400,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	13 Paket	53.143.194,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					7.510.800,00					3.907.332,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	7.510.800,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Paket	3.907.332,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					1.520.000,00					3.907.332,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	7 Dokumen	3 Dokumen	144 Dokumen	1.520.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	8 Dokumen	3.907.332,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					100.254.000,00					800.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	86 Laporan	60 Laporan	67 Laporan	100.254.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	72 Laporan	800.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					1.317.600,00					189.750.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.317.600,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Dokumen	189.750.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					50.000.000,00					4.950.560.050,00	
		-					50.000.000,00					4.950.560.050,00	
	6.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					0,00					2.012.586.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	4 Unit	0 Unit	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	2 Unit	2.012.586.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					0,00					126.500.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	30 Unit	50 Unit	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	10 Unit	126.500.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					0,00					178.649.050,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	0 Unit	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	10 Unit	178.649.050,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					50.000.000,00					2.569.575.000,00	
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Unit	2.569.575.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					0,00					63.250.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Unit	63.250.000,00	INSPEKTORAT
		-					6.762.000,00					251.223.498,00	
	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1.512.000,00					4.164.064,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.512.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Laporan	4.164.064,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					5.250.000,00					15.028.200,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	5.250.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Laporan	15.028.200,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					218.329.200,00					1.109.254.500,00	
		-					218.329.200,00					1.109.254.500,00	
	6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					24.000.000,00					37.570.500,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	24.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Unit	37.570.500,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					170.170.000,00					663.734.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	20 Unit	19 Unit	170.170.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	24 Unit	663.734.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel					0,00					20.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	55 Unit	33 Unit	50 Unit	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	37 Unit	20.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					12.740.000,00					150.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	62 Unit	49 Unit	50 Unit	12.740.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	60 Unit	150.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud					0,00					0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	1 Unit	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Unit	0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					0,00					37.950.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Unit	37.950.000,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					6.762.000,00					251.223.498,00	
		-					6.762.000,00					251.223.498,00	
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					0,00					232.031.234,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	-	0 Laporan	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	-	232.031.234,00	INSPEKTORAT
		-					218.329.200,00					1.109.254.500,00	
	6.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					11.419.200,00					200.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	3 Unit	11.419.200,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	-	200.000.000,00	INSPEKTORAT
168.	**6.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**					**365.318.600,00**					**3.000.000.000,00**	
		Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan					***365.318.600,00***					***1.200.000.000,00***	
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal					337.375.400,00					2.300.000.000,00	
		-					337.375.400,00					2.300.000.000,00	
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah					58.595.000,00					500.000.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	28 Laporan	20 Laporan	68 Laporan	58.595.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	24 Laporan	500.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah					107.878.400,00					500.000.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	43 Laporan	27 Laporan	16 Laporan	107.878.400,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	35 Laporan	500.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja					11.497.600,00					400.000.000,00	
		Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	8 Laporan	6 Laporan	11 Laporan	11.497.600,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	8 Laporan	400.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan					29.938.500,00					400.000.000,00	
		Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	26 Laporan	18 Laporan	7 Laporan	29.938.500,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	22 Laporan	400.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP					129.465.900,00					500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	36 Dokumen	24 Dokumen	23 Dokumen	129.465.900,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	30 Dokumen	500.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu					27.943.200,00					700.000.000,00	
		-					27.943.200,00					700.000.000,00	
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian KerugianNegara/Daerah					4.560.200,00					300.000.000,00	
		Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	10 Laporan	4 Laporan	2 Laporan	4.560.200,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	6 Laporan	300.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu					23.383.000,00					400.000.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	13 Laporan	17 Laporan	17 Laporan	23.383.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	13 Laporan	400.000.000,00	INSPEKTORAT
169.	**6.01.03**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**					**69.787.300,00**					**850.000.000,00**	
		Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi					***69.787.300,00***					***250.000.000,00***	
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan					2.304.000,00					50.000.000,00	
		-					2.304.000,00					50.000.000,00	
	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan					2.304.000,00					50.000.000,00	
		Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2.304.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	2 Rekomendasi	50.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi					67.483.300,00					800.000.000,00	
		-					67.483.300,00					800.000.000,00	
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah					10.487.000,00					200.000.000,00	
		Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	35 perangkat daerah	15 perangkat daerah	12 perangkat daerah	10.487.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	25 perangkat daerah	200.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi					4.820.000,00					200.000.000,00	
		Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	20 perangkat daerah	20 perangkat daerah	20 perangkat daerah	4.820.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	20 perangkat daerah	200.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi					42.089.800,00					200.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	7 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	42.089.800,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	6 Kegiatan	200.000.000,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas					10.086.500,00					200.000.000,00	
		Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	3 perangkat daerah	3 perangkat daerah	3 perangkat daerah	10.086.500,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	3 perangkat daerah	200.000.000,00	INSPEKTORAT
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**					**49.800.000,00**					**200.000.000,00**	
170.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**49.800.000,00**					**200.000.000,00**	
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					49.800.000,00					200.000.000,00	
		-					49.800.000,00					200.000.000,00	
	X.XX.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu					49.800.000,00					200.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	49.800.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Laporan	200.000.000,00	INSPEKTORAT
		KECAMATAN PADANG BARAT					**18.343.960.113,00**					**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**18.343.960.113,00**					**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**					**18.343.960.113,00**					**0,00**	
171.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**14.089.430.413,00**					**0,00**	
		Meningkatnya efektivitas dan efesiensi pelaksanaan urusan pemerintah daerah					***14.089.430.413,00***					***0,00***	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					20.555.700,00					0,00	
		-					20.555.700,00					0,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2.809.300,00					0,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	12 Dokumen	2.809.300,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	3 Dokumen	0,00	KECAMATAN PADANG BARAT
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					2.860.300,00					0,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2.860.300,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Dokumen	0,00	KECAMATAN PADANG BARAT
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					2.963.800,00					0,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2.963.800,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Dokumen	0,00	KECAMATAN PADANG BARAT
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					2.766.100,00					0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2.766.100,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Dokumen	0,00	KECAMATAN PADANG BARAT
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					2.506.100,00					0,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2.506.100,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Dokumen	0,00	KECAMATAN PADANG BARAT
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					3.173.100,00					0,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 Laporan	14 Laporan	12 Laporan	3.173.100,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	14 Laporan	0,00	KECAMATAN PADANG BARAT
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					3.477.000,00					0,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	6 Laporan	12 Laporan	3.477.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	6 Laporan	0,00	KECAMATAN PADANG BARAT
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					12.485.489.746,00					0,00	
		-					12.485.489.746,00					0,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					12.261.209.746,00					0,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/bulan	65 Orang/bulan	85 Orang/bulan	12.261.209.746,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	65 Orang/bulan	0,00	KECAMATAN PADANG BARAT
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					224.280.000,00					0,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	224.280.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Dokumen	0,00	KECAMATAN PADANG BARAT
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					216.663.200,00					0,00	
		-					216.663.200,00					0,00	
	7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					216.663.200,00					0,00	
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	216.663.200,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Dokumen	0,00	KECAMATAN PADANG BARAT
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					453.515.616,00					0,00	
		-					453.515.616,00					0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor					5.531.600,00					0,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	11 Paket	5.531.600,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	4 Paket	0,00	KECAMATAN PADANG BARAT
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					223.698.816,00					0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	4 Paket	223.698.816,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	8 Paket	0,00	KECAMATAN PADANG BARAT
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					9.109.000,00					0,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	2 Paket	5 Paket	9.109.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	4 Paket	0,00	KECAMATAN PADANG BARAT
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					76.829.400,00					0,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11 Paket	11 Paket	4 Paket	76.829.400,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	11 Paket	0,00	KECAMATAN PADANG BARAT
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					24.035.800,00					0,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	24.035.800,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	4 Paket	0,00	KECAMATAN PADANG BARAT
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					0,00					0,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	4 Dokumen	12 Dokumen	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	4 Dokumen	0,00	KECAMATAN PADANG BARAT
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu					26.726.000,00					0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	26.726.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Laporan	0,00	KECAMATAN PADANG BARAT
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					87.585.000,00					0,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	87.585.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Laporan	0,00	KECAMATAN PADANG BARAT
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					0,00					0,00	
		-					0,00					0,00	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					0,00					0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	3 Unit	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	5 Unit	0,00	KECAMATAN PADANG BARAT
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					0,00					0,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	6 Unit	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	5 Unit	0,00	KECAMATAN PADANG BARAT
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					243.045.000,00					0,00	
		-					243.045.000,00					0,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					3.465.000,00					0,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	3.465.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Laporan	0,00	KECAMATAN PADANG BARAT
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					239.580.000,00					0,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	239.580.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Laporan	0,00	KECAMATAN PADANG BARAT
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					670.161.151,00					0,00	
		-					670.161.151,00					0,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					271.280.000,00					0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 Unit	28 Unit	28 Unit	271.280.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	28 Unit	0,00	KECAMATAN PADANG BARAT
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel					0,00					0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 Unit	50 Unit	5 Unit	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	50 Unit	0,00	KECAMATAN PADANG BARAT
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					14.200.000,00					0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45 Unit	39 Unit	20 Unit	14.200.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	40 Unit	0,00	KECAMATAN PADANG BARAT
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					369.181.251,00					0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	14 Unit	14 Unit	11 Unit	369.181.251,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	14 Unit	0,00	KECAMATAN PADANG BARAT
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					15.499.900,00					0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 Unit	25 Unit	25 Unit	15.499.900,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	25 Unit	0,00	KECAMATAN PADANG BARAT
172.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**					**162.867.200,00**					**0,00**	
		meningkatnya pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai SOP					***162.867.200,00***					***0,00***	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan					50.246.600,00					0,00	
		-					50.246.600,00					0,00	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					25.918.000,00					0,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan	4 Laporan	12 Laporan	25.918.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	4 Laporan	0,00	KECAMATAN PADANG BARAT
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					24.328.600,00					0,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	4 Dokumen	12 Dokumen	24.328.600,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	4 Dokumen	0,00	KECAMATAN PADANG BARAT
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan					53.750.900,00					0,00	
		-					53.750.900,00					0,00	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					53.750.900,00					0,00	
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	11 Laporan	11 Laporan	12 Laporan	53.750.900,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	11 Laporan	0,00	KECAMATAN PADANG BARAT
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					58.869.700,00					0,00	
		-					58.869.700,00					0,00	
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha					23.213.700,00					0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	20 Dokumen	20 Dokumen	12 Dokumen	23.213.700,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	20 Dokumen	0,00	KECAMATAN PADANG BARAT
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					35.656.000,00					0,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	35.656.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Laporan	0,00	KECAMATAN PADANG BARAT
173.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**2.670.647.800,00**					**0,00**	
		meningktanya partisipasi swadaya kelurahan					***670.647.800,00***					***0,00***	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					2.670.647.800,00					0,00	
		-					2.670.647.800,00					0,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					124.999.900,00					0,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	11 Lembaga Kemasyarakatan	11 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	124.999.900,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	11 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	KECAMATAN PADANG BARAT
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					234.206.600,00					0,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	45 Unit	45 Unit	25 Unit	234.206.600,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	45 Unit	0,00	KECAMATAN PADANG BARAT
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					286.441.500,00					0,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	286.441.500,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	5 Pokmas / Ormas	0,00	KECAMATAN PADANG BARAT
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan					24.999.800,00					0,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	24.999.800,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Laporan	0,00	KECAMATAN PADANG BARAT
174.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**					**658.624.500,00**					**0,00**	
		persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai ketentuan					***658.624.500,00***					***0,00***	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					658.624.500,00					0,00	
		-					658.624.500,00					0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia					658.624.500,00					0,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4 Laporan	4 Laporan	12 Laporan	658.624.500,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	4 Laporan	0,00	KECAMATAN PADANG BARAT
175.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**					**930.267.700,00**					**0,00**	
		meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai ketentuan					***930.267.700,00***					***0,00***	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					930.267.700,00					0,00	
		-					930.267.700,00					0,00	
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal					899.394.000,00					0,00	
		Terlaksananya Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	4 Dokumen	4 Dokumen	0 Dokumen	899.394.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	4 Dokumen	0,00	KECAMATAN PADANG BARAT
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					30.873.700,00					0,00	
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	4 Dokumen	12 Dokumen	30.873.700,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	4 Dokumen	0,00	KECAMATAN PADANG BARAT
176.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**					**1.832.122.500,00**					**0,00**	
		meningkatnya pembinaan dan pengawasan					***1.832.122.500,00***					***0,00***	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					1.832.122.500,00					0,00	
		-					1.832.122.500,00					0,00	
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan					1.832.122.500,00					0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	4 Dokumen	4 Dokumen	12 Dokumen	1.832.122.500,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	4 Dokumen	0,00	KECAMATAN PADANG BARAT
		KELURAHAN BELAKANG TANGSI					**173.569.448,00**					**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**173.569.448,00**					**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**					**173.569.448,00**					**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
177.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**2.670.647.800,00**					**0,00**	
		meningktanya partisipasi swadaya kelurahan					***173.569.448,00***					***0,00***	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					2.670.647.800,00					0,00	
		-					2.670.647.800,00					0,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					136.559.748,00					0,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	45 Unit	45 Unit	5 Unit	136.559.748,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	45 Unit	0,00	KELURAHAN BELAKANG TANGSI
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					37.009.700,00					0,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	37.009.700,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	5 Pokmas / Ormas	0,00	KELURAHAN BELAKANG TANGSI
		KELURAHAN BEROK NIPAH					**195.169.448,00**					**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**195.169.448,00**					**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**					**195.169.448,00**					**0,00**	
178.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**2.670.647.800,00**					**0,00**	
		meningktanya partisipasi swadaya kelurahan					***195.169.448,00***					***0,00***	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					2.670.647.800,00					0,00	
		-					2.670.647.800,00					0,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					136.559.748,00					0,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	45 Unit	45 Unit	5 Unit	136.559.748,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	45 Unit	0,00	KELURAHAN BEROK NIPAH
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					58.609.700,00					0,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	58.609.700,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	5 Pokmas / Ormas	0,00	KELURAHAN BEROK NIPAH
		KELURAHAN FLAMBOYAN BARU					**195.169.448,00**					**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**195.169.448,00**					**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**					**195.169.448,00**					**0,00**	
179.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**2.670.647.800,00**					**0,00**	
		meningktanya partisipasi swadaya kelurahan					***195.169.448,00***					***0,00***	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					2.670.647.800,00					0,00	
		-					2.670.647.800,00					0,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					136.559.748,00					0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	45 Unit	45 Unit	4 Unit	136.559.748,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	45 Unit	0,00	KELURAHAN FLAMBOYAN BARU
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					58.609.700,00					0,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	58.609.700,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	5 Pokmas / Ormas	0,00	KELURAHAN FLAMBOYAN BARU
		KELURAHAN KAMPUNG JAO					**209.637.380,00**					**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**209.637.380,00**					**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**					**209.637.380,00**					**0,00**	
180.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**2.670.647.800,00**					**0,00**	
		meningktanya partisipasi swadaya kelurahan					***209.637.380,00***					***0,00***	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					2.670.647.800,00					0,00	
		-					2.670.647.800,00					0,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					136.627.680,00					0,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	45 Unit	45 Unit	5 Unit	136.627.680,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	45 Unit	0,00	KELURAHAN KAMPUNG JAO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					73.009.700,00					0,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	73.009.700,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	5 Pokmas / Ormas	0,00	KELURAHAN KAMPUNG JAO
		KELURAHAN KAMPUNG PONDOK					**180.837.380,00**					**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**180.837.380,00**					**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**					**180.837.380,00**					**0,00**	
181.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**2.670.647.800,00**					**0,00**	
		meningktanya partisipasi swadaya kelurahan					***180.837.380,00***					***0,00***	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					2.670.647.800,00					0,00	
		-					2.670.647.800,00					0,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					136.627.680,00					0,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	45 Unit	45 Unit	5 Unit	136.627.680,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	45 Unit	0,00	KELURAHAN KAMPUNG PONDOK
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					44.209.700,00					0,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	44.209.700,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	5 Pokmas / Ormas	0,00	KELURAHAN KAMPUNG PONDOK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		KELURAHAN OLO					**243.959.142,00**					**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**243.959.142,00**					**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**					**243.959.142,00**					**0,00**	
182.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**2.670.647.800,00**					**0,00**	
		meningktanya partisipasi swadaya kelurahan					***243.959.142,00***					***0,00***	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					2.670.647.800,00					0,00	
		-					2.670.647.800,00					0,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					170.949.442,00					0,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	45 Unit	45 Unit	5 Unit	170.949.442,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	45 Unit	0,00	KELURAHAN OLO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					73.009.700,00					0,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	73.009.700,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	5 Pokmas / Ormas	0,00	KELURAHAN OLO
		KELURAHAN PADANG PASIR					**221.060.580,00**					**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**221.060.580,00**					**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**					**221.060.580,00**					**0,00**	
183.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**2.670.647.800,00**					**0,00**	
		meningktanya partisipasi swadaya kelurahan					***221.060.580,00***					***0,00***	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					2.670.647.800,00					0,00	
		-					2.670.647.800,00					0,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					186.450.880,00					0,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	45 Unit	45 Unit	4 Unit	186.450.880,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	45 Unit	0,00	KELURAHAN PADANG PASIR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					34.609.700,00					0,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	34.609.700,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	5 Pokmas / Ormas	0,00	KELURAHAN PADANG PASIR
		KELURAHAN PURUS					**210.979.280,00**					**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**210.979.280,00**					**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**					**210.979.280,00**					**0,00**	
184.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**2.670.647.800,00**					**0,00**	
		meningktanya partisipasi swadaya kelurahan					***210.979.280,00***					***0,00***	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					2.670.647.800,00					0,00	
		-					2.670.647.800,00					0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					136.627.680,00					0,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	45 Unit	45 Unit	5 Unit	136.627.680,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	45 Unit	0,00	KELURAHAN PURUS
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					74.351.600,00					0,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	74.351.600,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	5 Pokmas / Ormas	0,00	KELURAHAN PURUS
		KELURAHAN RIMBO KALUANG					**180.837.380,00**					**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**180.837.380,00**					**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**					**180.837.380,00**					**0,00**	
185.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**2.670.647.800,00**					**0,00**	
		meningktanya partisipasi swadaya kelurahan					***180.837.380,00***					***0,00***	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					2.670.647.800,00					0,00	
		-					2.670.647.800,00					0,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					136.627.680,00					0,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	45 Unit	45 Unit	5 Unit	136.627.680,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	45 Unit	0,00	KELURAHAN RIMBO KALUANG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					44.209.700,00					0,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	44.209.700,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	5 Pokmas / Ormas	0,00	KELURAHAN RIMBO KALUANG
		KELURAHAN UJUNG GURUN					**188.780.514,00**					**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**188.780.514,00**					**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**					**188.780.514,00**					**0,00**	
186.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**2.670.647.800,00**					**0,00**	
		meningktanya partisipasi swadaya kelurahan					***188.780.514,00***					***0,00***	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					2.670.647.800,00					0,00	
		-					2.670.647.800,00					0,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					136.170.814,00					0,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	45 Unit	45 Unit	5 Unit	136.170.814,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	45 Unit	0,00	KELURAHAN UJUNG GURUN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					52.609.700,00					0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	52.609.700,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	5 Pokmas / Ormas	0,00	KELURAHAN UJUNG GURUN
		KECAMATAN PADANG TIMUR					**21.600.977.551,00**					**22.998.160.771,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**21.600.621.951,00**					**22.998.160.771,00**	
	7.01	**KECAMATAN**					**21.600.621.951,00**					**22.998.160.771,00**	
187.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**16.132.036.951,00**					**16.389.669.270,00**	
		Meningkatnya efektivitas dan efesiensi pelaksanaan urusan pemerintah daerah					***16.132.036.951,00***					***16.389.669.270,00***	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					18.258.500,00					28.962.900,00	
		-					18.258.500,00					28.962.900,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					5.987.200,00					7.860.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	5.987.200,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3 Dokumen	7.860.000,00	KECAMATAN PADANG TIMUR
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					4.783.600,00					7.614.800,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	4.783.600,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1 Dokumen	7.614.800,00	KECAMATAN PADANG TIMUR
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					4.201.000,00					7.516.900,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	4.201.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1 Dokumen	7.516.900,00	KECAMATAN PADANG TIMUR
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					3.286.700,00					5.971.200,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	1 Laporan	3.286.700,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4 Laporan	5.971.200,00	KECAMATAN PADANG TIMUR
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					14.350.234.415,00					13.596.562.155,00	
		-					14.350.234.415,00					13.596.562.155,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					14.110.286.315,00					13.373.926.355,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	84 Orang/bulan	84 Orang/bulan	92 Orang/bulan	14.110.286.315,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	84 Orang/bulan	13.373.926.355,00	KECAMATAN PADANG TIMUR
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					232.944.000,00					214.400.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14 Dokumen	14 Dokumen	1 Dokumen	232.944.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	14 Dokumen	214.400.000,00	KECAMATAN PADANG TIMUR
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					7.004.100,00					8.235.800,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	14 Laporan	4 Laporan	7.004.100,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	14 Laporan	8.235.800,00	KECAMATAN PADANG TIMUR
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					162.497.400,00					155.704.700,00	
		-					162.497.400,00					155.704.700,00	
	7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					162.497.400,00					155.704.700,00	
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	12 Dokumen	162.497.400,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1 Dokumen	155.704.700,00	KECAMATAN PADANG TIMUR
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					5.868.084,00					9.980.000,00	
		-					5.868.084,00					9.980.000,00	
	7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					5.868.084,00					9.980.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	79 Orang	79 Orang	92 Orang	5.868.084,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	79 Orang	9.980.000,00	KECAMATAN PADANG TIMUR
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					408.343.492,00					252.252.484,00	
		-					408.343.492,00					252.252.484,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor					17.007.900,00					13.246.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	8 Paket	17.007.900,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10 Paket	13.246.000,00	KECAMATAN PADANG TIMUR
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					211.553.500,00					38.240.400,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	4 Paket	211.553.500,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1 Paket	38.240.400,00	KECAMATAN PADANG TIMUR
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					0,00					0,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1 Paket	0,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Paket	0,00	KECAMATAN PADANG TIMUR
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					64.026.992,00					51.679.584,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	14 Paket	14 Paket	8 Paket	64.026.992,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	14 Paket	51.679.584,00	KECAMATAN PADANG TIMUR
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					4.062.500,00					13.989.500,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	8 Paket	4.062.500,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4 Paket	13.989.500,00	KECAMATAN PADANG TIMUR
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu					24.936.600,00					26.275.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	150 Laporan	150 Laporan	2 Laporan	24.936.600,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	150 Laporan	26.275.000,00	KECAMATAN PADANG TIMUR
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					86.756.000,00					108.822.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	15 Laporan	2 Laporan	86.756.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	15 Laporan	108.822.000,00	KECAMATAN PADANG TIMUR
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					30.436.200,00					137.500.000,00	
		-					30.436.200,00					137.500.000,00	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					0,00					27.500.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	0 Unit	2 Unit	0,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2 Unit	27.500.000,00	KECAMATAN PADANG TIMUR
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					30.436.200,00					110.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	16 Unit	0 Unit	1 Unit	30.436.200,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	16 Unit	110.000.000,00	KECAMATAN PADANG TIMUR
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					220.433.400,00					245.455.950,00	
		-					220.433.400,00					245.455.950,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					220.433.400,00					245.455.950,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	220.433.400,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	12 Laporan	245.455.950,00	KECAMATAN PADANG TIMUR
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					935.965.460,00					1.963.251.081,00	
		-					935.965.460,00					1.963.251.081,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					212.370.000,00					270.383.080,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	42 Unit	42 Unit	36 Unit	212.370.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	42 Unit	270.383.080,00	KECAMATAN PADANG TIMUR
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel					0,00					2.200.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	3 Unit	0 Unit	2 Unit	0,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1 Unit	2.200.000,00	KECAMATAN PADANG TIMUR
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					627.340.860,00					1.622.640.941,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	3 Unit	627.340.860,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1 Unit	1.622.640.941,00	KECAMATAN PADANG TIMUR
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					96.254.600,00					68.027.060,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	12 Unit	50 Unit	96.254.600,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	12 Unit	68.027.060,00	KECAMATAN PADANG TIMUR
188.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**					**325.637.400,00**					**380.705.079,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		meningkatnya pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai SOP					***325.637.400,00***					***380.705.079,00***	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan					38.014.600,00					42.764.077,00	
		-					38.014.600,00					42.764.077,00	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					23.330.000,00					20.393.917,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	23.330.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	12 Laporan	20.393.917,00	KECAMATAN PADANG TIMUR
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					14.684.600,00					22.370.160,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	14.684.600,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4 Dokumen	22.370.160,00	KECAMATAN PADANG TIMUR
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan					9.951.300,00					20.199.740,00	
		-					9.951.300,00					20.199.740,00	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					9.951.300,00					20.199.740,00	
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2000 Laporan	2000 Laporan	1 Laporan	9.951.300,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2000 Laporan	20.199.740,00	KECAMATAN PADANG TIMUR
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					277.671.500,00					317.741.262,00	
		-					277.671.500,00					317.741.262,00	
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha					11.383.300,00					17.741.262,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	48 Dokumen	48 Dokumen	1 Dokumen	11.383.300,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	48 Dokumen	17.741.262,00	KECAMATAN PADANG TIMUR
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					266.288.200,00					300.000.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	266.288.200,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1 Laporan	300.000.000,00	KECAMATAN PADANG TIMUR
189.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**2.339.537.000,00**					**2.917.508.549,00**	
		meningkatnya partisipasi swadaya masyarakat					***339.537.000,00***					***1.330.676.446,00***	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					2.339.537.000,00					2.917.508.549,00	
		-					2.339.537.000,00					2.917.508.549,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					58.792.200,00					184.859.946,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	13 Lembaga Kemasyarakatan	13 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	58.792.200,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	13 Lembaga Kemasyarakatan	184.859.946,00	KECAMATAN PADANG TIMUR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					15.554.400,00					1.050.000.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	5 Unit	15.554.400,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	12 Unit	1.050.000.000,00	KECAMATAN PADANG TIMUR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					251.900.000,00					30.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	251.900.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4 Pokmas / Ormas	30.000.000,00	KECAMATAN PADANG TIMUR
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan					13.290.400,00					65.816.500,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	12 Laporan	12 Laporan	2 Laporan	13.290.400,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	12 Laporan	65.816.500,00	KECAMATAN PADANG TIMUR
190.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**					**473.712.000,00**					**837.524.573,00**	
		Persentase urusan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai ketentuan					***473.712.000,00***					***837.524.573,00***	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					473.712.000,00					837.524.573,00	
		-					473.712.000,00					837.524.573,00	
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia					473.712.000,00					837.524.573,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	48 Laporan	48 Laporan	12 Laporan	473.712.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	48 Laporan	837.524.573,00	KECAMATAN PADANG TIMUR
191.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**					**2.182.664.400,00**					**1.778.354.522,00**	
		meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai ketentuan					***2.182.664.400,00***					***1.778.354.522,00***	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					2.182.664.400,00					1.778.354.522,00	
		-					2.182.664.400,00					1.778.354.522,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal					1.979.664.400,00					1.723.354.522,00	
		Terlaksananya Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	4 Dokumen	4 Dokumen	12 Dokumen	1.979.664.400,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4 Dokumen	1.723.354.522,00	KECAMATAN PADANG TIMUR
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					203.000.000,00					55.000.000,00	
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	24 Dokumen	24 Dokumen	24 Dokumen	203.000.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	24 Dokumen	55.000.000,00	KECAMATAN PADANG TIMUR
192.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**					**2.147.034.200,00**					**2.281.230.881,00**	
		meningkatnya pembinaan dan pengawasan					***2.147.034.200,00***					***2.281.230.881,00***	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					2.147.034.200,00					2.281.230.881,00	
		-					2.147.034.200,00					2.281.230.881,00	
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan					2.147.034.200,00					2.281.230.881,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	2.147.034.200,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4 Dokumen	2.281.230.881,00	KECAMATAN PADANG TIMUR
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**					**355.600,00**					**0,00**	
193.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**355.600,00**					**0,00**	
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					355.600,00					0,00	
		-					355.600,00					0,00	
	X.XX.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					355.600,00					0,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	1 Laporan	355.600,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	0,00	KECAMATAN PADANG TIMUR
		KELURAHAN ANDALAS					**225.410.380,00**					**225.410.380,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**225.410.380,00**					**225.410.380,00**	
	7.01	**KECAMATAN**					**225.410.380,00**					**225.410.380,00**	
194.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**2.339.537.000,00**					**2.917.508.549,00**	
		meningkatnya partisipasi swadaya masyarakat					***225.410.380,00***					***225.410.380,00***	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					2.339.537.000,00					2.917.508.549,00	
		-					2.339.537.000,00					2.917.508.549,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					136.880.380,00					136.880.380,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	3 Unit	136.880.380,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Padang Timur || Kelurahan Andalas || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	12 Unit	136.880.380,00	KELURAHAN ANDALAS
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					88.530.000,00					88.530.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	88.530.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Padang Timur || Kelurahan Andalas || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	4 Pokmas / Ormas	88.530.000,00	KELURAHAN ANDALAS
		KELURAHAN GANTING PARAK GADANG					**197.283.936,00**					**197.283.936,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**197.283.936,00**					**197.283.936,00**	
	7.01	**KECAMATAN**					**197.283.936,00**					**197.283.936,00**	
195.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**2.339.537.000,00**					**2.917.508.549,00**	
		meningkatnya partisipasi swadaya masyarakat					***197.283.936,00***					***197.283.936,00***	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					2.339.537.000,00					2.917.508.549,00	
		-					2.339.537.000,00					2.917.508.549,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					87.153.936,00					87.153.936,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	2 Unit	87.153.936,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Padang Timur || Kelurahan Ganting Parak Gadang || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	12 Unit	87.153.936,00	KELURAHAN GANTING PARAK GADANG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					110.130.000,00					110.130.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	110.130.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Padang Timur || Kelurahan Ganting Parak Gadang || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	4 Pokmas / Ormas	110.130.000,00	KELURAHAN GANTING PARAK GADANG
		KELURAHAN JATI					**233.999.316,00**					**111.176.931,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**233.999.316,00**					**111.176.931,00**	
	7.01	**KECAMATAN**					**233.999.316,00**					**111.176.931,00**	
196.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**2.339.537.000,00**					**2.917.508.549,00**	
		meningkatnya partisipasi swadaya masyarakat					***233.999.316,00***					***111.176.931,00***	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					2.339.537.000,00					2.917.508.549,00	
		-					2.339.537.000,00					2.917.508.549,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					136.469.316,00					13.646.931,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	3 Unit	136.469.316,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Padang Timur || Kelurahan Jati || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	12 Unit	13.646.931,00	KELURAHAN JATI
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					97.530.000,00					97.530.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	97.530.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Padang Timur || Kelurahan Jati || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	4 Pokmas / Ormas	97.530.000,00	KELURAHAN JATI
		KELURAHAN JATI BARU					**173.283.936,00**					**173.283.936,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**173.283.936,00**					**173.283.936,00**	
	7.01	**KECAMATAN**					**173.283.936,00**					**173.283.936,00**	
197.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**2.339.537.000,00**					**2.917.508.549,00**	
		meningkatnya partisipasi swadaya masyarakat					***173.283.936,00***					***173.283.936,00***	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					2.339.537.000,00					2.917.508.549,00	
		-					2.339.537.000,00					2.917.508.549,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					87.153.936,00					87.153.936,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	2 Unit	87.153.936,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Padang Timur || Kelurahan Jati Baru || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	12 Unit	87.153.936,00	KELURAHAN JATI BARU
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					86.130.000,00					86.130.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	86.130.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Padang Timur || Kelurahan Jati Baru || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	4 Pokmas / Ormas	86.130.000,00	KELURAHAN JATI BARU
		KELURAHAN KUBU MARAPALAM					**193.799.316,00**					**193.799.316,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**193.799.316,00**					**193.799.316,00**	
	7.01	**KECAMATAN**					**193.799.316,00**					**193.799.316,00**	
198.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**2.339.537.000,00**					**2.917.508.549,00**	
		meningkatnya partisipasi swadaya masyarakat					***193.799.316,00***					***193.799.316,00***	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					2.339.537.000,00					2.917.508.549,00	
		-					2.339.537.000,00					2.917.508.549,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					136.469.316,00					136.469.316,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	4 Unit	136.469.316,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Padang Timur || Kelurahan Kubu Marapalam || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	12 Unit	136.469.316,00	KELURAHAN KUBU MARAPALAM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					57.330.000,00					57.330.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	57.330.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Padang Timur || Kelurahan Kubu Marapalam || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	4 Pokmas / Ormas	57.330.000,00	KELURAHAN KUBU MARAPALAM
		KELURAHAN KUBU DALAM PARAK KARAKAH					**281.690.752,00**					**114.326.075,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**281.690.752,00**					**114.326.075,00**	
	7.01	**KECAMATAN**					**281.690.752,00**					**114.326.075,00**	
199.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**2.339.537.000,00**					**2.917.508.549,00**	
		meningkatnya partisipasi swadaya masyarakat					***281.690.752,00***					***114.326.075,00***	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					2.339.537.000,00					2.917.508.549,00	
		-					2.339.537.000,00					2.917.508.549,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					185.960.752,00					18.596.075,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	4 Unit	185.960.752,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Padang Timur || Kelurahan Kubu Dalam Parak Karakah || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	12 Unit	18.596.075,00	KELURAHAN KUBU DALAM PARAK KARAKAH
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					95.730.000,00					95.730.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	95.730.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Padang Timur || Kelurahan Kubu Dalam Parak Karakah || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	4 Pokmas / Ormas	95.730.000,00	KELURAHAN KUBU DALAM PARAK KARAKAH
		KELURAHAN PARAK GADANG TIMUR					**231.775.372,00**					**108.794.537,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**231.775.372,00**					**108.794.537,00**	
	7.01	**KECAMATAN**					**231.775.372,00**					**108.794.537,00**	
200.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**2.339.537.000,00**					**2.917.508.549,00**	
		meningkatnya partisipasi swadaya masyarakat					***231.775.372,00***					***108.794.537,00***	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					2.339.537.000,00					2.917.508.549,00	
		-					2.339.537.000,00					2.917.508.549,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					136.645.372,00					13.664.537,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	3 Unit	136.645.372,00	Kota Padang	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	12 Unit	13.664.537,00	KELURAHAN PARAK GADANG TIMUR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					95.130.000,00					95.130.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	95.130.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Padang Timur || Kelurahan Parak Gadang Timur || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	4 Pokmas / Ormas	95.130.000,00	KELURAHAN PARAK GADANG TIMUR
		KELURAHAN SAWAHAN					**147.483.936,00**					**147.483.936,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**147.483.936,00**					**147.483.936,00**	
	7.01	**KECAMATAN**					**147.483.936,00**					**147.483.936,00**	
201.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**2.339.537.000,00**					**2.917.508.549,00**	
		meningkatnya partisipasi swadaya masyarakat					***147.483.936,00***					***147.483.936,00***	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					2.339.537.000,00					2.917.508.549,00	
		-					2.339.537.000,00					2.917.508.549,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					87.153.936,00					87.153.936,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	3 Unit	87.153.936,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Padang Timur || Kelurahan Sawahan || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	12 Unit	87.153.936,00	KELURAHAN SAWAHAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					60.330.000,00					60.330.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	60.330.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Padang Timur || Kelurahan Sawahan || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	4 Pokmas / Ormas	60.330.000,00	KELURAHAN SAWAHAN
		KELURAHAN SAWAHAN TIMUR					**186.515.148,00**					**186.515.148,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**186.515.148,00**					**186.515.148,00**	
	7.01	**KECAMATAN**					**186.515.148,00**					**186.515.148,00**	
202.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**2.339.537.000,00**					**2.917.508.549,00**	
		meningkatnya partisipasi swadaya masyarakat					***186.515.148,00***					***186.515.148,00***	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					2.339.537.000,00					2.917.508.549,00	
		-					2.339.537.000,00					2.917.508.549,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					133.985.148,00					133.985.148,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	3 Unit	133.985.148,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Padang Timur || Kelurahan Sawahan Timur || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	12 Unit	133.985.148,00	KELURAHAN SAWAHAN TIMUR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					52.530.000,00					52.530.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	52.530.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Padang Timur || Kelurahan Sawahan Timur || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	4 Pokmas / Ormas	52.530.000,00	KELURAHAN SAWAHAN TIMUR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		KELURAHAN SIMPANG HARU					**128.757.908,00**					**128.757.908,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**128.757.908,00**					**128.757.908,00**	
	7.01	**KECAMATAN**					**128.757.908,00**					**128.757.908,00**	
203.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**2.339.537.000,00**					**2.917.508.549,00**	
		meningkatnya partisipasi swadaya masyarakat					***128.757.908,00***					***128.757.908,00***	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					2.339.537.000,00					2.917.508.549,00	
		-					2.339.537.000,00					2.917.508.549,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					85.827.908,00					85.827.908,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	2 Unit	85.827.908,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Padang Timur || Kelurahan Simpang Haru || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	12 Unit	85.827.908,00	KELURAHAN SIMPANG HARU
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					42.930.000,00					42.930.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	42.930.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Padang Timur || Kelurahan Simpang Haru || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	4 Pokmas / Ormas	42.930.000,00	KELURAHAN SIMPANG HARU
		KECAMATAN PADANG UTARA					**17.121.883.250,00**					**19.875.400.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**17.121.883.250,00**					**19.875.400.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**					**17.121.883.250,00**					**19.875.400.000,00**	
204.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**13.460.809.250,00**					**13.552.400.000,00**	
		Meningkatnya efektivitas dan efesiensi pelaksanaan urusan pemerintah daerah					***13.457.673.850,00***					***13.434.900.000,00***	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					21.354.900,00					46.200.000,00	
		-					21.354.900,00					46.200.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					3.003.000,00					5.200.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	6 Dokumen	3 Dokumen	3.003.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	2 Dokumen	5.200.000,00	KECAMATAN PADANG UTARA
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					3.135.400,00					7.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen	3.135.400,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	2 Dokumen	7.500.000,00	KECAMATAN PADANG UTARA
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					3.135.400,00					7.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen	3.135.400,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	2 Dokumen	7.500.000,00	KECAMATAN PADANG UTARA
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					2.997.000,00					7.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen	2.997.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	2 Dokumen	7.500.000,00	KECAMATAN PADANG UTARA
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					3.015.800,00					7.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen	3.015.800,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	2 Dokumen	7.500.000,00	KECAMATAN PADANG UTARA
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					2.971.900,00					5.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	0 Laporan	12 Laporan	2.971.900,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Laporan	5.000.000,00	KECAMATAN PADANG UTARA
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					3.096.400,00					6.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	12 Laporan	10 Laporan	3.096.400,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Laporan	6.000.000,00	KECAMATAN PADANG UTARA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					11.904.069.699,00					12.030.200.000,00	
		-					11.904.069.699,00					12.030.200.000,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					11.626.366.399,00					11.800.000.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang/bulan	75 Orang/bulan	80 Orang/bulan	11.626.366.399,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	75 Orang/bulan	11.800.000.000,00	KECAMATAN PADANG UTARA
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					265.200.000,00					205.200.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	265.200.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Dokumen	205.200.000,00	KECAMATAN PADANG UTARA
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					12.503.300,00					25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	12.503.300,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	14 Laporan	25.000.000,00	KECAMATAN PADANG UTARA
		-					162.497.400,00					116.000.000,00	
	7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					162.497.400,00					106.000.000,00	
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	162.497.400,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Dokumen	106.000.000,00	KECAMATAN PADANG UTARA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					159.395.500,00					282.000.000,00	
		-					159.395.500,00					282.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor					20.081.500,00					10.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	20.081.500,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Paket	10.000.000,00	KECAMATAN PADANG UTARA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					0,00					0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket	5 Paket	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	0 Paket	0,00	KECAMATAN PADANG UTARA
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					0,00					0,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	0 Paket	5 Paket	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Paket	0,00	KECAMATAN PADANG UTARA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					44.981.600,00					40.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	44.981.600,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	3 Paket	40.000.000,00	KECAMATAN PADANG UTARA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					4.708.900,00					10.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	4.708.900,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	2 Paket	10.000.000,00	KECAMATAN PADANG UTARA
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					8.500.000,00					17.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2000 Dokumen	2000 Dokumen	2840 Dokumen	8.500.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	2000 Dokumen	17.000.000,00	KECAMATAN PADANG UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu					16.252.500,00					21.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	16.252.500,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Laporan	21.000.000,00	KECAMATAN PADANG UTARA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					64.871.000,00					184.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	64.871.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Laporan	184.000.000,00	KECAMATAN PADANG UTARA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					161.272.800,00					75.000.000,00	
		-					161.272.800,00					75.000.000,00	
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					0,00					0,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	0 Unit	5 Unit	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Unit	0,00	KECAMATAN PADANG UTARA
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					0,00					25.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	0 Unit	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Unit	25.000.000,00	KECAMATAN PADANG UTARA
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					161.272.800,00					50.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	16 Unit	161.272.800,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	5 Unit	50.000.000,00	KECAMATAN PADANG UTARA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					208.150.000,00					230.000.000,00	
		-					208.150.000,00					230.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					3.150.000,00					0,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	0 Laporan	360 Laporan	3.150.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	0 Laporan	0,00	KECAMATAN PADANG UTARA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					205.000.000,00					230.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	205.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Laporan	230.000.000,00	KECAMATAN PADANG UTARA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					844.068.951,00					773.000.000,00	
		-					844.068.951,00					773.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					205.370.000,00					180.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	20 Unit	20 Unit	205.370.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	20 Unit	180.000.000,00	KECAMATAN PADANG UTARA
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel					0,00					3.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	0 Unit	3.000.000,00	KECAMATAN PADANG UTARA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					25.440.000,00					50.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	90 Unit	90 Unit	50 Unit	25.440.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	90 Unit	50.000.000,00	KECAMATAN PADANG UTARA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					613.258.951,00					540.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	8 Unit	8 Unit	613.258.951,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	8 Unit	540.000.000,00	KECAMATAN PADANG UTARA
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					162.497.400,00					116.000.000,00	
		-					162.497.400,00					116.000.000,00	
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					0,00					10.000.000,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	0 Laporan	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	-	10.000.000,00	KECAMATAN PADANG UTARA
205.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**					**58.202.200,00**					**178.000.000,00**	
		meningkatnya pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai SOP					***58.202.200,00***					***153.000.000,00***	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan					15.000.000,00					75.000.000,00	
		-					15.000.000,00					75.000.000,00	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					15.000.000,00					25.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	15.000.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Laporan	25.000.000,00	KECAMATAN PADANG UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					0,00					50.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Dokumen	50.000.000,00	KECAMATAN PADANG UTARA
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan					18.252.200,00					25.000.000,00	
		-					18.252.200,00					25.000.000,00	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					18.252.200,00					25.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	18.252.200,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Laporan	25.000.000,00	KECAMATAN PADANG UTARA
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					24.950.000,00					78.000.000,00	
		-					24.950.000,00					78.000.000,00	
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha					4.950.000,00					18.000.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	4 Dokumen	4 Dokumen	12 Dokumen	4.950.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	4 Dokumen	18.000.000,00	KECAMATAN PADANG UTARA
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					20.000.000,00					60.000.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Laporan	60.000.000,00	KECAMATAN PADANG UTARA
206.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**1.502.339.100,00**					**2.255.000.000,00**	
		meningkatnya partisipasi swadaya masyarakat					***102.339.100,00***					***2.255.000.000,00***	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					1.502.339.100,00					2.255.000.000,00	
		-					1.502.339.100,00					2.255.000.000,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					35.700.000,00					130.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	35.700.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	7 Lembaga Kemasyarakatan	130.000.000,00	KECAMATAN PADANG UTARA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					24.776.600,00					1.200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	25 Unit	21 Unit	1 Unit	24.776.600,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	22 Unit	1.200.000.000,00	KECAMATAN PADANG UTARA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					41.862.500,00					910.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	86 Pokmas / Ormas	86 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	41.862.500,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	86 Pokmas / Ormas	910.000.000,00	KECAMATAN PADANG UTARA
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan					0,00					15.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	0,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Laporan	15.000.000,00	KECAMATAN PADANG UTARA
207.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**					**476.342.800,00**					**640.000.000,00**	
		Persentase urusan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai ketentuan					***476.342.800,00***					***640.000.000,00***	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					476.342.800,00					640.000.000,00	
		-					476.342.800,00					640.000.000,00	
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia					476.342.800,00					640.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	476.342.800,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Laporan	640.000.000,00	KECAMATAN PADANG UTARA
208.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**					**1.239.090.000,00**					**1.350.000.000,00**	
		meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai ketentuan					***1.239.090.000,00***					***1.350.000.000,00***	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					1.239.090.000,00					1.350.000.000,00	
		-					1.239.090.000,00					1.350.000.000,00	
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal					1.221.090.000,00					1.300.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Terlaksananya Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.221.090.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Dokumen	1.300.000.000,00	KECAMATAN PADANG UTARA
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					18.000.000,00					50.000.000,00	
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	18.000.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Dokumen	50.000.000,00	KECAMATAN PADANG UTARA
209.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**					**1.785.099.900,00**					**1.900.000.000,00**	
		meningkatnya pembinaan dan pengawasan					***1.785.099.900,00***					***1.900.000.000,00***	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					1.785.099.900,00					1.900.000.000,00	
		-					1.785.099.900,00					1.900.000.000,00	
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan					1.785.099.900,00					1.900.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	4 Dokumen	4 Dokumen	12 Dokumen	1.785.099.900,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	4 Dokumen	1.900.000.000,00	KECAMATAN PADANG UTARA
		KELURAHAN ALAI PARAK KOPI					**227.900.466,00**					**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**227.900.466,00**					**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**					**227.900.466,00**					**0,00**	
210.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**1.502.339.100,00**					**2.255.000.000,00**	
		meningkatnya partisipasi swadaya masyarakat					***227.900.466,00***					***0,00***	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					1.502.339.100,00					2.255.000.000,00	
		-					1.502.339.100,00					2.255.000.000,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					98.780.966,00					0,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	25 Unit	21 Unit	0 Unit	98.780.966,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Padang Utara || Kelurahan Alai Parak Kopi || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	22 Unit	0,00	KELURAHAN ALAI PARAK KOPI
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					129.119.500,00					0,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	86 Pokmas / Ormas	86 Pokmas / Ormas	0 Pokmas / Ormas	129.119.500,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Padang Utara || Kelurahan Alai Parak Kopi || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	86 Pokmas / Ormas	0,00	KELURAHAN ALAI PARAK KOPI
		KELURAHAN AIR TAWAR BARAT					**215.022.766,00**					**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**215.022.766,00**					**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**					**215.022.766,00**					**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
211.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**1.502.339.100,00**					**2.255.000.000,00**	
		meningkatnya partisipasi swadaya masyarakat					***215.022.766,00***					***0,00***	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					1.502.339.100,00					2.255.000.000,00	
		-					1.502.339.100,00					2.255.000.000,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					98.503.266,00					0,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	25 Unit	21 Unit	0 Unit	98.503.266,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Padang Utara || Kelurahan Air Tawar Barat || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	22 Unit	0,00	KELURAHAN AIR TAWAR BARAT
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					116.519.500,00					0,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	86 Pokmas / Ormas	86 Pokmas / Ormas	0 Pokmas / Ormas	116.519.500,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Padang Utara || Kelurahan Air Tawar Barat || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	86 Pokmas / Ormas	0,00	KELURAHAN AIR TAWAR BARAT
		KELURAHAN AIR TAWAR TIMUR					**138.500.466,00**					**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**138.500.466,00**					**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**					**138.500.466,00**					**0,00**	
212.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**1.502.339.100,00**					**2.255.000.000,00**	
		meningkatnya partisipasi swadaya masyarakat					***138.500.466,00***					***0,00***	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					1.502.339.100,00					2.255.000.000,00	
		-					1.502.339.100,00					2.255.000.000,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					98.780.966,00					0,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	25 Unit	21 Unit	0 Unit	98.780.966,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Padang Utara || Kelurahan Air Tawar Timur || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	22 Unit	0,00	KELURAHAN AIR TAWAR TIMUR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					39.719.500,00					0,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	86 Pokmas / Ormas	86 Pokmas / Ormas	0 Pokmas / Ormas	39.719.500,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Padang Utara || Kelurahan Air Tawar Timur || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	86 Pokmas / Ormas	0,00	KELURAHAN AIR TAWAR TIMUR
		KELURAHAN GUNUNG PANGILUN					**200.300.466,00**					**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**200.300.466,00**					**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**					**200.300.466,00**					**0,00**	
213.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**1.502.339.100,00**					**2.255.000.000,00**	
		meningkatnya partisipasi swadaya masyarakat					***200.300.466,00***					***0,00***	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					1.502.339.100,00					2.255.000.000,00	
		-					1.502.339.100,00					2.255.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					98.780.966,00					0,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	25 Unit	21 Unit	0 Unit	98.780.966,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Padang Utara || Kelurahan Gunung Pangilun || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	22 Unit	0,00	KELURAHAN GUNUNG PANGILUN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					101.519.500,00					0,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	86 Pokmas / Ormas	86 Pokmas / Ormas	0 Pokmas / Ormas	101.519.500,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Padang Utara || Kelurahan Gunung Pangilun || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	86 Pokmas / Ormas	0,00	KELURAHAN GUNUNG PANGILUN
		KELURAHAN LOLONG BELANTI					**218.435.200,00**					**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**218.435.200,00**					**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**					**218.435.200,00**					**0,00**	
214.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**1.502.339.100,00**					**2.255.000.000,00**	
		meningkatnya partisipasi swadaya masyarakat					***218.435.200,00***					***0,00***	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					1.502.339.100,00					2.255.000.000,00	
		-					1.502.339.100,00					2.255.000.000,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					97.715.700,00					0,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	25 Unit	21 Unit	0 Unit	97.715.700,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Padang Utara || Kelurahan Lolong Belanti || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	22 Unit	0,00	KELURAHAN LOLONG BELANTI
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					120.719.500,00					0,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	86 Pokmas / Ormas	86 Pokmas / Ormas	0 Pokmas / Ormas	120.719.500,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Padang Utara || Kelurahan Lolong Belanti || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	86 Pokmas / Ormas	0,00	KELURAHAN LOLONG BELANTI
		KELURAHAN ULAK KARANG SELATAN					**231.017.870,00**					**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**231.017.870,00**					**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**					**231.017.870,00**					**0,00**	
215.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**1.502.339.100,00**					**2.255.000.000,00**	
		meningkatnya partisipasi swadaya masyarakat					***231.017.870,00***					***0,00***	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					1.502.339.100,00					2.255.000.000,00	
		-					1.502.339.100,00					2.255.000.000,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					97.698.370,00					0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	25 Unit	21 Unit	0 Unit	97.698.370,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Padang Utara || Kelurahan Ulak Karang Selatan || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	22 Unit	0,00	KELURAHAN ULAK KARANG SELATAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					133.319.500,00					0,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	86 Pokmas / Ormas	86 Pokmas / Ormas	0 Pokmas / Ormas	133.319.500,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Padang Utara || Kelurahan Ulak Karang Selatan || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	86 Pokmas / Ormas	0,00	KELURAHAN ULAK KARANG SELATAN
		KELURAHAN ULAK KARANG UTARA					**168.822.766,00**					**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**168.822.766,00**					**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**					**168.822.766,00**					**0,00**	
216.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**1.502.339.100,00**					**2.255.000.000,00**	
		meningkatnya partisipasi swadaya masyarakat					***168.822.766,00***					***0,00***	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					1.502.339.100,00					2.255.000.000,00	
		-					1.502.339.100,00					2.255.000.000,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					98.503.266,00					0,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	25 Unit	21 Unit	0 Unit	98.503.266,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Padang Utara || Kelurahan Ulak Karang Utara || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	22 Unit	0,00	KELURAHAN ULAK KARANG UTARA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					70.319.500,00					0,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	86 Pokmas / Ormas	86 Pokmas / Ormas	0 Pokmas / Ormas	70.319.500,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Padang Utara || Kelurahan Ulak Karang Utara || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	86 Pokmas / Ormas	0,00	KELURAHAN ULAK KARANG UTARA
		KECAMATAN PADANG SELATAN					**21.800.234.767,00**					**27.519.943.548,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**21.800.234.767,00**					**27.519.943.548,00**	
	7.01	**KECAMATAN**					**21.800.234.767,00**					**27.519.943.548,00**	
217.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**16.627.843.256,00**					**17.956.073.467,00**	
		Meningkatnya efektivitas dan efesiensi pelaksanaan urusan pemerintah daerah					***16.624.843.656,00***					***17.919.073.467,00***	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					28.535.800,00					41.000.000,00	
		-					28.535.800,00					41.000.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					4.999.900,00					7.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	4.999.900,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	3 Dokumen	7.000.000,00	KECAMATAN PADANG SELATAN
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					3.000.100,00					5.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.100,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Dokumen	5.000.000,00	KECAMATAN PADANG SELATAN
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					3.000.000,00					5.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Dokumen	5.000.000,00	KECAMATAN PADANG SELATAN
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					2.999.600,00					5.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.999.600,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Dokumen	5.000.000,00	KECAMATAN PADANG SELATAN
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					2.999.600,00					5.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.999.600,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Dokumen	5.000.000,00	KECAMATAN PADANG SELATAN
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					6.500.000,00					7.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	6.500.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	14 Laporan	7.000.000,00	KECAMATAN PADANG SELATAN
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					5.036.600,00					7.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	5.036.600,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	4 Laporan	7.000.000,00	KECAMATAN PADANG SELATAN
	7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah					0,00					0,00	
		Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	0 Dokumen	0,00	KECAMATAN PADANG SELATAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					15.398.731.356,00					16.270.000.000,00	
		-					15.398.731.356,00					16.270.000.000,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					15.141.571.356,00					16.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	95 Orang/bulan	84 Orang/bulan	100 Orang/bulan	15.141.571.356,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	90 Orang/bulan	16.000.000.000,00	KECAMATAN PADANG SELATAN
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					257.160.000,00					270.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	257.160.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	14 Dokumen	270.000.000,00	KECAMATAN PADANG SELATAN
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					167.177.400,00					155.504.700,00	
		-					167.177.400,00					155.504.700,00	
	7.01.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD					167.177.400,00					155.504.700,00	
		Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	167.177.400,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Laporan	155.504.700,00	KECAMATAN PADANG SELATAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					149.416.900,00					299.970.000,00	
		-					149.416.900,00					299.970.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor					6.990.600,00					8.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	10 Paket	6.990.600,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	10 Paket	8.000.000,00	KECAMATAN PADANG SELATAN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					19.983.400,00					20.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	Paket	2 Paket	19.983.400,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	2 Paket	20.000.000,00	KECAMATAN PADANG SELATAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					44.974.500,00					90.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	14 Paket	14 Paket	14 Paket	44.974.500,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	14 Paket	90.000.000,00	KECAMATAN PADANG SELATAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					17.499.900,00					35.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	5 Paket	17.499.900,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	5 Paket	35.000.000,00	KECAMATAN PADANG SELATAN
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					0,00					28.970.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4140 Dokumen	4140 Dokumen	4.140 Dokumen	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	4140 Dokumen	28.970.000,00	KECAMATAN PADANG SELATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu					4.004.500,00					8.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	170 Laporan	170 Laporan	170 Laporan	4.004.500,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	170 Laporan	8.000.000,00	KECAMATAN PADANG SELATAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					55.964.000,00					110.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	55.964.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Laporan	110.000.000,00	KECAMATAN PADANG SELATAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					244.175.100,00					333.598.767,00	
		-					244.175.100,00					333.598.767,00	
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					0,00					208.598.767,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	Unit	0 Unit	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	5 Unit	208.598.767,00	KECAMATAN PADANG SELATAN
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					0,00					25.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	2 Unit	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	2 Unit	25.000.000,00	KECAMATAN PADANG SELATAN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					244.175.100,00					100.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	16 Unit	16 Unit	16 Unit	244.175.100,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	16 Unit	100.000.000,00	KECAMATAN PADANG SELATAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					192.492.500,00					199.000.000,00	
		-					192.492.500,00					199.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					3.780.000,00					4.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	450 Laporan	450 Laporan	450 Laporan	3.780.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	450 Laporan	4.000.000,00	KECAMATAN PADANG SELATAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					188.712.500,00					195.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	188.712.500,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Laporan	195.000.000,00	KECAMATAN PADANG SELATAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					447.314.200,00					657.000.000,00	
		-					447.314.200,00					657.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					248.790.000,00					266.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	42 Unit	42 Unit	42 Unit	248.790.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	42 Unit	266.000.000,00	KECAMATAN PADANG SELATAN
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel					0,00					2.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	13 Unit	13 Unit	13 Unit	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	13 Unit	2.000.000,00	KECAMATAN PADANG SELATAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					19.880.000,00					21.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	40 Unit	40 Unit	19.880.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	40 Unit	21.000.000,00	KECAMATAN PADANG SELATAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					159.166.800,00					350.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13 Unit	13 Unit	13 Unit	159.166.800,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	13 Unit	350.000.000,00	KECAMATAN PADANG SELATAN
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					19.477.400,00					18.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13 Unit	13 Unit	13 Unit	19.477.400,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	13 Unit	18.000.000,00	KECAMATAN PADANG SELATAN
218.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**					**115.101.800,00**					**289.964.745,00**	
		Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai SOP					***115.101.800,00***					***244.964.745,00***	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan					40.105.000,00					80.000.000,00	
		-					40.105.000,00					80.000.000,00	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					20.108.200,00					35.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	20.108.200,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Laporan	35.000.000,00	KECAMATAN PADANG SELATAN
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					19.996.800,00					45.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	19.996.800,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	4 Dokumen	45.000.000,00	KECAMATAN PADANG SELATAN
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan					19.996.600,00					36.000.000,00	
		-					19.996.600,00					36.000.000,00	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					19.996.600,00					36.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	19.996.600,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Laporan	36.000.000,00	KECAMATAN PADANG SELATAN
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					55.000.200,00					173.964.745,00	
		-					55.000.200,00					173.964.745,00	
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha					30.000.200,00					45.000.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	48 Dokumen	48 Dokumen	48 Dokumen	30.000.200,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	48 Dokumen	45.000.000,00	KECAMATAN PADANG SELATAN
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					25.000.000,00					128.964.745,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	Laporan	12 Laporan	25.000.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Laporan	128.964.745,00	KECAMATAN PADANG SELATAN
219.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**3.101.553.911,00**					**6.299.287.360,00**	
		meningktanya partisipasi swadaya masyarakat					***701.553.911,00***					***4.746.487.360,00***	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					3.101.553.911,00					6.299.287.360,00	
		-					3.101.553.911,00					6.299.287.360,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					100.366.800,00					240.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	13 Lembaga Kemasyarakatan	13 Lembaga Kemasyarakatan	13 Lembaga Kemasyarakatan	100.366.800,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	13 Lembaga Kemasyarakatan	240.000.000,00	KECAMATAN PADANG SELATAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					58.884.611,00					3.651.287.360,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	12 Unit	58.884.611,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Unit	3.651.287.360,00	KECAMATAN PADANG SELATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					455.316.300,00					670.200.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	455.316.300,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	8 Pokmas / Ormas	670.200.000,00	KECAMATAN PADANG SELATAN
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan					86.986.200,00					185.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	86.986.200,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Laporan	185.000.000,00	KECAMATAN PADANG SELATAN
220.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**					**777.267.300,00**					**988.389.500,00**	
		Persentase urusan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai ketentuan					***777.267.300,00***					***988.389.500,00***	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					777.267.300,00					988.389.500,00	
		-					777.267.300,00					988.389.500,00	
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia					777.267.300,00					988.389.500,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	48 Laporan	48 Laporan	48 Laporan	777.267.300,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	48 Laporan	988.389.500,00	KECAMATAN PADANG SELATAN
221.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**					**1.766.263.200,00**					**1.466.370.161,00**	
		meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai ketentuan					***1.766.263.200,00***					***1.466.370.161,00***	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					1.766.263.200,00					1.466.370.161,00	
		-					1.766.263.200,00					1.466.370.161,00	
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal					1.738.310.900,00					1.425.370.161,00	
		Terlaksananya Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	1.738.310.900,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	4 Dokumen	1.425.370.161,00	KECAMATAN PADANG SELATAN
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					27.952.300,00					41.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	24 Dokumen	24 Dokumen	24 Dokumen	27.952.300,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	24 Dokumen	41.000.000,00	KECAMATAN PADANG SELATAN
222.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**					**1.812.205.300,00**					**2.072.658.315,00**	
		meningkatnya pembinaan dan pengawasan					***1.812.205.300,00***					***2.072.658.315,00***	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					1.812.205.300,00					2.072.658.315,00	
		-					1.812.205.300,00					2.072.658.315,00	
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan					1.812.205.300,00					2.072.658.315,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	1.812.205.300,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	4 Dokumen	2.072.658.315,00	KECAMATAN PADANG SELATAN
		KELURAHAN ALANG LAWEH					**192.875.500,00**					**129.400.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**192.875.500,00**					**129.400.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**					**192.875.500,00**					**129.400.000,00**	
223.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**3.101.553.911,00**					**6.299.287.360,00**	
		meningktanya partisipasi swadaya masyarakat					***192.875.500,00***					***129.400.000,00***	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					3.101.553.911,00					6.299.287.360,00	
		-					3.101.553.911,00					6.299.287.360,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					135.808.300,00					85.000.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	2 Unit	135.808.300,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Padang Selatan || Kelurahan Alang Laweh || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Unit	85.000.000,00	KELURAHAN ALANG LAWEH
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					57.067.200,00					44.400.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	57.067.200,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Padang Selatan || Kelurahan Alang Laweh || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	8 Pokmas / Ormas	44.400.000,00	KELURAHAN ALANG LAWEH
		KELURAHAN AIR MANIS					**164.075.500,00**					**129.400.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**164.075.500,00**					**129.400.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**					**164.075.500,00**					**129.400.000,00**	
224.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**3.101.553.911,00**					**6.299.287.360,00**	
		meningktanya partisipasi swadaya masyarakat					***164.075.500,00***					***129.400.000,00***	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					3.101.553.911,00					6.299.287.360,00	
		-					3.101.553.911,00					6.299.287.360,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					135.808.300,00					85.000.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	2 Unit	135.808.300,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Padang Selatan || Kelurahan Air Manis || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Unit	85.000.000,00	KELURAHAN AIR MANIS
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					28.267.200,00					44.400.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	28.267.200,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Padang Selatan || Kelurahan Air Manis || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	8 Pokmas / Ormas	44.400.000,00	KELURAHAN AIR MANIS
		KELURAHAN BATANG ARAU					**213.875.500,00**					**129.400.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**213.875.500,00**					**129.400.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**					**213.875.500,00**					**129.400.000,00**	
225.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**3.101.553.911,00**					**6.299.287.360,00**	
		meningktanya partisipasi swadaya masyarakat					***213.875.500,00***					***129.400.000,00***	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					3.101.553.911,00					6.299.287.360,00	
		-					3.101.553.911,00					6.299.287.360,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					135.808.300,00					85.000.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	2 Unit	135.808.300,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Padang Selatan || Kelurahan Batang Arau || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Unit	85.000.000,00	KELURAHAN BATANG ARAU
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					78.067.200,00					44.400.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	78.067.200,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Padang Selatan || Kelurahan Batang Arau || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	8 Pokmas / Ormas	44.400.000,00	KELURAHAN BATANG ARAU
		KELURAHAN BELAKANG PONDOK					**154.475.500,00**					**129.400.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**154.475.500,00**					**129.400.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**					**154.475.500,00**					**129.400.000,00**	
226.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**3.101.553.911,00**					**6.299.287.360,00**	
		meningktanya partisipasi swadaya masyarakat					***154.475.500,00***					***129.400.000,00***	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					3.101.553.911,00					6.299.287.360,00	
		-					3.101.553.911,00					6.299.287.360,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					135.808.300,00					85.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	2 Unit	135.808.300,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Padang Selatan || Kelurahan Belakang Pondok || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Unit	85.000.000,00	KELURAHAN BELAKANG PONDOK
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					18.667.200,00					44.400.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	18.667.200,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Padang Selatan || Kelurahan Belakang Pondok || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	8 Pokmas / Ormas	44.400.000,00	KELURAHAN BELAKANG PONDOK
		KELURAHAN BUKIT GADO-GADO					**161.675.500,00**					**129.400.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**161.675.500,00**					**129.400.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**					**161.675.500,00**					**129.400.000,00**	
227.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**3.101.553.911,00**					**6.299.287.360,00**	
		meningktanya partisipasi swadaya masyarakat					***161.675.500,00***					***129.400.000,00***	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					3.101.553.911,00					6.299.287.360,00	
		-					3.101.553.911,00					6.299.287.360,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					135.808.300,00					85.000.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	2 Unit	135.808.300,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Padang Selatan || Kelurahan Bukit Gado-gado || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Unit	85.000.000,00	KELURAHAN BUKIT GADO-GADO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					25.867.200,00					44.400.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	25.867.200,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Padang Selatan || Kelurahan Bukit Gado-gado || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	8 Pokmas / Ormas	44.400.000,00	KELURAHAN BUKIT GADO-GADO
		KELURAHAN MATA AIR					**256.104.600,00**					**129.400.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**256.104.600,00**					**129.400.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**					**256.104.600,00**					**129.400.000,00**	
228.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**3.101.553.911,00**					**6.299.287.360,00**	
		meningktanya partisipasi swadaya masyarakat					***256.104.600,00***					***129.400.000,00***	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					3.101.553.911,00					6.299.287.360,00	
		-					3.101.553.911,00					6.299.287.360,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					140.237.400,00					85.000.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	2 Unit	140.237.400,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Padang Selatan || Kelurahan Mata Air || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Unit	85.000.000,00	KELURAHAN MATA AIR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					115.867.200,00					44.400.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	115.867.200,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Padang Selatan || Kelurahan Mata Air || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	8 Pokmas / Ormas	44.400.000,00	KELURAHAN MATA AIR
		KELURAHAN PASA GADANG					**294.340.400,00**					**129.400.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**294.340.400,00**					**129.400.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**					**294.340.400,00**					**129.400.000,00**	
229.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**3.101.553.911,00**					**6.299.287.360,00**	
		meningktanya partisipasi swadaya masyarakat					***294.340.400,00***					***129.400.000,00***	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					3.101.553.911,00					6.299.287.360,00	
		-					3.101.553.911,00					6.299.287.360,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					180.273.200,00					85.000.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	2 Unit	180.273.200,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Padang Selatan || Kelurahan Pasa Gadang || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Unit	85.000.000,00	KELURAHAN PASA GADANG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					114.067.200,00					44.400.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	114.067.200,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Padang Selatan || Kelurahan Pasa Gadang || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	8 Pokmas / Ormas	44.400.000,00	KELURAHAN PASA GADANG
		KELURAHAN RANAH PARAK RUMBIO					**170.675.500,00**					**129.400.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**170.675.500,00**					**129.400.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**					**170.675.500,00**					**129.400.000,00**	
230.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**3.101.553.911,00**					**6.299.287.360,00**	
		meningktanya partisipasi swadaya masyarakat					***170.675.500,00***					***129.400.000,00***	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					3.101.553.911,00					6.299.287.360,00	
		-					3.101.553.911,00					6.299.287.360,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					135.808.300,00					85.000.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	2 Unit	135.808.300,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Padang Selatan || Kelurahan Ranah Parak Rumbio || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Unit	85.000.000,00	KELURAHAN RANAH PARAK RUMBIO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					34.867.200,00					44.400.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	34.867.200,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Padang Selatan || Kelurahan Ranah Parak Rumbio || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	8 Pokmas / Ormas	44.400.000,00	KELURAHAN RANAH PARAK RUMBIO
		KELURAHAN RAWANG					**218.075.500,00**					**129.400.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**218.075.500,00**					**129.400.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**					**218.075.500,00**					**129.400.000,00**	
231.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**3.101.553.911,00**					**6.299.287.360,00**	
		meningktanya partisipasi swadaya masyarakat					***218.075.500,00***					***129.400.000,00***	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					3.101.553.911,00					6.299.287.360,00	
		-					3.101.553.911,00					6.299.287.360,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					135.808.300,00					85.000.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	2 Unit	135.808.300,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Padang Selatan || Kelurahan Rawang || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Unit	85.000.000,00	KELURAHAN RAWANG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					82.267.200,00					44.400.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	82.267.200,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Padang Selatan || Kelurahan Rawang || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	8 Pokmas / Ormas	44.400.000,00	KELURAHAN RAWANG
		KELURAHAN SEBERANG PADANG					**218.075.500,00**					**129.400.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**218.075.500,00**					**129.400.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**					**218.075.500,00**					**129.400.000,00**	
232.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**3.101.553.911,00**					**6.299.287.360,00**	
		meningktanya partisipasi swadaya masyarakat					***218.075.500,00***					***129.400.000,00***	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					3.101.553.911,00					6.299.287.360,00	
		-					3.101.553.911,00					6.299.287.360,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					135.808.300,00					85.000.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	2 Unit	135.808.300,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Padang Selatan || Kelurahan Seberang Padang || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Unit	85.000.000,00	KELURAHAN SEBERANG PADANG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					82.267.200,00					44.400.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	82.267.200,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Padang Selatan || Kelurahan Seberang Padang || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	8 Pokmas / Ormas	44.400.000,00	KELURAHAN SEBERANG PADANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		KELURAHAN SEBERANG PALINGGAM					**185.075.500,00**					**129.400.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**185.075.500,00**					**129.400.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**					**185.075.500,00**					**129.400.000,00**	
233.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**3.101.553.911,00**					**6.299.287.360,00**	
		meningktanya partisipasi swadaya masyarakat					***185.075.500,00***					***129.400.000,00***	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					3.101.553.911,00					6.299.287.360,00	
		-					3.101.553.911,00					6.299.287.360,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					135.808.300,00					85.000.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	2 Unit	135.808.300,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Padang Selatan || Kelurahan Seberang Palinggam || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Unit	85.000.000,00	KELURAHAN SEBERANG PALINGGAM
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					49.267.200,00					44.400.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	49.267.200,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Padang Selatan || Kelurahan Seberang Palinggam || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	8 Pokmas / Ormas	44.400.000,00	KELURAHAN SEBERANG PALINGGAM
		KELURAHAN TELUK BAYUR					**170.675.500,00**					**129.400.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**170.675.500,00**					**129.400.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**					**170.675.500,00**					**129.400.000,00**	
234.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**3.101.553.911,00**					**6.299.287.360,00**	
		meningktanya partisipasi swadaya masyarakat					***170.675.500,00***					***129.400.000,00***	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					3.101.553.911,00					6.299.287.360,00	
		-					3.101.553.911,00					6.299.287.360,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					135.808.300,00					85.000.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	2 Unit	135.808.300,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Padang Selatan || Kelurahan Teluk Bayur || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Unit	85.000.000,00	KELURAHAN TELUK BAYUR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					34.867.200,00					44.400.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	34.867.200,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Padang Selatan || Kelurahan Teluk Bayur || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	8 Pokmas / Ormas	44.400.000,00	KELURAHAN TELUK BAYUR
		KECAMATAN NANGGALO					**15.746.810.315,00**					**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**15.746.810.315,00**					**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**					**15.746.810.315,00**					**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
235.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**12.180.907.038,00**					**0,00**	
		Meningkatnya efektivitas dan efesiensi pelaksanaan urusan pemerintah daerah					***12.156.908.538,00***					***0,00***	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					52.319.100,00					0,00	
		-					52.319.100,00					0,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					8.459.000,00					0,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100 Dokumen	100 Dokumen	6 Dokumen	8.459.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	100 Dokumen	0,00	KECAMATAN NANGGALO
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					7.999.500,00					0,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100 Dokumen	100 Dokumen	1 Dokumen	7.999.500,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	100 Dokumen	0,00	KECAMATAN NANGGALO
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					7.999.500,00					0,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100 Dokumen	100 Dokumen	1 Dokumen	7.999.500,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	100 Dokumen	0,00	KECAMATAN NANGGALO
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					7.999.500,00					0,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	100 Dokumen	100 Dokumen	1 Dokumen	7.999.500,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	100 Dokumen	0,00	KECAMATAN NANGGALO
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					11.862.100,00					0,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100 Laporan	100 Laporan	6 Laporan	11.862.100,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	100 Laporan	0,00	KECAMATAN NANGGALO
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					7.999.500,00					0,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Laporan	100 Laporan	1 Laporan	7.999.500,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	100 Laporan	0,00	KECAMATAN NANGGALO
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					11.065.890.838,00					0,00	
		-					11.065.890.838,00					0,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					10.850.082.838,00					0,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/bulan	100 Orang/bulan	70 Orang/bulan	10.850.082.838,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	100 Orang/bulan	0,00	KECAMATAN NANGGALO
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					215.808.000,00					0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100 Dokumen	100 Dokumen	12 Dokumen	215.808.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	100 Dokumen	0,00	KECAMATAN NANGGALO
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					162.497.400,00					0,00	
		-					162.497.400,00					0,00	
	7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					162.497.400,00					0,00	
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	100 Dokumen	100 Dokumen	12 Dokumen	162.497.400,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	100 Dokumen	0,00	KECAMATAN NANGGALO
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					261.040.900,00					0,00	
		-					261.040.900,00					0,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor					2.009.300,00					0,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100 Paket	100 Paket	12 Paket	2.009.300,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	100 Paket	0,00	KECAMATAN NANGGALO
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					124.053.600,00					0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 Paket	100 Paket	1 Paket	124.053.600,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	100 Paket	0,00	KECAMATAN NANGGALO
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					0,00					0,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100 Paket	100 Paket	2 Paket	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	100 Paket	0,00	KECAMATAN NANGGALO
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					29.987.600,00					0,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100 Paket	100 Paket	20 Paket	29.987.600,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	100 Paket	0,00	KECAMATAN NANGGALO
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					19.994.400,00					0,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100 Paket	100 Paket	10 Paket	19.994.400,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	100 Paket	0,00	KECAMATAN NANGGALO
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					2.400.000,00					0,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100 Dokumen	100 Dokumen	12 Dokumen	2.400.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	100 Dokumen	0,00	KECAMATAN NANGGALO
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu					21.980.000,00					0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100 Laporan	100 Laporan	12 Laporan	21.980.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	100 Laporan	0,00	KECAMATAN NANGGALO
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					60.616.000,00					0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	100 Laporan	12 Laporan	60.616.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	100 Laporan	0,00	KECAMATAN NANGGALO
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					238.003.200,00					0,00	
		-					238.003.200,00					0,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					2.003.400,00					0,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 Laporan	100 Laporan	12 Laporan	2.003.400,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	100 Laporan	0,00	KECAMATAN NANGGALO
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					235.999.800,00					0,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100 Laporan	100 Laporan	12 Laporan	235.999.800,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	100 Laporan	0,00	KECAMATAN NANGGALO
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					401.155.600,00					0,00	
		-					401.155.600,00					0,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					215.420.000,00					0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100 Unit	100 Unit	25 Unit	215.420.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	100 Unit	0,00	KECAMATAN NANGGALO
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel					0,00					0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	100 Unit	100 Unit	2 Unit	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	100 Unit	0,00	KECAMATAN NANGGALO
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					20.510.000,00					0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	100 Unit	0 Unit	20.510.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	100 Unit	0,00	KECAMATAN NANGGALO
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					165.225.600,00					0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0 Unit	0 Unit	165.225.600,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	0 Unit	0,00	KECAMATAN NANGGALO
236.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**					**39.285.500,00**					**0,00**	
		Meningkatnya pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai SOP					***29.285.500,00***					***0,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan					20.133.000,00					0,00	
		-					20.133.000,00					0,00	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					10.133.000,00					0,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	100 Laporan	100 Laporan	0 Laporan	10.133.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	100 Laporan	0,00	KECAMATAN NANGGALO
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					10.000.000,00					0,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 Dokumen	100 Dokumen	0 Dokumen	10.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	100 Dokumen	0,00	KECAMATAN NANGGALO
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan					10.000.000,00					0,00	
		-					10.000.000,00					0,00	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					10.000.000,00					0,00	
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100 Laporan	100 Laporan	0 Laporan	10.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	100 Laporan	0,00	KECAMATAN NANGGALO
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					9.152.500,00					0,00	
		-					9.152.500,00					0,00	
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha					9.152.500,00					0,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	100 Dokumen	100 Dokumen	0 Dokumen	9.152.500,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	100 Dokumen	0,00	KECAMATAN NANGGALO
237.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**1.344.598.177,00**					**0,00**	
		meningkatnya partisipasi swadaya masyarakat					***144.598.177,00***					***0,00***	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					1.344.598.177,00					0,00	
		-					1.344.598.177,00					0,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					47.891.700,00					0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100 Lembaga Kemasyarakatan	100 Lembaga Kemasyarakatan	0 Lembaga Kemasyarakatan	47.891.700,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	100 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	KECAMATAN NANGGALO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					0,00					0,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	100 Unit	100 Unit	0 Unit	0,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	100 Unit	0,00	KECAMATAN NANGGALO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					87.706.477,00					0,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100 Pokmas / Ormas	100 Pokmas / Ormas	0 Pokmas / Ormas	87.706.477,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	100 Pokmas / Ormas	0,00	KECAMATAN NANGGALO
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan					9.000.000,00					0,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	100 Laporan	100 Laporan	0 Laporan	9.000.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	100 Laporan	0,00	KECAMATAN NANGGALO
238.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**					**379.529.600,00**					**0,00**	
		Persentase urusan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai ketentuan					***379.529.600,00***					***0,00***	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					379.529.600,00					0,00	
		-					379.529.600,00					0,00	
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia					379.529.600,00					0,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	100 Laporan	100 Laporan	0 Laporan	379.529.600,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	100 Laporan	0,00	KECAMATAN NANGGALO
239.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**					**1.519.290.000,00**					**0,00**	
		meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai ketentuan					***1.519.290.000,00***					***0,00***	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					1.519.290.000,00					0,00	
		-					1.519.290.000,00					0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal					1.490.490.000,00					0,00	
		Terlaksananya Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	100 Dokumen	100 Dokumen	0 Dokumen	1.490.490.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	100 Dokumen	0,00	KECAMATAN NANGGALO
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					28.800.000,00					0,00	
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	100 Dokumen	100 Dokumen	0 Dokumen	28.800.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	100 Dokumen	0,00	KECAMATAN NANGGALO
240.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**					**1.483.200.000,00**					**0,00**	
		meningkatnya pembinaan dan pengawasan					***1.483.200.000,00***					***0,00***	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					1.483.200.000,00					0,00	
		-					1.483.200.000,00					0,00	
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan					1.483.200.000,00					0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	100 Dokumen	100 Dokumen	0 Dokumen	1.483.200.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	100 Dokumen	0,00	KECAMATAN NANGGALO
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**					**0,00**					**0,00**	
241.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**0,00**					**0,00**	
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					0,00					0,00	
		-					0,00					0,00	
	X.XX.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					0,00					0,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	100 Dokumen	100 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	100 Dokumen	0,00	KECAMATAN NANGGALO
		KELURAHAN GURUN LAWEH					**171.000.000,00**					**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**171.000.000,00**					**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**					**171.000.000,00**					**0,00**	
242.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**1.344.598.177,00**					**0,00**	
		meningkatnya partisipasi swadaya masyarakat					***171.000.000,00***					***0,00***	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					1.344.598.177,00					0,00	
		-					1.344.598.177,00					0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					135.000.000,00					0,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	100 Unit	100 Unit	0 Unit	135.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Nanggalo || Kelurahan Gurun Laweh || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	100 Unit	0,00	KELURAHAN GURUN LAWEH
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					36.000.000,00					0,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100 Pokmas / Ormas	100 Pokmas / Ormas	0 Pokmas / Ormas	36.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Nanggalo || Kelurahan Gurun Laweh || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	100 Pokmas / Ormas	0,00	KELURAHAN GURUN LAWEH
		KELURAHAN KAMPUNG LAPAI					**187.800.000,00**					**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**187.800.000,00**					**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**					**187.800.000,00**					**0,00**	
243.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**1.344.598.177,00**					**0,00**	
		meningkatnya partisipasi swadaya masyarakat					***187.800.000,00***					***0,00***	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					1.344.598.177,00					0,00	
		-					1.344.598.177,00					0,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					135.000.000,00					0,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	100 Unit	100 Unit	0 Unit	135.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Nanggalo || Kelurahan Kampung Lapai || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	100 Unit	0,00	KELURAHAN KAMPUNG LAPAI
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					52.800.000,00					0,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100 Pokmas / Ormas	100 Pokmas / Ormas	0 Pokmas / Ormas	52.800.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Nanggalo || Kelurahan Kampung Lapai || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	100 Pokmas / Ormas	0,00	KELURAHAN KAMPUNG LAPAI
		KELURAHAN KAMPUNG OLO					**128.200.000,00**					**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**128.200.000,00**					**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**					**128.200.000,00**					**0,00**	
244.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**1.344.598.177,00**					**0,00**	
		meningkatnya partisipasi swadaya masyarakat					***128.200.000,00***					***0,00***	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					1.344.598.177,00					0,00	
		-					1.344.598.177,00					0,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					85.000.000,00					0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	100 Unit	100 Unit	1 Unit	85.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Nanggalo || Kelurahan Kampung Olo || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	100 Unit	0,00	KELURAHAN KAMPUNG OLO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					43.200.000,00					0,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100 Pokmas / Ormas	100 Pokmas / Ormas	0 Pokmas / Ormas	43.200.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Nanggalo || Kelurahan Kampung Olo || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	100 Pokmas / Ormas	0,00	KELURAHAN KAMPUNG OLO
		KELURAHAN KURAO PAGANG					**166.600.000,00**					**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**166.600.000,00**					**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**					**166.600.000,00**					**0,00**	
245.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**1.344.598.177,00**					**0,00**	
		meningkatnya partisipasi swadaya masyarakat					***166.600.000,00***					***0,00***	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					1.344.598.177,00					0,00	
		-					1.344.598.177,00					0,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					85.000.000,00					0,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	100 Unit	100 Unit	0 Unit	85.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Nanggalo || Kelurahan Kurao Pagang || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	100 Unit	0,00	KELURAHAN KURAO PAGANG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					81.600.000,00					0,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100 Pokmas / Ormas	100 Pokmas / Ormas	0 Pokmas / Ormas	81.600.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Nanggalo || Kelurahan Kurao Pagang || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	100 Pokmas / Ormas	0,00	KELURAHAN KURAO PAGANG
		KELURAHAN SURAU GADANG					**375.400.000,00**					**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**375.400.000,00**					**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**					**375.400.000,00**					**0,00**	
246.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**1.344.598.177,00**					**0,00**	
		meningkatnya partisipasi swadaya masyarakat					***375.400.000,00***					***0,00***	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					1.344.598.177,00					0,00	
		-					1.344.598.177,00					0,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					135.000.000,00					0,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	100 Unit	100 Unit	0 Unit	135.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Nanggalo || Kelurahan Surau Gadang || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	100 Unit	0,00	KELURAHAN SURAU GADANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					240.400.000,00					0,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100 Pokmas / Ormas	100 Pokmas / Ormas	0 Pokmas / Ormas	240.400.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Nanggalo || Kelurahan Surau Gadang || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	100 Pokmas / Ormas	0,00	KELURAHAN SURAU GADANG
		KELURAHAN TABIANG BANDA GADANG					**171.000.000,00**					**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**171.000.000,00**					**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**					**171.000.000,00**					**0,00**	
247.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**1.344.598.177,00**					**0,00**	
		meningkatnya partisipasi swadaya masyarakat					***171.000.000,00***					***0,00***	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					1.344.598.177,00					0,00	
		-					1.344.598.177,00					0,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					135.000.000,00					0,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	100 Unit	100 Unit	0 Unit	135.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Nanggalo || Kelurahan Tabing Banda Gadang || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	100 Unit	0,00	KELURAHAN TABIANG BANDA GADANG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					36.000.000,00					0,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100 Pokmas / Ormas	100 Pokmas / Ormas	0 Pokmas / Ormas	36.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Nanggalo || Kelurahan Tabing Banda Gadang || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	100 Pokmas / Ormas	0,00	KELURAHAN TABIANG BANDA GADANG
		KECAMATAN KURANJI					**23.189.225.621,00**					**31.233.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**23.189.225.621,00**					**31.233.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**					**23.189.225.621,00**					**31.233.000.000,00**	
248.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**16.253.291.121,00**					**17.265.891.677,00**	
		Meningkatnya efektivitas dan efesiensi pelaksanaan urusan pemerintah daerah					***16.211.291.121,00***					***17.230.891.677,00***	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					65.000.000,00					52.500.000,00	
		-					65.000.000,00					52.500.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					8.000.000,00					5.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	8.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	2 Dokumen	5.000.000,00	KECAMATAN KURANJI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					8.000.000,00					5.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	8.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Dokumen	5.000.000,00	KECAMATAN KURANJI
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					8.000.000,00					5.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	8.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Dokumen	5.000.000,00	KECAMATAN KURANJI
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					8.000.000,00					5.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	8.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Dokumen	5.000.000,00	KECAMATAN KURANJI
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					8.000.000,00					5.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	8.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Dokumen	5.000.000,00	KECAMATAN KURANJI
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					15.000.000,00					12.500.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	15.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	13 Laporan	12.500.000,00	KECAMATAN KURANJI
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					10.000.000,00					15.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Laporan	15.000.000,00	KECAMATAN KURANJI
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					14.496.616.660,00					15.279.224.877,00	
		-					14.496.616.660,00					15.279.224.877,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					14.245.124.660,00					14.999.224.877,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90 Orang/bulan	90 Orang/bulan	90 Orang/bulan	14.245.124.660,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	90 Orang/bulan	14.999.224.877,00	KECAMATAN KURANJI
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					251.492.000,00					280.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	251.492.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Dokumen	280.000.000,00	KECAMATAN KURANJI
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					162.497.400,00					161.766.800,00	
		-					162.497.400,00					161.766.800,00	
	7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					162.497.400,00					161.766.800,00	
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	162.497.400,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Dokumen	161.766.800,00	KECAMATAN KURANJI
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					188.873.500,00					241.000.000,00	
		-					188.873.500,00					241.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor					8.571.200,00					10.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	8.571.200,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Paket	10.000.000,00	KECAMATAN KURANJI
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					49.909.800,00					70.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	49.909.800,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Paket	70.000.000,00	KECAMATAN KURANJI
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					9.970.000,00					10.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	9.970.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Paket	10.000.000,00	KECAMATAN KURANJI
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					10.000.000,00					7.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Dokumen	7.000.000,00	KECAMATAN KURANJI
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu					9.990.500,00					9.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	9.990.500,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Laporan	9.000.000,00	KECAMATAN KURANJI
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					100.432.000,00					135.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100.432.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	5 Laporan	135.000.000,00	KECAMATAN KURANJI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					208.844.200,00					300.000.000,00	
		-					208.844.200,00					300.000.000,00	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					208.844.200,00					300.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	11 Unit	208.844.200,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Unit	300.000.000,00	KECAMATAN KURANJI
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					359.614.561,00					210.000.000,00	
		-					359.614.561,00					210.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					5.040.000,00					5.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	5.040.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Laporan	5.000.000,00	KECAMATAN KURANJI
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					354.574.561,00					205.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	354.574.561,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Laporan	205.000.000,00	KECAMATAN KURANJI
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					771.844.800,00					1.021.400.000,00	
		-					771.844.800,00					1.021.400.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					302.640.000,00					150.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 Unit	31 Unit	31 Unit	302.640.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	31 Unit	150.000.000,00	KECAMATAN KURANJI
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel					4.750.000,00					13.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	10 Unit	4.750.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	10 Unit	13.000.000,00	KECAMATAN KURANJI
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					40.010.000,00					28.400.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	30 Unit	30 Unit	40.010.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	30 Unit	28.400.000,00	KECAMATAN KURANJI
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					424.444.800,00					800.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	10 Unit	10 Unit	424.444.800,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	10 Unit	800.000.000,00	KECAMATAN KURANJI
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					0,00					30.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	41 Unit	41 Unit	41 Unit	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	41 Unit	30.000.000,00	KECAMATAN KURANJI
249.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**					**119.952.000,00**					**95.000.000,00**	
		Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai SOP					***69.952.000,00***					***35.000.000,00***	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan					55.000.000,00					40.000.000,00	
		-					55.000.000,00					40.000.000,00	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					30.000.000,00					20.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	30.000.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Laporan	20.000.000,00	KECAMATAN KURANJI
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					25.000.000,00					20.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	25.000.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	2 Dokumen	20.000.000,00	KECAMATAN KURANJI
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan					25.000.000,00					20.000.000,00	
		-					25.000.000,00					20.000.000,00	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					25.000.000,00					20.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9 Laporan	9 Laporan	9 Laporan	25.000.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	9 Laporan	20.000.000,00	KECAMATAN KURANJI
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					39.952.000,00					35.000.000,00	
		-					39.952.000,00					35.000.000,00	
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha					25.000.000,00					20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	25.000.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Dokumen	20.000.000,00	KECAMATAN KURANJI
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					14.952.000,00					15.000.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	14.952.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Laporan	15.000.000,00	KECAMATAN KURANJI
250.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**1.998.801.500,00**					**8.832.482.204,00**	
		meningkatnya partisipasi swadaya masyarakat					***198.801.500,00***					***7.032.482.204,00***	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					1.998.801.500,00					8.832.482.204,00	
		-					1.998.801.500,00					8.832.482.204,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					78.200.000,00					200.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	78.200.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	10 Lembaga Kemasyarakatan	200.000.000,00	KECAMATAN KURANJI
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					1.500,00					6.640.482.204,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	38 Unit	38 Unit	38 Unit	1.500,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	38 Unit	6.640.482.204,00	KECAMATAN KURANJI
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					16.200.000,00					40.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	16.200.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	7 Pokmas / Ormas	40.000.000,00	KECAMATAN KURANJI
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan					104.400.000,00					152.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	9 Laporan	9 Laporan	9 Laporan	104.400.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	9 Laporan	152.000.000,00	KECAMATAN KURANJI
251.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**					**572.580.000,00**					**746.008.619,00**	
		Persentase urusan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai ketentuan					***572.580.000,00***					***746.008.619,00***	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					572.580.000,00					746.008.619,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		-					572.580.000,00					746.008.619,00	
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia					572.580.000,00					746.008.619,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	9 Laporan	9 Laporan	9 Laporan	572.580.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	9 Laporan	746.008.619,00	KECAMATAN KURANJI
252.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**					**3.271.601.000,00**					**3.245.200.000,00**	
		meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai ketentuan					***3.271.601.000,00***					***3.245.200.000,00***	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					3.271.601.000,00					3.245.200.000,00	
		-					3.271.601.000,00					3.245.200.000,00	
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal					3.253.601.000,00					3.195.200.000,00	
		Terlaksananya Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3.253.601.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	4 Kemudahan Berinvestasi Demi Terbukanya Lapangan Pekerjaan	3 Dokumen	3.195.200.000,00	KECAMATAN KURANJI
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					18.000.000,00					50.000.000,00	
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	18.000.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	12 Dokumen	50.000.000,00	KECAMATAN KURANJI
253.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**					**2.773.000.000,00**					**2.848.417.500,00**	
		meningkatnya pembinaan dan pengawasan					***2.773.000.000,00***					***2.848.417.500,00***	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					2.773.000.000,00					2.848.417.500,00	
		-					2.773.000.000,00					2.848.417.500,00	
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan					2.773.000.000,00					2.848.417.500,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	2.773.000.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	3 Mewujudkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	9 Dokumen	2.848.417.500,00	KECAMATAN KURANJI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		KELURAHAN AMPANG					**155.779.600,00**					**200.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**155.779.600,00**					**200.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**					**155.779.600,00**					**200.000.000,00**	
254.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**1.998.801.500,00**					**8.832.482.204,00**	
		meningkatnya partisipasi swadaya masyarakat					***155.779.600,00***					***100.000.000,00***	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					1.998.801.500,00					8.832.482.204,00	
		-					1.998.801.500,00					8.832.482.204,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					117.979.600,00					100.000.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	38 Unit	38 Unit	1 Unit	117.979.600,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Kuranji || Kelurahan Ampang || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	38 Unit	100.000.000,00	KELURAHAN AMPANG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					37.800.000,00					100.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	37.800.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Kuranji || Kelurahan Ampang || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	7 Pokmas / Ormas	100.000.000,00	KELURAHAN AMPANG
		KELURAHAN ANDURING					**177.335.000,00**					**200.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**177.335.000,00**					**200.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**					**177.335.000,00**					**200.000.000,00**	
255.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**1.998.801.500,00**					**8.832.482.204,00**	
		meningkatnya partisipasi swadaya masyarakat					***177.335.000,00***					***100.000.000,00***	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					1.998.801.500,00					8.832.482.204,00	
		-					1.998.801.500,00					8.832.482.204,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					117.935.000,00					100.000.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	38 Unit	38 Unit	1 Unit	117.935.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Kuranji || Kelurahan Anduring || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	38 Unit	100.000.000,00	KELURAHAN ANDURING
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					59.400.000,00					100.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	59.400.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Kuranji || Kelurahan Anduring || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	7 Pokmas / Ormas	100.000.000,00	KELURAHAN ANDURING
		KELURAHAN GUNUNG SARIK					**191.779.600,00**					**200.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**191.779.600,00**					**200.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**					**191.779.600,00**					**200.000.000,00**	
256.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**1.998.801.500,00**					**8.832.482.204,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		meningkatnya partisipasi swadaya masyarakat					***191.779.600,00***					***100.000.000,00***	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					1.998.801.500,00					8.832.482.204,00	
		-					1.998.801.500,00					8.832.482.204,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					117.979.600,00					100.000.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	38 Unit	38 Unit	1 Unit	117.979.600,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Kuranji || Kelurahan Gunung Sarik || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	38 Unit	100.000.000,00	KELURAHAN GUNUNG SARIK
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					73.800.000,00					100.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	73.800.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Kuranji || Kelurahan Gunung Sarik || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	7 Pokmas / Ormas	100.000.000,00	KELURAHAN GUNUNG SARIK
		KELURAHAN KALUMBUK					**206.735.000,00**					**200.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**206.735.000,00**					**200.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**					**206.735.000,00**					**200.000.000,00**	
257.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**1.998.801.500,00**					**8.832.482.204,00**	
		meningkatnya partisipasi swadaya masyarakat					***206.735.000,00***					***100.000.000,00***	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					1.998.801.500,00					8.832.482.204,00	
		-					1.998.801.500,00					8.832.482.204,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					117.935.000,00					100.000.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	38 Unit	38 Unit	1 Unit	117.935.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Kuranji || Kelurahan Kalumbuk || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	38 Unit	100.000.000,00	KELURAHAN KALUMBUK
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					88.800.000,00					100.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	88.800.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Kuranji || Kelurahan Kalumbuk || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	7 Pokmas / Ormas	100.000.000,00	KELURAHAN KALUMBUK
		KELURAHAN KORONG GADANG					**247.586.000,00**					**200.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**247.586.000,00**					**200.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**					**247.586.000,00**					**200.000.000,00**	
258.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**1.998.801.500,00**					**8.832.482.204,00**	
		meningkatnya partisipasi swadaya masyarakat					***247.586.000,00***					***100.000.000,00***	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					1.998.801.500,00					8.832.482.204,00	
		-					1.998.801.500,00					8.832.482.204,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					117.986.000,00					100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	38 Unit	38 Unit	1 Unit	117.986.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Kuranji || Kelurahan Korong Gadang || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	38 Unit	100.000.000,00	KELURAHAN KORONG GADANG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					129.600.000,00					100.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	129.600.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Kuranji || Kelurahan Korong Gadang || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	7 Pokmas / Ormas	100.000.000,00	KELURAHAN KORONG GADANG
		KELURAHAN KURANJI					**251.132.960,00**					**200.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**251.132.960,00**					**200.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**					**251.132.960,00**					**200.000.000,00**	
259.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**1.998.801.500,00**					**8.832.482.204,00**	
		meningkatnya partisipasi swadaya masyarakat					***251.132.960,00***					***100.000.000,00***	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					1.998.801.500,00					8.832.482.204,00	
		-					1.998.801.500,00					8.832.482.204,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					117.932.960,00					100.000.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	38 Unit	38 Unit	1 Unit	117.932.960,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Kuranji || Kelurahan Kuranji || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	38 Unit	100.000.000,00	KELURAHAN KURANJI
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					133.200.000,00					100.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	133.200.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Kuranji || Kelurahan Kuranji || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	7 Pokmas / Ormas	100.000.000,00	KELURAHAN KURANJI
		KELURAHAN LUBUK LINTAH					**162.979.600,00**					**200.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**162.979.600,00**					**200.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**					**162.979.600,00**					**200.000.000,00**	
260.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**1.998.801.500,00**					**8.832.482.204,00**	
		meningkatnya partisipasi swadaya masyarakat					***162.979.600,00***					***100.000.000,00***	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					1.998.801.500,00					8.832.482.204,00	
		-					1.998.801.500,00					8.832.482.204,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					117.979.600,00					100.000.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	38 Unit	38 Unit	1 Unit	117.979.600,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Kuranji || Kelurahan Lubuk Lintah || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	38 Unit	100.000.000,00	KELURAHAN LUBUK LINTAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					45.000.000,00					100.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	45.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Kuranji || Kelurahan Lubuk Lintah || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	7 Pokmas / Ormas	100.000.000,00	KELURAHAN LUBUK LINTAH
		KELURAHAN PASAR AMBACANG					**210.086.240,00**					**200.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**210.086.240,00**					**200.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**					**210.086.240,00**					**200.000.000,00**	
261.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**1.998.801.500,00**					**8.832.482.204,00**	
		meningkatnya partisipasi swadaya masyarakat					***210.086.240,00***					***100.000.000,00***	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					1.998.801.500,00					8.832.482.204,00	
		-					1.998.801.500,00					8.832.482.204,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					125.304.240,00					100.000.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	38 Unit	38 Unit	1 Unit	125.304.240,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Kuranji || Kelurahan Pasar Ambacang || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	38 Unit	100.000.000,00	KELURAHAN PASAR AMBACANG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					84.782.000,00					100.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	84.782.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Kuranji || Kelurahan Pasar Ambacang || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	7 Pokmas / Ormas	100.000.000,00	KELURAHAN PASAR AMBACANG
		KELURAHAN SUNGAI SAPIH					**196.586.000,00**					**200.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**196.586.000,00**					**200.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**					**196.586.000,00**					**200.000.000,00**	
262.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**1.998.801.500,00**					**8.832.482.204,00**	
		meningkatnya partisipasi swadaya masyarakat					***196.586.000,00***					***100.000.000,00***	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					1.998.801.500,00					8.832.482.204,00	
		-					1.998.801.500,00					8.832.482.204,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					117.986.000,00					100.000.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	38 Unit	38 Unit	1 Unit	117.986.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Kuranji || Kelurahan Sungai Sapih || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	5 Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	38 Unit	100.000.000,00	KELURAHAN SUNGAI SAPIH
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					78.600.000,00					100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	78.600.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Kuranji || Kelurahan Sungai Sapih || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	7 Pokmas / Ormas	100.000.000,00	KELURAHAN SUNGAI SAPIH
		KECAMATAN LUBUK BEGALUNG					**30.488.114.155,00**					**34.959.703.420,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**21.058.899.379,00**					**22.907.431.827,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**					**21.058.899.379,00**					**22.907.431.827,00**	
263.	**2.13.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**21.058.899.379,00**					**22.907.431.827,00**	
	2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					43.412.221,00					65.000.000,00	
		-					43.412.221,00					65.000.000,00	
	2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					6.668.300,00					7.500.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10000000 Dokumen	7500000 Dokumen	12 Dokumen	6.668.300,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	7500000 Dokumen	7.500.000,00	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
	2.13.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					5.254.621,00					7.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7500000 Dokumen	7500000 Dokumen	6 Dokumen	5.254.621,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	7500000 Dokumen	7.500.000,00	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
	2.13.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					5.072.100,00					7.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10000000 Dokumen	7500000 Dokumen	6 Dokumen	5.072.100,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	7500000 Dokumen	7.500.000,00	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
	2.13.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					4.144.300,00					7.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	7500000 Dokumen	7500000 Dokumen	12 Dokumen	4.144.300,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	7500000 Dokumen	7.500.000,00	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
	2.13.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					4.379.300,00					7.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	10000000 Dokumen	7637200 Dokumen	6 Dokumen	4.379.300,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	7500000 Dokumen	7.500.000,00	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
	2.13.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					8.371.800,00					17.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20000000 Laporan	10000000 Laporan	12 Laporan	8.371.800,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	17500000 Laporan	17.500.000,00	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
	2.13.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					9.521.800,00					10.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12000000 Laporan	10000000 Laporan	12 Laporan	9.521.800,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	10000000 Laporan	10.000.000,00	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					18.914.494.368,00					18.975.692.010,00	
		-					18.914.494.368,00					18.975.692.010,00	
	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					18.611.995.968,00					18.715.292.010,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18715737581 Orang/bulan	18715737581 Orang/bulan	106 Orang/bulan	18.611.995.968,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	18715737581 Orang/bulan	18.715.292.010,00	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
	2.13.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					302.498.400,00					260.400.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	260400000 Dokumen	260400000 Dokumen	9 Dokumen	302.498.400,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	260400000 Dokumen	260.400.000,00	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
	2.13.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					216.663.200,00					31.200.920,00	
		-					216.663.200,00					31.200.920,00	
	2.13.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					216.663.200,00					31.200.920,00	
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	311009400 Dokumen	311009400 Dokumen	12 Dokumen	216.663.200,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	311009400 Dokumen	31.200.920,00	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					214.291.650,00					154.783.500,00	
		-					214.291.650,00					154.783.500,00	
	2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor					18.012.900,00					8.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8000000 Paket	8000000 Paket	12 Paket	18.012.900,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	8000000 Paket	8.000.000,00	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					19.465.950,00					3.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3000000 Paket	2106700 Paket	15 Paket	19.465.950,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	3000000 Paket	3.000.000,00	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					60.172.500,00					52.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	52000000 Paket	52935000 Paket	15 Paket	60.172.500,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	52000000 Paket	52.000.000,00	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					27.084.700,00					42.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	42000000 Paket	42544200 Paket	12 Paket	27.084.700,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	42000000 Paket	42.000.000,00	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
	2.13.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					2.400.000,00					4.800.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4800000 Dokumen	4800000 Dokumen	12 Dokumen	2.400.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	4800000 Dokumen	4.800.000,00	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
	2.13.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu					10.211.500,00					34.986.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	34986000 Laporan	34986000 Laporan	2400 Laporan	10.211.500,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	34986000 Laporan	34.986.000,00	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					71.946.500,00					4.998.700,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	49987000 Laporan	49987000 Laporan	12 Laporan	71.946.500,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	49987000 Laporan	4.998.700,00	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
	2.13.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					4.997.600,00					4.998.800,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4998800 Dokumen	4998800 Dokumen	12 Dokumen	4.997.600,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	4998800 Dokumen	4.998.800,00	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
	2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					385.818.440,00					650.000.000,00	
		-					385.818.440,00					650.000.000,00	
	2.13.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					0,00					500.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	-	1 Unit	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	-	500.000.000,00	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
	2.13.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					53.115.200,00					50.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50000000 Unit	83182800 Unit	5 Unit	53.115.200,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	0 Unit	50.000.000,00	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
	2.13.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					332.703.240,00					100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100000000 Unit	163852305 Unit	12 Unit	332.703.240,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	100000000 Unit	100.000.000,00	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					193.163.400,00					203.000.000,00	
		-					193.163.400,00					203.000.000,00	
	2.13.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					3.994.200,00					3.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3000000 Laporan	3994200 Laporan	12 Laporan	3.994.200,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	3000000 Laporan	3.000.000,00	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					189.169.200,00					200.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	200000000 Laporan	199998000 Laporan	12 Laporan	189.169.200,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	200000000 Laporan	200.000.000,00	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.091.056.100,00					2.827.755.397,00	
		-					1.091.056.100,00					2.827.755.397,00	
	2.13.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					225.740.000,00					218.361.900,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	218361900 Unit	218361900 Unit	40 Unit	225.740.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	218361900 Unit	218.361.900,00	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
	2.13.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel					0,00					2.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2000000 Unit	2000000 Unit	5 Unit	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	2000000 Unit	2.000.000,00	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
	2.13.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					24.511.600,00					26.660.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	26660000 Unit	26660000 Unit	15 Unit	24.511.600,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	26660000 Unit	26.660.000,00	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
	2.13.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					747.130.900,00					2.028.072.797,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2340386935 Unit	2165560592 Unit	4 Unit	747.130.900,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1401135407 Unit	2.028.072.797,00	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
	2.13.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					17.080.000,00					525.660.700,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25660700 Unit	25660700 Unit	6 Unit	17.080.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	25660700 Unit	525.660.700,00	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
	2.13.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					76.593.600,00					27.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	15 Unit	76.593.600,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	-	27.000.000,00	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**9.429.214.776,00**					**12.052.271.593,00**	
	7.01	**KECAMATAN**					**9.429.214.776,00**					**12.052.271.593,00**	
264.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**					**146.093.276,00**					**729.473.220,00**	
		meningkatnya pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai SOP					***146.093.276,00***					***729.473.220,00***	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan					102.661.276,00					411.200.000,00	
		-					102.661.276,00					411.200.000,00	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					11.872.500,00					95.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	95000000 Laporan	75342500 Laporan	12 Laporan	11.872.500,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	95000000 Laporan	95.000.000,00	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					90.788.776,00					316.200.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	316200000 Dokumen	316200000 Dokumen	12 Dokumen	90.788.776,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	316200000 Dokumen	316.200.000,00	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan					33.757.000,00					258.273.220,00	
		-					33.757.000,00					258.273.220,00	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					33.757.000,00					258.273.220,00	
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	430319479 Laporan	50000000 Laporan	12 Laporan	33.757.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	294746881 Laporan	258.273.220,00	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					9.675.000,00					60.000.000,00	
		-					9.675.000,00					60.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha					9.675.000,00					60.000.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	60000000 Dokumen	60000000 Dokumen	12 Dokumen	9.675.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	60000000 Dokumen	60.000.000,00	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
265.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**4.256.517.800,00**					**5.679.053.573,00**	
		meningkatnya partisipasi swadaya masyarakat					***1.285.519.000,00***					***2.654.053.573,00***	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					4.236.517.800,00					5.654.053.573,00	
		-					4.236.517.800,00					5.654.053.573,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					171.201.100,00					175.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	175000000 Lembaga Kemasyarakatan	172063400 Lembaga Kemasyarakatan	12 Lembaga Kemasyarakatan	171.201.100,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	175000000 Lembaga Kemasyarakatan	175.000.000,00	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					295.541.800,00					2.007.053.573,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9559145971 Unit	7547674900 Unit	15 Unit	295.541.800,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	8017554776 Unit	2.007.053.573,00	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					801.984.600,00					407.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	407000000 Pokmas / Ormas	406263500 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	801.984.600,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	407000000 Pokmas / Ormas	407.000.000,00	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan					16.791.500,00					65.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	65000000 Laporan	64999800 Laporan	12 Laporan	16.791.500,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	65000000 Laporan	65.000.000,00	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan					20.000.000,00					25.000.000,00	
		-					20.000.000,00					25.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat					20.000.000,00					25.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	-	-	2 Laporan	20.000.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	-	25.000.000,00	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
266.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**					**931.389.700,00**					**1.357.672.300,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Persentase urusan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai ketentuan					***931.389.700,00***					***1.357.672.300,00***	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					931.389.700,00					1.357.672.300,00	
		-					931.389.700,00					1.357.672.300,00	
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia					931.389.700,00					1.357.672.300,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1677879312 Laporan	1081104400 Laporan	15 Laporan	931.389.700,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1425555915 Laporan	1.357.672.300,00	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
267.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**					**3.598.248.000,00**					**3.751.471.900,00**	
		meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai ketentuan					***3.598.248.000,00***					***3.751.471.900,00***	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					3.598.248.000,00					3.751.471.900,00	
		-					3.598.248.000,00					3.751.471.900,00	
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal					3.573.220.800,00					3.686.471.900,00	
		Terlaksananya Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	3225711885 Dokumen	3849314100 Dokumen	600 Dokumen	3.573.220.800,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	2730846971 Dokumen	3.686.471.900,00	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					25.027.200,00					65.000.000,00	
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	65000000 Dokumen	65000000 Dokumen	3 Dokumen	25.027.200,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	650000000 Dokumen	65.000.000,00	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
268.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**					**3.447.964.800,00**					**3.534.600.600,00**	
		meningkatnya pembinaan dan pengawasan					***3.447.964.800,00***					***3.534.600.600,00***	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					3.447.964.800,00					3.534.600.600,00	
		-					3.447.964.800,00					3.534.600.600,00	
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan					3.447.964.800,00					3.534.600.600,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	-	-	4 Dokumen	3.447.964.800,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	-	3.534.600.600,00	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
		KELURAHAN BANUARAN NAN XX					**198.020.000,00**					**195.115.600,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**198.020.000,00**					**195.115.600,00**	
	7.01	**KECAMATAN**					**198.020.000,00**					**195.115.600,00**	
269.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**4.256.517.800,00**					**5.679.053.573,00**	
		meningkatnya partisipasi swadaya masyarakat					***198.020.000,00***					***195.115.600,00***	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					4.236.517.800,00					5.654.053.573,00	
		-					4.236.517.800,00					5.654.053.573,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					135.020.000,00					143.515.600,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9559145971 Unit	7547674900 Unit	3 Unit	135.020.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Lubuk Begalung || Kelurahan Banuaran Nan XX || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	8017554776 Unit	143.515.600,00	KELURAHAN BANUARAN NAN XX
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					63.000.000,00					51.600.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	407000000 Pokmas / Ormas	406263500 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	63.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Lubuk Begalung || Kelurahan Banuaran Nan XX || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	407000000 Pokmas / Ormas	51.600.000,00	KELURAHAN BANUARAN NAN XX
		KELURAHAN BATUNG TABA NAN XX					**201.620.000,00**					**246.418.865,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**201.620.000,00**					**246.418.865,00**	
	7.01	**KECAMATAN**					**201.620.000,00**					**246.418.865,00**	
270.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**4.256.517.800,00**					**5.679.053.573,00**	
		meningkatnya partisipasi swadaya masyarakat					***201.620.000,00***					***246.418.865,00***	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					4.236.517.800,00					5.654.053.573,00	
		-					4.236.517.800,00					5.654.053.573,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					135.020.000,00					192.418.865,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9559145971 Unit	7547674900 Unit	3 Unit	135.020.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Lubuk Begalung || Kelurahan Batung Taba Nan XX || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	8017554776 Unit	192.418.865,00	KELURAHAN BATUNG TABA NAN XX
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					66.600.000,00					54.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	407000000 Pokmas / Ormas	406263500 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	66.600.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Lubuk Begalung || Kelurahan Batung Taba Nan XX || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	407000000 Pokmas / Ormas	54.000.000,00	KELURAHAN BATUNG TABA NAN XX

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		KELURAHAN CENGKEH NAN XX					**171.032.000,00**					**169.290.145,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**171.032.000,00**					**169.290.145,00**	
	7.01	**KECAMATAN**					**171.032.000,00**					**169.290.145,00**	
271.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**4.256.517.800,00**					**5.679.053.573,00**	
		meningkatnya partisipasi swadaya masyarakat					***171.032.000,00***					***169.290.145,00***	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					4.236.517.800,00					5.654.053.573,00	
		-					4.236.517.800,00					5.654.053.573,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					138.632.000,00					143.490.145,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9559145971 Unit	7547674900 Unit	3 Unit	138.632.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Lubuk Begalung || Kelurahan Cangkeh Nan XX || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	8017554776 Unit	143.490.145,00	KELURAHAN CENGKEH NAN XX
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					32.400.000,00					25.800.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	407000000 Pokmas / Ormas	406263500 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	32.400.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Lubuk Begalung || Kelurahan Cangkeh Nan XX || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	407000000 Pokmas / Ormas	25.800.000,00	KELURAHAN CENGKEH NAN XX
		KELURAHAN GAUNG,TELUK NIBUNG,SUNGAI BEREMAS (GATES) NAN XX					**189.020.000,00**					**194.492.848,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**189.020.000,00**					**194.492.848,00**	
	7.01	**KECAMATAN**					**189.020.000,00**					**194.492.848,00**	
272.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**4.256.517.800,00**					**5.679.053.573,00**	
		meningkatnya partisipasi swadaya masyarakat					***189.020.000,00***					***194.492.848,00***	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					4.236.517.800,00					5.654.053.573,00	
		-					4.236.517.800,00					5.654.053.573,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					135.020.000,00					150.692.848,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9559145971 Unit	7547674900 Unit	3 Unit	135.020.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Lubuk Begalung || Kelurahan Gates Nan XX || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	8017554776 Unit	150.692.848,00	KELURAHAN GAUNG,TELUK NIBUNG,SUNGAI BEREMAS (GATES) NAN XX
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					54.000.000,00					43.800.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	407000000 Pokmas / Ormas	406263500 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	54.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Lubuk Begalung || Kelurahan Gates Nan XX || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	407000000 Pokmas / Ormas	43.800.000,00	KELURAHAN GAUNG,TELUK NIBUNG,SUNGAI BEREMAS (GATES) NAN XX
		KELURAHAN GURUN LAWEH NAN XX					**173.300.000,00**					**177.506.595,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**173.300.000,00**					**177.506.595,00**	
	7.01	**KECAMATAN**					**173.300.000,00**					**177.506.595,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
273.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**4.256.517.800,00**					**5.679.053.573,00**	
		meningkatnya partisipasi swadaya masyarakat					***173.300.000,00***					***177.506.595,00***	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					4.236.517.800,00					5.654.053.573,00	
		-					4.236.517.800,00					5.654.053.573,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					132.500.000,00					144.506.595,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9559145971 Unit	7547674900 Unit	3 Unit	132.500.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Lubuk Begalung || Kelurahan Gurun Laweh Nan XX || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	8017554776 Unit	144.506.595,00	KELURAHAN GURUN LAWEH NAN XX
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					40.800.000,00					33.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	407000000 Pokmas / Ormas	406263500 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	40.800.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Lubuk Begalung || Kelurahan Gurun Laweh Nan XX || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	407000000 Pokmas / Ormas	33.000.000,00	KELURAHAN GURUN LAWEH NAN XX
		KELURAHAN KAMPUNG BARU NAN XX					**188.716.000,00**					**195.531.828,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**188.716.000,00**					**195.531.828,00**	
	7.01	**KECAMATAN**					**188.716.000,00**					**195.531.828,00**	
274.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**4.256.517.800,00**					**5.679.053.573,00**	
		meningkatnya partisipasi swadaya masyarakat					***188.716.000,00***					***195.531.828,00***	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					4.236.517.800,00					5.654.053.573,00	
		-					4.236.517.800,00					5.654.053.573,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					134.116.000,00					151.131.828,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9559145971 Unit	7547674900 Unit	3 Unit	134.116.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Lubuk Begalung || Kelurahan Kampung Baru Nan XX || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	8017554776 Unit	151.131.828,00	KELURAHAN KAMPUNG BARU NAN XX
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					54.600.000,00					44.400.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	407000000 Pokmas / Ormas	406263500 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	54.600.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Lubuk Begalung || Kelurahan Kampung Baru Nan XX || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	407000000 Pokmas / Ormas	44.400.000,00	KELURAHAN KAMPUNG BARU NAN XX
		KELURAHAN KAMPUNG JUA NAN XX					**168.620.000,00**					**170.400.100,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**168.620.000,00**					**170.400.100,00**	
	7.01	**KECAMATAN**					**168.620.000,00**					**170.400.100,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
275.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**4.256.517.800,00**					**5.679.053.573,00**	
		meningkatnya partisipasi swadaya masyarakat					***168.620.000,00***					***170.400.100,00***	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					4.236.517.800,00					5.654.053.573,00	
		-					4.236.517.800,00					5.654.053.573,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					135.020.000,00					143.400.100,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9559145971 Unit	7547674900 Unit	3 Unit	135.020.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Lubuk Begalung || Kelurahan Kampung Jua Nan XX || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	8017554776 Unit	143.400.100,00	KELURAHAN KAMPUNG JUA NAN XX
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					33.600.000,00					27.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	407000000 Pokmas / Ormas	406263500 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	33.600.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Lubuk Begalung || Kelurahan Kampung Jua Nan XX || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	407000000 Pokmas / Ormas	27.000.000,00	KELURAHAN KAMPUNG JUA NAN XX
		KELURAHAN KOTO BARU NAN XX					**182.420.000,00**					**187.432.228,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**182.420.000,00**					**187.432.228,00**	
	7.01	**KECAMATAN**					**182.420.000,00**					**187.432.228,00**	
276.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**4.256.517.800,00**					**5.679.053.573,00**	
		meningkatnya partisipasi swadaya masyarakat					***182.420.000,00***					***187.432.228,00***	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					4.236.517.800,00					5.654.053.573,00	
		-					4.236.517.800,00					5.654.053.573,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					135.020.000,00					145.432.228,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9559145971 Unit	7547674900 Unit	3 Unit	135.020.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Lubuk Begalung || Kelurahan Koto Baru Nan XX || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	8017554776 Unit	145.432.228,00	KELURAHAN KOTO BARU NAN XX
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					47.400.000,00					42.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	407000000 Pokmas / Ormas	406263500 Pokmas / Ormas	0 Pokmas / Ormas	47.400.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Lubuk Begalung || Kelurahan Koto Baru Nan XX || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	407000000 Pokmas / Ormas	42.000.000,00	KELURAHAN KOTO BARU NAN XX
		KELURAHAN LUBUK BEGALUNG NAN XX					**181.820.000,00**					**224.869.798,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**181.820.000,00**					**224.869.798,00**	
	7.01	**KECAMATAN**					**181.820.000,00**					**224.869.798,00**	
277.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**4.256.517.800,00**					**5.679.053.573,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		meningkatnya partisipasi swadaya masyarakat					***181.820.000,00***					***224.869.798,00***	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					4.236.517.800,00					5.654.053.573,00	
		-					4.236.517.800,00					5.654.053.573,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					135.020.000,00					187.069.798,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9559145971 Unit	7547674900 Unit	3 Unit	135.020.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Lubuk Begalung || Kelurahan Lubuk Begalung Nan XX || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	8017554776 Unit	187.069.798,00	KELURAHAN LUBUK BEGALUNG NAN XX
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					46.800.000,00					37.800.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	407000000 Pokmas / Ormas	406263500 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	46.800.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Lubuk Begalung || Kelurahan Lubuk Begalung Nan XX || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	407000000 Pokmas / Ormas	37.800.000,00	KELURAHAN LUBUK BEGALUNG NAN XX
		KELURAHAN PENGAMBIRAN, AMPALU NAN XX					**277.213.000,00**					**307.174.183,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**277.213.000,00**					**307.174.183,00**	
	7.01	**KECAMATAN**					**277.213.000,00**					**307.174.183,00**	
278.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**4.256.517.800,00**					**5.679.053.573,00**	
		meningkatnya partisipasi swadaya masyarakat					***277.213.000,00***					***307.174.183,00***	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					4.236.517.800,00					5.654.053.573,00	
		-					4.236.517.800,00					5.654.053.573,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					136.213.000,00					190.774.183,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9559145971 Unit	7547674900 Unit	3 Unit	136.213.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Lubuk Begalung || Kelurahan Pagambiran Ampalu Nan XX || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	8017554776 Unit	190.774.183,00	KELURAHAN PENGAMBIRAN, AMPALU NAN XX
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					141.000.000,00					116.400.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	407000000 Pokmas / Ormas	406263500 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	141.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Lubuk Begalung || Kelurahan Pagambiran Ampalu Nan XX || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	407000000 Pokmas / Ormas	116.400.000,00	KELURAHAN PENGAMBIRAN, AMPALU NAN XX
		KELURAHAN PAMPANGAN NAN XX					**237.416.000,00**					**227.298.564,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**237.416.000,00**					**227.298.564,00**	
	7.01	**KECAMATAN**					**237.416.000,00**					**227.298.564,00**	
279.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**4.256.517.800,00**					**5.679.053.573,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		meningkatnya partisipasi swadaya masyarakat					***237.416.000,00***					***227.298.564,00***	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					4.236.517.800,00					5.654.053.573,00	
		-					4.236.517.800,00					5.654.053.573,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					146.816.000,00					150.498.564,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9559145971 Unit	7547674900 Unit	3 Unit	146.816.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Lubuk Begalung || Kelurahan Pampangan Nan XX || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	8017554776 Unit	150.498.564,00	KELURAHAN PAMPANGAN NAN XX
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					90.600.000,00					76.800.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	407000000 Pokmas / Ormas	406263500 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	90.600.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Lubuk Begalung || Kelurahan Pampangan Nan XX || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	407000000 Pokmas / Ormas	76.800.000,00	KELURAHAN PAMPANGAN NAN XX
		KELURAHAN PARAK LAWEH, PULAU AIA NAN XX					**218.419.800,00**					**213.928.442,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**218.419.800,00**					**213.928.442,00**	
	7.01	**KECAMATAN**					**218.419.800,00**					**213.928.442,00**	
280.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**4.256.517.800,00**					**5.679.053.573,00**	
		meningkatnya partisipasi swadaya masyarakat					***218.419.800,00***					***213.928.442,00***	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					4.236.517.800,00					5.654.053.573,00	
		-					4.236.517.800,00					5.654.053.573,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					135.019.800,00					145.528.442,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9559145971 Unit	7547674900 Unit	3 Unit	135.019.800,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Lubuk Begalung || Kelurahan Parak Laweh Pulau Aia Nan XX || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	8017554776 Unit	145.528.442,00	KELURAHAN PARAK LAWEH, PULAU AIA NAN XX
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					83.400.000,00					68.400.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	407000000 Pokmas / Ormas	406263500 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	83.400.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Lubuk Begalung || Kelurahan Parak Laweh Pulau Aia Nan XX || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	407000000 Pokmas / Ormas	68.400.000,00	KELURAHAN PARAK LAWEH, PULAU AIA NAN XX
		KELURAHAN PITAMEH TANJUNGSABA NAN XX					**212.342.000,00**					**194.099.021,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**212.342.000,00**					**194.099.021,00**	
	7.01	**KECAMATAN**					**212.342.000,00**					**194.099.021,00**	
281.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**4.256.517.800,00**					**5.679.053.573,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		meningkatnya partisipasi swadaya masyarakat					***212.342.000,00***					***194.099.021,00***	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					4.236.517.800,00					5.654.053.573,00	
		-					4.236.517.800,00					5.654.053.573,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					150.542.000,00					146.099.021,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9559145971 Unit	7547674900 Unit	3 Unit	150.542.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Lubuk Begalung || Kelurahan Tanjung Saba Pitamen Nan XX || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	8017554776 Unit	146.099.021,00	KELURAHAN PITAMEH TANJUNGSABA NAN XX
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					61.800.000,00					48.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	407000000 Pokmas / Ormas	406263500 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	61.800.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Lubuk Begalung || Kelurahan Tanjung Saba Pitamen Nan XX || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	407000000 Pokmas / Ormas	48.000.000,00	KELURAHAN PITAMEH TANJUNGSABA NAN XX
		KELURAHAN TANAH SIRAH, PIAI NAN XX					**190.220.000,00**					**190.629.226,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**190.220.000,00**					**190.629.226,00**	
	7.01	**KECAMATAN**					**190.220.000,00**					**190.629.226,00**	
282.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**4.256.517.800,00**					**5.679.053.573,00**	
		meningkatnya partisipasi swadaya masyarakat					***190.220.000,00***					***190.629.226,00***	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					4.236.517.800,00					5.654.053.573,00	
		-					4.236.517.800,00					5.654.053.573,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					135.020.000,00					145.629.226,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9559145971 Unit	7547674900 Unit	3 Unit	135.020.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Lubuk Begalung || Kelurahan Tanah Sirah Piai Nan XX || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	8017554776 Unit	145.629.226,00	KELURAHAN TANAH SIRAH, PIAI NAN XX
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					55.200.000,00					45.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	407000000 Pokmas / Ormas	406263500 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	55.200.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Lubuk Begalung || Kelurahan Tanah Sirah Piai Nan XX || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	407000000 Pokmas / Ormas	45.000.000,00	KELURAHAN TANAH SIRAH, PIAI NAN XX
		KELURAHAN TANJUNG AUR NAN XX					**160.820.000,00**					**105.812.557,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**160.820.000,00**					**105.812.557,00**	
	7.01	**KECAMATAN**					**160.820.000,00**					**105.812.557,00**	
283.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**4.256.517.800,00**					**5.679.053.573,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		meningkatnya partisipasi swadaya masyarakat					***160.820.000,00***					***105.812.557,00***	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					4.236.517.800,00					5.654.053.573,00	
		-					4.236.517.800,00					5.654.053.573,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					135.020.000,00					85.412.557,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9559145971 Unit	7547674900 Unit	3 Unit	135.020.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Lubuk Begalung || Kelurahan Tanjung Aua Nan XX || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	8017554776 Unit	85.412.557,00	KELURAHAN TANJUNG AUR NAN XX
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					25.800.000,00					20.400.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	407000000 Pokmas / Ormas	406263500 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	25.800.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Lubuk Begalung || Kelurahan Tanjung Aua Nan XX || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	407000000 Pokmas / Ormas	20.400.000,00	KELURAHAN TANJUNG AUR NAN XX
		KECAMATAN LUBUK KILANGAN					**15.627.595.803,00**					**18.524.995.200,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**15.627.595.803,00**					**18.524.995.200,00**	
	7.01	**KECAMATAN**					**15.627.595.803,00**					**18.524.995.200,00**	
284.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**11.667.440.903,00**					**12.295.183.528,00**	
		Meningkatnya efektivitas dan efesiensi pelaksanaan urusan pemerintah daerah					***11.667.440.903,00***					***12.280.183.528,00***	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					36.109.790,00					45.000.000,00	
		-					36.109.790,00					45.000.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					7.671.600,00					10.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	7.671.600,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	2 Dokumen	10.000.000,00	KECAMATAN LUBUK KILANGAN
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					4.355.990,00					5.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.355.990,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Dokumen	5.000.000,00	KECAMATAN LUBUK KILANGAN
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					4.626.000,00					5.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.626.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Dokumen	5.000.000,00	KECAMATAN LUBUK KILANGAN
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					4.772.400,00					5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.772.400,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Dokumen	5.000.000,00	KECAMATAN LUBUK KILANGAN
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					4.639.000,00					5.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.639.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Dokumen	5.000.000,00	KECAMATAN LUBUK KILANGAN
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					10.044.800,00					15.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	10.044.800,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Laporan	15.000.000,00	KECAMATAN LUBUK KILANGAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					10.626.315.113,00					11.126.562.647,00	
		-					10.626.315.113,00					11.126.562.647,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					10.398.555.113,00					10.915.002.647,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	62 Orang/bulan	62 Orang/bulan	68 Orang/bulan	10.398.555.113,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	62 Orang/bulan	10.915.002.647,00	KECAMATAN LUBUK KILANGAN
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					227.760.000,00					211.560.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	227.760.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Dokumen	211.560.000,00	KECAMATAN LUBUK KILANGAN
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					162.497.400,00					259.174.500,00	
		-					162.497.400,00					259.174.500,00	
	7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					162.497.400,00					259.174.500,00	
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	162.497.400,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Dokumen	259.174.500,00	KECAMATAN LUBUK KILANGAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					337.981.200,00					531.036.381,00	
		-					337.981.200,00					531.036.381,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor					4.495.000,00					7.997.200,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	4.495.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Paket	7.997.200,00	KECAMATAN LUBUK KILANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					166.740.000,00					219.292.732,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	3 Paket	8 Paket	166.740.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	10 Paket	219.292.732,00	KECAMATAN LUBUK KILANGAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					37.887.700,00					41.997.500,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	26 Paket	26 Paket	26 Paket	37.887.700,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	26 Paket	41.997.500,00	KECAMATAN LUBUK KILANGAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					9.987.500,00					17.276.949,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	10 Paket	9.987.500,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	10 Paket	17.276.949,00	KECAMATAN LUBUK KILANGAN
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					7.500.000,00					19.890.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1980 Dokumen	1980 Dokumen	1980 Dokumen	7.500.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1980 Dokumen	19.890.000,00	KECAMATAN LUBUK KILANGAN
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu					10.375.000,00					13.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	10.375.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Laporan	13.000.000,00	KECAMATAN LUBUK KILANGAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					100.996.000,00					211.582.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100.996.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Laporan	211.582.000,00	KECAMATAN LUBUK KILANGAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					112.485.600,00					12.974.200,00	
		-					112.485.600,00					12.974.200,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					2.520.000,00					995.400,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	2.520.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Laporan	995.400,00	KECAMATAN LUBUK KILANGAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					109.965.600,00					11.978.800,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	109.965.600,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Laporan	11.978.800,00	KECAMATAN LUBUK KILANGAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					392.051.800,00					320.435.800,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		-					392.051.800,00					320.435.800,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					191.440.000,00					14.358.400,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit	27 Unit	27 Unit	191.440.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	27 Unit	14.358.400,00	KECAMATAN LUBUK KILANGAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					29.620.000,00					14.590.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit	20 Unit	29.620.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	20 Unit	14.590.000,00	KECAMATAN LUBUK KILANGAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					170.991.800,00					291.487.400,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	170.991.800,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Unit	291.487.400,00	KECAMATAN LUBUK KILANGAN
285.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**					**40.395.500,00**					**97.092.593,00**	
		meningkatnya pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai SOP					***33.668.000,00***					***97.092.593,00***	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan					22.490.500,00					58.092.593,00	
		-					22.490.500,00					58.092.593,00	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					15.763.000,00					18.092.593,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	15.763.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Laporan	18.092.593,00	KECAMATAN LUBUK KILANGAN
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					6.727.500,00					40.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	6.727.500,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Dokumen	40.000.000,00	KECAMATAN LUBUK KILANGAN
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan					6.727.500,00					26.000.000,00	
		-					6.727.500,00					26.000.000,00	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					6.727.500,00					26.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6.727.500,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Laporan	26.000.000,00	KECAMATAN LUBUK KILANGAN
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					11.177.500,00					13.000.000,00	
		-					11.177.500,00					13.000.000,00	
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha					11.177.500,00					13.000.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	11.177.500,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Dokumen	13.000.000,00	KECAMATAN LUBUK KILANGAN
286.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**1.484.787.500,00**					**2.301.322.919,00**	
		meningkatnya partisipasi swadaya masyarakat					***84.787.500,00***					***2.301.322.919,00***	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					1.484.787.500,00					2.301.322.919,00	
		-					1.484.787.500,00					2.301.322.919,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					54.000.000,00					15.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	54.000.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	8 Lembaga Kemasyarakatan	15.000.000,00	KECAMATAN LUBUK KILANGAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					0,00					1.900.000.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	21 Unit	21 Unit	28 Unit	0,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	21 Unit	1.900.000.000,00	KECAMATAN LUBUK KILANGAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					30.787.500,00					386.322.919,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	30.787.500,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	8 Pokmas / Ormas	386.322.919,00	KECAMATAN LUBUK KILANGAN
287.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**					**438.340.200,00**					**566.577.321,00**	
		Persentase urusan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai ketentuan					***438.340.200,00***					***566.577.321,00***	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					438.340.200,00					566.577.321,00	
		-					438.340.200,00					566.577.321,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia					438.340.200,00					566.577.321,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	438.340.200,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Laporan	566.577.321,00	KECAMATAN LUBUK KILANGAN
288.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**					**2.096.631.900,00**					**1.836.595.189,00**	
		meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai ketentuan					***2.096.631.900,00***					***1.836.595.189,00***	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					2.096.631.900,00					1.836.595.189,00	
		-					2.096.631.900,00					1.836.595.189,00	
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal					2.035.161.400,00					1.786.595.189,00	
		Terlaksananya Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.035.161.400,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Dokumen	1.786.595.189,00	KECAMATAN LUBUK KILANGAN
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					61.470.500,00					50.000.000,00	
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	61.470.500,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Dokumen	50.000.000,00	KECAMATAN LUBUK KILANGAN
289.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**					**1.299.999.800,00**					**1.428.223.650,00**	
		meningkatnya pembinaan dan pengawasan					***1.299.999.800,00***					***1.428.223.650,00***	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					1.299.999.800,00					1.428.223.650,00	
		-					1.299.999.800,00					1.428.223.650,00	
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan					1.299.999.800,00					1.428.223.650,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.299.999.800,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Dokumen	1.428.223.650,00	KECAMATAN LUBUK KILANGAN
		KELURAHAN BANDA BUEK					**262.830.770,00**					**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**262.830.770,00**					**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**					**262.830.770,00**					**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
290.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**1.484.787.500,00**					**2.301.322.919,00**	
		meningkatnya partisipasi swadaya masyarakat					***262.830.770,00***					***0,00***	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					1.484.787.500,00					2.301.322.919,00	
		-					1.484.787.500,00					2.301.322.919,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					158.430.770,00					0,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	21 Unit	21 Unit	4 Unit	158.430.770,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Lubuk Kilangan || Kelurahan Bandar Buat || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	21 Unit	0,00	KELURAHAN BANDA BUEK
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					104.400.000,00					0,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	104.400.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Lubuk Kilangan || Kelurahan Bandar Buat || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	8 Pokmas / Ormas	0,00	KELURAHAN BANDA BUEK
		KELURAHAN BATU GADANG					**194.430.770,00**					**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**194.430.770,00**					**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**					**194.430.770,00**					**0,00**	
291.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**1.484.787.500,00**					**2.301.322.919,00**	
		meningkatnya partisipasi swadaya masyarakat					***194.430.770,00***					***0,00***	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					1.484.787.500,00					2.301.322.919,00	
		-					1.484.787.500,00					2.301.322.919,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					158.430.770,00					0,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	21 Unit	21 Unit	4 Unit	158.430.770,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Lubuk Kilangan || Kelurahan Batu Gadang || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	21 Unit	0,00	KELURAHAN BATU GADANG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					36.000.000,00					0,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	36.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Lubuk Kilangan || Kelurahan Batu Gadang || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	8 Pokmas / Ormas	0,00	KELURAHAN BATU GADANG
		KELURAHAN BARINGIN					**126.015.380,00**					**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**126.015.380,00**					**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**					**126.015.380,00**					**0,00**	
292.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**1.484.787.500,00**					**2.301.322.919,00**	
		meningkatnya partisipasi swadaya masyarakat					***126.015.380,00***					***0,00***	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					1.484.787.500,00					2.301.322.919,00	
		-					1.484.787.500,00					2.301.322.919,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					109.215.380,00					0,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	21 Unit	21 Unit	4 Unit	109.215.380,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Lubuk Kilangan || Kelurahan Baringin || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	21 Unit	0,00	KELURAHAN BARINGIN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					16.800.000,00					0,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	16.800.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Lubuk Kilangan || Kelurahan Baringin || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	8 Pokmas / Ormas	0,00	KELURAHAN BARINGIN
		KELURAHAN INDARUNG					**226.230.770,00**					**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**226.230.770,00**					**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**					**226.230.770,00**					**0,00**	
293.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**1.484.787.500,00**					**2.301.322.919,00**	
		meningkatnya partisipasi swadaya masyarakat					***226.230.770,00***					***0,00***	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					1.484.787.500,00					2.301.322.919,00	
		-					1.484.787.500,00					2.301.322.919,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					158.430.770,00					0,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	21 Unit	21 Unit	4 Unit	158.430.770,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Lubuk Kilangan || Kelurahan Indarung || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	21 Unit	0,00	KELURAHAN INDARUNG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					67.800.000,00					0,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	67.800.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Lubuk Kilangan || Kelurahan Indarung || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	8 Pokmas / Ormas	0,00	KELURAHAN INDARUNG
		KELURAHAN KOTO LALANG					**213.630.770,00**					**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**213.630.770,00**					**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**					**213.630.770,00**					**0,00**	
294.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**1.484.787.500,00**					**2.301.322.919,00**	
		meningkatnya partisipasi swadaya masyarakat					***213.630.770,00***					***0,00***	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					1.484.787.500,00					2.301.322.919,00	
		-					1.484.787.500,00					2.301.322.919,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					158.430.770,00					0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	21 Unit	21 Unit	4 Unit	158.430.770,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Lubuk Kilangan || Kelurahan Koto Lalang || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	21 Unit	0,00	KELURAHAN KOTO LALANG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					55.200.000,00					0,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	55.200.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Lubuk Kilangan || Kelurahan Koto Lalang || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	8 Pokmas / Ormas	0,00	KELURAHAN KOTO LALANG
		KELURAHAN PADANG BESI					**201.630.770,00**					**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**201.630.770,00**					**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**					**201.630.770,00**					**0,00**	
295.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**1.484.787.500,00**					**2.301.322.919,00**	
		meningkatnya partisipasi swadaya masyarakat					***201.630.770,00***					***0,00***	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					1.484.787.500,00					2.301.322.919,00	
		-					1.484.787.500,00					2.301.322.919,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					158.430.770,00					0,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	21 Unit	21 Unit	4 Unit	158.430.770,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Lubuk Kilangan || Kelurahan Padang Besi || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	21 Unit	0,00	KELURAHAN PADANG BESI
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					43.200.000,00					0,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	43.200.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Lubuk Kilangan || Kelurahan Padang Besi || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	8 Pokmas / Ormas	0,00	KELURAHAN PADANG BESI
		KELURAHAN TARANTANG					**175.230.770,00**					**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**175.230.770,00**					**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**					**175.230.770,00**					**0,00**	
296.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**1.484.787.500,00**					**2.301.322.919,00**	
		meningkatnya partisipasi swadaya masyarakat					***175.230.770,00***					***0,00***	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					1.484.787.500,00					2.301.322.919,00	
		-					1.484.787.500,00					2.301.322.919,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					158.430.770,00					0,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	21 Unit	21 Unit	4 Unit	158.430.770,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Lubuk Kilangan || Kelurahan Tarantang || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	21 Unit	0,00	KELURAHAN TARANTANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					16.800.000,00					0,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	16.800.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Lubuk Kilangan || Kelurahan Tarantang || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	8 Pokmas / Ormas	0,00	KELURAHAN TARANTANG
		KECAMATAN PAUH					**19.312.106.759,00**					**22.520.450.788,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**19.312.106.759,00**					**22.520.450.788,00**	
	7.01	**KECAMATAN**					**19.312.106.759,00**					**22.520.450.788,00**	
297.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**14.734.012.659,00**					**14.654.456.965,00**	
		Meningkatnya efektivitas dan efesiensi pelaksanaan urusan pemerintah daerah					***14.734.012.659,00***					***14.629.456.965,00***	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					31.503.900,00					47.000.000,00	
		-					31.503.900,00					47.000.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					18.236.900,00					25.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	7 Dokumen	18.236.900,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	6 Dokumen	25.000.000,00	KECAMATAN PAUH
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					13.267.000,00					22.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	10 Laporan	15 Laporan	13.267.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	10 Laporan	22.000.000,00	KECAMATAN PAUH
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					13.114.697.277,00					13.237.000.000,00	
		-					13.114.697.277,00					13.237.000.000,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					12.866.411.677,00					13.000.000.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	94 Orang/bulan	94 Orang/bulan	14 Orang/bulan	12.866.411.677,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	94 Orang/bulan	13.000.000.000,00	KECAMATAN PAUH
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					240.960.000,00					225.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	240.960.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Dokumen	225.000.000,00	KECAMATAN PAUH
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					7.325.600,00					12.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	7.325.600,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Laporan	12.000.000,00	KECAMATAN PAUH
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					162.497.400,00					207.339.600,00	
		-					162.497.400,00					207.339.600,00	
	7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					162.497.400,00					207.339.600,00	
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	162.497.400,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Dokumen	207.339.600,00	KECAMATAN PAUH
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					356.632.000,00					190.000.000,00	
		-					356.632.000,00					190.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor					10.000.000,00					20.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	1 Paket	10.000.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	2 Paket	20.000.000,00	KECAMATAN PAUH
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					203.632.000,00					0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket	0 Paket	203.632.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	0 Paket	0,00	KECAMATAN PAUH
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					40.000.000,00					50.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	40.000.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	3 Paket	50.000.000,00	KECAMATAN PAUH
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					18.000.000,00					15.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	18.000.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	2 Paket	15.000.000,00	KECAMATAN PAUH
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu					29.998.000,00					25.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	29.998.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Laporan	25.000.000,00	KECAMATAN PAUH
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					55.002.000,00					80.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	55.002.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Laporan	80.000.000,00	KECAMATAN PAUH
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					0,00					0,00	
		-					0,00					0,00	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					0,00					0,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	0 Unit	0 Unit	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	0 Unit	0,00	KECAMATAN PAUH
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					143.994.200,00					163.000.000,00	
		-					143.994.200,00					163.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					3.994.200,00					3.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	650 Laporan	3.994.200,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Laporan	3.000.000,00	KECAMATAN PAUH
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					140.000.000,00					160.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	140.000.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Laporan	160.000.000,00	KECAMATAN PAUH
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					924.687.882,00					810.117.365,00	
		-					924.687.882,00					810.117.365,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					222.310.000,00					200.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit	21 Unit	26 Unit	222.310.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	21 Unit	200.000.000,00	KECAMATAN PAUH
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					34.933.000,00					40.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	20 Unit	28 Unit	34.933.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	28 Unit	40.000.000,00	KECAMATAN PAUH
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					667.444.882,00					570.117.365,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	10 Unit	10 Unit	667.444.882,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	10 Unit	570.117.365,00	KECAMATAN PAUH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
298.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**					**57.464.000,00**					**211.836.999,00**	
		meningkatnya pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai SOP					***57.464.000,00***					***211.836.999,00***	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan					14.993.000,00					67.000.000,00	
		-					14.993.000,00					67.000.000,00	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					14.993.000,00					42.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	12 Laporan	2 Laporan	14.993.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Laporan	42.000.000,00	KECAMATAN PAUH
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					0,00					25.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	12 Dokumen	0,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	2 Dokumen	25.000.000,00	KECAMATAN PAUH
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan					19.998.500,00					35.000.000,00	
		-					19.998.500,00					35.000.000,00	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					19.998.500,00					35.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	19.998.500,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Laporan	35.000.000,00	KECAMATAN PAUH
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					22.472.500,00					109.836.999,00	
		-					22.472.500,00					109.836.999,00	
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha					7.478.000,00					27.000.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	7.478.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Dokumen	27.000.000,00	KECAMATAN PAUH
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					14.994.500,00					82.836.999,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	1 Laporan	14.994.500,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Laporan	82.836.999,00	KECAMATAN PAUH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
299.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**2.128.000.000,00**					**5.068.406.112,00**	
		meningkatnya partisipasi swadaya masyarakat					***328.000.000,00***					***3.243.406.112,00***	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					2.128.000.000,00					5.068.406.112,00	
		-					2.128.000.000,00					5.068.406.112,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					150.000.000,00					180.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	150.000.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	7 Lembaga Kemasyarakatan	180.000.000,00	KECAMATAN PAUH
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					178.000.000,00					3.063.406.112,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	27 Unit	27 Unit	27 Unit	178.000.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	27 Unit	3.063.406.112,00	KECAMATAN PAUH
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					0,00					0,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	72 Pokmas / Ormas	72 Pokmas / Ormas	73 Pokmas / Ormas	0,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	72 Pokmas / Ormas	0,00	KECAMATAN PAUH
300.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**					**570.598.600,00**					**744.723.611,00**	
		Persentase urusan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai ketentuan					***570.598.600,00***					***744.723.611,00***	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					570.598.600,00					744.723.611,00	
		-					570.598.600,00					744.723.611,00	
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia					570.598.600,00					744.723.611,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	1 Laporan	12 Laporan	570.598.600,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1 Laporan	744.723.611,00	KECAMATAN PAUH
301.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**					**2.328.869.500,00**					**2.174.798.516,00**	
		meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai ketentuan					***2.328.869.500,00***					***2.174.798.516,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					2.328.869.500,00					2.174.798.516,00	
		-					2.328.869.500,00					2.174.798.516,00	
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal					2.310.089.500,00					2.129.798.516,00	
		Terlaksananya Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.310.089.500,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Dokumen	2.129.798.516,00	KECAMATAN PAUH
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					18.780.000,00					45.000.000,00	
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	18.780.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Dokumen	45.000.000,00	KECAMATAN PAUH
302.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**					**1.293.162.000,00**					**1.491.228.585,00**	
		meningkatnya pembinaan dan pengawasan					***1.293.162.000,00***					***1.491.228.585,00***	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					1.293.162.000,00					1.491.228.585,00	
		-					1.293.162.000,00					1.491.228.585,00	
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan					1.293.162.000,00					1.491.228.585,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	12 Dokumen	12 Dokumen	4 Dokumen	1.293.162.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Dokumen	1.491.228.585,00	KECAMATAN PAUH
		KELURAHAN BINUANG KAMPUNG DALAM					**189.066.666,00**					**190.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**189.066.666,00**					**190.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**					**189.066.666,00**					**190.000.000,00**	
303.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**2.128.000.000,00**					**5.068.406.112,00**	
		meningkatnya partisipasi swadaya masyarakat					***189.066.666,00***					***190.000.000,00***	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					2.128.000.000,00					5.068.406.112,00	
		-					2.128.000.000,00					5.068.406.112,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					133.647.166,00					135.000.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	27 Unit	27 Unit	3 Unit	133.647.166,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Pauh || Kelurahan Binuang Kampuang Dalam || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	27 Unit	135.000.000,00	KELURAHAN BINUANG KAMPUNG DALAM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					55.419.500,00					55.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	72 Pokmas / Ormas	72 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	55.419.500,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Pauh || Kelurahan Binuang Kampuang Dalam || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	72 Pokmas / Ormas	55.000.000,00	KELURAHAN BINUANG KAMPUNG DALAM
		KELURAHAN CUPAK TANGAH					**205.866.666,00**					**207.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**205.866.666,00**					**207.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**					**205.866.666,00**					**207.000.000,00**	
304.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**2.128.000.000,00**					**5.068.406.112,00**	
		meningkatnya partisipasi swadaya masyarakat					***205.866.666,00***					***207.000.000,00***	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					2.128.000.000,00					5.068.406.112,00	
		-					2.128.000.000,00					5.068.406.112,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					133.647.166,00					135.000.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	27 Unit	27 Unit	3 Unit	133.647.166,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Pauh || Kelurahan Cupak Tangah || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	27 Unit	135.000.000,00	KELURAHAN CUPAK TANGAH
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					72.219.500,00					72.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	72 Pokmas / Ormas	72 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	72.219.500,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Pauh || Kelurahan Cupak Tangah || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	72 Pokmas / Ormas	72.000.000,00	KELURAHAN CUPAK TANGAH
		KELURAHAN KAPALO KOTO					**202.266.666,00**					**205.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**202.266.666,00**					**205.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**					**202.266.666,00**					**205.000.000,00**	
305.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**2.128.000.000,00**					**5.068.406.112,00**	
		meningkatnya partisipasi swadaya masyarakat					***202.266.666,00***					***205.000.000,00***	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					2.128.000.000,00					5.068.406.112,00	
		-					2.128.000.000,00					5.068.406.112,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					133.647.166,00					135.000.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	27 Unit	27 Unit	3 Unit	133.647.166,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Pauh || Kelurahan Kapalo Koto || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	27 Unit	135.000.000,00	KELURAHAN KAPALO KOTO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					68.619.500,00					70.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	72 Pokmas / Ormas	72 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	68.619.500,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Pauh || Kelurahan Kapalo Koto || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	72 Pokmas / Ormas	70.000.000,00	KELURAHAN KAPALO KOTO
		KELURAHAN KOTO LUA					**198.666.667,00**					**210.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**198.666.667,00**					**210.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**					**198.666.667,00**					**210.000.000,00**	
306.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**2.128.000.000,00**					**5.068.406.112,00**	
		meningkatnya partisipasi swadaya masyarakat					***198.666.667,00***					***210.000.000,00***	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					2.128.000.000,00					5.068.406.112,00	
		-					2.128.000.000,00					5.068.406.112,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					133.647.167,00					135.000.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	27 Unit	27 Unit	3 Unit	133.647.167,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Pauh || Kelurahan Koto Lua || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	27 Unit	135.000.000,00	KELURAHAN KOTO LUA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					65.019.500,00					75.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	72 Pokmas / Ormas	72 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	65.019.500,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Pauh || Kelurahan Koto Lua || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	72 Pokmas / Ormas	75.000.000,00	KELURAHAN KOTO LUA
		KELURAHAN LAMBUNG BUKIT					**165.666.667,00**					**167.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**165.666.667,00**					**167.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**					**165.666.667,00**					**167.000.000,00**	
307.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**2.128.000.000,00**					**5.068.406.112,00**	
		meningkatnya partisipasi swadaya masyarakat					***165.666.667,00***					***167.000.000,00***	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					2.128.000.000,00					5.068.406.112,00	
		-					2.128.000.000,00					5.068.406.112,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					133.647.167,00					135.000.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	27 Unit	27 Unit	3 Unit	133.647.167,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Pauh || Kelurahan Lambung Bukik || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	27 Unit	135.000.000,00	KELURAHAN LAMBUNG BUKIT
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					32.019.500,00					32.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	72 Pokmas / Ormas	72 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	32.019.500,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Pauh || Kelurahan Lambung Bukik || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	72 Pokmas / Ormas	32.000.000,00	KELURAHAN LAMBUNG BUKIT
		KELURAHAN LIMAU MANIS					**196.266.667,00**					**197.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**196.266.667,00**					**197.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**					**196.266.667,00**					**197.000.000,00**	
308.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**2.128.000.000,00**					**5.068.406.112,00**	
		meningkatnya partisipasi swadaya masyarakat					***196.266.667,00***					***197.000.000,00***	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					2.128.000.000,00					5.068.406.112,00	
		-					2.128.000.000,00					5.068.406.112,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					133.647.167,00					135.000.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	27 Unit	27 Unit	3 Unit	133.647.167,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Pauh || Kelurahan Limau Manis || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	27 Unit	135.000.000,00	KELURAHAN LIMAU MANIS
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					62.619.500,00					62.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	72 Pokmas / Ormas	72 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	62.619.500,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Pauh || Kelurahan Limau Manis || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	72 Pokmas / Ormas	62.000.000,00	KELURAHAN LIMAU MANIS
		KELURAHAN LIMAU MANIS SELATAN					**212.466.667,00**					**214.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**212.466.667,00**					**214.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**					**212.466.667,00**					**214.000.000,00**	
309.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**2.128.000.000,00**					**5.068.406.112,00**	
		meningkatnya partisipasi swadaya masyarakat					***212.466.667,00***					***214.000.000,00***	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					2.128.000.000,00					5.068.406.112,00	
		-					2.128.000.000,00					5.068.406.112,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					133.647.167,00					135.000.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	27 Unit	27 Unit	4 Unit	133.647.167,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Pauh || Kelurahan Limau Manis Selatan || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	27 Unit	135.000.000,00	KELURAHAN LIMAU MANIS SELATAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					78.819.500,00					79.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	72 Pokmas / Ormas	72 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	78.819.500,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Pauh || Kelurahan Limau Manis Selatan || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	72 Pokmas / Ormas	79.000.000,00	KELURAHAN LIMAU MANIS SELATAN
		KELURAHAN PIAI TANGAH					**200.466.667,00**					**202.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**200.466.667,00**					**202.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**					**200.466.667,00**					**202.000.000,00**	
310.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**2.128.000.000,00**					**5.068.406.112,00**	
		meningkatnya partisipasi swadaya masyarakat					***200.466.667,00***					***202.000.000,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					2.128.000.000,00					5.068.406.112,00	
		-					2.128.000.000,00					5.068.406.112,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					133.647.167,00					135.000.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	27 Unit	27 Unit	3 Unit	133.647.167,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Pauh || Kelurahan Piai Tangah || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	27 Unit	135.000.000,00	KELURAHAN PIAI TANGAH
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					66.819.500,00					67.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	72 Pokmas / Ormas	72 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	66.819.500,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Pauh || Kelurahan Piai Tangah || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	72 Pokmas / Ormas	67.000.000,00	KELURAHAN PIAI TANGAH
		KELURAHAN PISANG					**229.266.667,00**					**233.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**229.266.667,00**					**233.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**					**229.266.667,00**					**233.000.000,00**	
311.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**2.128.000.000,00**					**5.068.406.112,00**	
		meningkatnya partisipasi swadaya masyarakat					***229.266.667,00***					***233.000.000,00***	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					2.128.000.000,00					5.068.406.112,00	
		-					2.128.000.000,00					5.068.406.112,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					133.647.167,00					135.000.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	27 Unit	27 Unit	3 Unit	133.647.167,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Pauh || Kelurahan Pisang || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	27 Unit	135.000.000,00	KELURAHAN PISANG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					95.619.500,00					98.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	72 Pokmas / Ormas	72 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	95.619.500,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Pauh || Kelurahan Pisang || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	72 Pokmas / Ormas	98.000.000,00	KELURAHAN PISANG
		KECAMATAN KOTO TANGAH					**32.747.754.850,00**					**42.357.775.682,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**32.747.754.850,00**					**42.357.775.682,00**	
	7.01	**KECAMATAN**					**32.747.754.850,00**					**42.357.775.682,00**	
312.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**20.951.413.850,00**					**20.422.411.497,00**	
		Meningkatnya efektivitas dan efesiensi pelaksanaan urusan pemerintah daerah					***20.951.413.850,00***					***20.367.411.497,00***	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					18.493.700,00					25.000.000,00	
		-					18.493.700,00					25.000.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					9.086.600,00					0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	7 Dokumen	6 Dokumen	9.086.600,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	3 Dokumen	0,00	KECAMATAN KOTO TANGAH
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					9.407.100,00					15.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	9.407.100,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	14 Laporan	15.000.000,00	KECAMATAN KOTO TANGAH
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					0,00					10.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	0,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	6 Laporan	10.000.000,00	KECAMATAN KOTO TANGAH
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					18.383.405.050,00					18.754.941.897,00	
		-					18.383.405.050,00					18.754.941.897,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					18.089.525.050,00					18.423.801.897,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	150 Orang/bulan	132 Orang/bulan	130 Orang/bulan	18.089.525.050,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	135 Orang/bulan	18.423.801.897,00	KECAMATAN KOTO TANGAH
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					293.880.000,00					331.140.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	293.880.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Dokumen	331.140.000,00	KECAMATAN KOTO TANGAH
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					162.497.400,00					207.339.600,00	
		-					162.497.400,00					207.339.600,00	
	7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					162.497.400,00					207.339.600,00	
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	162.497.400,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Dokumen	207.339.600,00	KECAMATAN KOTO TANGAH
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					564.184.000,00					337.500.000,00	
		-					564.184.000,00					337.500.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor					12.494.300,00					22.500.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	12.494.300,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	4 Paket	22.500.000,00	KECAMATAN KOTO TANGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					284.474.900,00					35.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	6 Paket	6 Paket	284.474.900,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	8 Paket	35.000.000,00	KECAMATAN KOTO TANGAH
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					75.000.000,00					60.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	15 Paket	75.000.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	15 Paket	60.000.000,00	KECAMATAN KOTO TANGAH
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					19.999.800,00					20.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	19.999.800,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	2 Paket	20.000.000,00	KECAMATAN KOTO TANGAH
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu					14.956.000,00					25.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	14.956.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Laporan	25.000.000,00	KECAMATAN KOTO TANGAH
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					157.259.000,00					175.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	157.259.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Laporan	175.000.000,00	KECAMATAN KOTO TANGAH
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					900.000.000,00					20.000.000,00	
		-					900.000.000,00					20.000.000,00	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					0,00					20.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	3 Unit	3 Unit	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	4 Unit	20.000.000,00	KECAMATAN KOTO TANGAH
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					900.000.000,00					0,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	0 Unit	1 Unit	900.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	0 Unit	0,00	KECAMATAN KOTO TANGAH
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					270.612.900,00					300.000.000,00	
		-					270.612.900,00					300.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					270.612.900,00					300.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	270.612.900,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Laporan	300.000.000,00	KECAMATAN KOTO TANGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		-					652.220.800,00					777.630.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					270.070.000,00					207.630.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33 Unit	30 Unit	30 Unit	270.070.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	32 Unit	207.630.000,00	KECAMATAN KOTO TANGAH
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					19.890.000,00					35.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	50 Unit	50 Unit	19.890.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	Unit	35.000.000,00	KECAMATAN KOTO TANGAH
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					362.260.800,00					355.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	14 Unit	14 Unit	14 Unit	362.260.800,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	14 Unit	355.000.000,00	KECAMATAN KOTO TANGAH
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					652.220.800,00					777.630.000,00	
		-					652.220.800,00					777.630.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					0,00					180.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	-	1 Unit	0,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	-	180.000.000,00	KECAMATAN KOTO TANGAH
313.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**					**42.998.200,00**					**140.000.000,00**	
		meningkatnya pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai SOP					***42.998.200,00***					***140.000.000,00***	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan					16.980.000,00					65.000.000,00	
		-					16.980.000,00					65.000.000,00	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					16.980.000,00					0,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	16.980.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Laporan	0,00	KECAMATAN KOTO TANGAH
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					0,00					65.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	4 Dokumen	12 Dokumen	0,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	4 Dokumen	65.000.000,00	KECAMATAN KOTO TANGAH
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan					19.970.700,00					50.000.000,00	
		-					19.970.700,00					50.000.000,00	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					19.970.700,00					50.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	12 Laporan	19.970.700,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	4 Laporan	50.000.000,00	KECAMATAN KOTO TANGAH
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					6.047.500,00					25.000.000,00	
		-					6.047.500,00					25.000.000,00	
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha					6.047.500,00					25.000.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	6.047.500,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	20 Dokumen	25.000.000,00	KECAMATAN KOTO TANGAH
314.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**3.225.916.100,00**					**10.075.376.535,00**	
		meningkatnya partisipasi swadaya masyarakat					***625.916.100,00***					***10.050.376.535,00***	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					3.225.916.100,00					10.050.376.535,00	
		-					3.225.916.100,00					10.050.376.535,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					157.490.000,00					280.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	15 Lembaga Kemasyarakatan	Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	157.490.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	15 Lembaga Kemasyarakatan	280.000.000,00	KECAMATAN KOTO TANGAH
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					31.156.400,00					7.920.376.535,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	100 Unit	100 Unit	50 Unit	31.156.400,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	100 Unit	7.920.376.535,00	KECAMATAN KOTO TANGAH
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					437.269.700,00					1.825.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	437.269.700,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	5 Pokmas / Ormas	1.825.000.000,00	KECAMATAN KOTO TANGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan					0,00					25.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	12 Laporan	0 Laporan	12 Laporan	0,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Laporan	25.000.000,00	KECAMATAN KOTO TANGAH
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan					0,00					25.000.000,00	
		-					0,00					25.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat					0,00					25.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	0 Laporan	12 Laporan	0,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Laporan	25.000.000,00	KECAMATAN KOTO TANGAH
315.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**					**837.514.400,00**					**1.516.845.750,00**	
		Persentase urusan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai ketentuan					***837.514.400,00***					***1.516.845.750,00***	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					837.514.400,00					1.516.845.750,00	
		-					837.514.400,00					1.516.845.750,00	
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia					837.514.400,00					1.516.845.750,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	837.514.400,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Laporan	1.516.845.750,00	KECAMATAN KOTO TANGAH
316.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**					**5.663.039.800,00**					**4.839.279.900,00**	
		meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai ketentuan					***5.663.039.800,00***					***4.839.279.900,00***	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					5.663.039.800,00					4.839.279.900,00	
		-					5.663.039.800,00					4.839.279.900,00	
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal					5.645.039.800,00					4.784.279.900,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Terlaksananya Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	5.645.039.800,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Dokumen	4.784.279.900,00	KECAMATAN KOTO TANGAH
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					18.000.000,00					55.000.000,00	
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	18.000.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Dokumen	55.000.000,00	KECAMATAN KOTO TANGAH
317.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**					**4.626.872.500,00**					**5.363.862.000,00**	
		meningkatnya pembinaan dan pengawasan					***4.626.872.500,00***					***5.363.862.000,00***	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					4.626.872.500,00					5.363.862.000,00	
		-					4.626.872.500,00					5.363.862.000,00	
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan					4.626.872.500,00					5.363.862.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4.626.872.500,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	4 Dokumen	5.363.862.000,00	KECAMATAN KOTO TANGAH
		KELURAHAN AIE PACAH					**163.200.000,00**					**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**163.200.000,00**					**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**					**163.200.000,00**					**0,00**	
318.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**3.225.916.100,00**					**10.075.376.535,00**	
		meningkatnya partisipasi swadaya masyarakat					***163.200.000,00***					***0,00***	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					3.225.916.100,00					10.050.376.535,00	
		-					3.225.916.100,00					10.050.376.535,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					91.200.000,00					0,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	100 Unit	100 Unit	2 Unit	91.200.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	100 Unit	0,00	KELURAHAN AIE PACAH
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					72.000.000,00					0,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	72.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Koto Tangah || Kelurahan Aie Pacah || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	5 Pokmas / Ormas	0,00	KELURAHAN AIE PACAH
		KELURAHAN BALAI GADANG					**271.800.000,00**					**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**271.800.000,00**					**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**					**271.800.000,00**					**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
319.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**3.225.916.100,00**					**10.075.376.535,00**	
		meningkatnya partisipasi swadaya masyarakat					***271.800.000,00***					***0,00***	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					3.225.916.100,00					10.050.376.535,00	
		-					3.225.916.100,00					10.050.376.535,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					135.000.000,00					0,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	100 Unit	100 Unit	2 Unit	135.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Koto Tangah || Kelurahan Balai Gadang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	100 Unit	0,00	KELURAHAN BALAI GADANG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					136.800.000,00					0,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	136.800.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Koto Tangah || Kelurahan Balai Gadang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	5 Pokmas / Ormas	0,00	KELURAHAN BALAI GADANG
		KELURAHAN BATANG KABUNG GANTING					**178.600.000,00**					**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**178.600.000,00**					**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**					**178.600.000,00**					**0,00**	
320.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**3.225.916.100,00**					**10.075.376.535,00**	
		meningkatnya partisipasi swadaya masyarakat					***178.600.000,00***					***0,00***	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					3.225.916.100,00					10.050.376.535,00	
		-					3.225.916.100,00					10.050.376.535,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					85.000.000,00					0,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	100 Unit	100 Unit	2 Unit	85.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Koto Tangah || Kelurahan Batang Kabung Ganting || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	100 Unit	0,00	KELURAHAN BATANG KABUNG GANTING
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					93.600.000,00					0,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	93.600.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Koto Tangah || Kelurahan Batang Kabung Ganting || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	5 Pokmas / Ormas	0,00	KELURAHAN BATANG KABUNG GANTING
		KELURAHAN BATIPUH PANJANG					**200.200.000,00**					**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**200.200.000,00**					**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**					**200.200.000,00**					**0,00**	
321.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**3.225.916.100,00**					**10.075.376.535,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		meningkatnya partisipasi swadaya masyarakat					***200.200.000,00***					***0,00***	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					3.225.916.100,00					10.050.376.535,00	
		-					3.225.916.100,00					10.050.376.535,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					85.000.000,00					0,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	100 Unit	100 Unit	2 Unit	85.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Koto Tangah || Kelurahan Batipuh Panjang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	100 Unit	0,00	KELURAHAN BATIPUH PANJANG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					115.200.000,00					0,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	115.200.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Koto Tangah || Kelurahan Batipuh Panjang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	5 Pokmas / Ormas	0,00	KELURAHAN BATIPUH PANJANG
		KELURAHAN BUNGO PASANG					**185.800.000,00**					**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**185.800.000,00**					**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**					**185.800.000,00**					**0,00**	
322.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**3.225.916.100,00**					**10.075.376.535,00**	
		meningkatnya partisipasi swadaya masyarakat					***185.800.000,00***					***0,00***	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					3.225.916.100,00					10.050.376.535,00	
		-					3.225.916.100,00					10.050.376.535,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					85.000.000,00					0,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	100 Unit	100 Unit	2 Unit	85.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Koto Tangah || Kelurahan Bungo Pasang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	100 Unit	0,00	KELURAHAN BUNGO PASANG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					100.800.000,00					0,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	100.800.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Koto Tangah || Kelurahan Bungo Pasang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	5 Pokmas / Ormas	0,00	KELURAHAN BUNGO PASANG
		KELURAHAN DADOK TUNGGUL HITAM					**250.200.000,00**					**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**250.200.000,00**					**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**					**250.200.000,00**					**0,00**	
323.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**3.225.916.100,00**					**10.075.376.535,00**	
		meningkatnya partisipasi swadaya masyarakat					***250.200.000,00***					***0,00***	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					3.225.916.100,00					10.050.376.535,00	
		-					3.225.916.100,00					10.050.376.535,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					135.000.000,00					0,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	100 Unit	100 Unit	3 Unit	135.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Koto Tangah || Kelurahan Dadok Tunggul Hitam || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	100 Unit	0,00	KELURAHAN DADOK TUNGGUL HITAM
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					115.200.000,00					0,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	115.200.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Koto Tangah || Kelurahan Dadok Tunggul Hitam || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	5 Pokmas / Ormas	0,00	KELURAHAN DADOK TUNGGUL HITAM
		KELURAHAN KOTO PANJANG IKUA KOTO					**221.400.000,00**					**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**221.400.000,00**					**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**					**221.400.000,00**					**0,00**	
324.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**3.225.916.100,00**					**10.075.376.535,00**	
		meningkatnya partisipasi swadaya masyarakat					***221.400.000,00***					***0,00***	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					3.225.916.100,00					10.050.376.535,00	
		-					3.225.916.100,00					10.050.376.535,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					135.000.000,00					0,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	100 Unit	100 Unit	2 Unit	135.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Koto Tangah || Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	100 Unit	0,00	KELURAHAN KOTO PANJANG IKUA KOTO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					86.400.000,00					0,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	86.400.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Koto Tangah || Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	5 Pokmas / Ormas	0,00	KELURAHAN KOTO PANJANG IKUA KOTO
		KELURAHAN KOTO PULAI					**113.800.000,00**					**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**113.800.000,00**					**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**					**113.800.000,00**					**0,00**	
325.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**3.225.916.100,00**					**10.075.376.535,00**	
		meningkatnya partisipasi swadaya masyarakat					***113.800.000,00***					***0,00***	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					3.225.916.100,00					10.050.376.535,00	
		-					3.225.916.100,00					10.050.376.535,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					85.000.000,00					0,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	100 Unit	100 Unit	2 Unit	85.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Koto Tangah || Kelurahan Koto Pulai || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	100 Unit	0,00	KELURAHAN KOTO PULAI
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					28.800.000,00					0,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	28.800.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Koto Tangah || Kelurahan Koto Pulai || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	5 Pokmas / Ormas	0,00	KELURAHAN KOTO PULAI
		KELURAHAN LUBUK BUAYA					**264.600.000,00**					**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**264.600.000,00**					**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**					**264.600.000,00**					**0,00**	
326.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**3.225.916.100,00**					**10.075.376.535,00**	
		meningkatnya partisipasi swadaya masyarakat					***264.600.000,00***					***0,00***	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					3.225.916.100,00					10.050.376.535,00	
		-					3.225.916.100,00					10.050.376.535,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					135.000.000,00					0,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	100 Unit	100 Unit	2 Unit	135.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Koto Tangah || Kelurahan Lubuk Buaya || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	100 Unit	0,00	KELURAHAN LUBUK BUAYA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					129.600.000,00					0,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	129.600.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Koto Tangah || Kelurahan Lubuk Buaya || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	5 Pokmas / Ormas	0,00	KELURAHAN LUBUK BUAYA
		KELURAHAN LUBUK MINTURUN					**157.000.000,00**					**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**157.000.000,00**					**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**					**157.000.000,00**					**0,00**	
327.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**3.225.916.100,00**					**10.075.376.535,00**	
		meningkatnya partisipasi swadaya masyarakat					***157.000.000,00***					***0,00***	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					3.225.916.100,00					10.050.376.535,00	
		-					3.225.916.100,00					10.050.376.535,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					85.000.000,00					0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	100 Unit	100 Unit	2 Unit	85.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Koto Tangah || Kelurahan Lubuk Minturun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	100 Unit	0,00	KELURAHAN LUBUK MINTURUN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					72.000.000,00					0,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	72.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Koto Tangah || Kelurahan Lubuk Minturun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	5 Pokmas / Ormas	0,00	KELURAHAN LUBUK MINTURUN
		KELURAHAN PADANG SARAI					**185.800.000,00**					**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**185.800.000,00**					**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**					**185.800.000,00**					**0,00**	
328.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**3.225.916.100,00**					**10.075.376.535,00**	
		meningkatnya partisipasi swadaya masyarakat					***185.800.000,00***					***0,00***	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					3.225.916.100,00					10.050.376.535,00	
		-					3.225.916.100,00					10.050.376.535,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					85.000.000,00					0,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	100 Unit	100 Unit	2 Unit	85.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Koto Tangah || Kelurahan Padang Sarai || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	100 Unit	0,00	KELURAHAN PADANG SARAI
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					100.800.000,00					0,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	100.800.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Koto Tangah || Kelurahan Padang Sarai || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	5 Pokmas / Ormas	0,00	KELURAHAN PADANG SARAI
		KELURAHAN PARUPUK TABING					**229.000.000,00**					**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**229.000.000,00**					**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**					**229.000.000,00**					**0,00**	
329.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**3.225.916.100,00**					**10.075.376.535,00**	
		meningkatnya partisipasi swadaya masyarakat					***229.000.000,00***					***0,00***	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					3.225.916.100,00					10.050.376.535,00	
		-					3.225.916.100,00					10.050.376.535,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					85.000.000,00					0,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	100 Unit	100 Unit	2 Unit	85.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Koto Tangah || Kelurahan Parupuk Tabing || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	100 Unit	0,00	KELURAHAN PARUPUK TABING

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					144.000.000,00					0,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	144.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Koto Tangah || Kelurahan Parupuk Tabing || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	5 Pokmas / Ormas	0,00	KELURAHAN PARUPUK TABING
		KELURAHAN PASIE NAN TIGO					**178.600.000,00**					**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**178.600.000,00**					**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**					**178.600.000,00**					**0,00**	
330.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**3.225.916.100,00**					**10.075.376.535,00**	
		meningkatnya partisipasi swadaya masyarakat					***178.600.000,00***					***0,00***	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					3.225.916.100,00					10.050.376.535,00	
		-					3.225.916.100,00					10.050.376.535,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					85.000.000,00					0,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	100 Unit	100 Unit	2 Unit	85.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Koto Tangah || Kelurahan Pasie Nan Tigo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	100 Unit	0,00	KELURAHAN PASIE NAN TIGO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					93.600.000,00					0,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	93.600.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Koto Tangah || Kelurahan Pasie Nan Tigo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	5 Pokmas / Ormas	0,00	KELURAHAN PASIE NAN TIGO
		KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG					**12.300.554.453,27**					**15.445.541.017,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**12.300.554.453,27**					**15.445.541.017,00**	
	7.01	**KECAMATAN**					**12.300.554.453,27**					**15.445.541.017,00**	
331.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**9.682.803.953,27**					**10.777.500.000,00**	
		Meningkatnya efektivitas dan efesiensi pelaksanaan urusan pemerintah daerah					***9.682.803.953,27***					***10.142.500.000,00***	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					30.900.500,00					68.000.000,00	
		-					30.900.500,00					68.000.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					12.500.500,00					20.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	12.500.500,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	3 Dokumen	20.000.000,00	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					14.000.000,00					35.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	14.000.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	14 Laporan	35.000.000,00	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					4.400.000,00					13.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4.400.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	4 Laporan	13.000.000,00	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					8.525.376.461,27					9.200.000.000,00	
		-					8.525.376.461,27					9.200.000.000,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					8.302.176.461,27					9.000.000.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang/bulan	65 Orang/bulan	65 Orang/bulan	8.302.176.461,27	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	70 Orang/bulan	9.000.000.000,00	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					223.200.000,00					200.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	223.200.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	14 Dokumen	200.000.000,00	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					162.497.400,00					250.000.000,00	
		-					162.497.400,00					250.000.000,00	
	7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					162.497.400,00					250.000.000,00	
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	162.497.400,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Dokumen	250.000.000,00	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					325.025.600,00					437.000.000,00	
		-					325.025.600,00					437.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor					18.828.700,00					35.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	8 Paket	18.828.700,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	8 Paket	35.000.000,00	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					169.105.900,00					200.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	8 Paket	169.105.900,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	8 Paket	200.000.000,00	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					35.979.800,00					50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	35.979.800,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Paket	50.000.000,00	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					9.319.200,00					15.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	7 Paket	5 Paket	9.319.200,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	8 Paket	15.000.000,00	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					0,00					7.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2222 Dokumen	2222 Dokumen	2222 Dokumen	0,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	2222 Dokumen	7.000.000,00	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu					20.750.000,00					15.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	200 Laporan	200 Laporan	170 Laporan	20.750.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	200 Laporan	15.000.000,00	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					71.042.000,00					95.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	15 Laporan	15 Laporan	71.042.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	15 Laporan	95.000.000,00	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					0,00					20.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	2 Dokumen	20.000.000,00	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					0,00					95.000.000,00	
		-					0,00					95.000.000,00	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					0,00					35.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	2 Unit	0,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	2 Unit	35.000.000,00	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					0,00					60.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	16 Unit	16 Unit	16 Unit	0,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	16 Unit	60.000.000,00	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					123.865.700,00					142.500.000,00	
		-					123.865.700,00					142.500.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1.990.800,00					2.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	450 Laporan	450 Laporan	450 Laporan	1.990.800,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	450 Laporan	2.500.000,00	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					121.874.900,00					140.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	121.874.900,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Laporan	140.000.000,00	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					515.138.292,00					585.000.000,00	
		-					515.138.292,00					585.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					218.280.000,00					210.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35 Unit	35 Unit	35 Unit	218.280.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	35 Unit	210.000.000,00	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel					0,00					45.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	13 Unit	Unit	13 Unit	0,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	13 Unit	45.000.000,00	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					37.150.000,00					45.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	8 Unit	8 Unit	37.150.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	8 Unit	45.000.000,00	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					216.451.800,00					250.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	10 Unit	8 Unit	216.451.800,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	10 Unit	250.000.000,00	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					43.256.492,00					35.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	12 Unit	12 Unit	43.256.492,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Unit	35.000.000,00	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
332.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**					**24.794.100,00**					**95.000.000,00**	
		meningkatnya pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai SOP					***24.794.100,00***					***55.000.000,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan					11.037.100,00					50.000.000,00	
		-					11.037.100,00					50.000.000,00	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					0,00					20.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	0,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	6 Laporan	20.000.000,00	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					11.037.100,00					30.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	11.037.100,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	6 Dokumen	30.000.000,00	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan					12.002.900,00					20.000.000,00	
		-					12.002.900,00					20.000.000,00	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					12.002.900,00					20.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12.002.900,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Laporan	20.000.000,00	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					1.754.100,00					25.000.000,00	
		-					1.754.100,00					25.000.000,00	
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha					1.754.100,00					20.000.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.754.100,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Dokumen	20.000.000,00	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					0,00					5.000.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	Laporan	0 Laporan	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Laporan	5.000.000,00	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
333.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**1.289.709.340,73**					**3.364.000.000,00**	
		meningkatnya partisipasi swadaya masyarakat					***89.582.400,00***					***2.164.000.000,00***	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					1.289.709.340,73					3.364.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		-					1.289.709.340,73					3.364.000.000,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					67.636.800,00					110.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	67.636.800,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	8 Lembaga Kemasyarakatan	110.000.000,00	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					8.099.300,00					1.414.000.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	8 Unit	8 Unit	8.099.300,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	8 Unit	1.414.000.000,00	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					3.083.200,00					600.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	3.083.200,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	10 Pokmas / Ormas	600.000.000,00	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan					10.763.100,00					40.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	10.763.100,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Laporan	40.000.000,00	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
334.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**					**389.501.000,00**					**450.000.000,00**	
		Persentase urusan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai ketentuan					***389.501.000,00***					***450.000.000,00***	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					389.501.000,00					450.000.000,00	
		-					389.501.000,00					450.000.000,00	
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia					389.501.000,00					450.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	389.501.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Laporan	450.000.000,00	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
335.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**					**1.332.904.600,00**					**1.085.022.487,00**	
		meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai ketentuan					***1.332.904.600,00***					***1.085.022.487,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					1.332.904.600,00					1.085.022.487,00	
		-					1.332.904.600,00					1.085.022.487,00	
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal					1.297.904.600,00					1.035.022.487,00	
		Terlaksananya Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.297.904.600,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Dokumen	1.035.022.487,00	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					35.000.000,00					50.000.000,00	
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	24 Dokumen	24 Dokumen	24 Dokumen	35.000.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	24 Dokumen	50.000.000,00	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
336.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**					**780.968.400,00**					**874.018.530,00**	
		meningkatnya pembinaan dan pengawasan					***780.968.400,00***					***874.018.530,00***	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					780.968.400,00					874.018.530,00	
		-					780.968.400,00					874.018.530,00	
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan					780.968.400,00					874.018.530,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	780.968.400,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Dokumen	874.018.530,00	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
		KELURAHAN BUNGUS BARAT					**200.000.007,99**					**200.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**200.000.007,99**					**200.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**					**200.000.007,99**					**200.000.000,00**	
337.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**1.289.709.340,73**					**3.364.000.000,00**	
		meningkatnya partisipasi swadaya masyarakat					***200.000.007,99***					***200.000.000,00***	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					1.289.709.340,73					3.364.000.000,00	
		-					1.289.709.340,73					3.364.000.000,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					114.200.007,99					150.000.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	8 Unit	6 Unit	114.200.007,99	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Bungus Teluk Kabung || Kelurahan Bungus Barat || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	8 Unit	150.000.000,00	KELURAHAN BUNGUS BARAT
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					85.800.000,00					50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	85.800.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Bungus Teluk Kabung || Kelurahan Bungus Barat || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	10 Pokmas / Ormas	50.000.000,00	KELURAHAN BUNGUS BARAT
		KELURAHAN BUNGUS SELATAN					**200.000.248,48**					**200.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**200.000.248,48**					**200.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**					**200.000.248,48**					**200.000.000,00**	
338.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**1.289.709.340,73**					**3.364.000.000,00**	
		meningkatnya partisipasi swadaya masyarakat					***200.000.248,48***					***200.000.000,00***	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					1.289.709.340,73					3.364.000.000,00	
		-					1.289.709.340,73					3.364.000.000,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					161.000.248,48					150.000.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	8 Unit	6 Unit	161.000.248,48	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Bungus Teluk Kabung || Kelurahan Bungus Selatan || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	8 Unit	150.000.000,00	KELURAHAN BUNGUS SELATAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					39.000.000,00					50.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	39.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Bungus Teluk Kabung || Kelurahan Bungus Selatan || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	10 Pokmas / Ormas	50.000.000,00	KELURAHAN BUNGUS SELATAN
		KELURAHAN BUNGUS TIMUR					**200.000.053,60**					**200.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**200.000.053,60**					**200.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**					**200.000.053,60**					**200.000.000,00**	
339.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**1.289.709.340,73**					**3.364.000.000,00**	
		meningkatnya partisipasi swadaya masyarakat					***200.000.053,60***					***200.000.000,00***	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					1.289.709.340,73					3.364.000.000,00	
		-					1.289.709.340,73					3.364.000.000,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					128.000.053,60					150.000.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	8 Unit	6 Unit	128.000.053,60	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Bungus Teluk Kabung || Kelurahan Bungus Timur || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	8 Unit	150.000.000,00	KELURAHAN BUNGUS TIMUR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					72.000.000,00					50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	72.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Bungus Teluk Kabung || Kelurahan Bungus Timur || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	10 Pokmas / Ormas	50.000.000,00	KELURAHAN BUNGUS TIMUR
		KELURAHAN TELUK KABUNG SELATAN					**200.029.201,42**					**200.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**200.029.201,42**					**200.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**					**200.029.201,42**					**200.000.000,00**	
340.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**1.289.709.340,73**					**3.364.000.000,00**	
		meningkatnya partisipasi swadaya masyarakat					***200.029.201,42***					***200.000.000,00***	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					1.289.709.340,73					3.364.000.000,00	
		-					1.289.709.340,73					3.364.000.000,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					175.429.201,42					150.000.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	8 Unit	6 Unit	175.429.201,42	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Bungus Teluk Kabung || Kelurahan Teluk Kabung Selatan || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	8 Unit	150.000.000,00	KELURAHAN TELUK KABUNG SELATAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					24.600.000,00					50.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	24.600.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Bungus Teluk Kabung || Kelurahan Teluk Kabung Selatan || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	10 Pokmas / Ormas	50.000.000,00	KELURAHAN TELUK KABUNG SELATAN
		KELURAHAN TELUK KABUNG TENGAH					**199.950.198,12**					**200.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**199.950.198,12**					**200.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**					**199.950.198,12**					**200.000.000,00**	
341.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**1.289.709.340,73**					**3.364.000.000,00**	
		meningkatnya partisipasi swadaya masyarakat					***199.950.198,12***					***200.000.000,00***	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					1.289.709.340,73					3.364.000.000,00	
		-					1.289.709.340,73					3.364.000.000,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					153.750.198,12					150.000.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	8 Unit	6 Unit	153.750.198,12	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Bungus Teluk Kabung || Kelurahan Teluk Kabung Tengah || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	8 Unit	150.000.000,00	KELURAHAN TELUK KABUNG TENGAH
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					46.200.000,00					50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	46.200.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Bungus Teluk Kabung || Kelurahan Teluk Kabung Tengah || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	10 Pokmas / Ormas	50.000.000,00	KELURAHAN TELUK KABUNG TENGAH
		KELURAHAN TELUK KABUNG UTARA					**200.147.231,12**					**200.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**200.147.231,12**					**200.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**					**200.147.231,12**					**200.000.000,00**	
342.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**1.289.709.340,73**					**3.364.000.000,00**	
		meningkatnya partisipasi swadaya masyarakat					***200.147.231,12***					***200.000.000,00***	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					1.289.709.340,73					3.364.000.000,00	
		-					1.289.709.340,73					3.364.000.000,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					147.347.231,12					150.000.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	8 Unit	6 Unit	147.347.231,12	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Bungus Teluk Kabung || Kelurahan Teluk Kabung Utara || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	8 Unit	150.000.000,00	KELURAHAN TELUK KABUNG UTARA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					52.800.000,00					50.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	52.800.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kota Padang || Kecamatan Bungus Teluk Kabung || Kelurahan Teluk Kabung Utara || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	10 Pokmas / Ormas	50.000.000,00	KELURAHAN TELUK KABUNG UTARA
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					**12.190.706.727,00**					**15.464.583.220,00**	
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**					**12.190.706.727,00**					**15.464.583.220,00**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**					**12.190.706.727,00**					**15.464.583.220,00**	
343.	**8.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**5.750.159.527,00**					**7.083.635.690,00**	
		Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah					***5.744.197.027,00***					***7.070.063.290,00***	
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					15.782.500,00					36.941.500,00	
		-					15.782.500,00					36.941.500,00	
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2.437.500,00					7.447.800,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2.437.500,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2 Dokumen	7.447.800,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					1.987.500,00					5.395.600,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1.987.500,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2 Dokumen	5.395.600,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	8.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					1.987.500,00					3.572.400,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1.987.500,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2 Dokumen	3.572.400,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					1.987.500,00					3.572.400,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1.987.500,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2 Dokumen	3.572.400,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					1.987.500,00					4.462.700,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1.987.500,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2 Dokumen	4.462.700,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					3.055.000,00					5.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	3.055.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	12 Laporan	5.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					2.340.000,00					7.490.600,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	2.340.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	12 Laporan	7.490.600,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					5.080.424.747,00					5.355.785.669,00	
		-					5.080.424.747,00					5.355.785.669,00	
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					4.875.344.747,00					5.140.385.669,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang/bulan	42 Orang/bulan	42 Orang/bulan	4.875.344.747,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	-	42 Orang/bulan	5.140.385.669,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					205.080.000,00					215.400.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	205.080.000,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	12 Dokumen	215.400.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					406.374.680,00					1.078.938.000,00	
		-					406.374.680,00					1.078.938.000,00	
	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor					6.491.800,00					5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	5 Paket	6.491.800,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5 Paket	5.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					0,00					35.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3 Paket	35.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					0,00					5.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	5 Paket	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5 Paket	5.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					172.151.200,00					198.500.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	17 Paket	17 Paket	17 Paket	172.151.200,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	17 Paket	198.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					33.846.680,00					25.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	5 Paket	33.846.680,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10 Paket	25.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					12.600.000,00					19.975.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12.600.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	12 Dokumen	19.975.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu					24.900.000,00					14.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	24.900.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	12 Laporan	14.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					156.385.000,00					776.463.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	156.385.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	24 Laporan	776.463.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					0,00					114.807.730,00	
		-					0,00					114.807.730,00	
	8.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					0,00					75.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	5 Unit	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5 Unit	75.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					0,00					10.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	2 Unit	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	10 Unit	10.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					0,00					29.807.730,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 Unit	5 Unit	5 Unit	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5 Unit	29.807.730,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					5.997.600,00					268.852.791,00	
		-					5.997.600,00					268.852.791,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					5.997.600,00					6.300.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	5.997.600,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	12 Laporan	6.300.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					0,00					150.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	12 Laporan	150.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					0,00					112.552.791,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	12 Laporan	112.552.791,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					241.580.000,00					228.310.000,00	
		-					241.580.000,00					228.310.000,00	
	8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					36.000.000,00					36.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	36.000.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1 Unit	36.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					188.570.000,00					171.610.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	15 Unit	15 Unit	188.570.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	15 Unit	171.610.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					17.010.000,00					20.700.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12 Unit	10 Unit	17.010.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	12 Unit	20.700.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
344.	**8.01.02**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**					**1.658.242.300,00**					**2.490.335.600,00**	
		Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan					***1.658.242.300,00***					***2.420.335.600,00***	
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan					1.658.242.300,00					2.490.335.600,00	
		-					1.658.242.300,00					2.490.335.600,00	
	8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan					927.476.100,00					1.192.222.900,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	350 Orang	350 Orang	350 Orang	927.476.100,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	350 Orang	1.192.222.900,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0007	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka					0,00					35.000.000,00	
		Terlaksananya pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	1 Dokumen	1 Dokumen	350 Dokumen	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 Dokumen	35.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka					730.766.200,00					1.156.112.700,00	
		Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka	Jumlah Paskibraka	54 Orang	54 Orang	54 Orang	730.766.200,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	54 Orang	1.156.112.700,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0009	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila					0,00					35.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 Dokumen	35.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0010	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila					0,00					35.000.000,00	
		Terlaksananya penugasan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 Dokumen	35.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0011	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila					0,00					37.000.000,00	
		Terbentuknya purnapaskibraka duta pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	54 Orang	54 Orang	54 Orang	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	54 Orang	37.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
345.	**8.01.03**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**					**2.240.346.000,00**					**2.223.593.400,00**	
		Meningkatnya etika dan budaya politik					***2.240.346.000,00***					***2.223.593.400,00***	
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik					2.240.346.000,00					2.223.593.400,00	
		-					2.240.346.000,00					2.223.593.400,00	
	8.01.03.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah					230.000.000,00					147.362.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Tersusunnya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	230.000.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2 Dokumen	147.362.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah					0,00					35.000.000,00	
		Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	150 Orang	150 Orang	150 Orang	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	150 Orang	35.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah					2.010.346.000,00					2.020.346.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	300 Orang	300 Orang	300 Orang	2.010.346.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	300 Orang	2.020.346.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah					0,00					20.885.400,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	12 Laporan	20.885.400,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
346.	**8.01.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**					**350.000.000,00**					**469.272.720,00**	
		Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakat					***350.000.000,00***					***469.272.720,00***	
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan					350.000.000,00					469.272.720,00	
		-					350.000.000,00					469.272.720,00	
	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah					0,00					204.926.400,00	
		Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	500 Orang	500 Orang	500 Orang	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	500 Orang	204.926.400,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah					350.000.000,00					264.346.320,00	
		Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	550 Orang	550 Orang	550 Orang	350.000.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	550 Orang	264.346.320,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
347.	**8.01.05**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**					**315.000.000,00**					**828.982.875,00**	
		Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat					***315.000.000,00***					***828.982.875,00***	
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya					315.000.000,00					828.982.875,00	
		-					315.000.000,00					828.982.875,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah					315.000.000,00					828.982.875,00	
		Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	900 Orang	900 Orang	900 Orang	315.000.000,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	900 Orang	828.982.875,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
348.	**8.01.06**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**					**1.876.958.900,00**					**2.368.762.935,00**	
		Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan					***1.876.958.900,00***					***2.368.762.935,00***	
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial					1.876.958.900,00					2.368.762.935,00	
		-					1.876.958.900,00					2.368.762.935,00	
	8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah					182.000.200,00					175.000.000,00	
		Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	50 Orang	50 Orang	50 Orang	182.000.200,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	50 Orang	175.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah					0,00					70.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	300 Orang	300 Orang	50 Orang	0,00	Kota Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	300 Orang	70.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota					1.694.958.700,00					2.123.762.935,00	
		Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	1.694.958.700,00	Kota Padang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4 Dokumen	2.123.762.935,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	J U M L A H						**3.012.457.239.042,00**					**5.366.075.114.750,39**	

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Kinerja menggambarkan kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasikan kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil instansi dihubungkan dengan visi yang diemban organisasi serta mengetahui dampak positif dan negatif dari kebijakan operasional. Kinerja menggambarkan apakah tujuan organisasi tercapai atau tidak. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian pembangunan, yang ditunjukkan melalui akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian bersifat mandiri setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RKPD dapat dicapai.

6.1 Indikator Kinerja Makro

Indikator makro pembangunan adalah ukuran-ukuran yang digunakan untuk menilai kemajuan pembangunan suatu daerah secara menyeluruh, terutama dari segi ekonomi, sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Indikator ini penting untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan pemerintah dan merancang strategi pembangunan ke depan.

Pertumbuhan ekonomi adalah indikator utama yang sangat penting untuk menjamin kesinambungan dalam menggerakkan pembangunan di daerah. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas juga diiringi dengan peningkatan Indeks Membangunan Manusia, penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka serta penurunan Tingkat Kemiskinan. Berikut disajikan target indikator kinerja makro Kota Padang tahun 2027:

Tabel 6- 1 Target Kinerja Makro Kota Padang Tahun 2027

No	Indikator	Satuan	Target
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	6,88
2	PDRB Per Kapita ADHB	Juta per kapita	122,87

No	Indikator	Satuan	Target
3	PDRB Per Kapita ADHK	Juta per kapita	61,64
4	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	85,14
5	Angka Harapan Hidup	Tahun	75,78
6	Harapan Lama Sekolah	Tahun	16,61
7	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	11,76
8	Pengeluaran Per Kapita	Rp. Ribu	16.175
9	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	9,04
10	Jumlah Penduduk Miskin	Jiwa	3.072
11	Tingkat Kemiskinan	Persen	3,12
12	Gini Ratio	Indeks	0,32

Sumber : RPJMD Kota Padang 2025-2029

6.2 Indikator Kinerja Utama

Tabel 6- 2 Indikator Kinerja Utama Kota Padang 2027

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Misi 1 : Menguatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	**Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas profesional, responsif, kolaboratif, dan partisipatif**		Indeks Reformasi Birokrasi	86	86,25	87,31	86,75	87	87,25	
		Meningkatnya kualitas integrasi pembangunan dari sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan kinerja	Nilai SAKIP	79	79,50	80	80,5	81	81,5	
		Meningkatkan Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang efektif, efisien dan akuntabel	Opini atas laporan keuangan pemerintah daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
		Meningkatnya kualitas pemetaan regulasi, regulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi daerah	Indeks Reformasi Hukum	91	91	92	93	94	96	
		Meningkatkan Pelayanan Publik yang profesional, responsif dan bebas korupsi	Indeks Pelayanan Publik	3,54	3,55	3,56	3,57	3,8	4,55	
		Meningkatnya pengawasan arsip daerah	Indeks Pengawasan Arsip	84	85	86	87	88	89	

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Meningkatnya pencegahan perilaku korupsi	Indeks Pencegahan Korupsi Daerah	95,2	95,25	95,5	95,75	96	96,25	
		Meningkatnya sumber daya aparatur yang profesional dan berintegritas	Indeks Sistem Merit	0,71	0,73	0,75	0,78	0,82	0,83	
Misi 2 : Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	**Mewujudkan Implementasi Kota Pintar dan Kota Sehat**		Smart City Index	3,2	3,4	3,5	3,6	3,8	4,0	
		Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan berbasis digitalisasi dalam wujudkan smart city	Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	3,96	4,02	4,08	4,13	4,19	4,25	Data imperative. SPBE digunakan s/d 2025, selanjutnya mulai tahun 2026 diganti dengan indeks transformasi digital pilar pemerintahan
			Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintahan	-	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	
		Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	0,84	0,84	0,85	0,85	0,85	0,86	
		Tercapainya kondisi lingkungan hidup yang bersih, nyaman, aman dan kualitas hidup sehat.	Peningkatan Penilaian Hasil Evaluasi Kota Sehat	0.01	-	0.01	-	0.08	-	Data dipublikasikan tiap 2 tahun
Misi 3 : Menguatkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya dengan Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	**Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul**		Indeks Pembangunan Manusia	84,51	84,82	85,14	85,53	85,93	86,33	Imperatif dari Prov Sumbar

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Meningkatnya literasi masyarakat Kota	Indeks pembangunan Literasi masyarakat	86	86	18,76	86	86	88	Mulai tahun 2025 terdapat perubahan cara perhitungan menggunakan instrumen dan metodologi terbaru sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 7 Tahun 2025
		Meningkatkan pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	0,849	0,849	0,850	0,850	0,851	0,852	
		Meningkatnya pelestarian dan pembangunan kebudayaan daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan	61,2	61,3	61,4	61,6	61,8	62,0	
		Meningkatnya Peran Pemuda dalam pembangunan sumber daya manusia unggul	Indeks Pembangunan Pemuda	56,5	56,8	57,0	57,2	57,3	57,5	
		Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan daerah	Indeks Pembangunan Gender	94,16	94,26	94,37	94,58	94,69	94,77	
	Meningkatkan stabilitas sosial dan politik daerah		Indeks Rasa Aman	11	10,8	10,6	10,4	10,2	10,00	Penurunan Angka Kriminalitas (RPJPD)
		Meningkatnya Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	65,0	65,5	66,0	66,5	67,0	67,5	
		Meningkatnya Toleransi beragama dan partisipasi politik	Indeks Kerukunan Umat Beragama	77,37	77,82	85,02	78,72	78,73	78,92	

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Indeks Kesejahteraan Sosial	53,89	54,29	54,69	55,09	55,49	55,89	
Misi 4 : Mendorong Kemudahan Berinvestasi Demi Terbukanya Lapangan Pekerjaan	**Mewujudkan Perekonomian Masyarakat yang adaptif dan kondusif**		Indeks daya saing daerah	4,27	4,3	4,35	4,4	4,45	4,5	
		Meningkatkan Realisasi Investasi	Nilai PMTB terhadap PDRB	29,94	29,97	30,00	30,03	30,06	30,09	
		Meningkatkan Tingkat Kesempatan Kerja	Perbandingan orang yang bekerja thd angkatan kerja	90,12%	90,85%	91,15%	91,30%	91,84%	92,01%	
Misi 5 : Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	**Mewujudkan Kota Layak Huni**		Indeks Kota Layak Huni	69,16	69,39	69,63	69,86	70,10	70,33	
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	77,36	77,65	77,79	78	78,25	78,42	Imperatif Provinsi Sumatera Barat
		Mewujudkan hunian layak dan terjangkau	Persentase Hunian Layak dan terjangkau	73,50	74,74	75,98	77,22	78,46	79,70	
		Mengembangkan dan merevitalisasi sarana serta prasarana umum yang ramah lingkungan dan hijau	Indeks Infrastruktur	66,12	66,65	67,03	67,42	67,8	68,18	
		Meningkatnya Kualitas Transportasi Publik	Rasio Konektivitas Wilayah	60,0	60,2	60,4	60,6	60,8	70,0	
Misi 6 : Menguatkan Jaringan Ketahanan Bencana	**Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim**		Indeks Risiko Bencana (IRB)	154,68	154,67 - 153,4	153,39 - 152,12	152,11 - 150,84	150,83 - 149,56	149,55 - 148,28	

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Penguatan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana dan perubahan iklim	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,52	0,53	0,55	0,57	0,59	0,61	
Misi 7 : Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif dengan Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	Mewujudkan Sektor perdagangan dan jasa yang tangguh		PDRB sektor perdagangan dan jasa (Miliar Rupiah)	30.744,63	32.622,65	34.500,68	36.378,70	38.256,72	40.134,74	Mencakup Lapangan Usaha G, K, M ,N, P. Q, R, S, T, U
		Meningkatnya kemampuan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan	Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	0,32	0,34	0,36	0,38	0,39	0,40	
		Meningkatnya Kontribusi Sektor perdagangan dan jasa terhadap perekonomian Daerah	Persentase Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan dan jasa	5,48	5,76	6,05	6,35	6,67	7,00	Mencakup Lapangan Usaha G, K, M ,N, P. Q, R, S, T, U
		Meningkatnya daya saing produk daerah	Persentase Pertumbuhan Net Ekspor	9,29	9,38	9,48	9,57	9,67	9,76	
		Meningkatkan Lapangan Usaha Perdagangan	Kontribusi Lapangan usaha Perdagangan Terhadap PDRB	17,99	18,30	18,61	18,92	19,23	19,54	
		Meningkatnya daya saing produk daerah dan transaksi perdagangan	Kontribusi Ekspor terhadap PDRB	7,108	7,123	7,138	7,153	7,168	7,185	Dihitung berdasarkan data PDRB Pengeluaran
		Meningkatkan perekonomian daerah dari sektor Koperasi dan UMKM (Usaha Mikro)	Nilai omset sektor koperasi dan UMKM (usaha mikro) (Rp Juta)	1.852.392,88	1.937.602,95	2.038.358,31	2.156.583,09	2.294.604,41	2.455.226,71	

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Misi 8 : Menggerakkan Potensi Kota untuk Terwujudnya Industri Kreatif dan Pariwisata Berkelanjutan	**Terwujudnya Meningkatkan perekonomian daerah dari sektor Industri Kreatif dan Pariwisata**		PDRB sektor industri kreatif dan pariwisata (Miliar Rupiah)	1218,19	1296,19	1374,19	1452,19	1530,19	1608,19	
		Meningkatnya Kontribusi Industri Kreatif terhadap Perekonomian Daerah	Persentase Pertumbuhan Sektor PDRB Ekonomi Kreatif	7,43	7,48	7,54	7,67	8,07	8,37	
		Meningkatnya Kontribusi sektor pariwisata terhadap Perekonomian Daerah	Persentase Pertumbuhan sektor pariwisata	7,12	7,22	8,98	9,08	9,11	9,14	

Sumber : RPJMD Kota Padang 2025-2029

6.3 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Penentuan target penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui indikator kinerja daerah (IKD). Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcome) atau kompositnya (impact). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Pencapaian Indikator Kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2027 yang telah direncanakan. Dalam proses perencanaan, ukuran keberhasilan/pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan publik dalam rangka perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Selanjutnya, indikator kinerja daerah dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah. Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang merupakan indikator gabungan dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi sosial. Aspek Pelayanan Umum merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti infrastruktur dasar baik secara fisik maupun sosial. Aspek daya saing daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

Untuk target kinerja Tahun 2027, indikator kinerja daerah Kota Padang tersebut secara rinci disajikan pada tabel berikut :

Tabel 6- 3 Indikator Kinerja Daerah tahun 2027

NO	INDIKATOR	SATUAN	Baseline 2024	TARGET TAHUN 2025	Realisasi 2025	Target Tahun 2027		KET
						RPJMD	RKPD	
1	2	3	4	5	4	5	6	7
I	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**							
1	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	86	86,3	86,03	87,8	87,8	
2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	%	8,57	5,82	8,57	5,1	5,1	Imperatif dari Prov Sumbar
3	Kapasitas Air Baku	m3/detik	2,025	2,225	1935	2,303	2,303	Imperatif dari Prov Sumbar
4	Konsumsi Listrik Per Kapita	kWh/kapita	2.384	2093	1,181	2508,2	2508,2	Imperatif dari Prov Sumbar
5	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum	%	51,47	50	51,47	55	55	Imperatif dari Prov Sumbar
6	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Daerah	Angka	77,26	77,36	80.68	77,75	77,79	Imperatif dari Prov Sumbar
7	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	14,3	20,46	14,69	23,17	23,17	Imperatif dari Prov Sumbar
8	Timbulan Sampah terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	persen	21,57	29,88	25.2	33,26	33,26	Imperatif dari Prov Sumbar
9	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%	73,6	38,01	81.2	45,37	45,37	Imperatif dari Prov Sumbar
10	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Angka	155,96	154,87	185,53	151,07	151,07	Imperatif dari Prov Sumbar
11	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,24	1,24	1,27	1,24	1,24	
12	Rasio Penduduk	%	46,28	46,28	49,86	47,32	47,32	
13	Kepadatan Penduduk	Orang/Km2	1373	1389	1374	1418	1418	
14	Indeks Tutupan Lahan, diganti dengan indeks kualitas lahan	Angka	-	80,44	80.61	80,47	80,47	
15	Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Sumber Air Siap Minum Perpipaan (%)	Persentase		50	51,47	55	55	Imperatif dari Prov Sumbarve

NO	INDIKATOR	SATUAN	Baseline 2024	TARGET TAHUN 2025	Realisasi 2025	Target Tahun 2027		KET
						RPJMD	RKPD	
1	2	3	4	5	4	5	6	7
II	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**							
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,65	4,16	3,63	6,88	6,88	Imperatif dari Prov Sumbar
2	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	Jiwa	41.4	35.313	37380	30.728	30.728	Imperatif dari Prov Sumbar
3	Tingkat Kemiskinan	%	4,1	3,66	3,63	3,12	3,12	Imperatif dari Prov Sumbar
4	PDRB Per Kapita (Rp Juta)	Rp Juta	88,22	97,52	92,21	122,87	122,87	Imperatif dari Prov Sumbar
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	9,88	9,88	9,70	9,04	9,04	Imperatif dari Prov Sumbar
6	Gini Ratio	Angka	324	0,32	0.348	0,32	0,32	Imperatif dari Prov Sumbar
7	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	84,38	84,51	84,93	85,14	85,14	Imperatif dari Prov Sumbar
8	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja		172,99	178,29	92,21	188,89	188,89	
9	Angka Harapan Hidup	Tahun	75,2	75,37	75,59	75,78	75,78	Imperatif dari Prov Sumbar
10	Prevalansi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%) SSGI	%	20,6	17,90	20,6	15,40	15,40	SSGI tidak dilaksanakan Kemenkes tahun 2025
	Prevalansi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%) EPPGBM	%	2,53	2,55	2,52	2,51	2,51	
11	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	%	98,06	99	98,34	99,20	99,20	Imperatif dari Prov Sumbar
13	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%)	%	89	80	83	86,4	86,4	
14	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)	%	90	93	91,50	94	94	Imperatif dari Prov Sumbar
15	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	11,63	11,64	11,64	11,76	11,76	Imperatif dari Prov Sumbar
16	Harapan Lama Sekolah	Tahun	16.57	16,58	16,58	16,61	16,61	Imperatif dari Prov Sumbar
17	Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional	%		65		75.15	75.15	Imperatif dari Prov Sumbar

NO	INDIKATOR	SATUAN	Baseline 2024	TARGET TAHUN 2025	Realisasi 2025	Target Tahun 2027		KET
						RPJMD	RKPD	
1	2	3	4	5	4	5	6	7
18	Angka Literasi dan Numerasi							
a	Angka Literasi SD	%	83,59	65	82,57	75,18	75,18	Imperatif dari Prov Sumbar
b	Angka Numerasi SD	%	71,84	20	77,59	28,32	28,32	Imperatif dari Prov Sumbar
c	Angka Literasi SMP	%	80,9	63	84,2	64,76	64,76	Imperatif dari Prov Sumbar
d	Angka Numerasi SMP	%	45,55	55	19,17	57,22	57,22	Imperatif dari Prov Sumbar
19	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka	85,47	86	18,76	86	86	
20	Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI)	Angka	52,71	53	58,28	55	55	
21	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	%	27,83	32,55	38.08	33,55	33,55	Imperatif dari Prov Sumbar
22	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	76,92	77,37	85,02	78,27	85,02	
23	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Angka	-	61,2	27	61,4	61,4	
24	Indeks Perlindungan Khusus Anak	Angka	-	66,35	-	66,722	66,722	Imperatif dari Prov Sumbar
25	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Angka	64,62	64,82	-	65,23	65,23	
26	Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0.172	0.172	-	0.171	0.171	Imperatif dari Prov Sumbar
27	Indeks Pembangunan Gender	Angka	94,04	94,16	94,04	94,37	94,37	
28	Indeks Pembangunan Pemuda	Angka	56,33	56,5	56,7	57	57	
29	Jumlah Kematian Ibu	Orang	14	12	14	11	11	
	Angka Kematian Ibu	Angka	86	85	105	84	84	
30	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun Ke atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	23,61	18	20	18,28	18,28	Imperatif dari Prov Sumbar
31	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi Yang Bekerja Di Bidang Keahlian Menengah Tinggi	%	73,52	68,13	48,16	69,49	69,49	Imperatif dari Prov Sumbar

NO	INDIKATOR	SATUAN	Baseline 2024	TARGET TAHUN 2025	Realisasi 2025	Target Tahun 2027		KET
						RPJMD	RKPD	
1	2	3	4	5	4	5	6	7
32	Persentase Penyandang Disabilitas Yang Bekerja Di Sektor Formal	%	0,55	45,63	-	47,63	47,63	Imperatif dari Prov Sumbar
33	Jumlah Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan di tingkat kab/kota/provinsi	Unit Layanan	1	1	-	1	1	Imperatif dari Prov Sumbar
34	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitasi dari Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan dan/atau dari Dinas yang menangani bidang ketenagakerjaan	Orang	-	408	-	666	666	Imperatif dari Prov Sumbar
35	Jumlah Kematian Bayi	Orang	116	114	103	110	110	
	Angka Kematian Bayi	Angka	8,3	8,2	7,7	8	8	
III	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**							
1	Angka Ketergantungan	%	45,7	46,28	-	47,32	47,32	
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	10,68	8,83	10,99	9,505	9,505	Imperatif dari Prov Sumbar
3	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	%	1,35	1,5	1,34	1,54	1,54	Imperatif dari Prov Sumbar
4	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	%	3,23	3,02	3,34	3,27	3,27	
5	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	4,08	3,82	3,34	4,09	4,09	Imperatif dari Prov Sumbar
6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	67,18	67,24	67,27	67,37	67,37	
7	Indeks Inovasi Daerah	Angka	63,72	64,23	67.64	67,44	67,44	Imperatif dari Prov Sumbar
8	Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan	Angka	4,95	5,06	5.13	5,16	5,16	
9	Rasio PDRB Sektor Perikanan	Angka	3,28	3,34	3.44	3,4	3,4	
10	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Angka	-	53	-	53,4	53,4	
11	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	% PDRB	28,52	29,94	28,38	30	30	Imperatif dari Prov Sumbar
12	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	% PDRB	7,92	65,61	11,15	66,486	66,486	Imperatif dari Prov Sumbar

NO	INDIKATOR	SATUAN	Baseline 2024	TARGET TAHUN 2025	Realisasi 2025	Target Tahun 2027		KET
						RPJMD	RKPD	
1	2	3	4	5	4	5	6	7
13	Indeks Infrastruktur/Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Angka	-	66,12	67,05	67,03	67,03	
14	Rumah Tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	%	-	74,5	78,79	77,36	77,36	Imperatif dari Prov Sumbar
15	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,69	0,71	0.82	0,8	0,8	Imperatif dari Prov Sumbar
16	Tingkat Inflasi	%	1,38	2,80 - 3,60	4,66	2,10 - 3,52	2,10 - 3,52	Imperatif dari Prov Sumbar
17	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	Indeks	5,54	5.55	6.35	6.38	6.38	Surat bappenas nomor. 12585/Dt.03.03/PP.03.01/06/2026 tanggal 22 Juni 2026 tentang Penyampaian Capaian dan Target Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) dalam rangka Penyusunan Dokumen RKPD Kabupaten/Kota 2027
18	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Ribu Orang	191,632 (OPD/Telkomsel)	32,174	228,352	34,174	34,174	Imperatif dari Prov Sumbar
19	Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB	%	3,45	3,265	-	3,349	3,349	Imperatif dari Prov Sumbar
20	Return on Asset (ROA) BUMD	%	6,17	8,01	6,00	8,08	8,08	Imperatif dari Prov Sumbar
21	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	%	58,08	55,65	-	58,05	58,05	Imperatif dari Prov Sumbar
22	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	54,25	54,25-55,63	56,45	54,86-56,71	54,86-56,71	Imperatif dari Prov Sumbar
23	Indeks Literasi Digital	Angka	52,71	53	-	55	55	Indeks literasi Digital terakhir dilakukan oleh Kementrian Kominfo pd thn 2023, setelah itu diganti menjadi indeks masyarakat digital indonesia
24	Total Dana Pihak Ketiga / PDRB	Miliar	36,78	25,41	30,67	30,88	30,88	Imperatif dari Prov Sumbar
25	Nilai Transaksi Saham per Kapita	Rupiah	7.448.960	19.155.489	12510	27.088.333	27.088.333	Imperatif dari Prov Sumbar
26	Total Kredit / PDRB	%	36,98	15,3	25018	20,56	20,56	Imperatif dari Prov Sumbar

NO	INDIKATOR	SATUAN	Baseline 2024	TARGET TAHUN 2025	Realisasi 2025	Target Tahun 2027		KET
						RPJMD	RKPD	
1	2	3	4	5	4	5	6	7
27	Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan	%	5,29	5,3	5,42	5,38	5,38	
28	Proporsi jumlah Industri Kecil dan Menengah	%	2,79	4,63	-	4,79	4,79	Imperatif dari Prov Sumbar
29	Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM)	%		4.686	-	4.726	4.726	Imperatif dari Prov Sumbar
29	Persentase kerja sama wajib yang dilaksanakan	%	-	87	-	88,5	88,5	
31	Proporsi jumlah Usaha Kecil dan Menengah non pertanian	%	83,9	4,69	-	4,73	4,73	Imperatif dari Prov Sumbar
32	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok	%	-	2-10	-	2,5-9,4	2,5-9,4	
33	Proporsi kontribusi PDRB Kota terhadap Provinsi	%	25,34	25,45	25.52	25,81	25,81	Imperatif dari Prov Sumbar
34	Jumlah warisan budaya benda yang dilestarikan	Angka	-	2	2	2	2	
35	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	Angka	-	2	3	2	2	
IV	**ASPEK PELAYANAN UMUM**							
1	Indeks Reformasi Hukum	Angka	98,7	91	100	92	92	
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	3,96	3,96	4,17	4,08	4,08	Imperatif dari Prov Sumbar
3	Indeks Pemerintahan Digital	Indeks		-	-	1.7	1.7	Imperatif dari Prov Sumbar
4	Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintahan		-	-	-	1,6	1,6	Indeks baru akan dipakai di tahun 2026
5	Indeks Pelayanan Publik	Angka	-	3,54	3,38	3,56	3,56	Imperatif dari Prov Sumbar
6	Survei Penilaian Integritas KPK	Angka	-	72	-	74	74	Kota Padang menggunakan Survei Penilaian Integritas KPK sebagai pengganti indeks integritas nasional
7	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda (Penegakan Perda)	%	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	Baseline 2024	TARGET TAHUN 2025	Realisasi 2025	Target Tahun 2027		KET
						RPJMD	RKPD	
1	2	3	4	5	4	5	6	7
8	Persentase Capaian Aksi HAM	%	-	-	-	-	-	
9	Tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu	%	73,72	-	-	-	-	Kota padang menggunakan indeks ini sebagai pengganti indeks demokrasi indonesia
10	Penurunan Angka Kriminalitas	Angka	-	11	-3.41	10,6	10,6	Kota Padang menggunakan indikator Penurunan Angka Kriminalitas sebagai pengganti indeks rasa aman (angka kriminalitas meningkat dari tahun sebelumnya dimana pada tahun 2024 sebanyak 1.789 kasus dan pada tahun 2025 sebanyak 1.850 kasus)
11	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban	Angka	-	65	76,32	66	66	
12	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	4,21	4,27	4.25	4,35	4,35	
13	Indeks Zakat Nasional (IZN)	Indeks		0.71	-	0.75	0.75	Imperatif dari Prov Sumbar

6.4. Indikator Kinerja Kunci

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (EKPPD) dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan yang menjadi kewenangan daerah. EKPPD ini dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang disusun berdasarkan pembagian urusan pemerintahan menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai Undang – undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Indikator Kinerja Kunci terbagi atas Indikator Kinerja Output, Outcome dan Penunjang Urusan Pilihan

6.4.1. Indikator Kinerja Kunci Output

Tabel 6- 4 Indikator Kinerja Kunci Output

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA (2024)	TARGET							SUMBER DATA	KET
							2025	Realisasi 2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Pendidikan	1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	1	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)	Jumlah PAUD: 540	485	539	495	500	507	507	507	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				2	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	18.164/600	500	20402	500	500	500	500	500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				3	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	-	456	0	456	456	456	456	456	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA (2024)	TARGET							SUMBER DATA	KET
							2025	Realisasi 2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri dan Swasta)	1.783	1691	1830	1696	1701	1706	1711	1716	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				5	Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)	1.783	1691	1830	1696	1701	1706	1711	1716	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				6	Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D- IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	1.393	1290	1635	1369	1448	1527	1606	1685	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				7	Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non- formal dari lembaga pemerintah	429	498	435	498	498	498	498	498	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang	1	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	Jumlah SD/MI : 362 Jumlah	SD A :146B :180 c : 15	SD/MI : 364, SMP/MTs :122	SD A :148 B :182 c : 11 SMP	SD A :156 B :180 c : 6 SMP	SD A :160 B :185 c : 3 SMP	SD A :165 B :163 c : 0 SMP	SD A :176 B :172 c : 0 SMP	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA (2024)	TARGET							SUMBER DATA	KET
							2025	Realisasi 2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			berpartisipasi dalam pendidikan dasar			SMP/MTs : 122	SMP A : 57 B : 34 C : 9		A : 58 B : 36 C : 7	A : 62 B : 35 C : 4	A : 65 B : 33 C : 3	A : 68 B : 32 C : 1	A : 70 B : 31 C : 0		
				2	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	93.735 / 5047	Baju 4385 LKS 4385	97402	Baju 4385 LKS 8770	Baju 4385 LKS 13155	Baju 4385 LKS 17540	Baju 4385 LKS 21925	Baju 4385 LKS 26310	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				3	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	45.151 / 2779	Baju 2797 LKS 2797	42143	Baju 2797 LKS 5594	Baju 2797 LKS 8391	Baju 2797 LKS 8391	Baju 2797 LKS 8391	Baju 2797 LKS 8391	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				4	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	72.235 /31	72235	74986	72235	72235	72235	72235	72235	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				5	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	36.367 / 24	36367	33310	36367	36367	36367	36367	36367	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				6	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	5.892	5502	5889	5777	5639	5612	5639	5639	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA (2024)	TARGET							SUMBER DATA	KET
							2025	Realisasi 2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				7	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	3.389	2653	3438	2785	2719	2706	2719	2719	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				8	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	5.892	5502	5889	5777	5639	5612	5639	5639	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				9	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama(Negeri dan Swasta)	3.389	2653	3438	2785	2719	2706	2719	2719	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				10	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	1.283	1227	1341	1288	1257	1251	1257	1257	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				11	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	1.351	585	565	614	599	596	599	599	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				12	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	1.283	1227	1341	1288	1257	1251	1257	1257	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA (2024)	TARGET							SUMBER DATA	KET
							2025	Realisasi 2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				13	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	1.351	585	565	614	599	596	599	599	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				14	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	5.572	3423	5754	3508	3491	3491	3491	3491	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				15	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	3.344	1569	3384	1600	1600	1600	1600	1600	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				16	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	319	263	326	265	267	269	267	267	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				17	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	117	75	117	83	85	87	89	91	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA (2024)	TARGET							SUMBER DATA	KET
							2025	Realisasi 2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				18	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/sederajat	1.189	403	1245	393	383	373	363	353	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				19	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/sederajat	665	198	537	195	192	185	180	170-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yangberpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	1	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi (Jumlah sekolah terakreditasi yang dimaksud adalah seluruh sekolah yang sudah terakreditasi, baik A, B atau C (dibuat terpisah))	Jumlah SD/MI : 362 Jumlah SMP/MTs : 122	SD A :146 B :180 c : 15 SMP A : 57 B : 34 C : 9	SD/MI : 364, SMP/MTs :122	SD A :148 B :182 c : 11 SMP A : 58 B : 36 C : 7	SD A :156 B :180 c : 6 SMP A : 62 B : 35 C : 4	SD A :160 B :185 c : 3 SMP A : 65 B : 33 C : 3	SD A :165 B :163 c : 0 SMP A : 68 B : 32 C : 1	SD A :176 B :172 c : 0 SMP A : 70 B : 31 C : 0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				2	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	93.735 / 5047	Baju 4385 LKS 4385	97402	Baju 4385 LKS 8770	Baju 4385 LKS 13155	Baju 4385 LKS 17540	Baju 4385 LKS 21925	Baju 4385 LKS 26310	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				3	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	45.151 / 2779	Baju 2797 LKS 2797	42143	Baju 2797 LKS 5594	Baju 2797 LKS 8391	Baju 2797 LKS 8391	Baju 2797 LKS 8391	Baju 2797 LKS 8391	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA (2024)	TARGET							SUMBER DATA	KET
							2025	Realisasi 2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				4	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	72.235 / 31	0	74986	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				5	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	36.367 / 34	36367	33310	36367	36367	36367	36367	36367	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				6	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	5.892	5502	5889	5777	5639	5612	5639	5639	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				7	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	3.389	2653	3438	2785	2719	2706	2719	2719	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				8	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	5.892	5502	5889	5777	5639	5612	5639	5639	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				9	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	3.389	2653	3438	2785	2719	2706	2719	2719	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA (2024)	TARGET							SUMBER DATA	KET
							2025	Realisasi 2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				10	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	1.283	1227	1341	1288	1257	1251	1257	1257	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				11	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	1.351	585	565	614	599	596	599	599	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				12	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	1.283	1227	1341	1288	1257	1251	1257	1257	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				13	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	1.351	585	565	614	599	596	599	599	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				14	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	5.752	3423	5754	3508	3491	3491	3491	3491	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				15	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	3.344	1569	3028	1600	1600	1600	1600	1600	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA (2024)	TARGET							SUMBER DATA	KET
							2025	Realisasi 2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				16	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki jazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	319	263	326	265	267	269	267	267	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				17	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	117	75	117	83	85	87	89	91	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				18	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki jazah SMA/sederajat	1.189	403	1242	393	383	373	363	353	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				19	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/sederajat	665	198	537	195	192	185	180	170-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang	1	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)	Jumlah : 29	A : 5 B : 17 C : 5	29	A : 5 B : 19 C : 5	A : 6 B : 20 C : 3	A : 5 B : 20 C : 3	A : 6 B : 23 C : 0	A : 6 B : 23 C : 0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA (2024)	TARGET							SUMBER DATA	KET
							2025	Realisasi 2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan												

6.4.2. Indikator Kinerja Kunci Outcome

Tabel 6- 5 Indikator Kinerja Kunci Outcome

NO	URUSAN	NO	IKK HASIL	CAPAIAN KINERJA(2025)			TARGET					SUMBER DATA	KET
					Target 2025	Realisasi 2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A.	**Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**												
1	Pendidikan	1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	19.825 / 31.808 x 100 % = 62.32%	62%	62,32%	65%	67%	70%	72%	75%	Dinas Pendidikan	
		2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	91.219 / 98.091 x 100 % = 92.99%	93%	0,9299	94%	95%	96%	97%	98%	Dinas Pendidikan	
		3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	47.748 / 50.026 x 100 % = 95.44%	94%	0,9544	95%	96%	97%	98%	99%	Dinas Pendidikan	
		4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	4.376 / 4.646 x 100 % = 94.18%	100%	0,9418	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pendidikan	

NO	URUSAN	NO	IKK HASIL	CAPAIAN KINERJA(2025)			TARGET					SUMBER DATA	KET
					Target 2025	Realisasi 2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Kesehatan	1	Rasio daya tampung RS Rujukan	3002 -------- x 100 % 961.910 = 0,31%	0,32%	0,31%	0,30%	29,4%	29,1%	28,9%	28,6%	Dinas Kesehatan	
		2	Persentase RS Rujukan Tingkat Kota yang terakreditasi	28 -------- x 100 % 28 = 100%	100	100,00%	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan	
		3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	6.643 -------- x 100 % 6.608 = 100,52 %	100	100,52%	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan	
		4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	6.643 -------- x 100 % 6.608 = 100,52%	100	100,52%	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan	
		5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	6.514 -------- x 100 % 6.296 = 103.46%	100	103,46%	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan	
		6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	31.368 -------- x 100 % 30.915 = 101,46%	100	101,46%	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan	
		7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	57.104 -------- x 100 % 57.104 = 100%	100	100,00%	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan	
		8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	617.577 -------- x 100 % 617.577 = 100%	100%	100,00%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan	
		9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	29.021 -------- x 100 % 29.021 = 100%	100	100,00%	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan	
		10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	61.398 -------- x 100 % 61.133	100%	100,43%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan	

NO	URUSAN	NO	IKK HASIL	CAPAIAN KINERJA(2025)			TARGET					SUMBER DATA	KET
					Target 2025	Realisasi 2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				= 100.43%									
		11	Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	18.873 -------- x 100 % 17.571 = 107.4%	100%	107,40%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan	
		12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	2.353 -------- x 100 % 2.027 = 116,08%	100%	116,08%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan	
		13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	25.365 -------- x 100 % 23.468 = 108.08%	100%	108,08%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan	
		14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	25.243 -------- x 100 % 21.500 = 117.4%	100%	117,40%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan	
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kota	0 Ha ---- x 100 % 1 Ha = 0%	-	0,00%	-	-	-	-	-	Dinas PUPR	Merupakan kewenangan pemerintah pusat
		2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kota	0 m ---- x 100 % 0 m = 0%	-	0,00%	-	-	-	-	-	Dinas PUPR	Merupakan kewenangan pemerintah pusat
		3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	3.290 hektar ---- x 100 % 4239.75 hektar = 77.59%	79 %	78%	81 %	83 %	85 %	87 %	88 %	Dinas PUPR	
		4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kota	943060 ---- x 100 % 961910 = 98.04%	98,10%	98,04%	98,20%	98,50%	98,80%	99,50%	100%	Dinas Perkim	

NO	URUSAN	NO	IKK HASIL	CAPAIAN KINERJA(2025)			TARGET					SUMBER DATA	KET
					Target 2025	Realisasi 2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	241481 ---- x 100 % 241481 = 100%	100%	100,00%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Perkim	
		6	Mengukur rasio kepatuhan IMB kota	1.667 ---- x 100 % 1.667 = 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DPUPR	
		7	Tingkat kemantapan jalan kota	495.69 Km ---- x 100 % 624.69 Km = 79.34%	82 %	79%	82.6 %	83,90%	84,6%	85,2%	85,86%	Dinas PUPR	
		8	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	150 ---- x 100 % 140 = 107.14 %	81,86%	107.14 %	81,86%	81,86%	81,86%	81,86%	81,86%	Dinas PUPR	
		9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	74 Paket ---- x 100 % 74 Paket = 100%	100%	100,00%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas PUPR	
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kota	16 ---- x 100 % 16 = 100. %	100%	100. %	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Perkim	
		2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kota	1 -------- x 100 % 1 = 100 %	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Perkim	
		3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	250.29 Ha -------- x 100 % 435.18 Ha = 57.51%	56,31%	57,51%	66,85%	78,57%	90,29%	100%	100%	Dinas Perkim	
		4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	307 -------- x 100 % 6768 = 4.54%	2,89%	4,54%	2,82%	2,75%	2,68%	2,60%	2,52%	Dinas Perkim	
		5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	2001 -------- x 100 % 2001	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Perkim	

NO	URUSAN	NO	IKK HASIL	CAPAIAN KINERJA(2025)			TARGET					SUMBER DATA	KET
					Target 2025	Realisasi 2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				= 100%									
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	38 ----- x 100 % 38 = 100 %	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	Satpol PP	
		2	Persentase Peraturan Daerahdan Perkada yang ditegakkan	21 -------- x 100 % 21 = 100 %	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	Satpol PP	
		3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	668196 -------- x 100 % 954565 = 70%	72	70,00%	78	82	88	95	100	BPBD	
		4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1 -------- x 100 % 1 = 100%	72	100%	78	82	88	95	100	BPBD	
		5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	429 -------- x 100 % 429 = 100%	100%	1	100%	100%	100%	100%	100%	BPBD	
		6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban Kebakaran	313 -------- x 100 % 313 = 100%	100%	1	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Damkar	
		7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	2.623 Menit	7,60	2.623 Menit	7,50	7,40	7,20	7,10	7 menit	Dinas Damkar	
6	Sosial	1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	990.00 -------- x 100 % 2606.00 = 37.98%	38	38%	38,50	39	39,25	39,50	39,75	Dinas Sosial	
		2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat	3527.00 -------- x 100 % 3527.00	100	100%	100	100	100	100	100	Dinas Sosial	

NO	URUSAN	NO	IKK HASIL	CAPAIAN KINERJA(2025)			TARGET					SUMBER DATA	KET
					Target 2025	Realisasi 2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota	= 100%									
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar												
7	Tenaga Kerja	1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	7 ---- x 100 % 19 = 36.84%	-	37%	-	-	-	-	-	Disnakerin	
		2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	66.363 -------- x 100 % 103.962 = 63.83%	100%	0,6383	100%	100%	100%	100%	100%	Disnakerin	
		3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	53.656,33 -------- x 100 % 103.962 = 51.61%		51,61%						Disnakerin	
		4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	73 ---- x 100 % 73 = 94.8%	100 %	95%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Disnakerin	
		5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kota	890 ---- x 100 % 2994 = 29,72	71,1%	29,72	71,2%	71,3%	71,4%	71,5%	71,6%	Disnakerin	
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	Persentase ARG (Anggaran Responsif Gender) pada belanja langsung APBD	431508889411.00 ---- x 100 % 2982604071958.00 = 14.46%	11,80	14,46%	12,00	12,25	12,50	12,75	13,00	DP3AP2KB	

NO	URUSAN	NO	IKK HASIL	CAPAIAN KINERJA(2025)			TARGET					SUMBER DATA	KET
					Target 2025	Realisasi 2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kota	61.00 ---- x 100 % 61.00 = 100%	100	100,00%	100	100	100	100	100	DP3AP2KB	
		3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	21.00 ---- x 100 % 342379.00 = 0%	10,00	0,00%	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	DP3AP2KB	
9	Pangan	1	Persentase cadangan pangan	147.43 --- x 100 % 88.66 = 166.28%	178,82	166,28%	237,65	284,70	331,76	378,82	425,88	Dinas Perikanan dan Pangan	
10	Pertanahan	1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	1681 -------- x 100 % 1681 = 100%	1.450 permohonan	1	1.450 permohonan	1.450 permohonan	1.450 permohonan	1.450 permohonan	1.450 permohonan	DPUPR	
		2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	1 lokasi --- x 100 % 1 lokasi = 100%	100%	100,00%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pertanahan	
		3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	0 ------- x 100 % 0 = 0%	1.450 permohonan	0%	1.450 permohonan	1.450 permohonan	1.450 permohonan	1.450 permohonan	1.450 permohonan	DPUPR	
		4	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	0 ------- x 100 % 0 = 0%	0,5 %	0%	0,5%	0,5 %	0,5 %	0,68 %	0,68 %	Dinas Pertanahan	
		5	Tersedianya tanah untuk masyarakat	0 ------- x 100 % 0 = 0%	-	0,00%	-	-	-	-	-	Dinas Pertanahan	

NO	URUSAN	NO	IKK HASIL	CAPAIAN KINERJA(2025)			TARGET					SUMBER DATA	KET
					Target 2025	Realisasi 2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	6 kasus ------- x 100 % 6 kasus = 100%	80	100%	80	80	90	90	100	Dinas Pertanahan	
11	Lingkungan Hidup	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota	IKLH = 77.26 IKA = 69.09 IKU = 87.80 IKL = 71.78	IKLH : 77.26 IKA : 79.70 IKU : 73.17 IKL : 80.44		IKLH : 77.27 IKA : 79.71 IKU : 73.18 IKL : 80.46	IKLH : 77.28 IKA : 79.72 IKU : 73.19 IKL : 80.47	IKLH : 77.29 IKA : 79.73 IKU : 73.20 IKL : 80.49	IKLH : 77.30 IKA : 79.74 IKU : 73.21 IKL : 80.50	IKLH : 77.31 IKA : 81.09 IKU : 74.67 IKL : 80.78	DLH	IKLH tidak termasuk Outcome sesuai edaran kepmendagri no. 100.2.1.7-109 tahun 2026 tentang IKK, Bobot dan Penilaian Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
		2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kota Padang	231379,91 -------- x 100 % 235235.09 = 98.36%	95,00%		96.10 %	96,88%	96,66%	98,00%	99,22%	DLH	
		3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota Padang	100 %	100 %		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	DLH	

NO	URUSAN	NO	IKK HASIL	CAPAIAN KINERJA(2025)			TARGET					SUMBER DATA	KET
					Target 2025	Realisasi 2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota Padang	62 -------- x 100 % 50 = 124%	100 %	124%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	DLH	Sesuai kepmendagri no. 100.2.1.7-109 tahun 2026 tentang IKK, Bobot dan Penilaian Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
			Persentase jumlah sampah yang tertangani	231379,91 -------- x 100 % 235235.09 = 98.36%	95,00%	98%	96.10 %	96,88%	96,66%	98,00%	99,22%		Sesuai kepmendagri no. 100.2.1.7-109 tahun 2026 tentang IKK, Bobot dan Penilaian Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
12	Administrasi Kependudukan dan Penatatan Sipil	1	Perekaman KTP Elektronik	687.920 -------- x 100 % 699.197 = 98.38%	99,60 %	98%	99,60 %	99,61 %	99,61 %	99,62 %	99,63 %	Disdukcapil	
		2	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	165.370 -------- x 100 % 260.219 = 63.55%	60,05%	64%	60,08 %	60,10	60,12 %	60,15 %	60,18 %	Disdukcapil	
		3	Kepemilikan akta kelahiran	274.813 -------- x 100 % 275.917	99,58 %	99,59%	99,62 %	99,64%	99,68 %	99,70%	99,73%	Disdukcapil	

NO	URUSAN	NO	IKK HASIL	CAPAIAN KINERJA(2025)			TARGET					SUMBER DATA	KET
					Target 2025	Realisasi 2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				= 99,59%									
		4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	10 --- x 100 % 35 = 28.57%	4 opd	28,57%	2 opd	2 opd	2 opd	2 opd	2 opd	Disdukcapil	
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	Persentase pengentasan desa tertinggal	-	-		-	-	-	-	-		Tidak ada kewenangan kota
		2	Persentase peningkatan status desa mandiri	-	-		-	-	-	-	-		Tidak ada kewenangan kota
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,18	2,2	218,00%	2,19	2,19	2,19	2,18	2,18	DP3AP2KB	
		2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	59112 -------- x 100 % 91042 = 64.92%	69,07	0,6492	69,15	69,25	69,35	69,45	69,55	DP3AP2KB	
		3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	5604 -------- x 100 % 91042 = 6.15%	10,00	6,15%	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	DP3AP2KB	
15	Perhubungan	1	Rasio konektivitas Kota	IK1 = ((69x1)/93) IK1 = 0,74 IK1 = ((69x1)/93) IK1 = 0,74	60%	0,74	60,2%	60,4%	60,6%	60,8%	70%	Dishub	

NO	URUSAN	NO	IKK HASIL	CAPAIAN KINERJA(2025)			TARGET					SUMBER DATA	KET
					Target 2025	Realisasi 2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				IK2 = 0 IK2 = 0 RKK = (0,74x1) + 0 = 0,74 RKK = (0,74x1) + 0 = 0,74 IK1 = ((69x1)/93) IK1 = ((69x1)/93)								
		2	V/C RASIO di jalan kota	1279,0 -------- x 100 % 2778,0 = 46.03%	0,47%	0,4603	0,48%	0,49%	0,50%	0,51%	0,52%	Dishub	
16	Komunikasi dan Informatika	1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	42 -------- x 100 % 42 = 100%	100 %	1	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Diskominfo	
		2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	17 -------- x 100 % 32 = 53,12%	9 --- x 100 % 15 = 60%	53,12%	11 --- x 100 % 15 = 73,33%	12 --- x 100 % 15 = 80%	13 --- x 100 % 15 = 86,66%	14 --- x 100 % 15 = 93,33%	15 --- x 100 % 15 = 100%	Diskominfo	
		3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kota	1786822 -------- x 100 % 651922 = 274.08%	100%	274,08%	100%	100%	100%	100%	100%	Diskominfo	
17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	93 ------- x 100 % 348 = 26,72%	26,17 %	26,72%	21,16 %	26,84 %	36,69 %	57,97 %	100 %	Dinas Koperasi dan UKM	

NO	URUSAN	NO	IKK HASIL	CAPAIAN KINERJA(2025)			TARGET					SUMBER DATA	KET
					Target 2025	Realisasi 2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	14500 ------- x 100 % 48274 = 30.03%	27 %	30,03%	32 %	37 %	43 %	48 %	53 %	Dinas Koperasi dan UKM	
18	Penanaman Modal	1	Persentase peningkatan investasi di Kota Padang	3.028.289.8860.790,97 – 3.650.616.813.415 -------- x 100 % 3.650.616.813.415 = -17,05	100%	-17,05	100%	100%	100%	100%	100%	DPMPTSP	
19	Kepemudaan dan Olahraga	1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	1.646 -------- x 100 % 228.404 = 0,72%	0,65	0,72%	0,67	0,68	0,69	0,70	0,71	Dispora	
		2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	22.812 -------- x 100 % 228.404 = 9.98%	15	9,98%	15,3	15,5	15,8	16	16,3	Dispora	
		3	Peningkatan prestasi olahraga	173 Medali	111	73 Medali	112	113	114	115	116	Dispora	
20	Statistik	1	Presentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	42 -------- x 100 % 42 =100 %	100%	100,00%	100%	100%	100%	100%	100%	Diskominfo	
		2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	42 -------- x 100 % 42 =100 %	100%	1	100%	100%	100%	100%	100%	Diskominfo	
21	Persandian	1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	526.00 ------ x 100 % 916.00 = 57.42%	68%	0,5742	70%	75%	77%	80%	80%	Diskominfo	
22	Kebudayaan	1	Terlestarikannya Cagar Budaya	81 -------- x 100 % 81 = 100%	100%	100,00%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

NO	URUSAN	NO	IKK HASIL	CAPAIAN KINERJA(2025)			TARGET					SUMBER DATA	KET
					Target 2025	Realisasi 2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	Perpustakaan	1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	70,01	74	60,19	76	77	78	80	81	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
		2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	85,47	86	18,76	86	86	86	86	88	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
24	Kearsipan	1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	T = (a+i+s+j)/4 T = (100%+100%+100%+75%) /4 T = 98.53%	50,17%	98,50%	54,45%	60,48%	66,96%	73,29%	97,61%	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
C	**Urusan Pilihan**												
		2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	T = (m + b + g + a + c + i)/6 T = (100%+ 100%+ 100%+100%+100%+100%)/ 6 T = 100%	100%	100% 100 %	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
25	Kelautan dan Perikanan	1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kota di (sumber data: one data KKP)	35458.99 Ton -------- x 100 % 35275.37= 100,52%	100 %	100,52%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Dinas Perikanan dan Pangan	
26	Pariwisata	1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	36.720 -------- x 100 % 191.632 = 19.16%	191.632 – 455.698 --- x 100 % 455.698 = 57,95%	0,1916	0,89	0,9	0,91	0,92	0,93	Dinas Pariwisata	

NO	URUSAN	NO	IKK HASIL	CAPAIAN KINERJA(2025)			TARGET					SUMBER DATA	KET
					Target 2025	Realisasi 2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kota	-135.187 -------- x 100 % 5.455.685 = -2.48 %	5.455.685 – 3.702.842 --- x 100 % 3.702.842 = 47,34 %	-2.48 %	2,3	2,5	2,7	2,9	3,1	Dinas Pariwisata	
		3	Tingkat hunian akomodasi	606.378 -------- x 100 % 1.750.905 = 34.63%	694.985 ------ x 100 % 1.370.575 = 50,71%	0,3463	50,87	50,95	51,03	51,12	51,20	Dinas Pariwisata	
		4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	1140.19 -------- x 100 % 84182.56 = 1,35%	1.140,19 ----- x 100 % 84.182,56 = 1,35%	1,35%	1,19	1,23	1,33	1,37	1,4	Dinas Pariwisata	
		5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	1.529.117.39.3..39. -------- x 100 % 73.279.829.14.27. = 20,86%	140.213.296.706 ---- x 100 % 662.549.854.335 = 21,16%	20,86%	15,81	14,53	13,43	12,63	12,90	Dinas Pariwisata	
27	Pertanian	1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	46.940,20 Ton ------ x 100 % 10.122 Ha = 4,64 ton/Ha	46.940,20 Ton ----- x 100 % 10.122 Ha = 4,64 ton/Ha	4,64	4,87 ton/Ha	5,11 ton/Ha	5,37 ton/Ha	5,64 ton/Ha	5,92 ton/Ha	Dinas Pertanian	
		2	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	-5 --- x 100 % 13 = - 48.37%	-90%	-0,4837	-90%	-90%	-90%	-90%	-90%	Dinas Pertanian	

NO	URUSAN	NO	IKK HASIL	CAPAIAN KINERJA(2025)			TARGET					SUMBER DATA	KET
					Target 2025	Realisasi 2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	Energi Sumber Daya Mineral	1	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kota	-	-		-	-	-	-	-	DPMPTSP	
29	Perdagangan	1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	102 -------- x 100 % 102 = 100 %	pupr	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Dinas Perdagangan	
		2	Persentase kinerja realisasi pupuk	3.77Ton -------- x 100 % 4.89 Ton = 76.99 %	50%	76.99 %	60%	65%	70%	80%	90%	Dinas Pertanian	
		3	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	3,77 ------- x 100 % 4,89 = 76,99 %	87,50 %	76,99 %	87,65 %	87,7 %	87,85 %	87,90 %	88 %	Dinas Perdagangan	
30	Perindusrian	1	Pertambahan jumlah industri Kecil dan Menengah di kota	1.262 -------- x 100 % 12.206 = 36.84%	16,85%	36,84%	16,87%	16,89%	16,91%	16,93%	16,95%	Disnakerin	
		2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industry dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	71,16%	100%	0,7116	100%	100%	100%	100%	100%	Disnakerin	

NO	URUSAN	NO	IKK HASIL	CAPAIAN KINERJA(2025)			TARGET					SUMBER DATA	KET
					Target 2025	Realisasi 2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Tidak ada	Tidak ada	-	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Disnakerin	
		4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI yang lokasinya lintas daerah kota dalam 1 kota yang dikeluarkan oleh instansi terkait	-	-	-	-	-	-	-	-	Disnakerin	
		5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kota dalam 1 kota yang dikeluarkan intansi terkait	-	-	-	-	-	-	-	-	Disnakerin	
		6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	100%	60%	100,00%	60%	60%	60%	60%	60%	Disnakerin	
NO	URUSAN	NO	IKK HASIL	CAPAIAN KINERJA(2025)			TARGET					SUMBER DATA	KET
					Target 2025	Realisasi 2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A.	**Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**												
1	Pendidikan	1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	19.825 ------- x 100 % 31.808 = 62.32%	62%	62,32%	65%	67%	70%	72%	75%	Dinas Pendidikan	

NO	URUSAN	NO	IKK HASIL	CAPAIAN KINERJA(2025)			TARGET					SUMBER DATA	KET
					Target 2025	Realisasi 2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	91.219 -------- x 100 % 98.091 = 92.99%	93%	0,9299	94%	95%	96%	97%	98%	Dinas Pendidikan	
		3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	47.748 -------- x 100 % 50.026 = 95.44%	94%	0,9544	95%	96%	97%	98%	99%	Dinas Pendidikan	
		4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	4.376 -------- x 100 % 4.646 = 94.18%	100%	0,9418	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pendidikan	
2	Kesehatan	1	Rasio daya tampung RS Rujukan	3002 -------- x 100 % 961.910 = 0,31%	0,32%	0,31%	0,30%	29,4%	29,1%	28,9%	28,6%	Dinas Kesehatan	
		2	Persentase RS Rujukan Tingkat Kota yang terakreditasi	28 -------- x 100 % 28 = 100%	100	100,00%	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan	
		3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	6.643 -------- x 100 % 6.608 = 100,52 %	100	100,52%	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan	
		4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	6.643 -------- x 100 % 6.608 = 100,52%	100	100,52%	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan	
		5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	6.514 -------- x 100 % 6.296 = 103.46%	100	103,46%	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan	
		6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	31.368 -------- x 100 % 30.915 = 101,46%	100	101,46%	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan	

NO	URUSAN	NO	IKK HASIL	CAPAIAN KINERJA(2025)			TARGET					SUMBER DATA	KET
					Target 2025	Realisasi 2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	57.104 / 57.104 x 100 % = 100%	100	100,00%	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan	
		8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	617.577 / 617.577 x 100 % = 100%	100%	100,00%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan	
		9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	29.021 / 29.021 x 100 % = 100%	100	100,00%	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan	
		10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	61.398 / 61.133 x 100 % = 100.43%	100%	100,43%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan	
		11	Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	18.873 / 17.571 x 100 % = 107.4%	100%	107,40%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan	
		12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	2.353 / 2.027 x 100 % = 116,08%	100%	116,08%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan	
		13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	25.365 / 23.468 x 100 % = 108.08%	100%	108,08%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan	
		14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	25.243 / 21.500 x 100 % = 117.4%	100%	117,40%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan	
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kota	0 Ha / 1 Ha x 100 % = 0%	-	0,00%	-	-	-	-	-	Dinas PUPR	Merupakan kewenangan pemerintah pusat

NO	URUSAN	NO	IKK HASIL	CAPAIAN KINERJA(2025)			TARGET					SUMBER DATA	KET
					Target 2025	Realisasi 2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kota	0 m ---- x 100 % 0 m = 0%	-	0,00%	-	-	-	-	-	Dinas PUPR	Merupakan kewenangan pemerintah pusat
		3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	3.290 hektar ---- x 100 % 4239.75 hektar = 77.59%	79 %	78%	81 %	83 %	85 %	87 %	88 %	Dinas PUPR	
		4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kota	943060 ---- x 100 % 961910 = 98.04%	98,10%	98,04%	98,20%	98,50%	98,80%	99,50%	100%	Dinas Perkim	
		5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	241481 ---- x 100 % 241481 = 100%	100%	100,00%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Perkim	
		6	Mengukur rasio kepatuhan IMB kota	1.667 ---- x 100 % 1.667 = 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DPUPR	
		7	Tingkat kemantapan jalan kota	495.69 Km ---- x 100 % 624.69 Km = 79.34%	82 %	79%	82.6 %	83,90%	84,6%	85,2%	85,86%	Dinas PUPR	
		8	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	150 ---- x 100 % 140 = 107.14 %	81,86%	107.14 %	81,86%	81,86%	81,86%	81,86%	81,86%	Dinas PUPR	
		9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	74 Paket ---- x 100 % 74 Paket = 100%	100%	100,00%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas PUPR	
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kota	16 ---- x 100 % 16 = 100. %	100%	100. %	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Perkim	

NO	URUSAN	NO	IKK HASIL	CAPAIAN KINERJA(2025)			TARGET					SUMBER DATA	KET
					Target 2025	Realisasi 2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kota	1 -------- x 100 % 1 = 100 %	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Perkim	
		3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	250.29 Ha -------- x 100 % 435.18 Ha = 57.51%	56,31%	57,51%	66,85%	78,57%	90,29%	100%	100%	Dinas Perkim	
		4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	307 -------- x 100 % 6768 = 4.54%	2,89%	4,54%	2,82%	2,75%	2,68%	2,60%	2,52%	Dinas Perkim	
		5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	2001 -------- x 100 % 2001 = 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Perkim	
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	38 ----- x 100 % 38 = 100 %	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	Satpol PP	
		2	Persentase Peraturan Daerahdan Perkada yang ditegakkan	21 -------- x 100 % 21 = 100 %	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	Satpol PP	
		3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	668196 -------- x 100 % 954565 = 70%	72	70,00%	78	82	88	95	100	BPBD	
		4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1 -------- x 100 % 1 = 100%	72	100%	78	82	88	95	100	BPBD	
		5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	429 -------- x 100 % 429 = 100%	100%	1	100%	100%	100%	100%	100%	BPBD	

NO	URUSAN	NO	IKK HASIL	CAPAIAN KINERJA(2025)			TARGET					SUMBER DATA	KET
					Target 2025	Realisasi 2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban Kebakaran	313 / 313 x 100 % = 100%	100%	1	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Damkar	
		7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	2.623 Menit	7,60	2.623 Menit	7,50	7,40	7,20	7,10	7 menit	Dinas Damkar	
6	Sosial	1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	990.00 / 2606.00 x 100 % = 37.98%	38	38%	38,50	39	39,25	39,50	39,75	Dinas Sosial	
		2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota	3527.00 / 3527.00 x 100 % = 100%	100	100%	100	100	100	100	100	Dinas Sosial	
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar												
7	Tenaga Kerja	1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	7 / 19 x 100 % = 36.84%	-	37%	-	-	-	-	-	Disnakerin	
		2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	66.363 / 103.962 x 100 % = 63.83%	100%	0,6383	100%	100%	100%	100%	100%	Disnakerin	
		3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	53.656,33 / 103.962 x 100 % = 51.61%		51,61%						Disnakerin	
		4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	73 / 73 x 100 % = 94.8%	100 %	95%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Disnakerin	

NO	URUSAN	NO	IKK HASIL	CAPAIAN KINERJA(2025)			TARGET					SUMBER DATA	KET
					Target 2025	Realisasi 2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kota	890 ---- x 100 % 2994 = 29,72	71,1%	29,72	71,2%	71,3%	71,4%	71,5%	71,6%	Disnakerin	
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	Persentase ARG (Anggaran Responsif Gender) pada belanja langsung APBD	431508889411.00 ---- x 100 % 2982604071958.00 = 14.46%	11,80	14,46%	12,00	12,25	12,50	12,75	13,00	DP3AP2KB	
		2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kota	61.00 ---- x 100 % 61.00 = 100%	100	100,00%	100	100	100	100	100	DP3AP2KB	
		3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	21.00 ---- x 100 % 342379.00 = 0%	10,00	0,00%	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	DP3AP2KB	
9	Pangan	1	Persentase cadangan pangan	147.43 --- x 100 % 88.66 = 166.28%	178,82	166,28%	237,65	284,70	331,76	378,82	425,88	Dinas Perikanan dan Pangan	
10	Pertanahan	1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	1681 -------- x 100 % 1681 = 100%	1.450 permohonan	1	1.450 permohonan	1.450 permohonan	1.450 permohonan	1.450 permohonan	1.450 permohonan	DPUPR	
		2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	1 lokasi --- x 100 % 1 lokasi = 100%	100%	100,00%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pertanahan	
		3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	0 ------- x 100 % 0 = 0%	1.450 permohonan	0%	1.450 permohonan	1.450 permohonan	1.450 permohonan	1.450 permohonan	1.450 permohonan	DPUPR	

NO	URUSAN	NO	IKK HASIL	CAPAIAN KINERJA(2025)			TARGET					SUMBER DATA	KET
					Target 2025	Realisasi 2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	0 ------- x 100 % 0 = 0%	0,5 %	0%	0,5%	0,5 %	0,5 %	0,68 %	0,68 %	Dinas Pertanahan	
		5	Tersedianya tanah untuk masyarakat	0 ------- x 100 % 0 = 0%	-	0,00%	-	-	-	-	-	Dinas Pertanahan	
		6	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	6 kasus ------- x 100 % 6 kasus = 100%	80	100%	80	80	90	90	100	Dinas Pertanahan	
11	Lingkungan Hidup	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota	IKLH = 77.26 IKA = 69.09 IKU = 87.80 IKL = 71.78	IKLH : 77.26 IKA : 79.70 IKU : 73.17 IKL : 80.44		IKLH : 77.27 IKA : 79.71 IKU : 73.18 IKL : 80.46	IKLH : 77.28 IKA : 79.72 IKU : 73.19 IKL : 80.47	IKLH : 77.29 IKA : 79.73 IKU : 73.20 IKL : 80.49	IKLH : 77.30 IKA : 79.74 IKU : 73.21 IKL : 80.50	IKLH : 77.31 IKA : 81.09 IKU : 74.67 IKL : 80.78	DLH	IKLH tidak termasuk Outcome sesuai edaran kepmendagri no. 100.2.1.7-109 tahun 2026 tentang IKK, Bobot dan Penilaian Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
		2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kota Padang	231379,91 -------- x 100 % 235235.09 = 98.36%	95,00%		96.10 %	96,88%	96,66%	98,00%	99,22%	DLH	

NO	URUSAN	NO	IKK HASIL	CAPAIAN KINERJA(2025)			TARGET					SUMBER DATA	KET
					Target 2025	Realisasi 2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota Padang	100 %	100 %		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	DLH	
			Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota Padang	62 -------- x 100 % 50 = 124%	100 %	124%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	DLH	Sesuai kepmendagri no. 100.2.1.7-109 tahun 2026 tentang IKK, Bobot dan Penilaian Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
			Persentase jumlah sampah yang tertangani	231379,91 -------- x 100 % 235235.09 = 98.36%	95,00%	98%	96.10 %	96,88%	96,66%	98,00%	99,22%		Sesuai kepmendagri no. 100.2.1.7-109 tahun 2026 tentang IKK, Bobot dan Penilaian Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
12	Administrasi Kependudukan dan Penatatan Sipil	1	Perekaman KTP Elektronik	687.920 -------- x 100 % 699.197 = 98.38%	99,60 %	98%	99,60 %	99,61 %	99,61 %	99,62 %	99,63 %	Disdukcapil	

NO	URUSAN	NO	IKK HASIL	CAPAIAN KINERJA(2025)			TARGET					SUMBER DATA	KET
					Target 2025	Realisasi 2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	165.370 -------- x 100 % 260.219 = 63.55%	60,05%	64%	60,08 %	60,10	60,12 %	60,15 %	60,18 %	Disdukcapil	
		3	Kepemilikan akta kelahiran	274.813 -------- x 100 % 275.917 = 99,59%	99,58 %	99,59%	99,62 %	99,64%	99,68 %	99,70%	99,73%	Disdukcapil	
		4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	10 --- x 100 % 35 = 28.57%	4 opd	28,57%	2 opd	2 opd	2 opd	2 opd	2 opd	Disdukcapil	
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	Persentase pengentasan desa tertinggal	-	-		-	-	-	-	-		Tidak ada kewenangan kota
		2	Persentase peningkatan status desa mandiri	-	-		-	-	-	-	-		Tidak ada kewenangan kota
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,18	2,2	218,00%	2,19	2,19	2,19	2,18	2,18	DP3AP2KB	
		2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	59112 -------- x 100 % 91042 = 64.92%	69,07	0,6492	69,15	69,25	69,35	69,45	69,55	DP3AP2KB	
		3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	5604 -------- x 100 % 91042 = 6.15%	10,00	6,15%	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	DP3AP2KB	

NO	URUSAN	NO	IKK HASIL	CAPAIAN KINERJA(2025)			TARGET					SUMBER DATA	KET
					Target 2025	Realisasi 2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	Perhubungan	1	Rasio konektivitas Kota	IK1 = ((69x1)/93) IK1 = 0,74 IK1 = ((69x1)/93) IK1 = 0,74 IK2 = 0 IK2 = 0 RKK = (0,74x1) + 0 = 0,74 RKK = (0,74x1) + 0 = 0,74 IK1 = ((69x1)/93) IK1 = ((69x1)/93)	60%	0,74	60,2%	60,4%	60,6%	60,8%	70%	Dishub	
		2	V/C RASIO di jalan kota	1279,0 -------- x 100 % 2778,0 = 46.03%	0,47%	0,4603	0,48%	0,49%	0,50%	0,51%	0,52%	Dishub	
16	Komunikasi dan Informatika	1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	42 -------- x 100 % 42 = 100%	100 %	1	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Diskominfo	
		2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	17 -------- x 100 % 32 = 53,12%	9 --- x 100 % 15 = 60%	53,12%	11 --- x 100 % 15 = 73,33%	12 --- x 100 % 15 = 80%	13 --- x 100 % 15 = 86,66%	14 --- x 100 % 15 = 93,33%	15 --- x 100 % 15 = 100%	Diskominfo	

NO	URUSAN	NO	IKK HASIL	CAPAIAN KINERJA(2025)			TARGET					SUMBER DATA	KET
					Target 2025	Realisasi 2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kota	1786822 -------- x 100 % 651922 = 274.08%	100%	274,08%	100%	100%	100%	100%	100%	Diskominfo	
17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	93 ------- x 100 % 348 = 26,72%	26,17 %	26,72%	21,16 %	26,84 %	36,69 %	57,97 %	100 %	Dinas Koperasi dan UKM	
		2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	14500 ------- x 100 % 48274 = 30.03%	27 %	30,03%	32 %	37 %	43 %	48 %	53 %	Dinas Koperasi dan UKM	
18	Penanaman Modal	1	Persentase peningkatan investasi di Kota Padang	3.028.289.8860.790,97 – 3.650.616.813.415 -------- x 100 % 3.650.616.813.415 = -17,05	100%	-17,05	100%	100%	100%	100%	100%	DPMPTSP	
19	Kepemudaan dan Olahraga	1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	1.646 -------- x 100 % 228.404 = 0,72%	0,65	0,72%	0,67	0,68	0,69	0,70	0,71	Dispora	
		2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	22.812 -------- x 100 % 228.404 = 9.98%	15	9,98%	15,3	15,5	15,8	16	16,3	Dispora	
		3	Peningkatan prestasi olahraga	173 Medali	111	73 Medali	112	113	114	115	116	Dispora	

NO	URUSAN	NO	IKK HASIL	CAPAIAN KINERJA(2025)			TARGET					SUMBER DATA	KET
					Target 2025	Realisasi 2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	Statistik	1	Presentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	42 -------- x 100 % 42 =100 %	100%	100,00%	100%	100%	100%	100%	100%	Diskominfo	
		2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	42 -------- x 100 % 42 =100 %	100%	1	100%	100%	100%	100%	100%	Diskominfo	
21	Persandian	1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	526.00 ------ x 100 % 916.00 = 57.42%	68%	0,5742	70%	75%	77%	80%	80%	Diskominfo	
22	Kebudayaan	1	Terlestarikannya Cagar Budaya	81 -------- x 100 % 81 = 100%	100%	100,00%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
23	Perpustakaan	1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	70,01	74	60,19	76	77	78	80	81	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
		2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	85,47	86	18,76	86	86	86	86	88	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
24	Kearsipan	1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	T = (a+i+s+j)/4 T = (100%+100%+100%+75%) /4 T = 98.53%	50,17%	98,50%	54,45%	60,48%	66,96%	73,29%	97,61%	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
C	**Urusan Pilihan**												

NO	URUSAN	NO	IKK HASIL	CAPAIAN KINERJA(2025)			TARGET					SUMBER DATA	KET
					Target 2025	Realisasi 2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	T = (m + b + g + a + c + i)/6 T = (100%+ 100%+ 100%+100%+100%+100%)/ 6 T = 100%	100%	100% 100 %	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
25	Kelautan dan Perikanan	1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kota di (sumber data: one data KKP)	35458.99 Ton -------- x 100 % 35275.37= 100,52%	100 %	100,52%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Dinas Perikanan dan Pangan	
26	Pariwisata	1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	36.720 -------- x 100 % 191.632 = 19.16%	191.632 – 455.698 --- x 100 % 455.698 = 57,95%	0,1916	0,89	0,9	0,91	0,92	0,93	Dinas Pariwisata	
		2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kota	-135.187 -------- x 100 % 5.455.685 = -2.48 %	5.455.685 – 3.702.842 --- x 100 % 3.702.842 = 47,34 %	-2.48 %	2,3	2,5	2,7	2,9	3,1	Dinas Pariwisata	
		3	Tingkat hunian akomodasi	606.378 -------- x 100 % 1.750.905 = 34.63%	694.985 ------ x 100 % 1.370.575 = 50,71%	0,3463	50,87	50,95	51,03	51,12	51,20	Dinas Pariwisata	
		4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	1140.19 -------- x 100 % 84182.56 = 1,35%	1.140,19 ----- x 100 % 84.182,56 = 1,35%	1,35%	1,19	1,23	1,33	1,37	1,4	Dinas Pariwisata	
		5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	1.529.117.39.3..39. -------- x 100 % 73.279.829.14.27.	140.213.296.706 ---- x 100	20,86%	15,81	14,53	13,43	12,63	12,90	Dinas Pariwisata	

NO	URUSAN	NO	IKK HASIL	CAPAIAN KINERJA(2025)			TARGET					SUMBER DATA	KET
					Target 2025	Realisasi 2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				= 20,86%	% 662.549.854.335 = 21,16%								
27	Pertanian	1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	46.940,20 Ton ------ x 100 % 10.122 Ha = 4,64 ton/Ha	46.940,20 Ton ----- x 100 % 10.122 Ha = 4,64 ton/Ha	4,64	4,87 ton/Ha	5,11 ton/Ha	5,37 ton/Ha	5,64 ton/Ha	5,92 ton/Ha	Dinas Pertanian	
		2	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	-5 --- x 100 % 13 = - 48.37%	-90%	-0,4837	-90%	-90%	-90%	-90%	-90%	Dinas Pertanian	
28	Energi Sumber Daya Mineral	1	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kota	-	-		-	-	-	-	-	DPMPTSP	
29	Perdagangan	1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	102 -------- x 100 % 102 = 100 %	pupr	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Dinas Perdagangan	
		2	Persentase kinerja realisasi pupuk	3.77Ton -------- x 100 % 4.89 Ton = 76.99 %	50%	76.99 %	60%	65%	70%	80%	90%	Dinas Pertanian	
		3	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	3,77 ------- x 100 % 4,89 = 76,99 %	87,50 %	76,99 %	87,65 %	87,7 %	87,85 %	87,90 %	88 %	Dinas Perdagangan	

NO	URUSAN	NO	IKK HASIL	CAPAIAN KINERJA(2025)			TARGET					SUMBER DATA	KET
					Target 2025	Realisasi 2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	Perindusrian	1	Pertambahan jumlah industri Kecil dan Menengah di kota	1.262 -------- x 100 % 12.206 = 36.84%	16,85%	36,84%	16,87%	16,89%	16,91%	16,93%	16,95%	Disnakerin	
		2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industry dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	71,16%	100%	0,7116	100%	100%	100%	100%	100%	Disnakerin	
		3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Tidak ada	Tidak ada	-	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Disnakerin	
		4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI yang lokasinya lintas daerah kota dalam 1 kota yang dikeluarkan oleh instansi terkait	-	-	-	-	-	-	-	-	Disnakerin	
		5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kota dalam 1 kota yang dikeluarkan intansi terkait	-	-	-	-	-	-	-	-	Disnakerin	

NO	URUSAN	NO	IKK HASIL	CAPAIAN KINERJA(2025)			TARGET					SUMBER DATA	KET
					Target 2025	Realisasi 2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	100%	60%	100,00%	60%	60%	60%	60%	60%	Disnakerin	

6.4.3. Indikator Kinerja Kunci Penunjang Urusan Pemerintahan

Tabel 6- 6 Indikator Kinerja Kunci Penunjang Urusan Pemerintah

No	URUSAN	No	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA (2025)		TARGET						SUMBER DATA	KET
						2025	Realisasi 2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Perencanaan dan Keuangan	1	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga Kesehatan ------x 100% Jumlah APBD	573928150331.34 ---- x 100 % 2818290949526.79 = 20.36%	532.075.148.867 ----- x 100 % 2.868.160.324.781 =16,43%	20.36 %	559.075.148.867 -------- x 100 % 3.018.027.224.989 =18,52%	564.665.900.356 -------- x 100 % 3.221.831.118.617 =17,53%	570.256.651.844 -------- x 100 % 3.377.930.538.425 =16,88%	575.847.403.333 -------- x 100 % 3.532.485.819.459 =17%	581.438.154.822 -------- x 100 % 3.642.949.934.942 =15,96%	BPKAD	
		2	Rasio PAD	Jumlah PAD ------ x 100% Jumlah	924526701752.07 -------- x 100 % 285054219844	894.292.136.639 -------- x 100 % 2.811.296.75	32.43 %	1.008.185.265.967 -------- x 100 % 2.995.186.306.716	1.123.826.456.700 -------- x 100 % 3.189.340.690.075	1.238.687.820.800 -------- x 100 % 3.386.481.44	1.294.348.348.100 -------- x 100 % 3.528.384.28	1.341.441.038.300 -------- x 100 % 3.650.482.37	BPKAD	

No	URUSAN	No	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA (2025)		TARGET						SUMBER DATA	KET
						2025	Realisasi 2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Pendapatan Pada APBD	3.07 = 32.43%	4.925 =31,81%		=33,66%	=35,24%	9.508 =36,58%	2.298 =36,68%	7.281 = 36,75%		
		3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP (belumdinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	3Level 3	Level 3	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Inspektorat	
		4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkat Kualitas APIP (belumdinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang	Level 3	Level 3	Level 2	LEvel 3	Level 3	LEvel 3	Level 3	Level 3	Inspektorat	

No	URUSAN	No	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA (2025)		TARGET						SUMBER DATA	KET
						2025	Realisasi 2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				dikeluarkan oleh BPKP										
		5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Jumlah belanja urusan pemerintahan – transfer expenditures ------ x 100% Jumlah belanja APBD	223853726548 2.54 -------- x 100 % 281829094952 6.79 = 79.42%	(2.584.853.109.431- – 112.989.386.610) -------- x 100 % 2.832.388.846.969 =87,27%	79.42 %	(2.610.701.640.525 - – 114.119.280.476) -------- x 100 % 3.018.027.224.989 =82,72%	(2.636.550.171.620 - – 115.249.174.342) -------- x 100 % 3.221.831.118.617 =78,26%	(2.688.247.233.808 – 116.379.068.208) -------- x 100 % 3.377.930.538.425 =75,37%	(2.662.398.702.714- – 117.508.962.074) -------- x 100 % 3.532.485.819.459 =72,77%	(2.714.095.764.903- – 118.638.855.941) -------- x 100 % 3.642.949.934.942 =71,25%	BPKAD	
		6	Opini Laporan Keuangan	Opini Laporan Keuangan (10 TahunTerakhir)	2013: WDP 2014: WTP 2015: WTP 2016: WTP 2017: WTP 2018: WTP 2019: WTP 2020: WTP 2021: WTP 2022: WTP 2023: WTP 2024: Belum terbit	WTP	2016: WTP 2017: WTP 2018: WTP 2019: WTP 2020: WTP 2021: WTP 2022: WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Inspektorat/ BPKAD	

No	URUSAN	No	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA (2025)		TARGET						SUMBER DATA	KET
						2025	Realisasi 2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							2023: WTP 2024: WTP 2025: Belum Terbit							
		7	Persentase kesesuaian antara Rencana Kerja Pemerintah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Jumlah program dan atau kegiatan dalam Perda APBD yang berkaitan dengan 17 program prioritas Presiden dan direalisasikan / Jumlah program dan atau kegiatan dalam Perda APBD yang berkaitan dengan 17	17/17 = 100%		100%							

No	URUSAN	No	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA (2025)		TARGET						SUMBER DATA	KET
						2025	Realisasi 2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				program prioritas Presiden yang direncanakan dan dianggarkan										
2	Pengadaan	1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	Jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun 2024 ------ x 100% Jumlah kontrak keseluruhan tahun 2024	0 ---- x 100 % 2322.00 = 0%	0 %	0%	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	BPBJ	tidak ada paket dengan nilai besar diatas 50M

No	URUSAN	No	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA (2025)		TARGET						SUMBER DATA	KET
						2025	Realisasi 2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif ------x 100% Jumlah seluruh pengadaan	12625.00 ---- x 100 % 23888.00 = 52.85%	95 %	52.85 %	95%	96%	96,5%	97%	97,5%	BPBJ	
		3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Jumlah nilai belanja operasi dan modal yang melalui pengadaan ------ x 100% Total belanja operai dan modal	877517527637.00 -------- x 100 % 3017768960487.00 = 29.07%	20%	29.07 %	22%	24%	25%	27%	30%	BPBJ	
		4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha	Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dalam Negeri, Produk Usaho Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi	212639511613.00 ---- x 100 % 403122285430.00 = 52.74%	25%	52.74 %	30%	35%	40%	45%	50%	BPBJ	

No	URUSAN	No	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA (2025)		TARGET						SUMBER DATA	KET
						2025	Realisasi 2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	Tahun (2024) – Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dalamm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (2023) ------- x 100% Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dalam Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (2023)										
3	Kepegawaian	1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/ Dasar (%)	Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru	2.224 ------ x 100 % 2.828 = 78,64%	79,08 %	78,64 %	68,20 %	68,50 %	58,52 %	68,56 %	68,64 %	BKPSDM	

No	URUSAN	No	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA (2025)		TARGET						SUMBER DATA	KET
						2025	Realisasi 2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			(PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	dan tenaga kesehatan) ----- x 100% Seluruh Jumlah Pegawai (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)										
		2	Rasio Pegawai Fungsional(%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan) ------x 100% Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	724 ---- x 100 % 2.828 = 27,72%	23,12	27,72 %	20,25	20,53	20,72	20,82	21,02	BKPSDM	
		3	Rasio Jabatan	Jumlah pegawai	484 ------- x 100 %	42,17	61,73 %	44,89	48,04	51,00	53,95	57,44	BKPSDM	

No	URUSAN	No	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA (2025)		TARGET						SUMBER DATA	KET
						2025	Realisasi 2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi (diluar guru dan tenaga kesehatan) ------ x 100% Seluruh jumlah pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	784 = 61,73%									
4	Manajemen Keuangan	1	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	{(Realisasi Belanja total belanja APBD)-1}x100%	2,818,290,949,526.79 ---x100% -1 2,832,388,846,969.00 = 99.50%	2.832.388.846.969 -------- - 1 x 100 % 2.832.388.846.969 =4,69 %	99.50 %	3.018.027.224.989 ---- - 1 x 100 % 3.018.027.224.989==== = 4,69 %	3.221.831.118.618 ---- - 1 x 100 % 3.221.831.118.618==== = 4,69 %	3.377.930.538.425 ---- - 1 x 100 % 3.377.930.538.425 = 4,69 %	3.532.485.819.459 --- 1 x 100 % 3.532.485.819.459 = 4,69 %	3.642.949.934.942 -- - 1 x 100 % 3.642.949.934.942 = 4,69 %	BPKAD	

No	URUSAN	No	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA (2025)		TARGET						SUMBER DATA	KET
						2025	Realisasi 2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		2	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	{(Total PAD dalam realisasitotal PAD dalamA PBD)-1}x100%	924,526,701,752.07 ---x100% -1 94,292,136,639.00 = 103.38%	6,26 %	103.38%	6,26 %	6,26 %	6,26 %	6,26 %	6,26 %	BPKAD	
		3	Manajemen Aset	Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak) Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak) Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak) Apakah nilai asset tercantum	Ya Ya Ya	Ya Ya Ya	Ya Ya Ya	Ya Ya Ya	Ya Ya Ya	Ya Ya Ya	Ya Ya Ya	Ya Ya Ya	BPKAD	

No	URUSAN	No	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA (2025)		TARGET						SUMBER DATA	KET
						2025	Realisasi 2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya		
		4	Cash Management: Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Nilai Realisasi SiLPA ------ x 100% Total Belanja Anggaran tahun sebelumnya (2023)	157479006781.99 ---- - 1 x 100 % 283238884696 9.00 = 5,55 %	56.863.569.856 --- - 1 x 100 % 2.560.291.241.430 =2,22%	5,55%	56.863.569.856 ----- - 1 x 100 % 2.832.388.846.969 =2,01%	56.863.569.856 ----- - 1 x 100 % 3.018.027.224.989 =1,88%	56.863.569.856 ---- - 1 x 100 % 3.221.831.118.618 =1,76%	56.863.569.856 --- - 1 x 100 % 3.377.930.538.425 =1,68%	56.863.569.856 --- - 1 x 100 % 3.532.485.819.459 =1,61%	BPKAD	
5	Transparansi dan Partisipasi Publik	1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	Realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemerintah Kota Padang ------x 100% Anggaran belanja untuk unit pelayanan	94,54 %	94,54 %	93.16 %	94,54 %	94,54 %	94,54 %	94,54 %	94,54 %	Diskominfo / BPKAD	

No	URUSAN	No	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA (2025)		TARGET						SUMBER DATA	KET
						2025	Realisasi 2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				dapat diakses di website Pemerintah Kota Padang										
		2	Akses public terhadap informasi keuangan daerah	Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Pemerintah Kota Padang ------x 100% Total jumlah dokumen yang telah dirinci	12 ---- - 1 x 100 % 12 = 100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Diskominfo/ BPKAD	
6	Pendidikan dan Pelatihan	1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan		2224 X100% 2828 = 72.64%	20 JP/Org/Tahnu	72.64 %	21 JP/Org/Tahun	22 JP/Org/Tahun	23 JP/Org/Tahun	24 JP/Org/Tahun	25 JP/Org/Tahun	BKPSDM	
		2	Persentase ASN yang mengikuti		784 X100% 2828	3,50	27.72 %	5,63	2,85	3,29	3,65	3,68	BPKSDM	

No	URUSAN	No	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA (2025)		TARGET						SUMBER DATA	KET
						2025	Realisasi 2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			pendidikan dan pelatihan formal		= 27.72%									
		3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural		484 X 100% 784 =61.73%	24,11	61.73 %	21,95	24,90	28,35	3,65	3,68	BPKSDM	
7	Penelitian dan Pengembangan	1	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Inovasi dan Telah Menjadi Bagian dari Program Kegiatan	jumlah produk inovasi perangkat daerah atau unit pelaksana teknis perangkat daerah dan telah menjadi bagian dari program dan atau kegiatan perangkat	65 -----x100% 65 =100%		100%						Bappeda	

No	URUSAN	No	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA (2025)		TARGET						SUMBER DATA	KET
						2025	Realisasi 2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				daerah dalam Anggaran Pendatan dan Belanja Daerah (APBD) / jumlah produk inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah atau unit pelaksana teknis perangkat daerah										

BAB VII
PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Padang Tahun 2027 disusun dengan mempedomani Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 serta Rencana Kegiatan Pemerintah (RKP) Tahun 2027.

RKPD Tahun 2027 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian visi dan misi RPJMD serta merupakan implementasi tahapan pertama pada RPJPD Tahun 2025-2045. Dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan tujuan dan fungsinya, RKPD Tahun 2027 sebagai dokumen rencana operasional bagi pelaksanaan pembangunan tahun 2027, memusatkan pada pencapaian arah kebijakan pembangunan daerah yang juga diselaraskan dengan rencana prioritas pembangunan Nasional.

RKPD Tahun 2027 memuat arah kebijakan pembangunan daerah, prioritas pembangunan, sasaran dan indikator kinerja, serta program, kegiatan, dan subkegiatan beserta pendanaan indikatif yang disusun berdasarkan :

a. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2025, permasalahan dan isu strategis daerah sebagai salah satu dasar perumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang akan diintervensi dengan program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan.

b. Proyeksi perkembangan ekonomi, sosial, dan lingkungan

c. Target terhadap pencapaian Visi, Misi dan Program Unggulan yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan ketercapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

d. Harmonisasi permasalahan dan isu pembangunan daerah dari masukan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan daerah baik yang terlibat langsung maupun tidak yang dijaring melalui pendekatan partisipatif.

e. Keselarasan dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional dan provinsi, guna menjamin keterpaduan dan sinergi pembangunan antarlevel pemerintahan.

MANAJEMEN RISIKO PEMBANGUNAN

Sasaran pembangunan dicapai melalui berbagai program/kegiatan prioritas yang dijalankan oleh lintas instansi dan antar jenjang pemerintahan. Kompleksitas pelaksanaan program diiringi dengan ketidakpastian dan konektivitas global yang semakin tinggi serta berdampak pada meningkatnya intensitas risiko yang dihadapi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Mengingat dalam menjalankan program/kegiatan prioritas selalu melibatkan lintas instansi dan kewenangan, maka risiko program/kegiatan sudah seharusnya dikelola dan dikendalikan secara sistematis dan terintegrasi. Dengan kehadiran Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam mengelola risiko pembangunan nasional secara kolaboratif.

Mendukung hal tersebut Pemerintah Kota Padang menerapkan Manajemen Risiko Pembangunan dimulai dari proses perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan.

Pengendalian terhadap kemungkinan adanya risiko-risiko dalam rangka mencapai target kinerja tujuan dan sasaran pembangunan daerah tersebut dilakukan dalam 2 tahapan, yaitu pada tahapan perencanaan dan tahapan pelaksanaan.

7.1 KAIDAH PELAKSANAAN

Pelaksanaan RKPD Tahun 2027 diharapkan mampu mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui penerapan prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam setiap tahapan pembangunan. Dengan pengelolaan pembangunan yang terencana, terukur, dan berkelanjutan, RKPD diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah, pemerataan pembangunan antarwilayah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Padang.

Keberhasilan pelaksanaan RKPD Tahun 2027 sangat bergantung pada komitmen dan peran aktif seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah, perangkat daerah, DPRD, dunia usaha, akademisi, organisasi kemasyarakatan, maupun masyarakat secara luas. Oleh karena itu, seluruh perangkat daerah diharapkan menjadikan RKPD sebagai acuan utama dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) serta dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan secara konsisten, terintegrasi, dan berorientasi pada hasil.

Dengan ditetapkannya RKPD Tahun 2027, seluruh pemangku kepentingan diharapkan memiliki kesamaan persepsi dan komitmen dalam melaksanakan pembangunan daerah sesuai dengan arah kebijakan dan prioritas yang telah ditetapkan. RKPD ini diharapkan menjadi pedoman yang operasional dan aplikatif, sehingga pembangunan Kota Padang Tahun 2027 dapat berjalan secara terarah, terukur, dan berkesinambungan dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kota Padang sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Padang Tahun 2025–2029.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

7.2 PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2027 SEBAGAI DASAR PERUBAHAN RKPD TAHUN 2027

Dalam rangka menjamin efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan daerah, RKPD Tahun 2027 harus didukung oleh mekanisme pengendalian, pemantauan, dan evaluasi yang berkelanjutan. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk menilai kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan, mengukur capaian kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasi permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan. Hasil pemantauan dan evaluasi tersebut menjadi bahan perbaikan kebijakan dan program pembangunan pada tahun berjalan maupun sebagai masukan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah pada tahun berikutnya.

Pengendalian pada tahapan pelaksanaan bertujuan untuk menjamin implementasi pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian ini dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana yang mencakup:

a. Pemantauan terhadap prioritas pembangunan daerah

b. Pemantauan terhadap mitigasi risiko dalam pencapaian target tujuan dan sasaran

c. pembangunan daerah yang dilakukan.

d. Evaluasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah.

e. Evaluasi pencapaian sasaran Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Program yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas penyelenggaraan pengendalian dalam rangka menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan daerah, perlu didukung dengan regulasi agar pelaksanaan pengendalian berjalan dengan efektif dan tepat sasaran. Tatanan regulasi tersebut menyinergikan regulasi terkait pemantauan, evaluasi pengendalian, manajemen risiko pembangunan dan manajemen kinerja.

Sinergi regulasi ini diperlukan untuk menjaga konsistensi pelaksanaan pengendalian dengan kinerja yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Selanjutnya, untuk menjaga kualitas pengendalian yang dilakukan, regulasi pengendalian ini dievaluasi secara berkala dan disesuaikan dengan kebijakan tertinggi yang berlaku. Sehingga RKPD Tahun 2027 bisa dijadikan sebagai :

a. pedoman dasar bagi Perangkat Daerah dalam menyusun dokumen Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah Tahun 2027;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

b. pedoman dasar dalam melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Tahun 2025 serta evaluasi terhadap hasil RKPD Tahun 2027

c. pedoman dasar dalam hal penyelarasan prioritas pembangunan dan sinergitas perencanaan pembangunan antar sektor, antar wilayah, dan antar tingkat Pemerintah.

d. pedoman dasar bagi seluruh stakeholder pembangunan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah di Kota Padang;

e. pedoman dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2027; dan

f. pedoman dasar dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2027

Padang, 7 Juli 2026

WALI KOTA PADANG,



FADLY AMRAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).